

Laporan Tahunan
Annual Report
2025

**Resilience
amidst Challenges**



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Disclaimer

Laporan Tahunan PT KB Finansia Multi Finance ("Perseroan") disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Perseroan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 kepada Regulator, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dari Perseroan. Laporan Tahunan ini disusun dengan konten berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2020 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, kinerja operasional, strategi, kebijakan, rencana dan proyeksi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan, serta lingkungan bisnis yang terkait. Oleh karena itu, kejadian di masa mendatang tidak dapat dijamin akan selalu selaras dengan proyeksi maupun asumsi Perseroan.

Laporan Tahunan ini juga berisikan pembahasan Laporan Keberlanjutan, di mana di dalamnya memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT KB Finansia Multi Finance. Sedangkan untuk penulisan angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

The Annual Report of PT KB Finansia Multi Finance ("the Company") has been prepared to comply with the requirements for reporting the Company's performance results for the period January 1 to December 31, 2025 to the Regulator, its Shareholders and Stakeholders. This Annual Report was prepared with content based on OJK Regulation No.29/POJK.04/2020 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains statements of financial condition, operational performance, strategies, policies, plans and projections, as well as the Company's objectives which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for matters of a historical nature. These statements have prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to be materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of the Company, as well as the related business environment. Therefore, the future events cannot be guaranteed to always align with the projections or the Company's assumptions.

This Annual Report also contains a Sustainability Report, in which the word "Company" refer is defined as PT KB Finansia Multi Finance. As for the writing of numbers in all tables and graphs, use Indonesian notation, unless stated otherwise.

Resilience amidst Challenges

Di tengah tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku industri, Perseroan tetap teguh pada prinsip optimisme dan komitmen. Tahun ini, kami mengalami dampak perlambatan ekonomi global dan pasar otomotif domestik yang lesu, yang memaksa kami untuk mengambil langkah proaktif demi menjaga kesehatan bisnis. Kami menjadikan periode penurunan kinerja sebagai momen untuk memperbaiki dan meremajakan seluruh lini usaha, suatu keputusan yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang diyakini akan semakin menantang.

Salah satu langkah besar yang kami lakukan adalah dengan menangani pinjaman bermasalah secara berani namun penuh perhitungan, termasuk melakukan penyesuaian struktur keuangan perusahaan, dengan tujuan jangka panjang membangun fondasi yang kokoh meraih kembali profitabilitas. Dengan neraca yang lebih sehat, KreditPlus akan lebih siap untuk melangkah ke depan, dan kami yakin bahwa semangat berinovasi yang telah kami tanam di lingkungan Perseroan akan menjadi pilar penting bagi ketahanan bisnis seiring perjalanan kami menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Amidst the challenges faced by many of its peers, Company remained steadfast in its optimism and commitment. This year, we felt the impact of the global economic slowdown and a sluggish domestic automotive market, forcing us to take proactive steps to keep our business afloat. While our revenues declined, we spotted on some opportunities to improve and rejuvenate all business lines. These steps were taken not only to address existing challenges but also as an effort to prepare for what is expected to be an increasingly challenging future.

One of the major steps we have taken is to address non-performing loans in a bold yet calculated manner, including restructuring the company's financial structure, with the long-term goal of building a solid foundation to restore profitability. By restructuring and setting aside healthy reserves, KreditPlus will be better prepared to move forward. We are confident that the innovative spirit we have instilled within the Company will be a crucial pillar of business resilience going forward.

Daftar Isi

Table of Contents



IKHTISAR KINERJA 2025 2025 Performance Highlight

6

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	8
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	9
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	10
Ikhtisar Kinerja Saham Stock Performance Highlights	12
Ikhtisar Obligasi dan Efek-Efek Lainnya Summary of Bonds and Other Securities	14
Peristiwa Penting Tahun 2025 Event Highlights 2025	15
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	15

LAPORAN MANAJEMEN Management Report

16

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	18
Dewan Komisaris Board of Commissioners	33
Laporan Direksi Board of Directors' Report	34
Direksi Board of Directors	55
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025	56
PT KB Finansia Multi Finance Statement Letter of members of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT KB Finansia Multi Finance	

PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

58

Identitas Perusahaan Corporate Identity	60

Skala Usaha Business Scale	
Riwayat Singkat Perusahaan Brief Company History	
Jejak Langkah Milestone	
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Cultural Values	
Bidang Usaha Line of Business	
Produk dan/atau Jasa Dihasilkan Products and/or Services Provided	
Wilayah Operasional Operational Area	
Struktur Organisasi Organizational Structure	
Keanggotaan dalam Asosiasi Industri Membership in Industrial Associations	
Perubahan Organisasi yang Bersifat Signifikan Significant Organizational Changes	
Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya Chronology of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and the Reasons for the Changes	
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Statement of Independence of Independent Commissioners	
Kronologis Perubahan Komposisi Direksi dan Alasan Perubahannya Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors and the Reasons for the Changes	
Profil Direksi Board of Directors' Profile	
Demografi Karyawan Employee Demographics	
Informasi Pemegang Saham Shareholders Information	
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	
Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, serta Perusahaan Ventura List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures	

61	Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology	100
62	Kronologi Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya Chronology of Bonds and Other Securities Listing	100
68		
70	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on the Use of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Services	103
72		
73	Informasi Mengenai Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Information regarding Supporting Institutions and/or Professions	105
74		
76	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	106
78		

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

108

Business Support Review

80	Sumber Daya Manusia Human Resources	110
	Teknologi Informasi Information Technology	130

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

150

Management Discussion and Analysis

86	Tinjauan Perkembangan Makro Ekonomi Global dan Nasional, serta Industri Pembiayaan Domestik Overview of Global and Domestic Macroeconomic Developments, and the Domestic Financing Industry	152
87		
93	Strategi Bisnis Tahun 2025 Business Strategy in 2025	154
96		
99	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	156
99	Tinjauan Keuangan Financial Review	162



TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

198

Komitmen Penerapan GCG Commitment to Implementing GCG	200
Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar GCG Implementation of Basic GCG Principles	203
Penilaian GCG Tahun 2025 2025 GCG Assessment	206
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism	209
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") General Meeting of Shareholders ("GMS")	212
Dewan Komisaris Board of Commissioners	232
Komisaris Independen Independent Commissioner	245
Direksi Board of Directors	248
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	266
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration Policy for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors	270
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Affiliated Relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders	276
Komite Pendukung Dewan Komisaris Supporting Committees of the Board of Commissioners	279
Komite Audit Audit Committee	279
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	288
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	296
Komite-Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors	304
Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Asset and Liability Management Committee	304

Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	316
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	325
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	333
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	337
Audit Eksternal External Audit	345
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	347
Fungsi Kepatuhan Compliance Function	352
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	358
Perkara Hukum Legal Cases	366
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	367
Kode Etik Code of Ethics	368
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	372
Kebijakan Antikorupsi, Antisuap, dan Antigratifikasi Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Anti-Gratification Policy	379
Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Terrorism Financing (CFT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) Program	387
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	391
Pemberian Dana/Donasi untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds/Donations for Social and Political Activities	393
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Long-Term Performance-Based Compensation Policy	393
Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Information Disclosure Policy Regarding Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners	394

Praktik <i>Bad Corporate Governance</i> Bad Corporate Governance Practices	394
Pelanggaran Hukum, terkait Perburuhan/ Tenaga Kerja/Konsumen/ Ketidakmampuan Melunasi Kewajiban/Perdagangan/Persaingan/ Lingkungan Hidup Violation of Law, Related to Labor/ Workforce/Consumers/Inability to Settle Obligations/Trade/Competition/ Environment	395
Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya <i>Insider Trading</i> Policy to Prevent Insider Trading	395
Kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok Policy on Supplier Selection and Capability Improvement	396
Kebijakan tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Policy on Fulfillment of Creditors' Rights	396

LAPORAN KEBERLANJUTAN Sustainability Report

398

Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	400
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	410
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	420
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Annual Report of Issuers or Public Companies	455
Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index	467
Lampiran Umpan Balik Feedback Attachment	471

LAPORAN KEUANGAN Financial Statements

473

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan Laporan Auditor Independen Financial Statement For the Year Ended 31 December 2025 and Independent Auditors' Report	

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2023

Financing Partner for Enhancing Life



Pada tahun 2023, Perseroan mampu mempertahankan kinerja bisnis dengan adanya peningkatan pembiayaan baru sepanjang tahun. Perseroan juga mampu memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan, melalui perolehan peringkat Korporat dan Obligasi menjadi (AAA) idn dari Fitch Ratings. Hal ini didukung pula dengan respons positif masyarakat terhadap Perseroan terkait penawaran obligasi kepada publik di tahun 2023 yang mengalami *oversubscribed*. Hal ini menjadi tolak ukur Perseroan yang mampu mempertahankan kinerja bisnis dan keuangan yang tetap stabil di tengah persaingan serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang tak kalah penting adalah dukungan kuat dari pemegang saham pengendali sehingga Perseroan dapat bertumbuh dan dengan ditunjang oleh tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif dan tepat, serta mampu meningkatkan kualitas layanan pembiayaan yang terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

In 2023, the Company was able to maintain business performance with an increase in new financing during the year. The Company was also able to sustainably strengthen its business performance, through the acquisition of Corporate and Bond ratings to (AAA) idn from Fitch Ratings. This was also supported by the positive public response to the Company regarding its Public Bonds Offering in 2023 which was oversubscribed. This shows that the Company is able to maintain stable business and financial performance in the midst of competition and contribute positively to national economic growth. Last but not least, the strong support from the controlling shareholders has enabled the Company to grow, supported by good governance, effective and appropriate risk management, and to improve the quality of reliable financing services for all Indonesian society and able to improve the quality of reliable financing services for all in Indonesian society.

2024

Navigating Challenges



Meski perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang baik dengan pertumbuhan sebesar 5,0% pada 2024, namun bagi industri pembiayaan, kenyataannya cukup berbeda dari apa yang kami perkirakan semula, terutama pada sektor-sektor yang kami tawarkan fasilitas pembiayaan, termasuk otomotif, di mana penurunannya cukup terasa sehingga memberikan tekanan pada bisnis. Di beberapa sektor lain, kami dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dari industri sejenis, seperti perbankan, juga dengan semakin banyaknya penawaran pinjaman *online*, sehingga tidak hanya menciptakan persaingan antarsesama pelaku pasar di industri yang sama tetapi juga antar industri perusahaan pembiayaan itu sendiri, dan berakibat pada penurunan aktivitas dibandingkan kondisi tahun lalu yang lebih baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah tingkat suku bunga yang masih tinggi, di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di atas 6% hampir sepanjang tahun sebelum menurunkannya menjadi 6%, namun kemudian mempertahankannya di kisaran tersebut hingga akhir tahun. Kalangan bisnis pun sepertinya menunda ekspansi dan menunggu pelantikan pemerintahan baru Indonesia yang baru berlangsung pada November, sehingga menambah tekanan industri. Kondisi mengancam penurunan kualitas kredit di sebagian besar pasar kami karena masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tengah bergelut dengan tingginya harga kebutuhan hidup akibat inflasi yang sempat sangat tinggi di tahun-tahun sebelumnya dan menggerogoti penghasilan mereka.

Di tengah situasi penuh tantangan, kami tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para nasabah, karena kami tahu bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan pada kondisi seperti ini adalah memegang teguh janji kami sebagai mitra pembiayaan. Ke dalam, kami memanfaatkan momentum ini dengan menguatkan fondasi bisnis melalui peningkatan penagihan dan pengetatan manajemen risiko, serta penyusunan strategi masa depan untuk meraih kembali pasar ketika industri pulih. Dengan menginisiasi strategi yang berorientasi pada pelanggan pada tahun ini, PT KB Finansia Multi Finance siap untuk memberikan pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

While the Indonesian economy remained in fine fettle with a growth of 5.0%, the course of 2024 turned out quite differently for the financing industry from what we had expected, particularly for the sectors to which we offer financing facilities, including automotive, which experienced a noticeable decline and posed pressure on our business. In our other sectors, we had to contend with more intense competition from similar industries, such as banks and the increasingly available technology-enabled online loan offerings, creating not only among-peer but also peer-to-peer competitions, leading to a trough compared to a relatively more favorable landscape in the previous year.

One of the factors influencing the financing industry this year was the continued high rate regime, as Bank Indonesia kept its benchmark rate above 6% nearly throughout the year before reducing it to 6% and pausing it at that level for the rest of the year. Businesses also seemed to hold off on their further expansion and wait until the country's new administration was sworn into office, which did not happen until November, multiplying industry pressure. The unfavorable landscape threatened to deteriorate credit quality in most of our market as low-to-mid-income earners struggled with prohibitive necessities the previous years' high inflation left them with, which started to eat into their wages.

Under such challenging circumstances, we remained committed to delivering to our customers, for we know that the best thing to do in a not-so-favorable environment is to embrace our promise as financing partners for enhancing life. Looking inward, we used the momentum to strengthen our business foundation as we improved collection, ran more stringent risk management, and devised future strategies to regain our lost markets once the industry recovers. With the customer-driven strategies we initiated this year, PT KB Finansia Multi Finance is set to deliver robust growth in the years ahead.

2025

Resilience amidst Challenges

Di tengah tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku industri, Perseroan tetap teguh pada prinsip optimisme dan komitmen. Tahun ini, kami mengalami dampak perlambatan ekonomi global dan pasar otomotif domestik yang lesu, yang memaksa kami untuk mengambil langkah proaktif demi menjaga kesehatan bisnis. Kami menjadikan periode penurunan kinerja sebagai momen untuk memperbaiki dan meremajakan seluruh lini usaha, suatu keputusan yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang diyakini akan semakin menantang.

Salah satu langkah besar yang kami lakukan adalah dengan menangani pinjaman bermasalah secara berani namun penuh perhitungan, termasuk melakukan penyesuaian struktur keuangan perusahaan, dengan tujuan jangka panjang membangun fondasi yang kokoh meraih kembali profitabilitas. Dengan neraca yang lebih sehat, KreditPlus akan lebih siap untuk melangkah ke depan, dan kami yakin bahwa semangat berinovasi yang telah kami tanam di lingkungan Perseroan akan menjadi pilar penting bagi ketahanan bisnis seiring perjalanan kami menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.



Amidst the challenges faced by many of its peers, Company remained steadfast in its optimism and commitment. This year, we felt the impact of the global economic slowdown and a sluggish domestic automotive market, forcing us to take proactive steps to keep our business afloat. While our revenues declined, we spotted on some opportunities to improve and rejuvenate all business lines. These steps were taken not only to address existing challenges but also as an effort to prepare for what is expected to be an increasingly challenging future.

One of the major steps we have taken is to address non-performing loans in a bold yet calculated manner, including restructuring the company's financial structure, with the long-term goal of building a solid foundation to restore profitability. By restructuring and setting aside healthy reserves, KreditPlus will be better prepared to move forward. We are confident that the innovative spirit we have instilled within the Company will be a crucial pillar of business resilience going forward.

01

Ikhtisar Kinerja 2025

2025 Performance
Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	8
Ikhtisar Operasional Operational Highlights	9
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	10
Ikhtisar Kinerja Saham Stock Performance Highlights	12
Ikhtisar Obligasi dan Efek-Efek Lainnya Summary of Bonds and Other Securities	14
Peristiwa Penting Tahun 2025 Event Highlights 2025	15
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	15





Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Jumlah Pendapatan	1.752.442	1.954.681	2.282.199	Total Income
Jumlah Beban	2.836.128	2.364.620	2.170.737	Total Expenses
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(1.083.686)	(409.939)	111.462	(Loss) Profit Before Income Tax
(Rugi) Laba Bersih Periode Berjalan	(857.602)	(314.927)	91.546	Net (Loss) Profit for The Period
Jumlah Rugi Komprehensif Lain	(8.426)	(11.759)	(20.391)	Total Other Comprehensive Loss
Jumlah (Rugi) Laba Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	(866.028)	(326.685)	71.155	Total Comprehensive (Loss) Income For the Period

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statement

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Jumlah Aset	4.759.159	8.123.470	8.620.928	Total Assets
Jumlah Liabilitas	4.631.024	7.129.307	7.249.341	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	128.135	994.163	1.371.587	Total Equity

Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian	2025	2024	2023	Description
Rasio Solvabilitas Solvability Ratio				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	36,14 kali times	7,17 kali times	5,29 kali times	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,97 kali times	0,88 kali times	0,84 kali times	Liabilities to Assets Ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	79,16%	88,29%	91,11%	Net financing receivables to total assets ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	86,39%	105,09%	113,90%	Net financing receivables to total loans ratio
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Margin Laba Bersih	(48,94%)	(16,11%)	4,01%	Net Profit Margin
Imbal Hasil Aset	(18,02%)	(3,88%)	1,06%	Return on Assets
Imbal Hasil Ekuitas	(669,29%)	(31,68%)	6,67%	Return on Equity
Margin Pendapatan terhadap Piutang Pembiayaan	44,27%	25,88%	27,86%	Revenue Margin to Financing Receivables
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar	119,14%	130,37%	124,60%	Current Ratio
Rasio Kas	3,96%	7,40%	3,69%	Cash Ratio
Rasio Aset Produktif Productive Asset Ratio				
Non-Performing Financing (NPF) - Neto	3,74%	2,80%	2,01%	Non-Performing Financing (NPF) - Neto
Non-Performing Financing (NPF) - Gross	5,98%	5,47%	3,71%	Non-Performing Financing (NPF) - Gross
Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios				
Gearing Ratio	(16,86) kali times	7,07 kali times	5,19 kali times	Gearing Ratio
Rasio Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan Total Saldo Piutang Pembiayaan	40,26%	48,96%	51,79%	Ratio of Investment Financing Receivables and Working Capital Financing to Total Financing Receivables Balance
MIMD/MSMD	(111%)	439%	606%	MIMD/MSMD
Pinjaman yang diterima, obligasi neto terhadap total aset	0,92x	0,84x	0,80x	Loans received, net bonds to total assets



Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

Segmen Pendapatan Pembiayaan

Financing Revenue Segment

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Pembiayaan Konsumen	1.642.740	1.825.589	2.169.746	Consumer Financing
Anjak Piutang	30.165	53.498	44.847	Factoring
Lain-lain	79.537	75.594	67.606	Others
Jumlah Pendapatan	1.752.442	1.954.681	2.282.199	Total Revenue

Segmen Pembiayaan per Wilayah Geografis

Financing Segments by Geographical Region

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Jabodetabek	1.324.008	2.682.027	2.891.433	Greater Jakarta
Sulawesi dan Indonesia Timur	920.957	1.445.474	1.375.876	Sulawesi and Eastern Indonesia
Sumatera	492.996	975.401	1.078.548	Sumatra
Jawa Barat	465.025	960.940	986.975	West Java
Jawa Timur	298.226	675.681	797.153	East Java
Kalimantan	353.585	578.987	692.484	Kalimantan
Jawa Tengah	103.765	287.009	370.600	Central Java
Jumlah Pembiayaan	3.958.562	7.551.519	8.193.069	Amount of Financing

Segmen Pembiayaan per Skema Pembiayaan

Financing Segments by Scheme

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Mobil	1.577.139	5.039.410	4.422.605	Car
Sepeda motor	1.216.294	1.769.966	1.611.765	Motorcycles
Barang <i>durable</i>	853.615	1.166.749	1.114.310	Durable goods
Tagihan Anjak Piutang	134.104	423.885	425.737	Factoring receivables
Lain-lain	177.410	1.622	1.847	Others
Jumlah Pembiayaan	3.958.562	7.551.519	8.193.069	Amount of Financing



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

Aspek Ekonomi

Economic Aspect

Keterangan	Satuan Unit	2025	2024	2023	Descriptions
Produk Ramah Lingkungan	Unit Produk Product Unit	11.872	37.162	21.805	Environmentally Friendly Products
Jumlah Pembiayaan Baru	Rp juta IDR million	3.980.755	7.715.098	8.919.998	Total New Financing
Jumlah Kontrak Baru	Kontrak Contract	316.694	430.259	574.695	Total New Contracts
Total Pembiayaan Baru untuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp juta IDR million	54.886	81.926	97.632	Total financing for Sustainable Business Activities
Persentase Total Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap Total Pembiayaan Keseluruhan	Persen Percent	1,38	1,06	1,09	Percentage of Total Financing for Sustainable Business Activities to Total Overall Financing
Total Piutang Pembiayaan	Rp juta IDR million	3.300.025	7.551.519	8.193.069	Total Financing Receivables
Modal Kerja Bersih	Rp miliar IDR billion	502	1.204	1.004	Net working Capital
Dividen per saham (nilai Rupiah penuh) atas Laba Tahun Sebelumnya	Rp per lembar saham IDR per share	-	23	200	Dividends per Share (full Rupiah value) on Previous Year's Profit
Jumlah Jaringan Usaha	Titik Lokasi Location point	180	191	195	Number of Business Networks

Aspek Sosial

Social Aspect

Keterangan	Satuan Unit	2025	2024	2023	Descriptions
Jumlah Karyawan	Orang People	3.947	6.793	8.152	Number of Employees
Persentase Karyawan Wanita	Persen Percent	23,97	20,48	19,26	Percentage of Female Employees
Persentase Karyawan Lokal terhadap Seluruh Karyawan	Persen Percent	99,87	99,94	99,94	Percentage of Local Employees to Total Employees
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kejadian Incident	0	0	0	Number of Work Accidents
Jumlah Jam Pelatihan Karyawan	Jumlah Total	49.752	68.961	143.264	Number of Employee Training Hours
Jumlah Kegiatan yang Berkaitan dengan Program Edukasi Literasi Keuangan	Jumlah Total	2	2	2	Number of Activities related to Financial Literacy Education Programs
Penyaluran Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Rp juta IDR million	45,00	132,51	270,71	Distribution of Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Funds
Tingkat Kepuasan Debitur	Persen Percent	98	97	95	Debtor Satisfaction
Jumlah Debitur Aktif	Ribuan Thousands	333.095	474.988	537.077	Number of Active Debtors



Aspek Lingkungan Hidup

Environmental Aspects

Keterangan	Satuan Unit	2025	2024	2023	Descriptions
Efisiensi Volume Penggunaan Energi Listrik	Persen Percent	(58,5)	(28,1)	16,0	Efficiency of Volume of Electricity Usage
Efisiensi Penggunaan Kertas	Persen Percent	(36,2)	(60,9)	129,8	Efficiency of Paper Usage
Efisiensi Penggunaan Air	Persen Percent	(38,9)	5,7	(17,1)	Efficiency of Water Usage
Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Operasional	Persen Percent	(31,1)	2,9	(5,7)	Efficiency of Fuel Usage for Operational Vehicles

Catatan | Notes:

Angka yang disajikan dalam tanda kurung merupakan nilai negatif, yang menunjukkan adanya efisiensi atau penurunan penggunaan energi/sumber daya dalam periode pelaporan.

The figures in parentheses are negative values, indicating an improvement in efficiency or a reduction in energy/resource use during the reporting period.



Ikhtisar Kinerja Saham

Stock Performance Highlights

Sejak pendirian hingga akhir 2025, Perseroan tidak memperdagangkan sahamnya maupun melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di bursa manapun, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, maupun volume perdagangan di bursa manapun.

From its founding until the end of 2025, the Company did not trade its shares or conduct an Initial Public Offering on any exchange, including the Indonesia Stock Exchange (IDX). Therefore, the Company is not obligated to disclose information regarding the number of outstanding shares, market capitalization, highest, lowest, and closing share prices, or trading volume on any exchange.

JUMLAH LEMBAR SAHAM

Per 31 Desember 2025, ekuitas Perseroan terdiri dari 426.250.040 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Seluruh saham Perseroan hingga akhir tahun 2025 tidak diperdagangkan di publik.

NUMBER OF SHARES

As of 31 December 2025, the Company's equity consisted of 426,250,040 shares with a par value of IDR1,000 per share. All of the Company's shares were not publicly traded until the end of 2025.

AKSI KORPORASI TERKAIT SAHAM

Pada 19 Agustus 2025 Perseroan melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham melalui transaksi jual beli saham antara pemegang saham Perseroan, yaitu PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") selaku Penjual dan KB Kookmin Card Corp. ("KBC") selaku Pembeli. Komposisi kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan menjadi 85% dimiliki oleh KBC dan 15% dimiliki oleh FPR.

CORPORATE ACTIONS RELATED TO SHARES

On 19 August 2025, the Company changed its share ownership composition through a share sale and purchase transaction between the Company's shareholders, namely PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") as the Seller and KB Kookmin Card Corp. ("KBC") as the Buyer. The Company's share ownership composition changed to 85% owned by KBC and 15% owned by FPR.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 153 tanggal 29 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk penambahan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp226.250.040.000 menjadi sebesar Rp426.250.040.000 melalui kapitalisasi Saham Bonus Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 yang berasal dari agio saham. Dimana pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara pro rata sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Adapun susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Then, based on Notarial Deed No. Based on Deed No. 153 dated 29 October 2025, drawn up before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company has approved and decided to increase the Company's authorized capital from IDR226,250,040,000 to IDR426,250,040,000 through the capitalization of the Company's Bonus Shares amounting to IDR200,000,000,000 derived from the share premium. The distribution of Bonus Shares to Shareholders will be pro rata according to their share ownership. The Company's shareholder composition has changed to the following:

1. KB Kookmin Card Corp, selaku pemegang 362.312.534 lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp362.312.534.000, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85%; dan
2. PT Finansia Pacifica Raya, selaku pemegang 63.937.506 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.937.506.000, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 15%.

1. KB Kookmin Card Corp, as the holder of 362,312,534 shares with a total value of IDR362,312,534,000, with a share ownership percentage of 85%; and
2. PT Finansia Pacifica Raya, as the holder of 63,937,506 shares with a total nominal value of IDR63,937,506,000, representing a share ownership percentage of 15%.



KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan pembagian dividen tunai dengan ketentuan sebagai berikut: laba bersih Perseroan dalam setiap tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan saldo laba positif akan dibagikan menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPST tersebut.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2024

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025, dikarenakan kerugian finansial Perseroan pada tahun fiskal 2024, maka para pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui untuk:

1. Tidak membagikan dividen tahun buku 2024; dan
2. Tidak mendistribusikan pembayaran kupon Obligasi Perpetual.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2023

Sesuai hasil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti RUPST 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2024, para pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2023 sebesar Rp91.546.129.267 untuk:

1. Pembagian dividen sebesar Rp5.203.750.920 kepada pemegang saham secara proporsional:
 - a. KB Kookmin Card Corp, sebesar Rp4.163.000.736; dan
 - b. PT Finansia Pacifica Raya, sebesar Rp1.040.750.184.
2. Pembayaran kupon *Perpetual Bonds* Rp45.534.411.333;
3. Alokasi sebagai dana cadangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan sebesar Rp45.250.008.000; dan
4. Alokasi sebagai laba ditahan sebesar Rp20.807.967.014.

KEBIJAKAN SUSPENSI, DELISTING, DAN RELISTING SAHAM

Sebagai perusahaan tertutup, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), penerbitan dividen saham atau saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham. Dengan status tersebut, saham Perseroan tidak menjadi subjek penghentian sementara perdagangan (*suspension*) atau penghapusan pencatatan (*delisting*) oleh regulator.

DIVIDEND POLICY

The Company has a cash dividend distribution policy with the following provisions: The Company's net profit for each fiscal year, as stated in the balance sheet and profit and loss account approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with a positive retained earnings balance, will be distributed according to the method of use determined by the AGM.

Dividend Distribution for Fiscal Year 2024

Based on the Circular Resolution of Shareholders in lieu of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2025, due to the Company's financial losses in fiscal year 2024, the Company's shareholders have resolved and agreed to:

1. Not distribute dividends for fiscal year 2024; and
2. Not distribute coupon payments for Perpetual Bonds.

Dividend Distribution for Fiscal Year 2023

In accordance with the Circular Resolution of the Company's Shareholders in Lieu of the 2024 AGM held on 16 April 2024, the Company's shareholders resolved and approved the use of the 2023 net profit of IDR91,546,129,267 for:

1. Distribution of dividends of IDR5,203,750,920 to shareholders proportionally:
 - a. KB Kookmin Card Corp, IDR4,163,000,736; and
 - b. PT Finansia Pacifica Raya, IDR1,040,750,184.
2. Payment of Perpetual Bond coupons of IDR45,534,411,333;
3. Allocation as a reserve fund as required under Article 70 of the Limited Liability Company Law and Article 20 of the Company's Articles of Association, IDR45,250,008,000; and
4. Allocation as retained earnings of IDR20,807,967,014.

SHARE SUSPENSION, DELISTING, AND RELISTING POLICY

As a private company, the Company does not undertake corporate actions such as stock splits, reverse stock mergers, stock dividends or bonus shares, or a reduction in the nominal value of its shares. Due to this status, the Company's shares are not subject to suspension or delisting by regulators.



Ikhtisar Obligasi dan Efek-Efek Lainnya

Summary of Bonds and Other Securities

Sampai dengan akhir periode pelaporan 2025, Perseroan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

As of the end of the 2025 reporting period, the Company has issued bonds with the following details:

Jenis Obligasi Type of Bond	Tahun Penerbitan Issuing Year	Seri Series	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Bunga Obligasi Interest Bond (%)	Peringkat Obligasi Bond Rating	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Pencatatan Obligasi Bond Listing	Status Pembayaran Payment Status
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Shelf Registration Bonds I KB Finansia Multi Finance Phase I Year 2024	2024	Seri A	Rp326.025.000.000	6,70% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 6.70% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	27 Desember 2025 December 27, 2025	BEI IDX	Lunas Paid
	2024	Seri B	Rp68.010.000.000	7,00% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.00% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	17 Desember 2027 December 17, 2027	BEI IDX	Belum Jatuh Tempo Not Yet Due
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Bonds II KB Finansia Multi Finance Year 2023	2023	Seri A	Rp500.000.000.000	6,20% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 6.20% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	7 Juli 2024 July 7, 2024	BEI IDX	Lunas Paid
	2023	Seri B	Rp500.000.000.000	7,30% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.30% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	27 Juni 2026 June 27, 2026	BEI IDX	Belum Jatuh Tempo Not Yet Due
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Bonds I KB Finansia Multi Finance Year 2022	2022	Seri A	Rp686.385.000.000	4,70% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 4.70% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	2 Agustus 2023 August 2, 2023	BEI IDX	Lunas Paid
	2022	Seri B	Rp313.615.000.000	7,40% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.40% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	22 Juli 2025 July 22, 2025	BEI IDX	Lunas Paid



Peristiwa Penting Tahun 2025

Event Highlights 2025

31 Januari | January

31 Januari | January

3 Juli | July

3 Juli | July



Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan yang Baru
Pengangkatan Bapak Sang In Lee sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Appointment of the Company's New President Commissioner
Appointment of Mr. Sang In Lee as the President Commissioner of the Company.

Pengangkatan Komisaris Perseroan yang Baru
Pengangkatan Bapak Je Ui Jung sebagai Komisaris Perseroan.
Appointment of the Company's New Commissioner
Appointment of Mr. Je Ui Jung as the Commissioner of the Company.

Pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang Baru
Pengangkatan Bapak Peter Halim sebagai Direktur Utama Perseroan.
Appointment of the Company's New President Director
Appointment of Mr. Peter Halim as the President Director of the Company.

Pengangkatan Kembali Komisaris Independen Perseroan
Pengangkatan kembali Bapak Nursalam Andi Tabusalla sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Reappointment of the Company's Independent Commissioner
The reappointment of Mr. Nursalam Andi Tabusalla as an Independent Commissioner of the Company.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan | Awards

	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Event	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Most Excellence in Collaboration	VIVO Priority	Oktober 2025 October 2025	Vivo Indonesia

Sertifikasi | Certifications

	Nama Sertifikat Certificate Name	Jenis Sertifikasi Certification Type	Institusi Pemberi Issuing Institution	Masa Berlaku Validity Period
	ISO/IEC 27001:2022	Information Security Management Systems	TSI	14 Maret 2022 – 27 Januari 2026 14 March 2022 – 27 January 2026

02

Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	18
Dewan Komisaris Board of Commissioners	33
Laporan Direksi Board of Directors' Report	34
Direksi Board of Directors	55
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT KB Finansia Multi Finance Statement Letter of members of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT KB Finansia Multi Finance	56





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Sepanjang tahun 2025, PT KB Finansia Multi Finance ("Perseroan") tetap menunjukkan resiliensi dalam menghadapi dinamika kondisi perekonomian global dan domestik serta sektor industri yang menantang. Di tengah tekanan terhadap kinerja sepanjang tahun 2025, kondisi tersebut berdampak pada penurunan kinerja Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengambil berbagai langkah strategis yang adaptif dan berbagai upaya perbaikan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta memperkuat fundamental Perseroan ke depan.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan laporan singkat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan, antara lain meliputi evaluasi atas kinerja Perseroan, penelaahan atas pelaksanaan strategi, pandangan terhadap prospek usaha, penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan, serta informasi terkait susunan dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN DINAMIKA INDUSTRI PEMBIAYAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi, dipicu oleh meningkatnya dinamika geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta berlanjutnya kebijakan moneter yang relatif ketat di sejumlah negara maju. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, meskipun Pemerintah Indonesia telah merespons secara antisipatif melalui berbagai kebijakan stimulus guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Throughout 2025, PT KB Finansia Multi Finance (the "Company") continued to demonstrate resilience in navigating global and domestic economic conditions and a challenging industry environment. Under sustained pressure on performance during the year, these conditions resulted in a decline in the Company's overall performance. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has undertaken adaptive strategic measures and necessary improvement efforts to maintain business continuity and strengthen the Company's fundamentals going forward.

On this occasion, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to present a summary report on the execution of our supervisory and advisory functions to the Board of Directors in relation to the management of the Company. This includes an evaluation of the Company's performance, a review of strategy implementation, our views on the business outlook, and an assessment of the implementation of good corporate governance, as well as information regarding the composition and changes in the Board of Commissioners.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON MACROECONOMIC DEVELOPMENTS AND FINANCING INDUSTRY DYNAMICS IN 2025

Throughout 2025, the global economy remained overshadowed by a high level of uncertainty, driven by increasing geopolitical developments, international trade fragmentation, and the continuation of relatively tight monetary policies in several advanced economies. These conditions exerted pressure on the domestic economy, although the Government of Indonesia responded proactively through various stimulus policies to maintain growth momentum and national economic stability.



SANG IN LEE

Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya strategis Direksi dalam menjaga kinerja Perusahaan di tengah tantangan industri, serta mendorong Direksi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar dapat meraih hasil yang lebih optimal.

The Board of Commissioners consistently supports the Board of Directors' strategic efforts to maintain the Company's performance amid industry challenges, and encourages the Board of Directors to pursue continuous improvement in order to achieve even better results.



Di tengah meningkatnya risiko penurunan (*downside risks*) ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% (YoY) pada tahun 2025, ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi yang masih tumbuh positif. Namun demikian, tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah, masih menjadi faktor penghambat. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, kekhawatiran terhadap stabilitas pendapatan, serta pola konsumsi yang semakin berhati-hati, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang sempat menurun ke level 115,0 pada September 2025 sebelum kembali membaik pada akhir tahun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, perlambatan aktivitas sektor riil berdampak pada menurunnya permintaan pembiayaan. Meskipun Bank Indonesia telah menerapkan pelonggaran moneter dengan menurunkan BI-Rate hingga mencapai 4,75% pada akhir tahun 2025, penurunan suku bunga acuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan biaya dana di industri pembiayaan. Struktur pendanaan yang masih bergantung pada sumber dana eksternal serta kondisi likuiditas yang relatif ketat menyebabkan biaya dana tetap tinggi sehingga membatasi ruang untuk menyesuaikan suku bunga pembiayaan dan pada akhirnya menekan minat serta kemampuan masyarakat dalam mengakses pembiayaan.

Dampak dari kondisi tersebut tercermin pada kinerja sektor otomotif, khususnya penjualan kendaraan roda empat yang mengalami perlambatan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil nasional secara *wholesales* menurun 7,2% (YoY), sementara *retail sales* turun 6,3% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut mencerminkan lemahnya permintaan kendaraan karena dipengaruhi oleh tekanan terhadap daya beli masyarakat di tengah masih tingginya biaya pembiayaan.

Mengingat sektor otomotif merupakan salah satu kontributor utama dalam portofolio industri pembiayaan, maka kondisi tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan. Sepanjang tahun 2025, total piutang pembiayaan industri *multifinance* tercatat sekitar Rp506,5 triliun atau hanya tumbuh 0,61% (YoY), mencerminkan perlambatan ekspansi di tengah tantangan permintaan. Sementara itu, dari sisi kualitas aset, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *net* tercatat sebesar 0,77% dan NPF *gross* sebesar 2,51%, meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 2,44%. Perkembangan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kemampuan bayar debitur seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat.

Against rising global downside risks, Indonesia's economy continued to demonstrate solid resilience, recording growth of 5.11% (YoY) in 2025, supported by domestic demand, particularly household consumption, government spending, and investment, which remained positive. However, pressure on purchasing power, especially in the lower to middle income segments, remained a constraining factor. This condition was influenced by rising prices of essential goods, concerns over income stability, and increasingly cautious consumption behavior, as reflected in the Consumer Confidence Index (CCI), which declined to 115.0 in September 2025 before improving toward year end.

In line with these developments, the slowdown in real sector activity led to a decline in financing demand. Although Bank Indonesia implemented monetary easing by reducing the BI-Rate to 4.75% by the end of 2025, the decline in the benchmark rate was not fully followed by a reduction in the cost of funds in the financing industry. A funding structure that remains dependent on external sources, combined with relatively tight liquidity conditions, kept the cost of funds elevated. This limited the ability to adjust financing interest rates and ultimately affected both the willingness and capacity of consumers to access financing.

The impact of these conditions was reflected in the performance of the automotive sector, particularly four-wheeled vehicle sales, which experienced a slowdown throughout 2025. Based on data from the Indonesian Automotive Industry Association (GAIKINDO), national car sales on a wholesale basis declined by 7.2% (YoY), while retail sales decreased by 6.3% (YoY) compared to the previous year. These developments reflect weak vehicle demand, influenced by pressure on purchasing power and the still high cost of financing.

Given that the automotive sector is one of the main contributors to the financing industry's portfolio, these conditions also affected overall financing growth. Throughout 2025, total financing receivables in the multifinance industry reached approximately IDR506.5 trillion, growing by only 0.61% (YoY), reflecting slower expansion under demand constraints. From an asset quality perspective, the net Non-Performing Financing (NPF) ratio was recorded at 0.77%, while gross NPF stood at 2.51%, increasing from 2.44% in the previous month. This development indicates pressure on debtor repayment capacity in line with weakening purchasing power.



Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan menghadapi tekanan baik dari sisi pertumbuhan pembiayaan maupun kualitas portofolio. Tekanan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pelemahan daya beli, tingginya biaya dana, serta perlambatan sektor otomotif yang selama ini merupakan kontributor utama dalam portofolio pembiayaan Perseroan. Dalam merespons dinamika tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan respons yang adaptif dan terukur dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko, sehingga Perseroan tetap mampu mempertahankan stabilitas kegiatan pembiayaan secara terkendali.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS ATAS PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif, komprehensif, dan berkesinambungan terhadap proses perumusan hingga pelaksanaan strategi oleh Direksi. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal penyusunan strategi bisnis dan Rencana Bisnis Tahunan (RBT), melalui pemberian arahan, masukan, serta penelaahan atas asumsi dasar, proyeksi kinerja, dan inisiatif strategis yang diajukan Direksi, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, dinamika industri, serta profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris juga menelaah dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi yang dirumuskan selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang Perseroan, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang memadai. Direksi juga didorong untuk menyusun strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan usaha, termasuk dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan dan ketidakpastian ekonomi.

Pengawasan atas pelaksanaan strategi dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, serta pembahasan pada komite-komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Melalui forum tersebut, Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Direksi secara periodik, menelaah pencapaian target, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan, dengan tetap menghormati kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.

Taking these developments into account, the Board of Commissioners assesses that the Company faced pressure on both financing growth or portfolio quality. These pressures were driven by weakening purchasing power, the elevated cost of funds, and the slowdown in the automotive sector, which has historically been a major contributor to the Company's financing portfolio. In responding to these dynamics, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has demonstrated an adaptive and measured response in maintaining a balance between business growth and risk management, enabling the Company to sustain stable financing operations in a controlled manner.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' OVERSIGHT OF STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners performs its oversight function actively, comprehensively, and on an ongoing basis over the entire process of strategy formulation and implementation by the Board of Directors. The oversight begins at the early stage of business strategy development and the preparation of the Annual Business Plan (RBT), through the provision of guidance, input, and review of key assumptions, performance projections, and strategic initiatives proposed by the Board of Directors, with consideration of macroeconomic conditions, industry dynamics, and the Company's risk profile. The Board of Commissioners also reviews and approves the Annual Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).

In its implementation, the Board of Commissioners ensures that the formulated strategies are aligned with the Company's vision, mission, and long term objectives, while upholding prudent principles and adequate risk management practices. The Board of Directors is also encouraged to develop strategies that are adaptive and responsive to changes in the business environment, including those arising from financing industry dynamics and economic uncertainty.

Oversight of strategy implementation is conducted on an ongoing basis through Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and discussions within committees under the Board of Commissioners, including the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Through these forums, the Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Board of Directors periodically, reviews the achievement of targets, and ensures follow up on recommendations provided, while respecting the authority of the Board of Directors to manage the Company.



Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif kepada Direksi terkait langkah-langkah strategis untuk memperkuat fundamental Perseroan. Sepanjang tahun 2025, rekomendasi yang diberikan mencakup aspek strategis, operasional, keuangan, dan tata kelola perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025;
2. Penunjukan eksternal auditor untuk jasa audit laporan keuangan tahun buku 2025;
3. Rekomendasi penyesuaian gaji tahun 2025;
4. Rekomendasi persetujuan pengunduran diri Bapak Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama;
5. Rekomendasi persetujuan pengunduran diri Bapak Yap Tjay Hing sebagai Direktur Utama Perseroan;
6. Rekomendasi persetujuan pengangkatan Bapak Peter Halim sebagai Direktur Utama Perseroan;
7. Rekomendasi persetujuan pengangkatan Bapak Sang In Lee sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Je Ui Jung sebagai Komisaris Perseroan;
8. Rekomendasi persetujuan pengangkatan ulang Bapak Nursalam Andi Tabusalla sebagai Komisaris Independen;
9. Persetujuan pengangkatan Bapak Hery Susanto Dermawan sebagai *Chief Operating Officer* (COO);
10. Perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
11. Rekomendasi perubahan struktur organisasi Perseroan;
12. Penerbitan saham bonus Perseroan;
13. Tinjauan hasil *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen Tahun 2024;
14. Rencana Bisnis Tahunan 2026; dan
15. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026.

Rekomendasi tersebut mencerminkan peran aktif Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis yang ditempuh Direksi telah melalui proses penelaahan yang memadai serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengedepankan kepentingan jangka panjang Perseroan. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang menyeluruh, Dewan Komisaris turut memastikan bahwa strategi bisnis yang dijalankan sepanjang tahun 2025 terlaksana secara efektif, terukur, dan mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan.

As part of its oversight function, the Board of Commissioners provides constructive advice and recommendations to the Board of Directors regarding strategic measures to strengthen the Company's fundamentals. Throughout 2025, the recommendations provided covered strategic, operational, financial, and governance aspects, including the following:

1. Supervisory Report on the Business Plan for the second semester of 2024 and the first semester of 2025;
2. Appointment of an external auditor for the audit of the 2025 financial statements;
3. Recommendation on salary adjustments for 2025;
4. Recommendation for approval of the resignation of Mr. Moon Cheol Kang as President Commissioner;
5. Recommendation for approval of the resignation of Mr. Yap Tjay Hing as President Director;
6. Recommendation for approval of the appointment of Mr. Peter Halim as President Director;
7. Recommendation for approval of the appointment of Mr. Sang In Lee as President Commissioner and Mr. Je Ui Jung as Commissioner;
8. Recommendation for approval of the reappointment of Mr. Nursalam Andi Tabusalla as Independent Commissioner;
9. Approval of the appointment of Mr. Hery Susanto Dermawan as Chief Operating Officer (COO);
10. Changes in the composition of the Risk Oversight Committee and the Nomination and Remuneration Committee;
11. Recommendation on changes to the Company's organizational structure;
12. Issuance of the Company's bonus shares;
13. Review of Management Key Performance Indicators (KPI) results for 2024;
14. The 2026 Annual Business Plan; and
15. The 2026 Sustainable Finance Action Plan.

These recommendations reflect the active role of the Board of Commissioners in ensuring that all policies and strategic actions undertaken by the Board of Directors have undergone adequate review processes and are aligned with good corporate governance principles, while prioritizing the long-term interests of the Company. Through the implementation of comprehensive oversight, the Board of Commissioners also ensures that the business strategies executed throughout 2025 have been implemented effectively, in a measurable manner, and in support of the Company's sustainable performance.



PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI DALAM MENGELOLA PERSEROAN SEPANJANG TAHUN 2025

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam mengelola Perseroan sepanjang tahun 2025, di tengah tekanan yang cukup signifikan pada industri pembiayaan. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan secara adaptif dan *prudent*, meskipun kinerja Perseroan pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

Pada aspek penyaluran pembiayaan, Dewan Komisaris menyadari adanya penurunan piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp3,64 triliun pada tahun 2025, dibandingkan Rp6,80 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencerminkan pelemahan permintaan pembiayaan di pasar, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap daya beli. Di sisi lain, Perseroan juga secara aktif menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih selektif sebagai respon terhadap meningkatnya risiko industri dan potensi penurunan kualitas aset. Hingga akhir Desember 2025, realisasi penyaluran pembiayaan baru Perseroan tercatat sebesar Rp3,98 triliun atau mencapai 50,2% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan strategi adaptif Perseroan yang secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian. Langkah ini dinilai tepat dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan stabilitas kinerja Perseroan khususnya di tengah kondisi pasar yang masih penuh tantangan, sekaligus menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa keputusan Direksi untuk menghentikan pembiayaan kembali dengan agunan kendaraan roda empat bekas (*refinancing*) serta pembiayaan kendaraan roda empat bekas merupakan langkah yang tepat, mengingat adanya penurunan kualitas aset pada lini bisnis tersebut yang dipengaruhi oleh pelemahan daya beli dan kemampuan bayar masyarakat. Sebagai bagian dari penyesuaian strategi, Direksi juga telah mengalihkan fokus pembiayaan ke segmen dengan profil dan potensi profitabilitas yang lebih baik, antara lain pembiayaan dengan agunan kendaraan roda dua bekas serta pembiayaan multiguna untuk *Digital Electronic & Appliances* ("DE&A").

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MANAGING THE COMPANY THROUGHOUT 2025

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the efforts undertaken by the Board of Directors in managing the Company throughout 2025, despite significant pressure in the financing industry. In the view of the Board of Commissioners, the Board of Directors has carried out its management functions in an adaptive and prudent manner, although the Company's performance in 2025 declined compared to the previous year.

From a financing disbursement perspective, the Board of Commissioners notes a decline in financing receivables to IDR3.64 trillion in 2025, compared to IDR6.80 trillion in the previous year. This decline reflects weaker financing demand in the market in line with increasing pressure on purchasing power. On the other hand, the Company has actively implemented a more selective financing disbursement policy in response to rising industry risks and the potential deterioration of asset quality. As of December 31, 2025, the realization of new financing disbursement amounted to IDR3.98 trillion, representing 50.2% of the established target. This reflects the Company's adaptive strategy in consistently applying prudent principles. This approach is considered appropriate in maintaining the quality of the financing portfolio and the stability of the Company's performance, particularly under challenging market conditions, and serves as a strong foundation for healthier and more sustainable growth going forward.

In line with these developments, the Board of Commissioners considers that the decision of the Board of Directors to discontinue refinancing of used four-wheeled vehicles was appropriate, given the deterioration in asset quality within this segment driven by weakening purchasing power and declining repayment capacity. As part of this strategic adjustment, the Board of Directors has also shifted its financing focus toward segments with more favorable profiles and stronger profitability potential, including used two-wheeled vehicle collateral-based financing and multipurpose financing for Digital Electronics & Appliances ("DE&A").



Dari aspek kualitas aset, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di seluruh lini kegiatan usaha Perseroan. Namun demikian, tekanan terhadap kemampuan bayar debitur sepanjang tahun 2025 berdampak pada meningkatnya risiko kredit serta kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Sejalan dengan kondisi tersebut, Perseroan mencatat beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi sebesar Rp1,45 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp770,09 miliar. Peningkatan pencadangan tersebut dipandang sebagai langkah konservatif dan diperlukan khususnya dalam mengantisipasi penurunan kualitas aset Perseroan di masa mendatang.

Terkait dengan aspek profitabilitas, Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp857,60 miliar pada tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rugi bersih pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp314,93 miliar. Peningkatan rugi bersih ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan Perseroan sepanjang periode pelaporan. Penurunan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan menjadi sebesar Rp1,75 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,95 triliun, serta adanya peningkatan beban pencadangan yang signifikan, sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengantisipasi potensi risiko penurunan kualitas aset. Dewan Komisaris berpandangan bahwa peningkatan rugi bersih tersebut tidak semata-mata mencerminkan penurunan fundamental kinerja operasional, melainkan merupakan konsekuensi dari langkah konservatif yang diambil oleh Direksi. Langkah tersebut bersifat konservatif, khususnya dalam rangka memperkuat kualitas aset Perseroan serta memastikan prinsip penerapan manajemen risiko yang lebih *prudent* dan berkelanjutan.

Sementara pada aspek struktur keuangan, Dewan Komisaris menyadari bahwa total aset Perseroan menurun menjadi sebesar Rp4,76 triliun pada tahun 2025, dibandingkan Rp8,12 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan jumlah piutang pembiayaan yang disebabkan oleh penurunan penyaluran pembiayaan baru. Hal ini sejalan dengan langkah penyesuaian portofolio pembiayaan dan penerapan strategi pengelolaan risiko yang lebih konservatif, serta bagian dari usaha Perseroan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja Perseroan.

From an asset quality perspective, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has undertaken various efforts to implement prudent principles and risk management across all lines of the Company's business activities. However, pressure on debtor repayment capacity throughout 2025 resulted in increased credit risk and a higher requirement for impairment loss provisions. In line with these conditions, the Company recorded an expense for the provision for impairment losses of Rp1.45 trillion, an increase of Rp770.09 billion compared to 2024. The increase in provisioning is considered a necessary and conservative measure, particularly to anticipate potential deterioration in the Company's asset quality going forward.

From a profitability perspective, the Board of Commissioners notes that the Company recorded a net loss of IDR857.60 billion in 2025. This amount represents an increase compared to the net loss of IDR314.93 billion recorded in the previous year. The increase in net loss reflects pressure on the Company's financial performance throughout the reporting period. The decline in performance was primarily driven by a decrease in revenue to IDR1.75 trillion compared to IDR1.95 trillion in the previous year, as well as a significant increase in provisioning expenses, in line with the Company's efforts to anticipate potential risks related to the deterioration of asset quality. The Board of Commissioners considers that the increase in net loss does not solely reflect a weakening of the Company's operational fundamentals, but rather represents the consequence of conservative measures taken by the Board of Directors. These measures are conservative in nature, particularly in strengthening the Company's asset quality and ensuring the implementation of more prudent and sustainable risk management principles.

From a financial structure perspective, the Board of Commissioners notes that total assets decreased to IDR4.76 trillion in 2025 from IDR8.12 trillion in 2024. This decline was mainly driven by a reduction in financing receivables due to lower new financing disbursement. This is consistent with the Company's portfolio adjustment and the implementation of a more conservative risk management strategy, as part of efforts to maintain performance stability and business sustainability.



Selain itu, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah melakukan berbagai langkah perbaikan secara terarah, antara lain melalui penguatan daya saing pada pasar yang berkembang, efisiensi biaya operasional, serta optimalisasi proses digital dalam pengajuan pembiayaan dan penagihan guna meningkatkan efektivitas dan meminimalkan risiko *fraud*. Upaya efisiensi juga diperkuat melalui penguatan fungsi penagihan, termasuk optimalisasi *debt collector*, serta penerapan strategi pendanaan yang lebih disiplin dengan memprioritaskan sumber pendanaan berbiaya kompetitif dan pengelolaan penarikan pinjaman secara lebih terukur.

Dari sisi permodalan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil merealisasikan langkah penguatan struktur permodalan melalui dua aksi korporasi strategis, yaitu peningkatan modal disetor sebesar Rp200 miliar melalui penerbitan saham bonus serta pencairan pinjaman subordinasi sebesar Rp247,8 miliar. Kedua langkah tersebut secara efektif memperkuat struktur permodalan Perseroan, mendukung ketahanan keuangan dan memberikan landasan yang lebih kokoh dalam menghadapi tekanan industri yang dinamis.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah menunjukkan respons yang adaptif dan terukur dalam menghadapi dinamika sepanjang tahun 2025. Respons tersebut tercermin melalui berbagai upaya, antara lain melalui penyesuaian strategi bisnis, penguatan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta penguatan struktur permodalan. Namun demikian, Dewan Komisaris mencermati bahwa masih terdapat sejumlah indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala, serta memperkuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing dan ketahanan keuangan Perseroan di masa mendatang.

In addition, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has implemented various targeted improvement initiatives, including strengthening competitiveness in developing markets, improving operational cost efficiency, and optimizing digital processes in financing applications and collections to enhance effectiveness and minimize fraud risk. Efficiency efforts were further strengthened through improvements in collection functions, including the optimization of debt collectors, as well as the implementation of a more disciplined funding strategy by prioritizing competitive funding sources and managing loan drawdowns in a more measured manner.

From a capital perspective, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors successfully strengthened the Company's capital structure through two strategic corporate actions, namely an increase in paid-in capital of IDR200 billion through the issuance of bonus shares and the disbursement of a subordinated loan amounting to IDR247.8 billion. These measures effectively strengthened the Company's capital structure, supported financial resilience, and provided a stronger foundation in navigating dynamic industry pressures.

Overall, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has demonstrated an adaptive and measured response in addressing the challenges throughout 2025. These responses are reflected in various initiatives, including business strategy adjustments, strengthening of risk management, operational efficiency improvements, and capital structure enhancement. However, the Board of Commissioners notes that several key performance indicators have not yet fully met the established targets. In this regard, the Board of Commissioners directs the Board of Directors to continue conducting periodic performance evaluations and monitoring, and to strengthen the necessary improvement measures to drive sustainable performance improvement while enhancing the Company's competitiveness and financial resilience going forward.



PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2026 YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris memandang bahwa pada tahun 2026 kondisi makroekonomi global diperkirakan memasuki fase stabilisasi pasca-pengetatan moneter, meskipun sejumlah risiko eksternal masih perlu diwaspadai. Dalam hal ini, International Monetary Fund (IMF) menilai bahwa perekonomian Indonesia akan tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid di tengah tekanan global, didukung oleh inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran serta kerangka kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan. Prospek tersebut juga sejalan dengan asesmen Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan mencapai di kisaran 4,9%–5,7% (YoY), didukung oleh penguatan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan otoritas terkait, stabilitas makroekonomi yang terpelihara, serta akselerasi reformasi struktural.

Sejalan dengan itu, OJK juga menyampaikan pandangan yang konstruktif terhadap industri pembiayaan dengan memproyeksikan pertumbuhan piutang pembiayaan *multifinance* berada pada kisaran 6%–8% (YoY) pada tahun 2026. Proyeksi ini dinilai realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta target industri, di mana segmen pembiayaan modal kerja diperkirakan tetap menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan, dengan tetap diimbangi oleh penguatan kualitas aset dan manajemen risiko.

Di tengah prospek yang relatif positif tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa industri pembiayaan masih akan menghadapi tantangan yang moderat, terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang diperkirakan belum sepenuhnya pulih serta kondisi biaya dana yang masih relatif tinggi. Namun demikian, Dewan Komisaris berpandangan bahwa arah strategi yang disusun oleh Direksi telah berada pada koridor yang tepat untuk merespons dinamika tersebut.

Sejalan dengan *outlook* positif ke depan, Dewan Komisaris memiliki keyakinan yang sejalan dengan Direksi bahwa prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 tetap terbuka dan memiliki potensi untuk tumbuh lebih baik. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan strategi yang difokuskan pada penguatan kualitas aset, peningkatan selektivitas penyaluran pembiayaan, efisiensi operasional, serta pengembangan segmen dengan profil risiko yang lebih terjaga dapat memperkuat kinerja dan mendorong pemulihan profitabilitas Perseroan secara bertahap.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE 2026 BUSINESS OUTLOOK PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners views that in 2026, global macroeconomic conditions are expected to enter a stabilization phase following the period of monetary tightening, although several external risks remain. The International Monetary Fund (IMF) indicates that Indonesia's economy is expected to maintain solid growth despite global pressures, supported by inflation within the target range and a credible and sustainable policy framework. This outlook is consistent with Bank Indonesia's assessment, which projects economic growth in 2026 in the range of 4.9%–5.7% (YoY), supported by stronger policy coordination between the Government and relevant authorities, maintained macroeconomic stability, and continued structural reforms.

In line with this outlook, the OJK has also expressed a constructive view on the financing industry, projecting multifinance receivables growth in the range of 6%–8% (YoY) in 2026. This projection is considered realistic given prevailing economic conditions and industry targets, where working capital financing is expected to remain one of the main growth drivers, supported by continued improvements in asset quality and risk management.

Despite this relatively positive outlook, the Board of Commissioners considers that the financing industry will continue to face moderate challenges, particularly related to purchasing power, which is not yet expected to fully recover, and the cost of funds, which remains relatively high. Nevertheless, the Board of Commissioners believes that the strategic direction formulated by the Board of Directors is appropriate in responding to these dynamics.

In line with the positive outlook, the Board of Commissioners shares the Board of Directors' view that the Company's business prospects in 2026 remain open and have the potential to improve. The Board of Commissioners considers that the implementation of strategies focused on strengthening asset quality, increasing selectivity in financing disbursement, improving operational efficiency, and developing segments with more controlled risk profiles will strengthen performance and support a gradual recovery in profitability.



Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris akan terus melakukan pendampingan secara aktif kepada Direksi, termasuk melalui pemberian arahan strategis dan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan yang dijalankan. Sinergi yang kuat antara Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat memastikan bahwa setiap langkah strategis Perseroan tetap adaptif terhadap dinamika eksternal, terukur dalam pengambilan risiko, serta mampu mengoptimalkan peluang pertumbuhan yang ada guna menjaga keberlanjutan kinerja Perseroan di tahun 2026.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI PERSEROAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") di seluruh lini organisasi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menginternalisasi prinsip-prinsip GCG sebagai bagian dari budaya kerja dan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan tercermin dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang semakin terstruktur dan disiplin.

Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, serta pembahasan di tingkat komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Melalui forum tersebut, Dewan Komisaris menelaah efektivitas implementasi kebijakan, kecukupan sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga mencermati pengkinian berbagai kebijakan turunan dari Pedoman GCG, termasuk Pedoman Strategi Anti-*Fraud*, Kode Etik Perseroan, kebijakan remunerasi, serta penyesuaian struktur organisasi yang senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan regulasi.

In carrying out its oversight function, the Board of Commissioners will continue to provide active guidance to the Board of Directors, including through strategic direction and periodic evaluation of policy implementation. Strong synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors is expected to ensure that the Company's strategic actions remain adaptive to external developments, measured in risk-taking, and able to optimize growth opportunities to sustain performance in 2026.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE COMPANY

In performing its oversight function, the Board of Commissioners actively and continuously monitors and evaluates the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across all organizational levels. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to internalizing GCG principles as part of the Company's working culture and as a fundamental framework for sustaining business continuity. The implementation of transparency, accountability, responsibility, and independence, as well as fairness and equality, is reflected in increasingly structured and disciplined business practices.

The Board of Commissioners conducts its oversight through various mechanisms, including Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and committee-level discussions under the Board of Commissioners. Through these forums, the Board of Commissioners reviews the effectiveness of policy implementation, the adequacy of internal control systems, and compliance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners also reviews updates to various policies derived from the GCG framework, including the Anti-Fraud Strategy Guidelines, the Company's Code of Ethics, remuneration policies, and adjustments to the organizational structure aligned with business needs and regulatory requirements.



Dari sisi sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memperkuat efektivitas pengendalian melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan tindak kecurangan (*fraud prevention, detection, and investigation*). Komitmen terhadap pengendalian *fraud* tersebut diwujudkan melalui implementasi strategi anti-*fraud*, penguatan fungsi Satuan Kerja Anti-*Fraud*, serta peningkatan kesadaran kepatuhan di lingkungan internal. Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan secara memadai dan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas operasional dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Sementara terkait aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah menerapkan kerangka manajemen risiko yang memadai dan selaras dengan ketentuan regulator dengan cakupan pengelolaan yang meliputi berbagai kategori risiko utama. Berdasarkan hasil evaluasi, profil risiko Perseroan berada pada tingkat yang masih dapat diterima. Meskipun demikian, risiko kredit tetap menjadi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk memperkuat proses pemantauan dan mitigasi risiko kredit, serta memastikan konsistensi pengelolaan risiko lainnya guna mengantisipasi potensi peningkatan risiko di masa mendatang.

Sejalan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris juga secara proaktif mengawasi pengelolaan aktivitas Perseroan guna meminimalkan risiko kepatuhan serta memperkuat budaya kepatuhan di seluruh organisasi. Pengawasan tersebut antara lain dilakukan terhadap implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT"). Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan kebijakan APU dan PPT dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta secara konsisten menjaga efektivitas penerapannya.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap implementasi *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengendalian internal. Dengan dukungan Komite Audit, Dewan Komisaris secara berkala menerima laporan terkait pelaksanaan WBS serta memantau tindak lanjut atas setiap pengaduan yang masuk. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus meningkatkan efektivitas sistem tersebut, termasuk melalui penguatan sosialisasi, perlindungan terhadap pelapor, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme pelaporan.

From an internal control perspective, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has strengthened control effectiveness through a comprehensive approach covering fraud prevention, detection, and investigation. This commitment is reflected in the implementation of anti-fraud strategies, strengthening of the Anti-Fraud Unit, and increased compliance awareness across the organization. The Board of Commissioners considers that the Company's internal control system has been adequately implemented and serves as a key element in maintaining operational integrity and minimizing the risk of irregularities.

With respect to risk management, the Board of Commissioners assesses that the Company has implemented an adequate risk management framework aligned with regulatory requirements, covering key risk categories. Based on the evaluation, the Company's risk profile remains within an acceptable range. However, credit risk remains an area that requires continued attention. Accordingly, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to strengthen monitoring and mitigation of credit risk, while ensuring consistency in managing other risks to anticipate potential increases in risk going forward.

In line with the compliance function, the Board of Commissioners also actively oversees the management of the Company's activities to minimize compliance risk and strengthen a culture of compliance across the organization. This includes oversight of the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML and CTF) policies. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has implemented AML and CTF policies properly and in accordance with applicable regulations, while maintaining their effectiveness on an ongoing basis.

In addition, the Board of Commissioners also oversees the implementation of the Whistleblowing System (WBS) as part of strengthening governance and internal control. With the support of the Audit Committee, the Board of Commissioners regularly receives reports on the implementation of the WBS and monitors the follow-up of each reported case. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to further enhance the effectiveness of the system, including through strengthening awareness, ensuring protection for whistleblowers, and increasing stakeholder confidence in the reporting mechanism.



Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan telah berjalan secara efektif, didukung oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi dengan baik. Sinergi tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas pengelolaan usaha, memperkuat pengendalian risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan fondasi tata kelola yang solid, Perseroan dinilai memiliki kesiapan yang memadai untuk menjaga stabilitas kinerja dan mendukung keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite tersebut berperan dalam memperkuat efektivitas pengawasan Dewan Komisaris melalui penyampaian kajian, analisis, dan rekomendasi atas pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja komite melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*), baik secara individual maupun kolektif. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite penunjang telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Laporan pelaksanaan tugas masing-masing komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian secara menyeluruh. Adapun rangkuman penilaian terhadap kinerja komite-komite penunjang sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Komite Audit

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik terutama dalam mendukung pengawasan atas kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta memberikan rekomendasi atas penunjukan KAP untuk tahun buku 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga independensi dan kualitas audit eksternal. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota sebesar 100%.

Overall, the Board of Commissioners considers that the implementation of corporate governance within the Company has been effective, supported by well-integrated internal control systems, risk management, compliance functions, and reporting mechanisms. This synergy serves as a strong foundation for maintaining the quality of business management, strengthening risk control, and ensuring compliance with applicable regulations. With this solid governance framework, the Company is considered to have adequate readiness to maintain performance stability and support business sustainability amid evolving business conditions.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its oversight and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These committees play a key role in enhancing the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight by providing reviews, analyses, and recommendations on the Company's management.

The Board of Commissioners conducts periodic evaluations of the performance of these committees through a self-assessment mechanism, both individually and collectively. Based on the evaluation of the implementation of the 2025 work programs, the Board of Commissioners assesses that all supporting committees have performed their duties and responsibilities effectively and have made significant contributions in supporting the execution of the oversight function.

Reports on the implementation of each committee's duties from the basis for the Board of Commissioners to conduct a comprehensive assessment. A summary of the performance evaluation of the supporting committees throughout 2025 is presented as follows:

Audit Committee

The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has performed its duties and responsibilities effectively, particularly in supporting oversight of the quality of financial reporting, the effectiveness of internal controls, and compliance with applicable regulations. The Audit Committee has also evaluated the performance of the Public Accounting Firm ("PAF") and provided recommendations regarding the appointment of the external auditor for the 2025 financial year as part of efforts to maintain audit independence and quality. Throughout 2025, the Audit Committee held 5 (five) meetings, with 100% attendance from all members.



Komite Pemantau Risiko

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung pengawasan atas penerapan manajemen risiko Perseroan. Komite ini secara konsisten melakukan penelaahan terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko, termasuk melakukan pemantauan eksposur risiko utama serta pemberian rekomendasi guna meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota sebesar 100%.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendukung proses nominasi dan penetapan remunerasi yang objektif, transparan, dan selaras dengan strategi Perseroan. Komite ini juga secara aktif melakukan penelaahan terhadap struktur organisasi, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, serta kebijakan remunerasi, sekaligus memberikan rekomendasi terkait pengembangan sumber daya manusia, termasuk perencanaan suksesi. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota sebesar 100%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada 31 Januari 2025, pemegang saham telah menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagai bagian dari upaya penguatan GCG serta penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika bisnis Perseroan. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen Perseroan dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasan yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri.

Risk Oversight Committee

In the view of the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee has effectively carried out its role in supporting oversight of the Company's risk management implementation. The Committee has consistently reviewed risk management policies and their implementation, including monitoring key risk exposures and providing recommendations to enhance the effectiveness of risk mitigation. Throughout 2025, the Risk Oversight Committee held 4 (four) meetings, with 100% attendance from all members.

Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners assesses that the Nomination and Remuneration Committee has effectively carried out its duties and responsibilities in supporting objective and transparent nomination processes and remuneration determination aligned with the Company's strategy. The Committee has also actively reviewed the organizational structure, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and remuneration policies, while providing recommendations on human capital development, including succession planning. Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings, with 100% attendance from all members.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on January 31, 2025, the shareholders approved changes to the composition of the Board of Commissioners as part of efforts to strengthen GCG and align with the Company's evolving business needs and dynamics. These changes also reflect the Company's commitment to ensuring that its oversight function remains effective and increasingly adaptive to industry developments.



Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Period	
	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Komisaris Utama President Commissioner	Sang In Lee	Moon Cheol Kang
Komisaris Independen Independent Commissioner	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla
Komisaris Commissioner	Je Ui Jung	-

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Moon Cheol Kang atas kontribusi, dedikasi, serta peran strategis yang telah diberikan selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung arah pengembangan Perseroan.

The Board of Commissioners expresses its highest appreciation and gratitude to Mr. Moon Cheol Kang for his contributions, dedication, and strategic role during his tenure as President Commissioner of the Company, particularly in strengthening the oversight function and supporting the Company's development direction.

Pada saat yang sama, Dewan Komisaris menyambut baik bergabungnya Bapak Sang In Lee sebagai Komisaris Utama serta Bapak Je Ui Jung sebagai Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris meyakini bahwa pengalaman, kompetensi, serta perspektif yang dimiliki akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendukung pencapaian kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

At the same time, the Board of Commissioners welcomes the appointment of Mr. Sang In Lee as President Commissioner and Mr. Je Ui Jung as Commissioner. The Board of Commissioners believes that their experience, competencies, and perspectives will add value in enhancing the effectiveness of oversight, strengthening corporate governance, and supporting the Company's sustainable performance.

APRESIASI

APPRECIATION

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Perseroan. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi penting bagi Perseroan dalam menjaga stabilitas kinerja sekaligus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang berkembang. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas kepemimpinan, komitmen, serta konsistensi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan Perseroan secara profesional, *prudent*, dan berorientasi pada penguatan fundamental usaha.

In closing, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation to all shareholders for their continued trust and support for the Company. This trust serves as an important foundation for maintaining performance stability while navigating various evolving dynamics and challenges. The Board of Commissioners also extends its appreciation to the Board of Directors for its leadership, commitment, and consistency in carrying out the management of the Company in a professional and prudent manner, with a strong focus on strengthening business fundamentals.



Apresiasi yang sama turut disampaikan kepada seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, dan kontribusi nyata dalam mendukung operasional dan pencapaian kinerja Perseroan, serta kepada seluruh debitur dan mitra usaha atas kepercayaan dan kerja sama yang terus terjalin dengan baik. Sinergi yang terbentuk di antara seluruh pemangku kepentingan tersebut merupakan elemen penting dalam memperkuat resiliensi serta menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris bersama Direksi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi strategis dalam mendorong transformasi bisnis, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memastikan penerapan manajemen risiko yang disiplin dan terintegrasi. Dengan fondasi tersebut, Perseroan berada pada posisi yang lebih kuat untuk menghadapi dinamika industri, memanfaatkan peluang pertumbuhan, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan begitu, kami optimis Perseroan akan mampu merealisasikan visinya sebagai Perusahaan Pembiayaan Penyedia Solusi dan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Terbaik di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

The same appreciation is extended to all employees for their dedication, integrity, and tangible contributions in supporting the Company's operations and performance achievements, as well as to all debtors and business partners for their continued trust and strong cooperation. The synergy established among all stakeholders represents an important element in strengthening resilience and ensuring the sustainability of the Company's business.

The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, reaffirms its commitment to strengthening strategic collaboration in driving business transformation, enhancing governance quality, and ensuring disciplined and integrated risk management practices. With this foundation, the Company is in a stronger position to navigate industry dynamics, capture growth opportunities, and create sustainable long-term value. Accordingly, we remain confident that the Company will be able to realize its vision of becoming the Best Technology-Based Financing Service Provider Financing Company in Indonesia, while delivering optimal value to all stakeholders.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,

SANG IN LEE

Komisaris Utama
President Commissioner



Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Nursalam Andi Tabusalla
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sang In Lee
Komisaris Utama
President Commissioner

Je Ui Jung
Komisaris
Commissioner



Laporan Direksi

Board of Directors' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2025 merupakan periode yang menantang bagi industri pembiayaan di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik sehingga menekan kinerja sektoral secara keseluruhan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Perseroan turut melakukan penyesuaian kinerja sepanjang tahun berjalan. Namun demikian, Perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha secara baik melalui penyediaan produk dan layanan pembiayaan yang unggul dan kompetitif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas portofolio yang dikelola.

Di tengah dinamika industri yang terus berkembang, Perseroan secara konsisten melanjutkan agenda pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan terbaik melalui inovasi dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Melalui laporan singkat ini, saya mewakili jajaran Direksi menyampaikan gambaran komprehensif mengenai kinerja, tantangan, serta langkah strategis yang telah ditempuh Perseroan sepanjang tahun buku 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

DINAMIKA MAKRO EKONOMI TAHUN 2025 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih berada dalam fase pemulihan yang belum merata dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, di mana risiko pertumbuhan cenderung mengarah ke sisi bawah (*downside risks*). Oleh karena itu, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 2,3% (YoY), mencerminkan terbatasnya ruang ekspansi di tengah meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta kebijakan moneter yang masih cenderung ketat di negara-negara maju. Kondisi tersebut mendorong volatilitas eksternal tetap tinggi dan meningkatkan tekanan rambatan terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

The year 2025 was a challenging period for the financing industry, as global and domestic economic uncertainty weighed on overall sector performance. In response, the Company made the necessary performance adjustments throughout the year. The Company continues to conduct its business operations effectively by providing superior and competitive financing products and services, while upholding the principle of prudence to maintain the quality of its managed portfolio.

In a continuously evolving industry landscape, the Company consistently advanced its sustainable growth agenda while strengthening its commitment to delivering high-quality services through ongoing innovation and continuous improvement. Through this report, on behalf of the Board of Directors, I present a comprehensive overview of the Company's performance, challenges, and strategic measures undertaken throughout the 2025 financial year, as a form of accountability to shareholders and stakeholders.

MACROECONOMIC DYNAMICS IN 2025 AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE COMPANY

Throughout 2025, the global economy remained in an uneven recovery phase with a high level of uncertainty, where growth risks continued to tilt to the downside. In this context, the World Bank projected global economic growth at approximately 2.3% (YoY), reflecting limited room for expansion amid rising geopolitical tensions, trade fragmentation, and monetary policies that remained relatively tight in advanced economies. These conditions sustained elevated external volatility and increased spillover pressures on emerging economies, including Indonesia.



PETER HALIM

Direktur Utama
President Director

Direksi memastikan fundamental bisnis Perusahaan tetap terjaga di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian, melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta implementasi prioritas strategi yang terukur.

The Board of Directors ensures that the Company's business fundamentals remain sound amid various pressures and uncertainties, through the application of prudent principles and the implementation of well-defined strategic priorities.



Di tengah dinamika global yang berkembang, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang relatif baik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% (YoY), meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 5,03% (YoY). Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4. Kinerja tersebut menegaskan kekuatan fundamental ekonomi domestik, dengan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Meskipun demikian, laju konsumsi cenderung tertahan, mencerminkan meningkatnya kehati-hatian masyarakat di tengah tekanan daya beli dan dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Selain pertumbuhan domestik yang tetap solid, laju inflasi nasional juga terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia dengan realisasi inflasi tahunan sebesar 2,92% (YoY), terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi sebesar 4,58% (YoY), sementara kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,83%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62%, serta kelompok transportasi sebesar 1,23%. Meskipun inflasi relatif terkendali, tekanan harga pada kebutuhan dasar tetap mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya pada segmen menengah ke bawah. Hal ini tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 120,4 pada November 2025 menjadi 118,9 pada Desember 2025. Meskipun masih berada pada zona optimis, penurunan ini mengindikasikan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam konsumsi.

Merespons dinamika pada sektor riil, Bank Indonesia (BI) menempuh kebijakan moneter yang lebih akomodatif sepanjang tahun 2025, tercermin dari penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) dari 6,00% pada awal tahun menjadi 4,75% di akhir tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas dalam sistem keuangan sekaligus memberikan ruang penurunan biaya dana (*cost of fund*), khususnya bagi industri pembiayaan. Namun demikian, dampak pelonggaran moneter tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendorong permintaan pembiayaan seiring konsumsi domestik yang masih tertahan akibat tekanan daya beli serta meningkatnya kehati-hatian masyarakat.

Against this backdrop, Indonesia's economy continued to demonstrate solid resilience, recording growth of 5.11% (YoY), an improvement from 5.03% (YoY) in the previous year. In nominal terms, Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached IDR23,821.1 trillion, with GDP per capita of IDR83.7 million, equivalent to USD5,083.4. This performance underscores the strength of domestic economic fundamentals, with household consumption remaining the primary driver of growth. However, consumption growth showed signs of moderation, reflecting increased caution among consumers amid pressure on purchasing power and an economic environment that has yet to fully stabilize.

In addition to solid domestic growth, the national inflation rate was maintained within Bank Indonesia's target range, with annual inflation recorded at 2.92% (YoY). This was mainly driven by the food, beverage, and tobacco group, which recorded inflation of 4.58% (YoY), while the healthcare group recorded inflation of 1.83%, the housing, water, electricity, and household fuel group recorded inflation of 1.62%, and the transportation group recorded inflation of 1.23%. Although inflation was relatively under control, price pressures on essential goods continued to affect the purchasing power of the public, particularly in the lower- to middle-income segments. This condition was reflected in the decline of the Consumer Confidence Index (CCI) from 120.4 in November 2025 to 118.9 in December 2025. Although it remained in the optimistic zone, this decline indicates increased caution among the public in consumption.

In response to developments in the real sector, Bank Indonesia (BI) implemented a more accommodative monetary policy throughout 2025, as reflected in the reduction of the benchmark interest rate (BI-Rate) from 6.00% at the beginning of the year to 4.75% at the end of the year. This policy is expected to strengthen liquidity in the financial system while providing room to reduce the cost of funds, particularly for the financing industry. However, the impact of this monetary easing has not been fully effective in encouraging financing demand, in line with domestic consumption that remains restrained due to pressure on purchasing power and increased public caution.



Lesunya permintaan pada sektor riil tercermin dari tertekannya kinerja industri otomotif secara agregat. Berdasarkan data *wholesales* Gaikindo (distribusi dari pabrikan ke *dealer*), angka penjualan mobil nasional sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 803.687 unit, atau menurun 7,2% (YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tren tersebut mengindikasikan pelemahan daya beli serta meningkatnya kehati-hatian konsumen dalam membeli barang tahan lama sehingga pada akhirnya berdampak langsung terhadap permintaan pembiayaan pada segmen kendaraan roda empat.

Sebaliknya, segmen kendaraan roda dua menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik sebagaimana tercermin dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang mencatat penjualan sepeda motor nasional sebesar 6.412.769 unit pada 2025, meningkat sekitar 1,3% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6.333.310 unit. Kinerja yang relatif stabil tersebut menegaskan bahwa kendaraan roda dua tetap menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya bagi segmen berpenghasilan menengah ke bawah dan pekerja sektor informal. Kondisi ini didukung oleh tingkat keterjangkauan yang lebih tinggi serta peran fungsional kendaraan roda dua sebagai sarana mobilitas dan penunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.

Perbedaan tren kinerja antar-segmen tersebut memberikan implikasi langsung terhadap industri pembiayaan nasional. Pada akhir tahun 2025, piutang pembiayaan industri hanya tumbuh sebesar 0,61% (YoY) menjadi sekitar Rp506,5 triliun, mencerminkan fase konsolidasi di tengah meningkatnya risiko kredit dan kehati-hatian pelaku industri. Dari sudut pandang profil risiko, NPF bersih di industri *multifinance* membaik menjadi 0,77% pada Desember 2025 dari 0,85% pada bulan sebelumnya, sementara NPF *gross* meningkat menjadi 2,51% dari 2,44%. Sementara itu, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat stabil sebesar 2,18 kali per Desember 2025, masih berada jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Sejalan dengan dinamika tersebut, Perseroan mencermati bahwa segmen pembiayaan kendaraan roda empat, khususnya kendaraan bekas, mengalami tekanan yang cukup signifikan, baik dari sisi permintaan maupun kualitas aset. Menyikapi hal tersebut, Perseroan mengambil langkah strategis dengan menghentikan pembiayaan kendaraan roda empat bekas serta membatasi aktivitas *refinancing* pada segmen tersebut, khususnya untuk nasabah baru dan saluran pemasaran melalui agen, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas portofolio dan mengelola risiko secara *prudent*.

Weak demand in the real sector was reflected in the overall performance of the automotive industry. Based on Gaikindo wholesales data (distribution from manufacturers to dealers), national car sales throughout 2025 were recorded at 803,687 units, representing a decline of 7.2% (YoY) compared to the same period in the previous year. This trend indicates weakening purchasing power and increased caution among consumers in purchasing durable goods, which ultimately had a direct impact on demand for financing in the four-wheeled vehicle segment.

On the other hand, the two-wheeled vehicle segment showed relatively better resilience, as reflected in data from the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI), which recorded national motorcycle sales of 6,412,769 units in 2025, an increase of approximately 1.3% (YoY) compared to 6,333,310 units in the previous year. This relatively stable performance confirms that two-wheeled vehicles remain the primary choice of the public, particularly for middle- to lower-income segments and informal sector workers. This condition is supported by a higher level of affordability and the functional role of two-wheeled vehicles as a means of mobility and support for daily economic activities.

The divergence in performance across segments had direct implications for the financing industry. By the end of 2025, industry financing receivables grew by only 0.61% (YoY) to approximately IDR506.5 trillion, reflecting a consolidation phase amid rising credit risk and increased prudence among industry players. From a risk profile perspective, NPF Net in the multifinance industry improved to 0.77% in December 2025 from 0.85% in the previous month, while gross NPF increased to 2.51% from 2.44%. Overall, financing risk remained manageable, supported by a stable gearing ratio of 2.18 times as of December 2025, well below the regulatory maximum threshold of 10 times.

In line with these developments, the Company observed that the four-wheeled vehicle financing segment, particularly used cars, experienced significant pressure, both in terms of demand and asset quality. In response to this condition, the Company implemented strategic measures by discontinuing used car financing and limiting refinancing activities in this segment, particularly for new customers and marketing channels through agents, as part of efforts to maintain portfolio quality and manage risk prudently.



Di sisi lain, Perseroan melihat bahwa segmen kendaraan roda dua bekas tetap menunjukkan permintaan yang stabil. Oleh karena itu, Perseroan memfokuskan strategi pada penguatan pembiayaan kendaraan roda dua bekas serta *Digital Electronic & Appliances* (DE&A) guna membangun portofolio yang lebih resilient dan selaras dengan profil risiko. Pada saat yang sama, Perseroan juga terus memperkuat penilaian risiko kredit, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam akuisisi dan penagihan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi, Direksi memandang tahun 2025 sebagai fase penataan ulang yang strategis baik bagi industri pembiayaan maupun Perseroan guna memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kualitas portofolio, serta memperketat disiplin pengelolaan risiko. Upaya tersebut menjadi landasan penting bagi Perseroan dalam memperbaiki kinerja serta mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan ke depan.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASINYA

Direksi memegang peran sentral dalam keseluruhan tahapan pengelolaan Perseroan, mulai dari perumusan strategi, perencanaan bisnis, implementasi, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja, guna memastikan keberlanjutan usaha serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan peran tersebut, Direksi secara aktif mengintegrasikan perspektif strategis, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada tahap perumusan strategi, Direksi mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi makroekonomi, dinamika industri, profil risiko Perseroan, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris dan masukan dari pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang ditetapkan tidak hanya selaras dengan arah pengembangan Perseroan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Selanjutnya, arah strategis tersebut dituangkan secara komprehensif dalam Rencana Bisnis Tahunan (RBT) yang disusun secara terukur dan realistis, serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana ini menjadi pedoman utama bagi Direksi dalam mengarahkan kegiatan operasional, alokasi sumber daya, serta pengambilan keputusan sepanjang tahun berjalan. Direksi juga berperan aktif dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi

On the other hand, the Company observed that the used two-wheeled vehicle segment continued to show stable demand. Therefore, the Company focused its strategy on strengthening used motorcycle financing and Digital Electronics & Appliances (DE&A) to build a more resilient portfolio aligned with its risk profile. At the same time, the Company also continued to strengthen credit risk assessment, optimize the use of technology in acquisition and collection, and improve operational efficiency on an ongoing basis.

By considering the various challenges and dynamics faced, the Board of Directors views 2025 as a strategic restructuring phase for both the financing industry and the Company in order to strengthen business fundamentals, improve portfolio quality, and tighten discipline in risk management. These efforts serve as an important foundation for the Company to improve performance and drive healthy and sustainable growth going forward.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Directors plays a central role across all stages of the Company's management, from strategy formulation and business planning to implementation, supervision, and performance evaluation, to ensure business continuity and the achievement of established targets. In carrying out this role, the Board of Directors actively integrates strategic perspectives, risk management, and prudent principles into every decision-making process.

At the strategy formulation stage, the Board of Directors considers various internal and external factors, including macroeconomic conditions, industry dynamics, the Company's risk profile, and recommendations from the Board of Commissioners, along with input from shareholders and other stakeholders. This approach ensures that the strategies established are aligned with the Company's development direction and remain adaptive to changes in the business environment.

The strategic direction is then comprehensively articulated in the Annual Business Plan (RBT), which is prepared in a measurable and realistic manner and has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with prevailing regulations. This plan serves as the primary guideline for the Board of Directors in directing operational activities, allocating resources, and making decisions throughout the year. The Board of Directors also plays an active role in the preparation and implementation of the



Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam strategi dan operasional bisnis.

Dalam tahap implementasi, Direksi memastikan bahwa strategi dijalankan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola, optimalisasi peran komite-komite di bawah Direksi, serta koordinasi lintas fungsi yang terstruktur. Direksi juga melakukan komunikasi dan dialog secara langsung dengan unit kerja, termasuk kantor cabang, untuk memastikan pemahaman yang selaras terhadap arah strategi sekaligus memperoleh *insight* terhadap kondisi operasional di lapangan.

Direksi turut menjalankan fungsi pengawasan secara berkesinambungan melalui pemantauan kinerja secara berkala, evaluasi atas pencapaian target, serta penyesuaian kebijakan secara responsif dan terukur sesuai dengan dinamika usaha. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk tetap *agile* dalam merespons perubahan sekaligus menjaga disiplin dalam pengelolaan risiko dan kualitas portofolio.

Secara keseluruhan, Direksi memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Perseroan berjalan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang. Peran aktif Direksi dalam setiap tahapan tersebut menjadi kunci dalam menjaga ketahanan Perseroan serta mendorong pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

PRIORITAS STRATEGI DAN INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2025

Direksi memandang bahwa dinamika industri pembiayaan sepanjang tahun 2025 masih diwarnai ketidakpastian tinggi serta tekanan terhadap daya beli masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Perseroan secara proaktif menetapkan dan mengeksekusi agenda penataan ulang strategi bisnis yang difokuskan pada penguatan fundamental, peningkatan kualitas portofolio, serta penajaman disiplin manajemen risiko guna memastikan keberlanjutan kinerja di tengah kondisi pasar yang menantang.

Dalam pelaksanaannya, Direksi berperan aktif dalam mengawal efektivitas implementasi strategi melalui pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi kinerja secara berkala, serta melakukan penyesuaian kebijakan yang responsif dan terukur sesuai dengan dinamika usaha yang berkembang. Sejalan dengan arah tersebut, Perseroan telah menjalankan berbagai inisiatif strategis sepanjang tahun 2025, yang antara lain meliputi:

Sustainable Finance Action Plan (RAKB) as part of the Company's commitment to integrating sustainable finance principles into its business strategy and operations.

At the implementation stage, the Board of Directors ensures that strategies are executed effectively and consistently across all levels of the organization. This is carried out through strengthened governance, optimization of the roles of committees under the Board of Directors, and structured cross-functional coordination. The Board of Directors also conducts direct communication and dialogue with business units, including branch offices, to ensure alignment in understanding the strategic direction while obtaining insights into on-the-ground operational conditions.

The Board of Directors also performs an ongoing supervisory function through periodic performance monitoring, evaluation of target achievement, and responsive and measured policy adjustments in line with business developments. This approach enables the Company to remain agile in responding to changes while maintaining discipline in risk management and portfolio quality.

Overall, the Board of Directors ensures that all stages of the Company's management are carried out in an integrated manner, from planning to evaluation, by upholding good governance, prudent principles, and a long-term orientation. The active role of the Board of Directors at each stage is key to maintaining the Company's resilience and driving sustainable performance.

STRATEGIC PRIORITIES AND KEY INITIATIVES IN 2025

The Board of Directors views the financing industry in 2025 as continuing to face high uncertainty and pressure on consumer purchasing power. In response, the Company proactively defined and executed a strategic repositioning of its business, focused on strengthening fundamentals, improving portfolio quality, and sharpening risk management discipline to ensure sustainable performance under challenging market conditions.

In practice, the Board of Directors actively ensured the effectiveness of strategy implementation through continuous oversight, periodic performance evaluation, and responsive and measured policy adjustments in line with evolving business conditions. In line with this direction, the Company implemented several strategic initiatives throughout 2025, including:



1. Peningkatan pendapatan, dengan fokus pada penyaluran pembiayaan kepada segmen pelanggan baru melalui:
 - a) Pengelolaan basis data konsumen secara efektif melalui *telemarketing*;
 - b) Optimalisasi jaringan distribusi;
 - c) Inovasi saluran akuisisi pelanggan berbasis digital, khususnya melalui platform Kreditplus Mobile (KPM); dan
 - d) Ekspansi pasar ke luar Jawa, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan Indonesia Timur, serta menghindari persaingan langsung pada pasar yang jenuh.
2. Optimalisasi biaya umum dan operasional, melalui:
 - a) Efisiensi biaya teknologi dan informasi, antara lain melalui:
 - i. Peralihan ke vendor dengan biaya layanan yang lebih kompetitif; dan
 - ii. Renegosiasi atas kontrak layanan dengan vendor eksisting;
 - b) Penataan jaringan kantor melalui penutupan cabang dan unit kerja dengan kontribusi rendah dan tingkat efisiensi yang belum optimal; dan
 - c) Sentralisasi fungsi analisis kredit untuk meningkatkan efisiensi operasional dan biaya karyawan.
3. Penguatan proses digitalisasi, khususnya pada pengajuan aplikasi pembiayaan dan penagihan guna meningkatkan kenyamanan konsumen serta meminimalkan potensi *fraud* internal.
4. Peningkatan efisiensi penagihan, melalui optimalisasi peran dan efektivitas fungsi *desk collector*.
5. Pengelolaan pendanaan secara *prudent*, melalui:
 - a) Penarikan pinjaman secara selektif dengan mengutamakan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif;
 - b) Pemanfaatan fasilitas pinjaman jangka pendek (mingguan/bulanan) secara terukur dengan tetap memperhatikan rasio keuangan sesuai ketentuan internal; dan
 - c) Penarikan pinjaman secara bertahap (*batch*) sesuai kebutuhan guna mengoptimalkan biaya dana.

Direksi menilai bahwa implementasi berbagai strategi dan inisiatif strategis tersebut memerlukan waktu, sehingga dampaknya terhadap profitabilitas Perseroan pada tahun 2025 belum sepenuhnya terefleksi. Kinerja keuangan Perseroan masih berada di bawah target, dipengaruhi oleh tingginya pembentukan cadangan kerugian, peningkatan pembiayaan bermasalah seiring menurunnya kemampuan bayar debitur, meningkatnya tingkat pengangguran sebagai dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melemahnya konsumsi domestik, serta berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global.

1. Revenue enhancement, with a focus on financing disbursement to new customer segments through:
 - a) Effective management of the consumer database through telemarketing;
 - b) Optimization of the distribution Network;
 - c) Innovation in digital-based customer acquisition channels, particularly through the Kreditplus Mobile (KPM); and
 - d) Market expansion outside Java, including Kalimantan, Sulawesi, and Eastern Indonesia, while avoiding direct competition in saturated markets.
2. Optimization of general and operating expenses, through:
 - a) Efficiency in information technology costs, including:
 - i. Migration to vendors offering more competitive service fees; and
 - ii. Renegotiation of service contracts with existing vendors;
 - b) Rationalization of the branch network through the closure of branches and business units with low contribution and suboptimal efficiency levels; and
 - c) Centralization of the credit analyst function to improve operational efficiency and employee cost.
3. Strengthening digitalization processes, particularly in financing application submissions and collections, to enhance customer convenience and minimize the risk of internal fraud.
4. Improvement in collection efficiency, through optimization of the role and effectiveness of the desk collector function.
5. Prudent funding management, through:
 - a) Selective loan drawdowns, prioritizing funding sources with competitive interest rates;
 - b) Measured utilization of short-term borrowing facilities (weekly/monthly) while maintaining financial ratios in accordance with internal policies; and
 - c) Phased (batch) loan drawdowns based on funding needs to optimize cost of funds.

The Board of Directors acknowledges that the implementation of these strategies and initiatives requires time, and therefore their impact on the Company's profitability in 2025 has not been fully reflected. The Company's financial performance remained below target, affected by higher provisioning for losses, an increase in non-performing financing in line with declining debtor repayment capacity, rising unemployment due to layoffs, weaker domestic consumption, and continued global economic uncertainty.



Meskipun demikian, Direksi meyakini bahwa langkah penataan ulang strategi yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 akan menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan kinerja Perseroan ke depan. Dengan menaruh fokus pada penguatan kualitas portofolio, disiplin manajemen risiko, serta peningkatan efektivitas operasional, Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

KINERJA PERSEROAN TAHUN 2025 DAN REALISASI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET

Direksi menilai bahwa kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 berada dalam tekanan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan dinamika industri pembiayaan yang masih menantang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Direksi mengedepankan pendekatan strategi yang lebih *prudent* dengan memprioritaskan penguatan kualitas aset dan disiplin pengelolaan risiko, alih-alih mendorong pertumbuhan secara agresif guna menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas kinerja Perseroan.

Sebagai implikasi dari pendekatan yang lebih selektif tersebut, aktivitas bisnis Perseroan sepanjang tahun 2025 mengalami moderasi, khususnya pada penyaluran pembiayaan baru. Pada posisi 31 Desember 2025, total pembiayaan baru tercatat sebesar Rp3,98 triliun, menurun 48,4% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,72 triliun. Capaian tersebut juga sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi sekitar 50,2%. Penurunan penyaluran pembiayaan baru selama 2025 dipengaruhi oleh penurunan pada pembiayaan kembali (*refinancing*) sepeda motor bekas serta pembiayaan DE&A dan penerapan strategi ekspansi yang lebih selektif.

Sejalan dengan moderasi aktivitas pembiayaan, maka portofolio pembiayaan Perseroan turut mengalami penurunan dengan posisi saldo piutang pembiayaan (*outstanding*) tercatat sebesar Rp3,96 triliun, lebih rendah 47,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,55 triliun. Penurunan ini sejalan dengan strategi Perseroan yang mengedepankan penyaluran pembiayaan baru secara lebih selektif serta percepatan pelunasan pada portofolio eksisting.

Penyesuaian strategi bisnis Perseroan yang tidak lagi berfokus pada pembiayaan kendaraan roda empat bekas (4W), serta pengalihan portofolio ke produk dengan tenor yang lebih pendek menyebabkan penyaluran pembiayaan menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini turut memengaruhi profil risiko pembiayaan Perseroan sehingga rasio *Non-Performing Financing* (NPF) - Neto

Nevertheless, The Board of Directors remains confident that the strategic repositioning carried out throughout 2025 will provide a strong foundation for future performance improvement. With a focus on strengthening portfolio quality, enforcing risk management discipline, and enhancing operational effectiveness, the Company is well positioned to achieve healthy and sustainable growth going forward.

COMPANY PERFORMANCE IN 2025 AND ACHIEVEMENT AGAINST TARGETS

The Board of Directors assesses that the Company's performance in 2025 was under pressure compared to the previous year, in line with the still-challenging dynamics of the financing industry. In addressing these conditions, the Board of Directors adopted a more prudent strategic approach by prioritizing asset quality strengthening and disciplined risk management, rather than pursuing aggressive growth, to safeguard business continuity and performance stability.

As a result of this more selective approach, the Company's business activities in 2025 experienced moderation, particularly in new financing disbursements. As of December 31, 2025, total new financing amounted to IDR3.98 trillion, a decrease of 48.4% compared to IDR7.72 trillion in 2024. This achievement was slightly below the established target, with a realization rate of approximately 50.2%. The decline in new financing disbursements in 2025 was driven by a decrease in refinancing for used motorcycles and DE&A financing, as well as the implementation of a more selective expansion strategy.

In line with the moderation in financing activities, the Company's financing portfolio also declined, with outstanding financing receivables recorded at IDR3.96 trillion, 47.6% lower than IDR7.55 trillion in the previous year. This decrease is consistent with the Company's strategy to adopt a more selective approach in new financing disbursement and to accelerate repayments in the existing portfolio.

The adjustment of the Company's business strategy, which no longer focuses on used four-wheeled vehicle (4W) financing, along with the shift in portfolio toward products with shorter tenors, resulted in a significant decline in financing disbursement compared to the previous year. This condition also affected the Company's financing risk profile, with the net Non-Performing Financing (NPF)



meningkat dari 2,80% pada tahun 2024 menjadi 3,74% pada tahun 2025. Kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan kualitas pembiayaan, khususnya yang berasal dari penyaluran pembiayaan baru (*new booking*) kendaraan roda empat pada periode sebelumnya.

Sejalan dengan penurunan aktivitas pembiayaan tersebut, kinerja pendapatan Perseroan yang mayoritas berasal dari kegiatan pembiayaan turut mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,75 triliun, menurun 10,4% dibandingkan Rp1,95 triliun pada tahun sebelumnya, serta mencapai 96,4% dari target yang telah ditetapkan. Dampak penurunan pendapatan tersebut tercermin pada kinerja profitabilitas Perseroan yang mengalami tekanan sehingga rugi bersih meningkat menjadi Rp857,60 miliar pada tahun 2025. Peningkatan rugi tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang dilakukan secara konservatif sebagai langkah antisipatif terhadap peningkatan risiko kredit.

Sejalan dengan strategi yang lebih selektif, Perseroan tidak melakukan ekspansi produk secara agresif sepanjang tahun 2025 dan melakukan penyesuaian portofolio dengan menghentikan penyaluran pembiayaan pada segmen mobil bekas serta produk *factoring* seiring meningkatnya profil risiko pada kedua segmen tersebut. Meskipun kinerja pembiayaan dan profitabilitas belum mencapai target, Direksi memandang langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari fase konsolidasi untuk memperkuat fundamental bisnis, sehingga diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja serta pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan ke depan.

TANTANGAN UTAMA DAN STRATEGI MITIGASI PERSEROAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi tekanan yang cukup signifikan yang berasal dari kombinasi faktor eksternal dan internal, yang secara langsung mempengaruhi kinerja pembiayaan, kualitas portofolio, serta tingkat profitabilitas. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut, dipicu oleh meningkatnya tensi perdagangan internasional, dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat, serta konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya stabilitas ekonomi global dan menurunnya tingkat kepercayaan pelaku usaha, yang pada akhirnya turut menekan aktivitas ekonomi domestik.

Di sisi domestik, perlambatan daya beli masyarakat menjadi tantangan utama yang berdampak pada menurunnya kapasitas pembayaran debitur di berbagai wilayah operasional Perseroan. Penurunan kemampuan bayar ini

ratio increasing from 2.80% in 2024 to 3.74% in 2025. The increase was also influenced by the deterioration in financing quality, particularly from new bookings of four-wheeled vehicle financing in prior periods.

In line with the decline in financing activities, the Company's revenue, which is predominantly derived from financing activities, also decreased. Throughout 2025, the Company recorded revenue of IDR1.75 trillion, down 10.4% from IDR1.95 trillion in the previous year, and achieving 96.4% of the established target. The decline in revenue impacted the Company's profitability, resulting in increased pressure and a higher net loss of IDR857.60 billion in 2025. The increase in net loss was primarily driven by higher impairment loss provisions, recognized conservatively as a precautionary measure against rising credit risk.

Matched with the more selective strategy, the Company did not pursue aggressive product expansion in 2025 and adjusted its portfolio by discontinuing financing in the used car segment and factoring products, in response to the increasing risk profile in both segments. Although financing performance and profitability have not yet met targets, the Board of Directors views these measures as part of a consolidation phase to strengthen business fundamentals, which is expected to support performance improvement and drive healthier and more sustainable growth going forward.

KEY CHALLENGES AND MITIGATION STRATEGIES IN 2025

Throughout 2025, the Company faced significant pressure arising from a combination of external and internal factors, which directly affected financing performance, portfolio quality, and profitability. From an external perspective, global economic uncertainty persisted, driven by rising international trade tensions, developments in United States tariff policies, and geopolitical conflicts in the Middle East. These conditions weakened global economic stability and reduced business confidence, which in turn put pressure on domestic economic activity.

On the domestic side, weakening purchasing power became a key challenge, affecting the repayment capacity of debtors across the Company's operational areas. This decline in repayment capacity directly increased credit



secara langsung meningkatkan risiko kredit serta menekan kualitas aset pembiayaan. Selain itu, perubahan regulasi pada beberapa sektor industri, khususnya pertambangan dan konstruksi, turut memberikan tekanan terhadap arus kas konsumen sehingga berimplikasi pada terganggunya kelancaran pemenuhan kewajiban pembiayaan.

Dari perspektif internal, tekanan tersebut semakin diperkuat oleh berakhirnya program relaksasi COVID-19 pada tahun 2024, yang mengakibatkan normalisasi profil risiko debitur dan meningkatkan tekanan terhadap kualitas pembayaran. Di samping itu, kualitas pembiayaan pada periode sebelumnya yang belum sepenuhnya optimal terutama pada segmen kendaraan roda empat bekas, serta pembiayaan *factoring* (anjak piutang) turut berkontribusi terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah. Kombinasi kondisi tersebut mendorong peningkatan kebutuhan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang pada akhirnya berdampak pada penurunan profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Dalam merespons berbagai tekanan tersebut, Perseroan mengambil langkah mitigasi secara terukur dengan menitikberatkan pada stabilitas kinerja serta penguatan fundamental bisnis secara berkelanjutan, salah satunya dengan memperkuat struktur permodalan melalui penerimaan pinjaman subordinasi dari *International Finance Corporation* (IFC) sebesar Rp247,8 miliar, serta penerbitan saham bonus senilai Rp200 miliar yang telah memperoleh persetujuan OJK. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kecukupan permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas Perseroan dalam mengelola risiko di tengah kondisi pasar yang menantang.

Dari sisi operasional, Perseroan juga melakukan penguatan manajemen risiko secara komprehensif melalui perbaikan proses penagihan, penetapan kriteria *underwriting*, serta penyempurnaan kebijakan mitigasi risiko, khususnya pada produk pembiayaan roda dua dan DE&A. Selain itu, Perseroan melakukan penyesuaian strategi ekspansi dengan lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan, antara lain melalui pembatasan akuisisi pelanggan baru dan *channel* agen, serta mengarahkan fokus pada pembiayaan kepada pelanggan eksisting melalui skema *Repeat Order* (RO) dan *Additional Order* (AO) yang memiliki profil risiko lebih terukur dan historis pembayaran yang lebih baik.

Sejalan dengan upaya penyehatan portofolio, Perseroan mengambil langkah strategis dengan menghentikan penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas di seluruh wilayah operasional, serta mengalihkan fokus pada optimalisasi aktivitas *collection* dan *recovery* pada segmen tersebut guna mempercepat perbaikan kualitas aset dan meminimalkan potensi risiko lanjutan. Keputusan

risk and put pressure on the quality of financing assets. In addition, regulatory changes in several sectors, particularly mining and construction, affected consumer cash flows and disrupted the timely fulfillment of financing obligations.

From an internal perspective, these pressures were further intensified by the expiration of COVID-19 relaxation programs in 2024, which led to the normalization of debtor risk profiles and increased pressure on payment quality. In addition, the quality of financing in prior periods that had not been fully optimal particularly in the used car financing, and factoring also contributed to the increase in non-performing financing. These combined conditions led to a higher requirement for impairment loss provisions (CKPN), which ultimately affected profitability and the Company's overall financial performance.

In response to these pressures, the Company implemented measured mitigation steps with a focus on performance stability and strengthening business fundamentals on a sustained basis. One of the key actions was strengthening the capital structure through the receipt of a subordinated loan from the International Finance Corporation (IFC) amounting to IDR247.8 billion, along with the issuance of bonus shares totaling IDR200 billion, which has obtained approval from the OJK. These measures are critical in maintaining capital adequacy and enhancing the Company's capacity to manage risk under challenging market conditions.

From an operational perspective, the Company also strengthened risk management comprehensively through improvements in collection processes, tighter underwriting criteria, and enhancements in risk mitigation policies, particularly for two-wheeled vehicle financing and Digital Electronics & Appliances (DE&A). In addition, the Company adjusted its expansion strategy by adopting a more selective approach in financing disbursement, including limiting new customer acquisition and agent channels, while focusing on financing for existing customers through Repeat Order (RO) and Additional Order (AO) schemes, which have more measurable risk profiles and stronger payment histories.

In line with portfolio improvement efforts, the Company implemented a strategic measure by discontinuing used car financing across all operational areas and shifting its focus to optimizing collection and recovery activities in this segment to accelerate asset quality improvement and minimize further risk exposure. This decision was based on a comprehensive evaluation indicating that the return level



ini didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh yang menunjukkan bahwa tingkat imbal hasil segmen tersebut tidak sebanding dengan profil risiko yang dihadapi, termasuk mempertimbangkan tekanan dari rendahnya tingkat suku bunga serta tingginya kewajiban pengembalian dana kepada *dealer*.

Secara keseluruhan, rangkaian langkah mitigasi yang telah ditempuh sepanjang tahun berjalan mencerminkan respons strategis Perseroan yang terarah, terukur, dan disiplin dalam menjaga stabilitas kinerja di tengah tekanan eksternal dan internal yang masih berlanjut. Implementasi berbagai inisiatif tersebut tidak hanya difokuskan pada penanganan risiko dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi bisnis secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas aset, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasi struktur operasional dan permodalan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis prinsip kehati-hatian, Direksi meyakini bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan ketahanan bisnis, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta menghasilkan kinerja yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) SEBAGAI *ENABLER* BISNIS PEMBIAYAAN

Dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan yang semakin kompetitif, Perseroan secara konsisten memperkuat peran sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) sebagai *enabler* strategis yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Sinergi antara kapabilitas SDM yang unggul dan pemanfaatan TI yang andal menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas operasional, kualitas layanan, serta daya saing Perseroan secara berkelanjutan.

Terkait pengelolaan SDM, Perseroan menempatkan pengembangan kompetensi karyawan sebagai prioritas utama guna memastikan kesiapan organisasi dalam menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan 11 program pelatihan dengan tingkat partisipasi mencapai 66% dari target, serta 7 program sertifikasi dengan jumlah peserta mencapai 126,2% dari rencana. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mencatat total jam pembelajaran sebesar 164 jam dalam setahun, atau rata-rata 9,11 jam per karyawan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp13,19 miliar atau setara dengan 91% dari total biaya pengembangan SDM pada tahun sebelumnya.

of this segment was not commensurate with its risk profile, taking into account pressure from low interest rates and high repayment obligations to dealers.

Overall, the mitigation measures implemented throughout the year reflect a focused, measured, and disciplined strategic response to maintain performance stability under continued external and internal pressures. The implementation of these initiatives is not only aimed at addressing short-term risks but also at strengthening the Company's overall business foundation through improved asset quality, enhanced risk management, and optimization of operational and capital structures. By adopting a more selective and prudent approach, the Board of Directors believes that the Company is on the right path to strengthening business resilience, maintaining sustainable growth, and delivering healthier and more sustainable performance over the medium to long term.

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES (HR) AND INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AS ENABLERS OF THE FINANCING BUSINESS

In response to increasingly competitive dynamics in the financing industry, the Company consistently strengthened the role of human resources (HR) and information technology (IT) as strategic enablers supporting business continuity and development. The synergy between strong human capital capabilities and reliable information technology serves as a key foundation for improving operational effectiveness, service quality, and the Company's competitiveness on a sustained basis.

In managing HR, the Company places employee competency development as a key priority to ensure organizational readiness in meeting evolving business needs. Throughout 2025, the Company implemented 11 training programs, with a participation rate reaching 66% of the target, and 7 certification programs with participation reaching 126.2% of the planned target. In total, training activities recorded 164 learning hours during the year, or an average of 9.11 hours per employee. To support these programs, the Company realized a budget of IDR13.19 billion, equivalent to 91% of the total human capital development cost in the previous year.



Sebagai bagian dari penguatan pengelolaan SDM secara menyeluruh, Perseroan juga melakukan penataan tenaga kerja secara lebih terarah melalui penyesuaian struktur organisasi dan penerapan kebijakan rekrutmen yang selektif. Sepanjang tahun 2025, jumlah karyawan baru yang direkrut tercatat sebanyak 1.718 orang, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencerminkan langkah efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional. Di sisi lain, tingkat keterikatan karyawan menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari skor *employee engagement* sebesar 8,71 pada aspek *clear and promising direction*, yang menunjukkan kuatnya kepercayaan karyawan terhadap arah strategis Perseroan.

Pada saat yang sama, Perseroan juga mengakselerasi pemanfaatan TI sebagai *enabler* operasional dan bisnis. Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menjaga keandalan sistem dengan capaian *system uptime* sebesar 99,25%, serta meningkatkan efisiensi operasional hingga 25% melalui optimalisasi infrastruktur berbasis *cloud*.

Lebih lanjut, berbagai inisiatif strategis di bidang TI turut direalisasikan untuk memperkuat efektivitas operasional dan kualitas layanan, antara lain melalui integrasi sistem *Customer Relationship Management* (CRM), penguatan pengembangan aplikasi secara terintegrasi, serta pengembangan fitur digital pada aplikasi Kreditplus Mobile guna meningkatkan kemudahan transaksi dan pengalaman nasabah. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan Perseroan dalam merespons kebutuhan pasar secara lebih cepat dan tepat.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan nasabah, Perseroan juga terus memperkuat tata kelola dan keamanan teknologi informasi melalui penerapan standar internasional, peningkatan sistem pengamanan data, serta implementasi *Disaster Recovery Center* (DRC). Langkah ini memastikan bahwa seluruh layanan digital Perseroan tetap berjalan secara andal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, sinergi antara SDM yang kompeten dan adaptif dengan dukungan TI yang terintegrasi telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat pengelolaan risiko, serta mendorong inovasi layanan pembiayaan. Dengan fondasi tersebut, Perseroan mampu menjaga kualitas portofolio, meningkatkan pengalaman nasabah, serta memperkuat posisi kompetitif di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

As part of strengthening overall HR management, the Company also optimized workforce management through organizational restructuring and the implementation of a more selective recruitment policy. Throughout 2025, the number of new hires reached 1,718 employees, lower than the previous year, reflecting efficiency measures to improve productivity and operational effectiveness. In parallel, employee engagement showed positive results, reflected in an employee engagement score of 8.71 in the clear and promising direction dimension, indicating strong employee confidence in the Company's strategic direction.

At the same time, the Company accelerated the utilization of information technology as an operational and business enabler. Throughout 2025, the Company maintained system reliability with system uptime reaching 99.25% and improved operational efficiency by 25% through the optimization of cloud-based infrastructure.

Further strategic initiatives in IT were implemented to strengthen operational effectiveness and service quality, including the integration of Customer Relationship Management (CRM) systems, enhancement of integrated application development, and the development of digital features within the Kreditplus Mobile application to improve transaction convenience and customer experience. These initiatives not only improved business process efficiency but also strengthened the Company's ability to respond to market needs in a timely and precise manner.

To ensure operational continuity and maintain customer trust, the Company also strengthened information technology governance and security through the implementation of international standards, enhancement of data security systems, and the implementation of a Disaster Recovery Center (DRC). These measures ensure that the Company's digital services operate reliably, securely, and in compliance with applicable regulations.

Overall, the synergy between competent and adaptive HR and integrated IT has contributed to improving efficiency, strengthening risk management, and driving innovation in financing services. With this foundation, the Company is able to maintain portfolio quality, enhance customer experience, and strengthen its competitive position in an evolving industry landscape.



PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Direksi memandang bahwa prospek industri pembiayaan pada tahun 2026 masih akan diwarnai oleh sejumlah tantangan yang bersumber dari dinamika ekonomi global maupun domestik. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap berada pada level moderat dengan proyeksi sekitar 3,3% (YoY) sebagaimana tercantum dalam publikasi *International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook Update* edisi Januari 2026. Proyeksi tersebut mencerminkan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global, yang dipicu antara lain oleh meningkatnya proteksionisme dan tensi perdagangan, potensi disrupsi pada pasar tenaga kerja, kerentanan fiskal di sejumlah negara, serta ketegangan geopolitik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar keuangan global.

Di tengah tekanan global tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap menunjukkan ketahanan yang solid, sebagaimana tercermin dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4% (YoY). Kinerja ini ditopang oleh konsumsi domestik yang tetap terjaga sebagai motor utama pertumbuhan, serta aktivitas investasi yang relatif resilien. Selain itu, arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada penguatan sektor-sektor strategis termasuk ketahanan pangan, energi, dan penguatan struktur ekonomi nasional juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan moneter, BI memberikan sinyal akan mempertahankan BI-Rate pada level 4,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75% dan *Lending Facility* sebesar 5,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran target 2,5% $\pm$ 1%. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi pemulihan permintaan kredit secara bertahap. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa efektivitas kebijakan moneter akan mulai memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan permintaan kredit di tahun 2026.

Meskipun prospek ekonomi domestik relatif terjaga, Direksi memandang bahwa industri pembiayaan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, khususnya meningkatnya intensitas persaingan seiring dengan agresivitas penetrasi pasar oleh perbankan, perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan grup usaha besar maupun pabrikan otomotif, serta berkembangnya *platform* pembiayaan berbasis teknologi. Di sisi lain, tekanan terhadap daya beli masyarakat terutama pada segmen menengah ke bawah masih berpotensi berlanjut sehingga dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit dan menekan kualitas aset industri secara keseluruhan.

BUSINESS OUTLOOK FOR 2026

The Board of Directors views the outlook for the financing industry in 2026 as remaining subject to several challenges arising from both global and domestic economic dynamics. Global economic growth is projected to remain at a moderate level, with an estimated growth rate of approximately 3.3% (YoY), as stated in the *International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook Update* published in January 2026. This projection reflects the continuation of global economic uncertainty, driven by rising protectionism and trade tensions, potential disruptions in the labor market, fiscal vulnerabilities in several countries, and geopolitical tensions that may affect the stability of global financial markets.

Under these global pressures, Indonesia's economy is projected to maintain solid resilience, as reflected in the 2026 State Budget (APBN) economic growth target of 5.4% (YoY). This performance is supported by stable domestic consumption as the main growth driver, along with relatively resilient investment activity. In addition, government policy direction focused on strengthening strategic sectors, including food security, energy, and the national economic structure, is expected to maintain stability while encouraging more inclusive and sustainable economic growth.

From a monetary policy perspective, Bank Indonesia has signaled that it will maintain the BI-Rate at 4.75%, with the *Deposit Facility* rate at 3.75% and the *Lending Facility* rate at 5.50%. This policy is intended to maintain Rupiah exchange rate stability and ensure that inflation remains within the target range of 2.5% $\pm$ 1%. At the same time, the policy is expected to provide room for a gradual recovery in credit demand. In line with this, Bank Indonesia projects that the effectiveness of monetary policy will begin to have a more tangible impact on increasing credit demand in 2026.

Although the domestic economic outlook remains relatively stable, the Board of Directors believes that the financing industry will continue to face structural challenges, particularly increasing competition intensity driven by aggressive market penetration by banks, financing companies affiliated with large business groups or automotive manufacturers, and the growth of technology-based financing platforms. At the same time, pressure on purchasing power, particularly in the lower- to middle-income segments, may continue and could lead to increased credit risk and pressure on overall industry asset quality.



Bagi Perseroan, dinamika tersebut berimplikasi langsung terhadap proyeksi kinerja pada tahun 2026, khususnya berpotensi meningkatkan rasio NPF dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sehingga menjadi area utama yang perlu dipulihkan secara bertahap. Sementara itu, segmen pembiayaan kendaraan roda empat juga diperkirakan masih berada dalam tekanan akibat tingginya persaingan dan kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih sehingga Perseroan berencana untuk mengadopsi strategi yang lebih selektif pada segmen tersebut.

Dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi dan *outlook* industri ke depan, Perseroan akan memprioritaskan pemulihan kinerja keuangan dan kualitas portofolio dibandingkan melakukan strategi ekspansi yang agresif melalui penerapan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih selektif dan berbasis manajemen risiko dengan penekanan pada perbaikan rasio-rasio keuangan utama. Namun demikian, Direksi menyadari bahwa proses pemulihan ini memerlukan waktu sehingga diharapkan dapat berlangsung secara bertahap dan terukur sepanjang tahun 2026.

Untuk mendukung arah strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan sejumlah langkah prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas aset, penguatan efektivitas penagihan, serta optimalisasi efisiensi operasional. Dari sisi bisnis, Perseroan akan memprioritaskan pengembangan portofolio pada segmen dengan profil risiko yang lebih terukur dan sejalan dengan kompetensi inti, khususnya pembiayaan kendaraan roda dua dan DE&A. Sementara itu dari sisi operasional, Perseroan juga akan melanjutkan inisiatif efisiensi melalui optimalisasi struktur organisasi dan jaringan distribusi, serta peningkatan produktivitas dan efektivitas proses bisnis secara berkelanjutan.

Pada jangka menengah, Perseroan akan memfokuskan strategi pada penguatan profitabilitas dan tata kelola melalui pengembangan portofolio pembiayaan yang lebih berkualitas, penguatan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, serta percepatan digitalisasi guna mendukung efisiensi operasional dan mitigasi risiko. Dalam jangka panjang, Perseroan akan berfokus pada penguatan keberlanjutan usaha melalui peningkatan kepercayaan konsumen, pengembangan kapabilitas SDM, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan inovasi digital secara konsisten.

For the Company, these dynamics have direct implications for its performance outlook in 2026, particularly the potential increase in the Non-Performing Financing (NPF) ratio and the Operating Expenses to Operating Income ratio (BOPO), making these key areas that require gradual improvement. Meanwhile, the four-wheeled vehicle financing segment is expected to remain under pressure due to intense competition and market conditions that have not fully recovered, leading the Company to adopt a more selective strategy in this segment.

Taking into account the macroeconomic analysis and industry outlook, the Company will prioritize the recovery of financial performance and portfolio quality rather than pursuing aggressive expansion strategies, through the implementation of more selective financing disbursement policies based on risk management principles, with a focus on improving key financial ratios. The Board of Directors acknowledges that this recovery process will require time and is expected to take place gradually and in a measured manner throughout 2026.

To support this strategic direction, the Company has established several priority actions focused on improving asset quality, strengthen collection effectiveness, and optimize operational efficiency. From a business perspective, the Company will prioritize portfolio development in segments with more measurable risk profiles and aligned with core competencies, particularly two-wheeled vehicle financing and Digital Electronics & Appliances (DE&A). From an operational perspective, the Company will continue efficiency initiatives by optimizing of organizational structure and distribution networks, as well as by continuously productivity and business process effectiveness.

In the medium term, the Company will focus its strategy on strengthening profitability and governance through the development of higher-quality financing portfolios, strengthening risk management systems and internal controls, and accelerating digitalization to support operational efficiency and risk mitigation. In the long term, the Company will focus on strengthening business sustainability through enhancing customer trust, developing human capital capabilities, and consistently implementing sustainability principles and digital innovation.



Sejalan dengan arah strategis tersebut, Direksi memandang bahwa meskipun industri pembiayaan pada tahun 2026 masih berada dalam tekanan, peluang pertumbuhan tetap terbuka, didukung oleh stabilitas ekonomi domestik dan potensi pemulihan permintaan kredit. Dengan menerapkan strategi yang selektif, disiplin dalam pengelolaan risiko, serta penguatan fundamental bisnis, Perseroan optimistis dapat melalui fase pemulihan dan secara bertahap membangun kinerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Direksi memastikan bahwa seluruh pengelolaan kegiatan usaha Perseroan senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG"). Sejalan dengan karakteristik industri pembiayaan yang semakin dinamis dan diatur secara ketat, penerapan GCG tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas organisasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan keberlangsungan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, Perseroan secara konsisten menginternalisasikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran ke dalam seluruh proses bisnis dan jenjang organisasi. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas pada level kantor pusat, namun juga diterapkan secara menyeluruh hingga ke unit bisnis dan jaringan cabang guna memastikan konsistensi standar tata kelola di seluruh lini operasional.

Penerapan GCG di lingkup Perseroan tercermin dari efektivitas peran dan fungsi organ tata kelola yang diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, Direksi, serta komite secara berkala, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan tersebut semakin diperkuat oleh penguatan fungsi pengawasan, manajemen risiko yang komprehensif, serta sistem pengendalian internal yang memadai sehingga memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara independen, objektif, dan *prudent*.

Sejalan dengan penguatan struktur dan mekanisme tata kelola tersebut, Perseroan juga memastikan keselarasan dengan dinamika regulasi yang berlaku melalui pengembangan, penerbitan, dan pemutakhiran kebijakan internal secara berkelanjutan sebagai turunan dari Pedoman GCG, yang diantaranya mencakup Pedoman Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), Kode Etik Perusahaan, kebijakan remunerasi, serta berbagai standar

In line with this strategic direction, the Board of Directors believes that although the financing industry in 2026 will remain under pressure, growth opportunities remain available, supported by domestic economic stability and the potential recovery in credit demand. By implementing a selective strategy, maintaining discipline in risk management, and strengthening business fundamentals, the Company is confident in navigating the recovery phase and gradually build healthier and more sustainable performance.

THE COMPANY'S COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors ensures that all business activities of the Company are conducted in accordance with prevailing laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG). In line with the increasingly dynamic and highly regulated nature of the financing industry, the implementation of GCG is not only positioned as a matter of regulatory compliance, but as a fundamental framework to maintain organizational integrity, strengthen stakeholder trust, and ensure the Company's long-term sustainability.

In conducting its financing activities, the Company consistently internalizes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across all business processes and organizational levels. The implementation of these principles is not limited to the head office, but is applied consistently across business units and branch networks to ensure uniform governance standards throughout all operational lines.

The implementation of GCG within the Company is reflected in the effective roles and functions of governance organs, demonstrated through the regular, structured, and well-documented meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and committees. This implementation is further supported by strengthened oversight functions, comprehensive risk management, and an adequate internal control system, ensuring that decision-making processes are carried out independently, objectively, and prudently.

In line with the strengthening of governance structures and mechanisms, the Company also ensures alignment with regulatory developments through the continuous development, issuance, and updating of internal policies derived from the GCG framework. These include, among others, the Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines, the Code of Conduct, remuneration policies, and various operational standards and procedures aligned



operasional dan prosedur kerja lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan OJK dan praktik terbaik di industri pembiayaan. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Perseroan dalam memperkuat budaya kepatuhan serta memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan secara *prudent*, transparan, dan akuntabel.

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan GCG yang efektif, Perseroan secara konsisten melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas implementasi GCG dengan mengacu pada parameter dan metodologi yang ditetapkan oleh regulator, antara lain mencakup evaluasi struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola. Berdasarkan penilaian tahun buku 2025, Perseroan memperoleh skor komposit “3” pada kategori “Cukup Baik,” yang mencerminkan bahwa penerapan GCG secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, komitmen Perseroan terhadap penerapan GCG juga tercermin dari tidak adanya sanksi yang dikenakan oleh regulator kepada Perseroan serta tidak ditemukannya insiden kebocoran data debitur sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta pengendalian internal Perseroan telah berjalan secara efektif dalam menjaga integritas operasional dan keamanan informasi.

Direksi memandang bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari proses penguatan penerapan tata kelola yang terus berjalan di Perseroan. Ke depan, Perseroan akan melanjutkan upaya perbaikan secara bertahap melalui peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan implementasi di seluruh unit kerja hingga tingkat cabang, serta melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika regulasi dan perkembangan industri.

KOMITMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN SESUAI PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam lanskap industri jasa keuangan yang semakin menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas, Perseroan secara konsisten mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi dan operasional bisnis. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk menjaga pertumbuhan usaha jangka panjang yang berkelanjutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembiayaan memberikan nilai tambah yang seimbang antara aspek ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, serta berdampak positif bagi masyarakat. Implementasi komitmen tersebut dijalankan secara terstruktur melalui RAKB Tahun 2025 yang menjadi acuan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh rantai nilai bisnis Perseroan.

with OJK regulations and industry best practices. These efforts are an integral part of strengthening the Company’s compliance culture and ensuring that all business activities are conducted in a prudent, transparent, and accountable manner.

As part of its commitment to effective GCG implementation, the Company consistently conducts self-assessments of its GCG practices based on parameters and methodologies established by the regulator, including evaluations of governance structure, processes, and outcomes. Based on the 2025 assessment, the Company obtained a composite score of “3” in the “Fairly Good” category, indicating that overall GCG implementation has been adequately carried out, while still providing room for further improvement to enhance governance effectiveness on an ongoing basis.

Furthermore, the Company’s commitment to GCG is also reflected in the absence of regulatory sanctions imposed on the Company and the absence of any debtor data breach incidents throughout 2025. This demonstrates that the Company’s compliance function, risk management, and internal control systems have operated effectively in maintaining operational integrity and information security.

The Board of Directors considers these achievements as part of the ongoing process of strengthening governance implementation within the Company. Going forward, the Company will continue its improvement efforts through enhancing oversight effectiveness, strengthening implementation across all business units down to the branch level, and adjusting policies in line with regulatory developments and industry trends.

COMMITMENT TO FINANCING PRACTICES ALIGNED WITH SUSTAINABLE FINANCE PRINCIPLES

In an increasingly sustainability-focused financial services landscape, the Company consistently integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business strategy and operations. This approach is intended not only to support sustainable long-term growth, but also to ensure that all financing activities deliver balanced value across economic aspects, environmental preservation, and positive social impact. The implementation of this commitment is carried out in a structured manner through the 2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB), which serves as the primary reference for integrating sustainability principles across the Company’s value chain.



Sesuai RAKB Tahun 2025, strategi keberlanjutan Perseroan difokuskan pada penguatan portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan, penerapan operasional yang ramah lingkungan, serta penguatan budaya organisasi berbasis ESG. Perseroan secara bertahap mengarahkan penyaluran pembiayaan pada sektor dan produk yang mendukung ekonomi rendah emisi, serta diiringi dengan penguatan kebijakan manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Meskipun demikian, Direksi menyadari bahwa implementasi Keuangan Berkelanjutan di Perseroan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik yang bersumber dari dinamika pasar maupun faktor internal. Adapun tingkat adopsi pembiayaan kendaraan ramah lingkungan yang masih relatif terbatas, serta tingginya sensitivitas harga pada segmen tertentu masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan portofolio pembiayaan hijau Perseroan. Di sisi internal, kapabilitas serta pemahaman ESG juga masih perlu terus diperkuat. Dari sisi internal, Direksi memandang bahwa kapabilitas dan pemahaman ESG di lingkungan Perseroan masih perlu terus diperkuat, khususnya di kalangan karyawan sebagai pelaksana utama proses bisnis. Sebagai respon, Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan pengembangan kapasitas melalui program edukasi dan peningkatan literasi ESG, serta melakukan penyelarasan kebijakan internal secara adaptif terhadap dinamika regulasi dan praktik terbaik di industri.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan sejumlah capaian dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan. Pada aspek ekonomi, total penyaluran pembiayaan tercatat senilai Rp3,96 triliun, dengan kontribusi pembiayaan berwawasan lingkungan sebesar 1,80% dari total portofolio, yang antara lain mencakup pembiayaan kendaraan listrik dan *hybrid* sebanyak 176 unit serta pembiayaan produk elektronik ramah lingkungan sebesar Rp36,09 miliar. Capaian ini mencerminkan langkah awal yang terukur dalam mendorong pertumbuhan portofolio pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Dari aspek lingkungan hidup, Perseroan terus memperkuat penerapan praktik operasional yang ramah lingkungan melalui berbagai inisiatif efisiensi sumber daya energi, antara lain melalui pengendalian penggunaan energi listrik, optimalisasi konsumsi bahan bakar, serta percepatan digitalisasi proses bisnis guna mengurangi penggunaan kertas, disertai dengan penerapan prinsip pengelolaan limbah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) serta pemenuhan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku tanpa adanya pelanggaran sepanjang tahun pelaporan.

In accordance with the 2025 RAKB, the Company's sustainability strategy focuses on strengthening environmentally oriented financing portfolios, implementing environmentally responsible operations, and reinforcing an ESG-based organizational culture. The Company is gradually directing financing toward sectors and products that support a low-emission economy, supported by strengthened risk management policies that incorporate environmental and social considerations into financing decision-making processes.

However, the Board of Directors recognizes that the implementation of Sustainable Finance within the Company continues to face several challenges, both arising from market dynamics and internal factors. The relatively limited adoption of environmentally friendly vehicle financing, along with high price sensitivity in certain segments, remains a primary constraint in developing the Company's green financing portfolio. From an internal perspective, ESG capabilities and understanding still require continuous strengthening. The Board of Directors further considers that ESG capabilities and understanding across the Company must continue to be enhanced, particularly among employees as the primary executors of business processes. In response, the Company continues to strengthen capacity development through ESG education and literacy programs, while also aligning internal policies in an adaptive manner with evolving regulatory dynamics and industry best practices.

Throughout 2025, the Company recorded several achievements in the implementation of Sustainable Finance. From an economic perspective, total financing disbursement amounted to IDR3.96 trillion, with environmentally oriented financing contributing 1.80% of the total portfolio. This includes financing for 176 electric and hybrid vehicles, as well as environmentally friendly electronic products totaling IDR36.09 billion. These achievements represent measured initial progress in developing a more sustainable financing portfolio.

From an environmental aspect, the Company continued to strengthen environmentally responsible operational practices through various energy efficiency initiatives, including managing electricity consumption, optimizing fuel usage, and accelerating the digitalization of business processes to reduce paper usage. These efforts were supported by the implementation of waste management practices based on *reduce, reuse, and recycle* (3R) principles, while maintaining full compliance with applicable environmental regulations without any violations during the reporting year.



Pada aspek sosial, Perseroan menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan bantuan pendidikan, termasuk donasi kepada Panti Asuhan Putra Nusa sebesar Rp13 juta, serta kegiatan sosial lainnya di wilayah operasional. Secara keseluruhan, realisasi anggaran TJSL Perseroan pada tahun ini tercatat sebesar Rp42 juta, meningkat dibandingkan tahun lalu.

Selain berkontribusi kepada masyarakat, Perseroan juga menempatkan aspek sosial dalam pengelolaan SDM sebagai prioritas utama. Di sisi internal, Perseroan memastikan penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut tercermin dari tidak adanya laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), diskriminasi, maupun praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tahun 2025.

Direksi meyakini bahwa penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan merupakan pilar strategis dalam memperkuat ketahanan bisnis Perseroan sekaligus menegaskan perannya sebagai institusi pembiayaan yang bertanggung jawab. Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan portofolio pembiayaan hijau, peningkatan kualitas pengelolaan risiko ESG, serta pengembangan inovasi produk dan layanan yang memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan Perseroan, Direksi didukung oleh sejumlah komite yang berperan strategis, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas. Keberadaan komite-komite tersebut memiliki peran signifikan dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan melalui penyediaan analisis, kajian, serta rekomendasi yang komprehensif dan berbasis prinsip kehati-hatian, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah bisnis Direksi telah melalui proses evaluasi yang memadai, terukur, dan selaras dengan profil risiko Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa seluruh komite di bawah Direksi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target strategis Perseroan. Penilaian ini didasarkan pada

From a social perspective, the Company implemented various Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on improving community welfare and strengthening stakeholder engagement. Throughout 2025, the Company provided educational support, including a donation of IDR13 million to Panti Asuhan Putra Nusa, along with other social initiatives across its operational areas. In total, the Company's CSR realization for the year amounted to IDR42 million, an increase compared to the previous year.

In addition to community contributions, the Company places strong emphasis on social aspects within human capital management. Internally, the Company ensures the implementation of fair and inclusive employment practices and maintains a safe and conducive working environment. This commitment is reflected in the absence of reported violations related to human rights, discrimination, or non-compliant labor practices throughout 2025.

The Board of Directors believes that the implementation of Sustainable Finance principles is a strategic pillar in strengthening the Company's business resilience while reinforcing its role as a responsible financing institution. Going forward, the Company remains committed to expanding its contribution to sustainable development through strengthening its green financing portfolio, enhancing ESG risk management, and developing innovative products and services that deliver long-term positive impacts on the environment and society.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its management and oversight functions, the Board of Directors is supported by several committees with strategic roles, including the Risk Management Committee, the Information Technology Steering Committee, and the Asset and Liability Management Committee. These committees play a significant role in strengthening the quality of decision-making through the provision of comprehensive analysis, assessments, and recommendations based on prudent principles, while ensuring that all policies and business actions undertaken by the Board of Directors have undergone adequate, measured evaluation processes aligned with the Company's risk profile.

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that all committees under its supervision demonstrated strong performance and made significant contributions to the achievement of the Company's strategic targets.



efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite, kualitas serta ketepatan waktu rekomendasi, tingkat kehadiran dan partisipasi aktif anggota komite dalam rapat, serta kualitas tindak lanjut dan kontribusi nyata dalam pengendalian risiko dan peningkatan kinerja Perseroan. Uraian lebih lanjut mengenai hasil evaluasi Direksi terhadap kinerja masing-masing komite disajikan sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko

Direksi mengapresiasi kinerja Komite Manajemen Risiko yang sepanjang tahun 2025 telah menjalankan fungsinya secara proaktif, efektif, dan berintegritas tinggi. Komite dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan risiko Perseroan, antara lain melalui pemberian rekomendasi terkait penguatan proses penyaringan kredit serta mitigasi risiko operasional yang terintegrasi dengan strategi anti-*fraud*. Rekomendasi yang diberikan tersebut turut mendukung peningkatan kualitas portofolio pembiayaan serta memperkuat kerangka pengendalian risiko Perseroan secara menyeluruh.

Selain itu, Komite secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap profil risiko Perseroan secara disiplin. Hal ini tercermin dari keaktifan dalam rapat rutin serta kemampuan Komite dalam memberikan masukan yang konstruktif, sehingga setiap kebijakan dan keputusan bisnis tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Direksi juga menilai bahwa Komite telah mampu merespons dinamika risiko secara adaptif sehingga pengelolaan risiko Perseroan tetap terjaga dalam batas yang dapat diterima (*risk appetite*) dan sejalan dengan strategi bisnis.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Direksi memandang bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menjalankan perannya secara optimal sepanjang tahun 2025. Komite berkontribusi signifikan dalam memastikan keselarasan antara pengembangan teknologi informasi dengan arah strategis bisnis Perseroan, khususnya dalam mengawal pelaksanaan berbagai inisiatif dan proyek digitalisasi. Peran ini turut mendukung peningkatan efisiensi operasional serta kualitas layanan kepada pelanggan.

Selain itu, Komite juga menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memberikan rekomendasi terkait mitigasi risiko teknologi informasi serta penguatan aspek keamanan data konsumen. Peran ini menjadi semakin krusial seiring dengan percepatan transformasi digital dan meningkatnya eksposur terhadap risiko siber. Direksi menilai bahwa kontribusi Komite dalam aspek ini telah meningkatkan kesiapan Perseroan dalam menghadapi risiko teknologi serta memperkuat keandalan sistem informasi yang mendukung kegiatan usaha.

This assessment is based on the effectiveness of the committees' duties and responsibilities, the quality and timeliness of their recommendations, the level of attendance and active participation of committee members in meetings, as well as the quality of follow-up actions and their tangible contributions to risk management and performance improvement. Further details regarding the Board of Directors' evaluation of the performance of each committee are presented as follows:

Risk Management Committee

The Board of Directors appreciates the performance of the Risk Management Committee, which throughout 2025 has carried out its functions in a proactive, effective, and high-integrity manner. The Committee plays a strategic role in maintaining the stability and quality of the Company's risk management, including through recommendations on strengthening credit screening processes and enhancing operational risk mitigation integrated with anti-fraud strategies. These recommendations have contributed to improving the quality of the financing portfolio and strengthening the Company's overall risk control framework.

In addition, the Committee consistently performed its oversight and evaluation functions over the Company's risk profile in a disciplined manner. This is reflected in its active participation in regular meetings and its ability to provide constructive input, ensuring that all policies and business decisions remain grounded in prudential principles. The Board of Directors also considers that the Committee has demonstrated the ability to respond adaptively to evolving risk dynamics, ensuring that the Company's risk exposure remains within acceptable limits (*risk appetite*) and aligned with its business strategy.

Information Technology Steering Committee

The Board of Directors considers that the Information Technology Steering Committee performed its role effectively throughout 2025. The Committee made significant contributions in ensuring alignment between information technology development and the Company's strategic business direction, particularly in overseeing the implementation of various digitalization initiatives and projects. This role supported improvements in operational efficiency and service quality for customers.

Additionally, the Committee has demonstrated strong effectiveness in providing recommendations on mitigating information technology risks and strengthening consumer data security. This role has grown in importance as digital transformation accelerates and exposure to cyber risks increases. The Board of Directors believes that the Committee's contributions in this area have improved the Company's readiness to address technology-related risks and enhanced the reliability of the information systems that support its business activities.



Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite secara aktif memberikan masukan dan rekomendasi strategis kepada Direksi dalam rangka menjaga keseimbangan struktur pendanaan, likuiditas, dan profitabilitas Perseroan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi tersebut mendukung pengambilan keputusan Direksi yang lebih terukur dalam pengelolaan struktur keuangan Perseroan.

Selain itu, Komite juga menjaga komunikasi yang efektif dengan Direksi melalui penyelenggaraan rapat secara berkala untuk memantau pergerakan aset dan liabilitas Perseroan, sehingga pengelolaan posisi keuangan dapat dilakukan secara responsif dan terukur. Direksi menilai bahwa peran aktif Komite dalam pemantauan ini berkontribusi terhadap pengelolaan risiko likuiditas dan risiko suku bunga secara lebih efektif, serta mendukung stabilitas kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI SEPANJANG TAHUN 2025

Sepanjang tahun buku 2025, terdapat perubahan pada susunan anggota Direksi Perseroan menyusul diterimanya pengunduran diri Bapak Yap Tjay Hing dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi dan seluruh jajaran Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yap Tjay Hing atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan selama masa jabatannya dalam mendukung perkembangan dan kinerja Perseroan.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan dan arah strategis Perseroan, posisi Direktur Utama selanjutnya dipercayakan kepada Bapak Peter Halim yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan. Penunjukan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan implementasi strategi serta menjaga stabilitas operasional Perseroan. Sesuai keputusan pemegang saham, susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Peter Halim;
2. Wakil Direktur Utama: Kisup Wi;
3. Direktur: Hery Susanto Dermawan;
4. Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs: Martina Hariyanto;
5. Direktur: Choi, Ho Jung; dan
6. Direktur: Kyeongho Min.

Asset and Liability Management Committee

Throughout 2025, the Asset and Liability Management Committee effectively carried out its duties and responsibilities. The Committee actively provided strategic input and recommendations to the Board of Directors to maintain a balanced funding structure, liquidity, and profitability, while adhering to prudent principles and applicable regulatory requirements. These recommendations supported more measured decision-making by the Board of Directors in managing the Company's financial structure.

In addition, the Committee maintained effective communication with the Board of Directors through regular meetings to monitor the movement of the Company's assets and liabilities, enabling responsive and well-measured financial position management. The Board of Directors assesses that the Committee's active role in this monitoring contributed to more effective management of liquidity risk and interest rate risk, while supporting the sustained stability of the Company's financial performance.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Throughout the 2025 financial year, there was a change in the composition of the Company's Board of Directors following the resignation of Mr. Yap Tjay Hing from his position as President Director of the Company. In this regard, the Board of Directors and the entire Company extend their highest appreciation and gratitude to Mr. Yap Tjay Hing for his dedication, contributions, and leadership during his tenure in supporting the Company's development and performance.

To ensure leadership continuity and maintain the Company's strategic direction, the role of President Director was entrusted to Mr. Peter Halim, who previously served as a Director of the Company. This appointment is expected to ensure the continuity of strategy implementation and maintain the stability of the Company's operations. In accordance with the shareholders' resolution, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025 is as follows:

1. President Director: Peter Halim;
2. Vice President Director: Kisup Wi;
3. Director: Hery Susanto Dermawan;
4. Human Resources & General Affairs Director: Martina Hariyanto;
5. Director: Choi, Ho Jung; dan
6. Director: Kyeongho Min.



Atas perubahan tersebut, Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha. Dengan komposisi Direksi yang baru, kami optimis Perseroan dapat semakin memperkuat kinerja organisasi serta mendukung pencapaian strategi bisnis secara optimal dan berkelanjutan.

APRESIASI

Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas arahan, pengawasan, serta pandangan strategis yang diberikan sepanjang tahun 2025 dalam memastikan pengelolaan Perseroan berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan.

Direksi turut mengapresiasi seluruh insan Perseroan atas dedikasi, sinergi, dan komitmen yang konsisten dalam menjalankan aktivitas operasional. Kontribusi kolektif tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas kinerja Perseroan di tengah dinamika dan berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh *dealer*, regulator, debitur, serta para pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang solid dan kepercayaan yang terus terjaga.

Kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pembiayaan Perseroan secara optimal, sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada debitur. Direksi berharap pengalaman yang diperoleh sepanjang tahun ini dapat menjadi landasan yang semakin memperkuat peran seluruh insan Perseroan dalam memperkokoh fondasi usaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan yang sehat.

Following this change, the Company confirms that there is no material impact on its operational activities, legal aspects, financial condition, or business continuity. With the new composition of the Board of Directors, the Company remains confident in its ability to further strengthen organizational performance and support the effective and sustainable execution of its business strategy.

APPRECIATION

The Board of Directors extends its highest appreciation to the Board of Commissioners for its guidance, oversight, and strategic insights throughout 2025 in ensuring that the Company's management has been carried out effectively and in alignment with good corporate governance principles. The Board of Directors also expresses its sincere gratitude to the shareholders for their continued trust and support.

The Board of Directors also appreciates all employees of the Company for their dedication, strong collaboration, and consistent commitment in carrying out operational activities. These collective contributions have been essential in maintaining the Company's performance stability amid the dynamics and challenges encountered throughout the year. Appreciation is also extended to all dealers, regulators, debtors, and other stakeholders for their strong cooperation and continued trust.

Close collaboration with all stakeholders has made a significant contribution in supporting the continuity of the Company's financing activities in an optimal manner, while maintaining the quality of services provided to debtors. The Board of Directors expects that the experience gained throughout the year will serve as a foundation to further strengthen the role of all employees in reinforcing business fundamentals and sustaining healthy growth.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

PETER HALIM

Direktur Utama
President Director



Direksi

Board of Directors



Kisup Wi
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Hery Susanto Dermawan
Direktur
Director

Martina Hariyanto
Direktur Sumber Daya
Manusia & General Affairs
Human Resources &
General Affairs Director

Peter Halim
Direktur Utama
President Director

Choi, Ho Jung
Direktur
Director

Kyeongho Min
Direktur
Director



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT KB Finansia Multi Finance

Statement Letter of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
regarding the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT KB Finansia Multi Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT KB Finansia Multi Finance tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2026

We, the undersigned, declare that all information in the 2025 Annual Report of PT KB Finansia Multi Finance has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, April, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

NURSALAM ANDI TABUSALLA

Komisaris Independen
Independent Commissioner

SANG IN LEE

Komisaris Utama
President Commissioner

JE UI JUNG

Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors

KISUP WI

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

PETER HALIM

Direktur Utama
President Director

HERY SUSANTO DERMAWAN

Direktur
Director

MARTINA HARIYANTO

Direktur Sumber Daya Manusia &
General Affairs
Director of Human Resources &
General Affairs

CHOI, HO JUNG

Direktur
Director

KYEONGHO MIN

Direktur
Director



Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

03

Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	60
Skala Usaha Business Scale	61
Riwayat Singkat Perusahaan Brief Company History	62
Jejak Langkah Milestone	68
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Cultural Values	70
Bidang Usaha Line of Business	72
Produk dan/atau Jasa Dihilkan Products and/or Services Provided	73
Wilayah Operasional Operational Area	74
Struktur Organisasi Organizational Structure	76
Keanggotaan dalam Asosiasi Industri Membership in Industrial Associations	78
Perubahan Organisasi yang Bersifat Signifikan Significant Organizational Changes	79

Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya Chronology of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and the Reasons for the Changes	80	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	99
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	82	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, serta Perusahaan Ventura List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures	99
Pernyataan Independensi Komisaris Independen Statement of Independence of Independent Commissioners	85	Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology	100
Kronologis Perubahan Komposisi Direksi dan Alasan Perubahannya Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors and the Reasons for the Changes	86	Kronologi Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya Chronology of Bonds and Other Securities Listing	100
Profil Direksi Board of Directors' Profile	87	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on the Use of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Services	103
Demografi Karyawan Employee Demographics	93	Informasi Mengenai Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Information regarding Supporting Institutions and/or Professions	105
Informasi Pemegang Saham Shareholders Information	96	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	106



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company Name

Nama Brand
Brand Name

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Status Badan Hukum
Legal Status

Bidang Usaha
Line of Business

**Tanggal Pencatatan Obligasi
di Bursa Efek Indonesia (BEI)**
Bond Listing Date on the
Indonesia Stock Exchange
(IDX)

**Komposisi Pemegang Saham
per 31 Desember 2025**
Composition of Shareholders
as of December 31, 2025

Bursa Pencatatan Obligasi
Bond Listing Exchange

Kode Emiten
Issuer Code

Modal Dasar
Authorized Capital

**Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh**
Issued and Fully Paid Capital

**Jumlah karyawan per
31 Desember 2025**
Number of employees as of
December 31, 2025

**Alamat Kantor Pusat dan
Kontak Perusahaan**
Head Office Address and
Company Contact

Layanan Pelanggan
Customer Service

**Jaringan Kantor per
31 Desember 2025**
Office Network as of
December 31, 2025

Wilayah Operasional
Operational Area

Media Sosial
Social Media

PT KB Finansia Multi Finance

KreditPlus

9 Juni 1994
9 June 1994

Akta Pendirian No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, S.H., Notaris di Pondok Gede yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.TH.94 tanggal 5 Agustus 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572.
The Establishment Deed No. 4 dated June 9, 1994, drawn up before Notary Rachmad Umar, S.H., Notary in Pondok Gede, which has received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-10.254 HT.01.01.TH.94 dated August 5, 1994, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 79 dated October 4, 1994, Supplement No. 7572.

Perseroan Terbatas
Limited Liability Company

Pembiayaan
Financing

25 Juli 2022
July 25, 2022

- KB Kookmin Card Corp. (85%)
- PT Finansia Pacifica Raya (15%)

Bursa Efek Indonesia (BEI)
Indonesia Stock Exchange (IDX)

FMFN

Rp426.250.040.000

Rp426.250.040.000

3.947 karyawan
3,947 employees

PT KB Finansia Multi Finance
Gedung Office 8, lantai 15, SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
E-mail: corsec@finansia.com
Tel. +62-21 2933 3646
Fax. +62-21 2933 3648
Situs web: <http://www.kreditplus.com/>

Whatsapp: 08118300605
E-mail: cs@kreditplus.com
Web Chat: www.kreditplus.com

- 1 Kantor Pusat
- 116 Kantor Cabang
- 64 Kantor selain kantor cabang
- 1 Head Office
- 116 Branch Offices
- 64 Offices other than branch office

Seluruh Indonesia
Throughout Indonesia

: PT. KB Finansia Multi Finance

PT KB Finansia Multi Finance
Office 8 Building, 15th floor, SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Email: corsec@finansia.com
Tel. +62-21 2933 3646
Fax. +62-21 2933 3648
Website: <http://www.kreditplus.com/>



Skala Usaha

Business Scale

Total Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Total Assets, Liabilities, and Equity

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	2025	2024	2023	Description
Jumlah Aset	4.759.159	8.123.470	8.620.928	Total Assets
Jumlah Liabilitas	4.631.024	7.129.307	7.249.341	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	128.135	994.163	1.371.587	Total Equity

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENDIDIKAN, DAN STATUS KETENAGAKERJAAN

Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 3.947 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan akhir tahun 2024 yang berjumlah 6.793 orang. Informasi lebih lanjut mengenai demografi karyawan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada halaman 93–95 dalam Laporan Tahunan ini.

NUMBER OF EMPLOYEES BY GENDER, AGE, EDUCATION, AND EMPLOYMENT STATUS

As of 31 December 2025, the Company had 3,947 employees, a decrease compared to 6,793 at the end of 2024. Further information regarding the Company's employee demographics for the past 2 (two) years is presented on page 93–95 of this Annual Report.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham Perseroan terdiri dari KB Kookmin Card Corp. dengan porsi kepemilikan sebesar 85% dan PT Finansia Pacifica Raya dengan porsi kepemilikan sebesar 15%. Informasi lebih lengkap mengenai Komposisi Pemegang Saham disajikan pada halaman 96–98 dalam Laporan Tahunan ini.

SHAREHOLDER STRUCTURE

As of 31 December 2025, the Company's shareholding structure consisted of KB Kookmin Card Corp. with an 85% ownership stake and PT Finansia Pacifica Raya with a 15% ownership stake. More complete information regarding the Shareholder Composition is presented on page 96–98 of this Annual Report.

WILAYAH OPERASIONAL

Per 31 Desember 2025, jaringan usaha Perseroan dijalankan melalui 1 (satu) Kantor Pusat, 116 Kantor Cabang, dan 64 Kantor Selain Kantor Cabang. Informasi lebih lengkap mengenai wilayah operasional Perseroan disajikan pada halaman 74–75 dalam Laporan Tahunan ini.

OPERATIONAL AREAS

As of 31 December 2025, the Company's business network was operated through 1 (one) Head Office, 116 Branch Offices, and 64 Non-Branch Offices. More complete information regarding the Company's operational areas is presented on page 74–75 of this Annual Report.



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief Company History



Rekam jejak PT KB Finansia Multi Finance (“Perseroan”) sebagai perusahaan pembiayaan dimulai hampir tiga dekade lalu, tepatnya pada 9 Juni 1994. Perseroan memulai aktivitasnya dengan nama PT Finansia Multi Finance, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4 yang dibuat oleh Notaris Rachmad Umar, S.H., di Pondok Gede. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-10254 HT.01.01.Th 94 tanggal 5 Juli 1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994. Sejak awal pendiriannya, Perseroan berfokus pada bidang usaha pembiayaan sesuai dengan izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994.

The track record of PT KB Finansia Multi Finance (the “Company”) as a financing company began nearly three decades ago, precisely on 9 June 1994. The Company commenced its operations under the name PT Finansia Multi Finance, established pursuant to Notarial Deed No. 4 drawn up by Notary Rachmad Umar, S.H., in Pondok Gede. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-10254 HT.01.01.Th 94 dated 5 July 1994 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 79 dated 4 October 1994. Since its inception, the Company has focused on financing activities in accordance with the business license issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Letter No. 460/KMK.017/1994 dated 14 September 1994.



Selanjutnya tahun 2020 menjadi titik penting dalam tonggak sejarah perusahaan yang menandai fase transformasi pasca perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan. KB Kookmin Card Corp., yang dikenal sebagai salah satu institusi finansial terkemuka di Korea Selatan, mengambil alih mayoritas saham Perseroan sebesar 80%. Melalui langkah strategis ini, Perseroan resmi menjadi bagian dari KB Financial Group sehingga membuka babak baru pertumbuhan, sinergi, dan inovasi yang berkelanjutan. Seiring dengan perubahan tersebut, Perseroan mengubah namanya menjadi PT KB Finansia Multi Finance, yang tercatat secara resmi dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan. Transformasi ini menegaskan komitmen Perseroan untuk memperkuat posisi di industri keuangan nasional khususnya dan menghadirkan kontribusi yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.

Dengan identitas baru ini, Perseroan juga memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-177/NB.11/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

Selama lebih dari 30 tahun, Perseroan telah menapaki perjalanan panjang di industri *multifinance*. Pencapaian ini membuktikan ketangguhan sekaligus komitmen Perseroan dalam memberikan layanan pembiayaan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk memperkuat kehadirannya dan membangun kesadaran publik, Perseroan menghadirkan *brand* "KreditPlus" yang kini telah dikenal luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Melalui merek ini, Perseroan tidak hanya menyediakan solusi pembiayaan, tetapi juga menegaskan dedikasinya dalam menjawab kebutuhan konsumen dengan layanan yang terus disempurnakan dan inovatif. Layanan pembiayaan yang ditawarkan Perseroan mencakup: i) pembiayaan multiguna, ii) pembiayaan modal kerja, dan iii) pembiayaan investasi.

The year 2020 marked a significant milestone in the Company's history, signifying a transformative phase following a change in its shareholding structure. KB Kookmin Card Corp., widely recognized as one of the leading financial institutions in South Korea, acquired 80% of the Company's shares. Through this strategic move, the Company officially became part of KB Financial Group, ushering in a new chapter of growth, synergy, and sustainable innovation. In line with this development, the Company changed its name to PT KB Finansia Multi Finance, as stipulated in Notarial Deed No. 23 dated 6 July 2020, executed before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in South Jakarta. This transformation reaffirmed the Company's commitment to strengthening its position within the national financial industry and delivering broader value to its stakeholders.

Under its new identity, the Company also obtained a business license from the Financial Services Authority ("OJK") through the Decree of the Member of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-177/NB.11/2020 dated 5 August 2020.

For more than 30 years, the Company has built a solid presence in the multifinance industry. This achievement reflects both its resilience and steadfast commitment to delivering optimal financing services to the public. To strengthen its market presence and enhance public awareness, the Company introduced the "KreditPlus" brand, which has since become widely recognized across various segments of Indonesian society. Through this brand, the Company not only provides financing solutions but also reinforces its dedication to addressing customer needs through continuously improved and innovative services. The Company's financing products include: (i) multipurpose financing, (ii) working capital financing, and (iii) investment financing.



Keberhasilan Perseroan dalam mengelola bisnis tidak terlepas dari konsistensi dan disiplin seluruh unsur organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Sebagai langkah mitigasi risiko untuk menghindari kredit macet, Perseroan mengoperasikan sistem yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Biro Kredit. Sistem ini memfasilitasi pengecekan validitas identitas secara *online* sekaligus mengembangkan mekanisme penilaian kelayakan kredit (*scoring system*). Sistem ini diterapkan pada seluruh calon debitur, baik masyarakat umum maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) yang tergolong *underbanked* maupun *unbanked*. Dengan adanya sistem ini, Perseroan dapat meminimalkan risiko kredit macet sekaligus memastikan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat.

Khusus bagi debitur dari segmen UMKM, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang tepat, termasuk produk anjak piutang (*invoice financing*) bagi UMKM berbadan usaha. Skema ini mempermudah para pelaku UMKM dalam menjaga kelancaran operasional sekaligus meningkatkan kapasitas pengembangan usaha melalui tambahan modal kerja dari fasilitas Anjak Piutang dengan Agunan.

Selain memastikan pengelolaan bisnis secara transparan dan akuntabel, Perseroan juga terus berinovasi dalam menyediakan layanan pembiayaan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan debitur. Wujud nyata komitmen Perseroan dalam melayani debitur secara inovatif, adaptif, dan aman tercermin melalui kehadiran aplikasi digital “Kreditplus Mobile.” Sejak diluncurkan pada tahun 2022, aplikasi ini telah memberikan kemudahan bagi para debitur dalam mengakses layanan pembiayaan secara cepat dan aman melalui *smartphone*.

Pada tahun yang sama, Kreditplus Mobile berhasil meraih sertifikasi ISO 27001:2013 atas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Hal ini semakin menegaskan komitmen tinggi Perseroan dalam menjaga standar keamanan data debitur. Lebih lanjut, sejak 2024 Perseroan telah melakukan *upgrade* ke ISO 27001:2022 guna memperkuat sistem keamanan informasi sebagai bagian dari pelayanan yang andal dan terpercaya bagi seluruh debitur.

The Company’s success in managing its business is underpinned by the consistency and discipline of all organizational elements in implementing sound corporate governance principles, particularly in extending financing to debtors. As part of its risk mitigation strategy to prevent non-performing loans, the Company operates a system integrated with the Civil Registration Office (Dukcapil) and Credit Bureau. This system facilitates online identity verification and incorporates a creditworthiness assessment mechanism (*scoring system*). It is applied to all prospective debtors, including individuals and Micro, Small, and Medium Enterprises (“MSMEs”), both underbanked and unbanked. Through this system, the Company is able to minimize credit risk while maintaining a healthy financing portfolio.

Specifically for MSME debtors, the Company is committed to providing comprehensive support through appropriate financing facilities, including invoice financing products for incorporated MSMEs. This scheme enables MSMEs to maintain operational continuity while enhancing business expansion capacity through additional working capital obtained from secured factoring facilities.

In addition to ensuring transparent and accountable business management, the Company continues to innovate in delivering targeted financing services tailored to debtor needs. A tangible manifestation of the Company’s commitment to innovative, adaptive, and secure service delivery is the launch of the “Kreditplus Mobile” digital application. Since its introduction in 2022, the application has enabled debtors to access financing services conveniently, swiftly, and securely via smartphones.

In the same year, Kreditplus Mobile successfully obtained ISO 27001:2013 certification for its Information Security Management System. This certification further underscores the Company’s strong commitment to maintaining high standards of debtor data security. Furthermore, since 2024, the Company has upgraded to ISO 27001:2022 to further strengthen its information security framework as part of its reliable and trusted service to all debtors.



Selain mengembangkan aplikasi digital, Perseroan juga mempermudah debitur melakukan pembayaran angsuran melalui *mobile banking*, *internet banking*, serta lebih dari puluhan ribu jaringan ATM, Kantor Pos, dan gerai Indomaret & Alfamart. Perseroan juga bekerja sama dengan *platform digital* seperti Tokopedia, Dana, dan Shopee, dalam menghadirkan berbagai opsi pembayaran yang cepat, mudah, dan praktis.

Di tahun 2025, Perseroan melakukan aksi korporasi yang berdampak pada perubahan komposisi kepemilikan saham. Berdasarkan Akta Notaris No. 108 tanggal 19 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perubahan komposisi kepemilikan saham dilaksanakan melalui transaksi jual beli saham antara pemegang saham Perseroan, yaitu PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") selaku Penjual dan KB Kookmin Card Corp. ("KBC") selaku Pembeli. Transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan transaksi tersebut, komposisi kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan, dengan kepemilikan saham KBC menjadi sebesar 85% dan FPR sebesar 15%. Perubahan tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depan.

Kemudian, berdasarkan Akta Notaris No. 153 tanggal 29 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perseroan telah menyetujui dan memutuskan penambahan modal dasar Perseroan dari nominal awal sebesar Rp226.250.040.000 menjadi Rp426.250.040.000 melalui aksi kapitalisasi Saham Bonus Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 yang berasal dari agio saham. Pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara pro rata sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak. Adapun susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

1. KB Kookmin Card Corp, selaku pemegang 362.312.534 lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp362.312.534.000, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85%; dan
2. PT Finansia Pacifica Raya, selaku pemegang 63.937.506 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.937.506.000, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 15%.

Beyond digital application development, the Company also facilitates installment payments through mobile banking, internet banking, and tens of thousands of ATM networks, post offices, and retail outlets such as Indomaret and Alfamart. The Company also collaborates with digital platforms such as Tokopedia, Dana, and Shopee to provide fast, convenient, and practical payment options.

In 2025, the Company undertook a corporate action resulting in a change in its shareholding composition. Pursuant to Notarial Deed No. 108 dated 19 August 2025 executed before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the change in shareholding composition was carried out through a share sale and purchase transaction between the Company's shareholders, namely PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") as Seller and KB Kookmin Card Corp. ("KBC") as Buyer. The transaction obtained approval from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with prevailing laws and regulations. Following this transaction, KBC's shareholding increased to 85%, while FPR's ownership became 15%. This change is expected to strengthen the Company's capital structure and support its future business development.

Subsequently, based on Notarial Deed No. 153 dated 29 October 2025 executed before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company approved and resolved to increase its authorized capital from IDR226,250,040,000 to IDR426,250,040,000 through the capitalization of Bonus Shares amounting to IDR200,000,000,000 derived from additional paid-up capital. The distribution of Bonus Shares was conducted on a pro rata basis in accordance with each shareholder's ownership proportion. The Company's shareholding composition is as follows:

1. KB Kookmin Card Corp., holding 362,312,534 shares with a total nominal value of IDR362,312,534,000, representing 85% ownership; and
2. PT Finansia Pacifica Raya, holding 63,937,506 shares with a total nominal value of IDR63,937,506,000, representing 15% ownership.



Berbagai upaya strategis yang telah diterapkan berhasil menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan bagi Perseroan, sebagaimana tercermin dari komitmen pelayanan yang sudah diberikan kepada lebih dari 333.095 debitur aktif yang tersebar di seluruh kota di Indonesia hingga akhir tahun 2025. Melalui layanan pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran, Perseroan semakin memperkuat perannya sebagai mitra keuangan yang andal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

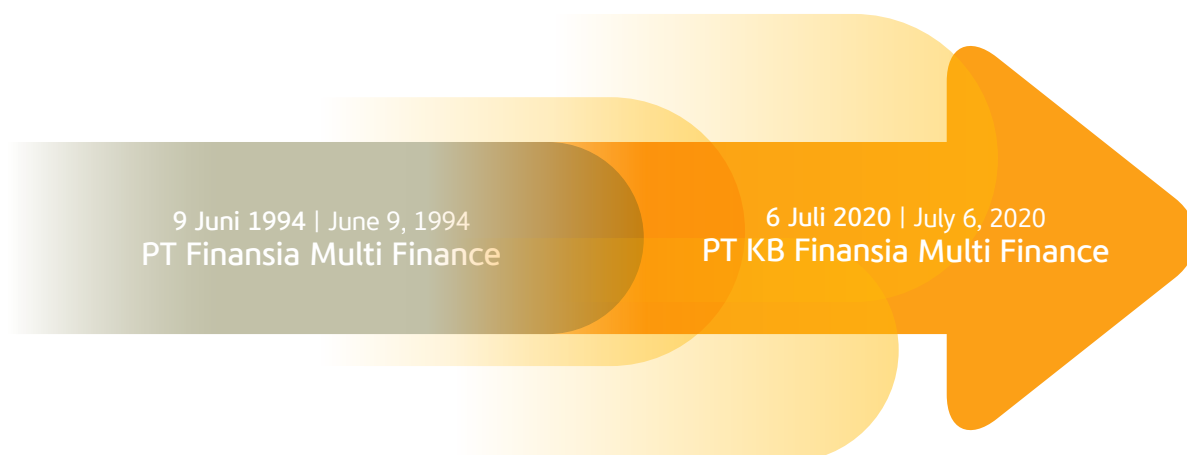
The various strategic initiatives implemented have successfully fostered sustainable business growth, as reflected in the Company's service commitment to more than 333,095 active debtors across cities throughout Indonesia as of the end of 2025. Through inclusive and targeted financing services, the Company continues to strengthen its role as a trusted financial partner in driving national economic growth and supporting sustainable development.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM

Berikut ini adalah kronologi perubahan nama dan status badan hukum Perseroan sejak pendirian hingga akhir tahun 2025:

INFORMATION ON CHANGES IN NAME AND LEGAL ENTITY STATUS

The following is a chronology of changes in the Company's name and legal entity status from its inception until the end of 2025:



Nama Perusahaan Semula Original Company Name	Nama Perusahaan Setelah Perubahan Company Name After Change	Tanggal Perubahan Date of Change	Dasar Hukum Perubahan Legal Basis for Change	Alasan Perubahan Reason for Change
PT Finansia Multi Finance	PT KB Finansia Multi Finance	6 Juli 2020 July 6, 2020	Akta No. 23 tanggal 6 Juli 2020, dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU0045638.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 Deed No. 23 dated July 6, 2020, drawn up before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU0045638.AH.01.02.2020 dated July 6, 2020.	Terjadi Akuisisi sehingga komposisi pemegang saham mayoritas mengalami perubahan The acquisition resulted in a change in the composition of the majority shareholders.



Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



Jejak Langkah

Milestone

1994

Perseroan memulai perjalanannya sebagai perusahaan pembiayaan dengan nama PT Finansia Multi Finance pada 9 Juni 1994.

The Company began its journey as a finance company under the name PT Finansia Multi Finance on 9 June 1994.

2001–2016

Perseroan terus berinovasi dan menyempurnakan produk serta layanan, khususnya pada pembiayaan multiguna untuk produk elektronik dan furnitur, modal kerja dengan agunan kendaraan bermotor (mobil), modal usaha, serta anjak piutang bagi konsumen korporasi.

The Company continues to innovate and refine its products and services, particularly in multipurpose financing for electronics and furniture, working capital secured by motor vehicles (cars), venture capital, and factoring for corporate customers.

2020

- KB Kookmin Card Corp. mengakuisisi 80% saham PT Finansia Multi Finance, menjadikannya pemegang saham pengendali dan secara resmi memasukkan Perseroan ke dalam KB Financial Group, salah satu grup finansial terbesar di Korea Selatan;
- Pada 6 Juli 2020, PT Finansia Multi Finance resmi berganti nama menjadi PT KB Finansia Multi Finance.
- KB Kookmin Card Corp. acquired 80% of PT Finansia Multi Finance's shares, making it the controlling shareholder and officially incorporating the Company into KB Financial Group, one of the largest financial groups in South Korea.
- On 6 July 2020, PT Finansia Multi Finance officially changed its name to PT KB Finansia Multi Finance.

2022

- Pada 22 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 senilai Rp1.000.000.000.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada 14 Juli 2022 melalui Surat Keputusan No. S-126/D.04/2022;
- Pada 29 Juli 2022, Fitch Ratings menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA+(idn)' untuk Obligasi I tersebut;
- Pada 13 September 2022, Fitch Ratings menaikkan peringkat berikut:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan dari 'AA+(idn)' menjadi 'AAA(idn)' dengan *Outlook* Stabil; dan
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 dari 'AA+(idn)' menjadi 'AAA(idn)';
- Aplikasi Kreditplus Mobile meraih sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 atas penerapan sistem manajemen keamanan informasi, menegaskan komitmen Perseroan dalam menjaga keamanan data konsumen.
- On 22 July 2022, the Company issued KB Finansia Multi Finance Bond I Year 2022 worth IDR1,000,000,000,000, which was declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on 14 July 2022, through Decree No. S-126/D.04/2022;
- On 29 July 2022, Fitch Ratings assigned a National Long-Term Rating of 'AA+(idn)' to Bond I;
- On 13 September 2022, Fitch Ratings upgraded the following ratings:
 - The Company's National Long-Term Rating from 'AA+(idn)' to 'AAA(idn)' with a Stable Outlook; and
 - The National Long-Term Rating of KB Finansia Multi Finance's Bond I 2022 from 'AA+(idn)' to 'AAA(idn)';
- The Kreditplus Mobile application received ISO/IEC 27001:2013 certification for its information security management system, affirming the Company's commitment to maintaining the security of consumer data.

kreditplus

*b PT KB Finansia Multi Finance

kreditplus

*b PT KB Finansia Multi Finance



2023

- Pada 27 Juni 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 senilai Rp1.000.000.000.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada 19 Juni 2023 melalui Surat Keputusan No. S-133/D.04/2023;
- Pada 18 Agustus 2023, Fitch Ratings mengafirmasi peringkat berikut:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan di 'AAA(idn)' dengan Outlook Stabil;
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 di 'AAA(idn)'; dan
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 di 'AAA(idn)';
- Perseroan memulai inisiatif penyaluran pembiayaan untuk produk-produk ramah lingkungan sebagai bagian dari program keuangan berkelanjutan;
- Pada 12 Desember 2023, struktur modal Perseroan diperkuat melalui penambahan modal disetor sebesar Rp100.000.000.000, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 114 tanggal 12 Desember 2023 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023.
- On 27 June 2023, the Company issued KB Finansia Multi Finance Bond II Year 2023 worth IDR1,000,000,000,000, which was declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on June 19, 2023, through Decree No. S-133/D.04/2023;
- On 18 August 2023, Fitch Ratings affirmed the following ratings:
 - The Company's National Long-Term Rating at 'AAA(idn)' with a Stable Outlook;
 - The National Long-Term Rating on KB Finansia Multi Finance Bond I Year 2022 at 'AAA(idn)'; and
 - The National Long-Term Rating on KB Finansia Multi Finance Bond II Year 2023 at 'AAA(idn)';
- The Company initiated a financing disbursement initiative for environmentally friendly products as part of its sustainable finance program;
- On 12 December 2023, the Company's capital structure was strengthened through an additional paid-in capital of IDR100,000,000,000, as stated in Notarial Deed No. 114 dated December 12, 2023, by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., and approved by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023.

2024

- Pada 25 Juli 2024, Fitch Ratings menetapkan dan mengafirmasi peringkat berikut:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan di 'AAA(idn)' dengan Outlook Stabil;
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 di 'AAA(idn)'; dan
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 di 'AAA(idn)';
- Pada 17 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 senilai Rp394.035.000.000, yang dinyatakan efektif oleh OJK pada 11 Desember 2024 melalui Surat Keputusan No. S-164/D.04/2024.
- On 25 July 2024, Fitch Ratings assigned and affirmed the following ratings:
 - The Company's National Long-Term Rating at 'AAA(idn)' with a Stable Outlook;
 - The National Long-Term Rating of KB Finansia Multi Finance's 2022 Bond I at 'AAA(idn)'; and
 - KB Finansia Multi Finance's National Long-Term Rating at 'AAA(idn)';
- On 17 December 2024, the Company issued KB Finansia Multi Finance's Shelf-Registered Bond I Phase I 2024 amounting to IDR394,035,000,000, which was declared effective by the Financial Services Authority (OJK) on 11 December 2024, through Decree No. S-164/D.04/2024.

2025

- Pada 15 Juli 2025, Fitch Ratings menetapkan dan mengafirmasi peringkat berikut:
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)'; Outlook Stabil
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022;
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023;
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 sejumlah Rp3 triliun; dan
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.
- Pada 19 Agustus 2025, terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham melalui transaksi jual beli saham antara pemegang saham Perseroan, yaitu PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") selaku Penjual dan KB Kookmin Card Corp. ("KBC") selaku Pembeli. Komposisi kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan dengan porsi kepemilikan KBC sebesar 85% dan FPR sebesar 15%.
- Pada 29 Oktober 2025, Perseroan melakukan penambahan modal dasar dari nominal awal sebesar Rp226.250.040.000 menjadi Rp426.250.040.000 melalui kapitalisasi Saham Bonus Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 yang berasal dari agio saham.
- On 15 July 2025, Fitch Ratings assigned and affirmed the following ratings:
 - National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(idn)'; Outlook Stable;
 - National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(idn)' for KB Finansia Multi Finance's Bond I 2022;
 - National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(idn)' for KB Finansia Multi Finance's Bond II 2023;
 - National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(idn)' for KB Finansia Multi Finance's Shelf-Registered Bond I 2024 amounting to IDR3 trillion; and
 - National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(idn)' for KB Finansia Multi Finance's Shelf-Registered Bond I Phase I 2024. The Company's National Long-Term Rating is at 'AAA(idn)' with a Stable Outlook.
- On 19 August 2025, there was a change in the share ownership composition through a share sale and purchase transaction between the Company's shareholders, namely PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") as the Seller and KB Kookmin Card Corp. ("KBC") as the Buyer. The Company's share ownership composition changed, with KBC holding 85% and FPR holding 15%.
- On 29 October 2025, the Company increased its authorized capital from the initial nominal amount of IDR226,250,040,000 to IDR426,250,040,000 through the capitalization of the Company's Bonus Shares amounting to IDR200,000,000,000 originating from share premium.

Makna Logo Logo meaning

1

BIRU dapat diartikan sebagai warna yang meningkatkan ekspresi verbal dalam berkomunikasi, ekspresi artistik, dan kekuatan.

BLUE is interpreted as a color that enhances verbal expression in communication, artistic expression, and strength.

2

MERAH dapat diartikan kegembiraan dan keberanian dalam menarik perhatian.

RED is interpreted as joy and courage in attracting attention.

3

KUNING yang dapat diartikan memancarkan keramahan, kehangatan, dan keceriaan.

YELLOW is interpreted as radiating friendliness, warmth, and cheerfulness.

4

TITIK 3 WARNA MERAH secara imajinasi dapat diartikan membentuk panah menghadap ke kanan, yang menunjukkan suatu tujuan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi dari Perseroan.

THE THREE RED DOTS is imaginatively interpreted as forming an arrow facing right, indicating a forward-looking goal to realize the Company's vision and mission.

5

Arti secara keseluruhan Kreditplus adalah Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai visi dan misi yang dapat membawa kemajuan, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan para konsumennya namun selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Kreditplus' overall meaning is a financing company with a vision and mission that can bring progress, by establishing good communication with its customers while always dynamically keeping up with the times.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Cultural Values

Visi Vision

Menjadi perusahaan pembiayaan ritel yang terpercaya di Indonesia yang menyediakan solusi keuangan yang mudah dan fleksibel bagi pelanggan, serta meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan, dengan dukungan teknologi digital.

To become the trusted retail financing company in Indonesia, providing convenient and flexible financial solutions to customers, while enhancing value for stakeholders, powered by digital technology.

Misi Mission

1. Menyediakan solusi pembiayaan digital yang mudah dan terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 2. Mendorong inklusi keuangan melalui layanan pembiayaan ritel yang fleksibel dan bertanggung jawab.
 3. Membangun budaya pembelajaran, pertumbuhan, dan penciptaan nilai untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.
1. Deliver convenient and reliable digital financing solutions that improve people's lives.
 2. Drive financial inclusion through flexible and responsible retail financing services.
 3. Foster a culture of learning, growth, and value creation for sustainable success.



Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Corporate Culture Values

Sebagai fondasi dalam mencapai kinerja yang unggul dan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dan budaya perusahaan di setiap lini operasional. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku sehari-hari, tetapi juga mencerminkan komitmen seluruh insan Perseroan untuk bekerja dengan profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Nilai-nilai dan budaya kerja yang dipegang teguh Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Integritas
- Kerja Sama
- Peduli dan Bertanggung Jawab
- Melakukan dengan Benar & Mengembangkan Diri
- Sikap 'Pasti Bisa' (*Can-do Attitude*)
- Tidak Rumit
- Rajin dan Tekun

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, setiap karyawan diharapkan mampu berkolaborasi secara efektif, terus mengembangkan diri, serta menghadapi tantangan dengan sikap positif dan inovatif.

As a foundation for achieving superior performance and sustainable business, the Company emphasizes the importance of implementing corporate values and culture across every operational line. These values not only serve as guidelines for daily behavior but also reflect the commitment of all Company employees to work professionally, responsibly, and with a results-oriented approach. The Company's values and work culture are as follows:

- Integrity
- Teamwork
- Caring and Responsibility
- Doing It Right & Developing Yourself
- Can-Do Attitude
- Simple Solution
- Diligence and Perseverance

Based on these principles, every employee is expected to collaborate effectively, continuously develop themselves, and face challenges with a positive and innovative attitude.



Integritas
Integrity



Kerja Sama
Teamwork



Peduli dan Bertanggung Jawab
Caring and Responsibility



Melakukan dengan Benar & Mengembangkan Diri
Do it right & Self Improvement



Sikap 'Pasti Bisa'
(*Can-do Attitude*)



Tidak Rumit
Simplicity



Rajin dan Tekun
Diligence



Bidang Usaha

Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang pembiayaan. Hal ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 151 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan No. AHU-0028078.AH.01.02. tahun 2022.

KEGIATAN USAHA DIJALANKAN DI TAHUN 2025

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap ruang lingkup kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terbaru.

INFORMASI PENGUNGKAPAN BIDANG USAHA DI DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2025

Rincian mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat ditemukan dalam Laporan Keuangan Tahunan PT KB Finansia Multi Finance untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's latest Articles of Association, the Company's main business activities are in the field of financing. This is stated in the Deed of Shareholders' Resolution No. 151 dated 19 April 2022, drawn up before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta, and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0028078.AH.01.02. year 2022.

BUSINESS ACTIVITIES CONDUCTED IN 2025

Until the end of 2025, the Company will not make any changes to the scope of its business activities. All activities will continue in accordance with Article 3 of the Company's most recent Articles of Association.

DISCLOSURE OF BUSINESS FIELDS IN THE ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2025

Details regarding the Company's business activities can be found in the Annual Financial Report of PT KB Finansia Multi Finance for the fiscal year ending December 31, 2025.



Produk dan/atau Jasa Dihasilkan

Products and/or Services Provided

Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan melalui berbagai produk dan/atau layanan pembiayaan multiguna yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Berikut adalah penjelasan mengenai layanan dan/atau produk yang ditawarkan Perseroan:

The Company operates in the financing sector through various multi-purpose financing products and/or services approved by the Financial Services Authority (OJK). The following is a description of the services and/or products offered by the Company:

Jenis Produk Product Type	Keterangan	Description
Multi Produk Multi-Products	- Pembiayaan untuk barang-barang elektronik, seperti <i>Gadget, Home Appliance, IT dan Communication, Audio/Video, Furniture, dan Agriculture</i>; - Nilai pembiayaan multi produk untuk produk elektronik berkisar di atas Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 18 bulan; dan - Jangka waktu untuk pembiayaan barang-barang lainnya (<i>productive machine/agriculture machine</i>) maksimal 36 bulan.	- Financing for electronic goods, such as gadgets, home appliances, IT and communication, audio/video, furniture, and agriculture; - Multi-product financing for electronic products ranges from IDR1,500,000 (one million five hundred thousand rupiah) with a maximum financing term of 18 months; and - Financing for other goods (<i>productive machinery/agriculture machinery</i>) is a maximum of 36 months.
Agunan Mobil Car Collateral	- Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil; dan - Nilai pembiayaan yang diberikan berkisar antara minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga maksimal 20% dari ekuitas, dengan tenor maksimal 48 bulan.	- Financing facilities secured by a car's Motor Vehicle Ownership Certificate (BPKB); and - Financing amounts range from a minimum of IDR20,000,000 (twenty million rupiah) to a maximum of 20% of equity, with a maximum term of 48 months.
Agunan Motor Motorcycle Collateral	- Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa BPKB motor; dan - Nilai pembiayaan berkisar minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tenor maksimal 36 bulan.	- Financing facilities secured by a motorcycle BPKB; and - Financing amounts ranging from a minimum of IDR2,000,000 (two million rupiah) with a maximum term of 36 months.
Anjak Piutang Factoring	- Produk pembiayaan yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM berbadan usaha; - Skema pembiayaan menggunakan anjak piutang (<i>factoring</i>), yaitu pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek berupa <i>invoice</i> dengan <i>term of payment</i> (TOP); dan - Nilai pembiayaan yang diberikan mulai dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 hingga 6 bulan.	- A financing product specifically aimed at MSMEs; - The financing scheme uses factoring, which is the purchase or transfer of short-term receivables in the form of invoices with a term of payment (TOP); and - Financing amounts start from IDR500,000,000 (five hundred million rupiah) with a term of 1 to 6 months.
Pembiayaan <i>Fleet</i> Kendaraan Vehicle Fleet Financing	- Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru, baik kendaraan penumpang maupun komersial, secara kredit dengan agunan berupa BPKB; dan - Nilai pembiayaan mulai dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tenor maksimal 60 bulan.	- Financing facilities for the purchase of new vehicles, both passenger and commercial vehicles, on credit with collateral in the form of a vehicle registration certificate (BPKB); and - Financing amounts starting from IDR50,000,000 (fifty million rupiah) with a maximum term of 60 months.



Wilayah Operasional

Operational Area

Perseroan memiliki jaringan operasional yang luas dan tersebar di seluruh kota di Indonesia. Peta persebaran jaringan usaha Perseroan dapat dilihat pada gambar berikut:

The Company has an extensive operational network spread across cities in Indonesia. A map of the Company's business network distribution can be seen in the following figure:



Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, dan 180 titik yang terdiri dari 116 Kantor Cabang, dan 64 Kantor Selain Kantor Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company had 1 (one) Head Office and 180 locations, consisting of 116 Branch Offices and 64 Non-Branch Offices, with the following details:

Provinsi Province	Kantor Cabang Branch Office	Kantor Selain Kantor Cabang Offices Other Than Branch Offices
Bali	3	-
Banten	12	8
Bengkulu	1	-
Daerah Istimewa Yogyakarta Special Region of Yogyakarta	18	10

Provinsi Province	Kantor Cabang Branch Office	Kantor Selain Kantor Cabang Offices Other Than Branch Offices
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Special Capital Region of Jakarta	1	-
Gorontalo	1	-
Jambi	24	26
Jawa Barat West Java	2	-



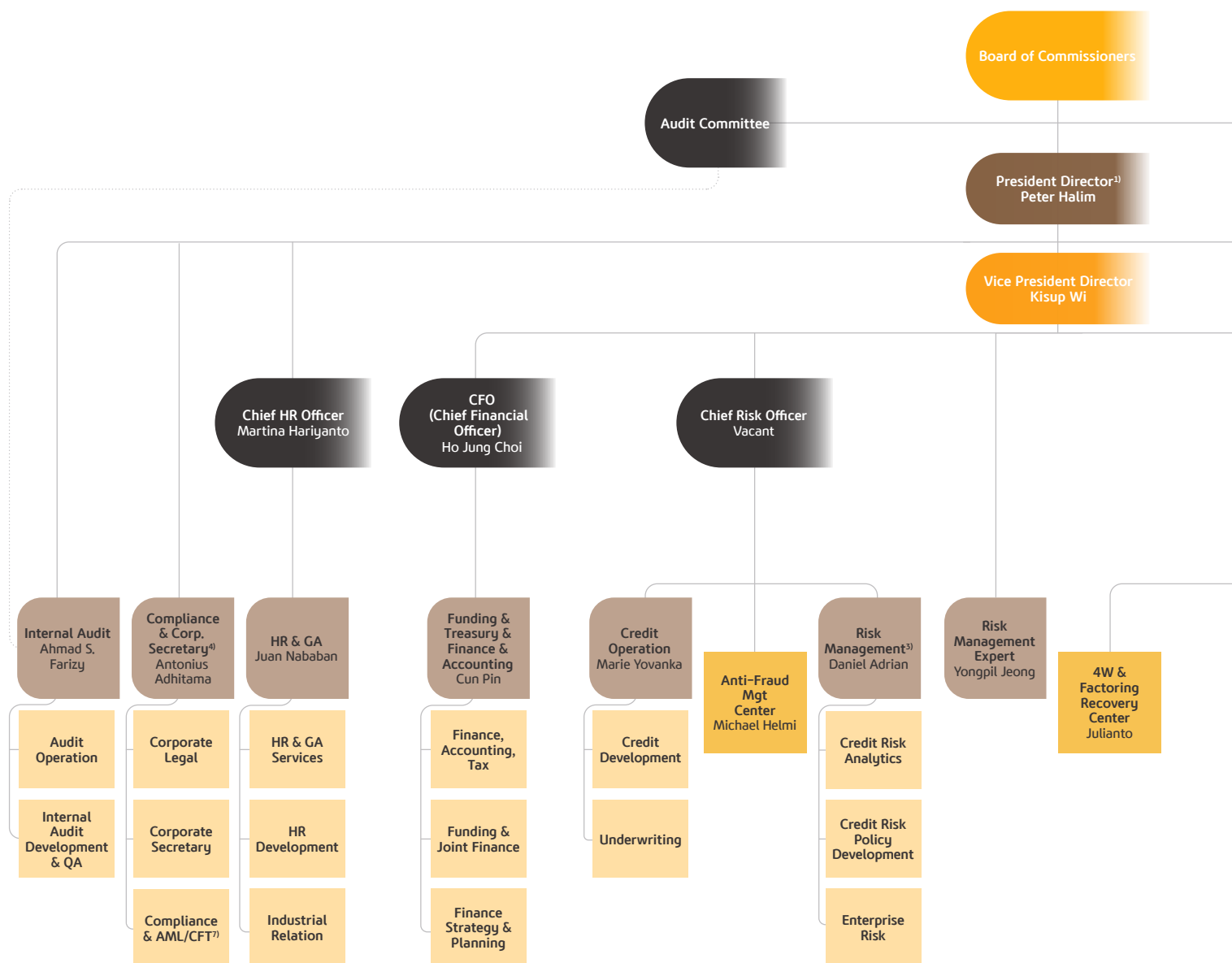
Provinsi Province	Kantor Cabang Branch Office	Kantor Selain Kantor Cabang Offices Other Than Branch Offices
Jawa Tengah Central Java	8	6
Jawa Timur East Java	2	-
Kalimantan Barat West Kalimantan	5	-
Kalimantan Selatan South Kalimantan	4	1
Kalimantan Tengah Central Kalimantan	4	3
Kalimantan Timur East Kalimantan	1	-

Provinsi Province	Kantor Cabang Branch Office	Kantor Selain Kantor Cabang Offices Other Than Branch Offices
Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Island	2	-
Kepulauan Riau Riau Island	1	-
Lampung	1	-
Maluku	1	-
Maluku Utara North Maluku	1	1
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	1	-
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	3	-
Riau	1	-
Sulawesi Barat West Sulawesi	8	5
Sulawesi Selatan South Sulawesi	1	-
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	2	1
Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	3	2
Sulawesi Utara North Sulawesi	4	1
Sumatera Selatan South Sumatra	1	-
Sumatera Utara North Sumatra	3	-
Total	116	64



Struktur Organisasi

Organizational Structure



Catatan:

- ¹⁾ President Director merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.
- ²⁾ Saat ini akan ditangani oleh Chief Operating Officer (COO).
- ³⁾ Departemen Manajemen Risiko merupakan departemen baru yang terdiri dari Manajemen Risiko Kredit dan Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management).
- ⁴⁾ Head of Compliance & Corporate Secretary juga menjalankan fungsi APU, PPT – PPPSPM : Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan menjalankan fungsi PDP : Perlindungan Data Pribadi. Serta juga sebagai Pejabat Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
- ⁵⁾ Head of Operation Management juga sebagai Pejabat Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
- ⁶⁾ Operation Support Team juga menjalankan fungsi Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Pelaksana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Kantor Pusat melalui Account Service.
- ⁷⁾ Compliance & AML/CFT Team juga sebagai Pelaksana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Kantor Pusat melalui fungsi Regulatory Compliance.
- ⁸⁾ Business Support Team juga menjalankan fungsi Literasi dan Inklusi melalui Marketing Communication.

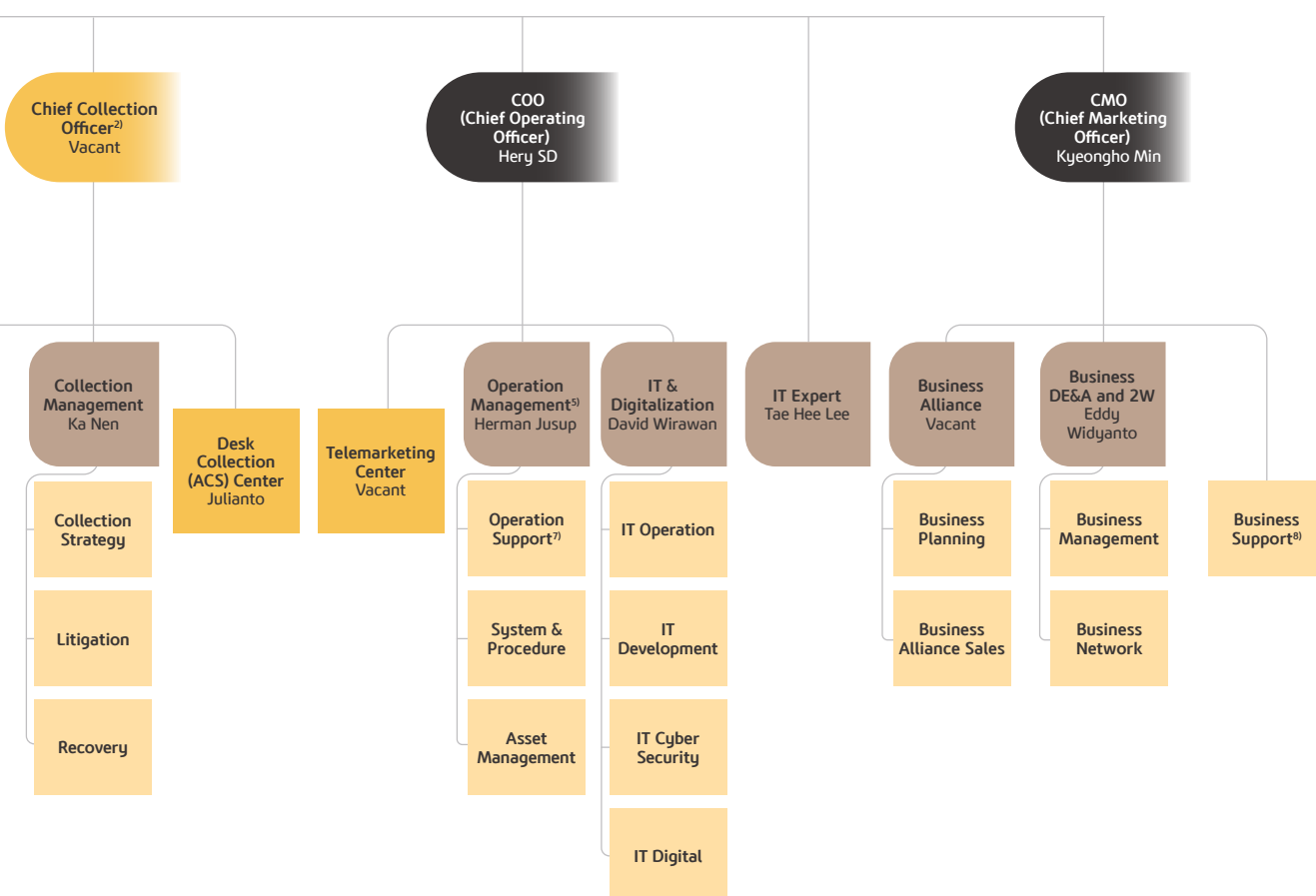


Struktur organisasi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 832/KBFMF/VIII/2025 tanggal 1 September 2025, adalah sebagai berikut:

The Company's organizational structure, as stipulated in Board of Directors Decree No. 832/KBFMF/VIII/2025 dated 1 September 2025, is as follows:

- Nomination & Remuneration Committee
- Risk Oversight Committee

- IT Steering Committee
- Asset & Liability Management Committee
- Risk Management Committee



Notes:

¹⁾ President Director concurrently serves as Compliance Director.

²⁾ Currently will be taken care by COO.

³⁾ Risk Management is the new department consist of Credit Risk Management and Enterprise Risk Management.

⁴⁾ Head of Compliance & Corporate Secretary also performs the Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism & Weapons of Mass destruction (AML, CFT & WMD) functions and performs the the Personal Data Protection (PDP) functions, as well as the Officer Function for Consumer and Community Protection.

⁵⁾ Head of Operation Management also serves as the Officer Function for Consumer and Community Protection.

⁶⁾ Operation Support Team performs the Consumer Service and Consumers Complaint Functions and acts as the Implementer of the Function for Consumer and Community Protection at the Head Office through the Account Service.

⁷⁾ Compliance & AML/CFT Team also acts as the Implementer of the Function for Consumer and Community Protection at the Head Office through the Regulatory Compliance Function.

⁸⁾ Business Support Team also performs the Literacy and Inclusion functions through the Marketing Communication.



Keanggotaan dalam Asosiasi Industri

Membership in Industrial Associations

Sepanjang tahun 2025, Perseroan aktif terlibat dalam diskusi strategis mengenai arah perkembangan industri *multifinance* di Indonesia melalui partisipasi di berbagai asosiasi nasional. Selama periode pelaporan, Perseroan tercatat sebagai anggota aktif di sejumlah asosiasi industri nasional bagi perusahaan pembiayaan, dengan uraian sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company actively engaged in strategic discussions regarding the development direction of the multifinance industry in Indonesia through participation in various national associations. During the reporting period, the Company was an active member of several national industry associations for finance companies, as described below:

Nama Asosiasi Association Name	Status	Skala Organisasi Organizational Scale
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) <i>Association of Indonesian Financing Companies (APPI)</i>  Alamat & Kontak Address & Contact Kota Kasablanka (EightyEight Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Casablanca, Kav.88 Jakarta Selatan, Indonesia <i>Email:</i> sekretariat@ifsa.or.id Tel.: +62-212982 0190 Fax.: +62-21 2982 019 Kota Kasablanka (EightyEight Kasablanka) Tower A 7th Floor, Unit D Jl. Casablanca Kav. 88 South Jakarta Indonesia <i>Email:</i> secretariat@ifsa.or.id Tel. +62-212982 0190 Fax. +62-21 2982 0191	Anggota Aktif Active Member	Nasional National
PT Raya Utama Indonesia (Rapindo)  Alamat & Kontak Address & Contact Kota Kasablanka (EightyEight Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Casablanca, Kav.88 Jakarta Selatan, Indonesia <i>Email:</i> info@rapindo.co.id Tel.: +62-2122836019 Kota Kasablanka (EightyEight Kasablanka) Tower A 7th Floor, Unit D Jl. Casablanca Kav. 88 South Jakarta Indonesia <i>Email:</i> info@rapindo.co.id Tel. +62-2122836019	Anggota Aktif Active Member	Nasional National
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) <i>Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)</i>  Alamat & Kontak Address & Contact Menara Karya Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 <i>Email:</i> info@lapssjk.id Tel.: 021-2527700 Menara Karya, 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Lot 1-2, RT.5/RW.2, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12950 <i>Email:</i> info@lapssjk.id Tel.: 021-2527700	Anggota Aktif Active Member	Nasional National



Perubahan Organisasi yang Bersifat Signifikan

Significant Organizational Changes

Pada tahun 2025, terdapat perubahan kepemilikan saham mayoritas melalui transaksi jual beli saham antara pemegang saham Perseroan, yaitu PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") selaku Penjual dan KB Kookmin Card Corp. ("KBC") selaku Pembeli. Atas aksi korporasi tersebut, struktur komposisi pemegang saham Perseroan kini terdiri dari KBC sebesar 85% dan FPR sebesar 15%. Selain itu, Perseroan juga telah menyetujui dan memutuskan penambahan modal dasar Perseroan dari nominal awal sebesar Rp226.250.040.000 menjadi Rp426.250.040.000 melalui aksi kapitalisasi Saham Bonus Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 yang berasal dari agio saham. Pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara pro rata sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak.

In 2025, there was a change in majority share ownership through a share sale and purchase transaction between the Company's shareholders, namely PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") as the Seller and KB Kookmin Card Corp. ("KBC") as the Buyer. As a result of this corporate action, the Company's shareholder structure now consists of KBC with 85% ownership and FPR with 15%. Furthermore, the Company has also approved and decided to increase the Company's authorized capital from the initial nominal amount of IDR226,250,040,000 to IDR426,250,040,000 through the capitalization of the Company's Bonus Shares amounting to IDR200,000,000,000 derived from additional paid-up capital. The distribution of Bonus Shares to Shareholders will be made pro rata in accordance with each party's ownership portion.



Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Chronology of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and the Reasons for the Changes

Selama tahun 2025, terjadi perubahan pada komposisi Dewan Komisaris Perseroan dengan kronologis sebagai berikut:

During 2025, changes occurred to the composition of the Company's Board of Commissioners, as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Setelah Perubahan After Change	
Periode 1 Januari s.d 31 Januari 2025 Period 1 January to 31 January 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode 31 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 Period January 31, 2025 to December 31, 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Moon Cheol Kang Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 131 tanggal 25 Juli 2024, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0231390, tanggal 25 Juli 2024. Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 131 dated 25 July 2024, which has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0231390, dated 25 July 2024.	Sang In Lee Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 10 Juli 2025, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0309509 tertanggal 10 Juli 2025. Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 54 dated July 10, 2025, which has been received and recorded by the Minister of Law pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0309509 dated July 10, 2025.
Nursalam Andi Tabusalla Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 93 tanggal 14 Juli 2020, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0287790, tanggal 14 Juli 2020. Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 93 dated 14 July 2020, which has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0287790, dated 14 July 2020.	Nursalam Andi Tabusalla Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0306306, masing-masing tertanggal 3 Juli 2025. Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 13, which has been received and recorded by the Minister of Law based on Letter No. AHU-AH.01.09-0306306, each dated 3 July 2025.



Sebelum Perubahan Before Change		Setelah Perubahan After Change	
Periode 1 Januari s.d 14 Mei 2025 Period 1 January to 14 May 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode 14 Mei 2025 s.d. 31 Desember 2025 Period 14 May 2025 to 31 December 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
-	-	Je Ui Jung Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 101 tanggal 20 Mei 2025, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0250523 tanggal 20 Mei 2025. Deed of Shareholders' Resolution No. 101 dated May 20, 2025, which has been received and registered by the Minister of Law pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0250523 dated May 20, 2025.

ALASAN PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2025 terjadi seiring dengan diterimanya pengunduran diri Bapak Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama Perseroan, dan digantikan oleh Bapak Sang In Lee, serta pengangkatan satu Komisaris baru, yaitu Bapak Je Ui Jung.

REASONS FOR CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The changes in the composition of the Board of Commissioners in 2025 occurred following the acceptance of the resignation of Mr. Moon Cheol Kang as President Commissioner of the Company, who was replaced by Mr. Sang In Lee, and the appointment of a new Commissioner, Mr. Je Ui Jung.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



Sang In Lee

Komisaris Utama

President Commissioner

Kewarganegaraan: Republik Korea
Usia: 50 tahun
Domisili: Korea Selatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 20 Juni 2025 hingga periode Laporan Tahunan ini. Diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 10 Juli 2025, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0309509 tertanggal 10 Juli 2025.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Bisnis, Soongsil University (2002).

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Komisaris yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penerimaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Manajer Umum di Grup Bisnis Global – KB Kookmin Card Corp. (2024 – saat ini);
- Direktur Utama – KB Daehan Specialized Bank Plc. (2022 – 2024);
- Direktur Keuangan – KB Daehan Specialized Bank Plc. (2018 – 2022);
- Manajer Senior di Departemen Bisnis Global – KB Kookmin Card Corp. (2017 – 2018);
- Manajer Senior di Departemen Rencana Strategis – KB Kookmin Card Corp. (2015 – 2016);
- Peneliti di Departemen Sumber Daya Manusia – KB Kookmin Card Corp. (2014 – 2015);
- Manajer di Departemen Rencana Strategis – KB Kookmin Card Corp. (2012 – 2014);
- Associate di Departemen Perencanaan Manajemen – KB Kookmin Card Corp. (2011 – 2012);
- Associate di Tim Pemasaran Kartu Kredit – KB Kookmin Card Corp. (2005 – 2011); dan
- Associate di Tim Manajemen Risiko Kartu Kredit – KB Kookmin Card Corp. (2004 – 2005).

Rangkap Jabatan

Manajer Umum di Grup Bisnis Global – KB Kookmin Card Corp. (2004 – saat ini)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Citizenship: Republic of Korea
Age: 50 years old
Domicile: South Korea

Legal Basis for Appointment

Served as President Commissioner from 20 June 2025, until the end of this Annual Report. Appointed based on Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 54 dated July 10, 2025, which has been received and recorded by the Minister of Law pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0309509 dated July 10, 2025.

Educational Background

Bachelor of Business Administration, Soongsil University (2002).

Professional Certification

Commissioner Expert Certification issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- General Manager at Global Business Group – KB Kookmin Card Corp. (2024 – present);
- President Director – KB Daehan Specialized Bank Plc. (2022 – 2024);
- Finance Director – KB Daehan Specialized Bank Plc. (2018 – 2022);
- Senior Manager in the Global Business Department – KB Kookmin Card Corp. (2017 – 2018);
- Senior Manager in the Strategic Planning Department – KB Kookmin Card Corp. (2015 – 2016);
- Researcher in the Human Resources Department – KB Kookmin Card Corp. (2014 – 2015);
- Manager in the Strategic Planning Department – KB Kookmin Card Corp. (2012 – 2014);
- Associate in the Management Planning Department – KB Kookmin Card Corp. (2011 – 2012);
- Associate in the Credit Card Marketing Team – KB Kookmin Card Corp. (2005 – 2011); and
- Associate in the Credit Card Risk Management Team – KB Kookmin Card Corp. (2004 – 2005).

Concurrent Positions

General Manager of the Global Business Group – KB Kookmin Card Corp. (2004 – present)

Affiliations

No affiliated relationships with any members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or the Controlling and Majority Shareholders.



Nursalam Andi Tabusalla

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan: Indonesia
Usia: 67 tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 10 Juli 2015 sampai saat ini, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 107 tanggal 30 Juli 2015 dan terakhir diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0306306, keduanya tanggal 3 Juli 2025.

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Business Administration dari University of San Francisco, USA (1983).

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Komisaris yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembinaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Direktur PT Multi Berkat Energi (2018 hingga saat ini);
- Direktur PT Massada Komunikasi (2003– hingga saat ini);
- Direktur PT Indohartama Sentra (2003–2019);
- Direktur PT INNI Sarana Golf Indonesia (2003–2019);
- General Manager PT ArieWest Indonesia (2000–2003);
- Wakil Direktur Utama Chase Manhattan Bank (1989–2000);
- Assistant Manager Individual Banking Chase Manhattan Bank (1985–1988); dan
- Assistant Manager Operation & System Chase Manhattan Bank (1984–1985)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit Perseroan (2021 – saat ini);
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2021 – saat ini);
- Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (2021 – saat ini);
- Direktur PT Multi Berkat Energi (2018 – saat ini); dan
- Direktur PT Massada Komunikasi (2003 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Indonesia
Age: 67 years old
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

Served as an Independent Commissioner of the Company from 10 July 2015, to the present. He was appointed based on Deed of Statement of Shareholder Resolution No. 107 dated 30 July 2015, and most recently based on Deed of Statement of Shareholder Resolution No. 13, which was received and recorded by the Minister of Law through Letter No. AHU-AH.01.09-0306306, both dated 3 July 2025.

Educational Background

Bachelor of Business Administration from the University of San Francisco, USA (1983).

Professional Certification

Expert Commissioner Certification issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- Director of PT Multi Berkat Energi (2018 to present);
- Director of PT Massada Komunikasi (2003 to present);
- Director of PT Indohartama Sentra (2003–2019);
- Director of PT INNI Sarana Golf Indonesia (2003–2019);
- General Manager of PT ArieWest Indonesia (2000–2003);
- Deputy President Director of Chase Manhattan Bank (1989–2000);
- Assistant Manager of Individual Banking at Chase Manhattan Bank (1985–1988); and
- Assistant Manager of Operations & Systems at Chase Manhattan Bank (1984–1985).

Concurrent Positions

- Chairman of the Company's Audit Committee (2021 – present);
- Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2021 – present);
- Chairman of the Company's Risk Oversight Committee (2021 – present);
- Director of PT Multi Berkat Energi (2018 – present); and
- Director of PT Massada Komunikasi (2003 – present).

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or principal shareholders.



Je Ui Jung
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan: Indonesia
Usia: 46 Tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 14 Mei 2025 hingga periode Laporan Tahunan ini. Diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 101 tanggal 20 Mei 2025, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0250523 tanggal 20 Mei 2025.

Riwayat Pendidikan

- Magister Bisnis, Universitas Nasional (2024)
- Sarjana Bahasa Malay – Indonesia, Busan University of Foreign Studies (2004)

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Komisaris yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022 – sekarang); dan
- Komisaris – PT Lotte Capital Indonesia (2023 – 2025).

Rangkap Jabatan

- Direktur – PT Lebih Bagus Eng (2018 – sekarang)
- Direktur – PT Sinergi Sukses Indonesia (2019 – sekarang)
- Komisaris – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022 – sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Indonesia
Age: 46 years old
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

Served as Commissioner from May 14, 2025, until the date of this Annual Report. Appointed pursuant to Shareholders' Resolution No. 101 dated May 20, 2025, which was received and recorded by the Minister of Law pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0250523 dated May 20, 2025.

Educational Background

- Master of Business, National University (2024)
- Bachelor's Degree in Malay-Indonesian Language, Busan University of Foreign Studies (2004)

Professional Certification

Expert Commissioner Certification issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- Commissioner – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022 – present); and
- Commissioner – PT Lotte Capital Indonesia (2023 – 2025).

Concurrent Positions

- Director – PT Lebih Bagus Eng (2018–present)
- Director – PT Sinergi Sukses Indonesia (2019–present)
- Board Member – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022–present)

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or principal shareholders.



Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Statement of Independence of Independent Commissioners

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai Pasal 24 POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, *juncto* Pasal 49 POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Perseroan mencatat bahwa Komisaris Independen telah menyampaikan surat pernyataan independensinya pada tanggal 5 Maret 2025.

The Company's Independent Commissioners have met the independence requirements as stipulated in Article 24 of POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, in conjunction with Article 49 of POJK No. 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. The Company notes that the Independent Commissioners submitted their independence statements on March 5, 2025.



Kronologis Perubahan Komposisi Direksi dan Alasan Perubahannya

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors and the Reasons for the Changes

Selama tahun 2025, terjadi perubahan pada komposisi Direksi Perseroan dengan kronologis sebagai berikut:

During 2025, changes occurred to the composition of the Company's Board of Directors, as follows:

Sebelum Perubahan Before Change		Setelah Perubahan After Change	
Periode 1 Januari s.d 3 Juli 2025 Period January 1 to 3 July 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode September s.d Desember 2025 Period September to December 2025	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Yap Tjay Hing Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 6 Juli 2022. Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 23 dated 6 July 2022.	Peter Halim Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 82 tanggal 16 September 2025, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0338247, tanggal 16 September 2025. Deed of Shareholders' Resolution No. 82 dated September 16, 2025, which has been received and recorded by the Minister of Law pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0338247, dated September 16, 2025.
Peter Halim Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0181727, tanggal 6 November 2023. Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 6 dated 2 November 2, 2023 which has been received and recorded by the Minister of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.09-0181727, dated 6 November 2023.	-	-

ALASAN PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2025

Perubahan komposisi Direksi pada tahun 2025 terjadi seiring diterimanya surat pengunduran diri Bapak Yap Tjay Hing selaku Direktur Utama Perseroan.

REASONS FOR CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The changes in the composition of the Board of Directors in 2025 occurred following the acceptance of the resignation letter of Mr. Yap Tjay Hing as President Director of the Company.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile



Peter Halim
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan: Indonesia
Usia: 53 tahun
Domisili: Indonesia

Citizenship: Indonesia
Age: 53 years old
Domicile: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

- Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tanggal 11 September 2025, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 82 tanggal 16 September 2025 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0338247 tanggal 16 September 2025;
- Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 November 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023.

Legal Basis for Appointment

- First appointed as President Director of the Company on September 11, 2025, pursuant to Shareholders' Resolution Deed No. 82 dated September 16, 2025, which was received and registered by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0338247 dated September 16, 2025;
- Has served as a Director of the Company since November 7, 2008, pursuant to Shareholders' Resolution Deed No. 6 dated November 2, 2023.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara (1995).

Educational History

Bachelor's Degree in Economics from Universitas Tarumanagara (1995).

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Pembiayaan - diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Professional Certification

Financing Expert Certification - Issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Riwayat Pekerjaan

- Direktur - PT KB Finansia Multi Finance (2008 - 2025)
- Chief Financial Officer PT Finansia Multi Finance (2003 - 2008);
- Audit Manager Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche Tohmatsu (1995 - 2003)

Employment History

- Director - PT KB Finansia Multi Finance (2008 - 2025)
- Chief Financial Officer - PT Finansia Multi Finance (2003 - 2008);
- Audit Manager, Public Accounting Firm Deloitte Touche Tohmatsu (1995 - 2003)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Pengelolaan Aset & Liabilitas Perseroan (2025 - saat ini);
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2025 - saat ini); dan
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2021 - saat ini).

Concurrent Positions

- Chair of the Company's Asset and Liability Management Committee (2025-present);
- Chair of the Company's Information Technology Steering Committee (2025-present); and
- Member of the Company's Risk Management Committee (2021-present).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or principal shareholders.



Kisup Wi

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Kewarganegaraan: Republik Korea
Usia: 50 tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

- Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan pada 5 November 2021 sampai dengan tahun 2024, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 9 November 2021;
- Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 21 Maret 2024 sampai saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 4 April 2024 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0138674 tanggal 4 April 2024.

Riwayat Pendidikan

- *Master of Law* dari Yonsei University, Korea Selatan (2012); dan
- *Bachelor of Public Administration* dari Yonsei University, Korea Selatan (2002).

Sertifikasi Profesi

- Sertifikasi Ahli Pembiayaan – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.
- Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Keuangan PT KB Finansia Multi Finance (2021 – 2024);
- Kepala Tim Bisnis Global KB Kookmin Card (2019 – 2020);
- Kepala Tim Perencanaan Keuangan KB Kookmin Card (2013 – 2019);
- Manajer Perencanaan Strategis KB Kookmin Card (2011 – 2012); dan
- Asisten Manajer Departemen Pendukung Operasional dan Proses KB Kookmin Bank (2003 – 2010).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2021 – saat ini);
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2022 – saat ini); dan
- Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan (2022 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Republic of Korea
Age: 50 years old
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

- First appointed as the Company's Chief Financial Officer on November 5, 2021, through 2024, pursuant to Shareholders' Resolution No. 37 dated November 9, 2021;
- Has served as Vice President Director of the Company since March 21, 2024, to the present, pursuant to Deed of Shareholders' Resolution No. 33 dated April 4, 2024, and has been received and registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.09-0138674 dated April 4, 2024.

Educational Background

- Master of Law from Yonsei University, South Korea (2012); and
- Bachelor of Public Administration from Yonsei University, South Korea (2002).

Professional Certifications

- Financing Expert Certification – held by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.
- Directors' Risk Management Certification – held by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Career History

- Finance Director of PT KB Finansia Multi Finance (2021 – 2024);
- Head of the Global Business Team at KB Kookmin Card (2019 – 2020);
- Head of the Financial Planning Team at KB Kookmin Card (2013 – 2019);
- Strategic Planning Manager at KB Kookmin Card (2011 – 2012); and
- Assistant Manager of the Operational and Process Support Department at KB Kookmin Bank (2003 – 2010).

Concurrent Positions

- Chairman of the Company's Risk Management Committee (2021–present);
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2022–present); and
- Member of the Company's Asset and Liability Management Committee (2022–present).

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or major shareholders.



Hery Susanto Dermawan

Direktur (Chief Operating Officer)
Director (Chief Operating Officer)

Kewarganegaraan: Indonesia
Usia: 55 tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 6 Juni 2016 sampai saat ini, dan terakhir diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0225393 tanggal 09 April 2021.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara (1993)

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Pembiayaan – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Senior General Manager PT Finansia Multi Finance (2006 – 2016);
- Direktur Operasional PT Artha Persada Finance (2002 – 2006);
- Regional Operation Manager PT Primaswadana Perkasa Finance (1996 – 2002); dan
- Assistant Supervisor Audit Division International Operation Director Deloitte Touche Tohmatsu (1993 – 1996)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2022 – saat ini); dan
- Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan (2022 – saat ini)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Indonesia
Age: 55 years old
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

Has served as Director of the Company since June 6, 2016 to the present, and was most recently appointed pursuant to Deed of Shareholders' Resolution No. 52 dated April 8, 2021, which has been received and registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0225393 dated April 9, 2021.

Educational History

Bachelor of Economics from Universitas Tarumanagara (1993)

Professional Certification

Financing Expert Certification – issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- Senior General Manager of PT Finansia Multi Finance (2006 – 2016);
- Operations Director of PT Artha Persada Finance (2002 – 2006);
- Regional Operations Manager of PT Primaswadana Perkasa Finance (1996 – 2002); and
- Assistant Supervisor, Audit Division, International Operations Director, Deloitte Touche Tohmatsu (1993 – 1996)

Concurrent Positions

- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2022–present); and
- Member of the Company's Asset and Liability Management Committee (2022–present)

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or principal shareholders.



Martina Hariyanto

**Direktur Sumber Daya Manusia &
General Affairs (Chief Human Resources Officer)**
Director of Human Resources & General Affairs
(Chief Human Resources Officer)

Kewarganegaraan: Indonesia
Usia: 61 tahun
Domisili: Indonesia

Citizenship: Indonesia
Age: 61 years old
Domicile: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 25 Juli 2023 sampai saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0096744 tanggal 26 Juli 2023. Dan Surat No. AHU-AH.01.09-0144272 tanggal 26 Juli 2023.

Legal Basis for Appointment

Has served as Director of the Company since July 25, 2023, to the present, pursuant to the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023, which has been received and registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0096744 dated July 26, 2023, and Letter No. AHU-AH.01.09-0144272 dated July 26, 2023.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan (1987).

Educational History

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Katolik Parahyangan (1987).

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Pembiayaan – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Professional Certification

Financing Expert Certification – issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Riwayat Pekerjaan

- Head of Human Resources & General Affairs PT KB Finansia Multi Finance (1997 – 2023);
- Customer Service Manager PT GE Astra Finance (1994 – 1997);
- Head of Administration dan HRD & General Affairs PT Adiputra Sumber (1992 – 1994);
- HRD & General Affairs Assistant Manager Corporate PT Astra Sedaya Finance (1990 – 1992); dan
- Management Improvement Staff & Management Trainee PT Astra Sedaya Finance (1988 – 1989).

Employment History

- Head of Human Resources & General Affairs, PT KB Finansia Multi Finance (1997 – 2023);
- Customer Service Manager, PT GE Astra Finance (1994 – 1997);
- Head of Administration, HRD & General Affairs, PT Adiputra Sumber (1992 – 1994);
- HRD & General Affairs Assistant Manager Corporate PT Astra Sedaya Finance (1990 – 1992); and
- Management Improvement Staff & Management Trainee PT Astra Sedaya Finance (1988 – 1989).

Rangkap Jabatan

Tidak ada rangkap jabatan yang dilakukan pada perusahaan manapun.

Concurrent Positions

No concurrent positions held in any company.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliations

No affiliated relationships with the Board of Commissioners, other Directors, or controlling or principal shareholders.



Choi, Ho Jung

Direktur (Chief Financial Officer)
Director (Chief Financial Officer)

Kewarganegaraan: Republik Korea
Usia: 45 tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 25 Juli 2023 sampai saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0096744 tanggal 26 Juli 2023. Dan Surat No. AHU-AH.01.09-0144272 tanggal 26 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan

- *Master of Applied Statistics* dari Cornell University, USA;
- *Master of Economics* dari University of Illinois, USA; dan
- *Bachelor of Business Management* dari Hongik University, Korea Selatan.

Sertifikasi Profesi

- Sertifikasi Ahli Pembiayaan – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.
- Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Penasihat Manajemen Risiko PT KB Finansia Multi Finance (2020 – Juli 2023);
- Manajer Departemen Bisnis Global KB Kookmin Card Corp. (2017 – 2020); dan
- Asisten Manajer Departemen Manajemen Risiko KB Kookmin Card Corp (2011 – 2017).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (Mei 2024 – saat ini);
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2023 – saat ini); dan
- Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan (2023 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Republic of Korea
Age: 45 years old
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

Has served as Director of the Company since July 25, 2023, to the present, pursuant to Deed of Declaration of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023, which has been received and registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0096744 dated July 26, 2023, and Letter No. AHU-AH.01.09-0144272 dated July 26, 2023.

Educational Background

- Master of Applied Statistics from Cornell University, USA;
- Master of Economics from the University of Illinois, USA; and
- Bachelor of Business Management from Hongik University, South Korea.

Professional Certifications

- Financing Expert Certification – issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.
- Director Risk Management Certification – issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- Risk Management Advisor at PT KB Finansia Multi Finance (2020 – July 2023);
- Manager of the Global Business Department at KB Kookmin Card Corp. (2017 – 2020); and
- Assistant Manager of the Risk Management Department, KB Kookmin Card Corp. (2011 – 2017).

Concurrent Positions

- Member of the Company's Risk Management Committee (May 2024 – present);
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2023 – present); and
- Member of the Company's Asset and Liability Management Committee (2023 – present).

Affiliations

No affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or principal shareholders.



Kyeongho Min

Direktur (Chief Marketing Officer)
Director (Chief Marketing Officer)

Kewarganegaraan: Republik Korea
Usia: 43 tahun
Domisili: Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 30 Desember 2024 sampai saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 269 tanggal 31 Desember 2024 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0230697 tanggal 31 Desember 2024 dan Surat No. AHU-AH.01.09-0294567 tanggal 31 Desember 2024.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Ajou, Korea (2008).

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Ahli Pembiayaan – diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama di i-Finance Leasing Plc (2023 – 2024);
- Kepala Bagian Pemasaran di KB Daehan Specialized Bank (2018 – 2022);
- Manajer di KB Kookmin Card Corp. (2017);
- Manajer di KB Kookmin Card Corp. (2011 – 2016); dan
- Asisten Manajer di KB Kookmin Bank (2008 – 2011).

Rangkap Jabatan

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan (2024–saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Citizenship: Republic of Korea
Age: 43 Years
Domicile: Indonesia

Legal Basis for Appointment

Served as Director of the Company since December 30, 2024, to the present, pursuant to Deed of Shareholders' Resolution No. 269 dated December 31, 2024, which has been received and registered by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-AH.01.03-0230697 dated December 31, 2024, and Letter No. AHU-AH.01.09-0294567 dated December 31, 2024.

Educational Background

Bachelor of Business Administration from Ajou University, Korea (2008).

Professional Certification

Financing Expert Certification – issued by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Employment History

- President Director at i-Finance Leasing Plc (2023 – 2024);
- Head of Marketing at KB Daehan Specialized Bank (2018 – 2022);
- Manager at KB Kookmin Card Corp. (2017);
- Manager at KB Kookmin Card Corp. (2011 – 2016); and
- Assistant Manager at KB Kookmin Bank (2008 – 2011).

Concurrent Positions

Member of the Company's Asset and Liability Management Committee (2024–present)

Affiliations

Has no affiliated relationships with either the Board of Commissioners, other Directors, or the controlling or major shareholders.



Demografi Karyawan

Employee Demographics

Per 31 Desember 2025, Perseroan tercatat mengelola 3.947 karyawan, mengalami perubahan sebesar 41,90% dibandingkan dengan 2024, yakni sebanyak 6.793 orang. Informasi lengkap mengenai demografi karyawan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

As of December 31, 2025, the Company managed 3,947 employees, a 41.90% change compared to 6,793 employees in 2024. Complete information regarding the Company's employee demographics for the past two years is presented in the following tables:

Komposisi Karyawan berdasarkan Gender

Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
Laki-Laki Male	3.001	76,03%	5.402	79,52%	(2.401)	(44,45%)
Perempuan Female	946	23,97%	1.391	20,48%	(445)	(31,99%)
Jumlah Total	3.947	100,00%	6.793	100,00%	(2.846)	(41,90%)

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Hubungan Kerja

Employee Composition based on Employment Status

Status Hubungan Kerja Employment Status	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
Kontrak (Tidak Tetap) Contract (Non-permanent)	1.523	38,59%	2.782	40,95%	(1.259)	(45,25%)
Permanen (Tetap) Permanent	2.131	53,99%	3.109	45,77%	(978)	(31,46%)
Masa Percobaan Probation	13	0,33%	31	0,46%	(18)	(58,06%)
Magang Internship	280	7,09%	871	12,82%	(591)	(67,85%)
Jumlah Total	3.947	100,00%	6.793	100,00%	(2.846)	(41,90%)



Komposisi Karyawan berdasarkan Jenjang Manajemen Employee Composition based on Management Level

Status Hubungan Kerja Employment Status	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	0,08%	2	0,01%	1	50,00%
Direksi Board of Directors	6	0,15%	7	0,10%	(1)	(14,28%)
Manager (General Manager, Regional Manager, Senior Manager, Manager, Branch Operational Manager, BOM)	343	8,72%	478	7,04%	(135)	(28,24%)
Assistant Manager	104	2,63%	78	1,15%	26	33,33%
Supervisor	930	23,56%	1.485	21,86%	(555)	(37,37%)
Staff	2.561	64,88%	4.743	69,84%	(2.182)	(46,00%)
Jumlah Total	3.947	100,00%	6.793	100,00%	(2.846)	(41,90%)

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenjang Jabatan sebagai Bentuk Kesetaraan Gender Tahun 2025 Employee Composition by Position Level as a Form of Gender Equality in 2025

Status Hubungan Kerja Employment Status	Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	0,08%	-	-
Direksi Board of Directors	5	0,13%	1	0,03%
Manager (General Manager, Regional Manager, Senior Manager, Manager, Branch Operational Manager, BOM)	283	7,17%	60	1,52%
Assistant Manager	62	1,57%	42	1,06%
Supervisor	739	18,72%	191	4,84%
Staff	1.909	48,36%	652	16,52%
Jumlah Total	3.001	76,03%	946	23,97%

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
Doktoral (S3) Doctoral Degree (S3)	-	-	-	-	-	-
Pascasarjana (S2) Master's Degree (S2)	23	0,58%	34	0,50%	(11)	(32,35%)
Sarjana (S1) Bachelor's Degree (S1)	1.743	44,16%	2.867	42,21%	(1.124)	(39,20%)
Diploma IV Diploma IV	14	0,35%	13	0,19%	1	7,69%
Diploma III Diploma III	301	7,63%	541	7,96%	(240)	(44,36%)
Diploma II Diploma II	3	0,08%	5	0,07%	(2)	(40,00%)



Tingkat Pendidikan Education Level	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
Diploma I Diploma I	11	0,28%	17	0,25%	(6)	(35,29%)
SMK Vocational High School (SMK)	699	17,71%	1.271	18,71%	(572)	(45,00%)
SMA Senior High School (SMA)	1.153	29,21%	2.044	30,09%	(891)	(43,59%)
SMP Junior High School (SMP)	-	-	1	0,01%	(1)	(100,00%)
SD Elementary School (SD)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	3.947	100,00%	6.793	100,00%	(2.846)	(41,90%)

Komposisi Karyawan berdasarkan Kelompok Usia

Employee Composition by Age Group

Kelompok Usia Age Group	2025		2024		Kenaikan (Penurunan) Tahun 2025-2024 Increase (Decrease) in 2025-2024	
	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Jumlah Total	Persentase Komposisi Percentage Composition	Selisih Difference	Persentase Percentage
< 25 Tahun Years old	252	6,38%	526	7,74%	(274)	(52,09%)
25-30 Tahun Years old	994	25,18%	1.960	28,85%	(966)	(49,28%)
31-35 Tahun Years old	1.079	27,34%	1.923	28,31%	(844)	(43,89%)
36-40 Tahun Years old	822	20,83%	1.298	19,11%	(476)	(36,67%)
≥ 41 Tahun Years old	800	20,27%	1.086	15,97%	(286)	(26,33%)
Jumlah Total	3.947	100,00%	6.793	100,00%	(2.846)	(41,90%)

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenjang Jabatan Karyawan Laki-laki dan Perempuan sesuai Kelompok Umur Tahun 2025

Employee Composition Based on Position Level of Male and Female Employees by Age Group in 2025

Deskripsi Description	Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		Manager (General Manager, Regional Manager, Senior Manager, Manager, Branch Operational Manager, BOM)		Assistant Manager		Supervisor		Staff	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
>45 tahun Years old	3	-	3	1	78	15	8	1	92	6	48	6
36-45 tahun Years old	-	-	2	-	154	33	18	7	393	67	573	114
26-35 tahun Years old	-	-	-	-	51	12	35	33	242	92	1.078	405
18-25 tahun Years old	-	-	-	-	-	-	1	1	12	26	210	127
Sub-Jumlah Sub-Total	3	-	-	-	284	60	62	42	739	191	1.909	652
Jumlah Total	3	-	6	-	343	-	104	-	930	-	2.561	-

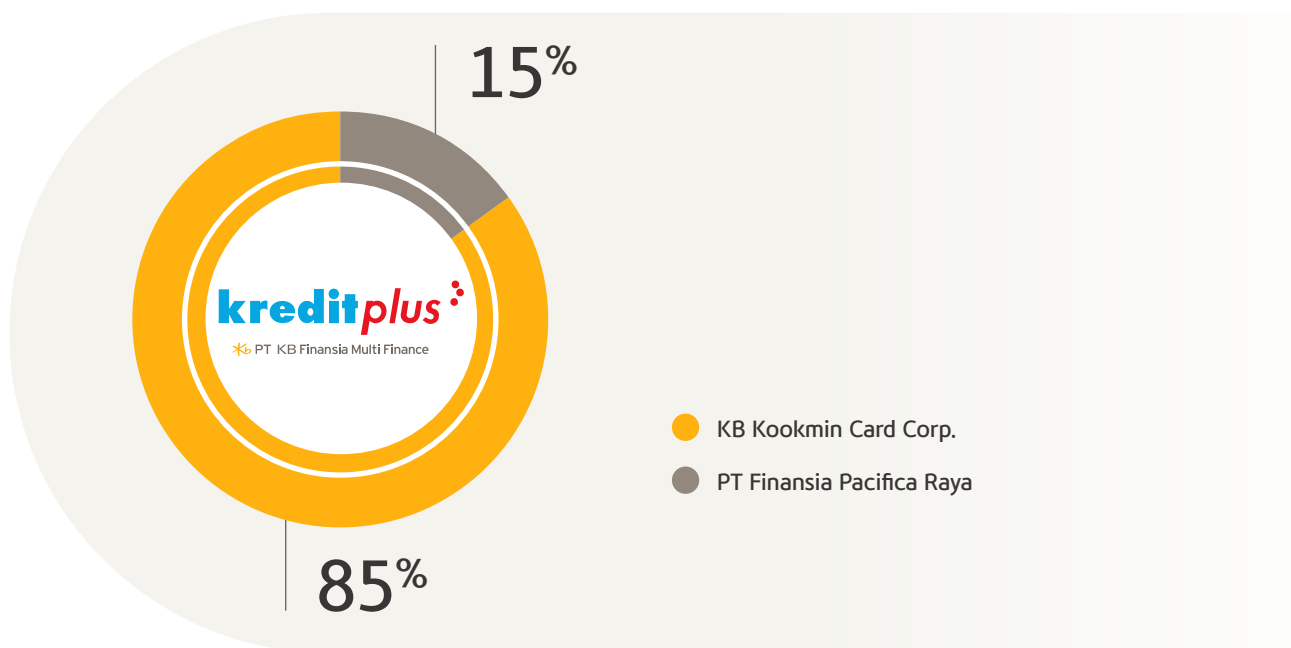


Informasi Pemegang Saham

Shareholders Information

Komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholder composition as of 31 December 2025, is as follows:



Nama Pemegang Saham Stakeholders Name	1 Januari 2025 1 January 2025			31 Desember 2025 31 December 2025		
	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Jumlah Nilai Saham (Rp) Total Share Value (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Jumlah Nilai Saham (Rp) Total Share Value (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Kepemilikan Saham Lebih dari 5% Share Ownership More Than 5%						
KB Kookmin Card Corp.	181.000.032	181.000.032.000	80,00	362.312.534	362.312.534.000	85,00
PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000	20,00	63.937.506	63.937.506.000	15,00
Kepemilikan Saham Kurang dari 5% Share Ownership Less Than 5%						
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Community (each under 5%)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	226.250.040	226.250.040.000	100,00	426.250.04	426.250.040.000	100,00

KEPEMILIKAN PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN STATUS INSTITUSIONAL

Struktur pemegang saham Perseroan per akhir 2025, jika dikelompokkan berdasarkan status institusional, adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDER OWNERSHIP BASED ON INSTITUTIONAL STATUS

The Company's shareholder structure as of the end of 2025, grouped by institutional status, is as follows:



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Jumlah Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Pemegang Saham Lokal Local Shareholders				
Perorangan Individuals	-	-	-	-
Institusi Institutions	1	63.937.506	63.937.506.000	15,00%
Sub-Jumlah Sub-Total	1	63.937.506	63.937.506.000	15,00%
Pemegang Saham Asing Foreign Shareholders				
Perorangan Individuals	-	-	-	-
Institusi Institutions	1	362.312.534	362.312.534.000	85,00%
Sub-Jumlah Sub-Total	1	362.312.534	362.312.534.000	85,00%
Jumlah Total	2	426.250.040	426.250.040.000	100,00%

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH JAJARAN MANAJEMEN KUNCI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercatat secara langsung sebagai pemegang saham Perseroan. Kendati demikian, Yap Tjay Hing, yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan Juli 2025, tercatat sebagai pemegang saham tidak langsung melalui kepemilikan saham di PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") sebesar 15% dari total keseluruhan saham Perseroan per 31 Desember 2025.

SHARE OWNERSHIP OF THE COMPANY BY KEY MANAGEMENT MEMBERS, BOTH DIRECT AND INDIRECT

Throughout 2025, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors were directly listed as shareholders of the Company. However, Yap Tjay Hing, who served as the Company's President Director until July 2025, was listed as an indirect shareholder through his ownership of shares in PT Finansia Pacifica Raya ("FPR"), representing 15% of the Company's total shares as of 31 December 2025.

Nama Name	Jabatan Position	Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership	
		1 Januari 2025 1 January 2025	31 Desember 2025 31 December 2025
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Sang In Lee	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Je Ui Jung	Komisaris Commissioner	-	-
Direksi Board of Directors			
Yap Tjay Hing ¹⁾	Direktur Utama President Director	20% ³⁾	
Peter Halim ²⁾	Direktur Utama President Director	-	-
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	-
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	-	-
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Director of Human Resources & General Affairs	-	-
Choi, Ho Jung	Direktur Director	-	-
Kyeongho Min	Direktur Director	-	-

Catatan | Note:

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 2025;

²⁾ Beliau resmi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 11 September 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 82 pada tanggal 16 September 2025;

³⁾ Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui FPR.

¹⁾ He officially resigned as President Director of the Company based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions on 3 July 2025;

²⁾ He has officially served as the Company's President Director since September 11, 2025, pursuant to Shareholders' Resolution No. 82 dated September 16, 2025;

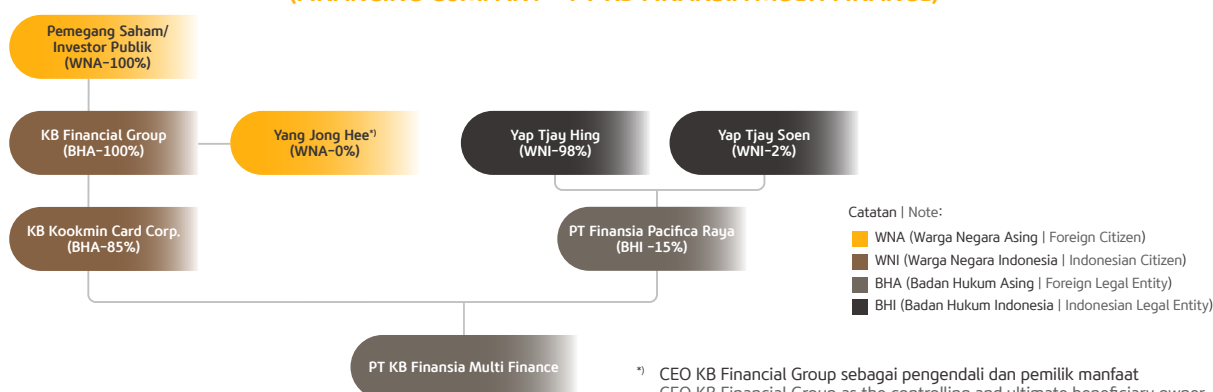
³⁾ Indirect ownership of the Company's shares through FPR.



INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI, SERTA PENERIMA MANFAAT AKHIR DARI KEPEMILIKAN SAHAM

Selama periode pelaporan tahun buku 2025, KB Kookmin Card Corp. bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan mayoritas mencapai 85% dari total saham Perseroan. Struktur Pemegang Saham Pengendali Perseroan disajikan pada bagan berikut ini:

(PERUSAHAAN PEMBIAYAAN – PT KB FINANSIA MULTI FINANCE) (FINANCING COMPANY – PT KB FINANSIA MULTI FINANCE)



Sebagaimana terlihat pada skema kepemilikan saham Perseroan di atas, pihak yang bertindak sebagai penerima manfaat akhir Perseroan adalah Yang Jong Hee selaku Chief Executive Officer KB Financial Group. Beliau memiliki kendali penuh atas Perseroan tanpa perlu persetujuan pihak lain.

KB Kookmin Card Corp. (“KBC”)

KB Kookmin Card Corp (“KBC”) adalah perusahaan kartu kredit ternama di Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 1987. KBC merupakan anak perusahaan dari KB Financial Group (“KBFG”), salah satu lembaga keuangan terbesar dan terkemuka di Korea Selatan. Dengan mengusung visi dan misi menjadi: “Penyedia Solusi Gaya Hidup No. 1,” KBC kini telah memiliki posisi yang kuat di industri jasa keuangan dengan menawarkan berbagai solusi pembayaran yang berkualitas dan adaptif, seperti pembayaran digital.

Hingga akhir Desember 2025, KBC telah memiliki fondasi operasional yang kuat melalui jaringan bisnis yang mencakup 29 Kantor Cabang dan didukung 1.438 karyawan serta jaringan internasional di negara selain Korea yang terdiri dari 3 Perusahaan Anak dan 1 Kantor Perwakilan.

PT Finansia Pacifica Raya (“FPR”)

PT Finansia Pacifica Raya (“FPR”) adalah perusahaan yang dimiliki oleh Yap Tjay Hing serta Yap Tjay Soen. FPR resmi didirikan pada tahun 1996 dengan berlandaskan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-7902 HT.01.01.Th.96 tanggal 28 Juni 1996.

INFORMATION ON MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS, AND ULTIMATE BENEFICIARIES OF SHARE OWNERSHIP

During the 2025 financial year reporting period, KB Kookmin Card Corp. acted as the Company’s Controlling Shareholder, with majority ownership reaching 85% of the Company’s total shares. The Company’s Controlling Shareholder structure is presented in the following chart:

As shown in the Company’s share ownership scheme above, the ultimate beneficiary of the Company is Yang Jong Hee, Chief Executive Officer of KB Financial Group. He has full control over the Company without requiring the approval of any other party.

KB Kookmin Card Corp. (“KBC”)

KB Kookmin Card Corp. (“KBC”) is a leading credit card company in South Korea, established in 1987. KBC is a subsidiary of KB Financial Group (“KBFG”), one of the largest and most prominent financial institutions in South Korea. With a vision and mission to become the “No. 1 Lifestyle Solution Provider,” KBC has established a strong position in the financial services industry by offering a variety of high-quality and adaptive payment solutions, including digital payments.

As of the end of December 2025, KBC will have a strong operational foundation through a business network that includes 29 branch offices and is supported by 1,438 employees, as well as an international network in countries other than Korea consisting of 3 subsidiaries and 1 representative offices.

PT Finansia Pacifica Raya (“FPR”)

PT Finansia Pacifica Raya (“FPR”) is a company owned by Yap Tjay Hing and Yap Tjay Soen. FPR was officially established in 1996 based on Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. 02-7902 HT.01.01.Th.96 dated June 28, 1996.

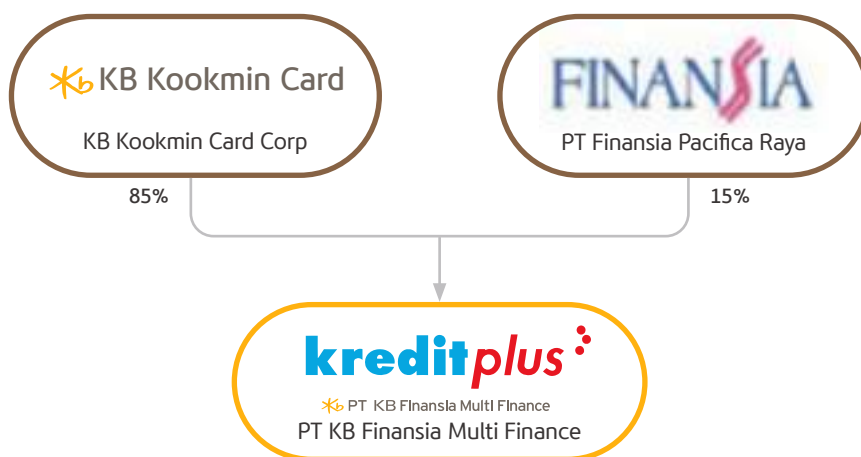


Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha KB Kookmin Card Corp. Struktur grup Perseroan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

The Company is part of the KB Kookmin Card Corp. business group. The Company's group structure as of December 31, 2025, is presented as follows:



Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, serta Perusahaan Ventura

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Sampai dengan akhir 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, maupun perusahaan ventura/patungan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama perusahaan, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, maupun status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, atau perusahaan ventura/patungan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2025.

As of the end of 2025, the Company does not have any subsidiaries, associated companies, or joint ventures. Therefore, there is no information regarding the company names, share ownership percentages, business fields, total assets, or operational status of subsidiaries, associated companies, or joint ventures in the 2025 Annual Report and Sustainability Report.



Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa manapun dan tidak melakukan penawaran umum perdana (IPO), sehingga tidak terdapat informasi terkait Kronologi Pencatatan Saham di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2025.

As of 31 December 2025, the Company will not trade its shares on any exchange and will not conduct an initial public offering (IPO). Therefore, there is no information regarding the Share Listing Chronology in the 2025 Annual Report and Sustainability Report.

Kronologi Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya

Chronology of Bonds and Other Securities Listing

OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022

Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK melalui Surat Keputusan No. S-126/D.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, untuk melakukan penawaran Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan pembayaran bunga setiap tiga bulan. Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri, yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp686.385.000.000,00, berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap 4,70% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan;
- Obligasi Seri B sebesar Rp313.615.000.000,00, berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat suku bunga tetap 7,40% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan.

KB FINANSIA MULTI FINANCE BONDS I 2022

The Company obtained an effective notice from the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Agency (OJK) through Decree No. S-126/D.04/2022 dated 14 July 2022, to offer KB Finansia Multi Finance Bonds I 2022 with a principal amount of IDR1,000,000,000,000.00 (one trillion Rupiah), with quarterly interest payments. These bonds are offered in two series:

- Series A Bonds of IDR686,385,000,000.00, with a term of 370 days with a fixed interest rate of 4.70% per annum, payable quarterly;
- Series B Bonds amounting to IDR313,615,000,000.00, with a term of three years with a fixed interest rate of 7.40% per annum, payable every three months.

OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023

Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK melalui Surat Keputusan No. S-133/D.04/2023 tanggal 19 Juni 2023, untuk melakukan penawaran Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri, yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp500.000.000.000,00, berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap 6,20% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan;

KB FINANSIA MULTI FINANCE BONDS II 2023

The Company obtained an effective notice from the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Agency (OJK) through Decree No. S-133/D.04/2023 dated 19 June 2023, to offer KB Finansia Multi Finance Bonds II 2023 with a principal amount of IDR1,000,000,000,000.00 (one trillion Rupiah). These bonds are offered in two series:

- Series A Bonds of IDR500,000,000,000.00, with a term of 370 days and a fixed interest rate of 6.20% per annum, payable quarterly;



- b. Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000,00, berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat suku bunga tetap 7,30% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan.

- b. Series B Bonds of IDR500,000,000,000.00, with a term of three years and a fixed interest rate of 7.30% per annum, payable quarterly.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024

Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK melalui Surat Keputusan No. S-164/D.04/2024 tanggal 11 Desember 2024, untuk melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok sebesar Rp394.035.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri, yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp326.025.000.000,00, berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap 6,70% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan;
- Obligasi Seri B sebesar Rp68.010.000.000,00, berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat suku bunga tetap 7,00% per tahun, dibayarkan setiap tiga bulan.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan obligasi seiring dengan strategi pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kronologi pencatatan seluruh obligasi yang diterbitkan Perseroan di BEI sampai dengan akhir 2025 disajikan pada tabel berikut:

KB FINANSIA MULTI FINANCE SHELF- REGISTERED BONDS I PHASE I YEAR 2024

The Company obtained an effective notice from the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Agency (OJK) through Decree No. S-164/D.04/2024 dated 11 December 2024, to offer KB Finansia Multi Finance Shelf-Registered Bonds I Phase I Year 2024 with a principal amount of IDR394,035,000,000.00 (three hundred ninety-four billion thirty-five million Rupiah). These bonds are offered in two series:

- Series A Bonds of IDR326,025,000,000.00, with a term of 370 days, with a fixed interest rate of 6.70% per annum, payable quarterly;
- Series B Bonds amounting to IDR68,010,000,000.00, with a term of three years with a fixed interest rate of 7.00% per year, paid every three months.

In 2025, the Company did not issue any bonds in line with its funding strategy tailored to business needs. The chronology of all bonds issued by the Company on the IDX through the end of 2025 is presented in the following table:

Jenis Obligasi Type of Bond	Tahun Penerbitan Issuing Year	Seri Series	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Bunga Obligasi Interest Bond (%)	Peringkat Obligasi Bond Rating	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Pencatatan Obligasi Bond Listing	Status Pembayaran Payment Status
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Shelf Registration Bonds I KB Finansia Multi Finance Phase I Year 2024	2024	Seri A	Rp326.025.000.000	6,70% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 6.70% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	27 Desember 2025 December 27, 2025	BEI IDX	Lunas Paid
	2024	Seri B	Rp68.010.000.000	7,00% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.00% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	17 Desember 2027 December 17, 2027	BEI IDX	Belum Jatuh Tempo Not Yet Due
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Bonds II KB Finansia Multi Finance Year 2023	2023	Seri A	Rp500.000.000.000	6,20% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 6.20% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	7 Juli 2024 July 7, 2024	BEI IDX	Lunas Paid
	2023	Seri B	Rp500.000.000.000	7,30% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.30% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	27 Juni 2026 June 27, 2026	BEI IDX	Belum Jatuh Tempo Not Yet Due
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Bonds I KB Finansia Multi Finance Year 2022	2022	Seri A	Rp686.385.000.000	4,70% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 4.70% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	370 hari kalender 370 calendar days	2 Agustus 2023 August 2, 2023	BEI IDX	Lunas Paid
	2022	Seri B	Rp313.615.000.000	7,40% per tahun (dibayarkan setiap 3 bulan) 7.40% per annum (paid quarterly)	AAAidn (Triple A)	3 tahun 3 years	22 Juli 2025 July 22, 2025	BEI IDX	Lunas Paid



Perseroan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang (*performing*) sebagai berikut:

- a. 60% dari total nilai emisi Obligasi yang dimiliki dan merupakan kekayaan Perseroan, sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 dan Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023;
- b. 40% dari total nilai emisi Obligasi yang dimiliki dan merupakan kekayaan Perseroan, sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024;
- c. Piutang (*performing*) dimaksud adalah piutang yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender.

KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK-EFEK LAINNYA

Selain obligasi yang telah diuraikan pada tabel di atas, Perseroan tidak pernah menerbitkan surat utang atau efek utang lainnya.

The Company provides guarantees to Bondholders through the Trustee in the form of performing receivables as follows:

- a. 60% of the total value of the Bonds issued and constituted as Company assets, in accordance with the Trustee Agreement, for KB Finansia Multi Finance Bond I in 2022 and KB Finansia Multi Finance Bond II in 2023;
- b. 40% of the total value of the Bonds issued and constituted as Company assets, in accordance with the Trustee Agreement, for KB Finansia Multi Finance Shelf-Registered Bond I Phase I in 2024;
- c. Performing receivables are receivables that have not experienced delays in principal and/or interest payments of more than 90 (ninety) calendar days.

CHRONOLOGY OF ISSUANCE OF OTHER SECURITIES

Other than the bonds described in the table above, the Company has never issued debt securities or other debt securities.



Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Information on the Use of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Services

Pada tahun 2025, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO International Limited*) yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit sebagaimana ditetapkan melalui keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 23 April 2025.

In 2025, the Company appointed the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners (a Member of BDO International Limited), registered with the Financial Services Authority (OJK), as the independent auditor for the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2025. This appointment was made based on a proposal from the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, as stipulated in the resolution of the Annual GMS on 23 April 2025.

Informasi KAP dan Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accountant Information

Nama Lembaga
Institution Name

Alamat
Address

Nama Akuntan Publik
Name of Public Accountant

Jasa yang Diberikan
Services Provided

Periode
Period

Biaya Jasa Audit
Audit Fee

Biaya Jasa Non-Audit (jika ada)
Non-Audit Fee (if any)

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited)

Prudential Tower, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Indonesia
Tel.: +62-21 5795 7300

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Indonesia
Tel.: +62-21 5795 7300

Bapak Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA
Mr. Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA

Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2025
General Audit of the Financial Statements for Fiscal Year 2025

Tahun Buku 2025
Fiscal Year 2025

Rp200.000.000 (General audit 31 Desember 2025 | 31 December 2025)

1. Rp85.000.000 (*Limited review 31 Maret 2025 | March 31, 2025*)
2. Rp85.000.000 (*Limited review 30 Juni 2025 | June 30, 2025*)
3. Rp85.000.000 (*Limited review 30 September 2025 | September 30, 2025*)

PERIODE AUDIT

Informasi mengenai KAP dan AP, beserta opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut:

AUDIT PERIOD

Information regarding the Public Accounting Firm (KAP) and Public Accounting Firm (AP), along with the external auditor's opinion on the Company's annual financial statements for the last three years, is presented in the following table:



Tahun Buku Financial Year	Nama KAP KAP Name	Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Opini Audit Audit Opinion	Fee atas Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan Fee for Annual Financial Statement Audit Services		Fee atas Jasa Non-Audit Laporan Keuangan Tahunan Fee for Non-Audit Services for Annual Financial Statements	
				Laporan Keuangan Financial Statements	Fee Fee	Laporan Keuangan Financial Statements	Fee Fee
2025	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO International Limited)	Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	31 Desember 2025 December 31, 2025	Rp200.000.000 tidak termasuk pajak IDR200,000,000 excluded tax	31 Maret 2025 (Diaudit secara terbatas) March 31, 2025 (Limited Review)	Rp85.000.000 tidak termasuk pajak IDR85,000,000 excluded tax
						30 Juni 2025 (Diaudit secara terbatas) June 30, 2025 (Limited Review)	Rp85.000.000 tidak termasuk pajak IDR85,000,000 excluded tax
						30 September 2025 (Diaudit secara terbatas) September 30, 2025 (Limited Review)	Rp85.000.000 tidak termasuk pajak IDR85,000,000 excluded tax
2024	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO International Limited)	Santanu Chandra, SE, Ak., CPA, CA	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	31 Maret 2024 March 31, 2024	Rp100.000.000 tidak termasuk pajak IDR100,000,000 excluded tax	30 September 2024 (Diaudit secara terbatas) September 30, 2024 (Limited Review)	Rp85.000.000 termasuk pajak IDR85,000,000 include tax
				30 Juni 2024 June 30, 2024	Rp100.000.000 tidak termasuk pajak IDR100,000,000 excluded tax		
				30 Juni 2024 (untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024) June 30, 2024 (for Shelf Registration Bonds I KB Finansia Multi Finance Phase I Year 2024)	Rp385.000.000 tidak termasuk pajak IDR385,000,000 excluded tax		
				31 Desember 2024 December 31, 2024	Rp195.000.000 tidak termasuk pajak IDR195,000,000 excluded tax		
2023	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO International Limited)	Santanu Chandra, CPA	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	31 Desember 2023 (untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023) December 31, 2023 (for Bonds II KB Finansia Multi Finance Year 2023)	Rp380.000.000 tidak termasuk pajak IDR380,000,000 excluded tax	31 Maret 2023 (Diaudit secara terbatas) March 31, 2023 (Limited Review)	Rp82.500.000 termasuk pajak IDR82,500,000 include tax
				31 Desember 2023 December 31, 2023	Rp175.000.000 tidak termasuk pajak IDR175,000,000 excluded tax	30 Juni 2023 (Diaudit secara terbatas) June 30, 2023 (Limited Review)	Rp82.500.000 termasuk pajak IDR82,500,000 include tax
						30 September 2023 (Diaudit secara terbatas) September 30, 2023 (Limited Review)	Rp82.500.000 termasuk pajak IDR82,500,000 include tax



Informasi Mengenai Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Information regarding Supporting Institutions and/or Professions

Perseroan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan profesi penunjang untuk mendukung kelancaran operasional dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Uraian lengkap mengenai profesi penunjang tersebut disajikan berikut ini:

The Company collaborates with various supporting institutions and professions to support the smooth operation of its business activities as a finance company. A complete description of these supporting professions is presented below:

Nama Lembaga Institution Name	Alamat Address	Lingkup Jasa yang Diberikan Scope of Service Provided	Periode Penugasan Assignment Period	Fee Fee
Lembaga Pemeringkat Efek Securities Rating Agency				
PT Fitch Ratings Indonesia	DBS Bank Tower, 24 th Floor Suite 2403 Jl. Prof. DR. Satrio, No. Kav 3-5, Jakarta 12940 – Indonesia Tel +62-21 2988 680	Memberikan evaluasi dan peringkat yang independen atas Perseroan dan penerbitan obligasi. Provide independent evaluation and ranking of bond issuance.	2025	Rp155.000.000 di luar pajak IDR155,000,000 excluding tax
Wali Amanat Trustee				
PT Bank Mandiri Tbk	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36- 38, Jakarta 12190 Indonesia Tel. +62-21524 5161	Mewakili dan melindungi kepentingan pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam akta perjanjian perwalian. Represent and protect the interests of bond holders in accordance with the provisions contained in the deed of trust agreement.	2025	Rp100.000.000 di luar pajak IDR100,000,000 excluding tax
Notaris Notary				
Jose Dima Satria S.H. M.Kn.	Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12420 Tel. +62-2129125500 Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A, Gandaria Selatan Urban Village, Cilandak District, South Jakarta 12420 Tel. +62- 2129125500	Menyiapkan dan membuat akta-akta Perseroan. Prepare and make Company's deeds.	2025	Rp47.500.000 di luar pajak IDR47,500,000 excluding tax
Pencatatan Emisi Obligasi Listing of Bond Emissions				
Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. +62-21515 0515 Fax. +62-21 515-033 Indonesia Stock Exchange Building Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. +62-21515 0515 Fax. +62-21 515-033	Melakukan pencatatan dalam Penerbitan Emisi Obligasi yang ditawarkan kepada Publik. Carrying out listings in the issuance of Bond Emissions offered to the Public	2025	Rp253.474.500 di luar pajak IDR253,474,500 excluding tax



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Untuk mencegah publikasi yang bias atau tidak akurat, Perseroan mengoptimalkan situs web resmi (<https://kreditplus.com/>) sebagai kanal komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja perusahaan secara transparan, akurat, dan kredibel. Pengelolaan situs web dilakukan secara profesional oleh unit kerja terkait dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") tentang Situs Web Emiten. Seluruh informasi yang tersaji pada laman web Perseroan senantiasa dimutakhirkan secara berkala agar tetap valid dan faktual, sehingga dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Seluruh informasi yang tersedia di laman web Perseroan disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyajian dual Bahasa ini memungkinkan investor dan pemangku kepentingan asing dapat memahami informasi yang disampaikan sehingga jangkauan komunikasi Perseroan menjadi lebih luas.

Sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan selalu berhati-hati dalam mempublikasikan informasi agar setiap data dapat dipertanggungjawabkan dan kerahasiaan informasi sensitif tetap terjaga. Seluruh informasi yang disebarluaskan melalui situs web Perseroan telah diverifikasi oleh manajemen sebelum dipublikasikan untuk memastikan validitasnya.

Dengan tetap memperhatikan unsur kerahasiaan informasi perusahaan, situs web Perseroan secara garis besar menampilkan informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Informasi Korporat

Informasi Korporat terbagi menjadi 4 (empat) bagian utama yang terdiri dari Tentang Kami, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

a. Portal Tentang Kami memuat informasi Perseroan seperti Informasi Umum, Visi Misi, Prestasi, Riwayat Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Struktur Kepemilikan, Struktur Grup, Profil Direksi, Profil Dewan Komisaris, Profil Komite, Profil Sekretaris Perusahaan, dan Anggaran Dasar.

b. Portal Hubungan Investor memuat tentang Profesi Penunjang dan Informasi bagi Investor.

To prevent biased or inaccurate publications, the Company optimizes its official website (<https://kreditplus.com/>) as a communication channel to convey company performance information in a transparent, accurate, and credible manner. The website is professionally managed by the relevant work units, in accordance with OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 ("POJK 8/2015") concerning Issuer Websites. All information presented on the Company's website is regularly updated to ensure its validity and factuality, thus assisting the public and stakeholders in making business decisions.

All information available on the Company's website is presented in two languages: Indonesian and English. This dual-language presentation allows investors and foreign stakeholders to understand the information presented, thereby broadening the Company's communication reach.

In line with the principles of good corporate governance, the Company always takes care in publishing information to ensure that all data is accountable and the confidentiality of sensitive information is maintained. All information disseminated through the Company's website has been verified by management before publication to ensure its validity.

While maintaining the confidentiality of corporate information, the Company's website generally displays general information accessible to the public and stakeholders, including:

1. Corporate Information

Corporate Information is divided into four main sections: About Us, Investor Relations, Corporate Governance, and Social and Environmental Responsibility.

a. The About Us portal contains Company information such as General Information, Vision and Mission, Achievements, Brief Company History, Organizational Structure, Ownership Structure, Group Structure, Directors Profile, Board of Commissioners Profile, Committee Profiles, Corporate Secretary Profile, and Articles of Association.

b. The Investor Relations portal contains information about Supporting Professionals and Information for Investors.



- c. Portal Tata Kelola Perusahaan memuat informasi tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Piagam Unit Audit Internal, Kode Etik, Pedoman Komite, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran, Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud, dan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - d. Portal Tanggung Jawab Sosial memuat informasi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial.
2. **Produk**
Bagian ini menjelaskan berbagai macam produk yang disediakan Perseroan secara terstruktur dan terperinci. Portal Produk memuat informasi tentang Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum, Multi Produk, Agunan Mobil, Agunan Motor, Anjak Piutang, Agunan Tanah dan Bangunan, Mobil Baru, Jual dan Sewa Balik Agunan Mobil, dan Pembiayaan Fleet.
 3. **Digital**
Bagian ini menjelaskan informasi seputar layanan berbasis teknologi yang disediakan oleh Perseroan, di antaranya adalah Kreditplus Mobile dan Kreditmu.
 4. **Informasi**
Bagian ini memuat 8 (delapan) bagian yang terdiri dari Artikel, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan, Identitas Brand, Publikasi Pengaduan Konsumen, Laporan Keberlanjutan, Pemrosesan Data Pribadi Konsumen dan Pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi.
 5. **Hi Kreditplus**
Bagian ini menjelaskan informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor selain Kantor Cabang, Hubungi Kami, Karir, LAPS, Proses Pelayanan Kreditplus Care, Prosedur Pengkinian Data Konsumen.
- c. The Corporate Governance portal contains information on Good Corporate Governance, the Internal Audit Unit Charter, the Code of Ethics, Committee Guidelines, Risk Management Policy, Whistleblowing System Mechanism Policy, Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies, and Guidelines for the Anti-Bribery Management System.
 - d. The Social Responsibility portal contains information about the Company's Social Responsibility and Environmental and Social Policies.
2. **Products**
This section explains the various products offered by the Company in a structured and detailed manner. The Product Portal includes information on General Product and Service Summary Information, Multi-Products, Car Collateral, Motorcycle Collateral, Factoring, Land and Building Collateral, New Cars, Car Collateral Sale and Leaseback, and Fleet Financing.
 3. **Digital**
This section explains information about the technology-based services provided by the Company, including Kreditplus Mobile and Kreditmu.
 4. **Information**
This section contains eight sections: Articles, Privacy Policy, Terms and Conditions, Brand Identity, Consumer Complaint Publication, Sustainability Report, Consumer Personal Data Processing, and Personal Data Protection Notice.
 5. **Hi Kreditplus**
This section provides information about Branch Offices and Offices other than Branch Offices, Contact Us, Careers, LAPS, Kreditplus Care Service Process, and Consumer Data Update Procedures.

PEMENUHAN INFORMASI PADA SITUS WEB PERSEROAN

Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan POJK 8/2015, berikut adalah daftar informasi yang disediakan di situs resmi Perseroan, antara lain:

COMPLIANCE WITH INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

As a form of compliance with POJK 8/2015, the following is a list of information provided on the Company's official website, including:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi Pemegang Saham Sampai dengan Pemilik Akhir Individu Shareholder Information Down to the Ultimate Individual Owner	✓	https://kreditplus.com/ownership-structure
Struktur Organisasi Organizational Structure	✓	https://kreditplus.com/organization-structure
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	✓	https://kreditplus.com/information-for-investors
Laporan Keuangan Tahunan (5 Tahun Terakhir) Annual Financial Statements (Last 5 Years)	✓	https://kreditplus.com/information-for-investors
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	https://kreditplus.com/board-of-commissioners https://kreditplus.com/board-of-directors



04

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

Sumber Daya Manusia
Human Resources
Teknologi Informasi
Information Technology

110

130





Sumber Daya Manusia

Human Resources



“Melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada adaptabilitas, fleksibilitas, dan peningkatan kompetensi, Perseroan mampu memperkuat daya saing serta membangun bisnis dan organisasi yang resilien.”

“Through human resources management focused on adaptability, flexibility, and skill development, the Company is able to strengthen its competitiveness and build a resilient business and organization.”



STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TALENTA PERSEROAN

Dalam menghadapi persaingan industri *multifinance* yang semakin dinamis, Perseroan menempatkan pengelolaan talenta sebagai fondasi utama keberlanjutan bisnis. Perseroan memahami bahwa keberhasilan setiap strategi, inovasi produk, dan layanan sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan keterlibatan karyawan. Berangkat dari kesadaran penuh akan hal ini, Perseroan menyusun program pengembangan Sumber Daya Manusia (“SDM”) secara terstruktur yang menitikberatkan pada adaptabilitas, fleksibilitas, dan kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan bisnis serta kemajuan teknologi.

Setiap inisiatif pengelolaan SDM Perseroan dirancang tidak hanya untuk mendorong produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, inklusif, dan setara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perseroan menekankan penguatan struktur organisasi agar Perseroan perusahaan menjadi lebih produktif, efisien, dan mampu mewujudkan visi serta misi secara optimal.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan serangkaian program pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis karyawan sekaligus mengembangkan kemampuan non-teknis, termasuk kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui berbagai inisiatif pengembangan kompetensi ini, Perseroan memastikan setiap karyawan memiliki kemampuan profesional dan sikap kerja yang adaptif, sekaligus siap menghadapi tantangan transformasi digital, sehingga setiap pencapaian dalam pertumbuhan perusahaan dapat diraih secara bersama-sama.

Dalam menjalankan praktik pengelolaan SDM, Perseroan juga senantiasa menjaga citra dan reputasinya dengan memastikan keselarasan antara implementasi kebijakan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai bentuk komitmen nyata, Perseroan secara berkala meninjau kebijakan internal dan melakukan pembaruan bila diperlukan, sehingga tetap relevan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, Perseroan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang bertanggung jawab sebagai landasan untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

COMPANY TALENT MANAGEMENT STRATEGY AND POLICY

In facing the increasingly dynamic competition in the multifinance industry, the Company places talent management as a key foundation for business sustainability. The Company understands that the success of every strategy, product innovation, and service is highly dependent on the competence, integrity, and engagement of its employees. Fully aware of this, the Company has developed a structured Human Resources (“HR”) development program that emphasizes employee adaptability, flexibility, and the ability to navigate business changes and technological advancements.

Each of the Company’s HR management initiatives is designed not only to boost productivity but also to create a comfortable, inclusive, and equitable work environment. To achieve these goals, the Company emphasizes strengthening its organizational structure to make the company more productive and efficient, and to optimally realize its vision and mission.

Throughout 2025, the Company has conducted a series of training programs aimed at enhancing employee technical skills while developing non-technical capabilities, including leadership, communication, and collaboration. Through these competency development initiatives, the Company ensures that each employee possesses professional skills and an adaptive work attitude, while also being prepared to face the challenges of digital transformation, so that every achievement in the company’s growth can be achieved together.

In carrying out HR management practices, the Company also consistently maintains its image and reputation by ensuring alignment between policy implementation and the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which has been updated through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. As a form of real commitment, the Company periodically reviews internal policies and makes updates when necessary, so that they remain relevant and in accordance with applicable laws. Through this approach, the Company not only complies with regulations but also builds a responsible work culture as a foundation for achieving sustainable performance.



KERANGKA MANAJEMEN SDM UNTUK MERAHAI KINERJA OPTIMAL

Kerangka Manajemen SDM merupakan fondasi strategis yang dirancang untuk memastikan seluruh potensi karyawan dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang terstruktur, kerangka ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan administratif, tetapi juga menekankan pengembangan kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan karyawan sebagai faktor kunci dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal.

Dalam kerangka ini, setiap elemen manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas, manajemen kinerja, hingga penghargaan dan pengakuan, seluruhnya dijalankan secara terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi.

Dalam mempersiapkan talenta-talenta terbaik yang profesional dan kompeten di semua tingkatan organisasi, Perseroan telah merancang strategi pengelolaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan mendorong kemampuan berinovasi setiap karyawan. Semua upaya ini dilakukan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etis, serta mewujudkan semangat nilai-nilai dan budaya Perseroan.

Sejalan dengan itu, Perseroan juga berkomitmen mempertahankan talenta-talenta terbaik melalui pembangunan *Employee Value Proposition* (EVP) yang jelas. Berbagai program dan inisiatif dirancang untuk memberikan pengalaman berkarier (*employee experience*) yang positif bagi seluruh karyawan. Strategi ini tidak hanya memperkuat keterikatan karyawan, tetapi juga meningkatkan daya tarik Perseroan sebagai tempat bekerja yang unggul di mata para talenta.

Komitmen tinggi Perseroan dalam menjangkau talenta berkualitas hingga mengawal pengembangan kapasitas seluruh karyawan tercermin dalam *framework* pengelolaan SDM yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Perseroan. Kerangka ini memastikan bahwa seluruh elemen manajemen SDM berjalan secara terintegrasi, membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing organisasi secara berkelanjutan.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR ACHIEVING OPTIMAL PERFORMANCE

The Human Resource Management Framework is a strategic foundation designed to ensure that all employees' potential is maximized effectively and efficiently. With a structured approach, this framework focuses not only on administrative management but also emphasizes employee competency development, motivation, and well-being as key factors in achieving optimal organizational performance.

Within this framework, every element of HR management, from workforce needs planning, recruitment and selection, capacity development, performance management, to rewards and recognition, is implemented in an integrated manner. This approach ensures that every individual has the opportunity to develop according to their abilities and contribute to organizational goals.

To prepare the best professional and competent talent at all levels of the organization, the Company has designed a human resource management strategy aimed at improving the quality of knowledge, fostering leadership, and encouraging the innovative capabilities of each employee. All of these efforts are carried out while adhering to moral and ethical values and embodying the spirit of the Company's values and culture.

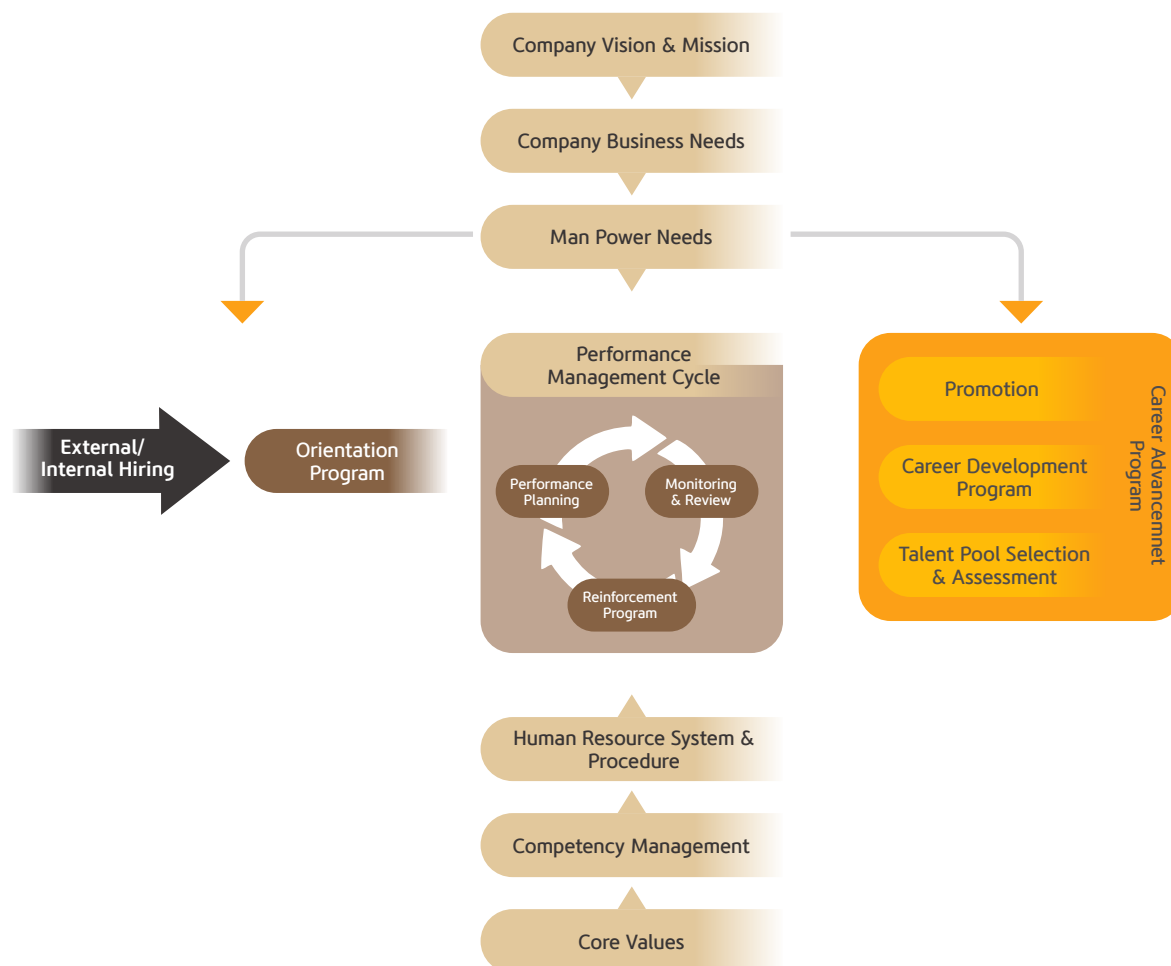
In line with this, the Company is also committed to retaining the best talent through the development of a clear Employee Value Proposition (EVP). Various programs and initiatives are designed to provide a positive career experience for all employees. This strategy not only strengthens employee engagement but also enhances the Company's attractiveness as a superior employer in the eyes of potential talent.

The Company's strong commitment to attracting quality talent and overseeing the capacity development of all employees is reflected in its human resource management framework, which is aligned with the Company's Vision and Mission. This framework ensures that all elements of human resource management operate in an integrated manner, fostering an adaptive and collaborative work culture, encouraging innovation, and strengthening the organization's sustainable competitiveness.



Berdasarkan *framework* yang telah ditetapkan, strategi perencanaan SDM Perseroan difokuskan pada identifikasi kebutuhan tenaga kerja sebagai langkah awal, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan bisnis Perseroan.

Based on the established framework, the Company's HR planning strategy focuses on identifying workforce needs as the initial step, ensuring that these needs are met to support the achievement of the Company's vision, mission, and business objectives.



Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengintegrasikan strategi pengelolaan SDM dengan rencana bisnis korporat agar dapat menarik dan menyeleksi kandidat karyawan terbaik yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan mempertahankan daya saing dan mencapai kinerja usaha yang optimal.

In its implementation, the Company integrates its HR management strategy with its corporate business plan to attract and select the best employee candidates who align with the organization's qualifications and needs. This approach enables the Company to maintain its competitiveness and achieve optimal business performance.

Sampai dengan tahun 2025, Perseroan menekankan 3 (tiga) fondasi utama sebagai pijakan dalam pengelolaan SDM yang efisien, yakni: (1) *Core Values* sebagai pedoman perilaku dan budaya kerja; (2) Pengembangan Kompetensi untuk memastikan setiap karyawan memiliki kemampuan yang relevan dan berkembang seiring perubahan bisnis; dan (3) Sistem & Prosedur Pengelolaan SDM guna memastikan seluruh proses berjalan efektif dan konsisten.

Until 2025, the Company emphasizes 3 (three) main foundations as the foundation for efficient HR management: (1) Core Values as guidelines for behavior and work culture; (2) Competency Development to ensure that each employee possesses relevant skills and develops in line with business changes; and (3) HR Management Systems & Procedures to ensure that all processes are effective and consistent.



Selain itu, Perseroan juga menempatkan keberagaman dan inklusivitas sebagai pilar utama dalam strategi pengelolaan karyawan. Melalui penerapan seluruh fondasi ini secara optimal, Perseroan berupaya membangun kolaborasi yang harmonis antara organisasi dan karyawan sehingga tercipta budaya kerja yang produktif dan selaras untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan.

Core Values

Dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis, Perseroan telah menetapkan nilai-nilai inti (*Core Values*) sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi seluruh karyawan dalam menciptakan budaya perusahaan yang produktif, sekaligus menjadi landasan motivasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan bisnis.

Hingga kini, Perseroan terus memperkuat implementasi mengokohkan 7 (tujuh) nilai-nilai inti di seluruh organisasi internal perusahaan, yaitu:

1. **Integritas** – Menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan.
2. **Kerja Sama** – Mendorong kolaborasi antar tim untuk menciptakan sinergi dan inovasi.
3. **Peduli dan Bertanggung Jawab** – Memperhatikan dampak tindakan terhadap rekan kerja, pelanggan, dan lingkungan sekitar.
4. **Melakukan dengan Benar & Mengembangkan Diri** – Menyelesaikan tugas dengan tepat sekaligus berupaya meningkatkan kompetensi diri.
5. **Sikap 'Pasti Bisa' (*Can-do Attitude*)** – Menunjukkan inisiatif dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan.
6. **Tidak Rumit** – Mengedepankan kesederhanaan dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.
7. **Rajin dan Tekun** – Konsisten dalam bekerja dengan dedikasi tinggi untuk mencapai hasil terbaik.

Agar penerapan nilai-nilai tersebut berjalan efektif, Perseroan melakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan memastikan implementasinya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Melalui penerapan nilai-nilai inti ini secara konsisten, Perseroan optimis dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif, sekaligus mendukung pencapaian kinerja ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan Kompetensi

Perseroan mengembangkan seluruh program peningkatan kapabilitas SDM dengan menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pembentukan perilaku kerja yang efektif. Pendekatan ini bertujuan mencetak SDM yang unggul, profesional, dan siap mendukung pencapaian seluruh tujuan bisnis Perseroan.

Furthermore, the Company also prioritizes diversity and inclusivity as key pillars in its employee management strategy. By optimally implementing these foundations, the Company strives to build harmonious collaboration between the organization and its employees, creating a productive and aligned work culture that supports the sustainable achievement of business goals.

Core Values

In carrying out all business activities, the Company has established core values as guidelines for all employees in carrying out their duties and responsibilities. These values serve as the foundation for all employees in creating a productive corporate culture and serve as a foundation for motivation in facing complex business challenges.

To date, the Company continues to strengthen the implementation of its 7 (seven) core values across the organization internally, namely:

1. **Integrity** – Upholding honesty and transparency in every action.
2. **Teamwork** – Encouraging collaboration between teams to create synergy and innovation.
3. **Caring and Responsibility** – Considering the impact of actions on colleagues, customers, and the surrounding environment.
4. **Doing It Right & Self Improvement Developing Yourself** – Completing tasks accurately while striving to improve your own competencies.
5. **Can-Do Attitude** – Demonstrating initiative and resilience in facing challenges.
6. **Simplicity Uncomplicated** – Prioritizing simplicity and efficiency in work execution.
7. **Diligence and Perseverance** – Consistently working with high dedication to achieve the best results.

To ensure the effective implementation of these values, the Company conducts regular outreach to enhance employee understanding and ensure their implementation in every task and responsibility they undertake. Through consistent application of these core values, the Company is optimistic about creating a productive and positive work environment, while simultaneously supporting the achievement of sustainable economic performance.

Competency Development

The Company develops comprehensive human resource capability development programs, emphasizing knowledge enhancement, competency enhancement, and the development of effective work behaviors. This approach aims to develop superior, professional human resources ready to support the achievement of all of the Company's business objectives.



Dalam praktiknya, Perseroan menyelenggarakan program pelatihan yang mencakup pemenuhan ketentuan OJK, kebutuhan bisnis, pengembangan kompetensi digital, *onboarding* karyawan baru, pengembangan talenta, sertifikasi, serta internalisasi budaya perusahaan. Kegiatan ini didukung dengan infrastruktur pelatihan tatap muka, *online*, dan *e-learning* dengan materi terstruktur, sosialisasi efektif, dan *monitoring* berkelanjutan sehingga pengembangan kompetensi dapat berjalan optimal dan selaras dengan arah transformasi Perseroan.

Sistem & Prosedur Pengelolaan SDM

Perseroan memastikan seluruh proses pengelolaan SDM didukung oleh standar dan sistem yang efisien, mencakup orientasi program, siklus manajemen kinerja (*Performance Management Cycle*), dan program pengembangan karir (*Career Advancement Program*). Sistem ini dirancang untuk menjamin setiap tahapan pengelolaan SDM berjalan konsisten dan selaras dengan tujuan bisnis Perseroan.

Proses pengelolaan SDM dimulai dengan menjaring talenta terbaik yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan masing-masing unit kerja. Kandidat yang lolos seleksi selanjutnya diikutsertakan pada program orientasi yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai budaya kerja, nilai perusahaan, serta tanggung jawab yang akan dijalankan. Melalui program ini, setiap karyawan baru diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal dalam tim maupun organisasi secara keseluruhan.

Kualitas SDM juga dijaga melalui penilaian kinerja berkala yang dilaksanakan dalam kerangka *Performance Management Cycle*. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan *review* kerja. Hasil evaluasi selanjutnya diimplementasikan melalui *Reinforcement Program* berbasis kinerja yang meliputi pelatihan, penghargaan, serta tindakan korektif. Program ini bertujuan memastikan setiap karyawan terus berkembang sekaligus mempertahankan keunggulan SDM Perseroan.

Sebagai langkah lanjutan, Perseroan juga menyediakan *Career Advancement Program* bagi karyawan yang menunjukkan performa tinggi, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempati posisi lebih strategis. Program ini menjadi jembatan bagi pengembangan kompetensi individu yang selaras dengan kebutuhan Perseroan, sekaligus mendorong pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan.

In practice, the Company conducts training programs that address compliance with OJK regulations, business needs, digital competency development, new employee onboarding, talent development, certification, and the internalization of corporate culture. These activities are supported by a comprehensive infrastructure of face-to-face, online, and e-learning training programs, with structured materials, effective outreach, and ongoing monitoring to ensure optimal competency development and alignment with the company's transformation direction.

HR Management Systems & Procedures

The Company ensures that all HR management processes are supported by efficient standards and systems, including program orientation, the Performance Management Cycle, and the Career Advancement Program. This system is designed to ensure that each stage of HR management is consistent and aligned with the Company's business objectives.

The HR management process begins with recruiting the best talent that matches the qualifications and needs of each work unit. Successful candidates are then enrolled in an orientation program designed to provide a comprehensive understanding of the company's work culture, values, and responsibilities. Through this program, each new employee is expected to adapt more quickly and contribute optimally to the team and the organization as a whole.

HR quality is also maintained through regular performance assessments conducted within the Performance Management Cycle framework. Evaluations are conducted comprehensively, from planning and implementation to monitoring and review. The evaluation results are then implemented through a performance-based Reinforcement Program that includes training, rewards, and corrective actions. This program aims to ensure the continuous development of each employee while maintaining the Company's HR excellence.

As a follow-up, the Company also provides a Career Advancement Program for high-performing employees, providing them with opportunities to occupy more strategic positions. This program serves as a bridge for developing individual competencies that align with company needs, while simultaneously encouraging the achievement of business goals in a sustainable manner.



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

Perseroan merancang struktur organisasi pengelolaan SDM yang jelas dan efisien untuk memastikan seluruh proses pengelolaan SDM berjalan optimal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 832/KBFMF/VIII/2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, seluruh aktivitas terkait pengelolaan SDM menjadi tanggung jawab unit-unit kerja di bawah People & Organization Development (termasuk *Talent Development*), Learning & Development, Recruitment, Compensation & Benefit, General Affairs, dan Industrial Relation, yang seluruhnya diawasi oleh Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Company has designed a clear and efficient HR management organizational structure to ensure that all HR management processes run optimally. Based on the Board of Directors' Decree No. 832/KBFMF/VIII/2025 concerning the Company's Organizational Structure, all activities related to HR management are the responsibility of work units under People & Organization Development (including Talent Development), Learning & Development, Recruitment, Compensation & Benefits, General Affairs, and Industrial Relations, all of which are supervised by the Director of Human Resources & General Affairs.



Struktur organisasi di atas dirancang agar setiap fungsi SDM mulai dari tahap rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga pengelolaan karier dapat dikelola secara terkoordinasi dan selaras dengan strategi bisnis Perseroan. Setiap unit memiliki peran dan tanggung jawab spesifik sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta penerapan kebijakan SDM yang konsisten di seluruh organisasi. Dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, Perseroan mampu menjaga kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang harmonis dan berorientasi pada hasil.

The organizational structure above is designed to ensure that every HR function, from recruitment and competency development to performance management and career management, can be managed in a coordinated manner aligned with the Company's business strategy. Each unit has specific roles and responsibilities, enabling rapid and accurate decision-making and consistent implementation of HR policies across the organization. With a well-defined organizational structure, the Company is able to maintain the quality of its human resources, increase productivity, and build a harmonious and results-oriented work culture.



MENARIK TALENTA UNGGUL UNTUK MASA DEPAN PERSEROAN

Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di industri *multifinance*, Perseroan menempatkan rekrutmen talenta unggul sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing. Proses rekrutmen dirancang secara selektif, transparan, dan tidak diskriminatif di mana hasil keputusan penerimaan atau penolakan kandidat sepenuhnya mengacu pada hasil evaluasi seleksi yang komprehensif.

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi inklusivitas dan transparansi, memastikan setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi. Proses rekrutmen juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat di daerah operasional, melalui prioritas bagi putra-putri daerah untuk mengisi posisi di kantor cabang masing-masing.

Dalam upaya menjaring karyawan unggul, Perseroan memprioritaskan *talent pool* internal untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya melalui kebijakan rotasi, penugasan, serta promosi jabatan. Apabila tidak terdapat kandidat internal yang memenuhi kualifikasi, maka proses rekrutmen dilanjutkan dengan memanfaatkan sumber eksternal melalui situs resmi Perseroan (<https://career.kreditplus.com/id>), portal pencarian kerja daring, serta kerja sama dengan universitas dan penyedia tenaga kerja profesional.

Selama proses pencarian kandidat karyawan, Perseroan kerap dihadapkan dengan sejumlah tantangan mulai dari persaingan ketat dengan perusahaan pembiayaan lain, kebutuhan kompetensi IT yang semakin spesifik, serta terbatasnya kandidat yang memahami regulasi dan proses bisnis pembiayaan. Kondisi ini menuntut Perseroan untuk menerapkan strategi rekrutmen yang adaptif, terukur, dan inovatif guna memastikan ketersediaan SDM yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Sepanjang tahun 2025, strategi rekrutmen Perseroan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi kekosongan (*vacant*) posisi strategis yang berperan langsung dalam pencapaian target Perseroan. Proses ini dilakukan melalui perluasan sumber rekrutmen yang relevan serta optimalisasi seleksi mulai dari tahap wawancara (*interview*), psikotes, *technical test*, hingga pemeriksaan latar belakang dan riwayat kredit secara *online*. Pendekatan yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan proses seleksi berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus memperluas jangkauan kandidat potensial yang dapat mendukung kebutuhan Perseroan.

ATTRACTING TOP TALENT FOR THE COMPANY'S FUTURE

Facing increasingly fierce competition in the multifinance industry, the Company prioritizes recruiting top talent as a key strategy to strengthen its competitiveness. The recruitment process is designed to be selective, transparent, and non-discriminatory, with the decision to accept or reject candidates based entirely on a comprehensive selection evaluation.

The Company consistently upholds inclusivity and transparency, ensuring that every candidate has an equal opportunity based on their competencies and qualifications. The recruitment process also contributes to community empowerment in its operational areas, by prioritizing local talent to fill positions in its respective branch offices.

In an effort to recruit top talent, the Company prioritizes its internal talent pool to improve time and resource efficiency through rotation, assignment, and promotion policies. If no qualified internal candidates are found, the recruitment process continues by utilizing external sources through the Company's official website (<https://career.kreditplus.com/id>), online job search portals, and collaborations with universities and professional labor providers.

During the employee candidate search process, the Company often encounters challenges, including intense peer competition, increasingly specific IT competency requirements, and a limited pool of candidates familiar with financing regulations and business processes. This situation requires the Company to implement an adaptive, measurable, and innovative recruitment strategy to ensure the availability of human resources that support business growth and sustainability.

Throughout 2025, the Company's recruitment strategy focused on meeting workforce needs to fill strategic vacancies that directly contribute to achieving the Company's targets. This process is carried out through expanding relevant recruitment sources and optimizing the selection process, from interviews and psychological assessments, technical tests, to online background and credit history checks. This comprehensive approach is designed to ensure an effective and efficient selection process while expanding the reach of potential candidates who can meet the Company's needs.



Dengan menerapkan rangkaian seleksi karyawan yang efektif dan objektif, Perseroan telah merekrut sebanyak 1.718 karyawan dari berbagai latar belakang untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kegiatan rekrutmen dilakukan melalui program seleksi reguler maupun *profesional hire* untuk menempati berbagai level jabatan mulai dari *officer*, *manager*, *middle manager*, hingga *senior manager*, sesuai kebutuhan Perseroan.

Dengan terlaksananya proses rekrutmen sepanjang tahun ini, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 3.947 orang per 31 Desember 2025. Angka ini mencerminkan penurunan 41,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6.793 orang. Penurunan ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis Perseroan.

MENILAI UNTUK TUMBUH: PENDEKATAN TERPADU KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER

Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan karir karyawan, Perseroan menerapkan *Career Advancement Program* yang memungkinkan karyawan menempati posisi-posisi kunci sesuai kapabilitasnya. Program ini dijalankan secara terstruktur, mulai dari level senior manager hingga jalur pelaksana dan pimpinan, sehingga memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas posisi strategis di seluruh organisasi.

Sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) diterapkan untuk mengevaluasi pencapaian dan kinerja karyawan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Penilaian yang objektif ini menjadi dasar bagi manajemen dalam memberikan umpan balik dan menentukan karyawan yang layak masuk dalam *talent pool*, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan karier.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mempromosikan sebanyak 147 karyawan berprestasi ke posisi yang lebih tinggi, dengan persentase karyawan perempuan mencapai 23,84%. Komposisi ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap kesetaraan dan inklusivitas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau gender, sekaligus mendorong pertumbuhan bersama.

By implementing an effective and objective employee selection process, the Company has recruited 1,718 employees from various backgrounds to fill required positions. Recruitment activities are conducted through regular selection programs and professional hires to fill various levels of positions, from officers, and managers, to middle managers, all the way to senior managers, according to the Company's needs.

With the recruitment process completed throughout the year, the Company's total employee count reached 3,947 as of December 31, 2025. This figure represents a 41.90% decrease compared to the previous year's 6,793 employees. This decrease is in line with the Company's efficiency efforts to align its organizational structure with operational needs and business strategy.

ASSESSING TO GROW: AN INTEGRATED APPROACH TO PERFORMANCE AND CAREER DEVELOPMENT

To support employee career development, the Company implements a Career Advancement Program that enables employees to occupy key positions aligned with their capabilities. This program is implemented in a structured manner, starting from the senior manager level through the executive and leadership pathways, ensuring leadership continuity and strategic position stability throughout the organization.

A Key Performance Indicator (KPI)-based performance appraisal system is implemented to evaluate employee achievements and performance according to their roles and responsibilities. This objective assessment serves as the basis for management to provide feedback and identify employees who are eligible to join the talent pool, while also serving as a reference for career development.

Throughout 2025, the Company promoted 147 of its high-performing employees to higher positions, with female employees representing 23.84% of the total promotions of whom were female. This composition reflects the Company's commitment to equality and inclusivity by providing equal opportunities for all employees regardless of ethnicity, religion, race, background, or gender, while simultaneously encouraging shared growth.



MENINGKATKAN KETERIKATAN KARYAWAN DAN MENGELOLA *TURNOVER* DI TINGKAT OPTIMAL

Dalam pengelolaan SDM, Perseroan menaruh perhatian khusus pada tingkat perputaran (*turnover*) karyawan mengingat stabilitas tim menjadi kunci tercapainya tujuan bisnis. Untuk mengurangi risiko *turnover* yang tinggi, Perseroan melakukan *benchmarking* pasar dan menganalisis posisi-posisi kunci dan kritikal, sekaligus meningkatkan keterlibatan karyawan agar semangat kerja dan loyalitas jangka panjang tetap terjaga.

Sepanjang tahun 2025, berbagai inisiatif retensi telah diterapkan Perseroan termasuk pemberian paket kompensasi dan tunjangan kompetitif, program pengembangan talenta dan kaderisasi pemimpin, serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan standar regulasi.

Pada tahun 2025, Perseroan telah mengadakan survey *engagement* karyawan yang menilai 5 (lima) faktor kunci, yaitu (1) *Clear and Promising Direction*, meraih skor tertinggi sebesar 8,71 yang mencerminkan tingginya kepercayaan karyawan terhadap arah masa depan Perseroan; (2) *Confidence in Leader* meraih skor 8,63; (3) *Quality and Customer Focus* meraih skor 8,59; (4) *Development Opportunities* meraih skor 8,32; dan (5) *Respect & Recognition* meraih skor 8,30. Hasil penilaian tingkat kepuasan karyawan ini mendorong Perseroan untuk terus memperkuat program pengembangan kualitas kepemimpinan di seluruh lini.

Melalui implementasi strategi retensi dan peningkatan keterikatan yang tepat, Perseroan berhasil menjaga tingkat atrisi (*turnover*) sukarela terkendali sebesar 13,58% di tahun 2025. Berikut ini adalah tren *turnover* karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut:

IMPROVING EMPLOYEE ENGAGEMENT AND MANAGING *TURNOVER* AT OPTIMAL LEVELS

In HR management, the Company pays special attention to employee turnover rates, given that team stability is key to achieving business goals. To mitigate the risk of high turnover, the Company conducts market benchmarking and analyzes key and critical positions, while simultaneously increasing employee engagement to maintain employee morale and long-term loyalty.

Throughout 2025, the Company implemented various retention initiatives, such as competitive compensation and benefits packages, talent development and leadership development programs, and competency enhancement through need-based education and training pursuant to regulatory standards.

In 2025, the Company conducted an employee engagement survey assessing 5 (five) key factors: (1) Clear and Promising Direction, earning the highest score of 8.71, reflecting high employee confidence in the Company's future direction; (2) Confidence in Leadership, earning a score of 8.63; (3) Quality and Customer Focus, earning a score of 8.59; (4) Development Opportunities, earning a score of 8.32; and (5) Respect & Recognition, earning a score of 8.30. The results of this employee satisfaction assessment encourage the Company to continue strengthening its leadership development program across all levels.

Through the implementation of appropriate retention and engagement strategies, the Company has successfully maintained a controlled voluntary attrition (*turnover*) rate of 13.58% by 2025. The following table shows the employee turnover trend over the past 2 (two) years:

Keterangan	2025	2024	Description
Meninggal Dunia	6	16	Deceased
Pensiun	22	16	Retired
Mengundurkan Diri	4.513	4.436	Resigned
Jumlah Karyawan Keluar	4.541	4.468	Number of Employees Leaving
Jumlah Karyawan yang Masuk	1.718	3.081	Number of Incoming Employees
Jumlah Karyawan di Awal Tahun	6.646	7.985	Number of Employees at the Beginning of the Year
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun	3.947	6.793	Number of Employees at the End of the Year
Persentase <i>Turnover</i>	13,58%	4,93%	Turnover Percentage



Dari tabel di atas, terlihat bahwa Perseroan mampu mempertahankan stabilitas tenaga kerja melalui penerapan kebijakan SDM yang efektif, termasuk program pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan komunikasi internal yang transparan. Upaya ini tidak hanya mampu menjaga tingkat *turnover*, tetapi juga memperkuat keterikatan karyawan terhadap tujuan dan budaya organisasi, sehingga mendukung pencapaian rencana bisnis secara berkelanjutan.

KEBIJAKAN REWARD & PUNISHMENT: MENINGKATKAN LOYALITAS DAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN

Perseroan menerapkan kebijakan *Reward & Punishment* agar dapat menciptakan budaya kerja yang disiplin, teratur, dan beretika, sekaligus mendorong kinerja karyawan yang optimal. Kebijakan *reward* diterapkan berdasarkan penilaian KPI masing-masing karyawan sebagai bentuk pemberian apresiasi nyata terhadap kinerja gemilang yang mendorong pencapaian tujuan Perseroan. Melalui penghargaan ini, setiap pencapaian tidak hanya diakui, tetapi juga menjadi motivasi bagi karyawan lain untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

The table above demonstrates that the Company has been able to maintain workforce stability through the implementation of effective HR policies, including career development programs, improved employee welfare, and transparent internal communications. These efforts should not only maintain turnover rates but it also strengthens employee engagement with the organization's goals and culture and eventually support the sustainable achievement of business plans.

REWARD AND PUNISHMENT POLICIES: INCREASING EMPLOYEE LOYALTY AND PRODUCTIVITY

The Company implements a Reward & Punishment policy to foster a disciplined, orderly, and ethical work culture, while simultaneously encouraging optimal employee performance. The reward policy is implemented based on each employee's KPI assessment as a tangible form of appreciation for outstanding performance that drives the achievement of the Company's goals. Through this award, each achievement is not only recognized but also motivates other employees to continue innovating, improving performance, and playing an active role in realizing the company's vision and mission.





Selain sebagai bentuk apresiasi, pemberian *reward* juga menjadi bagian dari strategi *employee value proposition* Perseroan. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah bagi karyawan, tetapi juga memastikan talenta terbaik terus tumbuh dan berkembang bersama Perseroan untuk mendukung keberlanjutan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, *reward* diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai. Pemberian apresiasi dalam bentuk tunai diwujudkan melalui penetapan gaji tahunan yang kompetitif sesuai peraturan ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR), uang pelaksanaan cuti tahunan, serta uang cuti besar setiap kelipatan 5 (lima) tahun masa kerja. Sementara *reward* non-tunai diberikan melalui kesempatan promosi jabatan, pelatihan (*training*) yang relevan untuk peningkatan kompetensi, fasilitas kesehatan, hak cuti, pembiayaan karyawan, serta fasilitas tambahan sesuai lokasi kerja dan jabatan.

Sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat menghambat atau merugikan aktivitas Perseroan, Perseroan juga menerapkan kebijakan *punishment* yang tegas bagi karyawan yang terbukti melanggar Peraturan Perusahaan (PP), *Standard Operating Procedure* (SOP), dan Kode Etik Perseroan. Penegakan sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, tetap mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Pelanggaran ringan dikenai sanksi pembinaan, sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada surat teguran atau peringatan, demosi jabatan, skorsing, pencabutan fasilitas, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada tahun 2025, Perseroan memberikan *reward* kepada sebanyak 2.659 karyawan yang menunjukkan prestasi dan kinerja gemilang, baik dalam pencapaian target individu maupun kontribusi terhadap keberhasilan tim. Di sisi lain, sebanyak 170 karyawan menerima sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Penerapan sanksi dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Melalui penerapan kebijakan *reward & punishment* yang adil, transparan, dan terukur, Perseroan tidak hanya menghargai prestasi dan kontribusi karyawan, tetapi juga menegakkan disiplin serta standar kinerja yang tinggi. Pendekatan ini memastikan lingkungan kerja tetap profesional, produktif, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus memperkuat loyalitas dan motivasi seluruh karyawan untuk berkontribusi secara optimal.

Beyond serving as a form of appreciation, rewards are also part of the Company's employee value proposition strategy. This policy is intended not only to provide added value to employees but also to ensure that top talent continues to grow and develop alongside the Company to support business sustainability in both the short and long term.

In practice, rewards are provided in cash and non-cash forms. Cash appreciation is realized through the determination of a competitive annual salary in accordance with employment regulations, a Holiday Allowance (THR), annual leave pay, and long-term leave pay for every five years of service. Meanwhile, non-cash rewards are provided in the form of job promotion opportunities, relevant training to improve competency, healthcare facilities, leave entitlements, employee financing, and additional benefits based on work location and position.

As a preventative measure against actions that could hinder or harm company activities, the Company also implements a strict punishment policy for employees found to have violated Company Regulations (PP), Standard Operating Procedures (SOP), and the Company's Code of Ethics. Sanctions are enforced according to the severity of the violation while still adhering to applicable employment regulations. Minor violations are subject to coaching, while serious violations can result in a letter of reprimand or warning, demotion, suspension, revocation of benefits, or even termination of employment.

In 2025, the Company awarded rewards to 2,659 employees who demonstrated outstanding achievements and performance, both in achieving individual targets and contributing to team success. On the other hand, 170 employees were given sanctions for violations. Sanctions were implemented fairly and transparently, commensurate with the severity of the offense.

Through the implementation of a fair, transparent, and measurable reward and punishment policy, the Company not only recognizes employee achievements and contributions but also enforces discipline and high performance standards. This approach ensures a professional, productive, and supportive work environment, while strengthening the loyalty and motivation of all employees to contribute optimally.



PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Perseroan memahami bahwa kualitas kerja karyawan merupakan pondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik dan mencapai kepuasan debitur. Oleh karena itu, Perseroan memprioritaskan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan baik untuk peningkatan *hard skill* maupun *soft skill*. Program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap individu mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sekaligus mendorong pelayanan yang lebih berkualitas.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan menempati peran kepemimpinan di masa depan sekaligus memperkuat ketersediaan talenta terbaik di posisi-posisi strategis. Sebanyak 183 karyawan tercatat mengikuti program ini, dengan jumlah jam pelatihan terakumulasi mencapai 164 jam dalam setahun, atau rata-rata 9,11 jam per karyawan.

Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp13.187.429.474, setara dengan sekitar 91% dari total biaya pengembangan SDM tahun 2025 yang berjumlah Rp14.475.420.000. Alokasi ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk berinvestasi secara signifikan dalam pengembangan talenta, sekaligus memastikan karyawan memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai untuk menghadapi tantangan bisnis serta memimpin organisasi di masa depan.

Berikut daftar kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan Perseroan sepanjang tahun 2025:

CONTINUING EDUCATION AND TRAINING PROGRAM

The Company understands that employee performance quality lays the key foundation for providing the best service and achieving customer satisfaction. Therefore, the Company prioritizes the implementation of continuous education and training programs for both hard and soft skill development. These programs are designed to equip employees with the necessary skills and knowledge to enable each individual to perform their duties optimally, while simultaneously promoting higher quality service.

Throughout 2025, the Company implemented a human resource development program designed to prepare employees for future leadership roles and strengthen the availability of top talent for strategic positions. As many as 183 employees participated in this program, with a total accumulated training hours of 164 hours per year, or an average of 9.11 hours per employee.

To support these education and training activities, the Company allocated a budget of IDR13,187,429,474, equivalent to approximately 91% of the total human resource development budget for 2025, which amounted to IDR14,475,420,000. This allocation reflects the Company's commitment to investing significantly in talent development, while ensuring employees have the competencies and readiness to face business challenges and lead the organization in the future.

The following is a list of training activities the Company has conducted throughout 2025:

No.	Materi Diklat Training Materials	Metode Diklat Training Methods	Perkiraan Waktu Diklat Estimated Training Time	Durasi Diklat Training Duration	Tempat Place	Jumlah Seluruh Peserta Total Number of Participants
1.	<i>Branch Managerial Development Program</i>	<i>Online/ Offline</i>	Jan–Des 2025 Jan–Dec 2025	4 bulan 4 months	Jakarta/ Cabang Jakarta/ Branch	28
2.	<i>Management Trainee</i>	<i>Online/ Offline</i>	Jan–Des 2025 Jan–Dec 2025	1 tahun 1 year	Jakarta/ Cabang Jakarta/ Branch	62
3.	<i>Leadership program for Manager</i>	<i>Online/ Offline</i>	Jan–Des 2025 Jan–Dec 2025	6 bulan 6 months	Jakarta/ Cabang Jakarta/ Branch	28



No.	Materi Diklat Training Materials	Metode Diklat Training Methods	Perkiraan Waktu Diklat Estimated Training Time	Durasi Diklat Training Duration	Tempat Place	Jumlah Seluruh Peserta Total Number of Participants
4.	Mandatory Training					
	a. Anti-Fraud	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	1.711
	b. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT)	Online/ Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	1 hari 1 day	Nasional National	2.027
	c. Pelindungan Konsumen Customer Protection	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	1 hari 1 day	Nasional National	3.947
	d. Pelindungan Data Pribadi Personal Data Protection	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	1 hari 1 day	Nasional National	3.947
	d. Management Dasar Resiko Basic Risk Management	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	283
	e. Pelatihan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Training on the Implementation of Sustainable Finance	Online	November 2025	1 hari 1 day	Nasional National	0
5.	Orientation Program					
	a. Orientasi Karyawan Baru (OKB) New Employee Orientation (OKB)	Online/ Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	12.294
	b. Orientation program for Operation STAFF	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	338
	c. Orientation program for Sales SPV/ HEAD	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	41
	d. Orientation program for Credit SPV/ HEAD	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	2 minggu 2 weeks	Nasional National	36
6.	Reinforcement Program					
	a. IT & Product Certification	Online	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	17
	b. Reinforcement program for MANAGER	Online/ Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	1.050
	c. Reinforcement program for Branch MANAGER	Online/ Offline	Jan, Feb, Mei 2025 Jan, Feb, May 2025	3 hari 3 days	Nasional National	123
	d. Reinforcement program for Credit MANAGER	Online/ Offline	Apr-Mei 2025 Apr-May 2025	3 hari 3 days	Nasional National	5
	e. Reinforcement program for Operation MANAGER	Offline	Juli 2025 July 2025	3 hari 3 days	Nasional National	111
	f. Reinforcement program for Sales SPV/ HEAD	Online/ Offline	Feb, Agt, Okt 2025 Feb, Aug, Oct 2025	3 hari 3 days	Nasional National	1.664
	g. Reinforcement program for Credit SPV/ HEAD	Online/ Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	172
7.	Employee Event	Online/ Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	4 hari s.d. 1 bulan 4 days to 1 month	Nasional National	27.184
8.	Sosialisasi MI/SKD MI/SKD Socialization	Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	644
9.	Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Assistance in Policy Implementation	Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	535
10.	Workshop Implementasi Kebijakan Policy Implementation Workshop	Offline	Jan-Des 2025 Jan-Dec 2025	3 hari 3 days	Nasional National	526



Selain mendorong karyawan mengikuti program pelatihan berkesinambungan, Perseroan juga berupaya meningkatkan standar pengetahuan dan kapabilitas mereka melalui program sertifikasi yang relevan dengan industri pembiayaan, sesuai ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pada tahun 2025, Perseroan menegaskan kepatuhannya melalui pelaksanaan program sertifikasi yang diselenggarakan oleh PT Sertifikasi Profesi Perusahaan Pembiayaan (SPPI) serta lembaga sertifikasi profesi lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing karyawan, sehingga memberikan dampak positif pada kinerja dan kredibilitas Perseroan.

Berikut ini adalah daftar sertifikasi yang telah diselenggarakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2025:

While encouraging employees to participate in ongoing training programs, the Company also strives to improve their knowledge and capabilities through certification programs relevant to the financing industry, in accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Businesses.

In 2025, the Company confirmed its compliance through the implementation of certification programs organized by PT Sertifikasi Profesi Perusahaan Pembiayaan (SPPI) and other professional certification institutions as needed by the organization. This program is designed to improve the quality and competitiveness of employees, thus positively impacting the Company's performance and credibility.

The following is a list of certifications the Company has held throughout 2025:

Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Pemberi Sertifikasi Certification Body	Target Peserta Target Participants	Realisasi Peserta Participant Realization
Sertifikasi Dasar Profesi Penagihan Basic Certification of Collection Profession	SPPI	1.700	2.184
Sertifikasi Dasar Manajerial Basic Managerial Certification	SPPI	84	86
Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification	SPPI	1	1
Sertifikasi Dasar Komisaris Commissioner Basic Certification	SPPI	1	1
Sertifikasi Manajemen Risiko – Direksi Risk Management Certification – Board of Directors	SPPI	1	1
Sertifikasi Manajemen Risiko – 1 tingkat di bawah Direksi Risk Management Certification – 1 level below Director	SPPI	1	1
Sertifikasi Refreshment Point BOD / BOC BOD/BOC Refreshment Point Certification	APPI	35	27
Jumlah Total		1.823	2.301

Pelaksanaan program pelatihan sepanjang tahun 2025 dirancang mencakup seluruh jenjang jabatan, melibatkan partisipasi karyawan dari berbagai kategori. Rincian jumlah peserta, total jam pelatihan, serta rata-rata jam pelatihan per karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:

All the training programs implemented throughout 2025, were designed for all job levels, with employees from various categories enrolled. Details of the number of participants, total training hours, and average training hours per employee are shown in the following table:

Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees Who Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hours Per Employee
Seluruh Karyawan Overall Employee	5.682	49.752	2,29
Berdasarkan Jenis Kelamin Based on Gender			
Laki-laki Male	4.431	36.833	2,48
Perempuan Female	1.251	12.919	2,66



Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees Who Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hours Per Employee
Berdasarkan Jenjang Manajemen Based on Management Level			
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	8	129	6,25
Kepala Divisi Head of Division	16	321	5,35
Manager Manager	757	13.097	5,07
Supervisor Supervisor	1.062	8.446	2,65
Staff	3.839	27.759	2,04

Untuk memastikan bahwa setiap program pelatihan dan sertifikasi memberikan nilai tambah yang nyata, Perseroan menerapkan mekanisme penilaian yang komprehensif. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai keaktifan peserta selama pelatihan, peningkatan pemahaman melalui *pre-test* dan *post test*, perubahan perilaku kerja, hingga dampaknya terhadap pencapaian kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi teknis dan digital mencatat peningkatan paling signifikan, disusul oleh penguatan kompetensi perilaku, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan pemecahan masalah. Peningkatan tersebut tercermin dalam penerapan kompetensi yang lebih efektif dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi, Perseroan juga secara konsisten menyelenggarakan program pengembangan talenta yang difokuskan pada penyiapan calon pemimpin masa depan serta penguatan talenta pada posisi-posisi strategis. Melalui pendekatan ini, Perseroan tidak hanya membangun kapasitas individu, tetapi juga memastikan kesiapan organisasi dalam menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang secara berkelanjutan.

MEMBANGUN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN BERKELANJUTAN

Perseroan meyakini bahwa hubungan industrial yang harmonis merupakan pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut dijalankan melalui penerapan strategi retensi yang terstruktur serta penyosialisasian *well-being framework* kepada seluruh karyawan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Melalui pendekatan ini Perseroan berharap dapat meningkatkan keterikatan karyawan sekaligus memperkuat hubungan kerja yang saling mendukung.

To ensure that each training and certification program provides real added value, the Company implements a comprehensive assessment mechanism. This evaluation assesses participant engagement during training, increased understanding through pre-tests and post-tests, changes in work behavior, and the impact on performance. The evaluation results indicate that technical and digital competency development recorded the most significant improvements, followed by strengthening behavioral competencies, such as communication, teamwork, and problem-solving skills. The improvements are reflected in the more effective application of these competencies in daily work activities.

In line with competency development efforts, the Company also consistently conducts talent development programs focused on preparing future leaders and strengthening talent in strategic positions. Through this approach, the Company not only builds individual capacity but also ensures organizational readiness to meet evolving business needs in a sustainable manner.

BUILDING HARMONIOUS AND SUSTAINABLE INDUSTRIAL RELATIONS

The Company believes that harmonious industrial relations are the primary foundation for creating a stable, productive, and sustainable work environment. This commitment is realized through the implementation of a structured retention strategy and the dissemination of a well-being framework to all employees, with the aim of maintaining a balance between work and personal life demands. Through this approach, the Company hopes to increase employee engagement while strengthening mutually supportive working relationships.



Dalam membangun hubungan industrial yang kondusif, Manajemen secara aktif mendorong terciptanya komunikasi yang efektif, terbuka, dan transparan dengan para karyawan. Perseroan menyediakan ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi, masukan, maupun ekspektasi karyawan, sehingga setiap potensi perbedaan pandangan dapat dikelola secara konstruktif. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga memberikan perlindungan yang setara terhadap hak seluruh karyawan sebagai wujud komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip kesetaraan.

Wujud nyata komitmen Perseroan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dituangkan melalui Peraturan Perusahaan (PP) PT KB Finansia Multi Finance yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan ini memuat batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban Perseroan sebagai pemberi kerja serta karyawan sebagai tenaga kerja. Keberadaan pedoman ini menjadi dasar bagi Perseroan maupun karyawan dalam membangun hubungan kerja yang transparan, adil, dan saling menghormati.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 19 kasus perselisihan hubungan industrial yang dihadapi oleh Perseroan. Seluruh kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak. Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus membangun hubungan industrial yang harmonis dan adil antara Manajemen dan seluruh karyawan sehingga keberlangsungan usaha jangka panjang dapat terjaga dengan maksimal.

MEKANISME DAN KANAL PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Perseroan menyediakan mekanisme dan kanal pengaduan ketenagakerjaan sebagai sarana resmi bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan terkait permasalahan ketenagakerjaan secara aman, terbuka, dan bertanggung jawab. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap pengaduan ditangani secara objektif, tepat waktu, serta menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan keadilan.

Seluruh umpan balik dan aspirasi karyawan dapat disampaikan melalui “IR Care”, sebagai wadah pengaduan yang disediakan oleh Perseroan. Proses pelaporan dapat dilakukan melalui:

- Email: ir.care@finansia.com
- Telp.: +62 815-7468-3268

To build conducive industrial relations, Management actively encourages effective, open, and transparent communication with employees. The Company provides a dialogue space to listen to employee aspirations, input, and expectations, so that any potential differences of opinion can be managed constructively. In line with this, the Company also provides equal protection for the rights of all employees as a manifestation of its commitment to fair, responsible, and equal employment practices.

The Company’s commitment to creating harmonious industrial relations is concretely outlined in the Company Regulation (PP) of PT KB Finansia Multi Finance, which is formulated in accordance with applicable labor laws and regulations. This regulation contains clear boundaries regarding the rights and obligations of the Company as an employer and employees as workers. These guidelines serve as a foundation for the Company and its employees in building transparent, fair, and respectful working relationships.

Throughout 2025, the Company faced 19 industrial relations disputes. All cases were resolved in accordance with applicable procedures and regulations, resulting in fair decisions for all parties. Moving forward, the Company is committed to continuing to build harmonious and fair industrial relations between Management and all employees to ensure optimal long-term business continuity.

MECHANISMS AND CHANNELS FOR COMPLAINTS REGARDING EMPLOYMENT ISSUES

The Company provides an employment complaint mechanism and channel as an official means for employees to submit complaints, input, and reports related to employment issues safely, openly, and responsibly. This mechanism is designed to ensure that every complaint is handled objectively, in a timely manner, and upholds the principles of confidentiality and fairness.

All employee feedback and aspirations can be submitted through “IR Care,” a complaint platform provided by the Company. Reporting can be done through:

- Email: ir.care@finanscia.com
- Phone: +62 815-7468-3268



IR Care dijalankan dengan mengedepankan prinsip *caring, agile, responsibility*, dan *ethic*. Melalui penerapan prinsip tersebut, setiap laporan yang diterima ditangani secara profesional dan responsif, serta diarahkan pada penyelesaian yang konstruktif.

Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat, ditelaah, dan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat permasalahan serta ketentuan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga menjamin tidak adanya tindakan balasan terhadap karyawan yang menyampaikan pengaduan dengan itikad baik.

Melalui penerapan mekanisme dan kanal pengaduan yang jelas dan terstruktur ini, Perseroan berupaya memperkuat komunikasi dua arah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap Manajemen, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dalam mendukung keberlanjutan usaha.

REALISASI PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Divisi Sumber Daya Manusia & General Affairs telah menjalankan berbagai program kerja secara terarah guna memperkuat fondasi organisasi dan mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan. Seluruh inisiatif tersebut dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga untuk membangun kapabilitas jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Fokus utama pengelolaan SDM sepanjang tahun ini diarahkan pada program pengembangan kompetensi karyawan. Sepanjang 2025, Perseroan menyelenggarakan 11 program pelatihan yang mencakup pelatihan *mandatory* dan penguatan kompetensi dengan tingkat partisipasi mencapai 66% dari target yang ditetapkan. Upaya ini dilengkapi dengan pelaksanaan 7 program sertifikasi yang mencatat tingkat partisipasi hingga tercapai 126% dari rencana. Program pelatihan dan sertifikasi tersebut menjadi inisiatif strategis SDM yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas operasional dan layanan pembiayaan, sekaligus membekali karyawan dengan kemampuan yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan mendukung realisasi rencana bisnis.

IR Care is implemented by prioritizing the principles of *caring, agility, responsibility*, and *ethics*. Through the application of these principles, every report received is handled professionally and responsively, and directed towards a constructive resolution.

Every complaint received will be recorded, reviewed, and followed up in accordance with the level of the problem and the provisions of Company Regulations and applicable laws and regulations. The Company also guarantees that there will be no retaliation against employees who submit complaints in good faith.

Through the implementation of clear and structured complaint mechanisms and channels, the Company strives to strengthen two-way communication so as to increase employee trust in Management, as well as maintain harmonious and conducive working relationships in supporting business sustainability.

REALIZATION OF HR WORK PROGRAM IN 2025

Throughout 2025, the Human Resources & General Affairs Division implemented various targeted work programs to strengthen the organizational foundation and support the achievement of the Company's business plan. All of these initiatives were designed not only to address short-term operational needs but also to build long-term capabilities aligned with sustainability principles.

The primary focus of HR management throughout the year was directed at employee competency development programs. Throughout 2025, the Company conducted 11 training programs, including mandatory training and competency strengthening, with a participation rate reaching 66% of the target. This effort was complemented by the implementation of 7 certification programs, with participation rate of 126% of the target. These training and certification programs were strategic HR initiatives that brought real impacts on the quality of operational and financing services, while equipping employees with relevant skills to enhance competitiveness and support the realization of the business plan.



Sementara dari sisi pengelolaan tenaga kerja, Perseroan menerapkan kebijakan rekrutmen yang selektif dengan memprioritaskan pengisian posisi yang kosong seiring dengan pengunduran diri karyawan, tanpa menambah jumlah tenaga kerja di luar kebutuhan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga efektivitas struktur organisasi sekaligus mendorong produktivitas yang lebih optimal.

Sejalan dengan upaya penguatan kompetensi dan efektivitas organisasi, Perseroan juga menempatkan peningkatan keterlibatan karyawan sebagai salah satu prioritas utama. Berbagai kegiatan kekaryawanan diselenggarakan secara berkesinambungan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya Perseroan. Salah satu momentum penting pada tahun 2025 adalah pelaksanaan "*Town Hall Meeting: Kreditplus 31st Anniversary*" yang tercatat sebagai kegiatan dengan tingkat partisipasi tertinggi sepanjang tahun. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi manajemen, tetapi juga wadah apresiasi melalui pemberian penghargaan kepada karyawan dengan masa bakti 25 tahun.

Antusiasme dan keterlibatan karyawan juga tercermin melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan Perseroan, termasuk "*Kickoff Speech*" dalam rangka menyambut tahun 2025 serta perayaan Idul Fitri, yang masing-masing diikuti oleh lebih dari 5.000 karyawan. Partisipasi aktif tersebut semakin diperkuat melalui berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan yang diselenggarakan oleh kantor pusat maupun cabang, menunjukkan keterlibatan karyawan yang merata di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan itu, upaya membangun keterikatan karyawan turut diperluas melalui optimalisasi kanal komunikasi digital. Perseroan secara konsisten memperkuat komunikasi internal melalui Instagram internal dengan mengangkat tema *Core Values* yang berbeda setiap bulannya. Pendekatan ini memberikan hasil yang positif sebagaimana tercermin dari peningkatan jumlah pengikut dari 5.070 pada Januari menjadi 5.254 pada November 2025, serta capaian tertinggi pada bulan Juni dengan konten bertema "*All Core Values*" berhasil meraih 42.752 views.

Selain mengoptimalkan *platform* media sosial, Perseroan secara rutin menerbitkan *newsletter* internal yang sepanjang tahun mencatat total 5.635 views, dengan tingkat pembaca tertinggi terjadi pada awal dan pertengahan tahun. Hal ini menandakan tingginya minat karyawan terhadap informasi dan komunikasi internal Perseroan.

Meanwhile, in terms of workforce management, the Company implemented a selective recruitment policy, prioritizing the filling of vacant positions following employee resignations, without adding more workers than necessary. This approach was taken to maintain the effectiveness of the organizational structure while encouraging optimal productivity.

In line with efforts to strengthen organizational competency and effectiveness, the Company also prioritizes increasing employee engagement. Various employee activities are held continuously to foster a sense of togetherness and strengthen the internalization of corporate cultural values. A key milestone in 2025 was the "*Town Hall Meeting: Kreditplus 31st Anniversary*," which recorded the highest participation rate of any event that year. This event served not only as a communication forum for management but also as a means of appreciation, recognizing employees with 25 years of service.

Employee enthusiasm and engagement were also reflected in various company activities, including the "*Kickoff Speech*" to welcome 2025 and the Eid al-Fitr celebration, each of which attracted over 5,000 employees. This active participation was further strengthened through various Independence Day celebrations held at the head office and branches, demonstrating widespread employee engagement across the organization.

Concurrently, efforts to build employee engagement were expanded through the optimization of digital communication channels. The Company consistently strengthens internal communications through its internal Instagram account, highlighting a different *Core Values* theme each month. This approach yielded positive results, as reflected in the increase in followers from 5,070 in January to 5,254 in November 2025. The highest number of views was achieved in June, with content themed "*All Core Values*," garnering 42,752 views.

In addition to optimizing its social media platforms, the Company regularly publishes an internal newsletter, which garnered a total of 5,635 views throughout the year, with peak readership occurring at the beginning and middle of the year. This indicates high employee interest in the Company's internal information and communications.



Secara keseluruhan, realisasi program SDM sepanjang tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan yang berjalan dengan baik dan terarah melalui berbagai inisiatif yang saling terintegrasi. Penguatan kompetensi, pengelolaan tenaga kerja yang efektif, serta peningkatan keterlibatan dan komunikasi internal telah menjadi pondasi penting dalam mendukung kinerja organisasi. Melalui implementasi program-program tersebut, Perseroan tidak hanya mampu menjaga kelancaran operasional, tetapi juga membangun organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi dinamika bisnis ke depan secara berkelanjutan.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2026

Tahun 2026 diproyeksikan menjadi momentum strategis bagi Perseroan seiring dengan dimulainya fase implementasi pengembangan sistem secara masif. Perseroan akan menjalankan pembaruan *core system*, transformasi model bisnis, serta penguatan berbagai inisiatif strategis baru yang menuntut kesiapan organisasi secara menyeluruh, khususnya dari sisi kesiapan SDM.

Untuk memastikan proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan, fokus pengembangan SDM pada tahun 2026 diarahkan pada pengoptimalan program pelatihan, penguatan komunikasi perubahan, serta pendampingan yang terstruktur. Inisiatif ini dirancang untuk membekali karyawan dengan kompetensi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang, sekaligus meminimalkan potensi resistensi terhadap perubahan melalui pemahaman yang utuh dan kesiapan mental kerja.

Sejalan dengan agenda transformasi tersebut, Perseroan memprioritaskan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan kemampuan beradaptasi di seluruh jenjang organisasi. Berbagai program pelatihan kepemimpinan dan manajemen perubahan telah dirancang untuk membekali para pemimpin dan karyawan dengan pemahaman yang jelas mengenai arah transformasi, penyesuaian pola kerja, serta peran strategis masing-masing individu dalam menjaga kesinambungan kinerja. Melalui pendekatan ini, Perseroan berharap mampu membangun organisasi yang lebih *agile*, resilien, dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang.

Overall, the implementation of HR programs throughout 2025 demonstrated strong and targeted implementation through various integrated initiatives. Strengthening competencies, effective workforce management, and increasing internal engagement and communication have become essential foundations for supporting organizational performance. Through the implementation of these programs, the Company has not only maintained smooth operations but also built an adaptive, collaborative organization that is prepared to sustainably face future business dynamics.

HR DEVELOPMENT FOCUS PLAN FOR 2026

2026 is projected to be a strategic momentum for the Company, in line with the start of the implementation phase of massive system development. The Company will make core system updates, business model transformations, and strengthen various new strategic initiatives that require comprehensive organizational readiness, particularly in terms of human resource readiness.

To ensure an effective and sustainable transformation process, the focus of human resource development in 2026 will be directed at optimizing training programs, strengthening change communication, and structured mentoring. These initiatives are designed to equip employees with competencies relevant to evolving business and technology needs, while minimizing potential resistance to change through a comprehensive understanding and mental readiness to work.

In line with this transformation agenda, the Company prioritizes the development of leadership competencies and adaptability at all levels of the organization. Various leadership and change management training programs have been designed to equip leaders and employees with a clear understanding of the direction of the transformation, adjustments to work patterns, and the strategic role of each individual in maintaining performance continuity. Through this approach, the Company hopes to build a more agile, resilient organization that is ready to face future business challenges.



Teknologi Informasi

Information Technology



“Perseroan secara konsisten memperkuat kapabilitas infrastruktur TI dan mengadopsi inovasi digital terbaru untuk menghadirkan layanan yang andal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.”

“The Company consistently strengthens its IT infrastructure capabilities and adopts the latest digital innovations to deliver reliable, secure services that meet customer needs.”



Dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan yang semakin kompetitif, Perseroan menjadikan Teknologi Informasi (TI) sebagai pilar strategis yang esensial untuk mendukung operasional, membantu pengelolaan risiko, dan mendorong inovasi layanan. Bagi Perseroan, TI bukan sekadar alat pendukung melainkan katalisator utama yang meningkatkan efisiensi proses bisnis, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih cepat, transparan, serta aman.

Sejak awal 2022, Perseroan memprioritaskan modernisasi infrastruktur TI sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memastikan kelancaran layanan pembiayaan bagi nasabah. Pesatnya perkembangan digitalisasi bisnis mendorong Perseroan untuk mengadopsi teknologi yang lebih inovatif agar senantiasa mampu menjawab kebutuhan nasabah yang semakin berorientasi pada pengalaman digital.

Sesuai dengan visinya untuk menjadi Perusahaan Pembiayaan Penyedia Solusi dan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Terbaik di Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan informasi dengan menaruh fokus utama pada aspek perlindungan data nasabah serta kepatuhan penuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan TI yang andal dan terintegrasi menjadikan Perseroan lebih adaptif terhadap perubahan digital sekaligus proaktif dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat kapabilitas infrastruktur TI dan mengadopsi inovasi digital terbaru. Tidak hanya untuk mewujudkan visi dan memperkuat daya saing, tetapi juga untuk menjamin pertumbuhan yang konsisten serta menghadirkan layanan yang lebih aman, cepat, dan dapat dipercaya bagi seluruh nasabah dan pemangku kepentingan.

Amid intensifying competition in the financing industry, the Company positions Information Technology (IT) as a core strategic pillar underpinning operations, strengthening risk management, and advancing service innovation. For the Company, IT is not viewed merely as an enabling tool, but as a critical driver of operational efficiency, data-driven decision-making, and the delivery of faster, more transparent, and secure customer experiences.

Since early 2022, the Company has prioritized the modernization of its IT infrastructure as a strategic initiative to improve operational efficiency while ensuring the seamless delivery of financing services to customers. The rapid acceleration of business digitalization has prompted the Company to adopt more innovative technologies in order to consistently address the growing demand for enhanced digital customer experiences.

In line with its vision to become the Best Technology-Based Financing Solutions and Services Provider in Indonesia, the Company remains committed to continuously strengthening information security, with a primary focus on safeguarding customer data and ensuring full compliance with all applicable regulations.

Overall, the implementation of reliable and integrated IT systems has enabled the Company to become more adaptive to digital transformation while proactively delivering sustainable innovation. Going forward, the Company will continue to strengthen its IT infrastructure capabilities and adopt the latest digital innovations. Not only to realize its vision and enhance competitiveness, but also to ensure consistent growth and deliver services that are secure, efficient, and trustworthy for all customers and stakeholders.



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TI

Dalam menghadapi perkembangan digitalisasi yang semakin kompleks, Perseroan telah membangun kerangka kebijakan Tata Kelola TI yang komprehensif untuk memastikan setiap inisiatif digital yang dikembangkan senantiasa selaras dengan standar industri serta berkontribusi dalam mendukung tujuan bisnis dan menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi nasabah maupun pemangku kepentingan.

Melalui penerapan Tata Kelola TI yang terintegrasi, Perseroan membangun fondasi strategis yang kokoh untuk menjamin operasional yang efisien, aman, dan sepenuhnya patuh terhadap regulasi. Komitmen Perseroan dalam menghadirkan implementasi tata kelola TI yang lebih terarah dan sesuai praktik terbaik industri tercermin melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi No. 703/KBFMF/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengenai Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Kebijakan ini menegaskan keselarasan strategi TI dengan tujuan bisnis, memperkuat keamanan siber, dan memastikan perlindungan data pribadi melalui prosedur yang sistematis serta mekanisme pengawasan yang terstruktur.

Seluruh inisiatif terkait pengembangan hingga penerapan tata kelola TI di lingkup Perseroan dijalankan oleh Departemen TI, serta didukung oleh fungsi IT Governance, Risk, and Compliance (GRC), dan diawasi secara langsung oleh Divisi Compliance. Struktur kolaboratif ini memastikan setiap langkah digital Perseroan berjalan terstruktur, transparan, dan sepenuhnya patuh pada regulasi, sekaligus mendukung penciptaan nilai strategis dan keunggulan kompetitif. Kerangka pengelolaan TI Perseroan berlandaskan beberapa regulasi utama, antara lain:

1. POJK No. 4/POJK.05/2021 ("POJK 4/2021") tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank;
2. POJK No. 10/POJK.05/2022 ("POJK 10/2022") mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI; dan
3. Surat Edaran OJK No. 22/2021 ("SEOJK 22/2021") tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Melalui penerapan kebijakan dan tata kelola TI yang efisien dan terstruktur, Perseroan telah membuktikan keandalannya dalam mengelola operasional bisnis secara efektif, sekaligus memitigasi potensi risiko yang mungkin muncul. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk menghadirkan layanan pembiayaan digital yang aman, terpercaya, dan responsif bagi seluruh nasabah.

IT POLICY AND GOVERNANCE

In navigating the increasingly complex landscape of digitalization, the Company has established a comprehensive IT Governance framework to ensure that every digital initiative remains aligned with industry standards and contributes meaningfully to business objectives, while delivering tangible value to customers and stakeholders.

Through the implementation of integrated IT Governance, the Company has built a strong strategic foundation to ensure efficient, secure, and fully compliant operations. The Company's commitment to strengthening structured and best-practice IT governance is reflected in the issuance of Board of Directors Decree No. 703/KBFMF/VIII/2024 dated 26 August 2024 concerning the Information Technology Risk Management Policy. This policy affirms the alignment of IT strategy with business objectives, reinforces cybersecurity measures, and ensures personal data protection through systematic procedures and structured oversight mechanisms.

All initiatives related to the development and implementation of IT governance within the Company are carried out by the IT Department, supported by the IT Governance, Risk, and Compliance (GRC) function, and directly overseen by the Compliance Division. This collaborative structure ensures that each digital initiative is implemented in a structured, transparent, and fully compliant manner, while supporting strategic value creation and competitive advantage. The Company's IT governance framework is anchored in several key regulations, including:

1. POJK No. 4/POJK.05/2021 ("POJK 4/2021") concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions;
2. POJK No. 10/POJK.05/2022 ("POJK 10/2022") concerning Information Technology-Based Joint Funding Services; and
3. OJK Circular Letter No. 22/2021 ("SEOJK 22/2021") concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.

Through the consistent implementation of efficient and structured IT governance policies, the Company has demonstrated its capability to manage business operations effectively while mitigating potential risks. This approach enables the Company to deliver secure, reliable, and responsive digital financing services to all customers.



Gangguan Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi menghadirkan tantangan berupa gangguan siber yang tidak dapat dihindari, termasuk bagi Perseroan sebagai pelaku usaha pembiayaan yang konsisten mengembangkan layanan berbasis digital kepada para nasabah ataupun mitra bisnis. Gangguan siber berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran operasional, kualitas layanan, dan kepercayaan nasabah. Sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi risiko tersebut, Perseroan telah merancang dan melaksanakan program mitigasi menyeluruh untuk menjaga keamanan, kontinuitas, dan kualitas layanan digital secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan secara proaktif memperkuat infrastruktur TI dengan membangun sistem keamanan siber yang ketat, menjalankan *Disaster Recovery Plan*, dan menerapkan prosedur pemulihan data yang tangguh. Upaya ini didukung dengan evaluasi berkala terhadap sistem TI sehingga memungkinkan Perseroan dalam mengidentifikasi celah risiko serta memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario gangguan. Dalam kerangka strategi mitigasi risiko TI tersebut, Perseroan secara khusus memprioritaskan pengelolaan risiko yang berasal dari vendor dan layanan eksternal, guna memastikan bahwa infrastruktur dan ekosistem TI tetap stabil, aman, dan terkendali dalam seluruh aktivitas operasional.

Dengan penerapan mitigasi dan pengelolaan risiko TI secara konsisten, Perseroan optimis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi sebagai penyedia solusi pembiayaan berbasis teknologi terdepan di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menegaskan komitmen Perseroan dalam menghadirkan layanan digital yang aman, andal, dan berkualitas tinggi.

Risiko Keamanan Siber dan Upaya Mitigasinya

Dalam menghadirkan layanan pembiayaan digital, Perseroan menempatkan keamanan dan perlindungan data nasabah sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkannya, Perseroan mengimplementasikan sistem keamanan TI yang komprehensif, mencakup *hard control* maupun *soft control* sehingga setiap lapisan perlindungan saling melengkapi dan memastikan seluruh data nasabah terlindungi secara optimal dari berbagai potensi risiko maupun gangguan siber.

Information Technology Disruption

The rapid advancement of technology presents unavoidable challenges in the form of cyber disruptions, including for the Company as a financing institution that consistently develops digital-based services for customers and business partners. Cyber incidents have the potential to significantly impact operational continuity, service quality, and customer trust. As a proactive measure in addressing such risks, the Company has designed and implemented a comprehensive mitigation program to safeguard the security, continuity, and quality of its digital services.

In its implementation, the Company proactively strengthens its IT infrastructure by establishing robust cybersecurity systems, executing a structured Disaster Recovery Plan, and applying resilient data recovery procedures. These efforts are supported by periodic evaluations of IT systems, enabling the Company to identify potential vulnerabilities and ensure preparedness across various disruption scenarios. Within its IT risk mitigation framework, the Company places particular emphasis on managing risks arising from vendors and external service providers, ensuring that the IT infrastructure and ecosystem remain stable, secure, and well-controlled throughout all operational activities.

Through the consistent implementation of IT risk mitigation and management practices, the Company remains confident in driving sustainable business growth while reinforcing its position as a leading technology-based financing solutions provider in Indonesia. This approach not only safeguards operational continuity but also strengthens customer trust, ensures regulatory compliance, and reaffirms the Company's commitment to delivering secure, reliable, and high-quality digital services.

Cybersecurity Risks and Mitigation Efforts

In delivering digital financing services, the Company places the security and protection of customer data as its foremost priority. To this end, the Company implements a comprehensive IT security system encompassing both hard controls and soft controls, ensuring that each layer of protection complements the other and that all customer data is optimally safeguarded against potential risks and cyber disruptions.



Sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan regulasi, Perseroan memastikan seluruh praktik keamanan siber yang diterapkan baik di kantor pusat maupun seluruh cabang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*P2P Lending*), dan POJK 4/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dalam kerangka pengelolaan TI yang sistematis dan berstandar internasional, Perseroan mengadopsi ISO 27001:2022 serta NIST *Cybersecurity Framework* (CSF) sebagai pedoman praktik terbaik. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan secara proaktif mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem dari berbagai ancaman siber, sehingga keamanan serta kontinuitas layanan digital tetap terjaga secara optimal, aman, dan andal.

Sejalan dengan kerangka tersebut, Perseroan turut memperkuat strategi keamanan siber melalui pengimplementasian enkripsi data, pengelolaan akses berbasis otorisasi, serta pengembangan sistem deteksi dan respons terhadap ancaman siber. Evaluasi dan audit berkala juga dilakukan guna memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi berbagai skenario risiko sekaligus menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Upaya ini diperkuat dengan penerapan enkripsi *data at rest*, *data in transit*, dan *data masking* pada informasi sensitif milik nasabah sehingga kerahasiaan dan integritas data dapat dijaga secara optimal dan menyeluruh.

Selain fokus pada penguatan aspek teknis, Perseroan juga secara konsisten membangun budaya kesadaran dan kepatuhan keamanan siber sebagai prioritas di seluruh unit kerja. Untuk itu, Perseroan menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi secara berkala yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman karyawan, memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, dan memastikan kesiapsiagaan seluruh tim dalam mengelola data serta menerapkan praktik keamanan informasi secara konsisten.

Dalam operasional harian, Perseroan juga terus meningkatkan fungsi *Security Operation Center* (SOC) yang secara 24/7 memantau aktivitas sistem, serta bertugas memverifikasi perubahan perilaku akun pengguna dan mencegah segala bentuk akses yang tidak sah. Seiring dengan upaya pemantauan dan deteksi ancaman, Perseroan mengoptimalkan implementasi *backup data* dan sistem *anti-ransomware*, termasuk memperkuat kerangka ISO 27001 dalam tata kelola TI, serta menerapkan *Secure Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan penambahan fungsi keamanan sejak tahap awal pengembangan aplikasi.

As part of its commitment to regulatory compliance, the Company ensures that all cybersecurity practices implemented at both the head office and branch levels are aligned with the Personal Data Protection Law, POJK 10/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (*P2P Lending*), and POJK 4/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.

Within a systematic and internationally recognized IT governance framework, the Company adopts ISO 27001:2022 and the NIST Cybersecurity Framework (CSF) as best practice references. This approach enables the Company to proactively identify, protect against, detect, respond to, and recover from cyber threats, thereby ensuring that the security and continuity of digital services are maintained in an optimal, secure, and reliable manner.

In line with this framework, the Company further strengthens its cybersecurity strategy through the implementation of data encryption, authorization-based access management, and the development of cyber threat detection and response systems. Periodic evaluations and audits are conducted to ensure system readiness in addressing various risk scenarios and to assess the effectiveness of implemented policies. These measures are reinforced through the application of encryption for data at rest, data in transit, as well as data masking for sensitive customer information, thereby ensuring comprehensive protection of data confidentiality and integrity.

Beyond technical enhancements, the Company consistently fosters a culture of cybersecurity awareness and compliance across all business units. Regular education and awareness programs are conducted to enhance employee understanding, reinforce adherence to security policies, and ensure organizational readiness in managing data and implementing information security practices consistently.

In daily operations, the Company continues to strengthen the role of its Security Operation Center (SOC), which monitors system activities on a 24/7 basis, verifies anomalies in user account behavior, and prevents any form of unauthorized access. Alongside ongoing monitoring and threat detection efforts, the Company optimizes data backup implementation and anti-ransomware systems, reinforces ISO 27001-based IT governance practices, and applies a Secure Software Development Life Cycle (SDLC) approach by embedding security functions from the earliest stages of application development.



Dengan mengintegrasikan standar internasional, pengujian sistem aplikasi, pemantauan ketat melalui SOC, serta program edukasi dan sosialisasi bagi karyawan, Perseroan mampu menghadirkan layanan pembiayaan digital yang aman, andal, dan sepenuhnya patuh regulasi. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah serta menjamin kelangsungan operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Disaster Recovery Center

Dalam upaya memastikan kontinuitas layanan pembiayaan digital sekaligus meminimalkan risiko gangguan operasional, Perseroan telah mengimplementasikan *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai bagian integral dari strategi manajemen risiko TI. DRC merupakan elemen penting dari *Business Continuity Management System* (BCMS) yang dirancang untuk menjamin ketersediaan, integritas, dan keamanan data, sekaligus memastikan operasional sistem TI dapat dipulihkan dengan cepat apabila terjadi gangguan, bencana, atau insiden siber yang berpotensi memengaruhi layanan kepada nasabah.

Penerapan DRC Perseroan sejalan dengan ketentuan POJK 4/2021 yang menekankan pentingnya kesiapan sistem TI dan mekanisme pemulihan bencana (*disaster recovery*) demi terjaganya keberlangsungan operasional serta perlindungan data nasabah. Infrastruktur DRC Perseroan dirancang dengan redundansi sistem, replikasi data, dan kemampuan pemulihan cepat, sehingga seluruh proses layanan digital tetap berjalan tanpa gangguan, bahkan dalam skenario risiko yang ekstrem.

Dalam praktik operasional, Perseroan menerapkan DRC dengan rasio *IT infrastructure* 1:1 terhadap *Data Center* sehingga memungkinkan setiap sistem dan aplikasi kritikal yang terdampak dipulihkan dengan cepat tanpa mengurangi performa operasional. Pendekatan ini memastikan efektivitas pemulihan dan ketersediaan layanan secara konsisten. Untuk mendukung penerapan DRC yang optimal, Perseroan menghadirkan infrastruktur unggul dan menerapkan pengelolaan risiko yang terarah sehingga operasional TI dapat dijalankan secara stabil dan andal.

Lebih jauh, Perseroan juga telah mengembangkan sistem pemantauan terpadu yang memonitor kinerja secara *real-time* baik pada sistem inti maupun sistem pendukung untuk menjaga keandalan layanan dan meminimalkan potensi gangguan operasional. Bersamaan dengan itu, Perseroan menjalankan proses pemeliharaan rutin, termasuk *backup* data harian guna memastikan keamanan informasi tetap terjaga dan kontinuitas layanan digital berjalan optimal.

By integrating international standards, conducting rigorous application system testing, implementing continuous monitoring through the SOC, and executing structured employee education and awareness programs, the Company is able to deliver digital financing services that are secure, reliable, and fully compliant with regulatory requirements. This comprehensive approach not only safeguards the confidentiality and integrity of customer data and ensures operational continuity, but also strengthens stakeholder trust and supports sustainable business growth.

Disaster Recovery Center

To ensure the continuity of digital financing services while minimizing the risk of operational disruptions, the Company has implemented a Disaster Recovery Center (DRC) as an integral component of its IT risk management strategy. The DRC forms a critical part of the Business Continuity Management System (BCMS), designed to safeguard data availability, integrity, and security, while ensuring that IT operations can be restored promptly in the event of disruptions, disasters, or cyber incidents that may impact customer services.

The Company's DRC implementation is aligned with POJK No. 4/2021, which emphasizes the importance of IT system readiness and disaster recovery mechanisms to maintain operational continuity and protect customer data. The DRC infrastructure is designed with system redundancy, data replication, and rapid recovery capabilities, ensuring that digital service processes remain uninterrupted, even under extreme risk scenarios.

In operational practice, the Company applies a 1:1 IT infrastructure ratio between the Data Center and the DRC, enabling critical systems and applications to be restored swiftly without compromising operational performance. This approach ensures consistent service availability and recovery effectiveness. To support optimal DRC implementation, the Company has deployed robust infrastructure and implemented structured risk management practices to maintain stable and reliable IT operations.

Furthermore, the Company has developed an integrated monitoring system that oversees performance in real time across both core and supporting systems, ensuring service reliability and minimizing potential operational disruptions. In parallel, the Company conducts routine maintenance processes, including daily data backups, to ensure data security and sustain optimal digital service continuity.



Dengan implementasi DRC yang menyeluruh dan efektif, Perseroan mampu memberikan jaminan kontinuitas layanan, menjaga stabilitas operasional, serta memperkuat posisi sebagai penyedia layanan pembiayaan digital yang andal, aman, dan responsif. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Perseroan dalam menghadirkan layanan berkualitas tinggi bagi seluruh nasabah dan pemangku kepentingan, sejalan dengan visi jangka panjang Perseroan.

Through the comprehensive and effective implementation of its DRC, the Company provides assurance of service continuity, maintains operational stability, and reinforces its position as a reliable, secure, and responsive provider of digital financing services. This initiative reflects the Company's steadfast commitment to delivering high-quality services to customers and stakeholders, in alignment with its long-term strategic vision.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI

Dalam rangka memastikan pengelolaan sistem TI yang efektif, aman, dan selaras dengan strategi transformasi digital, Perseroan membentuk Departemen IT and Digitalization sebagai unit utama yang memimpin seluruh inisiatif digital di berbagai lini operasional. Departemen ini bertugas memastikan implementasi kebijakan, pengembangan sistem, serta pengawasan infrastruktur TI dijalankan secara konsisten dan optimal.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 832/KBFMF/VIII/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, Departemen IT and Digitalization berada di bawah pengawasan langsung Direktur Operasional. Struktur ini memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, koordinasi lintas unit yang efisien, serta pemantauan kinerja sistem TI secara menyeluruh.

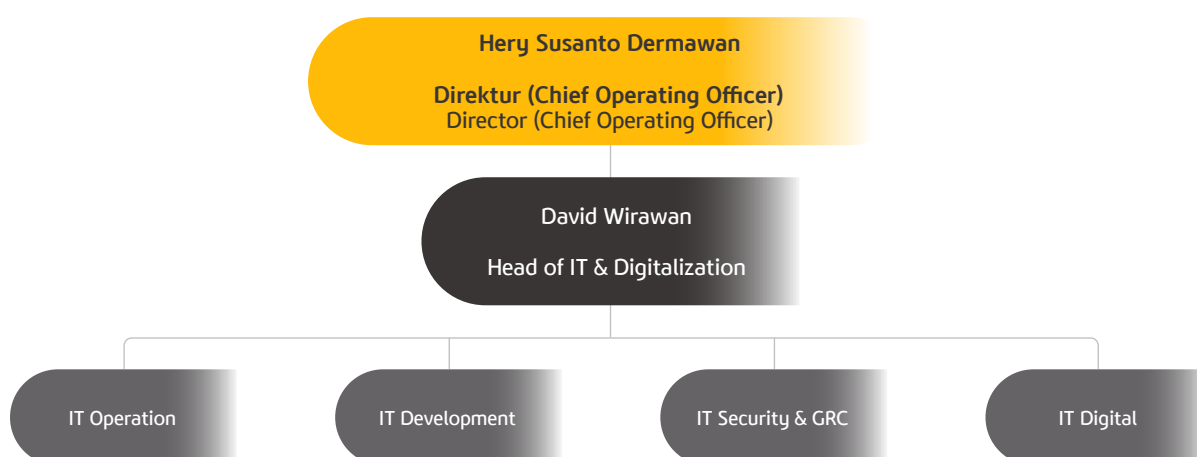
Secara keseluruhan, struktur organisasi pengelola TI Perseroan per 31 Desember 2025 disajikan pada bagan berikut:

IT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

To ensure effective, secure, and strategically aligned IT system management in support of the Company's digital transformation agenda, the Company has established the IT and Digitalization Department as the primary unit leading all digital initiatives across operational lines. This Department is responsible for ensuring the consistent and optimal implementation of IT policies, system development, and infrastructure oversight.

Pursuant to Board of Directors Decree No. 832/KBFMF/VIII/2025 dated 1 September 2025 concerning the Company's Organizational Structure, the IT and Digitalization Department operates under the direct supervision of the Operations Director. This structure facilitates more agile decision-making processes, efficient cross-unit coordination, and comprehensive monitoring of IT system performance.

Overall, the Company's IT governance organizational structure as of 31 December 2025 is presented in the following chart:





Dengan struktur organisasi yang jelas dan terintegrasi, Perseroan memastikan pengelolaan TI berjalan sinergis, mendukung transformasi digital, efisiensi operasional, mitigasi risiko, serta kepatuhan regulasi. Departemen IT and Digitalization memegang peran kunci dalam mengelola infrastruktur TI secara inovatif dan adaptif, sekaligus memperkuat keamanan data dan menghadirkan layanan pembiayaan digital yang andal dan terpercaya.

With a clear and integrated organizational structure, the Company ensures that IT management is conducted in a synergistic manner, supporting digital transformation, operational efficiency, risk mitigation, and regulatory compliance. The IT and Digitalization Department plays a pivotal role in managing IT infrastructure in an innovative and adaptive manner, while simultaneously strengthening data security and delivering reliable and trusted digital financing services.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN TI

IT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Departemen Teknologi Informasi (TI) memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan operasional sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan melalui implementasi dan pengelolaan teknologi yang inovatif. Dalam menjalankan peran tersebut, Departemen TI bertanggung jawab untuk:

The Information Technology (IT) Department plays a strategic role in ensuring operational continuity while supporting the Company's business growth through the implementation and management of innovative technologies. In carrying out this role, the IT Department is responsible for:

1. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola strategi teknologi informasi untuk mendukung kelancaran operasional dan arah pengembangan Perseroan.
2. Mengelola *database* dan melakukan analisis data guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan mendukung strategi bisnis.
3. Mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi termasuk *hardware* dan *software* yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
4. Memelihara sistem IT agar tetap andal, efisien, dan mampu mendukung operasional Perseroan secara optimal.
5. Mengelola keamanan jaringan dan perlindungan data Perseroan guna mengantisipasi ancaman siber serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan produk digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta mitra bisnis.
7. Menyusun kebijakan dan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan standar dan regulasi industri guna memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan terintegrasi.
8. Melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap infrastruktur teknologi informasi guna memastikan keselarasan dengan perkembangan industri dan kebutuhan bisnis.

1. Planning, developing, and managing information technology strategies to support smooth operations and the Company's development direction.
2. Managing databases and conducting data analysis to enhance decision-making effectiveness and support business strategies.
3. Developing and implementing appropriate technology solutions, including hardware and software, aligned with the Company's business needs.
4. Maintaining IT systems to ensure reliability, efficiency, and optimal support for the Company's operations.
5. Managing network security and safeguarding the Company's data to anticipate cyber threats and ensure compliance with prevailing regulations.
6. Developing and optimizing digital products to enhance operational efficiency and deliver added value to customers and business partners.
7. Establishing information technology policies and governance frameworks aligned with industry standards and regulatory requirements to ensure effective and integrated technology utilization.
8. Conducting continuous evaluation and enhancement of IT infrastructure to ensure alignment with industry developments and evolving business needs.

Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan TI sekaligus mempercepat transformasi digital, Departemen IT and Digitalization menerapkan prosedur pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur untuk setiap unit kerja pendukungnya. Pendekatan ini memungkinkan setiap unit memberikan kontribusi spesifik dan maksimal dalam membangun sistem teknologi informasi yang efisien, aman, dan inovatif.

To ensure effective IT management while accelerating digital transformation, the IT and Digitalization Department implements a structured division of roles and responsibilities across its supporting units. This approach enables each unit to deliver specific and optimal contributions in building an efficient, secure, and innovative information technology system.



Ruang lingkup tugas dan fungsi dari masing-masing unit di bawah Departemen IT and Digitalization dijabarkan pada tabel berikut:

The scope of duties and responsibilities of each unit under the IT and Digitalization Department is outlined in the following table:

Departemen IT and Digitalization IT and Digitalization Department

Departemen Departments	Tugas dan Fungsi	Duties and Functions
IT Operation	Bertanggung jawab dalam pemeliharaan operasional teknologi informasi, termasuk <i>IT Infrastructure</i> dan <i>IT Services</i> , guna memastikan sistem teknologi informasi tetap tersedia, andal, serta berjalan secara optimal untuk mendukung kelangsungan operasional Perseroan.	Responsible for maintaining information technology operations, including IT infrastructure and IT services, to ensure that information technology systems remain available, reliable, and run optimally to support the Company's operational continuity.
IT Development	Bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi yang mendukung kebutuhan bisnis serta memastikan integrasi teknologi yang efisien dalam operasional Perseroan.	Responsible for developing and managing application systems that support business needs and ensuring efficient technology integration into the Company's operations.
IT Security & GRC	Bertanggung jawab dalam menyusun tata kelola, risiko, dan kepatuhan seluruh IT departemen, memastikan sistem keamanan informasi beroperasi secara optimal.	Responsible for establishing governance, risk management, and compliance frameworks for the entire IT department, ensuring that information security systems operate optimally.
IT Digital	Bertanggung jawab dalam mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan di dalam Perseroan untuk mengimplementasikan digitisasi dalam berbagai aspek operasional. Selain itu, departemen ini berperan dalam memimpin proses transformasi digital guna meningkatkan efisiensi operasional.	Responsible for orchestrating all stakeholders within the Company to implement digitization in various operational aspects. Furthermore, this department plays a role in leading the digital transformation process to improve operational efficiency.

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN TI

Departemen IT and Digitalization Perseroan dipimpin oleh Head of IT and Digitalization yang bertanggung jawab langsung atas keempat departemen pendukung, yaitu IT Operation, IT Development, IT Cyber Security, dan IT Digital. Profil lengkap Head of IT and Digitalization disajikan sebagai berikut:

PROFILE OF THE HEAD OF THE IT DEPARTMENT

The Company's IT and Digitalization Department is led by the Head of IT and Digitalization, who holds direct responsibility for overseeing four supporting departments: IT Operation, IT Development, IT Cyber Security, dan IT Digital. The detailed profile of the Head of IT and Digitalization is presented as follows:

David Wirawan

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun
Indonesian citizen, 50 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Manajemen dari IPMI Business School (2015)
- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanuddin (1999)

- Master of Management from IPMI Business School (2015)
- Bachelor of Electrical Engineering from Hasanuddin University (1999)

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Financing Expert Certification issued by Indonesian Financing Professional Certification Institute.

Riwayat Karier Career History

- Head of IT & Digitalization di PT KB Finansia Multi Finance (2018 – saat ini)
- IT Director di PT Dutalestari Sentratama – Kino Group (2015– 2017)
- Chief Corporate IT di OT Group (1999– 2014)

- Head of IT & Digitalization at PT KB Finansia Multi Finance (2018 – present)
- IT Director at PT Dutalestari Sentratama – Kino Group (2015–2017)
- Chief Corporate IT at OT Group (1999–2014)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

Member of Information Technology Steering Committee

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN DEPARTEMEN TI TAHUN 2025

Dalam upaya membangun SDM yang unggul dan adaptif terhadap dinamika teknologi, Perseroan melaksanakan program pengembangan kompetensi khusus bagi karyawan Departemen IT and Digitalization setiap tahunnya. Program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan kemampuan teknis, pemahaman praktik keamanan siber, pengelolaan sistem TI, serta optimalisasi teknologi digital, sehingga mampu mendukung kelancaran operasional bisnis sekaligus mendorong inovasi layanan digital yang aman, andal, dan bernilai tambah bagi nasabah.

Sepanjang tahun 2025, karyawan Departemen IT and Digitalization telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan *hard skill* maupun *soft skill* yang difokuskan pada peningkatan kapabilitas teknis, efektivitas operasional, serta pengembangan sistem informasi yang tangguh dan aman. Perseroan juga menyelenggarakan acara *Tech Lounge* yang menghadirkan narasumber eksternal untuk berbagi materi dan pengalaman praktis seputar TI guna memperluas wawasan karyawan dan mendorong penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan TI.

Melalui kombinasi pelatihan, *workshop*, dan pengalaman langsung di lapangan, Perseroan memastikan tim Departemen IT and Digitalization menjadi semakin *tech-savvy* dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap berbagai solusi digital baru, sehingga dapat berkontribusi optimal dalam pengembangan sistem dan layanan digital. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya memperkuat kapabilitas internal, tetapi juga mendorong inovasi layanan digital, meningkatkan ketahanan sistem informasi, dan menegaskan kesiapan Perseroan dalam menghadapi tantangan digitalisasi di industri pembiayaan.

Berikut adalah daftar pelatihan yang telah diselenggarakan Perseroan dan diikuti oleh karyawan Departemen IT and Digitalization sepanjang tahun 2025:

Pelatihan Karyawan Perseroan Bidang TI Company Employee Training in the IT Fields

No.	Nama Pelatihan Training	Nama Penyelenggara Organizer	Periode Implementation Period	Jumlah Peserta Participants
1.	Workshop Flutterflow	Flutter Flow Indonesia	2025	20 orang 20 persons
2.	Container, Kubernetes and Automation	Metrodata Indonesia	2025	3 orang 3 persons
3.	Workshop Risk and Information Systems Control	OJK	2025	1 orang 1 person

IT DEPARTMENT EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2025

In its efforts to build a high-performing workforce that is adaptive to technological dynamics, the Company conducts an annual competency development program specifically for employees of the IT and Digitalization Department. This program is designed to equip employees with technical expertise, cybersecurity best practices, IT system management capabilities, and digital technology optimization skills, enabling them to support seamless business operations while driving innovation in secure, reliable, and value-added digital services for customers.

Throughout 2025, employees of the IT and Digitalization Department participated in various hard skill and soft skill training programs focused on enhancing technical capabilities, improving operational effectiveness, and strengthening the development of resilient and secure information systems. The Company also organized Tech Lounge events featuring external speakers who shared practical insights and expertise in information technology, broadening employees' perspectives and encouraging the adoption of best practices in IT management.

Through a combination of structured training, workshops, and hands-on experience, the Company ensures that the IT and Digitalization team becomes increasingly tech-savvy and agile in adapting to emerging digital solutions, enabling them to contribute optimally to the development of systems and digital services. This comprehensive approach not only strengthens internal capabilities but also fosters digital service innovation, enhances information system resilience, and reaffirms the Company's readiness to address digitalization challenges within the financing industry.

The following is a list of training programs organized by the Company and attended by employees of the IT and Digitalization Department throughout 2025:



Selain mendorong partisipasi karyawan dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kapabilitas, Perseroan juga secara aktif memfasilitasi program sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi terkini. Program sertifikasi ini dirancang untuk meningkatkan keahlian teknis karyawan Departemen IT and Digitalization agar senantiasa memenuhi standar profesional di bidang TI dan digitalisasi sehingga mampu mendukung penyediaan layanan pembiayaan digital yang optimal, aman, dan berdaya saing.

Adapun informasi mengenai jumlah karyawan yang telah memperoleh sertifikasi di bidang TI dan digitalisasi sepanjang tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Sertifikasi untuk Personel Divisi TI Certification for IT Division Personnel

Nama Pelatihan Training	Nama Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Participants
TOGAF 10	IT GOVERNANCE INDONESIA	10 orang 10 persons

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, Perseroan juga secara konsisten menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan (*sharing session*) yang melibatkan seluruh karyawan Departemen IT and Digitalization, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai seminar dan webinar yang diselenggarakan oleh vendor teknologi informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan, mengikuti perkembangan teknologi terkini, serta mengidentifikasi solusi digital yang relevan untuk diterapkan dalam operasional Perseroan.

Melalui rangkaian program pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan pengayaan pengetahuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Perseroan menegaskan komitmennya dalam mengembangkan kompetensi karyawan Departemen IT and Digitalization. Seluruh inisiatif tersebut berperan penting dalam menjaga keandalan sistem TI, meningkatkan kualitas layanan digital, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkesinambungan.

In addition to encouraging employee participation in various training and capability development programs, the Company also actively facilitates certification programs aligned with organizational needs and the latest technological developments. These certification programs are designed to enhance the technical expertise of IT and Digitalization Department employees, ensuring they consistently meet professional standards in IT and digitalization, enabling them to support the provision of optimal, secure, and competitive digital financing services.

The following table presents the number of employees who have obtained IT and digitalization certifications throughout 2025:

As part of its ongoing competency development efforts, the Company consistently organizes knowledge-sharing sessions involving all employees of the IT and Digitalization Department, while also encouraging active participation in seminars and webinars conducted by information technology vendors. These initiatives are designed to broaden perspectives, keep pace with the latest technological advancements, and identify relevant digital solutions that can be effectively implemented within the Company's operations.

Through the continuous implementation of training programs, professional certifications, and knowledge enrichment initiatives, the Company reaffirms its commitment to strengthening the competencies of employees within the IT and Digitalization Department. Collectively, these initiatives play a vital role in maintaining IT system reliability, enhancing the quality of digital services, and supporting the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.



ROADMAP PENGEMBANGAN TI PERIODE 2023–2027

Arah Strategis Pengelolaan TI dan Digitalisasi Industri Pembiayaan

Dalam beberapa tahun terakhir, akselerasi digitalisasi telah berlangsung secara signifikan dan membawa perubahan fundamental bagi industri pembiayaan. Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan tantangan baru, tetapi juga membuka peluang strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat daya saing Perseroan. Dalam konteks tersebut, penerapan teknologi digital menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan proses operasional yang lebih efektif dan terintegrasi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, perusahaan pembiayaan dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan terukur terhadap perkembangan teknologi yang terus berevolusi. Transformasi digital tidak lagi hanya menjadi inisiatif pendukung, melainkan telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan proses bisnis, pengembangan layanan, dan penguatan operasional secara menyeluruh. Implementasi transformasi digital yang optimal memerlukan dukungan infrastruktur TI yang andal, tata kelola yang kuat, serta kesiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing.

Sebagai upaya untuk mendorong akselerasi digitalisasi di sektor jasa keuangan, OJK telah menyusun *Roadmap Pengembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Periode 2023–2027* yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha pembiayaan dalam merumuskan langkah pengembangan serta implementasi teknologi digital. *Roadmap* ini berfokus pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu peningkatan daya saing industri, penguatan ketahanan dan tata kelola perusahaan pembiayaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun ekosistem pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitas implementasi *roadmap* tersebut, OJK juga telah menetapkan strategi pengembangan industri beserta indikator keberhasilan yang terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, implementasi digitalisasi, dan tujuan penguatan fundamental industri pembiayaan agar semakin kompetitif dan adaptif terhadap perubahan. Melalui indikator keberhasilan yang terarah, *roadmap* ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja transformasi digital perusahaan pembiayaan serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Roadmap Pengembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Periode 2023–2027 beserta strategi pengembangan dan indikator keberhasilannya disajikan dalam infografis berikut:

IT DEVELOPMENT ROADMAP 2023–2027

Strategic Direction for IT Management and Digitalization of the Financing Industry

In recent years, the acceleration of digitalization has progressed significantly, bringing fundamental changes to the financing industry. The advancement of digital technology has not only introduced new challenges but also created strategic opportunities to enhance operational efficiency, expand service reach, and strengthen the Company's competitiveness. In this context, the adoption of digital technology has become a crucial element in supporting business sustainability and establishing more effective and integrated operational processes.

In line with these developments, financing companies are required to adapt swiftly and in a measured manner to continuously evolving technological advancements. Digital transformation is no longer merely a supporting initiative, but has evolved into a core pillar in managing business processes, developing services, and strengthening overall operations. The optimal implementation of digital transformation requires reliable IT infrastructure, robust governance, and competent, competitive human capital readiness.

To accelerate digitalization within the financial services sector, OJK has issued the Financing Company Industry Development Roadmap for the 2023–2027 period, which serves as guidance for financing companies in formulating development strategies and implementing digital technologies. This roadmap focuses on three primary pillars: enhancing industry competitiveness, strengthening resilience and governance of financing companies, and optimizing the utilization of information technology to build an innovative, inclusive, and sustainable financing ecosystem.

To ensure effective implementation, OJK has also established industry development strategies accompanied by measurable success indicators. This approach aims to ensure alignment between regulatory policies, digitalization initiatives, and the strengthening of industry fundamentals, enabling financing companies to become more competitive and adaptive to change. Through clearly defined success indicators, the roadmap is expected to serve as a reference for evaluating digital transformation performance within financing companies, while contributing positively to national economic growth.

The Financing Company Industry Development Roadmap for the 2023–2027 period, along with its development strategies and success indicators, is presented in the following infographic:



Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2023 – 2027 dari Otoritas Jasa Keuangan Financing Company Roadmap 2023 – 2027 from the Financial Services Authority

Strategi Pengembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Financing Company Industrial Development Strategy

INDIKATOR KEBERHASILAN Success Indicators



Tahapan implementasi yang berfokus pada Pilar III mengenai akselerasi transformasi digital perusahaan pembiayaan untuk periode 2024–2027 disajikan dalam tabel berikut:

The implementation stages focused on Pillar III regarding the acceleration of digital transformation of financing companies for the 2024–2027 period are presented in the following table:

Tahapan Pelaksanaan Akselerasi Transformasi Digital Perusahaan Pembiayaan Stages of Implementing Digital Transformation Acceleration for Financing Companies

Pilar Pillars	Aksi Action	2024	2025	2026	2027
Aksi Transformasi digital perusahaan pembiayaan Digital transformation action of financing companies	Evaluasi implementasi ketentuan tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi. Evaluate the implementation of provisions on information technology governance and risk management.				
	Peningkatan kualitas SDM yang terkait penggunaan teknologi. Improve the quality of human resources related to technology use.				
	Inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Innovate financing products that meet community needs by utilizing digital technology.				
	Melakukan pengembangan sistem informasi pengawasan dan pengaturan perusahaan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi (SupTech). Develop an information system for monitoring and regulating financing companies based on information technology (SupTech).				
	Perusahaan pembiayaan membangun <i>regtech</i> untuk pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan. Financing companies are building <i>regtech</i> to meet regulatory compliance.				
	Perusahaan Pembiayaan melakukan mekanisme untuk menjaga keamanan data. Financing companies implement mechanisms to maintain data security.				



Melalui *roadmap* tersebut, OJK mengarahkan berbagai inisiatif strategis yang wajib menjadi acuan bagi perusahaan pembiayaan, termasuk Perseroan, dalam mempercepat agenda transformasi digital industri pembiayaan, antara lain:

1. Mengembangkan kebijakan atau regulasi yang dapat mendukung percepatan transformasi digital di industri
2. Perusahaan pembiayaan; Mendorong inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui riset dan pemanfaatan teknologi digital oleh Perusahaan pembiayaan;
3. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait teknologi digital baik industri perusahaan pembiayaan maupun di pengawas OJK untuk mempercepat proses transformasi digital industri perusahaan pembiayaan; dan
4. Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis teknologi (*Supervisory Technology*) di OJK dan pemanfaatan *Regulatory Technology* untuk pemenuhan kepatuhan oleh perusahaan pembiayaan terhadap ketentuan yang berlaku.

Implementasi *Roadmap* TI dan Digitalisasi Perseroan Tahun 2025

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten menyelaraskan strategi pengembangan teknologi informasi dengan *Roadmap* Industri Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan oleh OJK. *Roadmap* tersebut menjadi landasan strategis bagi Perseroan dalam mendorong efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi di seluruh lini bisnis.

Sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan tersebut, Perseroan telah menyusun *roadmap* TI internal yang difokuskan pada penguatan infrastruktur TI, percepatan digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan solusi pembiayaan berbasis teknologi yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan efektivitas operasional. Melalui implementasi *roadmap* ini, Perseroan menargetkan terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan melalui pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh.

Perseroan meyakini bahwa pengelolaan dan pengembangan TI yang inovatif merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika industri pembiayaan yang terus berkembang. Penguatan layanan pembiayaan berbasis digital yang aman, andal, dan mudah diakses tidak hanya meningkatkan pengalaman nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan ekspansi bisnis Perseroan. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital secara berkelanjutan senantiasa dilakukan dengan mengacu pada *roadmap* TI Perseroan untuk periode 2025–2026.

Through this roadmap, the OJK directs various strategic initiatives that must serve as a reference for finance companies, including the Company, in accelerating the digital transformation agenda of the finance industry, including:

1. Developing policies or regulations that can support the acceleration of digital transformation in the finance industry.
2. Encouraging innovation in finance products that meet community needs through research and the use of digital technology by finance companies;
3. Encouraging improvements in the quality of human resources (HR) related to digital technology, both within the finance industry and within OJK supervisors, to accelerate the digital transformation process of the finance industry; and
4. Accelerating the implementation of technology-based supervision (*Supervisory Technology*) at the OJK and the use of *Regulatory Technology* to ensure compliance by finance companies with applicable regulations.

Implementation of the Company's IT and Digitalization Roadmap for 2025

As a financing company committed to sustainable growth, the Company consistently aligns its information technology development strategy with the Financing Company Industry Roadmap issued by the Financial Services Authority (OJK). This roadmap serves as a strategic foundation for enhancing operational efficiency, strengthening competitiveness, and optimizing digitalization across all business lines.

As a follow-up to this policy direction, the Company has established its internal IT roadmap, focused on strengthening IT infrastructure, accelerating business process digitalization, and developing technology-based financing solutions to enhance service quality and operational effectiveness. Through the implementation of this roadmap, the Company aims to achieve sustainable business growth through comprehensive digital technology utilization.

The Company believes that innovative IT management and development are critical factors in sustaining business continuity amid the evolving dynamics of the financing industry. Strengthening secure, reliable, and easily accessible digital financing services not only enhances customer experience but also contributes positively to business performance and expansion. Accordingly, continuous digital service development is undertaken in reference to the Company's IT roadmap for the 2025–2026 period.



Secara keseluruhan, *roadmap* TI Perseroan sepanjang periode 2025–2026 diarahkan untuk melanjutkan agenda transformasi digital secara terukur dan terintegrasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja bisnis. Seluruh inisiatif yang dijalankan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip GCG.

Pada tahun 2025, strategi TI Perseroan diarahkan pada optimalisasi efisiensi biaya infrastruktur TI guna mendukung peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh. Sejalan dengan fokus tersebut, Perseroan juga menerapkan otomasi dalam proses pengembangan sistem aplikasi untuk meningkatkan kecepatan, konsistensi, dan kualitas hasil pengembangan. Di saat yang sama, penguatan aspek keamanan TI turut menjadi prioritas utama melalui peningkatan pengawasan yang komprehensif serta penguatan kesadaran keamanan siber di seluruh lapisan organisasi.

Melalui implementasi *roadmap* TI yang terarah dan selaras dengan kebijakan regulator, Perseroan menegaskan komitmen penuh untuk terus memperkuat fondasi transformasi digital secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem TI dalam mendukung operasional yang efisien dan aman, tetapi juga menjadi *enabler* utama dalam peningkatan kualitas layanan, mitigasi risiko, serta penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan *roadmap* TI yang adaptif dan berorientasi masa depan, Perseroan optimistis dapat menjaga daya saing, memperkuat ketahanan bisnis, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri pembiayaan yang terus berkembang.

FRAMEWORK TI PERSEROAN

Dalam mendukung operasional dan pengembangan bisnis berbasis teknologi digital, Perseroan menyusun *Framework* TI sebagai kerangka kerja strategis yang memungkinkan integrasi berbagai aspek teknologi informasi. *Framework* tersebut menjadi landasan bagi Perseroan dalam mengelola kebutuhan pemangku kepentingan melalui pendekatan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian teknologi yang terstruktur, baik pada level operasional maupun strategis.

Sejalan dengan *Roadmap* TI Perseroan, *Framework* TI diarahkan untuk memperkuat fondasi sistem TI yang aman, andal, dan berkelanjutan. Penguatan aspek keamanan TI menjadi salah satu pilar utama dalam *framework* tersebut yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi canggih guna melindungi data dan infrastruktur digital secara optimal. Upaya ini mencakup penerapan teknologi enkripsi

Overall, the Company's IT roadmap for 2025–2026 is directed toward advancing a structured and integrated digital transformation agenda aimed at improving productivity, efficiency, and overall business effectiveness. All initiatives are implemented in accordance with prevailing laws and regulations, as well as principles of GCG.

In 2025, the Company's IT strategy focused on optimizing IT infrastructure cost efficiency to support broader operational efficiency improvements. In line with this focus, the Company also implemented automation within system application development processes to enhance speed, consistency, and development quality. At the same time, strengthening IT security remained a top priority, achieved through comprehensive monitoring enhancements and reinforced cybersecurity awareness across all organizational levels.

Through the structured implementation of its IT roadmap, aligned with regulatory policies, the Company reaffirms its full commitment to strengthening the foundation of sustainable digital transformation. This approach ensures that IT infrastructure and systems remain ready to support secure and efficient operations, while also serving as a key enabler in improving service quality, mitigating risks, and creating added value for all stakeholders. By adopting an adaptive and forward-looking IT roadmap, the Company remains confident in maintaining competitiveness, reinforcing business resilience, and driving sustainable growth amid the continuously evolving financing industry landscape.

COMPANY'S IT FRAMEWORK

To support operations and the development of technology-based business activities, the Company has established an IT Framework as a strategic working framework that enables the integration of various information technology aspects. This framework serves as the foundation for managing stakeholder needs through a structured approach to technology planning, development, and control, both at the operational and strategic levels.

In alignment with the Company's IT Roadmap, the IT Framework is designed to strengthen a secure, reliable, and sustainable IT system foundation. The reinforcement of IT security constitutes one of the core pillars of the framework, implemented through the adoption of advanced technologies to optimally safeguard data and digital infrastructure. These efforts include the application



tingkat lanjut, peningkatan kapabilitas dan responsivitas sistem *firewall*, serta pengembangan mekanisme deteksi dan respons terhadap ancaman siber yang didukung oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Penerapan langkah-langkah strategis tersebut memungkinkan Perseroan menjaga ketahanan sistem TI secara menyeluruh dan berkesinambungan.

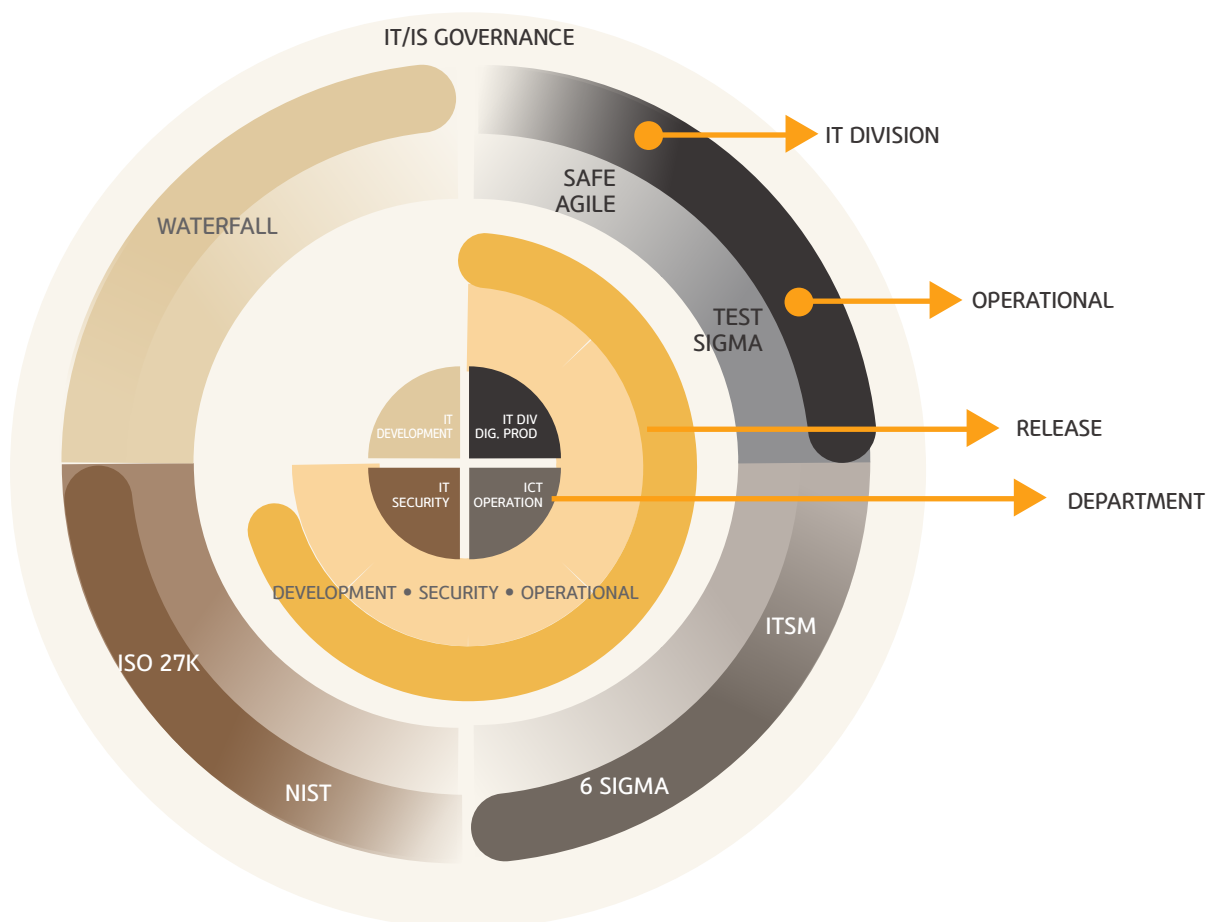
Berpijak pada fondasi keamanan dan ketahanan sistem yang kokoh, Perseroan mengarahkan seluruh pengembangan dan pengelolaan TI secara disiplin melalui *Framework* TI yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan kesiapan sistem internal dalam menghadapi dinamika industri serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang semakin berbasis data dan digital. Melalui penerapan *Framework* TI yang berkesinambungan, TI diposisikan sebagai *enabler* strategis yang mendukung transformasi digital, ketahanan usaha, dan penciptaan pertumbuhan berkelanjutan bagi Perseroan.

Secara keseluruhan, *Framework* TI Perseroan digambarkan melalui diagram berikut:

of advanced encryption technologies, enhancement of firewall system capabilities and responsiveness, as well as the development of artificial intelligence (AI) supported cyber threat detection and response mechanisms. The implementation of these strategic measures enables the Company to maintain comprehensive and sustainable IT system resilience.

Built upon a strong foundation of system security and resilience, the Company directs all IT development and management activities in a disciplined manner through the established IT Framework. This approach is designed to ensure the readiness of internal systems in responding to industry dynamics while supporting increasingly data-driven and digital-based business decision-making. Through the consistent implementation of the IT Framework, IT is positioned as a strategic enabler that supports digital transformation, business resilience, and the creation of sustainable growth for the Company.

Overall, the Company's IT Framework is illustrated in the following diagram:





BIAYA INVESTASI PENGEMBANGAN TI TAHUN 2025

Perubahan pola perilaku dan kebutuhan masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital mendorong Perseroan untuk terus bersikap adaptif dalam merespons dinamika bisnis yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menempatkan pengembangan TI sebagai salah satu prioritas strategis yang diterapkan secara menyeluruh dalam operasional bisnis agar dapat menjawab kebutuhan nasabah akan hadirnya layanan pembiayaan berbasis digital yang mudah diakses, andal, dan aman.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan berbagai inisiatif strategis di bidang TI sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat fondasi digital Perseroan. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mengokohkan infrastruktur TI, meningkatkan kapabilitas sistem informasi, serta mendukung perwujudan misi Perseroan sebagai penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang bernilai tambah.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, investasi TI yang dilakukan Perseroan pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan efisiensi infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah guna memastikan pengalaman layanan yang semakin andal dan terintegrasi. Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif sebagai berikut:

1. Penggantian IT Vendor dan IT Solution untuk beberapa layanan infrastruktur TI, termasuk *Data Streaming* dan eKYD (*Know Your Device*) dengan solusi yang memiliki kualitas lebih optimal, biaya yang lebih efisien, serta selaras dengan kebutuhan dan skala bisnis Perseroan;
2. Pengoptimalan layanan infrastruktur TI berbasis *cloud* guna meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi operasional sistem; dan
3. Peningkatan serta penyempurnaan fitur pembayaran angsuran pada aplikasi Kreditplus Mobile, yang ditujukan untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih optimal sekaligus mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran oleh nasabah.

Dengan melakukan investasi pengembangan TI yang terarah dan berkelanjutan, Perseroan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi digital yang efisien, andal, dan berdaya saing. Langkah strategis ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas layanan pembiayaan berbasis digital, tetapi juga memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri serta kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

IT DEVELOPMENT INVESTMENT COSTS IN 2025

Shifts in public behavior patterns and needs, which are increasingly integrated with digital technology, have prompted the Company to remain adaptive in responding to evolving business dynamics. In line with this development, the Company has positioned IT development as a key strategic priority, implemented comprehensively across business operations to address customers' expectations for digital-based financing services that are accessible, reliable, and secure.

Throughout 2025, the Company realized various strategic IT initiatives as part of its ongoing commitment to strengthening its digital foundation. These initiatives were directed at reinforcing IT infrastructure, enhancing information system capabilities, and supporting the Company's mission as a provider of technology-based financing solutions and value-added services.

Consistent with this strategic direction, IT investments in 2025 were focused on improving infrastructure efficiency, optimizing the utilization of digital technologies, and enhancing service quality to ensure a more reliable and integrated customer experience. The implementation of this strategy was reflected through several key initiatives, including:

1. The replacement of selected IT Vendors and IT Solutions for certain infrastructure services, including Data Streaming and eKYD (Know Your Device), with solutions offering improved quality, greater cost efficiency, and better alignment with the Company's business scale and operational needs;
2. Optimization of cloud-based IT infrastructure services to enhance system flexibility, scalability, and operational efficiency; and
3. Enhancement and refinement of installment payment features within the Kreditplus Mobile application, aimed at delivering a more seamless transaction experience while facilitating customers' fulfillment of their installment obligations.

Through targeted and sustainable IT development investments, the Company reaffirms its commitment to strengthening an efficient, reliable, and competitive digital foundation. These strategic measures not only support the enhancement of digital financing service quality but also ensure the Company's readiness to navigate industry dynamics and continuously evolving customer needs.



BIAYA INVESTASI PENGEMBANGAN TI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Perseroan telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan sistem. Biaya ini digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk penyempurnaan infrastruktur TI, pengembangan aplikasi digital, serta penguatan keamanan siber berbasis ISO 27001:2022 yang masih berlaku hingga 2026.

Selain itu, investasi juga diarahkan pada automasi proses bisnis serta pengembangan kompetensi SDM TI melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan langkah ini, Perseroan memastikan kesiapan teknologi dalam mendukung inovasi layanan serta meningkatkan daya saing di industri pembiayaan digital.

REALISASI PROGRAM KERJA TI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan layanan pembiayaan berbasis digital yang andal dan efisien, Perseroan merealisasikan berbagai program kerja strategis di bidang teknologi informasi. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan program kerja TI difokuskan pada peningkatan *cost efficiency* layanan infrastruktur TI dengan tetap menjaga kualitas dan keandalan layanan digital. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi anggaran secara terukur tanpa mengurangi keandalan sistem, sehingga Perseroan tetap mampu menghadirkan layanan digital yang stabil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Pada aspek infrastruktur TI, Perseroan mencatat peningkatan kinerja sistem yang tercermin dari capaian *system uptime* sebesar 99,25% pada tahun 2025, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 99,12%. Selain itu, Perseroan juga telah menginisiasi pembaruan sistem inti (*core system*) yang ditargetkan untuk *go live* pada tahun 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat keandalan sistem sekaligus meningkatkan efisiensi proses bisnis secara *end-to-end*.

Berlandaskan capaian kinerja tersebut, Perseroan melanjutkan penguatan transformasi TI melalui implementasi sejumlah langkah strategis yang terarah. Pada tahun 2025, langkah-langkah strategis utama yang telah diterapkan Perseroan meliputi:

1. Optimalisasi pemanfaatan *platform* Google Cloud guna mendukung kinerja sistem TI yang lebih efisien dan andal, yang berdampak pada peningkatan efisiensi operasional Perseroan hingga sebesar 25%;

IT INVESTMENT DEVELOPMENT COSTS IN 2025

In 2025, the Company allocated an adequate budget to support the development of information technology aimed at enhancing operational efficiency and system security. These expenditures were directed toward various strategic programs, including the enhancement of IT infrastructure, the development of digital applications, and the strengthening of cybersecurity measures in accordance with ISO 27001:2022 standards, which remain valid through 2026.

In addition, investments were focused on business process automation and the development of IT human capital competencies through structured training and professional certification programs. Through these initiatives, the Company ensures technological readiness to support service innovation and to strengthen its competitiveness within the digital financing industry.

REALIZATION OF THE 2025 IT WORK PROGRAM

To realize reliable and efficient digital-based financing services, the Company implemented various strategic information technology initiatives. Throughout 2025, the execution of IT programs was primarily focused on enhancing cost efficiency within IT infrastructure services, while maintaining the quality and reliability of digital services. This approach enabled disciplined budget optimization without compromising system dependability, allowing the Company to consistently deliver stable, secure, and responsive digital services to customers.

From an IT infrastructure perspective, the Company recorded improved system performance, reflected in a system uptime achievement of 99.25% in 2025, compared to 99.12% in 2024. In addition, the Company initiated the upgrade of its core system, which is targeted to go live in 2026. This initiative is expected to further strengthen system reliability while enhancing end-to-end business process efficiency.

Building upon these performance achievements, the Company continued to reinforce its IT transformation through the implementation of targeted strategic measures. In 2025, the key strategic initiatives implemented included:

1. Optimization of the Google Cloud platform to support more efficient and reliable IT system performance, contributing to an operational efficiency improvement of up to 25%;



2. Penggabungan sistem aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM) ke dalam satu platform terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat integrasi dan konsistensi data; dan
3. Penguatan sinergi pengembangan aplikasi melalui penggabungan fungsi *Mobile Developer*, *Front-End Developer*, serta UI/UX Designer guna meningkatkan efektivitas kolaborasi dan mempercepat proses pengembangan aplikasi di seluruh tahapan *Software Development Life Cycle* (SDLC).

Sementara pada aspek layanan digital, Departemen IT and Digitalization bersama unit bisnis secara berkelanjutan mengembangkan berbagai fitur baru yang berorientasi pada peningkatan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman nasabah. Sepanjang tahun 2025, sejumlah pengembangan fitur strategis telah direalisasikan Perseroan, antara lain:

1. Implementasi fitur *Auto Debit* pada rekening nasabah melalui aplikasi Kreditplus Mobile untuk mempermudah pembayaran angsuran;
2. Pengembangan fitur *Customer Get Customer* pada aplikasi Kreditplus Mobile sebagai bagian dari penguatan strategi akuisisi nasabah; dan
3. Pengembangan fitur *cashless collection* melalui penambahan opsi pembayaran QRIS pada aplikasi *Mobile Collection System* yang digunakan oleh tim *Field Collector*, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan pembayaran angsuran bagi nasabah.

Melalui realisasi berbagai program kerja TI tersebut, Perseroan secara konsisten memperkuat fondasi digital secara terarah dan berkelanjutan. Upaya ini menegaskan peran TI sebagai *strategic enabler* dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kualitas layanan, serta mendorong daya saing Perseroan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

PRIORITAS PROGRAM KERJA TI TAHUN 2026

Perseroan menyadari bahwa akselerasi teknologi digital yang semakin masif menghadirkan dinamika baru bagi industri pembiayaan, baik dalam bentuk tantangan maupun peluang pertumbuhan ke depan. Dalam merespons dinamika tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya untuk terus bersikap adaptif serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital di seluruh lini operasional guna meningkatkan daya saing, efisiensi proses bisnis, dan keberlanjutan usaha.

2. Consolidation of Customer Relationship Management (CRM) applications into a single integrated platform to enhance operational efficiency while strengthening data integration and consistency; and
3. Strengthening application development synergy through the integration of Mobile Developer, Front-End Developer, and UI/UX Designer functions to enhance collaboration effectiveness and accelerate application development across all stages of the Software Development Life Cycle (SDLC).

On the digital services front, the IT and Digitalization Department, in collaboration with business units, continuously developed new features aimed at improving customer convenience, ease of use, and overall experience. Throughout 2025, several strategic feature enhancements were realized, including:

1. Implementation of an Auto Debit feature for customer accounts through the Kreditplus Mobile application to facilitate installment payments;
2. Development of a Customer Get Customer feature within the Kreditplus Mobile application as part of strengthening the customer acquisition strategy; and
3. Development of a cashless collection feature through the addition of QRIS payment options within the Mobile Collection System application used by the Field Collector team, providing greater flexibility and convenience for customers in making installment payments.

Through the realization of these IT initiatives, the Company has consistently strengthened its digital foundation in a structured and sustainable manner. These efforts reaffirm IT's role as a strategic enabler in enhancing operational efficiency, strengthening service quality, and driving the Company's long-term competitiveness.

IT WORK PROGRAM PRIORITIES IN 2026

The Company recognizes that the accelerating pace of digital technology adoption has introduced new dynamics within the financing industry, presenting both challenges and future growth opportunities. In responding to these developments, the Company reaffirms its commitment to remain adaptive and to maximize the utilization of digital technology across all operational lines in order to enhance competitiveness, improve business process efficiency, and ensure long-term sustainability.



Sejalan dengan arah strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan sejumlah program kerja prioritas di bidang TI untuk tahun 2026. Program-program ini difokuskan pada penguatan fondasi sistem, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi proses bisnis berbasis digital, yang meliputi:

1. Pembaruan *core system* beserta *surrounding system* guna meningkatkan keandalan sistem, kualitas layanan, serta pengalaman pengguna secara menyeluruh;
2. Pengoptimalan biaya operasional TI melalui pengelolaan infrastruktur dan layanan yang lebih efisien, dengan tetap menjaga standar kualitas dan keandalan layanan; serta
3. Digitalisasi proses bisnis pada tahapan *customer acquisition*, *underwriting*, dan *collection* untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mempercepat proses operasional, serta meningkatkan efektivitas penagihan angsuran.

Selain fokus pada penguatan sistem dan efisiensi operasional, Perseroan juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi TI tahun 2026. Dalam hal ini, Perseroan telah merancang berbagai inisiatif penguatan keamanan siber, antara lain melalui implementasi *Data Loss Prevention* (DLP) guna mencegah kebocoran serta penyalahgunaan data sensitif, serta melanjutkan penerapan *pre-requisite* jangka panjang sebagai fondasi menuju penerapan *Zero Trust Architecture* yang berpedoman pada kerangka kerja NIST untuk memperkuat perlindungan sistem dan data secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan program kerja prioritas dan inisiatif penguatan keamanan siber tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan teknologi digital secara strategis ke dalam operasional bisnis. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Perseroan sekaligus menghadirkan layanan pembiayaan berbasis digital yang andal, aman, dan inovatif secara berkelanjutan.

In line with this strategic direction, the Company has established several priority IT work programs for 2026. These programs are focused on strengthening system foundations, enhancing service quality, and optimizing digital-based business processes, including:

1. Upgrading the core system and its surrounding systems to improve overall system reliability, service quality, and user experience;
2. Optimizing IT operational costs through more efficient infrastructure and service management, while maintaining service quality and reliability standards; and
3. Digitalizing business processes across customer acquisition, underwriting, and collection stages to enhance decision-making accuracy, accelerate operational processes, and improve installment collection effectiveness.

In addition to strengthening systems and improving operational efficiency, the Company places particular emphasis on cybersecurity as an integral component of its 2026 IT strategy. In this regard, the Company has designed various cybersecurity enhancement initiatives, including the implementation of Data Loss Prevention (DLP) solutions to prevent data leakage and misuse of sensitive information. The Company is also continuing the implementation of long-term prerequisites as a foundation toward adopting a Zero Trust Architecture framework, guided by the NIST framework, to comprehensively strengthen system and data protection.

Through the execution of these priority programs and cybersecurity initiatives, the Company underscores its commitment to strategically integrating digital technology into its business operations. This approach is expected to reinforce the Company's competitiveness while delivering reliable, secure, and innovative digital financing services on a sustainable basis.

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perkembangan Makro Ekonomi Global dan Nasional, serta Industri Pembiayaan Domestik Overview of Global and Domestic Macroeconomic Developments, and the Domestic Financing Industry	152
Strategi Bisnis Tahun 2025 Business Strategy in 2025	154
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	156
Tinjauan Keuangan Financial Review	162





Tinjauan Perkembangan Makro Ekonomi Global dan Nasional, serta Industri Pembiayaan Domestik

Overview of Global and Domestic Macroeconomic Developments, and the Domestic Financing Industry



“Pada tahun 2025, ketidakpastian global dan domestik melemahkan daya beli dan permintaan pembiayaan domestik. Dampaknya, industri *multifinance* melambat dan risiko kredit meningkat. Sejalan dengan itu, Perseroan memperketat ekspansi pembiayaan secara *prudent* dengan realisasi pembiayaan baru sebesar Rp3,98 triliun per 31 Desember 2025, turun 48,4% (YoY) atau 50,2% dari target Perseroan.”

“In 2025, global and domestic uncertainties will weaken purchasing power and domestic demand for financing. As a result, the multifinance industry slowed down and credit risk increased. In line with this, the Company prudently tightened its financing expansion, with new financing realized at IDR3.98 trillion as of December 31, 2025 a 48.4% (YoY) or 50.2% from the Company's target.”



Pada tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi seiring dengan berlanjutnya penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara utama. Kondisi tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi global yang mengalami moderasi menjadi sekitar 3,2% (YoY), dengan tekanan inflasi yang mulai mereda namun masih mendorong bank sentral mempertahankan suku bunga pada level yang relatif tinggi.

Dari dalam negeri, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,11% (YoY) pada tahun 2025, didukung oleh konsumsi domestik dan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Di sisi lain, tingkat inflasi tahunan relatif terkendali sebesar 2,92% atau masih dalam target sasaran Pemerintah. Namun demikian, dampak penurunan suku bunga acuan ke suku bunga kredit belum sepenuhnya optimal sehingga biaya pendanaan di sektor riil tetap relatif tinggi sepanjang tahun. Di sisi lain, daya beli masyarakat, khususnya pada segmen pembiayaan konsumtif, cenderung mengalami tekanan seiring dengan meningkatnya beban cicilan dan kehati-hatian sektor rumah tangga dalam berbelanja.

Di tengah kondisi industri yang menantang, perusahaan pembiayaan menghadapi tekanan dari sisi permintaan sebagaimana tercermin dari lesunya kinerja sektor otomotif yang merupakan motor utama pembiayaan konsumen. Pada tahun 2025, Gaikindo mencatat penjualan mobil nasional sepanjang 2025 turun 7,2% (YoY) menjadi 803.687 unit, sedangkan AISI mencatat penjualan sepeda motor domestik 2025 sebesar 6.412.769 unit, naik tipis 1,3% (YoY) dari tahun lalu.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja industri *multifinance* pada 2025 melambat signifikan, tercermin dari pertumbuhan piutang pembiayaan yang turun dari 1,09% (YoY) pada November menjadi 0,61% (YoY) pada Desember. Pada saat yang sama, rasio NPF *gross* meningkat dari 2,44% pada 2024 menjadi 2,51%, menunjukkan tekanan pada kemampuan bayar debitur. Kenaikan risiko kredit ini turut mendorong peningkatan beban pencadangan dan menekan profitabilitas industri.

Di tengah dinamika industri yang menantang, kegiatan usaha Perseroan yang berfokus pada pembiayaan konsumen segmen ritel turut terdampak, tercermin dari terbatasnya pertumbuhan pembiayaan baru, tekanan pada kualitas aset, serta peningkatan beban pencadangan yang menekan kinerja keuangan. Meski demikian, Perseroan merespons kondisi tersebut melalui penerapan strategi mitigasi risiko yang tepat dan terukur guna menjaga kualitas portofolio serta memastikan kelangsungan usaha tetap terjaga.

In 2025, the global economy grappled with persistent uncertainty as major economies continued with their monetary policy adjustments. This climate of instability was clearly evident in the moderated year-on-year growth rate of approximately 3.2%, with inflationary pressures beginning to ease, but still prompting the central bank to keep interest rates at relatively high levels.

Domestically, Indonesia's economy showcased remarkable resilience, achieving a year-on-year growth rate of 5.11% in 2025, bolstered by robust domestic consumption and stable macroeconomic fundamentals. Annual inflation was relatively contained at 2.92%, comfortably within the government's target range. However, the transmission of benchmark rate cuts to lending rates proved suboptimal, resulting in persistently high funding costs for the real sector throughout the year. Concurrently, purchasing power, particularly in the consumer financing segment, faced challenges as rising installment burdens prompted more cautious household spending.

Amidst the challenging industry, financing companies faced demand-side pressures, as evidenced by the sluggish performance of the automotive sector, the engine of consumer financing. In 2025 Gaikindo reported a 7.2% annualized decline in national car sales to 803,687 units. But the AISI fared better with a modest rise in domestic motorcycle sales, reaching 6,412,769 units, or an annualized increase of 1.3%.

The multifinance industry confirmed this trend as it slowed drastically in 2025, evidenced by a drop in the annualized growth of financing receivables from 1.09% in November to just 0.61% in December, with a rise in the NPF ratio from 2.44% in 2024 to 2.51%, signaling more pressure on borrowers' repayment capacities. The higher credit risk led to higher allowance, which added pressure to profitability across the industry.

Amid these challenging industry dynamics, the Company's retail consumer financing division experienced a downturn, characterized by constrained growth in new financing, deteriorating asset quality, and a larger allowance for impairment loss that negatively impacted financial performance. In response to these adversities, the Company adopted risk mitigation strategies to preserve portfolio quality and ensure business continuity.



Strategi Bisnis Tahun 2025

Business Strategy in 2025

Perseroan secara berkelanjutan memperkuat posisi kompetitif di industri pembiayaan guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha. Sejalan dengan dinamika industri yang menantang sepanjang tahun 2025, Perseroan menetapkan arah pengembangan bisnis yang terukur serta mengimplementasikan sejumlah strategi prioritas yang difokuskan pada optimalisasi pertumbuhan, efisiensi biaya, penguatan proses digital, serta pengelolaan pendanaan yang *prudent*.

Adapun strategi bisnis yang dijalankan Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan, dimana Perseroan berfokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan ke segmen pelanggan baru. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing di pasar yang sedang berkembang, dengan cara:
 - a) pengelolaan basis data konsumen yang efektif melalui *telemarketing*,
 - b) memaksimalkan jaringan distribusi yang luas,
 - c) berinovasi dalam saluran akuisisi pelanggan digital, terutama melalui platform Kreditplus Mobile (KPM), dan
 - d) menghindari persaingan langsung di pasar yang sangat jenuh dengan memperluas jaringan penjualannya ke luar Jawa, menargetkan wilayah yang belum terpenetrasi seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
- 2) Menekan biaya umum dan operasional yang dilakukan dengan cara:
 - a) melakukan penghematan biaya dalam hal penggunaan sistem teknologi dan informasi, dimana hal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
 - i) beralih ke vendor lain yang menawarkan harga layanan yang lebih kompetitif, dan
 - ii) melakukan renegotiasi atas harga layanan dengan vendor layanan yang saat ini ada.

The Company continuously strengthens its competitive position in the financing industry to sustain business growth. In line with the challenging industry dynamics throughout 2025, the Company has established a measured business development direction and implemented several priority strategies focused on optimizing growth, enhancing cost efficiency, strengthening digital processes, and maintaining prudent funding management.

The business strategies implemented by the Company in 2025 are as follows:

- 1) Increasing revenue, where the Company focuses on expanding financing disbursement to new customer segments. This effort is carried out by enhancing competitiveness in growing markets through:
 - a) effective management of the consumer database through telemarketing,
 - b) maximizing its extensive distribution network,
 - c) innovating in digital customer acquisition channels, particularly through the Kreditplus Mobile (KPM) platform, and
 - d) avoiding direct competition in highly saturated markets by expanding its sales network outside Java, targeting underpenetrated regions such as Kalimantan, Sulawesi, and Eastern Indonesia.
- 2) Reducing general and operational expenses, carried out through:
 - a) cost efficiency in the use of information technology systems, implemented through various measures, including:
 - i) transitioning to alternative vendors offering more competitive service pricing, and
 - ii) renegotiating service fees with existing vendors.



- b) melakukan penutupan sejumlah kantor cabang maupun kantor selain kantor cabang yang memiliki kontribusi pendapatan yang rendah dan tidak efisien.
 - c) menerapkan sentralisasi kredit analisis di satu tempat untuk efisiensi biaya operasional sekaligus biaya pegawai.
- 3) Memperkuat pemrosesan digital dalam hal proses pengajuan aplikasi pembiayaan dan penagihan untuk tujuan meningkatkan kenyamanan konsumen dan mengurangi tindakan *fraud* internal.
- 4) Melakukan efisiensi biaya penagihan dengan memaksimalkan penagihan melalui *Desk Collector*.
- 5) Melakukan inisiatif terkait pendanaan sebagai berikut:
 - a) sepanjang tahun 2025, Perseroan melakukan penarikan pinjaman dengan disiplin dengan mengutamakan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang paling kompetitif.
 - b) Perseroan juga telah menggunakan fasilitas pinjaman dengan tenor jangka pendek (mingguan/bulanan) yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah, tentunya dengan tetap memperhitungkan rasio-rasio keuangan yang berkaitan, sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.
 - c) Perseroan juga telah membagi penarikan pinjaman menjadi beberapa *batch* kecil atau sesuai kebutuhan, untuk mengurangi biaya jika penarikan dilakukan sekaligus di depan dan dalam jumlah yang besar.
- b) closing a number of branch offices and non-branch offices with low revenue contribution and inefficiency.
 - c) implementing centralized credit analysis in a single location to improve operational and personnel cost efficiency.
- 3) Strengthening digital processing in financing application and collection processes to enhance customer convenience and reduce internal fraud risks.
- 4) Improving collection cost efficiency by maximizing collections through Desk Collectors.
- 5) Implementing funding-related initiatives as follows:
 - a) Throughout 2025, the Company exercised disciplined loan drawdowns, prioritizing facilities with the most competitive interest rates.
 - b) The Company also utilized short-term loan facilities (weekly/monthly) with lower interest rates, while still maintaining compliance with relevant financial ratios in accordance with internal policies.
 - c) The Company also structured loan drawdowns into smaller batches or on an as-needed basis to minimize costs that may arise from large upfront drawdowns.



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

TREN PEMBIAYAAN BARU

Sepanjang tahun 2025, penyaluran pembiayaan baru Perseroan menghadapi tekanan seiring dengan kondisi makroekonomi dan industri yang kurang kondusif. Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan yang masih relatif tinggi, pelemahan daya beli masyarakat, serta meningkatnya risiko kredit mendorong Perseroan untuk lebih selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pada posisi 31 Desember 2025, total pembiayaan baru Perseroan tercatat sebesar Rp3,98 triliun, menurun signifikan hingga 48,4% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7,72 triliun. Capaian tersebut juga sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi sebesar 50,2%.

Komposisi penyaluran pembiayaan baru Perseroan berdasarkan segmen usaha selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

NEW FINANCING TRENDS

Throughout 2025, the Company's new financing disbursements faced pressure amid less conducive macroeconomic and industry conditions. Interest rates and funding costs remained relatively high, weakening purchasing power, and rising credit risk prompted the Company to adopt a more selective approach to expanding its financing portfolio.

In line with these conditions, as of 31 December 2025, the Company recorded total new financing of IDR3.98 trillion, representing a 48.4% decline from the 2024 realization of IDR7.72 trillion. This achievement was also slightly below the established target, with a realization rate of 50.2%.

The composition of the Company's new financing disbursements by business segment over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Segmen Usaha Business Segment	Jumlah Pembiayaan Baru New Financing Amount			
	2025		2024	
	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)
Pembiayaan Investasi Investment Financing	104.380	2,62	212.747	2,76
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	1.076.792	27,05	3.914.481	50,74
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	2.799.584	70,33	3.587.870	46,50
Jumlah Total	3.980.756	100,0	7.715.098	100,0

Berdasarkan segmen usaha, penyaluran pembiayaan baru Perseroan masih didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan nilai sebesar Rp2.799 miliar (setara dengan 70,33% dari total pembiayaan baru). Selanjutnya, pembiayaan modal Kerja memberikan kontribusi sebesar Rp1.076 miliar atau setara 27,05% dari total pembiayaan baru, sementara pembiayaan investasi mencatatkan kontribusi sebesar Rp104 miliar atau sebesar 2,62% dari total pembiayaan baru.

By business segment, the Company's new financing disbursements remained predominantly driven by multipurpose financing, totaling IDR2,799 billion (equivalent to 70.33% of total new financing). Working capital financing contributed IDR1,076 billion, representing 27.05% of total new financing, while investment financing contributed IDR104 billion, equivalent to 2.62% of total new financing.



PIUTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEGMENT USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2025, total piutang pembiayaan yang dikelola (*managed receivables*) Perseroan tercatat sebesar Rp3,96 triliun, menurun 47,58% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,55 triliun.

Perkembangan piutang pembiayaan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

FINANCING RECEIVABLES BASED ON BUSINESS SEGMENT

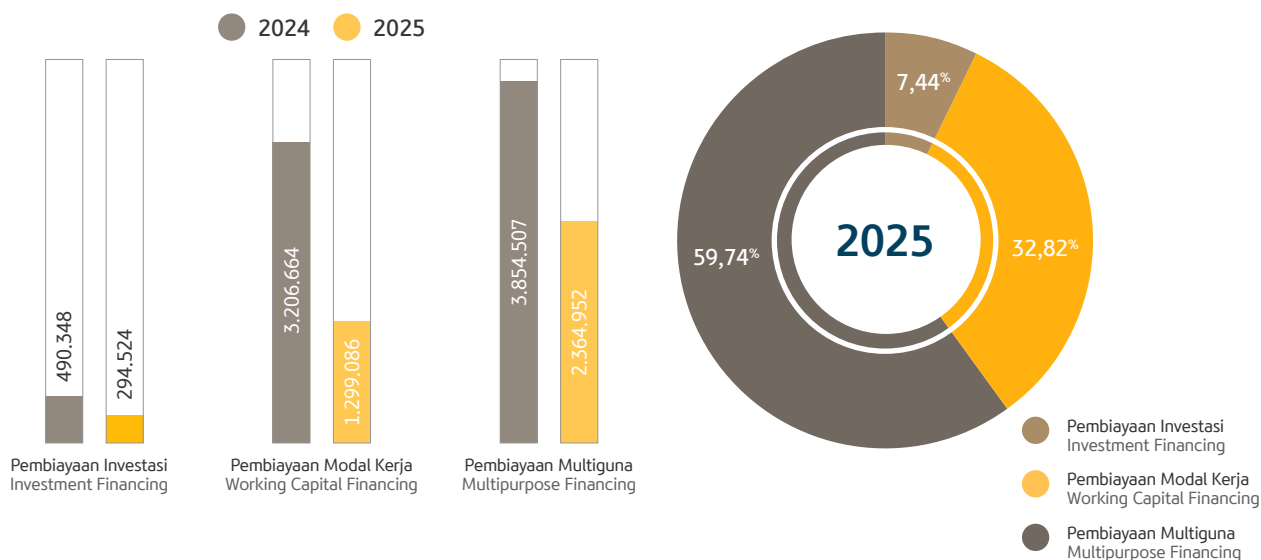
As of 31 December 2025, the Company's total managed receivables amounted to IDR3.96 trillion, representing a decrease of 47.58% compared to the previous year's position of IDR7.55 trillion.

The development of the Company's financing receivables over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Segmen Usaha Business Segment	Piutang Pembiayaan Financing Receivables				Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
	2025		2024		Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)		
Pembiayaan Investasi Investment Financing	294.524	7,44	490.348	6,49	(195.824)	(39,94)
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	1.299.086	32,82	3.206.664	42,46	(1.907.578)	(59,49)
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	2.364.952	59,74	3.854.507	51,05	(1.489.555)	(38,64)
Jumlah Total	3.958.562	100,00	7.551.519	100,00	(3.592.957)	(47,58)

Piutang Pembiayaan berdasarkan Segmen Usaha (dalam Jutaan Rupiah)
Financing Receivables based on Business Segment (in millions of Rupiah)





Secara keseluruhan, penurunan terjadi pada seluruh segmen usaha dengan penurunan paling signifikan sebesar 59,49% terjadi pada segmen Pembiayaan Modal Kerja yang mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp1,30 triliun, turun dari Rp3,21 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya, Pembiayaan Multiguna menurun 38,64% menjadi Rp2,36 triliun dari Rp3,85 triliun pada periode sebelumnya, sementara Pembiayaan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 39,94% menjadi Rp294,52 miliar dari Rp490,35 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi komposisi, Pembiayaan Multiguna tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sebesar 59,74% terhadap total piutang pembiayaan. Sementara itu, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 32,82% dan 7,44% terhadap total piutang pembiayaan Perseroan per akhir tahun 2025.

PIUTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN OBJEK PEMBIAYAAN

Berdasarkan pengelompokan objek pembiayaan yang mencakup mobil, sepeda motor, barang *durable*, dan tagihan anjak piutang, adapun nilai piutang pembiayaan Perseroan pada segmen mobil dan tagihan anjak piutang mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 62,35% dan 68,36%. Perkembangan tren piutang pembiayaan berdasarkan objek pembiayaan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Overall, declines were recorded across all business segments, with the most significant contraction of 59.49% occurring in the working capital financing segment, which recorded financing receivables of IDR1.30 trillion, down from IDR3.21 trillion in 2024. Similarly, multipurpose financing decreased by 38.64% to IDR2.36 trillion from IDR3.85 trillion in the previous period, while investment financing also declined by 39.94% to IDR294.52 billion from IDR490.35 billion in the prior year.

In terms of composition, multipurpose financing remained the largest contributor, accounting for 59.74% of total financing receivables. Meanwhile, working capital financing and investment financing accounted for 32.82% and 7.44%, respectively, of the Company's total financing receivables as of year-end 2025.

FINANCING RECEIVABLES BASED ON FINANCED OBJECTS

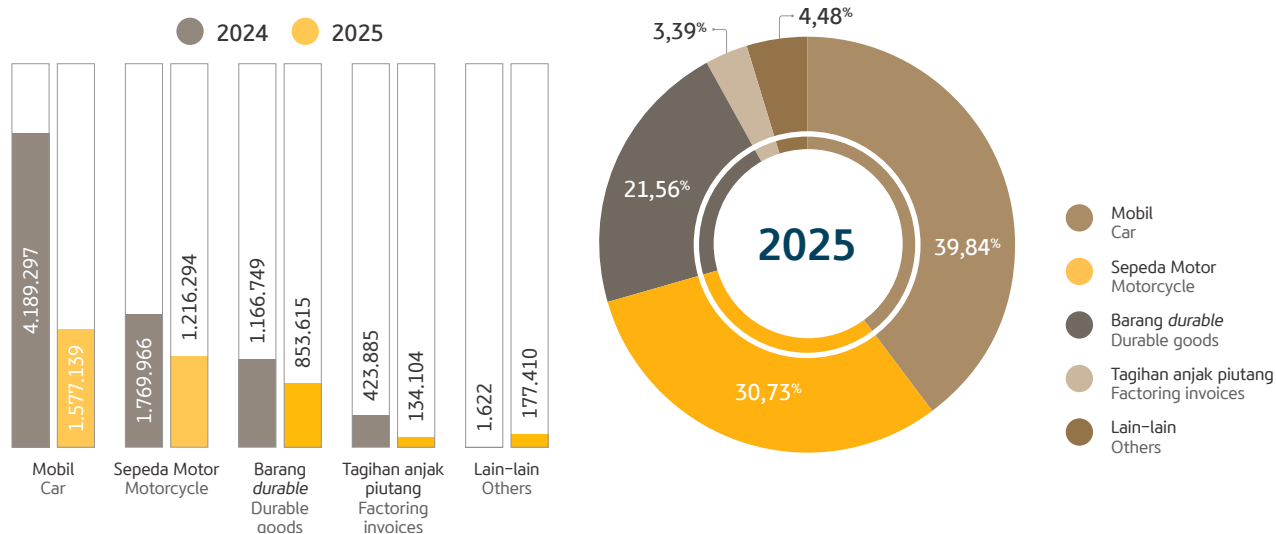
Based on the classification of financing objects, which include cars, motorcycles, durable goods, and factoring receivables, the Company's financing receivables in the car and factoring segments declined by 62.35% and 68.36%, respectively. The trend in the Company's financing receivables by financing object over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Segmen Usaha Business Segment	Piutang Pembiayaan Financing Receivables				Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
	2025		2024		Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)		
Mobil Car	1.577.139	39,84	4.189.297	55,48	(2.612.158)	(62,35)
Sepeda Motor Motorcycle	1.216.294	30,73	1.769.966	23,44	(553.672)	(31,28)
Barang <i>durable</i> Durable goods	853.615	21,56	1.166.749	15,45	(313.134)	(26,84)
Tagihan anjak piutang Factoring invoices	134.104	3,39	423.885	5,61	(289.781)	(68,36)
Lain-lain Others	177.410	4,48	1.622	0,02	175.788	10.837,73
Jumlah Total	3.958.562	100,00	7.551.519	100,00	(3.592.957)	(47,58)



Piutang Pembiayaan berdasarkan Objek Pembiayaan (dalam Jutaan Rupiah)
Financing Receivables based on Financed Objects (in millions of Rupiah)



Berdasarkan objek pembiayaan, seluruh kategori mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Piutang pembiayaan untuk mobil mencatatkan penurunan paling signifikan secara nominal, yaitu sebesar 62,35% menjadi Rp1,58 triliun dari Rp4,19 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, pembiayaan sepeda motor menurun sebesar 31,28% menjadi Rp1,22 triliun dari Rp1,77 triliun, dan pembiayaan barang *durable* turun sebesar 26,84% menjadi Rp853,62 miliar dari Rp1,17 triliun.

Selain itu, tagihan anjak piutang juga mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 68,36% menjadi Rp134,10 miliar dari Rp423,89 miliar pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, kategori lain-lain mencatatkan peningkatan menjadi Rp177,41 miliar, meskipun kontribusinya terhadap total piutang pembiayaan masih relatif kecil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi (*mapping*) portofolio *fleet financing* yang sebelumnya dicatat pada kategori mobil menjadi bagian dari kategori lain-lain.

Dilihat dari segi komposisinya, pembiayaan untuk mobil masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sebesar 39,84% terhadap total piutang pembiayaan Perseroan meskipun per 31 Desember 2025 Perseroan telah menghentikan pembiayaan baru untuk objek pembiayaan mobil bekas. Selanjutnya, pembiayaan sepeda motor dan barang *durable* masing-masing berkontribusi sebesar 30,73% dan 21,56%. Sementara itu, tagihan anjak piutang dan kategori lain-lain memberikan kontribusi masing-masing sebesar 3,39% dan 4,48% terhadap total piutang pembiayaan per 31 Desember 2025.

Based on financing objects, all categories recorded declines compared to the previous year. Financing receivables for cars posted the largest nominal decrease, down 62.35% to IDR1.58 trillion from IDR4.19 trillion in 2024. Meanwhile, motorcycle financing decreased by 31.28% to IDR1.22 trillion from IDR1.77 trillion, and durable goods financing declined by 26.84% to IDR853.62 billion from IDR1.17 trillion.

In addition, factoring receivables also declined by 68.36% to IDR134.10 billion from IDR423.89 billion in the previous year. On the other hand, the “other” category recorded an increase to IDR177.41 billion, although its contribution to total financing receivables remains relatively small. This increase was primarily due to a reclassification of the fleet financing portfolio, which was previously recorded under the “automobiles” category and is now included in the “other” category.

In terms of composition, car financing remained the largest contributor, accounting for 39.84% of the Company’s total financing receivables; however, as of December 31, 2025, the Company had ceased new financing for used cars. Motorcycle and durable goods financing contributed 30.73% and 21.56%, respectively, while factoring receivables and the “others” category accounted for 3.39% and 4.48%, respectively, of total financing receivables as of December 31, 2025.



PIUTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN WILAYAH GEOGRAFIS

Perseroan membagi wilayah operasional ke dalam beberapa area utama yang meliputi Jabodetabek, Sulawesi dan Indonesia Timur, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Jawa Tengah. Dengan cakupan wilayah tersebut, jaringan operasional Perseroan hingga akhir Desember 2025 didukung oleh 1 Kantor Pusat, 116 Kantor Cabang, serta 64 kantor selain Kantor Cabang.

Tren piutang pembiayaan Perseroan berdasarkan wilayah geografis selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

FINANCING RECEIVABLES BY GEOGRAPHIC AREA

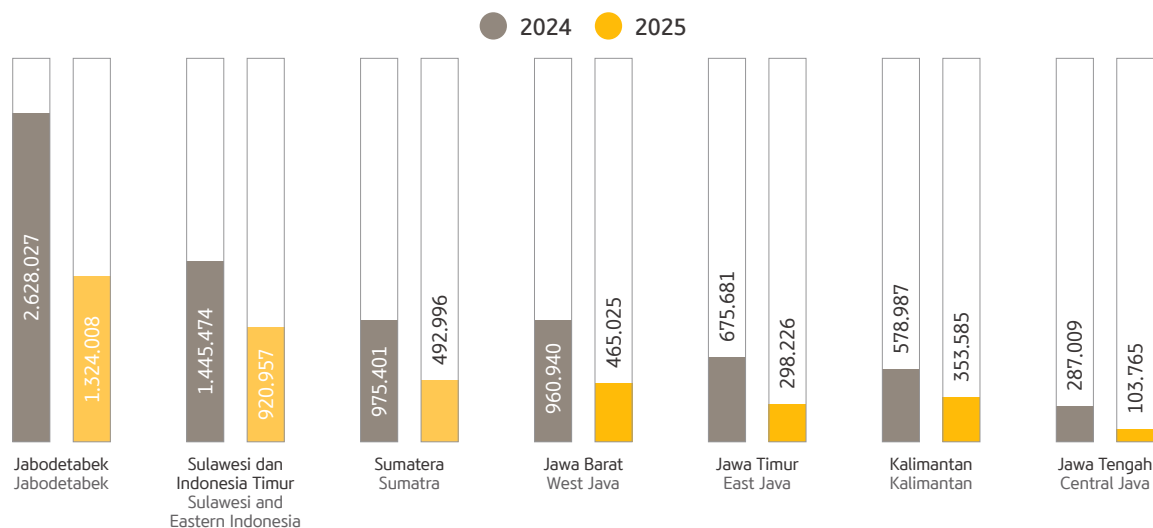
The Company divides its operational territory into several key areas covering Jabodetabek, Sulawesi and Eastern Indonesia, Sumatra, West Java, East Java, Kalimantan, and Central Java. Within this coverage, the Company's operational network as of the end of December 2025 comprises 1 Head Office, 116 Branch Offices, and 64 offices other than Branch Offices.

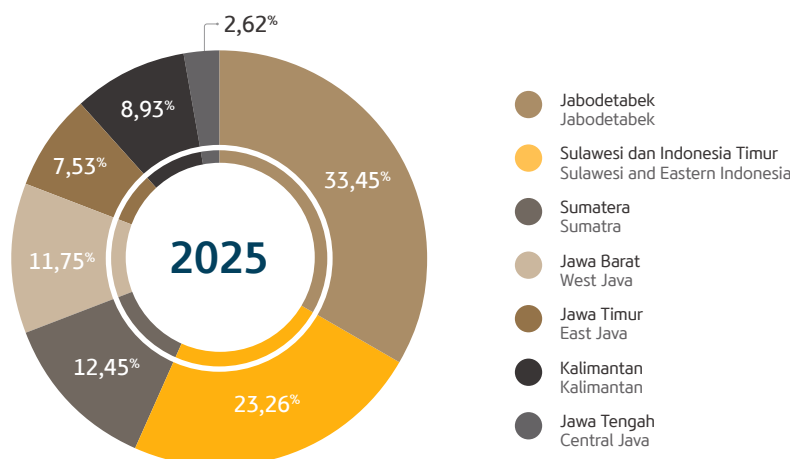
The trend in the Company's financing receivables by geographic region over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Segmen Usaha Business Segment	Piutang Pembiayaan Financing Receivables				Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
	2025		2024			
	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Jabodetabek	1.324.008	33,45	2.628.027	34,80	(1.304.019)	(49,62)
Sulawesi dan Indonesia Timur Sulawesi and Eastern Indonesia	920.957	23,26	1.445.474	19,14	(524.517)	(36,29)
Sumatera Sumatra	492.996	12,45	975.401	12,92	(482.405)	(49,46)
Jawa Barat West Java	465.025	11,75	960.940	12,72	(495.916)	(51,61)
Jawa Timur East Java	298.226	7,53	675.681	8,95	(377.455)	(55,86)
Kalimantan	353.585	8,93	578.987	7,67	(225.402)	(38,93)
Jawa Tengah Central Java	103.765	2,62	287.009	3,80	(183.244)	(63,85)
Jumlah Total	3.958.562	100,00	7.551.519	100,00	(3.592.957)	(47,58)

Piutang Pembiayaan berdasarkan Wilayah Geografis (dalam Jutaan Rupiah)
Financing Receivables by Geographic Area (in millions of Rupiah)





Secara keseluruhan, piutang pembiayaan di seluruh wilayah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan total portofolio Perseroan. Wilayah Jabodetabek tetap menjadi kontributor terbesar dengan nilai piutang pembiayaan sebesar Rp1,32 triliun atau 33,45% dari total piutang pembiayaan, meskipun mengalami penurunan sebesar 49,62% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,63 triliun.

Selanjutnya, wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp920,96 miliar atau 23,26% dari total, diikuti oleh wilayah Sumatera sebesar Rp492,99 miliar (12,45%) dan Jawa Barat sebesar Rp465,03 miliar (11,75%). Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Jawa Timur masing-masing membukukan piutang pembiayaan sebesar Rp353,59 miliar (8,93%) dan Rp298,23 miliar (7,53%). Adapun wilayah Jawa Tengah memberikan kontribusi terkecil sebesar Rp103,77 miliar atau 2,62% terhadap total piutang pembiayaan Perseroan.

Dari sisi pertumbuhan, seluruh wilayah mengalami kontraksi, dengan penurunan terdalam terjadi di wilayah Jawa Tengah sebesar 63,85%, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 55,86% dan Jawa Barat sebesar 51,61%. Penurunan juga terjadi di wilayah Jabodetabek dan Sumatera masing-masing sebesar 49,62% dan 49,46%, sementara Kalimantan serta Sulawesi dan Indonesia Timur mencatatkan penurunan yang relatif lebih moderat masing-masing sebesar 38,93% dan 36,29%. Hal ini disebabkan karena pembiayaan baru Perseroan yang juga turun dibandingkan tahun 2024.

Overall, financing receivables across all regions declined compared to the prior year, in line with the contraction in the Company's total portfolio. The Jabodetabek region remained the largest contributor, recording financing receivables of IDR1.32 trillion, or 33.45% of total financing receivables, despite a 49.62% decrease from IDR2.63 trillion in 2024.

The Sulawesi and Eastern Indonesia region posted financing receivables of IDR920.96 billion, or 23.26% of the total, followed by Sumatera at IDR492.99 billion (12.45%) and West Java at IDR465.03 billion (11.75%). Meanwhile, Kalimantan and East Java recorded financing receivables of IDR353.59 billion (8.93%) and IDR298.23 billion (7.53%), respectively. Central Java contributed the smallest share at IDR103.77 billion, or 2.62% of the Company's total financing receivables.

In terms of growth, all regions experienced contraction, with the steepest decline recorded in Central Java at 63.85%, followed by East Java at 55.86% and West Java at 51.61%. Declines were also recorded in Jabodetabek and Sumatera at 49.62% and 49.46%, respectively, while Kalimantan, Sulawesi, and Eastern Indonesia posted comparatively more moderate decreases of 38.93% and 36.29%. These contractions were attributable to the Company's new financing, which also declined relative to 2024.



Tinjauan Keuangan

Financial Review



Pembahasan analisis keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan keuangan tersebut telah diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International Limited*).

Perseroan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, yang mencerminkan bahwa posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas Perseroan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku. Opini ini menjadi landasan penting bagi manajemen dan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja serta merumuskan strategi ke depan.

This financial analysis is based on the Company's audited Financial Statements for the year ended December 31, 2025. The Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) audited these statements following Indonesian Financial Accounting Standards.

The Company received an unqualified opinion in all material respects, reflecting that the Company's financial position, financial performance, and cash flows have been fairly presented in accordance with applicable standards. This opinion serves as an important foundation for management and stakeholders in evaluating performance and formulating forward-looking strategies.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

Secara keseluruhan, jumlah aset Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,76 triliun, turun 41,41% dibandingkan Rp8,12 triliun pada posisi 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang Perseroan.

Perkembangan jumlah aset Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Assets

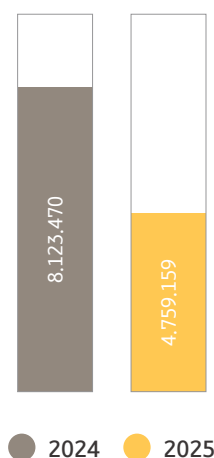
As of year-end 2025, the Company's total assets stood at IDR4.76 trillion, a decrease of 41.41% from IDR8.12 trillion as of 31 December 2024. This decline was primarily attributable to a reduction in the Company's financing receivables and factoring receivables.

The development of the Company's total assets over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalent	103.856	293.797	(189.941)	(64,65)
Piutang Pembiayaan Financing Receivables	3.635.020	6.799.027	(3.164.007)	(46,54)
Tagihan anjak piutang Factoring Receivables	132.776	373.016	(240.240)	(64,40)
Beban dibayar dimuka dan uang muka Prepaid Expenses and Advances	24.798	17.922	6.876	38,37
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	513	522	(9)	(1,72)
Piutang lain-lain Other Receivables	122.098	100.941	21.157	20,96
Aset hak-guna Right-of-Use Assets	57.155	77.659	(20.504)	(26,40)
Aset tetap Fixed Assets	102.120	122.849	(20.729)	(16,87)
Aset tak berwujud Intangible Assets	107.719	96.772	10.947	11,31
Investasi jangka panjang Long-Term Investment	41.580	29.160	12.420	42,59
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	413.463	185.137	228.326	123,33
Aset lain-lain Other Assets	18.061	26.668	(8.607)	(32,28)
Jumlah Aset Total Assets	4.759.159	8.123.470	(3.364.311)	(41,41)

Jumlah Aset (dalam Jutaan Rupiah)
Total Assets (in millions of Rupiah)





Kas dan Setara Kas

Pada akhir tahun 2025, kas dan setara kas Perseroan tercatat sebesar Rp103,86 miliar, turun 64,65% dibandingkan Rp293,80 miliar pada akhir tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Piutang Pembiayaan

Saldo piutang pembiayaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3,64 triliun, mengalami penurunan sebesar 46,54% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp6,80 triliun. Penurunan ini sejalan dengan melambatnya penyaluran pembiayaan baru serta penerapan kebijakan selektif dalam ekspansi pembiayaan.

Tagihan Anjak Piutang

Perseroan membukukan tagihan anjak piutang sebesar Rp132,78 miliar pada akhir tahun 2025, menurun 64,40% dari Rp373,02 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan strategi Perseroan berupa penghentian penyaluran pembiayaan pada segmen anjak piutang.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Posisi beban dibayar dimuka dan uang muka tercatat sebesar Rp24,80 miliar per 31 Desember 2025, meningkat 38,37% dibandingkan Rp17,92 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan pembayaran dimuka untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Pajak Dibayar Dimuka

Pada akhir tahun 2025, pajak dibayar dimuka tercatat sebesar Rp513 juta, relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar 1,72% dibandingkan Rp522 juta pada tahun 2024.

Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain tercatat sebesar Rp122,10 miliar pada posisi 31 Desember 2025, meningkat 20,96% dibandingkan Rp100,94 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari komisi asuransi yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

Aset Hak Guna

Aset hak-guna pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp57,16 miliar, turun 26,40% dibandingkan Rp77,66 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh optimalisasi penggunaan kendaraan operasional di tingkat cabang.

Cash and Cash Equivalents

As of year-end 2025, the Company's cash and cash equivalents stood at IDR103.86 billion, a decrease of 64.65% from IDR293.80 billion at year-end 2024. This decline was primarily attributable to lower cash receipts from borrowings and issued securities.

Financing Receivables

The financing receivables balance as of 31 December 2025 was recorded at IDR3.64 trillion, a 46.54% decrease from IDR6.80 trillion in the prior year. This decline is consistent with the slowdown in new financing disbursements and with the Company's selective financing policy for expansion.

Factoring Receivables

The Company recorded factoring receivables of IDR132.78 billion at year-end 2025, down 64.40% from IDR373.02 billion in 2024. This decrease was primarily driven by a strategic shift whereby the Company ceased disbursements in the factoring segment.

Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses and advances stood at IDR24.80 billion as of 31 December 2025, an increase of 38.37% from IDR17.92 billion in the prior year. This increase reflects higher advance payments made for the Company's operational requirements.

Prepaid Taxes

As of year-end 2025, prepaid taxes were recorded at IDR513 million, remaining relatively stable, with a marginal decline of 1.72% from IDR522 million in 2024.

Other Receivables

Other receivables stood at IDR122.10 billion as of 31 December 2025, an increase of 20.96% from IDR100.94 billion in the prior year. This increase was primarily driven by higher insurance commission income yet to be remitted by insurance companies.

Right-of-Use Assets

Right-of-use assets as of year-end 2025 were recorded at IDR57.16 billion, a decrease of 26.40% from IDR77.66 billion in 2024. This decline was primarily attributable to the optimization of operational vehicle utilization at the branch level.



Aset Tetap

Per 31 Desember 2025, nilai aset tetap tercatat sebesar Rp102,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,87% dibandingkan Rp122,85 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap Perseroan.

Aset Takberwujud

Nilai aset takberwujud meningkat menjadi Rp107,72 miliar pada akhir tahun 2025, atau naik 11,31% dibandingkan Rp96,77 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan piranti lunak untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang tercatat sebesar Rp41,58 miliar per 31 Desember 2025, meningkat 42,59% dibandingkan Rp29,16 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar investasi jangka panjang.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp413,46 miliar pada akhir tahun 2025, atau naik 123,33% dibandingkan Rp185,14 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama terkait dengan rugi fiskal yang terjadi pada tahun berjalan dan dapat dikompensasikan untuk periode berikutnya.

Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain tercatat sebesar Rp18,06 miliar pada posisi akhir tahun 2025, menurun 32,28% dibandingkan Rp26,67 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan aset pembiayaan karyawan Perseroan.

Liabilitas

Pada akhir tahun 2025, total liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp4,63 triliun, turun 35,04% dibandingkan Rp7,13 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari penurunan pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan.

Perkembangan jumlah liabilitas Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Fixed Assets

As of 31 December 2025, fixed assets were recorded at IDR102.12 billion, a decrease of 16.87% from IDR122.85 billion in the prior year. This decline was influenced by the increase in accumulated depreciation of the Company's fixed assets.

Intangible Assets

Intangible assets increased to IDR107.72 billion at year-end 2025, up 11.31% from IDR96.77 billion in 2024. This growth was primarily driven by software additions supporting the Company's operational activities.

Long-Term Investments

Long-term investments stood at IDR41.58 billion as of 31 December 2025, an increase of 42.59% from IDR29.16 billion in the prior year. This increase was primarily attributable to the appreciation in the fair value of long-term investments.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets recorded a significant increase to IDR413.46 billion at year-end 2025, up 123.33% from IDR185.14 billion in 2024. This increase was primarily due to fiscal losses incurred during the year, available for carry-forward to subsequent periods.

Other Assets

Other assets stood at IDR18.06 billion as of year-end 2025, a decrease of 32.28% from IDR26.67 billion in the prior year. This decline was primarily attributable to a reduction in the Company's employee financing assets.

Liabilities

As of year-end 2025, the Company's total liabilities stood at IDR4.63 trillion, a decrease of 35.04% from IDR7.13 trillion in the prior year. This decline was largely driven by reductions in the Company's borrowings and issued securities.

The development of the Company's total liabilities over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

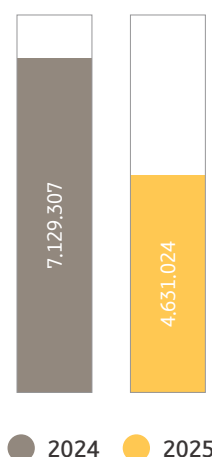
Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Pinjaman yang diterima Borrowings	3.549.779	5.622.539	(2.072.760)	(36,87)
Pinjaman subordinasi Subordinated Loans	244.416	-	244.416	100,00



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Surat berharga yang diterbitkan Marketable Securities issued	567.055	1.202.055	(635.000)	(52,83)
Utang lain-lain Other Liabilities	40.289	63.159	(22.870)	(36,21)
Utang pajak Tax Payables	3.682	3.888	(206)	(5,30)
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	114.014	107.132	6.882	6,42
Liabilitas imbalan pasca-kerja Post-employment benefit liability	102.308	115.470	(13.162)	(11,40)
Liabilitas sewa Lease liability	9.481	15.065	(5.584)	(37,07)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.631.024	7.129.307	(2.498.283)	(35,04)

Jumlah Liabilitas (dalam Jutaan Rupiah)
Total Liabilities (in millions of Rupiah)



● 2024 ● 2025

Pinjaman yang Diterima

Pada akhir tahun 2025, saldo pinjaman yang diterima tercatat sebesar Rp3,55 triliun, menurun 36,87% dibandingkan Rp5,62 triliun pada akhir tahun 2024. Penurunan pinjaman yang diterima ini sejalan dengan penurunan piutang pembiayaan.

Pinjaman Subordinasi

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan pinjaman subordinasi sebesar Rp244,42 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang belum terdapat saldo pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi ini menjadi bagian dari langkah Perseroan dalam mengoptimalkan struktur permodalan guna menjaga ketahanan keuangan di tengah dinamika industri.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Nilai surat berharga yang diterbitkan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp567,06 miliar, menurun 52,83% dibandingkan Rp1,20 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh adanya obligasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi oleh Perseroan ditahun 2025.

Borrowings

As of year-end 2025, the borrowings balance stood at IDR3.55 trillion, a decrease of 36.87% from IDR5.62 trillion at year-end 2024. This decline is consistent with the reduction in the Company's financing receivables.

Subordinated Loans

As of 31 December 2025, the Company recorded subordinated loans of IDR244.42 billion, compared to no outstanding balance in the prior year. These subordinated loans are part of the Company's efforts to optimize its capital structure and maintain financial resilience amid industry dynamics.

Issued Securities

Issued securities as of year-end 2025 were recorded at IDR567.06 billion, a decrease of 52.83% from IDR1.20 trillion in 2024. This decline was attributable to bonds that matured and were fully repaid by the Company during 2025.



Utang Lain-Lain

Utang lain-lain tercatat sebesar Rp40,29 miliar per 31 Desember 2025, menurun 36,21% dibandingkan Rp63,16 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang kepada *dealer*.

Utang Pajak

Pada akhir tahun 2025, utang pajak tercatat sebesar Rp3,68 miliar, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp3,89 miliar.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar meningkat menjadi Rp114,01 miliar pada posisi 31 Desember 2025, atau naik 6,42% dibandingkan Rp107,13 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan beban operasional yang masih harus dibayar terkait dengan pemeliharaan sistem informasi.

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja tercatat sebesar Rp102,31 miliar pada akhir tahun 2025, menurun 11,40% dibandingkan Rp115,47 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah karyawan Perseroan.

Liabilitas Sewa

Per 31 Desember 2025, liabilitas sewa tercatat sebesar Rp9,48 miliar, menurun 37,07% dibandingkan Rp15,07 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan oleh penurunan aset sewa Perseroan.

Ekuitas

Pada akhir tahun 2025, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp128,14 miliar, menurun signifikan sebesar 87,11% dibandingkan Rp994,16 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya.

Perkembangan jumlah ekuitas Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Other Payables

Other payables stood at IDR40.29 billion as of 31 December 2025, a decrease of 36.21% from IDR63.16 billion in the prior year. This decline was primarily driven by a reduction in payables to dealers.

Taxes Payable

As of year-end 2025, taxes payable were recorded at IDR3.68 billion, a slight decrease from IDR3.89 billion in 2024.

Accrued Expenses

The accrued expenses balance increased to IDR114.01 billion as of 31 December 2025, up 6.42% from IDR107.13 billion in the prior year. This increase was primarily attributable to higher outstanding operational expenses related to information systems maintenance.

Post-Employment Benefit Liabilities

Post-employment benefit liabilities stood at IDR102.31 billion at year-end 2025, a decrease of 11.40% from IDR115.47 billion in 2024. This decline is consistent with the Company's headcount reduction.

Lease Liabilities

As of 31 December 2025, lease liabilities were recorded at IDR9.48 billion, a decrease of 37.07% from IDR15.07 billion in the prior year. This decline is consistent with the reduction in the Company's lease assets.

Equity

As of year-end 2025, the Company's total equity stood at IDR128.14 billion, a 87.11% decrease from IDR994.16 billion in 2024. This decline was primarily attributable to a reduction in unappropriated retained earnings.

The development of the Company's total equity over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

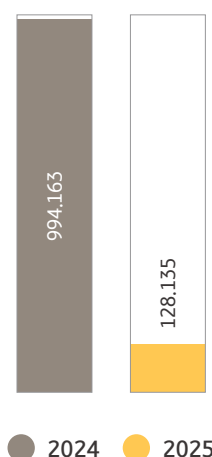
Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Modal saham – Nilai nominal Rp1.000 per saham Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh – 426.250.040 saham (2024: 226.250.040 saham) Share Capital – Nominal Value of IDR1,000 per Share Authorized Capital, Issued and Fully Paid-up Capital – 426,250,040 Shares. (2024: 226,250,040 saham)	426.250	226.250	200.000	88,40
Tambahan modal disetor Additional Paid-up Capital	88.887	288.887	(200.000)	(69,23)
Komponen ekuitas lain Other Equity Components	(76.313)	(67.887)	(8.426)	12,41



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Saldo laba Retained Earnings				
- Telah ditentukan penggunaannya Appropriated Use	45.250	45.250	0	0,00
- Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated Use	(955.938)	(98.337)	(857.601)	872,10
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan Perpetual convertible bonds	600.000	600.000	0	0,00
Jumlah Ekuitas Total Equity	128.135	994.163	(866.028)	(87,11)

Jumlah Ekuitas (dalam Jutaan Rupiah)
Total Equity (in millions of Rupiah)



Modal Saham

Per 31 Desember 2025, modal saham Perseroan tercatat sebesar Rp426,25 miliar, meningkat 88,40% dibandingkan Rp226,25 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari kapitalisasi saham Bonus yang berasal dari tambahan modal disetor di mana pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara pro rata sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tercatat sebesar Rp88,89 miliar pada akhir tahun 2025, menurun 69,23% dibandingkan Rp288,89 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kapitalisasi saham bonus yang bersumber dari tambahan modal disetor.

Komponen Ekuitas Lain

Komponen ekuitas lain tercatat sebesar negatif Rp76,31 miliar pada posisi 31 Desember 2025, mencerminkan peningkatan kerugian sebesar 12,41% dibandingkan negatif Rp67,89 miliar pada tahun sebelumnya. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian komponen penghasilan komprehensif lain.

Share Capital

As of December 31, 2025, the Company's share capital stood at IDR426.25 billion, an increase of 88.40% from IDR226.25 billion in the prior year. This increase was primarily derived from the capitalization of Bonus Shares sourced from additional paid-in capital, whereby the distribution of Bonus Shares to Shareholders was carried out on a pro rata basis in accordance with their respective shareholdings.

Additional Paid-In Capital

Additional paid-in capital was recorded at Rp88.89 billion at year-end 2025, a decrease of 69.23% from IDR288.89 billion in 2024. This decline was attributable to the capitalization of bonus shares sourced from additional paid-in capital.

Other Equity Components

Other equity components were recorded at negative IDR76.31 billion as of December 31, 2025, reflecting a 12.41% increase in the loss position compared to negative IDR67.89 billion in the prior year. This movement was primarily influenced by adjustments to other comprehensive income components.



Saldo Laba – Telah Ditentukan Penggunaannya

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya tetap sebesar Rp45,25 miliar pada akhir tahun 2025, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Saldo Laba – Tidak Ditentukan Penggunaannya

Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya tercatat negatif sebesar Rp955,94 miliar pada akhir tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan negatif Rp98,34 miliar pada tahun 2024 atau naik 872,10%. Hal ini terutama berasal dari dampak kinerja Perseroan selama periode berjalan.

Obligasi Perpetual yang Dapat Dikonversikan

Nilai obligasi *perpetual* yang dapat dikonversikan tetap sebesar Rp600,00 miliar pada akhir tahun 2025, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Appropriated Retained Earnings

Appropriated retained earnings remained unchanged at IDR45.25 billion at year-end 2025, consistent with the prior year.

Unappropriated Retained Earnings

Unappropriated retained earnings were recorded at a negative IDR955.94 billion at year-end 2025, a significant deterioration from negative IDR98.34 billion in 2024, representing an increase of 872.10%. This was primarily driven by the Company's financial performance during the current period.

Convertible Perpetual Bonds

The value of convertible perpetual bonds remained unchanged at IDR600.00 billion at year-end 2025, consistent with the prior year.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

INCOME STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Pendapatan Income				
Pembiayaan Konsumen Consumer Financing	1.642.740	1.825.589	(182.849)	(10,02)
Anjak Piutang Factoring	30.165	53.498	(23.333)	(43,61)
Lain-lain Others	79.537	75.594	3.943	5,22
Jumlah Pendapatan Total Revenue	1.752.442	1.954.681	(202.239)	(10,35)
Beban Expenses				
Beban kepegawaian Personnel Expense	526.371	602.028	(75.657)	(12,57)
Beban keuangan Financial Expense	407.091	516.022	(108.931)	(21,11)
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	310.574	294.283	16.291	5,54
Cadangan kerugian penurunan nilai Piutang pembiayaan Allowance for Impairment Losses on Financing Receivables	1.449.160	770.093	679.067	88,18
Tagihan anjak piutang Factoring Receivables	20.164	46.492	(26.328)	(56,63)
Beban penyusutan dan amortisasi Depreciation and Amortization Expenses	121.729	111.849	9.880	8,83
Beban lain-lain Other Expenses	1.040	23.852	(22.812)	(95,64)
Jumlah Beban Total Expenses	2.836.128	2.364.620	471.508	19,94
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Loss Before Income Tax	(1.083.686)	(409.939)	(673.747)	164,35



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Pajak Penghasilan Income Tax				
a) Kini Current	-	-	-	-
b) Tangguhan Deferred	226.085	95.013	131.071	137,95
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits	226.085	95.013	131.071	137,95
Rugi Bersih Tahun Berjalan Net Loss for the Current Year	(857.602)	(314.927)	(542.675)	172,32
Pos-Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be Reclassified to Profit or Loss				
a) Kerugian aktuarial program manfaat pasti Actuarial loss on defined benefit programs	(23.088)	(862)	(22.226)	2.578,42
b) Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Profit (loss) on change in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income	12.420	(14.040)	1.620	(11,54)
c) Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss	2.241	3.143	(902)	(28,70)
Jumlah Kerugian Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Loss	(8.426)	(11.759)	3.333	(28,34)
Jumlah Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Loss for the Current Year	(866.028)	(326.685)	(539.343)	165,10

Pendapatan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,75 triliun, menurun 10,35% dibandingkan Rp1,95 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan pendapatan pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Perkembangan pendapatan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Revenue

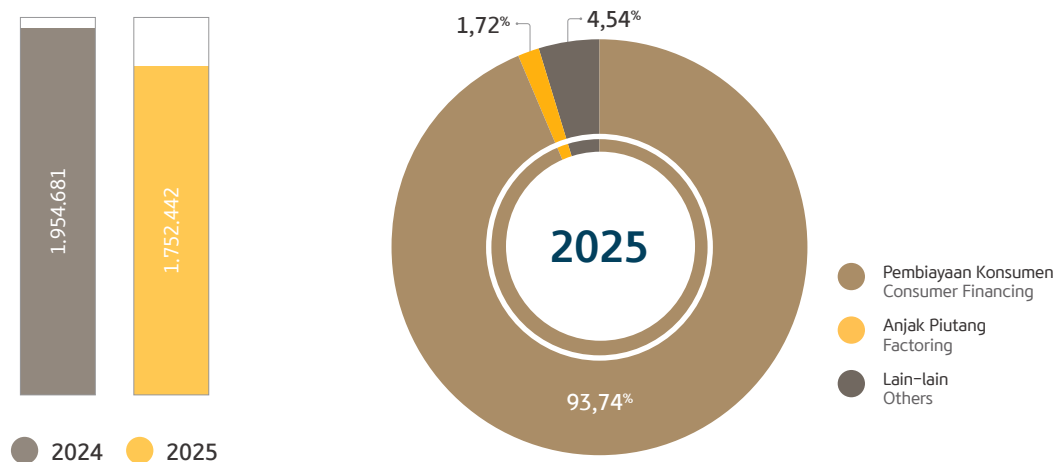
Throughout 2025, the Company recorded revenue of IDR1.75 trillion, a 10.35% decrease from IDR1.95 trillion in 2024. This decline was primarily attributable to a reduction in consumer financing and factoring income. The development of the Company's revenue over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	Kontribusi (%) Contribution (%)	2024	Kontribusi (%) Contribution (%)	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
					Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Pendapatan Revenue						
Pembiayaan Konsumen Consumer Financing	1.642.740	93,74	1.825.589	93,40	(182.849)	(10,02)
Anjak Piutang Factoring	30.165	1,72	53.498	2,74	(23.333)	(43,61)
Lain-lain Others	79.537	4,54	75.594	3,87	3.943	5,22
Jumlah Pendapatan Total Income	1.752.442	100,00	1.954.681	100,00	(202.239)	(10,35)



Jumlah Pendapatan (dalam Jutaan Rupiah)
Total Income (in millions of Rupiah)



Pembiayaan Konsumen

Sepanjang tahun 2025, pendapatan dari segmen pembiayaan konsumen tercatat sebesar Rp1,64 triliun, menurun 10,02% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,83 triliun. Segmen ini tetap menjadi kontributor utama dengan porsi sebesar 93,74% terhadap total pendapatan, meningkat tipis dari 93,40% pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya piutang pembiayaan konsumen.

Anjak Piutang

Pendapatan dari anjak piutang sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp30,17 miliar, turun signifikan 43,61% dibandingkan Rp53,50 miliar pada tahun 2024. Kontribusi segmen ini terhadap total pendapatan juga menurun menjadi 1,72% dari sebelumnya 2,74%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tagihan anjak piutang Perseroan.

Beban

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan jumlah beban sebesar Rp2,84 triliun, meningkat 19,94% dibandingkan Rp2,36 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan.

Consumer Financing

Throughout 2025, revenue from the consumer financing segment totaled IDR1.64 trillion, a decrease of 10.02% compared to IDR1.83 trillion in 2024. This segment remained the primary contributor, accounting for 93.74% of total revenue, a slight increase from 93.40% in the previous year. This decline aligns with the decrease in consumer financing receivables.

Factoring

Revenue from factoring for the year 2025 was recorded at IDR30.17 billion, a significant decrease of 43.61% compared to IDR53.50 billion in 2024. This segment's contribution to total revenue also decreased to 1.72% from 2.74%. This decline was primarily driven by a decrease in the Company's factoring receivables.

Expenses

Throughout 2025, the Company recorded total expenses of IDR2.84 trillion, an increase of 19.94%, from IDR2.36 trillion in the prior year. This increase represents higher expenses, primarily due to a rise in the allowance for impairment losses on financing receivables.



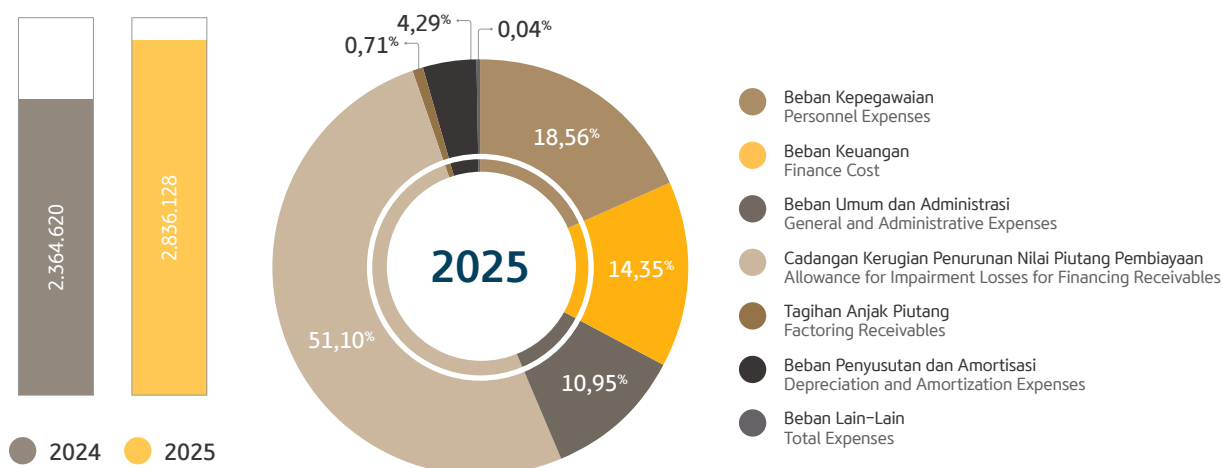
Perkembangan jumlah beban Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

The development of the Company's total expenses over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	Kontribusi (%) Contribution (%)	2024	Kontribusi (%) Contribution (%)	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
					Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Beban Expenses						
Beban Kepegawaian Personnel Expenses	526.371	18,56	602.028	25,46	(75.657)	(12,57)
Beban Keuangan Finance Cost	407.091	14,35	516.022	21,82	(108.931)	(21,11)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	310.574	10,95	294.283	12,45	16.291	5,54
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan Allowance for Impairment Losses for Financing Receivables	1.449.160	51,10	770.093	32,57	679.067	88,18
Tagihan Anjak Piutang Factoring Receivables	20.164	0,71	46.492	1,97	(26.328)	(56,63)
Beban Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization Expenses	121.729	4,29	111.849	4,73	9.880	8,83
Beban Lain-Lain Other Expenses	1.040	0,04	23.852	1,01	(22.812)	(95,64)
Jumlah Beban Total Expenses	2.836.128	100,00	2.364.620	100,00	471.508	19,94

Jumlah Beban (dalam Jutaan Rupiah)
Total Expenses (in millions of Rupiah)





Beban Kepegawaian

Beban kepegawaian sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp526,37 miliar, menurun 12,57% dibandingkan Rp602,03 miliar pada tahun 2024. Kontribusi beban ini terhadap total beban juga menurun menjadi 18,56% dari sebelumnya 25,46%, sejalan dengan efisiensi biaya tenaga kerja yang dilakukan Perseroan.

Beban Keuangan

Sepanjang tahun 2025, beban keuangan tercatat sebesar Rp407,09 miliar, turun 21,11% dibandingkan Rp516,02 miliar pada tahun sebelumnya. Porsi beban keuangan terhadap total beban juga menurun menjadi 14,35% dari 21,82%, mencerminkan penurunan *outstanding* pendanaan sejalan dengan strategi pengelolaan liabilitas.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp310,57 miliar sepanjang tahun 2025, meningkat 5,54% dibandingkan Rp294,28 miliar pada tahun 2024. Kontribusinya terhadap total beban relatif stabil pada level 10,95%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban promosi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp857,60 miliar, meningkat signifikan hingga 172,32% dibandingkan rugi bersih sebesar Rp314,93 miliar pada tahun 2024. Peningkatan rugi bersih ini mencerminkan tekanan yang lebih besar terhadap kinerja profitabilitas Perseroan selama periode berjalan.

Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan pembiayaan konsumen dan anjak piutang serta meningkatnya beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan.

Jumlah Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan

Sejalan dengan dinamika kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan jumlah kerugian komprehensif sebesar Rp866,03 miliar, dibandingkan Rp326,69 miliar pada tahun 2024. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan rugi bersih tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2025, posisi kas dan setara kas Perseroan tercatat sebesar Rp103,86 miliar, menurun 64,65% dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya sebesar Rp293,80 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus kas keluar yang signifikan dari aktivitas pendanaan, meskipun Perseroan mencatatkan peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Personnel Expenses

Personnel expenses in 2025 were recorded at IDR526.37 billion, a 12.57% decrease from IDR602.03 billion in 2024. The contribution of this expense to total expenses also declined to 18.56% from 25.46%, in line with the Company's labor cost efficiency measures.

Financial Expenses

Financial expenses in 2025 were recorded at IDR407.09 billion, a 21.11% decrease from IDR516.02 billion in the prior year. The proportion of finance costs to total expenses also declined to 14.35% from 21.82%, reflecting a reduction in outstanding funding in line with the Company's liability management strategy.

General and Administrative Expenses

General and administrative expenses totaled IDR310.57 billion in 2025, an increase of 5.54% from IDR294.28 billion in 2024. Their contribution to total expenses remained relatively stable at 10.95%. This increase was primarily attributable to higher promotional expenses incurred to support the Company's operational activities.

Net Loss for the Period

Throughout 2025, the Company recorded a net loss of IDR857.60 billion, a 172.32% increase from the IDR314.93 billion net loss in 2024. This widening net loss reflects greater pressure on the Company's profitability during the current period.

This was primarily driven by a decline in consumer financing and factoring income, coupled with an increase in the allowance for impairment losses on financing receivables.

Total Comprehensive Loss For The Current Period

In line with the Company's performance throughout 2025, the Company recorded a total comprehensive loss of IDR866.03 billion, compared to IDR326.69 billion in 2024. This development is consistent with the increase in net loss for the current year.

CASH FLOW STATEMENTS

As of 31 December 2025, the Company's cash and cash equivalents stood at IDR103.86 billion, a decrease of 64.65% from IDR293.80 billion at the close of the prior year. This decline was primarily driven by significant cash outflows from financing activities, notwithstanding an increase in net cash from operating activities.



Ringkasan kinerja arus kas Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

A summary of the Company's cash flow performance over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Perubahan (2025-2024) Changes (2025-2024)	
			Nominal (Rp) Nominal (IDR)	%
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flow provided by operating activities	2.382.346	397.314	1.985.032	499,61
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net Cash Flow Used in Investment Activities	(90.283)	(114.749)	24.466	(21,32)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flow used for financing activities	(2.482.254)	(139.083)	(2.343.171)	1.684,73
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	293.797	150.519	143.278	95,19
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	103.856	293.797	(189.941)	(64,65)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	250	(204)	454	(222,55)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada posisi 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp2,38 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp397,31 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran atas transaksi pembiayaan.

Net Cash Flows Generated from Operating Activities

As of 31 December 2025, the Company recorded net cash flows from operating activities of IDR2.38 trillion, a significant increase from IDR397.31 billion in 2024. This improvement was primarily attributable to a reduction in payments for financing transactions.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp90,28 miliar, menurun 21,32% dari sebesar Rp114,75 miliar pada periode sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran untuk perolehan aset tetap.

Net Cash Flows Used in Investing Activities

Net cash used in investing activities as of year-end 2025 was recorded at IDR90.28 billion, a decrease of 21.32% from IDR114.75 billion in the prior period. This decline was primarily attributable to a reduction in payments for the acquisition of fixed assets.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Pada akhir 2025, Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2,48 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp139,08 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas yang berasal dari pinjaman yang diterima.

Net Cash Flows Used in Financing Activities

As of year-end 2025, the Company recorded net cash flows used in financing activities of IDR2.48 trillion, a significant increase from IDR139.08 billion in 2024. This was primarily attributable to a decline in cash receipts from borrowings.

RASIO-RASIO KEUANGAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perseroan senantiasa memastikan bahwa tingkat kesehatan perusahaan serta pengelolaan rasio-rasio keuangan utama berada dalam koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 ("POJK 35/2018") tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah

FINANCIAL RATIOS

In carrying out its financing business activities, the Company consistently ensures that its financial soundness and key financial ratios remain within the boundaries prescribed by applicable regulations. This refers to POJK No. 35/POJK.05/2018 ("POJK 35/2018") concerning the Conduct of Business for Financing Companies, as amended several times, most recently by POJK No. 46 of 2024 concerning the



terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, serta peraturan terkait lainnya.

Melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bisnis, Perseroan berupaya menjaga rasio-rasio keuangan yang menjadi indikator utama kesehatan perusahaan pembiayaan. Adapun posisi rasio keuangan Perseroan yang bersifat wajib disajikan pada tabel berikut:

Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, as well as other related regulations.

By applying prudential principles in business management, the Company endeavors to maintain financial ratios that serve as the primary indicators of a financing company's soundness. The Company's mandatory financial ratio positions are presented in the following table:

Rasio Keuangan	2025	2024	Financial Ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	79,16%	88,29%	Ratio of net financing receivables to total assets
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	86,39%	105,1%	Ratio of net financing receivables to total loans
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	40,26 %	48,96%	Ratio of Investment Financing Receivables and Working Capital Financing to Total Financing Receivables
Rasio permodalan	10,45%	21,85%	Capital Ratio
Non - Performing Financing (NPF) - Neto	3,74%	2,80%	Non - Performing Financing (NPF) - Neto
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	(111%)	439%	Equity to Paid-up Capital Ratio
Gearing Ratio	(16,86) kali times	7,07 kali times	Gearing Ratio
Imbal Hasil Ekuitas	(669,29%)	(31,68%)	Return on Equity
Imbal Hasil Aset	(18,02%)	(3,88%)	Return on Asset
Margin Laba Bersih	(48,94%)	(16,11%)	Net Profit Margin
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	169,47%	124,57%	Operating Expenses to Operating Income
Rasio Lancar	119,14%	130,37%	Current Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	36.14 kali times	7,17 kali times	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,97 kali times	0,88 kali times	Liabilities to Total Assets Ratio

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan likuiditas secara hati-hati dan cermat untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan secara *prudent* dengan menjaga kecukupan dana secara tepat waktu melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan.

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

ABILITY TO PAY DEBTS AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Company consistently manages its liquidity in a prudent and disciplined manner to ensure its ability to meet both short-term and long-term obligations as they fall due. Liquidity risk management is carried out cautiously by maintaining adequate funding in a timely manner through the optimization of various funding sources.

The following presents the Company's liquidity and solvency ratios for the past 2 (two) years:

Keterangan	2025	2024	Description
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,97 kali times	0,88 kali times	Liabilities to Assets Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	36,14 kali times	7,17 kali times	Liabilities to Equity Ratio



Keterangan	2025	2024	Description
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar	119,14%	130,37%	Quick ratio
Rasio Kas	3,96%	7,40%	Cash Ratio

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pada tahun 2025 Perseroan mencatatkan dinamika kinerja likuiditas yang relatif terjaga, meskipun terdapat sedikit penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, rasio lancar (*quick ratio*) Perseroan berada pada level 119,14% dan rasio kas sebesar 3,96%, menurun dibandingkan tahun 2024 namun masih menunjukkan kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Dari sisi solvabilitas, rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 36,14 kali, meningkat dibandingkan dengan 7,17 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh perubahan pada struktur permodalan, baik dari sisi liabilitas maupun ekuitas, seiring dengan dinamika kinerja keuangan Perseroan selama tahun berjalan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 manajemen terus melakukan langkah-langkah pengelolaan permodalan secara lebih *prudent* dan terukur. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi struktur pendanaan, pengendalian liabilitas, serta penguatan posisi ekuitas secara bertahap. Ke depan, Perseroan akan terus memantau kondisi permodalan secara berkala guna menjaga keseimbangan struktur keuangan dan mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan para kreditur dan pemangku kepentingan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam merealisasikan kembali piutang yang timbul dari kegiatan usaha pembiayaan. Pengelolaan kolektibilitas yang baik menjadi aspek penting dalam menjaga likuiditas serta memastikan keberlangsungan operasional Perseroan.

Dalam rangka meminimalkan risiko kredit dan menjaga kelancaran arus kas, Perseroan menerapkan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan piutang secara efektif dan terukur. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas portofolio tetap terjaga serta risiko piutang bermasalah dapat dikendalikan secara optimal.

Perseroan juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap piutang pembiayaan, khususnya yang berada dalam kategori bermasalah, dengan mengacu pada ketentuan POJK 35/2018. Selain itu, Perseroan mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas piutang berdasarkan jumlah hari tunggakan guna mendukung pengelolaan risiko yang lebih terstruktur.

Based on the above calculations, in 2025, the Company recorded a relatively stable liquidity performance, despite some adjustments compared to the previous year. The Company's quick ratio stood at 119.14% and its cash ratio at 3.96% in 2025, both lower than in 2024 but still indicating an adequate capacity to meet short-term obligations.

From a solvency perspective, the Company's liabilities-to-equity ratio was recorded at 36.14 times, increasing from 7.17 times in 2024. This increase was primarily driven by changes in the capital structure, both in terms of liabilities and equity, in line with the Company's financial performance dynamics during the year.

Overall, in 2025, management continued to implement more prudent and measured capital management initiatives. These efforts included optimizing the funding structure, controlling liabilities, and gradually strengthening the equity position. Going forward, the Company will continue to monitor its capital structure regularly to maintain a balanced financial position and support sustainable business continuity, while preserving the confidence of creditors and stakeholders.

Receivables Collectability Level

The collectability level of receivables reflects the Company's ability to recover receivables arising from its financing activities. Effective management of collectability is a critical aspect in maintaining liquidity and ensuring the continuity of the Company's operations.

To minimize credit risk and maintain healthy cash flow, the Company implements strategic measures to manage receivables effectively and in a measured manner. These efforts aim to maintain portfolio quality and optimally control the risk of non-performing receivables.

The Company also actively monitors its financing receivables, particularly those classified as non-performing, in accordance with POJK 35/2018. In addition, the Company classifies receivables collectability levels based on days past due to support a more structured risk management approach.



Adapun profil umur piutang pembiayaan bruto yang dikelola Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

The aging profile of the Company's gross financing receivables over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	2025	2024	Description
Tidak ada tunggakan	4.210.718	8.124.370	No late payments
Tunggakan 1-90 hari	294.466	288.891	Overdue 1-90 days
Tunggakan > 90 hari	50.849	81.755	Overdue > 90 days
Jumlah Piutang pembiayaan - bruto	4.556.033	8.495.016	Total Financing Receivables - gross
Persentase jumlah tunggakan angsuran > 90 hari terhadap jumlah piutang pembiayaan - bruto	1,12%	0,96%	Percentage of total installment past dues > 90 days to total financing receivables - gross

Perseroan menetapkan bahwa piutang pembiayaan dikategorikan mengalami penurunan nilai apabila telah menunggak lebih dari 90 hari, dan atas piutang tersebut dilakukan pembentukan cadangan kerugian secara kolektif. Penerapan kebijakan tersebut mendukung pengelolaan risiko kredit yang lebih disiplin dan terstruktur.

The Company classifies financing receivables as impaired when they are overdue by more than 90 days, and establishes collective impairment allowances. The implementation of this policy supports a more disciplined and structured credit risk management framework.

Sejalan dengan penerapan kebijakan tersebut, kualitas piutang pembiayaan selama tahun 2025 relatif terjaga, didukung oleh profil debitur dengan riwayat pembayaran yang baik. Hal ini turut tercermin dari rasio NPF yang tetap terjaga sebesar 3,74% pada tahun 2025.

In line with this policy, the quality of financing receivables in 2025 remained relatively well maintained, supported by a strong repayment history in the debtor profile. This is also reflected in the Company's non-performing financing (NPF) ratio, which remained controlled at 3.74% in 2025.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Rincian Struktur Modal

Capital Structure Details

Pengelolaan struktur permodalan Perseroan saat ini difokuskan pada upaya memperkuat kondisi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara sumber pendanaan dari hutang dan ekuitas. Dalam hal ini, Direksi secara aktif melakukan penyesuaian strategi permodalan dengan mempertimbangkan biaya pendanaan, tingkat risiko keuangan, serta kebutuhan operasional dan pengembangan usaha.

The Company's management is currently focused on strengthening its financial condition and ensuring business continuity while maintaining an appropriate balance between debt and equity funding sources. In this regard, the Board of Directors actively adjusts capital strategies by taking into account funding costs, financial risk levels, and operational and business development needs.

Perseroan juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap posisi permodalan, termasuk melalui analisis bulanan, guna memastikan kecukupan modal dalam mendukung kegiatan usaha serta menjaga profil risiko tetap dalam batas yang dapat dikelola.

The Company also continuously monitors and evaluates its capital position, including through monthly analysis, to ensure capital adequacy to support business activities while maintaining its risk profile within manageable limits.



Dalam pengelolaannya, struktur permodalan Perseroan senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018");
2. Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("POJK 47/2020");
3. Peraturan OJK No. 46 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura ("POJK 46/2024").

Dalam aspek permodalan, Perseroan senantiasa memperoleh dukungan berkelanjutan dari pemegang saham serta secara konsisten melakukan koordinasi dengan OJK sehubungan dengan penguatan struktur permodalan Perseroan sehingga mampu mendukung kegiatan usaha secara optimal sekaligus menjaga tingkat kesehatan keuangan dan profit risiko yang *prudent*.

Manajemen atas Struktur Modal

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, pada tahun 2025 Perseroan melakukan penyesuaian terhadap komposisi modal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp226.250.040.000 yang terbagi atas 226.250.040 saham biasa menjadi sebesar Rp426.250.040.000 yang terbagi atas 426.250.040 saham biasa, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000 per saham, yang berasal dari kapitalisasi agio saham menjadi Saham Bonus sebesar Rp200.000.000.000. Pembagian Saham Bonus ini dilakukan secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing, sebagai bagian dari upaya penguatan struktur permodalan secara berkelanjutan.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Penetapan kebijakan struktur permodalan Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 35/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK 46/2024 yang mensyaratkan Perusahaan Pembiayaan untuk memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%. Rasio tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.

In managing its capital structure, the Company consistently refers to the prevailing regulations applicable to financing companies, including the following:

1. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Business Activities ("POJK 35/2018");
2. Financial Services Authority Regulation No. 47/POJK.05/2020 concerning Business Licensing and Institutional Aspects of Financing Companies and Sharia Financing Companies ("POJK 47/2020");
3. Financial Services Authority Regulation No. 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies ("POJK 46/2024").

In terms of capital, the Company continues to receive ongoing support from its shareholders and consistently coordinates with the OJK regarding the strengthening of the Company's capital structure, thereby ensuring optimal support for its business operations while maintaining sound financial health and a prudent risk-return profile.

Management Policy on Capital Structure

In order to strengthen its capital structure, in 2025 the Company made adjustments to its capital composition as stipulated in the Articles of Association. This adjustment was carried out by increasing the authorized capital from the original amount of IDR226,250,040,000, divided into 226,250,040 common shares, to IDR426,250,040,000, divided into 426,250,040 common shares, with a par value of IDR1,000 per share, derived from the capitalization of share premium into Bonus Shares amounting to IDR200,000,000,000. The distribution of these Bonus Shares was conducted proportionally to shareholders in accordance with their respective ownership stakes, as part of efforts to strengthen the capital structure on a sustainable basis.

Basis for Management Policy on Capital Structure

The determination of the Company's capital structure policy is guided by prevailing laws and regulations, particularly POJK 35/2018, as amended from time to time, most recently by POJK 46/2024, which requires financing companies to maintain a minimum capital adequacy ratio of 10%. This ratio is calculated based on the proportion of adjusted equity to adjusted assets.



Selain itu, ketentuan internal terkait struktur permodalan Perseroan juga diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 4 mengenai permodalan, yang menjadi dasar dalam pengelolaan struktur modal secara berkelanjutan.

In addition, internal provisions governing the Company's capital structure are also set out in detail in the Company's Articles of Association, particularly Article 4 concerning capital, which serves as the foundation for the sustainable management of its capital structure.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun buku 2025 Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Dengan demikian, Perseroan tidak menyajikan informasi berikut ini:

1. Nama dari pihak yang melakukan ikatan;
2. Tujuan dari perikatan;
3. Sumber dana yang disiapkan untuk memenuhi perikatan tersebut;
4. Denominasi mata uang dalam ikatan tersebut; dan
5. Langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

MATERIAL COMMITMENT TO CAPITAL GOODS INVESTMENT

In the financial year 2025, the Company did not have any material commitments to capital goods investment. Accordingly, the Company does not present the following information:

1. Name of the counterparty to the commitment;
2. Purpose of the commitment;
3. Source of funds allocated to fulfill the commitment;
4. Currency denomination of the commitment; and
5. Company's planned measures to hedge risks arising from related foreign currency exposure.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU 2025

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp6,16 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penerapan strategi efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki Perseroan.

Seluruh belanja modal tersebut dibiayai dari sumber kas internal Perseroan dan dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak menimbulkan eksposur terhadap risiko nilai tukar mata uang asing.

Rincian investasi barang modal yang direalisasikan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT IN FISCAL YEAR 2025

In 2025, the Company recorded capital goods investment of IDR6.16 billion, lower than the capital expenditure recorded in the previous year. This decrease was in line with the implementation of efficiency strategies and the optimization of the Company's existing asset utilization.

All capital expenditures were financed from the Company's internal cash resources and were conducted in Rupiah, thereby not giving rise to foreign exchange exposure.

Details of the Company's realized capital expenditures as of 31 December 2025 are presented in the following table:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Objectives	Nilai Value
Renovasi bangunan Building Renovation	Untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan To support the continuity of the Company's operations	516,91
Kendaraan Vehicle		2.378,80
Perabot dan perlengkapan kantor Office Furniture and Supplies		71,41
Peralatan kantor Office Equipment		3.191,31
Jumlah Total		6.158,43



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 9 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039319.AH.01.11.tanggal 23 Februari 2026 dan telah dicatat dalam sistem administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0096321, Perusahaan telah menyetujui perubahan susunan anggota Direksi, sehingga susunan anggota Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Direksi Board of Directors		
Direktur Utama	Peter Halim	President Director
Wakil Direktur Utama	Kisup Wi	Vice President Director
Direktur	Hery Susanto Dermawan	Director
Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs	Martina Hariyanto	Director of Human Resources & General Affairs
Direktur	Choi, Ho Jung	Director
Direktur	Kyeongho Min	Director

Keputusan Direksi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai pengganti Rapat Direksi tanggal 12 Januari 2026, diputuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan Bapak Jacob Tanasale sebagai Chief Collection Officer;
- Menyetujui pemberhentian Bapak Antonius Padua Wisuda sebagai Compliance & Corporate Secretary, yang juga menjabat sebagai Compliance Officer;
- Menyetujui pemberhentian Bapak Cun Pin sebagai Head of Finance, Accounting & Funding, Treasury;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Cun Pin sebagai Head of Compliance & Corporate Secretary, yang juga menjabat sebagai Compliance Officer;
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Cun Pin sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on Notarial Deed No. 37 dated 9 February 2026, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and having obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. AHU-0039319.AH.01.11.dated 23 February 2026 and recorded in the administrative system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.09-0096321, the Company approved changes to the composition of the Board of Directors, resulting in the following Board of Directors composition:

Board of Directors Resolutions

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of a Board of Directors Meeting dated 12 January 2026, the following resolutions were adopted:

- Approval of the appointment of Mr. Jacob Tanasale as Chief Collection Officer;
- Approval of the dismissal of Mr. Antonius Padua Wisuda as Compliance & Corporate Secretary, who also served as Compliance Officer;
- Approval of the dismissal of Mr. Cun Pin as Head of Finance, Accounting & Funding, Treasury;
- Approval of the appointment of Mr. Cun Pin as Head of Compliance & Corporate Secretary, who also serves as Compliance Officer;
- Approval of the honorable dismissal of Mr. Cun Pin as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee.



Dewan Komite

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai pengganti Rapat Direksi tanggal 12 Januari 2026, susunan Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Committee Board

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of a Board of Directors Meeting dated 12 January 2026, the composition of the Company's Asset and Liability Management Committee is as follows:

Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Asset and Liability Management Committee		
Ketua	Peter Halim	Chairman
Anggota	Kisup Wi	Member
Anggota	Kyeongho Min	Member
Anggota	Choi, Ho Jung	Member
Anggota	Hery Susanto Dermawan	Member
Anggota	Daniel Adrian	Member

PT Bank KB Indonesia Tbk.

Kredit Modal Kerja

Pada tanggal 11 Februari 2026, Perusahaan dan PT Bank KB Indonesia Tbk. telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit atas fasilitas Uncommitted Term Loan, yang mencakup perubahan plafon fasilitas menjadi sebesar Rp100.000.000.000 serta perpanjangan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan.

Pada tanggal 11 Februari 2026, Perusahaan dan PT Bank KB Indonesia Tbk. juga menandatangani Perjanjian Kredit dalam bentuk Uncommitted Term Loan untuk mendukung kegiatan modal kerja Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas selama 12 (dua belas) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan *Letter of Comfort* dari KB Kookmin Card Corp.

PT Bank KB Indonesia Tbk.

Working Capital Loan

On 11 February 2026, the Company and PT Bank KB Indonesia Tbk. executed an Addendum to the Credit Agreement for an Uncommitted Term Loan facility, covering an amendment to the facility limit to IDR100,000,000,000 and an extension of the facility tenor by 12 months.

On 11 February 2026, the Company and PT Bank KB Indonesia Tbk. also executed a Credit Agreement in the form of an Uncommitted Term Loan to support the Company's working capital activities in the amount of IDR100,000,000,000, with a facility tenor of 12 (twelve) months. This facility is secured by a Letter of Comfort from KB Kookmin Card Corp.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025, SERTA PROYEKSI KINERJA TAHUN 2026

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, realisasi kinerja Perseroan secara umum masih berada di bawah target yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal ini sejalan dengan kondisi industri pembiayaan yang masih menantang, serta belum optimalnya penyaluran pembiayaan yang turut memengaruhi pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION IN 2025 AND PERFORMANCE PROJECTION FOR 2026

Comparison of 2025 Target and Realization

Throughout 2025, the Company fell short of its stated targets in overall performance. This was in line with the still challenging conditions in the financing industry, as well as suboptimal financing disbursement, which affected the achievement of the Company's financial and operational performance.

Taking these conditions into account, a comparison between the Company's performance targets and realizations for the period ended 31 December 2025 is presented in the following table:



Kinerja Keuangan Financial Performance

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Pos-Pos Keuangan Utama Main Financial Items	Target Tahun 2025 Target 2025	Realisasi Tahun 2025 Realization 2025	Pencapaian Achievement
Laba (Rugi) Profit (Loss)			
Pendapatan Revenue	2.063.513	1.752.442	84,93%
(Rugi) Laba Bersih Periode Berjalan Net (Loss)/Profit for the Period	(230.774)	(857.602)	371,62%
Jumlah (Rugi) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Period	(230.774)	(866.028)	375,27%
Posisi Keuangan Financial Position			
Jumlah Aset Total Assets	7.425.627	4.759.159	64,09%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	6.457.153	4.631.024	71,72%
Jumlah Ekuitas Total Equity	968.475	128.135	13,23%
Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios			
Imbal Hasil Aset Return on Assets	(3,98%)	(18,02%)	452,76%
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity	(23,83%)	(669,29%)	2808,60%
Rasio Lancar Current Ratio	144,54%	119,15%	82,43%
Rasio Kas Cash Ratio	8,69%	3,96%	45,58%
NPF Neto Net NPF	1,72%	3,74%	217,44%
Gearing Ratio	5,78 kali times	(16,86) kali times	221,11%
Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Financing Disbursement by Objective			
Penyaluran Pembiayaan Baru New Financing Disbursement	7.925.000	3.980.756	50,23%
Piutang pembiayaan yang dikelola Managed Financing Receivables	6.372.130	3.958.562	62,12%
Pembiayaan Investasi Investment Financing	396.325	272.437	68,74%
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	3.016.777	1.120.371	37,14%
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	2.959.029	2.242.212	75,78%
Lain-Lain Others			
Struktur Modal Capital Structure	Proyeksi rasio permodalan Perseroan untuk tahun 2025 adalah sebesar 25,04%. The Company's projected capital ratio for 2025 is 25.04%.	Realisasi rasio permodalan Perseroan untuk tahun 2025 adalah sebesar 10,04%. The realization of the Company's capital ratio for 2025 is 10.04%	40,01%

Proyeksi Kinerja Tahun 2026

Pada tahun 2026, Perseroan memandang bahwa industri pembiayaan memiliki prospek pertumbuhan yang positif seiring dengan potensi perbaikan kondisi makroekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan konsumtif, khususnya kendaraan bermotor dan barang elektronik.

2026 Performance Projection

The Company views the financing industry in 2026 as having positive growth prospects, supported by the potential improvement in macroeconomic conditions and increasing demand for consumer financing, particularly for motor vehicles and electronic goods.



Dengan mempertimbangkan peluang tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2025. Optimisme ini didukung oleh penerapan strategi bisnis yang lebih terarah, penguatan kualitas aset, serta optimalisasi penyaluran pembiayaan secara selektif.

Perseroan juga telah menyusun rencana bisnis yang lebih matang dengan menetapkan target kinerja yang lebih tinggi namun tetap realistis, guna mendorong perbaikan kinerja keuangan dan operasional secara berkelanjutan.

Adapun proyeksi kinerja Perseroan untuk tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Taking these opportunities into account, the Company is optimistic that it can achieve better performance compared to its 2025 realization. This optimism is supported by the implementation of more focused business strategies, the strengthening of asset quality, and selective optimization of financing disbursement.

The Company has also formulated a more comprehensive business plan by setting higher yet realistic performance targets to drive sustainable improvements in financial and operational performance.

The Company's performance projections for 2026 are presented as follows:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Pos-Pos Keuangan Utama	Target 2026	Main Financial Items
Laba (Rugi) Profit or (Loss)		
Pendapatan	1.352.601	Revenue
(Rugi) Laba Bersih Periode Berjalan	(46.627)	Net (Loss)/Income for the Period
Jumlah (Rugi) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	(117.526)	Total Comprehensive (Loss)/Income the Period
Posisi Keuangan Financial Position		
Jumlah Aset	3.347.048	Total Assets
Jumlah Liabilitas	3.080.126	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	266.922	Total Equity
Imbal Hasil Aset	(1,46%)	Return on Assets
Imbal Hasil Ekuitas	(23,42%)	Return on Equity
Rasio Lancar	108,83%	Current Ratio
Rasio Kas	4,57%	Cash Ratio
NPF Neto	3,87%	Net NPF
Gearing Ratio	5,68 kali times	Gearing Ratio
Penyaluran Pembiayaan Baru	2.538.964	New Financing Disbursement
Piutang pembiayaan yang dikelola	2.122.499	Managed Financing Receivables
Pembiayaan Investasi	199.426	Investment Financing
Pembiayaan Modal Kerja	169.110	Working Capital Financing
Pembiayaan Multiguna	1.753.963	Multipurpose Financing
Lain-Lain Others		
Struktur Modal	3,40%	Capital Structure



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Pos-Pos Keuangan Utama	Target 2026	Main Financial Items
Kebijakan Dividen (<i>dividend payout ratio</i>)	Kebijakan dividen Perseroan senantiasa mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Inisiatif pembagian dividen dilakukan setiap tahun melalui RUPS Tahunan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. The Company's dividend policy is always referred to applicable laws and regulations. Dividend distribution is conducted annually through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), while carefully considering the Company's financial condition.	Dividend Policy

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Kebijakan Dividen

Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, antara lain kondisi kesehatan perusahaan, kecukupan dan kebutuhan permodalan, tingkat profitabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan dan prospek ekonomi, baik global maupun domestik. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan Manajemen dalam mengusulkan pembagian dividen yang selanjutnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam pelaksanaannya, Perseroan memastikan bahwa setiap keputusan pembagian dividen dilakukan secara *prudent* dan tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap kondisi keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2025 tanggal 23 April 2025, para pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangan Perseroan pada tahun buku 2024 yang masih mencatatkan rugi bersih.

DIVIDEND AND DISTRIBUTION POLICY

Dividend Policy

The Company establishes its dividend distribution policy by considering various relevant factors, including the Company's financial health, capital adequacy and requirements, level of profitability, compliance with applicable laws and regulations, as well as global and domestic economic developments and outlook. These factors serve as the basis for Management in proposing dividend distribution, which is subsequently decided through the General Meeting of Shareholders (GMS). In its implementation, the Company ensures that any dividend distribution decision is carried out prudently and does not adversely affect the Company's financial condition or risk profile.

Dividend Distribution in the Last 2 (two) Years

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on 23 April 2025, the shareholders resolved not to distribute dividends to shareholders. This decision was made in consideration of the Company's financial performance in the 2024 financial year, which still recorded a net loss.



Adapun rincian pembayaran dividen kepada pemegang saham selama 2 (dua) tahun buku terakhir disajikan sebagai berikut:

Details of dividend payments to shareholders over the past 2 (two) financial years are presented as follows:

	2025	2024
Dasar hukum Legal Basis	Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai Pengganti RUPS Tahunan Tahun 2025 untuk Tahun Buku 2024 yang telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2025. Circular Decision of the General Meeting of Shareholders ("GMS") as a Substitute for the 2025 Annual GMS for the 2024 Financial Year which has been signed by all Shareholders on April 23, 2025.	Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai Pengganti RUPS Tahunan Tahun 2024 untuk Tahun Buku 2023 yang telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham pada tanggal 16 April 2024. Circular Decision of the General Meeting of Shareholders ("GMS") as a Substitute for the 2024 Annual GMS for the 2023 Financial Year which has been signed by all Shareholders on April 16, 2024.
Tahun buku Fiscal Year	Pembagian dividen atas kinerja tahun buku 2024. Dividend distribution based on performance for the 2024 financial year.	Pembagian dividen atas kinerja tahun buku 2023. Dividend distribution based on performance for the 2023 financial year.
Total dividen yang dibagikan Total dividend distributed	-	Rp5.203.750.920
Jumlah dividen per saham Total dividend per share	-	Rp23/saham shares
Persentase dividen yang dibagikan terhadap laba bersih Percentage of dividends distributed to net profit	-	5,68%
Tanggal pengumuman distribusi dividen tunai Cash dividend distribution announcement date	-	23 April 2024 April 23, 2024
Tanggal pembayaran dividen tunai Cash dividend payment date	-	Kepada KB Kookmin Card Corp.: Rp4.163.000.736 Kepada PT Finansia Pacifica Raya: Rp1.040.750.184

PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2026, perekonomian global diperkirakan mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap, meskipun masih diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi di berbagai negara. Seiring dengan meredanya tekanan inflasi, arah kebijakan moneter global diproyeksikan menjadi lebih akomodatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta menurunkan biaya pendanaan secara bertahap.

Sementara dari dalam negeri, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh solid dalam kisaran 5,0%-5,4% (YoY), didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta keberlanjutan program hilirisasi. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dan inflasi yang relatif rendah turut menjadi faktor pendukung bagi pemulihan daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

BUSINESS PROSPECTS

We expect to see a gradual improvement in the global economy for the year 2026, although it will likely remain under geopolitical uncertainty and the dynamics of economic policies across countries. Projections suggest that as inflationary pressures subside, global monetary policy will become more accommodative and lead to increase liquidity and lower funding costs.

Meanwhile, domestically, the Indonesian economy is projected to maintain solid growth of 5.0%-5.4% (YoY), supported by strong domestic consumption, increased investment, and the continuation of downstreaming programs. Maintained macroeconomic stability and relatively low inflation are also supporting factors for the recovery of public purchasing power and overall economic activity.



Sejalan dengan proyeksi fundamental ekonomi yang tetap kuat serta daya tarik investasi jangka panjang yang terjaga, kinerja industri pembiayaan pada tahun 2026 diyakini akan membaik serta mampu mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 6%-8% (YoY), didorong oleh pembiayaan multiguna dan modal kerja. Prospek tersebut dinilai realistis seiring dengan mulai terlihatnya pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dari capaian pembiayaan baru sebesar Rp78,16 triliun per Januari 2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang lebih kondusif serta potensi penurunan suku bunga, Perseroan optimis dapat memperbaiki kinerja bisnis pada tahun 2026. Dukungan sinergi dengan KB Financial Group melalui KB Kookmin Card turut memperkuat permodalan dan pengembangan bisnis Perseroan.

Dalam mengejar target pertumbuhan yang lebih baik pada 2026 mendatang, Perseroan telah mempersiapkan serangkaian strategi prioritas, salah satunya dengan tetap berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dan multiguna, serta mulai mengembangkan pembiayaan kendaraan listrik. Seraya dengan itu, penguatan digitalisasi dan jaringan distribusi juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar.

Melalui penerapan strategi bisnis yang terukur serta dukungan pendanaan yang kompetitif, Perseroan berada pada posisi yang solid untuk memanfaatkan momentum pemulihan industri dan mendorong pertumbuhan kinerja, meskipun tetap menghadapi persaingan yang semakin ketat.

ASPEK PEMASARAN

Dalam menghadapi persaingan industri pembiayaan yang semakin ketat serta percepatan transformasi digital, Perseroan terus memperkuat posisi pasarnya melalui penyediaan solusi pembiayaan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini turut diperkuat melalui komitmen peningkatan kualitas layanan, penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta fokus pada pengalaman debitur untuk membangun loyalitas pelanggan sebagai fondasi pertumbuhan usaha jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga mengimplementasikan strategi pemasaran yang adaptif dan terintegrasi sebagai bagian dari strategi bisnis secara menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis berikut ini:

In line with projections of continued strong economic fundamentals and maintained long-term investment attractiveness, the financing industry's performance in 2026 is expected to improve, recording positive growth of 6%-8% (YoY), driven by multipurpose financing and working capital. This prospect is considered realistic, given the emerging signs of economic recovery, as reflected in new financing reaching IDR78.16 trillion as of January 2026.

Given such a more favorable macroeconomic landscape and potentially lower interest rates, the Company is optimistic about its improved business performance in 2026. Synergy with KB Financial Group through the KB Kookmin Card has strengthened the Company's capital and business development.

To achieve its higher growth target in 2026, the Company has prepared a series of priority strategies, including a continued focus on motor vehicle and multi-purpose vehicle financing, and the development of electric vehicle financing. Concurrently, digitalization and the strengthening of its distribution network will continue to improve efficiency and market reach.

Through the implementation of a measurable business strategy and competitive funding support, the Company is solidly positioned to capitalize on the momentum of industry recovery and drive performance growth, despite facing increasingly fierce competition.

MARKETING ASPECTS

Amid the increasingly fierce competition in the financing industry and the acceleration of digital transformation, the Company continues to strengthen its market position by providing a range of customer-driven innovative financing solutions. This effort is further strengthened by a commitment to improving service quality, strengthening relationships with stakeholders, and focusing on the debtor experience to build customer loyalty as a foundation for long-term business growth.

In line with this, the Company also implements an adaptive and integrated marketing strategy as part of its overall business strategy to drive growth in financing distribution. This strategy is realized through the following strategic initiatives:



1. Mendorong pemanfaatan aplikasi Kreditplus Mobile sebagai sarana utama dalam pengajuan pembiayaan dan pembayaran angsuran guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan;
2. Meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja (*dealer*) melalui pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi;
3. Melaksanakan program pemasaran bersama dengan dealer dan mitra strategis yang memiliki jaringan distribusi yang kuat; dan
4. Memperluas basis pelanggan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas *telemarketing* (TMO) di seluruh lini bisnis, termasuk penguatan *cross-selling*;
 - b. pembaruan data konsumen secara *real-time* untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas penjualan; dan
 - c. optimalisasi jaringan pemasaran melalui penambahan mitra tenaga pemasaran.

Pangsa Pasar

Perseroan terus menjalankan strategi pemasaran yang adaptif dengan tetap memperhatikan dinamika makroekonomi dan kondisi industri pembiayaan. Berdasarkan data OJK per Agustus 2025, pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan nasional tercatat sebesar 0,78% dari sisi piutang pembiayaan, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,50%. Penurunan ini sejalan dengan penyesuaian laju penyaluran pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi usaha.

Ke depan, Perseroan akan terus mencermati perkembangan pasar dan secara bertahap mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja melalui pengelolaan portofolio yang lebih selektif, pemanfaatan jaringan distribusi yang ada, serta penguatan kapabilitas digital sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham, baik bagi karyawan maupun manajemen.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan penawaran umum sehingga tidak terdapat realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pada periode pelaporan ini.

1. Encouraging the use of the Kreditplus Mobile application as the primary means for financing applications and installment payments to increase customer convenience and comfort;
2. Improving the quality of service to business partners (*dealers*) through the development of an integrated application system;
3. Implementing joint marketing programs with dealers and strategic partners with strong distribution networks; and
4. Expanding the customer base through:
 - a. increasing telemarketing (TMO) activities across all business lines, including strengthening cross-selling;
 - b. updating consumer data in real time to improve sales effectiveness and productivity; and
 - c. optimizing the marketing network by adding marketing partners.

Market Share

The Company continues to implement an adaptive marketing strategy while closely monitoring macroeconomic dynamics and developments in the financing industry. According to OJK data as of August 2025, the Company's market share in the national financing industry was 0.78% for financing receivables, down from 1.50% the previous year. This decline is in line with adjustments in the pace of financing disbursement and the application of prudent principles in business expansion.

Going forward, the Company will continue to monitor market developments and gradually optimize performance improvement efforts through more selective portfolio management, utilization of existing distribution networks, and strengthening digital capabilities in accordance with business needs and conditions.

EMPLOYEE OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until the end of 2025, the Company did not have a share ownership program, either for employees or management.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

In 2025, the Company did not conduct public offering activities so that there was no realization of the use of proceeds from the public offering in this reporting period.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, tidak terdapat transaksi yang memerlukan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan bagian dari kegiatan usaha yang wajar dan bertujuan untuk mendukung operasional perusahaan, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan, dan Sifat Transaksi

Informasi mengenai pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan selama tahun 2025, termasuk sifat hubungan dan jenis transaksi yang dilakukan, telah diungkapkan dalam Catatan No. 33 atas Laporan Keuangan Tahunan PT KB Finansia Multi Finance untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagaimana dirangkum sebagai berikut:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of Relationships	Sifat dari Transaksi Nature of Transaction
KB Kookmin Card Corp	Pemegang saham Shareholder	Beban yang masih harus dibayar, beban umum dan administrasi, obligasi perpetual yang dapat dikonversikan, dan laba ditahan Accrued expenses, general and administrative expenses, convertible perpetual bonds, and retained earnings
PT Finansia Pacifica Raya	Pemegang saham Shareholder	Aset hak-guna Right-of use-assets
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	Perusahaan asosiasi Associate entities	Piutang lain-lain, utang lain-lain, dan pendapatan pembiayaan konsumen. Other Receivables, Other Payables, Consumer Financing Income
PT Bank KB Indonesia Tbk	Perusahaan asosiasi Associate entities	Kas dan setara kas, investasi jangka panjang, pinjaman yang diterima, beban keuangan, pendapatan lain-lain, dan beban umum dan administrasi dan investasi jangka panjang. Cash and cash equivalents, long-term investments, borrowings, finance charges, other income, and general and administrative expenses and long-term investments.
PT Prima Sentra Abadi	Pemegang saham yang sama Same shareholders	Utang lain-lain Other debts
Kookmin Bank, Hong Kong Branch	Perusahaan asosiasi Associate entities	Beban umum dan administrasi General and administrative expenses
PT KB Valbury Sekuritas	Perusahaan asosiasi Associate entities	Beban umum dan administrasi General and administrative expenses
PT KB Data Systems Indonesia	Perusahaan asosiasi Associate entities	Aset tak berwujud Intangible assets
Kookmin Bank	Perusahaan asosiasi Associate entities	Beban umum dan administrasi General and administrative expenses

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/ RELATED PARTIES

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

During 2025, the Company did not engage in any transactions containing conflicts of interest. Therefore, there were no transactions requiring approval through a General Meeting of Shareholders (GMS) as stipulated in applicable regulations.

Reason for Transactions

Transactions with related parties conducted by the Company are part of its normal business activities and are intended to support the company's operations, while adhering to the arm's length principle.

Related Parties, Nature of Relationships, and Nature of Transactions

Information on related parties who engaged in transactions with the Company during 2025, including the nature of the relationships and the types of transactions undertaken, is disclosed in Note No. 33 to the Annual Financial Statements of PT KB Finansia Multi Finance for the financial year ended December 31, 2025, as summarized below:



Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of Relationships	Sifat dari Transaksi Nature of Transaction
Personel manajemen kunci	Direktur, komisaris dan pejabat eksekutif Directors, Commissioners, Executive Officers	Beban kepegawaian Personnel Expenses
Yap Tjay Hing	Pemegang saham yang sama Same shareholders	Piutang lain-lain Other receivables

Saldo Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pengungkapan lebih lanjut mengenai transaksi keuangan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi disajikan secara lebih komprehensif dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan. Adapun ringkasan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Related Party Transaction Balances

Further disclosures regarding the Company's financial transactions with related parties are presented in more comprehensive detail in Note 33 to the Financial Statements. A summary of significant related party balances as of December 31, 2025, and December 31, 2024, is presented as follows:

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Pihak Berelasi Related Parties	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2025	
		Total	Persentase (%) Percentage (%)	Total	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Assets					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	PT Bank KB Indonesia Tbk	30.341	0,64	10.089	0,12
Aset hak-guna Rights-of-use assets	PT Finansia Pacifica Raya	17.566	0,37	26.101	0,32
Piutang lain-lain Other receivables	Yap Tjay Hing	2.182	0,05	-	-
	PT Kookmin Best Insurance Indonesia	119	0,00	891	0,01
Aset tak berwujud Intangible assets	PT KB Data Systems Indonesia	274	0,01	433	0,01
Investasi jangka Panjang Long-term investments	PT Bank KB Indonesia Tbk	41.580	0,87	29.160	0,36
Jumlah dan Persentase terhadap Jumlah Aset Amount and Percentage to Total Assets		92.062	1,93	66.673	0,82
Liabilitas Liabilities					
Pinjaman yang diterima Borrowings	PT Bank KB Indonesia Tbk	200.000	4,32	250.000	3,51
Utang lain-lain Other debts	PT Prima Sentra Abadi	243	0,01	1.759	0,02
	PT Kookmin Best Insurance Indonesia	119	0,00	5.535	0,08
Beban yang masih harus dibayar Accrued Expenses	KB Kookmin Card Corp	3.715	0,08	3.188	0,04
Jumlah dan Persentase terhadap Jumlah Liabilitas Amount and Percentage to Total Liabilities		204.076	4,41	260.481	3,65
Ekuitas Equity					
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan Convertible perpetual bonds	KB Kookmin Card Corp	600.000	468,26	600.000	60,35
Jumlah dan Persentase terhadap Jumlah Ekuitas Amount and Percentage to Total Equity		600.000	468,26	600.000	60,35
Pendapatan Revenue					
Pendapatan pembiayaan konsumen Consumer financing income	PT Kookmin Best Insurance Indonesia	2.850	0,16	8.404	0,43
Pendapatan lain – lain Other revenue	PT Bank KB Indonesia Tbk	238	0,01	370	0,02
Jumlah dan Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Amount and Percentage to Total Income		3.087	0,18	8.774	0,45



(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Pihak Berelasi Related Parties	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2025	
		Total	Persentase (%) Percentage (%)	Total	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Expenses					
Beban keuangan Financial expenses	PT Bank KB Indonesia Tbk	13.955	0,49	32.830	1,39
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	KB Kookmin Card Corp	7.193	0,25	6.087	0,26
	Bank Kookmin, Cabang Hong Kong	1.738	0,06	2.573	0,11
	Bank Kookmin	1.562	0,06	1.750	0,07
	PT KB Valbury Sekuritas	455	0,02	367	0,02
	PT Bank KB Indonesia Tbk	-	-	96	0,00
Jumlah dan Persentase terhadap Jumlah Beban Amount and Percentage to Total Expenses		24.903	0,88	43.703	1,85

Kewajaran, Mekanisme Review, dan Pemenuhan Peraturan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak berelasi yang tidak mengandung benturan kepentingan. Transaksi tersebut merupakan bagian dari aktivitas bisnis normal Perseroan yang umumnya berkaitan dengan kegiatan pendanaan dan pinjam-meminjam dana.

Untuk memastikan terpenuhinya prinsip kewajaran (*arm's length principle*), Perseroan memastikan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali diungkapkan lain dalam laporan keuangan. Selain itu, pelaksanaan transaksi tersebut telah mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, serta PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Fairness, Review Mechanisms, and Compliance with Regulations for Transactions with Affiliated Parties

In conducting its business activities, the Company engages in financial transactions with related parties that do not involve conflicts of interest. These transactions are part of the Company's normal business activities, generally related to funding and borrowing activities.

To ensure compliance with the arm's length principle, the Company ensures that all transactions with related parties are conducted on terms and conditions equivalent to those conducted with third parties, unless otherwise disclosed in the financial statements. Furthermore, these transactions comply with applicable regulations, including Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Party Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions, as well as PSAK 7 concerning Disclosure of Related Parties.



Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan selama tahun 2025 telah dilaksanakan melalui prosedur yang memadai untuk memastikan tidak adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga melibatkan Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk melakukan pengawasan serta penelaahan guna memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk standar PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak berelasi, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

INFORMASI TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan aktivitas investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang.

PENGARUH PERUBAHAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan, sehingga Perseroan secara berkelanjutan melakukan penyesuaian kebijakan dan proses bisnis guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa regulasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional Perseroan antara lain sebagai berikut:

Role of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee

The Board of Directors declares that all affiliated party transactions conducted by the Company during 2025 were implemented through adequate procedures to ensure there are no conflicts of interest that could harm the Company, either in the short or long term.

In its implementation, the Company also involves the Board of Commissioners and the Audit Committee to carry out supervision and review to ensure that each affiliated transaction has complied with applicable provisions, including the PSAK 7 standard regarding related party disclosure, and is carried out in accordance with the arm's length principle

INFORMATION ON TRANSACTION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Throughout 2025, the Company did not make any investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and/or debt restructuring activities.

THE IMPACTS OF CHANGES IN GOVERNMENT REGULATIONS ON COMPANIES

Throughout 2025, there were a number of changes in regulations and legislation that impacted the Company's business activities. Consequently, the Company continuously adjusted its policies and business processes to ensure compliance with applicable regulations. Several regulations that significantly impacted the Company's operations include the following:



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
1.	POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2024.	Penerapan POJK 46 Tahun 2024 berdampak pada struktur permodalan Perseroan seiring dengan adanya redefinisi klasifikasi modal inti. Sebagai langkah proaktif, Perseroan tengah melaksanakan rencana aksi strategis melalui penambahan modal dan restrukturisasi perpetual bonds guna memastikan pemenuhan ambang batas Modal Inti Minimum Disetor (MIMD), baik untuk rasio minimal 50% sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah korektif ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjaga kepatuhan regulasi sekaligus menjamin stabilitas operasional dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
	POJK Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies. This regulation takes effect on December 31, 2024. - Regulations regarding the maximum amount of investment in a company. - The obligation of a PT company to determine a Controlling Shareholder ("PSP"). - The obligation of the company to determine the beneficial owner. - Additional organizational structures that the company must have, including human resources and consumer education and protection services. - List of documents that the company must attach when submitting a branch office opening report. - The removal of requirement for a permit on a branch office to conduct business activities for a maximum of 3 (three) months from the opening permit. - The obligation for the company to attach a branch office closure plan if it intends to close a branch office. - Changes to the reporting period for branch office closures from 15 days to 10 days from the date of closure. - Upgrades to the status of an office other than a branch office to a branch office must be reported no later than 10 days from the date of upgrade. - Additional document attachments in the status upgrade report include Work Systems & Procedures and Organizational Structure. - Exceptions to the inclusion of planned changes in ownership in the Business Plan for Companies with the required conditions. - Reporting obligations for Companies making changes to paid-in capital that do not result in a change in PSP in 10 HK. - List of documents required for reporting changes in paid-in capital. - Paid-in capital obligations to be included in the Company's Business Plan. - Additional documents that must be attached when reporting on the implementation of the GMS approving the merger. - Additional requirements for Companies intending to cease their business activities, namely not being in the process of restructuring and having settled their obligations. - Additional documents to be attached include proof of settlement of taxes and other obligations to the State. - Companies shall have all the supporting documents in 20 HK if there some are missing. - Changes to the requirements for a dissolution application from a plan to settle the rights and obligations of the Debtor to a Company. - In the event of liquidation, the Board of Directors is required to prepare and submit a Closing Balance Sheet. The Company appoints a person in charge and employees as a task force to serve the interests of the Debtor and the public. The Company holds a GMS to decide on the dissolution and establish a Liquidation Team, which must obtain OJK approval. The Board of Directors must submit a request for approval along with a list of required documents. - Working capital financing can be conducted through purchases with installment payments. - Regarding payment methods, investment financing must be conducted through face-to-face meetings. Working capital and multipurpose financing can be conducted through face-to-face meetings or not. - Changes to requirements related to working capital financing activities through business capital facilities and multipurpose financing through fund facilities, with assessments based on the position at the end of December. - Financing Companies are required to have a Core Capital to Paid-in Capital ratio of at least 50%.	The implementation of POJK 46 of 2024 has impacted the Company's capital structure due to the redefinition of core capital classifications. As a proactive measure, the Company is currently implementing a strategic action plan through capital increases and the restructuring of perpetual bonds to ensure compliance with the Minimum Paid-in Core Capital (MIMD) threshold, both for the minimum ratio of 50% in accordance with applicable regulations. These corrective measures demonstrate the Company's commitment to maintaining regulatory compliance while ensuring operational stability and sustainable business growth.



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Penjelasan Perubahan Explanation of Changes	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
2.	POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 2 November 2025 POJK Number 19 of 2025 concerning Ease of Access to Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises. This regulation takes effect on November 2, 2025.	1. Penguatan kewajiban penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan target yang lebih terukur dan bertahap 2. Perluasan skema pembiayaan (<i>supply chain financing, channeling, joint financing</i>, dan ekosistem digital) 3. Penyederhanaan persyaratan dan percepatan proses pengajuan pembiayaan 4. Pemanfaatan data alternatif untuk mendukung <i>credit scoring</i> UMKM 5. Penguatan peran lembaga penjaminan kredit untuk menurunkan risiko pembiayaan 6. Pendorongan digitalisasi dalam proses pembiayaan dan integrasi dengan ekosistem keuangan 7. Pemberian insentif dan penerapan pengawasan bagi lembaga jasa keuangan terkait penyaluran pembiayaan UMKM 8. Peningkatan kewajiban pelaporan, transparansi, dan <i>monitoring</i> kualitas pembiayaan UMKM 1. Strengthening the obligation to distribute financing to MSMEs with more measurable and gradual targets. 2. Expansion of financing schemes (<i>supply chain financing, channeling, joint financing</i>, and digital ecosystems). 3. Simplifying requirements and accelerating the financing application process. 4. Utilizing alternative data to support MSME credit scoring. 5. Strengthening the role of credit guarantee institutions to reduce financing risks. 6. Encouraging digitalization in the financing process and integration with the financial ecosystem. 7. Providing incentives and implementing supervision for financial services institutions related to the distribution of MSME financing. 8. Increasing reporting requirements, transparency, and monitoring of the quality of MSME financing.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.
4.	Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PADK) Nomor 45/PADK.06/2025 Tahun 2025. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2027. Regulation of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (PADK) Number 45/PADK.06/2025 of 2025. This regulation takes effect on July 1, 2027.	1. Pencabutan SEOJK 3/SEOJK.05/2016 dan SEOJK 26 /SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan 2. Penambahan Formulir 2103 – Rincian Pembiayaan Buy Now Pay Later 3. Penambahan Formulir 2105 – Rincian Pengalihan Piutang 4. Penambahan Formulir 2107 – Rincian Penghapusan Piutang 1. Revocation of SEOJK 3/SEOJK.05/2016 and SEOJK 26/SEOJK.05/2019 concerning Monthly Reports of Financing Companies 2. Addition of Form 2103 – Buy Now Pay Later Financing Details 3. Addition of Form 2105 – Receivables Transfer Details 4. Addition of Form 2107 – Receivables Write-Off Details	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.
5.	POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (<i>Buy Now Pay Later</i>/BNPL). Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 5 Desember 2025. POJK Number 32 of 2025 concerning the Implementation of Buy Now Pay Later (BNPL). This regulation takes effect on December 5, 2025.	1. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian BNPL. 2. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama. 3. Perusahaan wajib memberikan informasi kepada nasabah terkait sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, dan/atau informasi lain. 4. Perusahaan menyusun laporan penyelenggaraan BNPL kepada OJK. 5. Penghentian penyelenggaraan BNPL dilakukan atas dasar inisiatif Perusahaan dan perintah OJK. 6. OJK dapat menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan dalam penyelenggaraan BNPL. 1. Companies may establish specific policies for assessing the eligibility of BNPL. 2. Financing companies may collaborate with other parties to provide BNPL under a cooperation agreement. 3. Companies are required to provide customers with information regarding the source of financing funds, installment amounts and frequencies, and/or other information. 4. Companies must prepare reports on BNPL provision to the Financial Services Authority (OJK). 5. Termination of BNPL provision is carried out at the Company's initiative and upon the OJK's instruction. 6. The OJK may set a maximum limit on the economic benefits to Companies from providing BNPL.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Penjelasan Perubahan Explanation of Changes	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
6.	POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 22 Desember 2025. POJK Number 35 of 2025 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies. This regulation takes effect on December 22, 2025.	- Persyaratan perubahan kepemilikan Pemegang Saham yang wajib dilaporkan dan/atau mendapat persetujuan OJK. - Lampiran dokumen untuk laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan. - Pengecualian pembiayaan investasi yang wajib dilakukan melalui tatap muka secara fisik. - Perubahan syarat pembiayaan modal usaha dan fasilitas dana (<i>cash loan</i>) menjadi 50%. - Perubahan ketentuan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan fasilitas dana (<i>cash loan</i>). - Perubahan layanan pembiayaan digital yang dapat melalui Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna tanpa melalui tatap muka secara fisik dan melalui Pembiayaan Investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik. - Requirements for changes in Shareholder ownership that must be reported and/or approved by the Financial Services Authority (OJK). - Document attachments for the report on the implementation of the GMS approving the Merger. - Exceptions to investment financing that must be conducted through physical meetings. - Changes to the requirements for working capital financing and cash loan facilities to 50%. - Changes to the provisions for working capital financing through working capital facilities and cash loans. - Changes to digital financing services that can be provided through Working Capital Financing and Multipurpose Financing without physical meetings, and through Investment Financing without physical meetings.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.
7.	POJK Nomor 42 Tahun 2025 Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 22 Desember 2025. POJK Number 42 of 2025 concerning Financial Reporting Integrity of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. This regulation takes effect on December 22, 2025.	- Kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. - Pembentukan unit kerja atau penunjukan pejabat eksekutif - Komitmen Direksi dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi. - Kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan pengendalian internal ke OJK. - Kewajiban Dewan Komisaris untuk menuangkan hasil pengawasan dalam laporan pengawasan rencana bisnis. - Tanggung jawab Komite Audit dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Laporan Keuangan. - Larangan bagi pihak terkait yang berkepentingan beserta dengan sanksinya. - Internal control policies and procedures in the financial reporting process. - Establishment of work units or appointment of executive officers. - Commitment of the Board of Directors in a Statement Letter signed by the Board of Directors. - Obligation of the Board of Directors to submit internal control reports to the Financial Services Authority (OJK). - Obligation of the Board of Commissioners to include the results of supervision in a business plan oversight report. - Responsibility of the Audit Committee in monitoring and evaluating the Financial Reports. - Prohibitions for related parties and their sanctions.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Penjelasan Perubahan Explanation of Changes	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
8.	POJK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 18 Desember 2025. POJK Number 38 of 2025 concerning Lawsuits by the Financial Services Authority for Consumer Protection in the Financial Services Sector. This regulation takes effect on December 18, 2025.	1. OJK berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen. 2. Gugatan diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. 3. Gugatan bertujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK 4. OJK dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan. 5. OJK mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan. 1. The Financial Services Authority (OJK) has the authority to provide legal defense by filing a lawsuit for consumer protection. 2. The lawsuit is filed based on an unlawful act. 3. The lawsuit aims to recover the assets of the injured party from the party causing the loss and/or to obtain compensation from the party causing the loss to consumers and/or financial services institutions. 4. The OJK may coordinate with external parties in the lawsuit filing process. 5. The OJK will announce a list of consumers who will be included in the lawsuit.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.
9.	POJK Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 19 Desember 2025. POJK Number 39 of 2025 concerning Procedures for Collecting Administrative Sanctions in the Form of Fines in the Financial Services Sector. This regulation takes effect on December 19, 2025.	1. OJK menetapkan penagihan SABD. 2. Pihak yang dikenakan SABD wajib melakukan pembayaran kepada OJK. 3. Pelaksanaan pembayaran wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat SABD ditetapkan atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan ditetapkan. 4. Setiap hari keterlambatan pembayaran SABD dari jangka waktu dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh OJK, dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh OJK. 5. Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan keberatan atas SABD yang ditetapkan OJK dengan terlebih dahulu melakukan pelunasan SABD. 6. Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. 1. The OJK determines the collection of SABD. 2. The party subject to the SABD is required to make payment to the OJK. 3. Payment must be made within a maximum of 30 (thirty) days after the SABD letter is issued or the OJK's response letter to the objection request is issued. 4. Each day of delay in SABD payment within the stipulated period will be subject to interest of 2% (two percent) per month of the SABD amount determined by the OJK, up to a maximum of 48% (forty-eight percent) of the SABD amount determined by the OJK. 5. The party subject to the SABD may file an objection to the SABD determined by the OJK by first making full payment of the SABD. 6. The party subject to the SABD may request a refund of the overpayment.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan. There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.
10.	POJK Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Regulasi ini berlaku efektif per tanggal 10 November 2025.	POJK 25 Tahun 2025 mengubah POJK 49/2024 terkait pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan jasa keuangan lainnya. Peraturan ini memberikan tambahan masa peralihan bagi LKM untuk memenuhi parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor, merespons perlambatan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemampuan lembaga keuangan.	Tidak ada dampak signifikan terhadap Kegiatan usaha dan/atau Laporan Keuangan Perseroan.



No.	Peraturan Terkait Related Regulations	Penjelasan Perubahan Explanation of Changes	Dampak Signifikan terhadap Kegiatan Usaha Perusahaan dan/atau Laporan Keuangan Significant Impact on the Company's Business Activities and/or Financial Reports
	POJK Number 25 of 2025 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 49 of 2024 concerning Supervision, Determination of Supervision Status, and Follow-up of Supervision of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. This regulation takes effect on November 10, 2025.	POJK No. 25 of 2025 amends POJK No. 49 of 2024 regarding the supervision of Microfinance Institutions (MFIs) and other financial services. This regulation provides MFIs with an extended transition period to meet the equity-to-paid-in-capital ratio requirements, in response to the economic slowdown that has impacted the financial institutions' ability to meet these requirements.	There is no significant impact on the Company's business operations and/or financial statements.

PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2025

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

CHANGES TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS IN 2025

During 2025, there were no changes in accounting policies that had a material impact on the Company's financial performance.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Perseroan melakukan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 28/POJK.05/2020 dan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020. Berdasarkan regulasi tersebut, penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) faktor utama, yaitu aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Profil Risiko, Rentabilitas, dan Permodalan.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*), tingkat kesehatan Perseroan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

COMPANY HEALTH LEVEL

The Company conducted a soundness assessment of its Financing Companies for 2025, referring to the provisions of POJK No. 28/POJK.05/2020 and SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020. Based on these regulations, the assessment was conducted on four main factors: Good Corporate Governance, Risk Profile, Profitability, and Capitalization.

Based on the self-assessment, the Company's soundness level for 2025 is as follows:

No.	Faktor Penilaian Assessment Factor	Peringkat Individual Individual Rating
1.	Tata kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance	Peringkat 3 Rank 3
2.	Profil risiko Risk Profile	Peringkat 4 Rank 4
3.	Rentabilitas Profitability	Peringkat 4 Rank 4
4.	Permodalan Capitalization	Peringkat 5 Rank 5
Peringkat Tingkat Kesehatan Perseroan Company Health Rating		Peringkat 4 Rank 4

06

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Komitmen Penerapan GCG Commitment to Implementing GCG	200
Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar GCG Implementation of Basic GCG Principles	203
Penilaian GCG Tahun 2025 2025 GCG Assessment	206
Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism	209
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") General Meeting of Shareholders ("GMS")	212
Dewan Komisaris Board of Commissioners	232
Komisaris Independen Independent Commissioner	245
Direksi Board of Directors	248
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	266
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration Policy for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors	270
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Affiliated Relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders	276
Komite Pendukung Dewan Komisaris Supporting Committees of the Board of Commissioners	279
Komite Audit Audit Committee	279
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	288
Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee	296

Komite-Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Directors	304	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	391
Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Asset and Liability Management Committee	304	Pemberian Dana/Donasi untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision of Funds/Donations for Social and Political Activities	393
Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee	316	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Long-Term Performance-Based Compensation Policy	393
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	325	Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Information Disclosure Policy Regarding Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners	394
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	333	Praktik <i>Bad Corporate Governance</i> Bad Corporate Governance Practices	394
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	337	Pelanggaran Hukum, terkait Perburuhan/ Tenaga Kerja/Konsumen/Ketidakmampuan Melunasi Kewajiban/Perdagangan/Persaingan/Lingkungan Hidup Violation of Law, Related to Labor/ Workforce/Consumers/Inability to Settle Obligations/Trade/Competition/Environment	395
Audit Eksternal External Audit	345	Kebijakan untuk Mencegah Terjadinya <i>Insider Trading</i> Policy to Prevent Insider Trading	395
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	347	Kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok Policy on Supplier Selection and Capability Improvement	396
Fungsi Kepatuhan Compliance Function	352	Kebijakan tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Policy on Fulfillment of Creditors' Rights	396
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	358		
Perkara Hukum Legal Cases	366		
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	367		
Kode Etik Code of Ethics	368		
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	372		
Kebijakan Antikorupsi, Antisuap, dan Antigratifikasi Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Anti-Gratification Policy	379		
Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) Program	387		



Komitmen Penerapan GCG

Commitment to Implementing GCG



“Perseroan meyakini bahwa penerapan praktik *governance* yang disiplin dan terintegrasi menjadi landasan kokoh untuk menciptakan ketahanan bisnis serta mampu menjaga ritme usaha tetap terkendali di tengah tantangan yang semakin kompleks.”

“The Company believes that the implementation of disciplined and integrated governance practices serves as a solid foundation for building business resilience and maintaining a steady business pace amid increasingly complex challenges.”



KOMITMEN SELURUH INSAN PERSEROAN TERHADAP PENERAPAN GCG

PT KB Finansia Multi Finance (“Perseroan”) berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – “GCG”) secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta regulasi OJK. Penerapan GCG menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan guna memastikan pengelolaan perusahaan yang sehat, *prudent*, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.

Komitmen manajemen tercermin melalui penetapan kebijakan, struktur tata kelola, serta pengawasan yang memadai untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF). Manajemen secara berkesinambungan memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta fungsi kepatuhan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan meminimalkan potensi risiko operasional, hukum, dan reputasi.

Seluruh karyawan Perseroan memiliki kewajiban untuk mendukung penerapan GCG melalui kepatuhan terhadap kode etik, pedoman perilaku, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan GCG guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta pengelolaan benturan kepentingan dalam setiap aktivitas kerja.

Melalui komitmen yang kuat dari manajemen dan karyawan, Perseroan memastikan bahwa penerapan GCG tidak hanya bersifat kepatuhan terhadap regulasi (*compliance-based*), tetapi juga menjadi bagian dari budaya Perseroan. Implementasi GCG yang efektif diharapkan dapat mendukung kesinambungan usaha, memperkuat kepercayaan regulator dan pemangku kepentingan, serta menjaga kinerja Perseroan tetap sehat dan berkelanjutan.

COMMITMENT OF ALL COMPANY PERSONNEL TO THE IMPLEMENTATION OF GCG

PT KB Finansia Multi Finance (the “Company”) is committed to consistently and sustainably implementing the principles of good corporate governance (“GCG”) in accordance with applicable laws and regulations and the Financial Services Authority (“OJK”) regulations. The implementation of GCG lays the primary foundation for the Company’s business operations, ensures sound, prudent management, and safeguards the interests of stakeholders.

Management’s commitment is reflected in the establishment of policies, governance structures, and adequate oversight to ensure all business activities are conducted in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness (TARIF). Management continuously strengthens the effectiveness of the internal control system, risk management, and compliance functions to ensure compliance with OJK regulations and minimize potential risks of operational, legal, and reputational risks.

It is obligatory for all employees to support the implementation of GCG by adhering to the applicable code of ethics, code of conduct, and standard operating procedures. The Company regularly disseminates and internalizes its GCG policies to increase employee understanding and awareness of the application of prudential principles and the management of conflicts of interest in all work activities.

Through the Management’s and employees’ unwavering commitment, the Company ensures that GCG implementation is not only compliance-based but also an integral part of the company culture. Effective GCG implementation is expected to support business continuity, strengthen the trust of regulators and stakeholders, and maintain the Company’s healthy and sustainable performance.



DASAR HUKUM DAN/ATAU LANDASAN PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di Perseroan dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (“UU 40/2007”);
2. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (“POJK 48/2024”);
3. Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (“SEOJK 28/2025”);
4. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (“POJK 28/2020”);
5. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (“SEOJK 11/2020”);
6. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 55/2015”);
7. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 34/2014”);
8. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK 56/2015”);
9. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35/2014”);
10. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”);
11. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
12. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 8/2015”);
13. Anggaran Dasar Perseroan; dan
14. Pedoman GCG Perseroan.

LEGAL BASIS AND/OR FOUNDATION FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG

The Company implements GCG consistently with reference to the provisions of the Financial Services Authority (“OJK”) and other relevant laws and regulations, including but not limited to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation (“Law 40/2007”);
2. OJK Regulation No. 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (“POJK 48/2024”);
3. OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.06/2025 concerning Reports on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (“SEOJK 28/2025”);
4. OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Health Level of Non-Bank Financial Services Institutions (“POJK 28/2020”);
5. OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Health Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies (“SEOJK 11/2020”);
6. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee (“POJK 55/2015”);
7. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies (“POJK 34/2014”);
8. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters (“POJK 56/2015”);
9. OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (“POJK 35/2014”);
10. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31/2015”);
11. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (“POJK 33/2014”);
12. OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies (“POJK 8/2015”);
13. The Company’s Articles of Association; and
14. The Company’s GCG Guidelines.



Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar GCG

Implementation of Basic GCG Principles

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan mengacu pada ketentuan regulator, khususnya POJK 48/2024 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan dijabarkan sebagai berikut:

The implementation of GCG principles in the Company refers to regulatory provisions, specifically OJK Regulation 48/2024 concerning the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. In line with these provisions, the implementation of GCG principles within the Company is outlined as follows:

Penjelasan berdasarkan POJK 48/2024 Description based on POJK 48/2024	Implementasi di Perseroan Tahun 2025	Implementation in the Company in 2025
Keterbukaan Transparency		
Merupakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. It is openness in the decision-making process and openness in disclosing and providing information that is relevant and easily accessible to stakeholders.	- Perseroan memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan strategis yang relevan bagi Pemangku Kepentingan. - Perseroan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan melalui situs web resmi www.kreditplus.com, sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. - Perseroan menyampaikan laporan keuangan dan laporan-laporan terkait kepatuhan kepada regulator secara transparan dan tepat waktu untuk mendukung kepercayaan Pemangku Kepentingan. - Perseroan mengadakan pertemuan rutin dengan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan perkembangan dan informasi penting terkait kinerja serta rencana bisnis. - Perseroan menerapkan sistem pengelolaan informasi yang efektif untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan sudah diverifikasi dan sesuai dengan standar GCG.	- The Company ensures transparency in the strategic decision-making process that is relevant to Stakeholders. - The Company provides accurate, relevant, and easily accessible information to Stakeholders through the official website, www.kreditplus.com, in accordance with applicable regulations and standards. - The Company submits financial reports and reports related to compliance to regulators in a transparent and timely manner to support Stakeholder trust. - Perseroan mengadakan pertemuan rutin dengan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan perkembangan dan informasi penting terkait kinerja serta rencana bisnis. - Perseroan menerapkan sistem pengelolaan informasi yang efektif untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan sudah diverifikasi dan sesuai dengan standar GCG.
Akuntabilitas Accountability		
Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. It is the clarity of function and implementation of accountability.	- Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan selaras dengan visi dan misi Perseroan. - Setiap individu yang menjabat di organ Perseroan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya, serta memahami perannya dalam penerapan GCG. - Perseroan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif guna mendukung sistem pengendalian internal. - Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang mengatur karyawan sampai dengan Direksi untuk memperkuat pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.	- The Company has determined the duties and responsibilities of each Company organ in line with the Company's vision and mission. - Each individual serving in the Company organ has the competency that is in accordance with their responsibilities and understands their role in implementing GCG. - The Company has established effective Standard Operating Procedures (SOP) to support the internal control system. - The Company has Company Regulations, a Code of Ethics, and a Code of Conduct that regulates employees up to the Board of Directors to strengthen the implementation of GCG consistently and sustainably.
Tanggung Jawab Responsibility		
Merupakan tanggung jawab kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik It is the responsibility of management to comply with the provisions of laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.	- Perseroan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.	- The Company is managed in accordance with applicable laws and regulations. - Keberhasilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.



Penjelasan berdasarkan POJK 48/2024 Description based on POJK 48/2024	Implementasi di Perseroan Tahun 2025	Implementation in the Company in 2025
Independensi Independence		
Keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. A state that is managed independently and professionally and is free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.	• Perseroan dikelola secara mandiri, berpedoman pada visi dan misi, serta tidak terdapat intervensi oleh pemegang saham, Dewan Komisaris, atau pihak lain di luar batas kewenangannya. • Menghindari segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. • Pelaksanaan kegiatan atau transaksi yang memiliki benturan kepentingan wajib mengikuti ketentuan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau ketentuan lain yang berlaku.	• The Company is managed independently, guided by its vision and mission, and there is no intervention by shareholders, the Board of Commissioners, or other parties beyond its authority. • Avoids any activities that could potentially create a conflict of interest in the decision-making process. • The implementation of activities or transactions that involve a conflict of interest must comply with the provisions of POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and/or other applicable provisions.
Kewajaran Fairness		
Merupakan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. It is equality, balance and justice in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, provisions of laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices.	• Perseroan memastikan hak setiap pemangku kepentingan terpenuhi secara setara dan adil sesuai perjanjian, regulasi, dan standar etika yang berlaku. • Perseroan menyediakan akses informasi yang transparan dan akurat bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang tepat. • Perseroan mengelola hubungan kerja yang adil dengan karyawan, termasuk pengembangan karier dan kompensasi yang setara sesuai standar industri. • Perseroan menanggapi kebutuhan dan masukan Pemangku Kepentingan secara objektif, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan Perseroan. • Perseroan menerapkan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan.	• The Company ensures that the rights of each Stakeholder are fulfilled equally and fairly in accordance with applicable agreements, regulations, and ethical standards. • The Company provides transparent and accurate access to information for Stakeholders to make the right decisions. • The Company manages fair working relationships with employees, including career development and equal compensation according to industry standards. • The Company responds to the needs and input of Stakeholders objectively, taking into account the balance of the Company's interests. • The Company implements an inclusive work environment and respects the rights of Stakeholders.

Selain mengacu pada regulasi OJK, Perseroan juga mengadopsi prinsip-prinsip GCG berbasis etika sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2021. Dalam praktiknya, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama PUGKI secara konsisten untuk memastikan pengelolaan Perseroan tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.

While adhering to OJK regulations, the Company also adopts ethics-based GCG principles as formulated in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021. In practice, the Company consistently applies GCG principles based on the four main pillars of PUGKI to ensure that the Company's management remains transparent, accountable, and oriented towards stakeholder interests.



Pilar-pilar ini dirangkum secara komprehensif dalam tabel berikut:

These pillars are comprehensively summarized in the following table:

Penjelasan Prinsip GCG Explanation of GCG Principles	Implementasi Prinsip GCG di Perseroan Implementation of GCG Principles in the Company
Pilar I: Perilaku Beretika Pillar I: Ethical Behavior	
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the Company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. The Company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each company organ does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.	1. Mengedepankan prinsip transparansi dan integritas dalam seluruh kegiatan bisnis dengan berlandaskan <i>Code of Conduct</i>. 2. Menerapkan nilai-nilai inti (<i>core values</i>) sebagai pedoman dalam operasional dan proses pengambilan keputusan di Perseroan. 3. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui prinsip keadilan dan keberlanjutan. 4. Memastikan setiap organ Perseroan menjalankan tugasnya secara profesional dan independen untuk menghindari konflik kepentingan serta pengaruh eksternal.
Pilar II: Transparansi Pillar II: Transparency	
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting its business, the Company provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only matters required by law but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.	1. Menjamin keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan melalui publikasi di situs web resmi Perseroan. 2. Menyampaikan informasi material yang akurat, relevan, dan tepat waktu melalui berbagai saluran komunikasi resmi. 3. Melaksanakan RUPS dengan transparansi serta menyediakan akses informasi sebelum dan setelah rapat berlangsung. 4. Menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku guna memastikan akurasi dan akuntabilitas. 5. Mempublikasikan Laporan Tahunan yang mencerminkan penerapan prinsip GCG serta komitmen terhadap keberlanjutan.
Pilar III: Akuntabilitas Pillar III: Accountability	
Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company must be accountable for its performance in a transparent and fair manner. Therefore, the Company must be managed properly, measurably, and in accordance with the Company's interests, while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	1. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip GCG guna menciptakan tata kelola yang optimal. 2. Menyajikan laporan kinerja yang akurat serta transparan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. 3. Mengelola Perseroan dengan profesionalisme dan perencanaan yang terstruktur agar sejalan dengan kepentingan bersama. 4. Menjamin proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Mendorong peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam mengawasi kinerja Direksi secara independen dan objektif.



Penjelasan Prinsip GCG Explanation of GCG Principles	Implementasi Prinsip GCG di Perseroan Implementation of GCG Principles in the Company
Pilar IV: Keberlanjutan Pillar IV: Sustainability	
Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupannya dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that aligns in line with business interests and the sustainable development agenda.	1. Mengadopsi kebijakan ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi guna mendukung keberlanjutan bisnis. 2. Menyediakan produk inovatif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pasar berkelanjutan. 3. Membangun pendekatan bisnis yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. 4. Menjalankan inisiatif tanggung jawab sosial dengan fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 5. Berpartisipasi aktif dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara lebih luas. 1. Adopt environmentally friendly policies through energy efficiency, waste management, and emission reduction to support business sustainability. 2. Provide innovative products oriented toward environmental sustainability to meet sustainable market needs. 3. Develop a business approach that integrates environmental, social, and governance (ESG) aspects to align with sustainability principles. 4. Implement social responsibility initiatives with a focus on education, healthcare, and community economic empowerment. 5. Actively participate in collaboration with stakeholders to achieve broader sustainability goals.

Penilaian GCG Tahun 2025

2025 GCG Assessment

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) GCG sebagai bagian dari kewajiban pemenuhan ketentuan regulator serta dalam rangka mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan. Penilaian GCG tersebut disampaikan dalam Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG bertujuan untuk memastikan tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG telah dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi Perseroan. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan guna mempersiapkan dan menyempurnakan infrastruktur, struktur organisasi, serta kebijakan internal agar penerapan GCG dapat berjalan secara efektif, terukur, dan komprehensif.

In 2025, the Company conducted a GCG Self-Assessment as part of its regulatory compliance obligations and to support the sustainable implementation of good corporate governance. The GCG assessment is presented in the Company Health Assessment Report in accordance with applicable regulations.

The GCG Self-Assessment aims to ensure the consistent implementation of GCG principles at all levels of the Company's organization. Furthermore, the assessment results are used as a basis for identifying areas for improvement needed to prepare and refine infrastructure, organizational structure, and internal policies to ensure effective, measurable, and comprehensive GCG implementation.



Dalam melaksanakan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2025, Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta regulasi OJK, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK 28/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB);
2. POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
3. SEOJK 28/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun; dan
4. SEOJK 11/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

In conducting the 2025 GCG Self-Assessment, the Company referred to the provisions of applicable laws and regulations and OJK regulations, including but not limited to:

1. POJK 28/2020 on the Assessment of the Financial Health of Non-Bank Financial Institutions (LJKNB);
2. POJK 48/2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Institutions;
3. SEOJK 28/2025 on the Implementation of Risk Management for Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Funds; and
4. SEOJK 11/2020 on the Assessment of the Financial Health of Financing Companies and Sharia Financing Companies.

DASAR PENILAIAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Metode penilaian GCG secara *self-assessment* pada dasarnya merupakan mekanisme *check and balance* yang dilakukan secara sistematis untuk memetakan kekuatan dan kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan regulator.

BASIS FOR ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The self-assessment method for GCG assessment is essentially a systematic check-and-balance mechanism to identify the strengths and weaknesses in the implementation of GCG principles within the Company. This assessment aims to ensure that good corporate governance is implemented consistently and in accordance with regulatory requirements.

Dasar penilaian penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut ditinjau berdasarkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

The basis for assessing the implementation of GCG principles is reviewed based on three main aspects:

1

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Structure and Infrastructure Governance

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur GCG Perseroan agar proses penerapan prinsip GCG Perseroan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Assess the adequacy of the Company's GCG structure and infrastructure so that the process of implementing the Company's GCG principles produces outcomes that meet stakeholder expectations.

2

Proses Penerapan Tata Kelola Governance Implementation Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip GCG Perseroan dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Assess the effectiveness of the Company's GCG principles implementation process supported by adequate GCG structure and infrastructure to produce outcomes that meet stakeholder expectations.

3

Hasil Penerapan Tata Kelola Results of Implementation of Governance

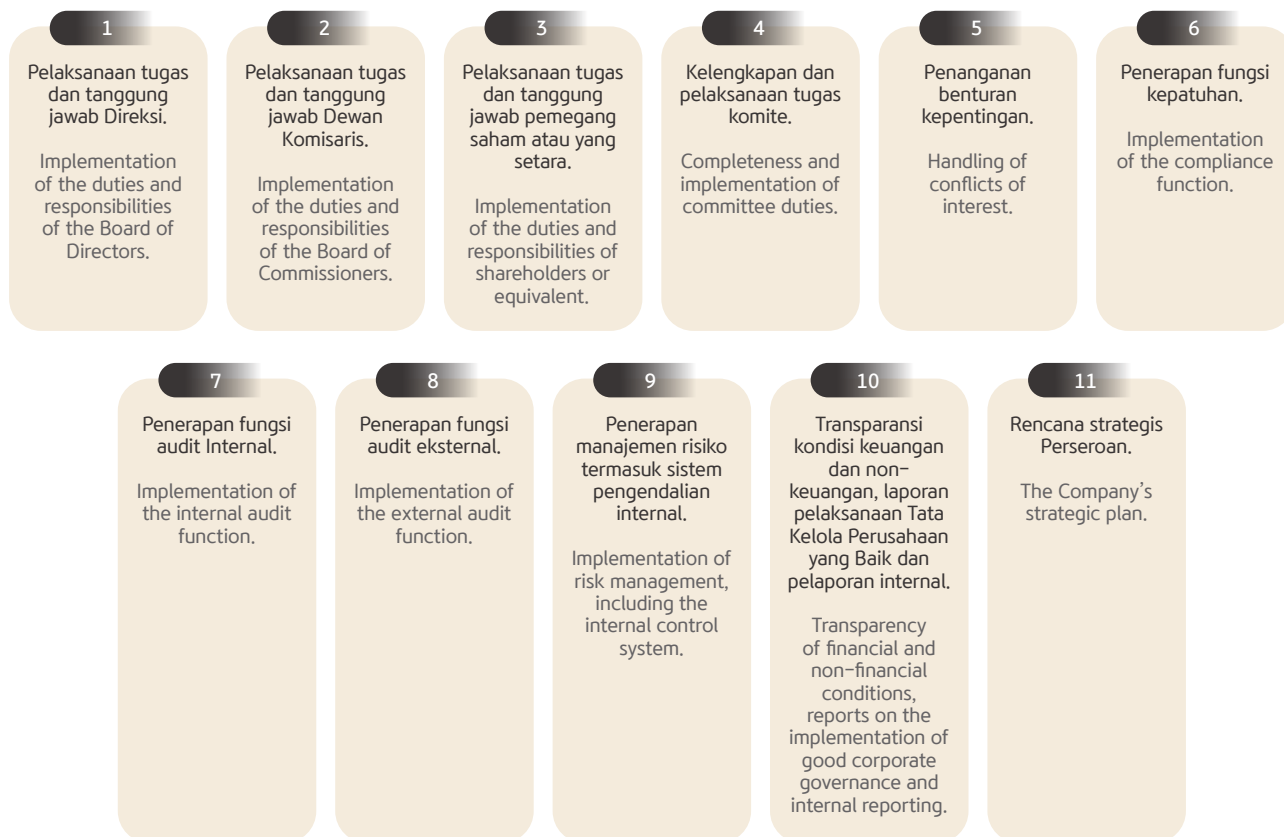
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan sebagai hasil proses penerapan prinsip GCG dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG.

Assessing the quality of outcomes that meet stakeholder expectations as a result of the process of implementing GCG principles supported by the adequacy of GCG structures and infrastructure.



KRITERIA PENILAIAN PENERAPAN GCG

Kriteria Penilaian Sendiri GCG Perseroan berpedoman pada indikator atau parameter yang ditetapkan dalam SEOJK 11/2020, yaitu:



GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT CRITERIA

The Company's GCG Self-Assessment Criteria are guided by the indicators or parameters set out in OJK Circular Letter 11/2020, namely:

HASIL PENILAIAN SELF-ASSESSMENT GCG TAHUN 2025

Hasil *Self-Assessment* GCG Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

2025 GCG SELF-ASSESSMENT RESULTS

The results of the Company's GCG Self-Assessment for the 2025 financial year are as follows:

Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilaian Sendiri	Self Assessment
Penilai Assessor	Pihak Internal Perseroan dengan melibatkan jajaran Direksi beserta Pejabat Fungsi Kepatuhan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.	The Company's internal parties involve the Board of Directors and Compliance Function Officers to produce a comprehensive and structured assessment of the effectiveness of the Company's governance implementation.
Periode Penilaian Assessment Period	1 Januari 2025 – 31 Desember 2025	January 1, 2025 – December 31, 2025
Tahun Buku Financial Year	2025	2025



No.	Aspek Aspect	Peringkat Rating	Kategori Category
1.	Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Aspects of Governance Structure and Infrastructure	3	Cukup Baik Pretty Good
2.	Aspek Proses Penerapan Tata Kelola Aspects of the Governance Implementation Process	3	Cukup Baik Pretty Good
3.	Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola Governance Implementation Result Aspect	3	Cukup Baik Pretty Good

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas penerapan GCG Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 13 Februari 2026 menunjukkan perolehan skor peringkat 3 (Cukup Baik). Penilaian tersebut diperoleh setelah melalui proses evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh terhadap penerapan GCG, yang mencakup berbagai aspek penilaian yang terbagi ke dalam 15 (lima belas) parameter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The results of the Company's Self-Assessment of GCG implementation for the 2025 fiscal year, submitted to the Financial Services Authority (OJK) on February 13, 2026, showed a score of 3 (Fair). This assessment was obtained after a comprehensive and thorough evaluation process of GCG implementation, which covered various assessment aspects divided into 15 (fifteen) parameters in accordance with applicable regulations.

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanism

Struktur tata kelola Perseroan mengacu pada UU 40/Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ tersebut menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh organ-organ pendukung guna memastikan penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan.

The Company's governance structure is based on Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, which establishes three main organs: the General Meeting of Shareholders ("GMS"), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These three organs carry out their roles and responsibilities in accordance with applicable regulations and are supported by supporting organs to ensure the effective and sustainable implementation of GCG.

Berikut disajikan gambaran struktur GCG yang diimplementasikan di Perseroan:

The following is an overview of the GCG structure implemented in the Company:

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") General Meeting of Shareholders ("GMS")

Merupakan organ yang memiliki kewenangan tertinggi, menetapkan arah strategis Perseroan.
It is the organ that has the highest authority, determining the strategic direction of the Company.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Direksi.
Carries out a supervisory function on the policies and performance of the Board of Directors.

Direksi Board of Directors

Bertanggung jawab atas manajemen operasional Perseroan.
Responsible for the operational management of the Company.



Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite pendukung, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Komite-komite tersebut berperan dalam membantu pelaksanaan fungsi pengawasan agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

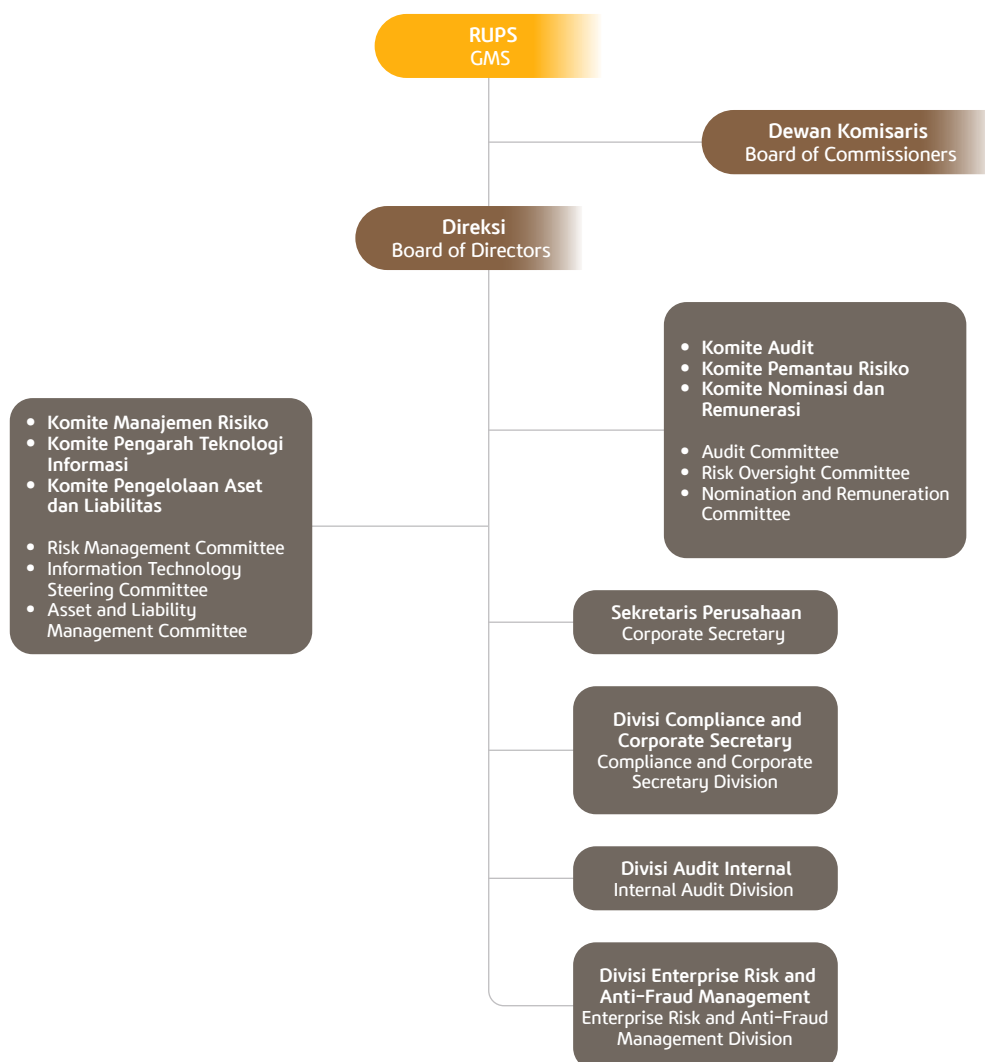
In carrying out its functions, the Board of Commissioners is supported by several supporting committees, including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee. These committees play a role in assisting the implementation of the supervisory function, ensuring it runs effectively and in accordance with applicable regulations.

Sementara itu, Direksi mengelola kegiatan usaha Perseroan bersama dengan divisi-divisi di bawahnya serta didukung oleh komite-komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Manajemen Risiko.

Meanwhile, the Board of Directors manages the Company's business activities together with its subordinate divisions and is supported by committees established to assist in carrying out the Board of Directors' duties and responsibilities, including the Asset and Liability Management Committee, the Information Technology Steering Committee, and the Risk Management Committee.

Berikut disajikan gambaran struktur GCG Perseroan secara lengkap:

The following is a complete overview of the Company's GCG structure:





MEKANISME DAN *SOFT STRUCTURE* GCG

Dalam rangka memastikan penerapan GCG berjalan secara efektif dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan OJK, Perseroan membangun dan mengimplementasikan mekanisme tata kelola yang terstruktur dengan dukungan infrastruktur GCG yang memadai. Mekanisme ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan peran dan fungsi seluruh organ utama serta organ pendukung Perseroan sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan secara *prudent*, transparan, dan akuntabel.

Penerapan mekanisme GCG di Perseroan didukung oleh keberadaan kebijakan, pedoman, dan prosedur internal (*soft structure* GCG) yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas operasional di seluruh tingkatan organisasi.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan telah memiliki berbagai perangkat tata kelola, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Direksi, Pedoman Dewan Komisaris, Piagam Audit Internal, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Kebijakan Pengendalian Internal, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kebijakan Penerapan Strategi Anti-*Fraud*, Peraturan Kepatuhan, Kode Etik, serta pedoman komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.

Seluruh perangkat tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kebijakan dan pedoman tersebut dilakukan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas mekanisme GCG dalam mendukung pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perseroan.

Melalui mekanisme GCG yang terintegrasi dan berbasis regulasi tersebut, Perseroan berupaya menumbuhkan budaya tata kelola yang kuat di seluruh organisasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung kesinambungan usaha Perseroan secara jangka panjang.

GCG MECHANISM AND *SOFT STRUCTURE*

To ensure the effective and sustainable implementation of GCG in accordance with OJK regulations, the Company has established and implemented a structured governance mechanism supported by adequate GCG infrastructure. This mechanism is designed to support the roles and functions of all key and supporting organs of the Company, ensuring prudent, transparent, and accountable business management.

The implementation of GCG mechanisms in the Company is supported by the existence of internal policies, guidelines, and procedures (GCG *soft structures*) that serve as a reference for decision-making and operational activities at all levels of the organization.

As of the end of 2025, the Company had established a comprehensive set of governance instruments, including the Articles of Association, Corporate Governance Manual, Board of Directors Charter, Board of Commissioners Charter, Internal Audit Charter, Risk Management Policy, Whistleblowing System Policy, Internal Control Policy, Anti-Bribery Management System Guidelines, Anti-Fraud Strategy Policy, Compliance Regulations, Code of Conduct, as well as the charters of committees under the Board of Directors and the Board of Commissioners.

All of these instruments are formulated with reference to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, and are aligned with applicable laws and regulations. These policies and guidelines are implemented consistently and evaluated periodically to ensure the effectiveness of GCG mechanisms in supporting the Company's risk management, internal control, and compliance.

Through these integrated, regulation-based GCG mechanisms, the Company strives to foster a strong culture of governance throughout the organization, strengthen stakeholder trust, and support the Company's long-term business sustainability.



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

General Meeting of Shareholders (“GMS”)

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ lainnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis terkait Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**
RUPST diselenggarakan secara wajib setiap tahun untuk membahas dan mengambil keputusan atas agenda-agenda yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

RUPSLB diselenggarakan apabila diperlukan untuk mengambil keputusan atas hal-hal tertentu di luar agenda RUPST.

KEWENANGAN RUPS

Kewenangan RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU 40/2007, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan atau kebijakan OJK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, RUPS memiliki kewenangan untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan;
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan;
3. Mengambil keputusan yang menyangkut organisasi Perseroan, seperti perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan;
4. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Menetapkan gaji, tunjangan, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) is a Company organ that has powers not granted to other organs, as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. The GMS serves as a forum for shareholders to make strategic decisions regarding the Company.

In accordance with the Articles of Association, the Company holds two types of GMS:

1. **Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)**
The AGMS is held on a mandatory basis every year to discuss and make decisions on agenda items determined in accordance with applicable regulations.
2. **Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)**
The EGMS is held when necessary to make decisions on specific matters outside the AGMS agenda.

AUTHORITY OF THE GMS

The authority of the GMS is exercised in accordance with the provisions of Law 40/2007, the Company’s Articles of Association, and applicable laws and regulations, including the provisions and policies of the Financial Services Authority (OJK).

Based on these provisions, the GMS has the authority to:

1. Approve the Annual Report, including ratifying the Financial Statements and the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners, and to discharge the responsibilities of the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions;
2. Determine the use of the Company’s net profit;
3. Make decisions on the Company’s organization, such as amendments to the Articles of Association, mergers, amalgamations, acquisitions, separations, dissolutions, and liquidations of the Company;
4. Appoint and/or change the composition of the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Determine the salaries, allowances, and honorariums of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
6. Approve transactions containing a conflict of interest;



7. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan; dan
8. Memutuskan hal-hal lain yang menjadi kewenangan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements; and
8. Decide on other matters within the authority of the GMS in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

PERLAKUAN SETARA BAGI PARA PEMEGANG SAHAM

Meskipun berstatus sebagai perusahaan tertutup, Perseroan tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip Perlakuan Setara (*fairness*) bagi seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Perseroan memastikan bahwa setiap pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, setara, dan proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian akses informasi yang memadai dan tepat waktu, pelaksanaan RUPS secara transparan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa seluruh keputusan strategis yang memerlukan persetujuan pemegang saham dilaksanakan melalui RUPS sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan OJK.

Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal pembagian informasi material, penetapan kebijakan strategis, maupun pelaksanaan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, penerapan prinsip perlakuan setara bagi pemegang saham diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pemegang saham serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan secara *prudent* dan berintegritas.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS

Secara umum, prosedur penyelenggaraan RUPS di Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang setara bagi seluruh pemegang saham, sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan dapat dihadiri secara fisik maupun melalui media telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

EQUAL TREATMENT FOR SHAREHOLDERS

Despite its status as a private company, the Company remains committed to implementing the principle of equal treatment (*fairness*) for all shareholders in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles. The Company ensures that each shareholder receives fair, equal, and proportional rights and treatment commensurate with their share ownership.

This commitment is realized through providing adequate and timely access to information, transparent GMS meetings, and a decision-making mechanism that upholds the principles of accountability and compliance with the Company's Articles of Association. The Company also ensures that all strategic decisions requiring shareholder approval are implemented through the GMS in accordance with the authority stipulated in the Limited Liability Company Law and OJK regulations.

The Company is committed to preventing discrimination in the sharing of information, in the setting of strategic policies, and in transactions that could create conflicts of interest. Applying equal treatment for shareholders builds their trust and supports the Company's continuity with prudence and integrity.

GMS IMPLEMENTATION PROCEDURES

In general, the procedures for a GMS convention at the Company are carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, while still prioritizing the principles of transparency, accountability, and equal treatment for all shareholders, as follows:

1. The GMS shall be convened at the domicile of the Company and can be attended physically or via teleconference media or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.



2. Pemanggilan RUPS harus disampaikan kepada seluruh pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. Dalam panggilan ini harus dicantumkan waktu, tempat, dan agenda RUPS.
3. RUPS dianggap sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
4. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sejak waktu yang ditetapkan untuk penyelenggaraan RUPS, maka RUPS akan ditunda sampai tanggal yang jatuh 10 (sepuluh) hari sesudah itu pada waktu dan di tempat yang sama. Pada rapat yang ditunda tersebut, $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari semua saham ditempatkan dan disetor penuh yang hadir atau diwakili secara sah akan membentuk kuorum.
5. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Calling for the GMS must be delivered to all shareholders by registered letter and/or advertisement in a newspaper no later than 14 (fourteen) days prior the date of the GMS. This invitation must include the time, place, and agenda of the GMS.
3. The GMS is considered valid if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
4. In the event that the quorum is not present within 30 (thirty) minutes as of the specified time for convening the GMS, the meeting shall be adjourned to the date falling 10 (ten) days after such date and shall be convened at the same time and place. At the adjourned meeting, at least $\frac{1}{2}$ (one half) of all issued and paidup shares that are legally present or represented shall constitute a quorum.
5. All resolutions shall be adopted on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus. In the event that a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus cannot be reached, the resolution shall be adopted on the basis of an approving vote of at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of votes validly cast in the meeting.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA DI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 13 (tiga belas) kali RUPS Luar Biasa dengan uraian sebagai berikut:

Informasi RUPS Tahunan 2025 2025 Annual GMS Information

HOLDING OF THE ANNUAL GMS AND EXTRAORDINARY GMS IN 2025

In 2025, the Company held 1 (one) Annual GMS and 13 (thirteen) Extraordinary GMS with the following description:

Waktu Pelaksanaan
Time of Implementation

23 April 2025

April 23, 2025

Jenis Pelaksanaan
Type of Implementation

Sirkuler Tertulis

Written Circular

Kuorum
Quorum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") secara sirkuler ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") was circularly signed by all shareholders.

Pihak Independen Penghitung Suara
Independent Vote Counting Party

Perseroan tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara RUPS.

The Company did not use independent parties to count the votes at the GMS.



Hasil Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2025

Results of Decisions and Realization of the 2025 Annual GMS

No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Approval of the Company's Annual Financial Report for the financial year ending December 31, 2024	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (<i>member of BDO International Limited</i>) sesuai dengan laporannya tanggal 26 Maret 2025, dengan pendapat wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Approved and ratified the Company's Annual Financial Report for the financial year 2024 for the financial year ending on December 31, 2024, as audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) in accordance with its report dated March 26, 2025, with a fair opinion in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.	Terealisasi Realized
2.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 Approval of the Company's 2024 Annual Report	1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan 2024 yang telah disampaikan 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan Perseroan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode tahun buku 2024. 1. Accepted the submitted 2024 Annual Report. 2. Granted a release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Company during the 2024 financial year.	Terealisasi Realized
3.	Persetujuan terkait penggunaan laba/laba ditahan (tidak adanya pembagian dividen) Approval regarding the use of retained earnings (no dividend distribution)	Menyetujui penggunaan laba/laba ditahan (tidak adanya pembagian dividen). Approved the use of retained earnings (no dividend distribution).	Terealisasi Realized
4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik ("AP") yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") and a Public Accountant ("AP") appointed by the KAP to audit the Company for the financial year ending December 31, 2025.	1. Menyetujui penunjukan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (<i>member of BDO International Limited</i>) dan AP yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, di mana keputusan ini dengan mempertimbangkan rekomendasi dan keputusan Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan AP sebagai penanggung jawab atas laporan keuangan hasil audit Perseroan yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau mengundurkan diri atau adanya benturan kepentingan. 1. Approved the appointment of KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (a member of BDO International Limited) and the appointed Public Accountant (AP) to audit the Company for the financial year ending December 31, 2025, with this decision taking into account the recommendations and decisions of the Audit Committee and the Board of Commissioners of the Company. 2. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement KAP and/or AP in the event that the appointed KAP and AP responsible for the Company's audited financial statements are unable to complete their work properly or resign or there is a conflict of interest.	Terealisasi Realized
5.	Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Approval of the remuneration of the Company's Board of Commissioners and Directors.	Menyetujui: i) Besaran total remunerasi keseluruhan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah maksimal sebesar Rp39.700.000.000; dan ii) Besaran total remunerasi dan/atau honorarium keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah maksimal sebesar Rp1.270.000.000. Pemegang Saham memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian atas total remunerasi dan/atau honorarium yang disebutkan dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Approved: i. The total remuneration for all members of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year was set at a maximum of IDR39,700,000,000; and ii. The total remuneration and/or honorarium for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year was set at a maximum of IDR1,270,000,000. Shareholders authorized and delegated authority to the Board of Commissioners to make adjustments to the total remuneration and/or honorarium stated in the event of changes and/or additions to the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	Terealisasi Realized



Seluruh hasil keputusan RUPST 2025 telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, yang dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://www.kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/6808a8f06b5c0-summary-of-2025-agms.pdf>.

All the results of the 2025 AGMS decisions have been published on the Company's website, which can be accessed at the following link: <https://www.kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/6808a8f06b5c0-summary-of-2025-agms.pdf>.

Informasi RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Information on the 2025 Extraordinary GMS

Jenis Pelaksanaan Type of Implementation	Sirkuler	Circular
Kuorum Quorum	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") secara sirkuler ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.	The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") was circularly signed by all shareholders.
Pihak Independen Penghitung Suara Independent Vote Counting Party	Perseroan tidak menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara RUPS.	The Company did not use independent parties to count the votes at the GMS.

Hasil Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Results of Decisions and Realization of the 2025 Extraordinary GMS

No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Pengunduran Diri Presiden Komisaris, Agenda Pengangkatan, dan Perubahan Anggaran Dasar Resignation of the President Commissioner, Appointment Agenda, and Amendments to the Articles of Association	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Moon Cheol Kang atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menerima dan menyetujui perubahan AD Perseroan yakni Pasal 12.(2) dan 15.(3), sehingga Pasal 12 dan Pasal 15 menjadi sebagaimana tertera pada Lampiran yang dilampirkan Keputusan Sirkuler ini. 4. Menerima dan mengangkat Bapak Sang In Lee sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Menerima dan mengangkat Bapak Je Ui Jung sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan dari OJK terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
			6. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dan tunduk pada ketentuan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan <i>juncto</i> Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, oleh karena untuk pengangkatannya yang masih menunggu hasil <i>fit and proper test</i> dari OJK, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama: Sang In Lee^{*)} Komisaris Independen: Nursalam Andi Tabusalla Komisaris: Je Ui Jung^{*)} ^{*)} Berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari OJK. 7. Menerima dan menyetujui bahwa setelah efektifnya perubahan AD sebagaimana disebut pada keputusan nomor 3 di atas, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum Keputusan Sirkuler ini, akan mengikuti sisa masa jabatan dari pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 1. Accepted and approved the resignation of Mr. Moon Cheol Kang as President Commissioner of the Company effective as of the date of this Circular Decision. 2. Approved to grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Moon Cheol Kang for his supervisory and management duties and actions in the Company during his term of office and as long as what was done was acknowledged and approved by the Shareholders and reflected in the Company's Financial Report. 3. Accepted and approved the changes to the Company's Articles of Association, namely Article 12.(2) and 15.(3), so that Article 12 and Article 15 become as stated in the Attachment attached to this Circular Decision. 4. Accepted and appointed Mr. Sang In Lee as the Company's President Commissioner with a term of office for a period of 3 (three) years, which would only be effective from the date the person concerned passes the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority ("OJK") regarding his appointment as the Company's President Commissioner, without reducing the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time. 5. Accepted and appointed Mr. Je Ui Jung as Commissioner of the Company with a term of office for a period of 3 (three) years, which would only be effective from the date the person concerned passes the Fit and Proper Test from the OJK regarding his appointment as Commissioner of the Company, without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss him at any time. 6. In connection with the above decisions and subject to the provisions of Article 15 of the Company's articles of association in conjunction with OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, because the appointment awaited the results of the fit and proper test from the OJK, the composition of the Company's Board of Commissioners would be be as follows: President Commissioner: Sang In Lee^{*)} Independent Commissioner: Nursalam Andi Tabusalla Commissioner: Je Ui Jung^{*)} ^{*)} Effective from the date the person concerned passes the Fit and Proper Test from the OJK. 7. Accepted and agreed that after the effective change to the rticles of Association as referred to in decision number 3 above, the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners before this Circular Decision, would follow the remaining term of office of the appointment of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.	



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
2.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Persetujuan Transaksi Afiliasi atas Fasilitas KB Bukopin Approval of Affiliate Transactions for KB Bukopin Facilities	1. Menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Kredit antara PT Bank KB Bukopin ("KB Bukopin") dengan Perseroan dengan total plafon sebesar Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui dan tercermin di dalam <i>Terms Sheet/Offering Letter/Perjanjian Kredit</i> sebagaimana dianggap baik oleh Direksi. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada salah satu anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan dan Pemegang Saham untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut di atas dan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Approved to sign a Credit Agreement between PT Bank KB Bukopin ("KB Bukopin") and the Company with a total ceiling of IDR200,000,000,000 (Two Hundred Billion Rupiah) with the terms and conditions agreed and reflected in the Terms Sheet / Offering Letter / Credit Agreement as deemed appropriate by the Board of Directors. 2. Agreed to grant power of attorney, either jointly or individually to one of the members of the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to represent the Company and the Shareholders to make and sign the above agreement and to carry out all actions deemed necessary to achieve the aforementioned objectives.	Terealisasi Realized
3.	25 Februari 2025 February 25, 2025	Transaksi Afiliasi dengan PT Prima Sentra Abadi Affiliate Transaction with PT Prima Sentra Abadi	1. Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Prima Sentra Abadi ("PSA") sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen PSA untuk pembelian kendaraan dari PSA, dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dan wajar ("Perjanjian Kerja Sama"). 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada anggota Direksi kecuali Direktur terafiliasi yang terkena dampak (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dan/atau mengeluarkan dan/atau menyetujui dan/atau menandatangani Perjanjian Kerjasama atau dokumen tertulis sejenis yang mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama. 1. Accepted and approved the affiliate transaction between the Company and PT Prima Sentra Abadi ("PSA") in connection with the provision of financing facilities to PSA consumers for the purchase of vehicles from PSA, with the terms and conditions stated and agreed in the agreement made in good faith and fairly ("Cooperation Agreement"). 2. Agreed to grant authority to members of the Board of Directors except the affected affiliated Directors (either jointly or individually) to conduct further negotiations and/or issue and/or approve and/or sign a Cooperation Agreement or similar written document that has the same force and is an integral part of the Cooperation Agreement.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
4.	25 Februari 2025 February 25, 2025	Transaksi Afiliasi dengan PT Siwarga Indomedia Affiliate Transactions with PT Siwarga Indomedia	1. Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Siwarga Indomedia ("Pasarwarga") sehubungan dengan menjual dan membiayai kebutuhan konsumen perorangan dan/atau badan hukum yang akan membeli barang berupa semua barang berwujud yang dimiliki/disediakan oleh Pasarwarga secara <i>online</i>, di mana pembiayaan atas barang tersebut melalui Perseroan, dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dan wajar ("Perjanjian Kerja Sama"). 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada anggota Direksi kecuali Direktur terafiliasi yang terkena dampak (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dan/atau mengeluarkan dan/atau menyetujui dan/atau menandatangani Perjanjian Kerjasama atau dokumen tertulis sejenis yang mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama. 1. Accepted and approved affiliate transactions between the Company and PT Siwarga Indomedia ("Pasarwarga") in connection with selling and financing the needs of individual consumers and/or legal entities who will purchase goods in the form of all tangible goods owned/provided by Pasarwarga online, where financing for such goods was through the Company, with the terms and conditions stated and agreed upon in an agreement made in good faith and fairly ("Cooperation Agreement"). 2. Agreed to grant authority to members of the Board of Directors except the affected affiliated Directors (either jointly or individually) to conduct further negotiations and/or issue and/or approve and/or sign a Cooperation Agreement or similar written document that has the same force and is an integral part of the Cooperation Agreement.	Terealisasi Realized
5.	11 April 2025 April 11, 2025	Amandemen Kelima atas Jaminan Perusahaan Fifth Amendment to the Corporate Guarantee	1. Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp., sehubungan dengan Amandemen Kelima Perjanjian Penjaminan yang diberikan oleh KB Kookmin Card Corp., ("Perjanjian"). Perjanjian terlampir pada Keputusan Sirkuler ini. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan untuk membuat dan/atau menandatangani Perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas. 1. Accepted and approved the affiliated transaction between the Company and KB Kookmin Card Corp., in connection with the Fifth Amendment to the Guarantee Agreement provided by KB Kookmin Card Corp., ("Agreement"). The Agreement was attached to this Circular Decision. 2. Agreed to grant power of attorney, either jointly or individually to one of the members of the Company's Board of Directors with the right of substitution, to represent the Company to make and/or sign the Agreement as stated in point 1 above.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
6.	3 Juli 2025 July 3, 2025	Pengunduran Diri dan Pengangkatan Presiden Direktur serta Pengangkatan Kembali Komisaris Independen Resignation and Appointment of President Director and Reappointment of Independent Commissioner	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Yap Tjay Hing sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini. 2. Menyetujui memberikan dengan hormat pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Yap Tjay Hing atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Peter Halim sebagai Direktur Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Peter Halim sebagai Direktur Utama Perseroan yang hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terhadap pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nursalam Andi Tabusalla sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas maka susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama: Peter Halim Wakil Direktur Utama: Kisup Wi Direktur: Hery Susanto Dermawan Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs: Martina Hariyanto Direktur: Choi, Ho Jung Direktur: Kyeongho Min	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
7.	17 Juli 2025 July 17, 2025	Transaksi Afiliasi dengan PT Sunindo Kookmin Best Finance Affiliate Transaction with PT Sunindo Kookmin Best Finance	1. Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Sunindo Kookmin Best Finance sehubungan dengan penyaluran pembiayaan ("Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dan disepakati dalam Perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dan wajar. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan untuk melakukan negosiasi lebih lanjut dan/atau mengeluarkan dan/atau menyetujui dan/atau menandatangani Perjanjian termasuk semua perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dan/atau, dokumen-dokumen apapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini di kemudian hari sepanjang perubahan tidak material atau material secara komersial berdasarkan pertimbangan Direksi serta melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tujuan sebagaimana disebutkan di atas. 1. Accept and approve the affiliate transaction between the Company and PT Sunindo Kookmin Best Finance in connection with the distribution of financing ("Agreement") with the terms and conditions stated and agreed in the Agreement made in good faith and fairly. 2. Agree to grant power of attorney, either jointly or individually to one of the members of the Company's Board of Directors with the right of substitution, to represent the Company to conduct further negotiations and/or issue and/or approve and/or sign the Agreement including all changes, additions, extensions and updates and/or any documents related to this Agreement in the future as long as the changes are not material or commercially material based on the consideration of the Board of Directors and to carry out all actions deemed necessary to carry out the objectives as stated above.	Terealisasi Realized
8.	19 Agustus 2025 August 19, 2025	Perubahan Komposisi Pemegang Saham Changes in Shareholder Composition	1. Menerima dan menyetujui pengalihan 11.312.502 (sebelas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus dua) lembar saham di dalam Perseroan atau setara dengan 5,00% (lima persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor di dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) setiap lembar dengan jumlah total nominal saham sebesar Rp11.312.502.000 (sebelas miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus dua ribu Rupiah) ("Penjualan Saham") dari PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") kepada KB Kookmin Card Corp. ("KBC") dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 19 Agustus 2025 antara FPR sebagai Penjual dan KBC sebagai Pembeli. Accepted and approved the transfer of 11,312,502 (eleven million three hundred twelve thousand five hundred two) shares in the Company or equivalent to 5.00% (five percent) of the issued and paid-up capital in the Company, each with a nominal value of IDR1,000.00 (one thousand Rupiah) per share with a total nominal value of IDR11,312,502,000 (eleven billion three hundred twelve million five hundred two thousand Rupiah) ("Share Sale") from PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") to KB Kookmin Card Corp. ("KBC") with terms and conditions based on the Share Sale and Purchase Deed dated August 19, 2025 between FPR as the Seller and KBC as the Buyer. 2. Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengesampingkan haknya untuk membeli saham terlebih dahulu (<i>pre-emptive rights</i>) sehubungan dengan Penjualan Saham berdasarkan AD Perseroan. The Shareholders agreed to waive their rights to purchase shares in advance (<i>pre-emptive rights</i>) in connection with the Sale of Shares based on the Company's Articles of Association.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization																
Setelah menyelesaikan Penjualan Saham, Para Pemegang Saham menyepakati dan menyetujui perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Upon the completion of the Sale of Shares, the Shareholders agreed and approved the change in the composition of the Company's shareholders to be as follows: <table><tr><th>Pemegang Saham Shareholders</th><th>Jumlah Saham Number of Shares</th><th>Nilai Nominal Total (IDR) Total Nominal Value (IDR)</th><th>Persentase (%) Percentage (%)</th></tr><tr><td>KBC</td><td>192.312.534</td><td>192.312.534.000</td><td>85</td></tr><tr><td>FPR</td><td>33.937.506</td><td>33.937.506.000</td><td>15</td></tr><tr><td>Total</td><td>226.250.040</td><td>226.250.040.000</td><td>100</td></tr></table>					Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal Total (IDR) Total Nominal Value (IDR)	Persentase (%) Percentage (%)	KBC	192.312.534	192.312.534.000	85	FPR	33.937.506	33.937.506.000	15	Total	226.250.040	226.250.040.000	100
Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal Total (IDR) Total Nominal Value (IDR)	Persentase (%) Percentage (%)																	
KBC	192.312.534	192.312.534.000	85																	
FPR	33.937.506	33.937.506.000	15																	
Total	226.250.040	226.250.040.000	100																	
9.	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Transaksi Afiliasi <i>Standby Letter of Credit</i> (SLBC) Kookmin Bank Hong Kong Kookmin Bank Hong Kong Standby Letter of Credit (SLBC) Affiliate Transaction	1. Menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Fasilitas Penerbitan Jaminan <i>Standby Letter of Credit</i> ("SBLC") antara Kookmin Bank, Hong Kong Branch dan Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui dan tercermin di dalam Perjanjian Jaminan SBLC. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Fasilitas Penerbitan Jaminan dalam bentuk SBLC tersebut di atas, dan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Agreed to sign the Standby Letter of Credit ("SBLC") Guarantee Issuance Facility Agreement between Kookmin Bank, Hong Kong Branch and the Company with the terms and conditions agreed and reflected in the SBLC Guarantee Agreement. 2. Agreed to grant power of attorney, either jointly or individually to the Company's Directors, with the right of substitution, to represent the Company to make and sign the Guarantee Issuance Facility Agreement in the form of the SBLC mentioned above, and to carry out all actions deemed necessary to achieve this objective.	Terealisasi Realized																



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization																												
10	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Penerbitan Saham Bonus Issuance of Bonus Shares	1. Menerima dan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari semula Rp226.250.040.000 yang terdiri dari 226.250.040 lembar saham biasa menjadi Rp426.250.040.000 terdiri dari 426.250.040 saham biasa dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000, sehingga modal dasar Perseroan menjadi: Accepted and approved the increase in the Company's authorized capital from the original IDR226,250,040,000 consisting of 226,250,040 ordinary shares to IDR426,250,040,000 consisting of 426,250,040 ordinary shares with each share worth IDR1,000, so that the Company's authorized capital becomes: <table> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">Sebelum Penambahan Before an Increase</th><th colspan="2">Sesudah Penambahan After an Increase</th></tr> <tr> <th>Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)</th><th>Jumlah Saham Number of Shares</th><th>Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)</th><th>Jumlah Saham Number of Shares</th></tr> <tr> <td>Modal Dasar Authorized Capital</td><td>226.250.040.000</td><td>226.250.040</td><td>426.250.040.000</td><td>426.250.040</td></tr> </table> 2. Menerima dan menyetujui: Accepted and agreed: a. sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura ("POJK 47/2020"), untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak Rp200.000.000.000 yang berasal dari penerbitan Saham Bonus, di mana pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham akan dilakukan secara pro rata sesuai dengan kepemilikan sahamnya, yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan No. S-1089/PL.021/2025, tanggal 24 Oktober 2025 perihal Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan PT KB Finansia Multi Finance, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi: in accordance with the provisions of Article 71 of the Financial Services Authority Regulation Number 47/POJK.05/2020 of 2020 concerning Business Licensing and Institutions of Financing Companies and Sharia Financing Companies as amended by Financial Services Authority Regulation Number 46 of 2024 concerning Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies ("POJK 47/2020"), to increase the Company's issued and paid-up capital by IDR200,000,000,000 originating from the issuance of Bonus Shares, where the distribution of Bonus Shares to Shareholders will be carried out pro rata according to their share ownership, which has received approval from the OJK based on Decree No. S-1089/PL.021/2025, dated October 24, 2025 concerning Approval of the Plan to Change Ownership of PT KB Finansia Multi Finance, so that the Company's issued and paid-up capital becomes: <table> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">Sebelum Penambahan Before an Increase</th><th colspan="2">Sesudah Penambahan After an Increase</th></tr> <tr> <th>Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)</th><th>Jumlah Saham Number of Shares</th><th>Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)</th><th>Jumlah Saham Number of Shares</th></tr> <tr> <td>Modal Disetor dan Ditempatkan Issued and Paid-up Capital</td><td>226.250.040.000</td><td>226.250.040</td><td>426.250.040.000</td><td>426.250.040</td></tr> </table>		Sebelum Penambahan Before an Increase		Sesudah Penambahan After an Increase		Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Modal Dasar Authorized Capital	226.250.040.000	226.250.040	426.250.040.000	426.250.040		Sebelum Penambahan Before an Increase		Sesudah Penambahan After an Increase		Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Modal Disetor dan Ditempatkan Issued and Paid-up Capital	226.250.040.000	226.250.040	426.250.040.000	426.250.040	Terealisasi Realized
	Sebelum Penambahan Before an Increase		Sesudah Penambahan After an Increase																													
	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares																												
Modal Dasar Authorized Capital	226.250.040.000	226.250.040	426.250.040.000	426.250.040																												
	Sebelum Penambahan Before an Increase		Sesudah Penambahan After an Increase																													
	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Amount (Rp)	Jumlah Saham Number of Shares																												
Modal Disetor dan Ditempatkan Issued and Paid-up Capital	226.250.040.000	226.250.040	426.250.040.000	426.250.040																												



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization																				
			Setelah penyelesaian penerbitan Saham Bonus, menyetujui perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: After the completion of the issuance of Bonus Shares, approved the change in the composition of the Company's shareholders to be as follows: <table> <tr> <th>Pemegang Saham Shareholders</th><th>Saham Saat Ini Existing Shares</th><th>Penambahan Modal Capital Increase</th><th>Setelah Penambahan Modal After Capital Increase</th><th>Persentase Percentage (%)</th></tr> <tr> <td>KB Kookmin Card Corp.</td><td>192.312.534.000</td><td>170.000.000.000</td><td>362.312.534.000</td><td>85</td></tr> <tr> <td>PT Finansia Pacifica Raya</td><td>33.937.506.000</td><td>30.000.000.000</td><td>63.937.506.000</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>226.250.040.000</td><td>200.000.000.000</td><td>426.250.040.000</td><td>100</td></tr> </table>	Pemegang Saham Shareholders	Saham Saat Ini Existing Shares	Penambahan Modal Capital Increase	Setelah Penambahan Modal After Capital Increase	Persentase Percentage (%)	KB Kookmin Card Corp.	192.312.534.000	170.000.000.000	362.312.534.000	85	PT Finansia Pacifica Raya	33.937.506.000	30.000.000.000	63.937.506.000	15	Total	226.250.040.000	200.000.000.000	426.250.040.000	100	
Pemegang Saham Shareholders	Saham Saat Ini Existing Shares	Penambahan Modal Capital Increase	Setelah Penambahan Modal After Capital Increase	Persentase Percentage (%)																				
KB Kookmin Card Corp.	192.312.534.000	170.000.000.000	362.312.534.000	85																				
PT Finansia Pacifica Raya	33.937.506.000	30.000.000.000	63.937.506.000	15																				
Total	226.250.040.000	200.000.000.000	426.250.040.000	100																				
			b. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk menjadi berbunyi sebagai berikut: Amended the provisions of Article 4 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association, to read as follows: (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp426.250.040.000 (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari 426.250.040 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh) lembar saham biasa dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000 (seribu Rupiah). The Company's Authorized Capital amounts to IDR426,250,040,000 (four hundred twenty-six billion two hundred fifty million and forty thousand Rupiah), consisting of 426,250,040 (four hundred twenty-six million two hundred fifty thousand and forty) ordinary shares with each share worth IDR1,000 (one thousand Rupiah). (2) Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah 426.250.040 (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh) lembar saham biasa, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp426.250.040.000 (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), oleh para pemegang saham dan rincian jumlah serta nilai nominal saham masing-masing pemegang saham akan disebut pada bagian akhir akta ini, yang terdiri dari: Of the authorized capital, 100% (one hundred percent) or 426,250,040 (four hundred twenty six million two hundred fifty thousand and forty) ordinary shares have been placed and fully paid up, with a total nominal value of IDR426,250,040,000 (four hundred twenty six billion two hundred fifty million and forty thousand Rupiah), by the shareholders and details of the number and nominal value of each shareholder's shares will be stated at the end of this deed, which consists of: a. sebesar Rp226.250.040.000 merupakan modal sebelumnya yang telah disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan: dan IDR226,250,040,000 is the previous capital that has been paid in by the Company's Shareholders; and b. sebesar Rp200.000.000.000 merupakan setoran melalui Kapitalisasi Saham Bonus Perseroan yang berasal dari Agio Saham." IDR200,000,000,000 is a deposit through the Company's Bonus Share Capitalization originating from Share Premium."																					



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2025 Decision of the 2025 EGMS	Realisasi Realization
11.	29 Oktober 2025	Transaksi Afiliasi Amandemen <i>Corporate Guarantee</i> dengan KB Kookmin Card Corp. Affiliate Transaction of Corporate Guarantee Amendment with KB Kookmin Card Corp.	1. Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp., sehubungan dengan Amandemen Keenam Perjanjian Penjaminan yang diberikan oleh KB Kookmin Card Corp., ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui dan tercermin di dalam Perjanjian. Perjanjian terlampir pada Keputusan Sirkuler ini. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan untuk membuat dan/atau menandatangani Perjanjian. 1. Accepted and approved the affiliate transaction between the Company and KB Kookmin Card Corp., in connection with the Sixth Amendment to the Guarantee Agreement provided by KB Kookmin Card Corp., ("Agreement") with the terms and conditions agreed and reflected in the Agreement. The Agreement is attached to this Circular Decision. 2. Agreed to grant power of attorney, either jointly or individually to one of the members of the Company's Board of Directors with the right of substitution, to represent the Company in making and/or signing the Agreement.	Terealisasi Realized
12.	27 November 2025	Transaksi Afiliasi Penggunaan Merek Kookmin Bank Affiliate Transactions Using the Kookmin Bank Brand	Menyetujui pembayaran tahunan atas Royalti Merek kepada Kookmin Bank berdasarkan Perjanjian Lisensi antara Kookmin Bank dan Perseroan tanggal 28 Desember 2020. Approved the annual payment of Brand Royalty to Kookmin Bank based on the License Agreement between Kookmin Bank and the Company dated December 28, 2020.	Terealisasi Realized
13.	27 November 2025	Rencana Bisnis Tahun 2026 2026 Business Plan	Menerima dan menyetujui Rencana Bisnis Tahun 2026 (Rencana Bisnis Tahun 2026 dilampirkan pada Keputusan Sirkuler ini). Accepted and approved the 2026 Business Plan (the 2026 Business Plan is attached to this Circular Decision).	Terealisasi Realized

Informasi tentang Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2024 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen Information on the Results of the 2024 Annual GMS Decisions and Follow-Up by Management

No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Approval of the Company's Annual Financial Report for the financial year ending December 31, 2024	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (<i>member of BDO International Limited</i>) sesuai dengan laporannya tanggal 16 Februari 2024, dengan pendapat wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Approved and ratified the Company's Annual Financial Statement for the 2023 financial year, which includes the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the financial year ended December 31, 2023, audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) in accordance with its report dated February 16, 2024, with a fair opinion in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.	Terealisasi Realized
2.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 Approval of the Company's 2023 Annual Report	1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan 2023 yang telah disampaikan. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan Perseroan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. 1. Accepted the 2023 Annual Report that has been submitted. 2. Granting release and discharge of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervision carried out during the 2023 financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report.	Terealisasi Realized



No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
3.	Persetujuan terkait penggunaan laba/laba ditahan (tidak adanya pembagian dividen). Approval regarding the use of retained earnings (no dividend distribution).	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (<i>member of</i> BDO International Limited), laba bersih Perseroan tahun 2023 adalah sebesar Rp91.546.129.267 di mana disetujui penggunaan laba bersih tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp5.203.750.920, akan dibagikan sebagai dividen kepada masing-masing pemegang saham secara proporsional, yakni: a. KB Kookmin Card Corp, sebesar Rp4.163.000.736; b. PT Finansia Pacifica Raya, sebesar Rp1.040.750.184. 2. Sejumlah Rp45.534.411.333, akan digunakan untuk pembayaran kupon <i>Perpetual Bonds</i>. 3. Sejumlah Rp20.000.000.000, akan digunakan untuk dialokasikan menjadi dana cadangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan ("Dana Cadangan"), yang mana total Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar Rp45.250.008.000 atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 4. Sejumlah Rp20.807.967.014, akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Based on the 2023 Annual Financial Statement audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), the Company's net profit in 2023 was IDR91,546,129,267 where the approved use of the net profit is as follows: 1. A total of IDR5,203,750,920 would be distributed as dividends to each shareholder proportionally, namely: a. KB Kookmin Card Corp, amounting to IDR4,163,000,736; b. PT Finansia Pacifica Raya, amounting to IDR1,040,750,184. 2. A total of IDR45,534,411,333 would be used for Perpetual Bonds coupon payments. 3. An amount of IDR20,000,000,000 would be allocated as a reserve fund as required under the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law and Article 20 of the Company's Articles of Association ("Reserve Fund"), where the total of the Company's Reserve Fund will be IDR45,250,008,000 or 20% of the Company's issued and paid-up capital. 4. An amount of IDR20,807,967,014 would be allocated as retained earnings.	Terealisasi Realized
4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") and the Public Accountant appointed by the KAP to audit the Company for the financial year ending December 31, 2025.	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (<i>member of</i> BDO International Limited) dan Akuntan Publik ("AP") yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, di mana keputusan ini dengan mempertimbangkan rekomendasi dan keputusan Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang telah disebutkan pada poin 5 di atas dalam hal Kantor Akuntan dan Akuntan Publik sebagai penanggung jawab atas laporan keuangan hasil audit Perseroan yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau mengundurkan diri atau adanya benturan kepentingan. 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) and the Public Accountant ("AP") appointed by the KAP to audit the Company for the financial year ending December 31, 2024, where this decision takes into account the recommendations and decisions of the Audit Committee and the Board of Commissioners of the Company. 2. Granted power to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant as mentioned in point 5 above in the event that the appointed Accounting Firm and Public Accountant as responsible for the Company's audited financial report are unable to complete their work properly or resign or there is a conflict of interest.	Terealisasi Realized
5.	Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Approval of the remuneration of the Company's Board of Commissioners and Directors.	Menerima dan menyetujui: 1. besaran total remunerasi keseluruhan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sebesar Rp45.900.000.000; dan 2. besaran total remunerasi dan/atau honorarium keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sebesar Rp950.000.000. Selanjutnya, Pemegang Saham memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian atas total remunerasi dan/atau honorarium yang disebutkan di atas dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Accepted and agreed: 1. the total amount of remuneration for all members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year is a maximum of IDR45,900,000,000; and 2. The total amount of remuneration and/or honorarium for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year is a maximum of IDR950,000,000. Furthermore, the Shareholders granted power and delegated authority to the Board of Commissioners to make adjustments to the total remuneration and/or honorarium mentioned above in the event of changes and/or additions to the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	Terealisasi Realized



Informasi tentang Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa 2024 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Information on the Results of the 2024 EGMS Decisions and Follow-Up by Management

No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	24 Januari 2024 January 24, 2024	Penjualan Aset Perseroan berupa Piutang Pembiayaan yang sudah dihapus buku. Sale of Company Assets in the form of Financing Receivables that have been written off.	Menerima dan menyetujui penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan yang sudah dihapus buku. Accepted and approved the sale of the Company's assets in the form of financing receivables that have been written off.	Terealisasi Realized
2.	15 Februari 2024 February 15, 2024	Pengunduran Diri dan Pengangkatan Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan. Resignation and Appointment of the Deputy President Director and President Commissioner of the Company.	- Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan yaitu: - Joohyun Hwang, sebagai Wakil Direktur Utama; dan - Song, Yong Hun, sebagai Komisaris Utama. - Memberhentikan dengan hormat Kisup Wi sebagai Direktur Keuangan Perseroan dan mengangkat Kisup Wi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 tahun, di mana pemberhentian dan pengangkatannya hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terhadap pengangkatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. - Mengangkat Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 tahun, yang hanya akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari OJK terhadap pengangkatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. - Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dan tunduk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan juncto POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, oleh karena untuk pengangkatan penggantinya yang masih menunggu hasil <i>fit and proper test</i> dari OJK, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut: - Susunan Direksi Direktur Utama: Yap Tjay Hing Wakil Direktur Utama: Kisup Wi^{*)} Direktur: Peter Halim Direktur: Hery Susanto Dermawan Direktur Keuangan: Lowong^{*)} Direktur Pemasaran: Sea Hwan Lah Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs: Martina Hariyanto Direktur: Choi, Ho Jung - Susunan Dewan Komisaris Komisaris Utama: Moon Cheol Kang^{*)} Komisaris Independen: Nursalam Andi Tabusalla ^{*)} Berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari OJK. - Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Joohyun Hwang sebagai Wakil Direktur Utama dan Song, Yong Hun sebagai Komisaris Utama atas tindakan-tindakan korporasi selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
			- Accepted and approved the resignation of the Deputy President Director and President Commissioner of the Company, namely: - Joohyun Hwang, as Deputy President Director; and - Song, Yong Hun, as the Chief Commissioner. - Honorably dismissed Kisup Wi as the Company's Finance Director and appoint Kisup Wi as the Company's Deputy President Director for a term of 5 years, whereby his dismissal and appointment would only be effective from the date the person concerned passes the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority ("OJK") regarding his appointment as the Company's Deputy President Director. - Appointed Moon Cheol Kang as the Company's President Commissioner with a term of office for a period of 5 years, which will only be effective from the date the person concerned passes the <i>Fit and Proper Test</i> from the OJK regarding his appointment as the Company's President Commissioner. - In connection with the above decisions and subject to the provisions of Article 12 and Article 15 of the Company's articles of association in conjunction with POJK No. 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, therefore for the appointment of his replacement who await the results of the fit and proper test from the OJK, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows: - Composition of the Board of Directors President Director : Yap Tjay Hing Deputy President Director: Kisup Wi^{*)} Director: Peter Halim Director: Hery Susanto Dermawan Finance Director: Vacant^{*)} Marketing Director: Sea Hwan Lah Director of Human Resources & General Affairs: Martina Hariyanto Director: Choi, Ho Jung - Composition of the Board of Commissioners President Commissioner: Moon Cheol Kang^{*)} Independent Commissioner: Nursalam Andi Tabusalla ^{*)} Effective from the date the person concerned passes the Fit and Proper Test from the OJK. - Approved the granting of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Joohyun Hwang as Deputy President Director and Song, Yong Hun as President Commissioner for corporate actions during their term of office and as long as they are acknowledged and approved by the Shareholders and reflected in the Company's Financial Report.	
3.	16 April 2024 April 16, 2024	Transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Kookmin Best Insurance Indonesia. Affiliate transaction between the Company and PT Kookmin Best Insurance Indonesia.	Menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Kookmin Best Insurance Indonesia sehubungan dengan perlindungan asuransi dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Approved the affiliate transaction between the Company and PT Kookmin Best Insurance Indonesia in connection with insurance protection with the terms and conditions stated in the cooperation agreement.	Terealisasi Realized
4.	27 Mei 2024 May 27, 2024	Penjualan Aset Perseroan berupa Piutang Pembiayaan yang sudah dihapus buku. Sale of Company Assets in the form of Financing Receivables that have been written off.	Menyetujui penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan yang sudah dihapus buku. Approved the sale of the Company's assets in the form of financing receivables that have been written off.	Terealisasi Realized
5.	27 Mei 2024 May 27, 2024	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Amendments to the Company's Articles of Association.	Menerima dan menyetujui untuk mengubah Pasal 12.(1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan. Accepted and agreed to amend Article 12.(1) and (2) of the Company's Articles of Association concerning the Company's Board of Directors.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
6.	25 Juli 2024 July 25, 2024	Transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT KB Valbury Sekuritas. Affiliate transaction between the Company and PT KB Valbury Sekuritas.	Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT KB Valbury Sekuritas selaku penjamin emisi untuk rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Bersifat Utang yaitu Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance, dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Kerja sama. Accepted and approved the affiliate transaction between the Company and PT KB Valbury Sekuritas as underwriter for the Company's plan to conduct a Continuous Public Offering of Debt, namely the KB Finansia Multi Finance Continuous Bonds I, with the terms and conditions stated in the Cooperation Agreement.	Terealisasi Realized
7.	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Penjualan Aset Perseroan berupa Piutang Pembiayaan yang sudah dihapus buku. Sale of Company Assets in the form of Financing Receivables that have been written off.	Menyetujui penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan yang sudah dihapus buku. Approved the sale of the Company's assets in the form of financing receivables that have been written off.	Terealisasi Realized
8.	4 September 2024 September 4, 2024	Transaksi Afiliasi dengan Kookmin Bank, Hong Kong Branch. Affiliate Transaction with Kookmin Bank, Hong Kong Branch.	Menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Fasilitas Penerbitan Jaminan <i>Standby Letter of Credit</i> ("SBLC") antara Kookmin Bank, Hong Kong Branch dan Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui dan tercermin di dalam Perjanjian Jaminan SBLC. Agreed to sign the Standby Letter of Credit ("SBLC") Guarantee Issuance Facility Agreement between Kookmin Bank, Hong Kong Branch and the Company with the terms and conditions agreed and reflected in the SBLC Guarantee Agreement.	Terealisasi Realized
9.	30 September 2024 September 30, 2024	Transaksi Afiliasi dengan PT Finansia Pacifica Raya Affiliate Transaction with PT Finansia Pacifica Raya	Menerima dan menyetujui transaksi afiliasi antara Perseroan dengan PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") selaku salah satu pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan penyewaan ruang kantor yang dimiliki oleh FPR, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan disetujui di dalam perjanjian sewa menyewa. Accepted and approved the affiliate transaction between the Company and PT Finansia Pacifica Raya ("FPR") as one of the Company's shareholders, in connection with the rental of office space owned by FPR, with the terms and conditions stipulated and agreed in the lease agreement.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
10.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Bersifat Utang yaitu Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance. Issuance of a Debt-Based Sustainable Public Offering, namely KB Finansia Multi Finance's Sustainable Bonds I.	1. Menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Bersifat Utang yaitu Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance dengan nilai penerbitan sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000 (tiga Triliun Rupiah) yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada BEI ("Obligasi PUB"). Penentuan kepastian jumlah Obligasi PUB yang ditawarkan, tingkat bunga dan jangka waktu akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (<i>bookbuilding</i>). 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk menyediakan jaminan sehubungan dengan penerbitan Obligasi PUB berupa Piutang Usaha (<i>Performing</i>) milik Perseroan yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai pokok Obligasi PUB setiap tahap pada tanggal emisi. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal emisi, total nilai penjaminan atas Piutang Usaha (<i>Performing</i>) menjadi sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari nilai pokok Obligasi PUB. 1. Approved the Company's plan to conduct a Debt-Based Continuous Public Offering (PUB), namely the KB Finansia Multi Finance Continuous Bonds I with a maximum issuance value of IDR3,000,000,000,000 (three trillion Rupiah) which will be issued in several stages and listed on the IDX ("PUB Bonds"). The determination of the certainty of the number of PUB Bonds offered, the interest rate and the term will be determined later based on the results of the initial offering (<i>bookbuilding</i>). 2. Approved the Company's plan to provide collateral in connection with the issuance of PUB Bonds in the form of the Company's Performing Accounts Receivable which will be bound in a fiduciary guarantee deed with a collateral value of at least 20% (twenty percent) of the principal value of the PUB Bonds for each stage on the issuance date. Within a maximum period of 5 (five) months from the issuance date, the total collateral value for the Performing Accounts Receivables will be at least 40% (forty percent) of the principal value of the PUB Bonds.	Terealisasi Realized
11.	28 November 2024 November 28, 2024	Rencana Bisnis Tahun 2025. 2025 Business Plan.	Menerima dan menyetujui Rencana Bisnis Tahun 2025. Accepted and approved the 2025 Business Plan.	Terealisasi Realized
12.	28 November 2024 November 28, 2024	Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan Kookmin Bank. Affiliate Transaction between the Company and Kookmin Bank.	Menyetujui perubahan syarat dan kondisi atas Perjanjian Lisensi antara Kookmin Bank dan Perseroan tanggal 28 Desember 2020. Approved changes to the terms and conditions of the License Agreement between Kookmin Bank and the Company dated December 28, 2020.	Terealisasi Realized



No.	Tanggal Keputusan Date of Resolution	Agenda Rapat Meeting Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
13.	30 Desember 2024 December 30, 2024	Pengunduran Diri Direktur Pemasaran Perseroan dan Pengangkatan Direktur Perseroan. Resignation of the Company's Marketing Director and Appointment of the Company's Director.	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sea Hwan Lah sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Sea Hwan Lah atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan selama masa jabatannya dan sepanjang yang dilakukan diakui dan disetujui oleh para Pemegang Saham serta tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Kyeongho Min sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-493/ PL.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kyeongho Min Selaku Calon Direktur PT KB Finansia Multi Finance tertanggal 20 (dua puluh) November 2024, dengan masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Menerima dan menyetujui untuk mengubah Pasal 12.(1) dan 12.(2) AD Perseroan. 5. Menyetujui susunan Direksi sebagai berikut: Direktur Utama: Yap Tjay Hing Wakil Direktur Utama Direktur: Kisup Wi Direktur: Peter Halim Direktur: Hery Susanto Dermawan Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs: Martina Hariyanto Direktur: Choi, Ho Jung Direktur: Kyeongho Min	Terealisasi Realized



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip GCG, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris bertugas untuk memberikan arahan strategis, evaluasi kebijakan, dan pemantauan kinerja Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris berperan penting dalam menjaga integritas tata kelola dan memastikan bahwa setiap keputusan strategis Perseroan diambil secara hati-hati dan bertanggung jawab.

The Board of Commissioners carries out an independent oversight function to ensure that the Company's management is carried out in accordance with GCG principles, laws and regulations, and the Company's interests. The Board of Commissioners is responsible for providing strategic direction, evaluating policies, and monitoring the performance of the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners plays a crucial role in maintaining the integrity of governance and ensuring that every strategic decision made by the Company is made prudently and responsibly.

DASAR HUKUM

Pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan tugas Dewan komisaris mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain:

1. UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK 27/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
5. Anggaran Dasar Perseroan; dan
6. Pedoman Dewan Komisaris Perseroan.

LEGAL BASIS

The formation, appointment, and implementation of the duties of the Board of Commissioners refer to several regulations and laws, including:

1. Law 40/2007 on Limited Liability Companies;
2. POJK 33/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. POJK 27/2016 on the Assessment of Competence and Suitability for Key Personnel of Financial Services Institutions;
4. POJK 48/2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Institutions;
5. The Company's Articles of Association; and
6. The Company's Board of Commissioners Charter.

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Dewan Komisaris yang ditetapkan pada 21 Maret 2022. Pedoman ini ditinjau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan tujuan strategis Perseroan serta kepatuhan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK terkait Dewan Komisaris dan tata kelola perusahaan.

Secara garis besar, Pedoman Dewan Komisaris mengatur ketentuan mengenai hal-hal berikut ini:

1. Pengantar dan Ketentuan Umum
2. Peran dan Akuntabilitas
3. Struktur dan Keanggotaan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Pembentukan Komite

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Company's Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities in accordance with the provisions of the Board of Commissioners Charter, which were established on March 21, 2022. These guidelines are reviewed periodically to ensure alignment with the Company's strategic objectives and compliance with developments in applicable laws and regulations, including OJK provisions regarding the Board of Commissioners and corporate governance.

In general, the Board of Commissioners Guidelines regulate provisions regarding the following matters:

1. Introduction and General Provisions
2. Role and Accountability
3. Structure and Membership
4. Duties and Responsibilities
5. Establishment of Committees



6. Wewenang
7. Transparansi
8. Etika Kerja
9. Rapat dan Pelaksanaannya
10. Masa Jabatan
11. Pelaporan

Guna memastikan kesesuaian dan relevansi dengan praktik terbaik serta peraturan yang berlaku, Perseroan telah melakukan pembaruan terhadap Pedoman Dewan Komisaris pada September 2025. Sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, Pedoman Dewan Komisaris telah dipublikasikan di situs web Perseroan dan dapat diakses melalui tautan berikut: www.kreditplus.com/good-corporate-governance.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Periode menjabat Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak pelaksanaan RUPS yang menetapkan pengangkatannya atau sejak tanggal efektif pengangkatan setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk periode yang sama. Ketentuan ini tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KRITERIA KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan pihak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, dengan standar kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

6. Authority
7. Transparency
8. Work Ethics
9. Meetings and Proceedings
10. Term of Office
11. Reporting

To ensure compliance and relevance with best practices and applicable regulations, the Company has updated the Board of Commissioners Guidelines in September 2025. As a form of openness and transparency to all stakeholders, the Board of Commissioners Guidelines have been published on the Company's website and can be accessed through the following link: www.kreditplus.com/good-corporate-governance.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years, calculated from the GMS that determined their appointment or from the effective date of appointment after passing the Fit and Proper Test from the OJK. After their term of office ends, the Board of Commissioners may be reappointed for the same period. This provision does not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time while still observing the provisions of applicable laws and regulations.

MEMBERSHIP CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company ensures that each of the incumbent members of its Board of Commissioners meets all regulatory provisions and has high competence and integrity, with the following criteria:

1. Possesses good moral character, ethics, and integrity;
2. Competent in performing legal acts;
3. Within the 5 (five) years prior to appointment and during their term of office:
 - a. Has never been declared bankrupt;
 - b. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners convicted guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c. Has never been convicted of a crime that harms state finances and/or is related to the financial services sector; and
 - d. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their term of office:



- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
 6. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 7. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

- Failed to hold an Annual GMS;
- Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners at the GMS unaccepted or failed to submit their accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
- Has caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statements to the OJK.

4. Has a commitment to comply with laws and regulations;
5. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Issuer or Public Company;
6. Each member of the Board of Commissioners shall pass a fit and proper test in accordance with the provisions of the Financial Services Authority regulations; and
7. The majority of members of the Board of Commissioners shall not have familial relationships up to the second degree with their fellow members and/or members of the Board of Directors.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Memantau efektivitas penerapan tata kelola yang baik;
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
6. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The collegial duties and responsibilities of the Board of Commissioners, in accordance with applicable regulations, are as follows:

1. Carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors;
2. Supervising the Board of Directors in maintaining a balance of interests of all parties;
3. Preparing reports on the activities of the Board of Commissioners, which are part of the report on the implementation of good corporate governance;
4. Monitoring the effectiveness of the implementation of good governance;
5. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results and/or other authority supervision results;
6. Under certain conditions, holding Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated by laws and regulations and the Articles of Association.



KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

COMPOSITION OF MEMBERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2025, komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mengalami perubahan, sehingga susunan Dewan Komisaris dengan kronologis sebagai berikut:

In 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners has changed, and given below is its new composition:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2025 – 31 Januari 2025

Composition of the Board of Commissioners for the Period January 1, 2025 – January 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK Date of Passing the OJK Fit and Proper Test	Masa Jabatan Term of Office
Moon Cheol Kang	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 131 tanggal 25 Juli 2024 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 131 dated July 25, 2024	18 Juli 2024 July 18, 2024	Juli 2024 – Januari 2025 (Periode Pertama) July 2024 – January 2025 (First Term)
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 93 tanggal 13 Juli 2020 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 93 dated July 13, 2020	20 Mei 2015 May 20, 2015	Juli 2020– Juli 2025 (Periode Kedua) July 2020 – July 2025 (Second Term)

Komposisi Dewan Komisaris Periode 31 Januari 2025 – 31 Desember 2025

Composition of the Board of Commissioners for the Period 31 January 2025 – 31 December 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK Date of Passing the OJK Fit and Proper Test	Masa Jabatan Term of Office
Sang In Lee	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 10 Juli 2025 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 54 dated July 10, 2025	20 Juni 2025 June 20, 2025	Juli 2025 – Juli 2028 July 2025 – July 2028
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 93 tanggal 13 Juli 2020 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 93 dated July 13, 2020	20 Mei 2015 May 20, 2015	Juli 2020– Juli 2025 (Periode Kedua) July 2020 – July 2025 (Second Term)
		Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 Juli 2025 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 13 dated July 3, 2025		Juli 2025 – Juli 2028 (Periode Ketiga) July 2025 – July 2028 (Third Term)
Je Ui Jung	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 101 tanggal 20 Mei 2025 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 101 dated May 20, 2025	14 Mei 2025 May 14, 2025	Mei 2025 – Mei 2028 (Periode Pertama) May 2025 – May 2025 (First Term)

Profil lengkap dari setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dijelaskan secara rinci dalam Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Profil Dewan Komisaris.

The complete profile of each member of the Company's Board of Commissioners is available in detail in the Company Profile Chapter, Sub-Chapter Profile of the Board of Commissioners.



PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, mengamanatkan bahwa setiap pihak utama Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan. Pada tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab secara kolegal dan individu yang harus dijalankan sesuai dengan bidang masing-masing. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan pengawasan secara optimal di bidangnya masing-masing. Berikut merupakan rincian pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan:

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' FIT AND PROPER

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, each key party in the Company is required to undergo a fit and proper test. By 2025, all incumbent members of the Company's Board of Commissioners will have passed the Fit and Proper Test by the OJK.

DIVISION OF SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has both collective and individual responsibilities that must be carried out in accordance with their respective areas of responsibility. This division of duties is intended to ensure that each member of the Board of Commissioners can optimally carry out oversight in their respective areas. The following is a breakdown of the duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas	Field of Duties
Sang In Lee	Komisaris Utama President Commissioner	Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan dan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, melakukan pengawasan terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan, memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan terciptanya sinergi antara Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali dalam mencapai visi dan misi Perseroan.	Conduct supervision of the Company's management policies and the implementation of the Company's management by the Board of Directors in accordance with the articles of association, provide advice to the Board of Directors, supervise the implementation of good corporate governance within the Company, ensure the Company's compliance with applicable regulations and ensure the creation of synergy between the Company and the Controlling Shareholders in achieving the Company's vision and mission.
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan, serta melindungi kepentingan pemegang saham serta melakukan pengawasan terhadap Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite pada setiap akhir tahun buku, dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.	Conduct supervision of the Company's management by the Board of Directors and management with the principles of good governance and transparency, as well as protecting the interests of shareholders and supervising the Committees under the Board of Commissioners, evaluating the performance of committees at the end of each financial year, and ensuring the Company's compliance with applicable regulations.
Je Ui Jung	Komisaris Commissioner	Melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta mendukung pelaksanaan tugas Komite guna memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG, dengan kewenangan untuk mengakses informasi yang diperlukan, meminta klarifikasi, memberikan rekomendasi, dan mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.	Conducting supervision over the policies and management of the Company by the Board of Directors in accordance with the Articles of Association, providing advice to the Board of Directors, and supporting the implementation of the Committee's duties to ensure that the Company's management is carried out in accordance with laws and regulations and GCG principles, with the authority to access necessary information, request clarification, provide recommendations, and make decisions in accordance with applicable mechanisms.



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dengan tetap memperhatikan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan lainnya. Namun tidak termasuk rangkap jabatan pada:

- Anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- Anggota BOC merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional asosiasi menjadi anggota BOC pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi.
- Anggota BOC merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan OJK.

Berikut merupakan informasi rinci terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025:

BOARD OF COMMISSIONERS' CONCURRENT POSITION POLICY

In accordance with the applicable provisions on concurrent positions, members of the Board of Commissioners are not permitted to hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in 2 (two) other financing companies. However, this does not include concurrent positions in:

- Non-independent members of the Board of Commissioners carry out functional duties for the Company's shareholders in the form of legal entities in their business groups; and/or
- Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions. As long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.
- BOC members are association administrators who do the association's functional duties and serve as BOC members in subsidiaries controlled by the association.
- BOC members are association administrators who serve as commissioners in institutions appointed by the OJK.

The following is detailed information regarding the concurrent positions of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan di Perseroan Concurrent Positions in the Company	Jabatan pada Perusahaan (Instansi) Lain Position in Other Companies (Institutions)
Sang In Lee	Komisaris Utama President Commissioner	- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2025 – saat ini); dan - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2025 – saat ini) - Member of the Company's Risk Oversight Committee (2025 – present); and - Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2025 – present)	General Manager Grup Bisnis Global KB Kookmin Card Co., Ltd (2024 – saat ini) General Manager of KB Kookmin Card Co., Ltd Global Business Group (2024 – present)
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Ketua Komite Audit Perseroan (2021 – saat ini); - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2021 – saat ini); dan - Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (2021 – saat ini). - Chairman of the Company's Audit Committee (2021 – present);- - Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2021 – present); and - Chairman of the Company's Risk Oversight Committee (2021 – present).	- Direktur PT Multi Berkat Energi (2018 – saat ini); dan - Direktur PT Massada Komunikasi (2003 – saat ini). - Director of PT Multi Berkat Energi (2018 – present); - and- Director of PT Massada Komunikasi (2003 – present).
Je Ui Jung	Komisaris Commissioner	-	- Komisaris – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022 – sekarang). - Direktur – PT Sinergi Sukses Indonesia (2019 – sekarang) - Direktur – PT Lebih Bagus Eng (2018 – sekarang) - Commissioner – PT Sunindo Kookmin Best Finance (2022 – present) - Director – PT Sinergi Sukses Indonesia (2019 – present) - Director – PT Lebih Bagus Eng (2018 – present)



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dewan Komisaris Perseroan menegaskan komitmen untuk mencegah benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai bagian dari penerapan GCG. Pengelolaan benturan kepentingan diatur dalam Kebijakan Internal Perseroan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Pasal 27 Pedoman Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
2. Memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
4. Mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam situasi atau transaksi yang mengandung atau berpotensi memiliki benturan kepentingan. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara berkala untuk memastikan keputusan Dewan Komisaris tetap independen, transparan, dan akuntabel.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih, baik di Perseroan maupun di perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri. Informasi tersebut telah dilaporkan secara rutin dalam Laporan Tata Kelola Perseroan yang disampaikan setiap tahun kepada OJK. Pengungkapan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 Pedoman Dewan Komisaris serta regulasi POJK 48/2024 guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap prinsip-prinsip GCG.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi pengawasan secara independen, bebas dari benturan kepentingan, dan berpegang pada prinsip GCG. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan akuntabel.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

The Company's Board of Commissioners affirms its commitment to preventing conflicts of interest as part of its GCG implementation. Conflict of interest management is regulated in the Company's Internal Policy and complies with applicable laws and regulations. Pursuant to Article 27 of the Board of Commissioners Guidelines, members of the Board of Commissioners are prohibited from:

1. Conduct transactions that have a conflict of interest with the Company's activities;
2. Take advantage of their position in the Company for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Company's profits;
3. Take and/or receive personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision; and
4. Interfere in the Company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors, unless otherwise stipulated in the Articles of Association.

Throughout 2025, no member of the Board of Commissioners was involved in any situation or transaction that contained or had the potential to contain a conflict of interest. The implementation of this policy is regularly monitored to ensure that the Board of Commissioners' decisions remain independent, transparent, and accountable.

TRANSPARENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Each member of the Company's Board of Commissioners is required to disclose share ownership of 5% or more, both in the Company and in other companies, both domestic and international. This information is routinely reported in the Corporate Governance Report submitted annually to the Financial Services Authority (OJK). This disclosure aligns with Article 66 of the Board of Commissioners Guidelines and POJK 48/2024 to ensure transparency, accountability, and compliance of Board of Commissioners members with GCG principles.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners carries out its supervisory function independently, free from conflicts of interest, and adheres to GCG principles. All members of the Board of Commissioners have met the independence criteria as required by applicable laws and regulations, enabling them to carry out their supervisory function objectively and accountably.



RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris Perseroan wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris maupun atas permintaan satu atau lebih pemegang saham. Kebijakan ini diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris Perseroan dan selaras dengan ketentuan POJK 33/2014.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, yang tidak memiliki hak suara untuk menentukan keputusan rapat. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Komisaris Pemegang Saham Mayoritas yang ditunjuk oleh KB Kookmin Card Corp. atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan sah tanpa mengadakan rapat formal, dengan syarat seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis terhadap usul yang diajukan. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2025, rapat Dewan Komisaris telah diadakan sebanyak 6 (enam) kali. Informasi terkait frekuensi rapat dan tingkat kehadiran secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Moon Cheol Kang ¹⁾	Komisaris Utama President Commissioner	–	–	–
Sang In Lee ²⁾	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Je Ui Jung ³⁾	Komisaris Commissioner	4	4	100%

¹⁾ Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama efektif per tanggal 31 Januari 2025;

²⁾ Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama per tanggal 20 Juni 2025;

³⁾ Efektif menjabat sebagai Komisaris per tanggal 14 Mei 2025.

¹⁾ No longer serves as President Commissioner effective as of January 31, 2025;

²⁾ Effective as President Commissioner as of June 20, 2025;

³⁾ Effective as Commissioner as of May 14, 2025.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Meeting Policy

The Company's Board of Commissioners is required to hold meetings at least once every two months, or at any time deemed necessary by the Board of Commissioners or at the request of one or more shareholders. This policy is stipulated in the Company's Board of Commissioners Guidelines and aligns with the provisions of POJK 33/2014.

Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner, who does not have voting rights to determine meeting decisions. If the President Commissioner is unable to attend, the meeting may be chaired by the Commissioner, the Majority Shareholder, appointed by KB Kookmin Card Corp., or by another member of the Board of Commissioners present, in accordance with the Company's Articles of Association.

Furthermore, the Board of Commissioners may make valid decisions without holding a formal meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and have given their written approval to the proposal. Decisions made through this mechanism have the same legal force as decisions made at a Board of Commissioners meeting.

Meeting Frequency and Level of Attendance

During 2025, the Board of Commissioners held six meetings. Detailed information regarding meeting frequency and attendance levels is presented in the following table:



Agenda Rapat

Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

The Board of Commissioners meeting held in 2025 discussed the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	- Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Tahun 2024; dan - Rencana Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	- Financial Literacy and Financial Inclusion Education Activities for 2024; and - Financial Literacy and Financial Inclusion Education Activity Plan for 2025
2.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Update Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bapak Sang In Lee dan Bapak Je Ui Jung	Update on the Fit and Proper Test Process for Mr. Sang In Lee and Mr. Je Ui Jung
3.	30 Mei 2025 May 30, 2025	Peninjauan Hasil KPI Manajemen Tahun 2024 dan Penetapan KPI Manajemen Tahun 2025	Review of 2024 Management KPI Results and Determination of 2025 Management KPIs
4.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Peninjauan Kinerja Kuartal II	Second Quarter Performance Review
5.	26 September 2025 September 26, 2025	- Amandemen Peraturan Dewan Komisaris - Amandemen Peraturan Komite di bawah Dewan Komisaris dan Penetapan Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Penyaluran Pembiayaan; dan - Update atas Implementasi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM)	- Amendments to the Board of Commissioners Regulations - Amendments to the Regulations of the Committees under the Board of Commissioners and the Stipulation of the Board of Commissioners' Decisions on Financing Distribution Policies; and - Updates on the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Weapons of Mass Destruction Proliferation (AML, CFT & PPPSPM)
6.	27 November 2025 November 27, 2025	Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan KB FMF Tahun 2025 serta Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2026	Realization of Financial Literacy and Inclusion Activities of KB FMF in 2025 and Financial Inclusion Activity Plan in 2026

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan rapat gabungan bersama Direksi minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat gabungan ini bertujuan untuk membahas kinerja Perseroan, isu-isu strategis, serta pengambilan keputusan penting yang mendukung keberlanjutan dan pencapaian tujuan strategis Perseroan. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi, guna memastikan pengawasan yang efektif serta pengambilan keputusan yang akuntabel. Kebijakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam Pasal 50 dan 62 Pedoman Dewan Komisaris Perseroan, serta selaras dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 33/2014 dan regulasi terkait perusahaan pembiayaan.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Meeting Policy

The Company's Board of Commissioners is required to hold a joint meeting with the Board of Directors at least once every 3 (three) months. This joint meeting aims to discuss the Company's performance, strategic issues, and make important decisions that support the sustainability and achievement of the Company's strategic objectives. This activity also serves as a means of coordination and synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors, to ensure effective supervision and accountable decision-making. The policy for joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors is stated in Articles 50 and 62 of the Company's Board of Commissioners Guidelines, and is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, POJK 33/2014 and regulations related to financing companies.



Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2025, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Informasi terkait frekuensi rapat dan tingkat kehadiran secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Meeting Frequency and Level of Attendance

During 2025, 4 (four) Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors were held, attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Detailed information regarding meeting frequency and attendance levels is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Moon Cheol Kang ¹⁾	Komisaris Utama President Commissioner	–	–	–
Sang In Lee ²⁾	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%
Je Ui Jung ³⁾	Komisaris Commissioner	2	2	100%
Yap Tjay Hing ⁴⁾	Direktur Utama President Director	2	2	100%
Peter Halim ⁵⁾	Direktur Utama President Director	4	4	100%
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	4	4	100%
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Mansia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	4	4	100%
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	4	4	100%
Choi, Ho Jung	Direktur Director	4	4	100%
Kyeongho Min	Direktur Director	4	4	100%

¹⁾ Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama efektif per tanggal 31 Januari 2025;

²⁾ Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama per tanggal 20 Juni 2025;

³⁾ Efektif menjabat sebagai Komisaris per tanggal 14 Mei 2025;

⁴⁾ Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif per tanggal 3 Juli 2025;

⁵⁾ Efektif menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 11 September 2025, sebelumnya beliau merupakan Direktur Perseroan.

¹⁾ No longer serves as President Commissioner effective as of January 31, 2025;

²⁾ Effective as President Commissioner as of June 20, 2025;

³⁾ Effective as Commissioner as of May 14, 2025;

⁴⁾ No longer serves as President Director effective as of July 3, 2025;

⁵⁾ Effective as President Director as of September 11, 2025, previously served as Director of the Company.

Agenda Rapat

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas topik agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

The joint meeting of the Board of Commissioners and Directors held in 2025 discussed the following agenda topics:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Kinerja Perseroan Q4 Tahun 2024	Q4 2024 Company Performance
2.	30 April 2025 April 30, 2025	Kinerja Perseroan Q1 Tahun 2025	Q1 2025 Company Performance
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Kinerja Keuangan Semester I 2025 dan Prioritas Utama Semester II 2025	Financial Performance for Semester I 2025 and Key Priorities for Semester II 2025
4.	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Kinerja Perseroan Q3 Tahun 2025	Q3 2025 Company Performance



PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Kebijakan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Pedoman Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal ini, Perseroan menetapkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, Perseroan juga menyediakan akses bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengembangkan kompetensi dan berbagi wawasan melalui berbagai media, termasuk forum diskusi, seminar, webinar, serta kegiatan pengembangan profesional lainnya, guna memastikan pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel.

Pelaksanaan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan aktif melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkesinambungan Perseroan dalam mendukung pengembangan kapasitas anggota Dewan Komisaris, serta memastikan pengawasan yang efektif, dan memperkuat penerapan prinsip GCG.

Berikut adalah daftar kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun 2025:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Nursalam Andi Tabusalla Komisaris Independen Independent Commissioner	Seminar Nasional Arah kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru National Seminar on OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Finance Companies	4 Februari 2025, bertempat di The Raffles Hotel, Jakarta Selatan February 4, 2025, at The Raffles Hotel, South Jakarta

PROGRAM ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS BARU TAHUN 2025

Perseroan belum memiliki kebijakan tertulis khusus mengenai program orientasi, namun setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat tetap mengikuti program orientasi yang komprehensif. Program ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Perseroan, melalui pertemuan dan diskusi dengan Direksi serta anggota Dewan Komisaris lain di Kantor Pusat, serta pengenalan operasional melalui kunjungan ke kantor cabang.

2025 BOARD OF COMMISSIONERS EDUCATION AND/OR TRAINING PROGRAM

Board of Commissioners Education and/or Training Program Policy

The Company's Board of Commissioners is required to continuously improve its competency through education and training programs, as stipulated in Article 39 of the Board of Commissioners Guidelines. To support this, the Company has established a policy that provides opportunities for members of the Board of Commissioners to participate in training programs relevant to their duties and responsibilities. Furthermore, the Company also provides access for all members of the Board of Commissioners to develop their competencies and share insights through various media, including discussion forums, seminars, webinars, and other professional development activities, to ensure effective and accountable oversight and decision-making.

Implementation of the 2025 Board of Commissioners Education and/or Training Program

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners actively implemented education and training programs to enhance competency and knowledge relevant to its supervisory duties and responsibilities. These activities are part of the Company's ongoing commitment to supporting the capacity development of Board of Commissioners members, ensuring effective oversight, and strengthening the implementation of GCG principles.

The following is a list of education and training programs attended by Board of Commissioners members in 2025:

ORIENTATION PROGRAM FOR THE NEW BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The Company does not yet have a specific written policy regarding an orientation program, but each newly appointed member of the Board of Commissioners still undergoes a comprehensive orientation program. This program aims to provide a comprehensive understanding of the Company through meetings and discussions with the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners at the Head Office, as well as an operational introduction through visits to branch offices.



Beberapa sesi orientasi juga dilengkapi dengan pemaparan dari unit kerja atau Departemen terkait, sehingga anggota baru memperoleh wawasan yang memadai untuk mengambil keputusan yang independen, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip GCG dan ketentuan POJK terkait pengelolaan Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan program orientasi khusus bagi anggota Dewan Komisaris yang baru bergabung, yaitu Bapak Sang In Lee sebagai Komisaris Utama dan Bapak Je Ui Jung sebagai Komisaris. Program ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Perseroan, termasuk struktur organisasi, operasional, dan kebijakan tata kelola. Materi yang diberikan selama program orientasi mencakup:

1. Pemahaman menyeluruh mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, dan Strategi Perseroan;
2. Kunjungan langsung (*on site*) ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk bertatap muka dan berinteraksi dengan jajaran manajemen Perseroan;
3. Studi mendalam tentang tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan panjang, posisi di pasar, risiko, serta isu strategis lainnya yang relevan;
4. Kajian dokumen penting Perseroan, termasuk Anggaran Dasar, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pedoman tata tertib Dewan Komisaris, laporan keuangan, serta regulasi yang berkaitan dengan proses bisnis Perseroan; dan
5. Pemahaman mengenai kewenangan yang diberikan kepada audit internal dan eksternal, sistem serta kebijakan pengendalian internal, termasuk peran komite audit.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penerapan prinsip GCG di seluruh kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan rapat dan penelaahan laporan rutin sepanjang tahun, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi, termasuk melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, guna mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara efektif dan berkelanjutan.

Several orientation sessions also include presentations from relevant work units or departments, so that new members gain sufficient insight to make independent, transparent, and accountable decisions, in line with GCG principles and the POJK provisions regarding the management of the Board of Commissioners.

In 2025, the Company held a special orientation program for newly joined members of the Board of Commissioners, namely Mr. Sang In Lee as President Commissioner and Mr. Je Ui Jung as Commissioner. This program, implemented in 2025, was designed to provide a comprehensive understanding of the Company, including its organizational structure, operations, and governance policies. Materials provided during the orientation program included:

1. A comprehensive understanding of the Company's Vision, Mission, Values, and Strategy;
2. On-site visits to the Head Office and Branch Offices to meet and interact with the Company's management;
3. An in-depth study of the Company's objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, market position, risks, and other relevant strategic issues;
4. A review of the Company's key documents, including the Articles of Association, the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners' code of conduct, financial reports, and regulations relating to the Company's business processes; and
5. Understanding the authority granted to internal and external audits, internal control systems and policies, including the role of the audit committee.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities to ensure the implementation of GCG principles across all of the Company's business activities at all levels of the organization. The Board of Commissioners played an active role in holding routine meetings and reviewing reports throughout the year, and oversaw the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities periodically and intermittently. Furthermore, the Board of Commissioners provided direction and recommendations to the Board of Directors, including through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, to support the effective and sustainable achievement of the Company's strategic objectives.



Informasi lebih komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dijabarkan secara rinci dalam Bab Laporan Manajemen, Sub Bab Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

More comprehensive information regarding the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function is detailed in the Management Report chapter, Sub-Chapter "Board of Commissioners' Report" of this Annual Report.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja

Performance Assessment Procedures and Criteria

Penilaian kinerja terhadap komite pendukung Dewan Komisaris, meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko mengacu pada kriteria *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati bersama pada awal tahun dan dirancang untuk mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi setiap komite dalam mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Kriteria penilaian masing-masing komite meliputi, antara lain:

The performance assessment of the Board of Commissioners' supporting committees, including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee, refers to Key Performance Indicators (KPIs) criteria mutually agreed upon at the beginning of the year and designed to reflect the effectiveness, efficiency, and contribution of each committee in supporting the Board of Commissioners' oversight duties. The assessment criteria for each committee include, among other things:

1. Tingkat pemenuhan agenda kerja dan rencana kerja tahunan komite;
2. Kualitas analisis, rekomendasi, dan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Pedoman Dewan Komisaris;
4. Tingkat partisipasi dan kontribusi setiap anggota dalam rapat dan diskusi komite;
5. Penerapan prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan komite.

1. The level of fulfillment of the committee's work agenda and annual work plan;
2. The quality of analysis, recommendations, and reports submitted to the Board of Commissioners;
3. Compliance with laws and regulations and the Board of Commissioners' Guidelines;
4. The level of participation and contribution of each member in committee meetings and discussions;
5. The application of the principles of transparency, independence, and accountability in all committee activities.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas komite dan memberikan arahan atau perbaikan yang diperlukan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

The results of these assessments then serve as the basis for the Board of Commissioners to evaluate the effectiveness of the committees and provide necessary direction or improvements, while supporting appropriate and sustainable decision-making.

Hasil Penilaian Kinerja Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2025

Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners' Supporting Committees in 2025

Komite Audit

Audit Committee

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara optimal, khususnya terkait pengawasan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan regulator. Melalui pelaksanaan serangkaian rapat, penelaahan dokumen, dan diskusi mendalam dengan Divisi Audit Internal serta auditor eksternal, Komite Audit dinilai telah memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan proses audit dan penguatan kontrol internal.

Throughout 2025, the Board of Commissioners assessed that the Audit Committee optimally supported the implementation of its supervisory duties, particularly regarding the oversight of financial statements, the effectiveness of the internal control system, and the Company's compliance with regulatory requirements. Through a series of meetings, document reviews, and in-depth discussions with the Internal Audit Division and external auditors, the Audit Committee was assessed as having provided strategic recommendations for improving the audit process and strengthening internal controls.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya secara tepat dan terukur sepanjang 2025. Komite ini memastikan kebijakan nominasi, suksesi, dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tetap selaras dengan strategi bisnis, prinsip GCG, serta dinamika pasar tenaga kerja. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga memberikan rekomendasi terkait pengembangan sumber daya manusia di tingkat Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memberikan kontribusi maksimal dalam pengawasan risiko Perseroan. Komite ini memastikan penerapan manajemen risiko secara konsisten di seluruh aktivitas usaha melalui pemantauan profil risiko, evaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko, serta penelaahan berbagai laporan risiko utama. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko secara berkala memberikan masukan strategis untuk memperkuat proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan serta mitigasi, dan pelaporan risiko, termasuk jenis risiko sesuai dengan ketentuan dan prinsip manajemen risiko yang berlaku.

Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners assessed that the Nomination and Remuneration Committee performed its functions appropriately and measurably throughout 2025. This committee ensured that the nomination and remuneration policies for members of the Board of Commissioners and Board of Directors remained aligned with business strategy, GCG principles, and labor market dynamics. Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee also provided recommendations regarding human resource development at the Board of Directors and Board of Commissioners levels.

Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee made a maximum contribution to the Company's risk oversight. This committee ensured the consistent implementation of risk management across all business activities by monitoring risk profiles, evaluating the effectiveness of the risk management framework, and reviewing various key risk reports. Throughout 2025, the Risk Oversight Committee periodically provided strategic input to strengthen the processes of risk identification, measurement, control, monitoring and mitigation, and reporting, including risk types in accordance with applicable risk management provisions and principles.

Komisaris Independen Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak eksternal. Keberadaan Komisaris Independen di jajaran Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan setiap proses pengawasan dan pengambilan keputusan di Perseroan berlangsung sesuai dengan prinsip GCG. Komisaris Independen ditunjuk berdasarkan kriteria khusus, memiliki latar belakang profesional yang beragam, serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali.

Independent Commissioners are external members of the Board of Commissioners. Their presence on the Board of Commissioners aims to ensure that all supervisory and decision-making processes within the Company are conducted in accordance with GCG principles. Independent Commissioners are appointed based on specific criteria, possess diverse professional backgrounds, and have no financial, managerial, ownership, or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling shareholders.



JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN PER 31 DESEMBER 2025

Perusahaan pembiayaan dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, sesuai dengan POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen dari total 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris. Dengan komposisi ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan OJK mengenai jumlah dan proporsi Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 POJK No. 48/2024, Perseroan telah menetapkan kriteria atau kualifikasi individual yang harus dipenuhi oleh seorang Komisaris Independen, antara lain:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, pemegang saham dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
5. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
6. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
8. Berkewarganegaraan Indonesia.
9. Berdomisili di Indonesia.

NUMBER OF INDEPENDENT COMMISSIONERS AS OF DECEMBER 31, 2025

Finance companies with total assets exceeding IDR250,000,000,000.00 (two hundred and fifty billion rupiah) are required to have at least one Independent Commissioner, in accordance with OJK Regulation 48/2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

As of December 31, 2025, the Company had one Independent Commissioner out of a total of three members of the Board of Commissioners. With this composition, the Company has complied with OJK regulations regarding the number and proportion of Independent Commissioners within the Board of Commissioners structure.

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA

By taking into account the provisions of Article 49 of POJK No. 48/2024, the Company has established individual criteria or qualifications that must be met by an Independent Commissioner, including:

1. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, shareholders and/or members of the Company's Sharia Supervisory Board.
2. Has never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board, or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the Company or another company that has an affiliated relationship with the Company within the last 6 (six) months.
3. Is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period.
4. Understands laws and regulations in the field of financing and other relevant laws and regulations.
5. Have good knowledge of the Company's financial condition.
6. Does not have shares either directly or indirectly in the Company.
7. Does not have any business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.
8. An Indonesian citizen.
9. Domiciled in Indonesia.



PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen menyampaikan pernyataan independensinya kepada OJK sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, objektivitas, dan kemandirian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pada tahun 2025, komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Bapak Nursalam Andi Tabusalla selaku Komisaris Independen Perseroan melalui Surat Pernyataan Independensi tertanggal 5 Maret 2025. Adapun isi pernyataan independensi tersebut mencakup hal-hal berikut ini:

1. Telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan OJK terkait lainnya yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Akan bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER'S INDEPENDENCE STATEMENT

Independent Commissioners submit their independence statements to the Financial Services Authority (OJK) as a commitment to maintaining integrity, objectivity, and independence in carrying out their supervisory functions. In 2025, this commitment was reaffirmed by Mr. Nursalam Andi Tabusalla, the Company's Independent Commissioner, through a Declaration of Independence Letter dated March 5, 2025. The contents of the Declaration of Independence include the following:

1. Has fulfilled the requirements to become a member of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and other applicable OJK regulations.
2. Has no affiliated relationship with either Shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners. Has no financial, management, share ownership, and/or familial relationship with Shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or other relationships.
3. Is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
4. Does not have shares either directly or indirectly in the Company.
5. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.
6. Act independently in carrying out duties and responsibilities as an Independent Commissioner of the Company.



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang memegang tanggung jawab penuh, baik secara individual maupun kolektif, atas seluruh manajemen operasional Perseroan. Selain itu, Direksi bertindak sebagai wakil Perseroan dalam berbagai kegiatan, baik di lingkup internal maupun eksternal, termasuk di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Peran ini menegaskan tanggung jawab Direksi dalam mengambil keputusan strategis, menjalankan operasional harian, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG.

DASAR HUKUM

Proses pembentukan, pengangkatan, serta pelaksanaan tugas Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK 27/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
5. Anggaran Dasar Perseroan; dan
6. Pedoman Direktur Perseroan.

PEDOMAN DIREKSI

Pedoman Direksi Perseroan ditetapkan pertama kali pada 16 Maret 2022 sebagai acuan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi. Pedoman ini bertujuan memastikan setiap anggota Direksi melaksanakan perannya secara profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendukung kepentingan Perseroan serta penerapan prinsip GCG.

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Direksi telah diselaraskan dengan ketentuan POJK No. 48/2024, antara lain mencakup:

1. Pengantar dan Ketentuan Umum
2. Peran dan Akuntabilitas
3. Struktur dan Keanggotaan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Pembentukan Komite

The Board of Directors is the Company's organ that holds full responsibility, both individually and collectively, for all of the Company's operational management. Furthermore, the Board of Directors acts as the Company's representative in various activities, both internally and externally, including both inside and outside the courts, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association. This role emphasizes the Board of Directors' responsibility in making strategic decisions, carrying out daily operations, and ensuring compliance with laws and regulations and GCG principles.

LEGAL BASIS

The process of forming, appointing, and carrying out the duties of the Company's Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws and regulations, including:

1. Law 40/2007 on Limited Liability Companies;
2. POJK 33/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. POJK 27/2016 on the Assessment of Competence and Suitability for Key Personnel of Financial Services Institutions;
4. POJK 48/2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Institutions;
5. The Company's Articles of Association; and
6. The Company's Board of Director Charter.

BOARD OF DIRECTORS' CHARTER

The Company's Board of Directors Guidelines were first established on March 16, 2022, as a reference for carrying out the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors. These guidelines aim to ensure that each member of the Board of Directors carries out their role professionally, transparently, and with integrity, while supporting the Company's interests and the implementation of GCG principles.

The principles stipulated in the Board of Directors Guidelines have been aligned with the provisions of POJK No. 48/2024, including:

1. Introduction and General Provisions
2. Role and Accountability
3. Structure and Membership
4. Duties and Responsibilities
5. Establishment of Committees



6. Wewenang
7. Transparansi
8. Etika Kerja
9. Rapat dan Pelaksanaannya
10. Masa Jabatan
11. Pelaporan

Pada tahun 2025, pedoman ini masih dinilai relevan dan belum memerlukan pembaruan. Sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, Pedoman Direksi telah dipublikasikan di situs web Perseroan dan dapat diakses melalui tautan berikut: www.kreditplus.com/good-corporate-governance.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Direksi Perseroan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Periode menjabat masing-masing anggota Direksi dimulai sejak pelaksanaan RUPS yang menetapkan pengangkatannya atau berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

Anggota Direksi juga berhak mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir, dengan ketentuan permohonan pengunduran diri disampaikan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri, sehingga proses pengelolaan dan pergantian Direksi tetap berjalan lancar.

KRITERIA KEANGGOTAAN DIREKSI

Perseroan memastikan bahwa setiap anggota Direksi yang menjabat adalah individu yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kompetensi profesional dan integritas tinggi. Setiap anggota Direksi ditunjuk berdasarkan standar kriteria yang mencakup kemampuan manajerial, pengalaman di bidang terkait, dan komitmen terhadap prinsip GCG.

Standar kriteria bagi anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - l. tindak pidana di sektor keuangan atau merugikan negara yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat;

6. Authority
7. Transparency
8. Work Ethics
9. Meetings and Proceedings
10. Term of Office
11. Reporting

In 2025, these guidelines were still relevant and no updates were deemed necessary. As a form of openness and transparency to all stakeholders, the Board of Directors' Guidelines have been published on the Company's website and can be accessed through the following link: www.kreditplus.com/good-corporate-governance.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office of the Company's Board of Directors is set at three years and may be extended for an equal period. Each member of the Board of Directors' term of office begins upon the appointment at the GMS, or is effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK).

Members of the Board of Directors also have the right to resign before the end of their term of office, provided that the resignation request is submitted in writing to the Company no later than 30 (thirty days) prior to the effective date of resignation, to ensure the smooth management and replacement of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP CRITERIA

The Company ensures that each of the incumbent members of its Board of Directors is an individual who meets the regulatory criteria, and possesses professional competence and high integrity. Each member of the Board of Directors is appointed based on standard criteria that include managerial ability, experience in related fields, and commitment to GCG principles.

The standard criteria for members of the Company's Board of Directors are as follows:

- a. competent to perform legal acts;
- b. possess good character, morals, and integrity, demonstrated at least by complying with applicable regulations, including never having been convicted of a crime within a certain period prior to nomination, including:
 - l. criminal offenses in the financial sector or those that cause state losses for which the sentence has been completed within the last 20 (twenty) years prior to nomination and during the term of office;



- II. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- III. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 terakhir sebelum dicalonkan.
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
- g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
- h. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan serta mampu berkomunikasi dengan baik. Seluruh anggota Direksi Perseroan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
- i. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional
- j. mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- k. mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi.
- l. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan lainnya
- II. felony offenses, namely crimes listed in the Criminal Code (KUHP) and/or equivalent KUHPs abroad that carry a penalty of 1 (one) year or more imprisonment for which the sentence has been completed within the last 10 (ten) years prior to nomination; and/or
- III. Other crimes punishable by imprisonment of 1 (one) year or more, including corruption, money laundering, narcotics/psychotropic substances, smuggling, customs, excise, human trafficking, illicit arms trafficking, terrorism, counterfeiting, taxation, forestry, environmental, and maritime and fisheries offenses, for which the sentence has been completed within the last 20 days prior to nomination.
- c. Never having been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt within the 5 (five) years prior to appointment and during their term of office.
- d. Have never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their term of office: (a) has failed to hold an Annual GMS, (b) whose accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has been rejected by the GMS or whose accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has been failed to be presented to the GMS, and (c) has caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority ("OJK") to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the OJK within 5 (five) years prior to their appointment and during their term of office.
- e. have a commitment to complying with laws and regulations.
- f. have a commitment to developing a healthy company.
- g. have no bad debts and/or financing.
- h. have the ability, knowledge, experience, and/or expertise in the fields required by the Company and are able to communicate effectively. All members of the Company's Board of Directors must possess knowledge relevant to their positions.
- i. be able to act in good faith, honestly, and professionally.
- j. be able to act in the interests of the Company and/or other stakeholders.
- k. Prioritize the interests of the Company and/or other stakeholders over personal interests.
- l. Capable of making decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and debtors, creditors, and/or other stakeholders.



- m. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.
- n. bukan pegawai atau pejabat aktif OJK.
- o. bukan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.

- m. Capable of avoiding the abuse of authority to obtain improper personal gain or cause losses to the Company.
- n. Not an active employee or official of the Financial Services Authority (OJK).
- o. Not an employee or official of the Financial Services Authority (OJK) if the person concerned has left the OJK less than 6 (six) months ago.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN DIREKSI

Pada tahun 2025, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sehubungan dengan diterimanya pengunduran diri Bapak Yap Tjay Hing dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Bapak Peter Halim sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Dengan dinamika tersebut, komposisi Direksi Perseroan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP

In 2025, the number and composition of the Company's Board of Directors changed compared to the previous year due to the acceptance of the resignation of Mr. Yap Tjay Hing from his position as President Director and the appointment of Mr. Peter Halim, who previously served as a Director, as the Company's new President Director.

Given these dynamics, the composition of the Company's Board of Directors throughout 2025 was as follows:

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2025 – September 2025

Composition of the Board of Directors for the Period January 1, 2025 – September 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Date of Passing the OJK Fit and Proper Test	Masa Jabatan Term of Office
Yap Tjay Hing	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 6 Juli 2022 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 23 dated July 6, 2022	10 Juni 2014 June 10, 2014	Juli 2022–Juli 2025 (Periode Kelima) July 2022–July 2025 (Fifth Term)
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 4 April 2024 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 33 dated April 4, 2024	21 Maret 2024 March 21, 2024	Maret 2024 – Maret 2029 (Periode Pertama) March 2024 – March 2029 (First Term)
Peter Halim	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 6 dated November 2, 2023	16 Oktober 2008 October 16, 2008	November 2023 – September 2025 (Periode Keempat) November 2023 – September 2025 (Fourth Term)
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023	20 Juni 2023 June 20, 2023	Juli 2023 – Juli 2028 (Periode Pertama) July 2023 – July 2028 (First Term)
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 52 dated April 8, 2021	21 Maret 2016 March 21, 2016	Maret 2021 – Februari 2026 (Periode Kedua) March 2021 – February 2026 (Second Term)
Choi, Ho Jung	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023	6 Juni 2023 June 6, 2023	Juli 2023 – Februari 2026 (Periode Pertama) July 2023 – February 2026 (First Term)
Kyeongho Min	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 269 tanggal 31 Desember 2024 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 269 dated December 31, 2024	20 November 2024 November 20, 2024	November 2024– November 2029 (Periode Pertama) November 2024– November 2029 (First Term)



Komposisi Direksi September 2025 – 31 Desember 2025

Composition of the Board of Directors for the Period September 2025 – December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Date of Passing the OJK Fit and Proper Test	Masa Jabatan Term of Office
Peter Halim	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 82 tanggal 16 September 2025 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 82 dated September 16, 2025	11 September 2025 September 11, 2025	September 2025 – September 2028 (Periode Pertama) September 2025 – September 2028 (First Term)
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 4 April 2024 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 33 dated April 4, 2024	21 Maret 2024 March 21, 2024	Maret 2024 – Maret 2029 (Periode Pertama) March 2024 – March 2029 (First Term)
Peter Halim	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 6 dated November 2, 2023	16 Oktober 2008 October 16, 2008	November 2023 – September 2025 (Periode Keempat) November 2023 – September 2025 (Fourth Term)
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023	20 Juni 2023 June 20, 2023	Juli 2023 – Juli 2028 (Periode Pertama) July 2023 – July 2028 (First Term)
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 52 dated April 8, 2021	21 Maret 2016 March 21, 2016	Maret 2021 – Februari 2026 (Periode Kedua) March 2021 – February 2026 (Second Term)
Choi, Ho Jung	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 122 dated July 26, 2023	6 Juni 2023 June 6, 2023	Juli 2023 – Februari 2026 (Periode Pertama) July 2023 – February 2026 (First Term)
Kyeongho Min	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 269 tanggal 31 Desember 2024 Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 269 dated December 31, 2024	20 November 2024 November 20, 2024	November 2024– November 2029 (Periode Pertama) November 2024– November 2029 (First Term)

Profil lengkap dari setiap anggota Direksi Perseroan telah dijelaskan secara rinci dalam bab Profil Perusahaan, Sub Bab Profil Direksi.

The complete profile of each member of the Company's Board of Directors is available in detail in the Company Profile chapter, Sub-Chapter Directors' Profile.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pedoman Direksi Perseroan mengatur bahwa setiap pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian anggota Direksi yang diajukan ke RUPS harus berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Nominasi. Calon anggota Direksi yang diusulkan wajib terlebih dahulu lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, guna memastikan setiap anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas, dan kualifikasi profesional yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Board of Directors Guidelines stipulate that any appointment, dismissal, or replacement of a member of the Board of Directors proposed to the GMS must be based on the recommendation of the Board of Commissioners or the Nomination Committee. Proposed candidates for the Board of Directors must first pass the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK), to ensure that each member of the Board of Directors possesses the competence, integrity, and professional qualifications appropriate to the Company's needs.



PENILAIAN KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DIREKSI

Pasal 2 POJK No. 27/2016 menetapkan bahwa setiap anggota Direksi Perseroan sebagai Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan OJK melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pihak Utama dalam Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, Perusahaan Modal Ventura (PMV), dan Perusahaan Pegadaian meliputi:

- 1) Pemegang Saham Pengendali;
- 2) Anggota Direksi;
- 3) Anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Penilaian ini bertujuan untuk memastikan calon Pihak Utama memiliki kompetensi, integritas, dan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direksi, meskipun telah diangkat melalui RUPS.

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Direksi yang menjabat per 31 Desember 2025 telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang diselenggarakan oleh OJK sehingga standar kompetensi, integritas, dan kualifikasi setiap anggota Direksi terjamin sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi memegang tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pencapaian tujuan Perseroan demi terpenuhinya kepentingan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi senantiasa mengacu pada Pedoman Direksi dan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perseroan;
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' SUITABILITY AND ELIGIBILITY

Article 2 of OJK Regulation No. 27/2016 stipulates that each member of the Company's Board of Directors, as a Principal Party, must obtain OJK approval through a Fit and Proper Test before carrying out their duties, functions, and authorities. Principal Parties in Financing Companies, Guarantee Institutions, Venture Capital Companies (PMV), and Pawnshops include:

- 1) Controlling Shareholders;
- 2) Members of the Board of Directors;
- 3) Members of the Board of Commissioners; and
- 4) Members of the Sharia Supervisory Board.

This assessment aims to ensure that prospective Principal Parties possess the competency, integrity, and qualifications in accordance with applicable regulations. Prospective members of the Board of Directors who have not obtained OJK approval shall refrain from discharging their duties and functions as Directors, even if they have been appointed through a GMS.

The Company ensures that all members of the Board of Directors serving as of December 31, 2025, have passed the Fit and Proper Test conducted by the OJK, ensuring that the standards of competency, integrity, and qualifications of each member of the Board of Directors are guaranteed in accordance with applicable regulations.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors holds full responsibility for the management of the Company and plays a strategic role in achieving the Company's objectives in order to meet the interests of Shareholders and other stakeholders. In carrying out its duties, responsibilities, and authorities, the Board of Directors consistently refers to the Board of Directors' Guidelines and the Company's Articles of Association.

Based on these provisions, the Board of Directors' duties and responsibilities include, among others:

1. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the Company's management;
2. The Board of Directors is obliged to manage the Company in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;
3. The Board of Directors is obliged to implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels of the organization;



4. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan;
 5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
 6. Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan;
 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 8. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi paling kurang membentuk fungsi-fungsi berikut:
 - a. Audit Internal;
 - b. Manajemen Risiko; dan
 - c. Kepatuhan;
 9. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas;
 10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
 11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; dan
 12. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan. Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan.
4. The Board of Directors is fully responsible for determining the short-term and long-term strategic direction and priorities of the Company;
 5. The Board of Directors is required to disclose to employees regarding the Company's strategic policies in the field of personnel;
 6. The Board of Directors is required to implement the Company's social responsibility programs;
 7. The Board of Directors is required to follow up on audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities;
 8. In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors must at least form the following:
 - a. Internal Audit;
 - b. Risk Management; and
 - c. Compliance;
 9. The Board of Directors is required to maintain a healthy and open relationship with the Board of Commissioners and support the Board of Commissioners in carrying out its role as a supervisory organ
 10. The Board of Directors is required to be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS;
 11. The Board of Directors is required to provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners; and
 12. The Board of Directors is responsible for ensuring that the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Company. The Board of Directors must have a good understanding of the types and levels of risk inherent in the Company's business activities.

PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan Perseroan, Direksi menjalankan tanggung jawab secara kolegal maupun individual sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Perseroan telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota Direksi, dengan mempertimbangkan pengalaman profesional, latar belakang pendidikan, serta keahlian individu. Rincian pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

To maximize the Company's management function, the Board of Directors carries out its responsibilities both collegially and individually in accordance with their respective areas. The Company has established a clear division of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors, taking into account professional experience, educational background, and individual expertise. Details of the division of duties and authorities for each member of the Board of Directors are presented in the following table:



Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas	Field of Duties
Peter Halim	Direktur Utama President Director	- Memimpin dan memberikan arahan strategis Perseroan kepada seluruh Direksi dan manajemen untuk membangun tujuan jangka panjang, strategi, rencana, dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan seluruh lini bisnis Perseroan agar mencapai visi dan misi serta sasaran bisnis Perseroan. - Secara langsung memimpin dan mengarahkan beberapa unit kerja, yaitu: - Internal Audit; - Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan.	- Lead and provide strategic direction of the Company to all Board of Directors and management to build long-term goals, strategies, plans, and policies in running all lines of the Company's business in order to achieve the Company's vision, mission, and business targets. - Directly lead and direct several work units, namely: - Internal Audit; - Compliance & Corporate Secretary
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	- Mewakili Direktur Utama dalam menjalankan fungsinya dan fokus kepada memimpin secara strategis fungsi pemasaran & pengembangan produk, operasional bisnis, fungsi keuangan, risiko, sumber daya manusia serta teknologi informasi dan digitalisasi untuk mencapai visi dan misi Perseroan. - Secara langsung memimpin dan mengarahkan beberapa unit kerja, yaitu: - Teknologi Informasi & Digitalisasi; - Manajemen Risiko & Pengendalian Fraud; - Manajemen Risiko Kredit.	- Representing the President Director in carrying out his/her functions and focusing on strategically leading the marketing & product development functions, business operations, finance functions, risk, human resources as well as information technology and digitalization to achieve the Company's vision and mission. - Directly leading and directing several work units, namely: - Information Technology & Digitalization - Risk Management & Fraud Control - Credit Risk Management
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human resource & General Affairs Director	- Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengawasi strategi terkait sumber daya manusia dan general affairs dengan tujuan agar tercapainya visi dan misi Perseroan, terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi organisasi. - Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs menjalankan fungsinya dengan fokus utama pada: - Pengembangan SDM dan Organisasi Perseroan; - Pengembangan Talent SDM; - Menjalankan Learning and Development serta Rekrutmen; - Kompensasi dan Benefit; - General Affair; - Industrial Relation.	- Responsible for planning, developing, managing, and supervising strategies related to human resources and general affairs with the aim of achieving the Company's vision and mission, creating a healthy work environment, and increasing the effectiveness, productivity, and efficiency of the organization. - The Director of Human Resources & General Affairs carries out his/her functions with a primary focus on: - Development of the Company's Human Resources and Organization; - Development of HR Talent; - Implementing Learning and Development as well as Recruitment; - Compensation and Benefits; - General Affairs; - Industrial Relations
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	- Bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin perencanaan serta pengelolaan strategi dan operasional penjualan dari setiap produk yang ada di Perseroan untuk mencapai target yang telah ditetapkan Perseroan. - Menjalankan fungsinya dengan fokus utama pada: - Pengembangan bisnis baru; - Bisnis operasional Pembiayaan 2 Wheelers; - Bisnis Operasional DE & A; - Bisnis operasional Pembiayaan 4 Wheelers.	- Responsible for directing and leading the planning and management of sales strategies and operations for each product in the Company to achieve the targets set by the Company. - Carrying out its functions with a primary focus on: - New business development; 2 Wheelers Financing operational business; - DE & A operational business; 4 Wheelers Financing operational business
Choi, Ho Jung	Direktur Director	- Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan strategi keuangan dan <i>funding</i> perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dan menjaga tingkat kesehatan keuangan perusahaan. - Menjalankan fungsinya dengan fokus utama pada fungsi: - Keuangan & Akuntansi; - Pendanaan & Perbendaharaan.	- Responsible for planning, developing, managing, and overseeing the company's short-term, medium-term, and long-term financial and funding strategies to realize the company's vision and mission and maintain the company's financial health. - Performs duties with a primary focus on the following functions: - Finance & Accounting; - Funding & Treasury.



Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas	Field of Duties
Kyeongho Min	Direktur Director	- Bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin strategi pemasaran serta pengembangan produk dengan mengembangkan dan mengawasi inisiatif pemasaran strategis. - Pengembangan dan implementasi produk. - Memastikan aliansi bisnis yang menguntungkan untuk mencapai tujuan bisnis Perseroan. - Menjalankan fungsinya dengan fokus utama pada fungsi: - Pemasaran & Pengembangan Produk - Komunikasi Pemasaran - Implementasi Proyek Pemasaran - E-commerce & Partnerships - Korean Desk & Strategic Partnership	- Responsible for directing and leading marketing strategies and product development by developing and supervising strategic marketing initiatives. - Product development and implementation. - Ensuring profitable business alliances to achieve the Company's business objectives. - Carrying out its functions with a primary focus on the following functions: - Marketing & Product Development - Marketing Communications - Marketing Project Implementation - E-commerce & Partnerships - Korean Desk & Strategic Partnershi

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Pedoman Direksi pada Pasal 11 menetapkan bahwa anggota Direksi Perseroan tidak boleh menjabat sebagai Anggota Direksi di perusahaan lain, namun diperbolehkan merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris hingga maksimal 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, rangkap jabatan anggota Direksi Perseroan telah sepenuhnya memenuhi ketentuan Pedoman Direksi dan peraturan OJK. Rincian rangkap jabatan Direksi per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

BOARD OF DIRECTORS' CONCURRENT POSITION POLICY

Article 11 of the Board of Directors' Guidelines stipulates that member of the Company's Board of Directors may not serve as Board Members of other companies, but are permitted to concurrently serve as Board Commissioners of up to two (2) other companies and/or institutions, while still complying with applicable regulations.

Throughout 2025, the concurrent positions of members of the Company's Board of Directors fully complied with the provisions of the Board of Directors' Guidelines and OJK regulations. Details of concurrent Board of Directors positions as of December 31, 2025, are presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan pada Perusahaan (Instansi) lain Concurrent Positions in Other Companies (Agencies)
Yap Tjay Hing ¹⁾	Direktur Utama President Director	Tidak ada None
Peter Halim ²⁾	Direktur Utama President Director	Tidak ada None
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Tidak ada None
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	Tidak ada None
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	Tidak ada None
Choi, Ho Jung	Direktur Director	Tidak ada None
Kyeongho Min	Direktur Director	Tidak ada None

¹⁾ Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif per tanggal 3 Juli 2025;

²⁾ Efektif menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 11 September 2025, sebelumnya beliau merupakan Direktur Perseroan.

¹⁾ No longer serves as President Director effective as of July 3, 2025;

²⁾ Effective as President Director as of September 11, 2025, previously served as Director of the Company.



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pengelolaan benturan kepentingan merupakan aspek penting dalam penerapan prinsip GCG. Perseroan memastikan seluruh anggota Direksi menghindari setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sehingga setiap keputusan diambil secara independen dan objektif.

Pedoman Direksi mengatur secara jelas mekanisme pengungkapan, mitigasi, dan dokumentasi benturan kepentingan. Seluruh pengungkapan dicatat dan diawasi melalui mekanisme audit internal serta dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Komite terkait, sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang terlibat dalam situasi atau transaksi yang mengandung atau berpotensi memiliki benturan kepentingan. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara berkala untuk memastikan keputusan Dewan Komisaris tetap independen, transparan, dan akuntabel.

TRANSPARANSI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih, baik di Perseroan maupun di perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Informasi ini dicatat dalam Laporan Tata Kelola Perseroan yang disampaikan setiap tahun kepada OJK. Kebijakan terkait transparansi pengungkapan kepemilikan saham Direksi diatur dalam Pasal 37 Pedoman Direksi dan POJK 48/2024. Dengan berpedoman pada ketentuan internal dan regulasi yang berlaku, Perseroan memastikan seluruh anggota Direksi mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola.

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi Perseroan senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dengan memastikan setiap keputusan bebas dari benturan kepentingan. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi standar independensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Pedoman Direksi, sehingga tata kelola Perseroan tetap transparan dan akuntabel.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

Managing conflicts of interest is a crucial aspect of implementing GCG principles. The Company ensures that all members of the Board of Directors refrain from activities that could create a conflict of interest, ensuring that every decision is made independently and objectively.

The Board of Directors' Guidelines clearly regulate the mechanisms for disclosing, mitigating, and documenting conflicts of interest. All disclosures are recorded and monitored through an internal audit mechanism and periodically evaluated by the Board of Commissioners and relevant Committees, as a form of transparency to all stakeholders.

Throughout 2025, no member of the Board of Directors was involved in any situation or transaction that contained or potentially contained a conflict of interest. The implementation of this policy is monitored regularly to ensure that the Board of Commissioners' decisions remain independent, transparent, and accountable.

TRANSPARENCY OF BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

Each member of the Board of Directors is required to disclose to the Company any share ownership of 5% or more, both in the Company and in other companies domiciled domestically and internationally. This information is recorded in the Corporate Governance Report submitted annually to the Financial Services Authority (OJK). The policy regarding transparency in disclosure of share ownership by the Board of Directors is regulated in Article 37 of the Board of Directors Guidelines and POJK 48/2024. By adhering to internal provisions and applicable regulations, the Company ensures that all members of the Board of Directors adhere to the principles of transparency and accountability in implementing corporate governance.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Board of Directors consistently carries out its duties and responsibilities independently, ensuring that every decision is free from conflicts of interest. All members of the Board of Directors have met the independence standards stipulated in laws and regulations and the Board of Directors' Guidelines, ensuring that the Company's governance remains transparent and accountable.



DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

Perseroan memiliki seorang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha senantiasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, regulasi OJK, serta kebijakan internal yang berlaku. Direktur ini memiliki tanggung jawab utama untuk mengarahkan, mengawasi, dan memastikan efektivitas implementasi kerangka kepatuhan di seluruh lini organisasi, termasuk koordinasi dengan Dewan Komisaris dan unit audit internal serta pelaporan rutin kepada OJK.

Pada tahun 2025, fungsi kepatuhan Perseroan dijalankan oleh Bapak Peter Halim yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Direktur Kepatuhan efektif sejak 3 Juli 2025, menggantikan Bapak Yap Tjay Hing. Dalam kapasitas ini, beliau memastikan seluruh kegiatan Perseroan mematuhi ketentuan perundang-undangan, regulasi OJK, serta kebijakan internal yang berlaku. Lebih jauh, beliau juga mengawasi pengelolaan risiko hukum dan regulasi secara menyeluruh, sehingga penerapan prinsip kepatuhan berjalan konsisten di seluruh lini organisasi dan mendukung tata kelola Perseroan yang akuntabel dan transparan sesuai ketentuan POJK.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat

Direksi Perseroan menyelenggarakan rapat secara rutin sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan dan pengambilan keputusan yang efektif dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali setiap bulan atau pada saat dianggap perlu oleh seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi diharapkan dapat menghadiri sekurang-kurangnya 50% dari total rapat yang diselenggarakan selama satu tahun. Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat ini diatur dalam Pasal 60 Pedoman Direksi dan merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan.

Selain frekuensi dan kehadiran, Pedoman Direksi juga memuat aturan rinci terkait tata cara pelaksanaan rapat yang mencakup mekanisme pimpinan rapat, pengambilan keputusan, perwakilan anggota Direksi, serta prosedur dokumentasi dan pelaporan hasil rapat, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama namun tidak memiliki suara yang menentukan.
2. Jika Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan tanpa perlu pembuktian kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh pemegang saham pengendali sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

DIRECTOR IN CHARGE OF COMPLIANCE FUNCTION

The Company has a Director responsible for the compliance function, ensuring that all business activities fully comply with all regulatory provisions, OJK regulations, and internal policies. The Director is primarily responsible for directing, supervising, and ensuring the effective implementation of the compliance framework across the organization, including coordination with the Board of Commissioners and the internal audit unit, as well as regular reporting to the OJK.

In 2025, the Company's compliance function was assumed by Mr. Peter Halim, who served as President Director and Director of Compliance, effective July 3, 2025, succeeding Mr. Yap Tjay Hing. In this capacity, he ensures that all Company activities comply with applicable laws and regulations, OJK regulations, and internal policies. Furthermore, he also oversees the comprehensive management of legal and regulatory risks, ensuring consistent implementation of compliance principles across the organization and supporting accountable and transparent Company governance in accordance with POJK provisions.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Meeting Policy

The Company's Board of Directors holds regular meetings as part of its effective management and decision-making mechanism, with a minimum frequency of once a month or as deemed necessary by all members of the Board of Directors. Each member of the Board of Directors is expected to attend at least 50% of the total meetings held during a year. Provisions regarding the conduct of these meetings are stipulated in Article 60 of the Board of Directors' Guidelines and refer to the Company's Articles of Association.

In addition to frequency and attendance, the Board of Directors' Guidelines also contain detailed rules regarding meeting procedures, including the mechanism for chairing meetings, decision-making, representation of Board members, and procedures for documenting and reporting meeting results, as described below:

1. Board of Directors Meetings are chaired by the President Director but do not have a determining vote.
2. If the President Director is unable to attend without the need for proof to a third party, then the meeting will be chaired by a Director elected by the controlling shareholder in accordance with the provisions of the Articles of Association.



3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
 4. Rapat Direksi dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh dua anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham pengendali dan satu anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham minoritas.
 5. Keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan dibuat melalui pemungutan suara dengan persetujuan lebih dari 50% dari anggota Direksi yang hadir.
 6. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak memberikan satu suara serta tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 7. Rapat Direksi dapat dilaksanakan secara tatap muka atau melalui teknologi seperti *teleconference*, *video conference*, atau media elektronik lainnya.
 8. Hasil rapat Direksi harus dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
3. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
 4. A Board of Directors meeting is considered valid and can make binding decisions if attended by two members of the Board of Directors elected by the controlling shareholder and one member of the Board of Directors elected by the minority shareholder.
 5. Decisions in the Board of Directors meeting are taken based on deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, decisions are made through voting with the approval of more than 50% of the members of the Board of Directors present.
 6. Each member of the Board of Directors present has the right to cast one vote and one additional vote for each other member of the Board of Directors represented.
 7. Board of Directors meetings can be held face-to-face or through technology such as teleconference, video conference, or other electronic media.
 8. The results of the Board of Directors meeting must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors present, and submitted to all members of the Board of Directors.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2025, Direksi telah mengadakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat yang dihadiri oleh anggota Direksi. Informasi terkait frekuensi rapat dan tingkat kehadiran secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Meeting Frequency and Level of Attendance

During 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) meetings attended by its members. Detailed information about meeting frequency and attendance levels is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yap Tjay Hing ¹⁾	Direktur Utama President Director	6	5	83.3%
Peter Halim ²⁾	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director	12	11	91.6%
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	12	12	100%
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director	12	12	100%
Choi, Ho Jung	Direktur Director	12	12	100%
Kyeongho Min	Direktur Director	12	12	100%

¹⁾ Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif per tanggal 3 Juli 2025;

²⁾ Efektif menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 11 September 2025, sebelumnya beliau merupakan Direktur Perseroan.

¹⁾ No longer serves as President Director effective as of July 3, 2025;

²⁾ Effective as President Director as of September 11, 2025, previously served as Director of the Company.



Agenda Rapat

Rapat Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2025 membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

The Board of Directors meeting held in 2025 discussed various agendas as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Januari 2025	Monthly Review (Activities & Plans) January 2025
2.	25 Februari 2025 February 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Februari 2025	Monthly Review (Activities & Plans) February 2025
3.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Maret 2025	Monthly Review (Activities & Plans) March 2025
4.	29 April 2025 April 29, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) April 2025	Monthly Review (Activities & Plans) April 2025
5.	26 Mei 2025 May 26, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Mei 2025	Monthly Review (Activities & Plans) May 2025
6.	30 Juni 2025 June 30, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Juni 2025	Monthly Review (Activities & Plans) June 2025
7.	28 Juli 2025 July 28, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Juli 2025	Monthly Review (Activities & Plans) July 2025
8.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Agustus 2025	Monthly Review (Activities & Plans) August 2025
9.	29 September 2025 September 29, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) September 2025	Monthly Review (Activities & Plans) September 2025
10.	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Oktober 2025	Monthly Review (Activities & Plans) October 2025
11.	27 November 2025 November 27, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) November 2025	Monthly Review (Activities & Plans) November 2025
12.	8 Desember 2025 December 8, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Desember 2025	Monthly Review (Activities & Plans) December 2025

PROGRAM PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DIREKSI TAHUN 2025

Kebijakan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Perseroan mewajibkan setiap anggota Direksi untuk secara berkesinambungan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui program pendidikan dan/atau pelatihan yang relevan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Program ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang profesional, independen, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh kebijakan dan praktik operasional Perseroan sejalan dengan prinsip GCG dan ketentuan OJK.

Pelaksanaan program pendidikan dan/atau pelatihan dapat mencakup seminar, *workshop*, pelatihan teknis, forum diskusi, maupun kegiatan pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan Direksi. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman Direksi terhadap regulasi, praktik industri, manajemen risiko, serta tren dan dinamika pasar, sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkelanjutan.

2025 BOARD OF DIRECTORS EDUCATION AND/OR TRAINING PROGRAM

Directors' Education and/or Training Program Policy

The Company requires each member of the Board of Directors to continuously improve their competency and knowledge through educational and/or training programs relevant to their duties, functions, and responsibilities. These programs are designed to support professional, independent, and accountable decision-making, while ensuring that all Company policies and operational practices align with GCG principles and OJK regulations.

The implementation of educational and/or training programs may include seminars, workshops, technical training, discussion forums, and leadership development activities tailored to the needs of the Board of Directors. All of these activities are aimed at strengthening the Board of Directors' understanding of regulations, industry practices, risk management, and market trends and dynamics, thereby supporting the ongoing effectiveness of the Company's management.



Pelaksanaan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pengambilan keputusan. Program-program ini mencakup seminar, workshop, pelatihan teknis, dan forum diskusi yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Pelaksanaan program pendidikan dan/atau pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman Direksi terhadap regulasi, praktik industri, manajemen risiko, serta prinsip GCG sehingga mendukung pengelolaan Perseroan secara profesional, independen, dan berkelanjutan.

Informasi lebih rinci mengenai jenis program dan peserta yang mengikuti pelatihan dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Implementation of the 2025 Board of Directors Education and/or Training Program

Throughout 2025, the Company's Board of Directors participated in various relevant education and/or training programs to enhance their competency, knowledge, and decision-making capacity. These programs included seminars, workshops, technical training, and discussion forums tailored to the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors.

These education and/or training programs aimed to strengthen the Board of Directors' understanding of regulations, industry practices, risk management, and GCG principles, thereby supporting the professional, independent, and sustainable management of the Company.

More detailed information regarding the types of programs and the participants can be found in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Yap Tjay Hing Direktur Utama President Director Peter Halim Direktur Utama President Director Kisup Wi Wakil Direktur Utama Vice President Director Hery Susanto Dermawan Direktur Director Martina Haryanto Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director Choi, Ho Jung Direktur Director	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Finance Companies	4 Februari 2025 February 4, 2025
Yap Tjay Hing Direktur Utama President Director Martina Haryanto Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director	Seminar Nasional Will Trade War Create Financial Turmoil? National Seminar Will Trade War Create Financial Turmoil?	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Finance Companies	6 Mei 2025 May 6, 2025
Kyeongho Min Direktur Director	International Seminar Global, ASEAN, and Indonesia Economy International Seminar Global, ASEAN, and Indonesian Economy	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Finance Companies	11 July 2025 July 11, 2025



Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Peter Halim Direktur Utama President Director Kisup Wi Wakil Direktur Utama Vice President Director Hery Susanto Dermawan Direktur Director Kyeongho Min Direktur Director Martina Haryanto Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director Choi, Ho Jung Direktur Director	Seminar <i>Online Economic Outlook</i> Economic Outlook Online Seminar	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Finance Companies	2 September 2025 September 2, 2025
Peter Halim Direktur Utama President Director Kisup Wi Wakil Direktur Utama Vice President Director Hery Susanto Dermawan Direktur Director Kyeongho Min Direktur Director Martina Haryanto Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director Choi, Ho Jung Direktur Director	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU- PPT dan PPSM)l Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter- Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and PPSM) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	Hukum Online (PT Justika Siar Publika)	10 Desember 2025 December 10, 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan tata kelola, Perseroan memastikan bahwa anggota Direksi telah memenuhi OJK yang mewajibkan Direksi Perusahaan Pembiayaan memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan jenjang jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam POJK yang berlaku.

Pemenuhan sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami, mengelola, dan mengawasi risiko secara terintegrasi, sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

Board of Directors Risk Management Certification

As part of implementing the principle of prudence and strengthening governance, the Company ensures that members of its BoD have complied with the Financial Services Authority (OJK) requirement that Financing Company Directors hold Risk Management Certification in accordance with their respective positions, as stipulated in the applicable POJK.

This certification is intended to ensure that the Board of Directors has the competency in understanding, managing, and overseeing risks in an integrated manner, in line with the complexity of the Company's business activities.



Sehubungan dengan hal tersebut, anggota Direksi Perseroan yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko – Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bapak Yap Tjay Hing, memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko – Direksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia; dan
2. Bapak Choi, Ho Jung memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko – Direksi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

Dengan kepemilikan sertifikasi tersebut, Perseroan menilai bahwa Direksi telah memenuhi ketentuan regulator serta memiliki kapabilitas yang memadai dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU TAHUN 2025

Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur ketentuan tentang program orientasi bagi anggota Direksi baru. Namun demikian, setiap anggota Direksi yang baru diangkat tetap menjalani proses pengenalan secara komprehensif. Program orientasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas, tanggung jawab, dan peran strategis Direksi dalam pengelolaan Perseroan, sekaligus memperkenalkan kondisi operasional, struktur organisasi, kebijakan internal, serta regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan OJK dan prinsip GCG.

Proses orientasi bagi Direktur baru dilaksanakan melalui kunjungan ke Kantor Pusat untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi lainnya serta Dewan Komisaris. Selain itu, anggota Direksi baru juga melakukan kunjungan ke kantor cabang Perseroan guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kegiatan operasional, yang dalam beberapa kesempatan dilengkapi dengan pemaparan dari unit kerja atau Departemen terkait. Melalui kegiatan ini, Direksi baru memperoleh wawasan yang memadai untuk mengambil keputusan yang profesional, independen, dan akuntabel sejak awal masa jabatannya.

PENILAIAN KINERJA ORGAN-ORGAN DI BAWAH DIREKSI

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja

Direksi melaksanakan penilaian kinerja tahunan terhadap seluruh komite pendukung di bawahnya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian manajemen dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola Perseroan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap organ

In this regard, the following members of the Company's Board of Directors have obtained Risk Management Certification – Directors:

1. Mr. Yap Tjay Hing obtained the Risk Management Certification – Directors from the Indonesian Financing Professional Certification Institute; and
2. Mr. Choi Ho Jung obtained the Risk Management Certification – Directors from the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

With these certifications, the Company assesses that the Board of Directors has complied with regulatory requirements and possesses sufficient capabilities to support the implementation of effective and sustainable risk management.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS IN 2025

The Company does not yet have a policy specifically regulating the orientation program for new members of the Board of Directors. However, each newly appointed member of the Board of Directors undergoes a comprehensive induction process. This orientation program is designed to provide a comprehensive understanding of the duties, responsibilities, and strategic role of the Board of Directors in managing the Company, while also introducing the operational conditions, organizational structure, internal policies, and applicable regulations, including OJK provisions and GCG principles.

The orientation process for new Directors is carried out through a visit to the Head Office for meetings and discussions with other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, new members of the Board of Directors also visit the Company's branch offices to gain a comprehensive understanding of operational activities, supplemented on several occasions by presentations from relevant work units or departments. Through these activities, new Directors gain sufficient insight to make professional, independent, and accountable decisions from the beginning of their term.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF ORGANS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Performance Assessment Procedures and Criteria

The Board of Directors conducts an annual performance assessment of all of its supporting committees as part of its management control mechanism and the implementation of accountability principles in the Company's governance. This assessment aims to ensure that each supporting body



pendukung menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara efektif, selaras dengan strategi Perseroan, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur dan KPI yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Perseroan dengan cakupan kriteria utama sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan mandat, kewenangan, dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Tingkat pencapaian target kinerja dan kontribusi nyata terhadap sasaran strategis Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap kebijakan internal, standar operasional prosedur, serta regulasi yang berlaku;
4. Efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan penerapan prinsip kehati-hatian;
5. Kualitas, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan kepada Direksi; serta
6. Peran aktif dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Direksi dalam melakukan evaluasi kinerja, penyempurnaan proses kerja, serta penetapan langkah perbaikan dan penguatan fungsi organ pendukung guna memastikan keberlangsungan kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Hasil Penilaian Kinerja Komite-Komite Pendukung Direksi Tahun 2025

Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara efektif dalam menjaga kesehatan struktur neraca Perseroan. Komite secara aktif melakukan analisis dan memberikan rekomendasi yang tepat terkait pengelolaan likuiditas, strategi pendanaan, pengendalian risiko suku bunga, serta proyeksi arus kas. Melalui forum rapat dan pemantauan berkala, Komite dinilai mampu mendukung pengambilan keputusan Direksi yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kondisi pasar yang dinamis.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Direksi menilai bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan perannya secara optimal dalam memastikan keselarasan antara strategi teknologi informasi dan arah bisnis Perseroan. Komite memberikan arahan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap penyusunan dan implementasi *roadmap* teknologi informasi, penguatan keamanan siber, peningkatan efisiensi infrastruktur TI, serta pelaksanaan berbagai inisiatif digital.

carries out its functions, duties, and authorities effectively, in line with the Company's strategy, and in compliance with laws and regulations and the Financial Services Authority (OJK) regulations.

The assessment is conducted based on the procedures and Key Performance Indicators (KPIs) established in the Company's internal policies, covering the following main criteria:

1. Conformity of task implementation to established mandates, authorities, and work plans;
2. Level of achievement of performance targets and tangible contribution to the Company's strategic objectives;
3. Compliance with internal policies, standard operating procedures, and applicable regulations;
4. Effectiveness of risk management, internal control, and the application of the principle of prudence;
5. Quality, accuracy, and timeliness of reporting to the Board of Directors; and
6. Active role in supporting the implementation of Good Corporate Governance.

The Board of Directors use the assessment results to conduct performance evaluations, improve work processes, and determine steps for improvement and strengthen the functions of supporting organs to ensure the Company's continued performance.

Results of the Performance Assessment of the Board of Directors' Supporting Committees in 2025

Asset and Liability Management Committee

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that the Asset and Liability Management Committee effectively performed its supervisory and control functions in maintaining the Company's balance sheet structure. The Committee actively analyzed and provided appropriate recommendations regarding liquidity management, funding strategy, interest rate risk control, and cash flow projections. Through regular meetings and monitoring, the Committee was deemed capable of supporting the Board of Directors' decision-making in line with prudent principles and dynamic market conditions.

Information Technology Steering Committee

The Board of Directors assessed that the Information Technology Steering Committee optimally performed its role in ensuring alignment between the Company's information technology strategy and business direction. The Committee provided both short-term and long-term strategic direction regarding the development and implementation of the information technology roadmap, strengthening cybersecurity, increasing IT infrastructure



Seluruh upaya tersebut dinilai berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan, keandalan sistem, serta produktivitas operasional Perseroan.

Komite Manajemen Risiko

Direksi memberikan penilaian positif atas kinerja Komite Manajemen Risiko yang dinilai telah menjalankan mandatnya secara efektif dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Komite secara konsisten menelaah profil risiko Perseroan, mengevaluasi kecukupan parameter dan limit risiko, serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat pengendalian risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas. Direksi memandang bahwa Komite telah menjalankan fungsi pemantauan, pelaporan, dan eskalasi risiko secara disiplin, serta memastikan pengelolaan risiko tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kerangka regulasi OJK.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Perseroan. Direksi memfokuskan upaya pada penguatan kinerja operasional dan keuangan, penyempurnaan strategi bisnis berkelanjutan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi proses operasional di seluruh lini organisasi.

Dalam menghadapi dinamika industri dan tantangan pasar yang terus berkembang, Direksi mengambil berbagai langkah strategis, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan inovasi produk dan layanan, serta penyesuaian kebijakan dan proses bisnis yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Seluruh inisiatif tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Direksi juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Dewan Komisaris sebagai bagian dari penerapan GCG. Kolaborasi tersebut dilakukan guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan, mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Informasi lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tugas Direksi dijabarkan secara rinci dalam Bab Laporan Manajemen, Sub Bab Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

efficiency, and implementing various digital initiatives. All of these efforts were assessed as positively contributing to improving service quality, system reliability, and the Company's operational productivity.

Risk Management Committee

The Board of Directors positively assessed the performance of the Risk Management Committee, which was deemed to have effectively carried out its mandate in ensuring the implementation of comprehensive and integrated risk management. The Committee consistently reviews the Company's risk profile, evaluates the adequacy of risk parameters and limits, and provides strategic recommendations to strengthen credit, operational, market, and liquidity risk controls. The Board of Directors believes that the Committee has carried out its risk monitoring, reporting, and escalation functions in a disciplined manner, while ensuring that risk management remains in line with prudential principles and the OJK regulatory framework.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Company's Board of Directors consistently and responsibly carried out its management duties and responsibilities in accordance with its given mandate. The Board of Directors focused its efforts on strengthening operational and financial performance, refining sustainable business strategies, and increasing the effectiveness and efficiency of operational processes across the organization.

In response to industry dynamics and evolving market challenges, the Board of Directors took various strategic steps, including optimizing resource utilization, strengthening product and service innovation, and adapting policies and business processes to changing regulations and economic conditions. All of these initiatives were implemented while prioritizing the principles of prudence and integrated risk management.

The Board of Directors also maintained intensive coordination and communication with the Board of Commissioners as part of GCG implementation. This collaboration ensured the effectiveness of the supervisory function, support the achievement of the Company's strategic objectives, and create sustainable added value for shareholders and all stakeholders.

More comprehensive information regarding the implementation of the Board of Directors' duties is detailed in the Management Report chapter, Sub-Chapter "Board of Commissioners' Report" of this Annual Report.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri (*self-assessment*) sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta penerapan prinsip GCG. Penilaian ini dilakukan secara berkala dengan menggunakan metodologi dan parameter yang terukur, objektif, serta relevan dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Ruang lingkup penilaian mencakup aspek struktur dan komposisi Dewan Komisaris, efektivitas proses kerja dan mekanisme pengambilan keputusan, kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, tingkat independensi, efektivitas penyelenggaraan rapat, serta kontribusi masing-masing anggota dalam memberikan arahan strategis kepada Direksi. Pendekatan ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk menilai kinerja secara komprehensif, baik secara kolektif maupun individual.

Hasil *self-assessment* ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, termasuk dalam mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, seperti penguatan kompetensi, penyempurnaan tata kelola rapat, dan peningkatan efektivitas pengawasan. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan Dewan Komisaris pada periode berikutnya, sehingga fungsi pengawasan tetap adaptif terhadap dinamika usaha, selaras dengan ketentuan regulator, serta mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris disusun untuk mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta kontribusi Dewan Komisaris dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kolektif dan individual, melalui kriteria sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Performance Assessment Procedure

The Company's Board of Commissioners conducts an independent performance assessment (*self-assessment*) as part of its ongoing commitment to ensuring the effectiveness of its supervisory function and the application of GCG principles. This assessment is conducted periodically using a methodology and parameters that are measurable, objective, and relevant to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners.

The scope of the assessment includes aspects of the structure and composition of the Board of Commissioners, the effectiveness of work processes and decision-making mechanisms, the quality of the supervisory function, the level of independence, the effectiveness of meeting management, and the contribution of each member in providing strategic direction to the Board of Directors. This approach enables the Board of Commissioners to comprehensively assess performance, both collegially and individually.

The results of this *self-assessment* are then used as a tool for evaluation and continuous improvement, including identifying areas requiring improvement, such as strengthening competencies, refining meeting governance, and enhancing supervisory effectiveness. Furthermore, the assessment results serve as the basis for developing the Board of Commissioners' development plan for the following period, ensuring that the supervisory function remains adaptive to business dynamics, aligns with regulatory requirements, and provides optimal added value for the Company and all stakeholders.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The performance assessment criteria for the Board of Commissioners are designed to reflect the effectiveness of the Board's supervisory and advisory functions, as well as its contribution to supporting the achievement of the Company's strategic objectives. The assessment is conducted comprehensively, taking into account both collegial and individual aspects, through the following criteria:



1. Tingkat Kehadiran dan Partisipasi Rapat;
2. Kontribusi dalam Fungsi Pengawasan dan Pemberian Nasihat;
3. Keterlibatan dalam Penugasan Khusus;
4. Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Kebijakan.

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara berkelanjutan, sekaligus menjadi acuan dalam upaya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola Perseroan ke depan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara individual oleh setiap anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *self-assessment* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, independen, dan selaras dengan prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil *self-assessment* tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilakukan penelaahan secara independen dan komprehensif terhadap efektivitas kinerja Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan verifikasi dan penyalarsan hasil penilaian dengan kriteria dan indikator kinerja yang telah ditetapkan guna memastikan konsistensi, kewajaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal Perseroan.

Hasil akhir penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada para pemegang saham untuk memperoleh persetujuan dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 674 Pedoman Dewan Komisaris dan regulasi OJK yang mengatur penerapan tata kelola pada perusahaan pembiayaan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT KB Finansia Multi Finance untuk Tahun Buku 2025, Dewan Komisaris dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya secara efektif. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris tersebut telah berjalan selaras dengan kebijakan internal Perseroan, Anggaran Dasar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan peran pengawasan, pemberian nasihat, dan pengambilan keputusan strategis secara akuntabel,

1. Meeting Attendance and Participation;
2. Contribution to the Supervisory and Advisory Function;
3. Involvement in Special Assignments;
4. Compliance with Provisions and Policies.

These assessment criteria serve as the basis for ongoing evaluation of the Board of Commissioners' performance and serve as a reference for future efforts to improve the effectiveness of the supervisory function and strengthen the Company's governance.

Party Carrying Out the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out individually by each member of the Board of Commissioners through a self-assessment mechanism as a form of accountability for the implementation of their supervisory and advisory functions to the Board of Directors. This mechanism is designed to ensure that the assessment is conducted objectively, independently, and in accordance with GCG principles and applicable laws and regulations.

The results of the self-assessment are then submitted to the Nomination and Remuneration Committee for an independent and comprehensive review of the effectiveness of the Board of Commissioners' performance. The Nomination and Remuneration Committee verifies and aligns the assessment results with established criteria and performance indicators to ensure consistency, fairness, and compliance with the Company's internal regulations.

The final results of the Board of Commissioners' performance assessment are determined and become part of the Board of Commissioners' accountability report, which is disclosed in the Company's Annual Report. The report is then submitted to shareholders for approval at the GMS, in accordance with Article 67 of the Board of Commissioners Guidelines and OJK regulations governing the implementation of governance in finance companies.

Results of the 2025 Board of Commissioners Performance Assessment

Based on the results of a self-assessment of PT KB Finansia Multi Finance's Good Corporate Governance implementation for the 2025 Financial Year, the Board of Commissioners was deemed to have effectively carried out its supervisory duties and responsibilities. The Board of Commissioners' functions have been carried out in accordance with the Company's internal policies, the Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The assessment results indicate that the Board of Commissioners has carried out its supervisory, advisory, and strategic decision-making roles in an accountable,



independen, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung penerapan prinsip GCG secara konsisten di seluruh kegiatan usaha Perseroan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penerapan prinsip GCG. Proses penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada kriteria dan indikator kinerja yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, serta mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain penilaian oleh Dewan Komisaris, Direksi juga melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara tahunan terhadap efektivitas kinerja kolegal maupun individual. *Self-assessment* tersebut dilakukan dengan mengacu pada pencapaian KPI yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota Direksi pada awal tahun buku. KPI tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam rencana kerja Direksi yang selaras dengan strategi bisnis, sasaran kinerja, serta arah pengembangan Perseroan.

Hasil penilaian atas realisasi KPI dan pelaksanaan tugas Direksi kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi guna memastikan objektivitas, konsistensi, dan kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian serta standar tata kelola yang berlaku. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi penilaian kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan ditetapkan.

Hasil akhir penilaian kinerja Direksi selanjutnya dilaporkan kepada RUPS dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi berjalan secara efektif, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan strategis Perseroan. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek kolegal maupun individual, serta mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola

independent, and responsible manner, thus supporting the consistent implementation of GCG principles across all of the Company's business activities.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors Performance Assessment Procedure

The Board of Directors' performance assessment is conducted as part of the oversight mechanism and implementation of GCG principles. The assessment process is conducted by the Board of Commissioners, referring to the criteria and performance indicators recommended by the Nomination and Remuneration Committee, and considering the compliance of the Board of Directors' duties and responsibilities with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

In addition to the assessment by the Board of Commissioners, the Board of Directors also conducts an annual self-assessment of the effectiveness of both collegial and individual performance. This self-assessment is conducted based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon by all members of the Board of Directors at the beginning of the fiscal year. These KPIs are then incorporated into the Board of Directors' work plan, which aligns with the Company's business strategy, performance targets, and development direction.

The Nomination and Remuneration Committee then reviews the results of the assessment of KPI realization and the Board of Directors' duties to ensure objectivity, consistency, and compliance with prudent principles and applicable governance standards. Based on these reviews, the Nomination and Remuneration Committee submits recommendations for the Board of Commissioners' performance assessment to the Board of Commissioners for discussion and approval.

The final results of the Board of Directors' performance assessment are then reported to the GMS and disclosed in the Company's Annual Report as a form of the Company's accountability and transparency to all stakeholders in accordance with applicable regulatory provisions.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

The Board of Directors' performance assessment criteria are designed to ensure that the Board of Directors' duties, responsibilities, and authorities are carried out effectively, accountably, and in line with the Company's strategic objectives. The assessment is conducted by considering both collegial and individual aspects, while adhering to the



perusahaan yang baik. Adapun kriteria penilaian kinerja Direksi meliputi, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Direktur;
2. Pencapaian kinerja keuangan dan bisnis Perseroan;
3. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
4. Implementasi GCG oleh masing-masing Direktur;
5. Tingkat kehadiran masing-masing Direktur di rapat internal Direksi, rapat gabungan dengan Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite pendukung di bawah Direksi; dan
6. Keterlibatan setiap Direktur dalam tugas-tugas tertentu.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan oleh Direktur Utama sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja manajemen. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama mempertimbangkan rekomendasi serta masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi guna memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan selaras dengan prinsip GCG.

Penilaian tersebut mencakup evaluasi atas pencapaian target kinerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keselarasan pengambilan keputusan dengan strategi dan kepentingan Perseroan. Hasil penilaian kinerja Direksi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan, remunerasi, serta peningkatan efektivitas kinerja Direksi di periode berikutnya, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, seluruh anggota Direksi dinyatakan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sepanjang tahun 2025. Penilaian tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal yang berlaku.

principles of prudence and good corporate governance. The Board of Directors' performance assessment criteria include, among other things:

1. Implementation of the duties and functions of each Director;
2. Achievement of the Company's financial and business performance;
3. The Company's compliance with applicable regulations;
4. Implementation of GCG by each Director;
5. The level of attendance of each Director at internal meetings of the Board of Directors, joint meetings with the Board of Commissioners and meetings with supporting committees under the Board of Directors; and
6. Involvement of each Director in certain duties.

Party Carrying Out the Assessment

The performance of the Board of Directors is assessed by the President Director as part of the internal control mechanism and management performance accountability. In implementing this, the President Director considers the recommendations and input provided by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee to ensure the assessment process is conducted objectively, transparently, and in accordance with GCG principles.

This assessment includes an evaluation of the achievement of performance targets, the implementation of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, compliance with laws and regulations, and the alignment of decision-making with the Company's strategy and interests. The results of the Board of Directors' performance assessment are then used as a basis for establishing policies for development, remuneration, and improving the effectiveness of the Board of Directors' performance in subsequent periods. These are disclosed in the Annual Report in accordance with applicable regulations.

Results of the 2025 Board of Directors Performance Assessment

Based on the results of the performance assessment conducted in accordance with applicable provisions and mechanisms, all members of the Board of Directors were declared to have carried out their duties and responsibilities effectively throughout 2025. This assessment reflects the level of compliance of the Board of Directors with the Company's Articles of Association, laws and regulations, and applicable internal policies.



Selama tahun 2025, Perseroan menghadapi tekanan yang cukup signifikan, terutama akibat ketidakpastian makroekonomi, konflik geopolitik yang mengganggu lanskap bisnis, serta meningkatnya intensitas persaingan di industri. Pada akhirnya, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja Perseroan di sepanjang 2025. Merespon kondisi tersebut, Direksi telah berupaya untuk menjalankan sejumlah inisiatif strategis untuk mengurangi dampak yang lebih besar terhadap Perseroan, meskipun penurunan pada sejumlah indikator kinerja tidak dapat dihindarkan.

Ke depan, Dewan Komisaris bersama Direksi berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan pada berbagai aspek, termasuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menjaga Tingkat Kesehatan Bank, guna meningkatkan kualitas kinerja serta memastikan keberlanjutan usaha Perseroan yang lebih baik di masa mendatang.

During 2025, the Company was under significant pressure, primarily due to macroeconomic uncertainty, geopolitical conflicts that disrupted the business landscape, and more intense industry competition. These conditions eventually impacted the Company's performance throughout the year. In response, the Board of Directors undertook several strategic initiatives to mitigate the impact on the Company, despite an inevitable decline in some of its performance indicators.

Going forward, the Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to continuously evaluating and strengthening various aspects, including the implementation of Good Corporate Governance and maintaining the Bank's Soundness Level, to improve the quality of performance and ensure the Company's continued business sustainability in the future.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam kebijakan internal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 660/KBFMF/III/2024 tentang Pencalonan dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan penerapan prinsip GCG secara konsisten.

Proses nominasi diawali dengan identifikasi dan penentuan kandidat oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Dalam melakukan seleksi, Komite Nominasi dan Remunerasi mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, integritas, reputasi keuangan, pengalaman profesional, serta pemahaman kandidat terhadap industri pembiayaan

NOMINATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The nomination procedure for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is regulated by internal policy established through Board of Directors Decree No. 660/KBFMF/III/2024 concerning the Nomination and Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners. This policy is formulated with reference to OJK provisions, the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations to ensure the consistent implementation of GCG principles.

The nomination process begins with the identification and selection of candidates by the Nomination and Remuneration Committee, a supporting body to the Board of Commissioners. In conducting the selection, the Nomination and Remuneration Committee considers the candidate's competency, integrity, financial reputation, professional experience, and understanding of the financing



dan kebutuhan strategis Perseroan. Selain itu, aspek independensi dan komitmen terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

Selanjutnya kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Kandidat yang disetujui wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk memiliki sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi serta mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam kondisi tertentu, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diangkat melalui RUPS sebelum dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Namun demikian, pengangkatan tersebut baru dapat berlaku efektif setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. Selama belum memperoleh bukti kelulusan dari OJK, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat tidak diperkenankan untuk menjalankan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui penerapan prosedur nominasi yang terstruktur, transparan, dan sesuai regulasi, Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat memiliki kapabilitas, integritas, serta kompetensi yang memadai untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan strategis Perseroan.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur secara formal dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan POJK 48/2024, serta memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mendukung penerapan GCG.

Kebijakan remunerasi Perseroan mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh remunerasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penetapan remunerasi dilakukan

industry and the Company's strategic needs. Furthermore, independence and commitment to the application of prudential principles and risk management are also important components of the assessment process.

The candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors recommended by the Nomination and Remuneration Committee are then submitted to the Board of Commissioners for approval. Approved candidates must meet all established requirements, including holding a certification of expertise in the financing sector issued by a Professional Certification Institute and undergoing and passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK) before undertaking their duties and responsibilities.

Under certain circumstances, members of the Board of Commissioners and Directors may be appointed through a GMS before passing the Fit and Proper Test conducted by the OJK, while still considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, which has received approval from the Board of Commissioners. However, such appointments will only become effective after the individuals have passed the Fit and Proper Test conducted by the OJK. Until they have received proof of passing the Fit and Proper Test from the OJK, newly appointed members of the Board of Commissioners and Directors are not permitted to carry out their functions, authorities, and responsibilities in accordance with applicable regulations.

Through the implementation of a structured, transparent, and regulatory-compliant nomination procedure, the Company ensures that the appointed members of the Board of Commissioners and Directors possess sufficient capability, integrity, and competence to support business sustainability and the achievement of the Company's strategic objectives.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has established a remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors, which is formally regulated in the Nomination and Remuneration Committee Guidelines. These guidelines are formulated in accordance with the provisions of POJK 48/2024 and adhere to the principles of fairness, transparency, and accountability to support the implementation of GCG.

The Company's remuneration policy stipulates that each member of the Board of Commissioners and Directors is entitled to receive remuneration for the performance of their duties, functions, and responsibilities. Remuneration



secara terstruktur dengan mempertimbangkan antara lain kompleksitas usaha Perseroan, tingkat tanggung jawab jabatan, kinerja Perseroan, serta pencapaian kinerja masing-masing organ.

Dengan menerapkan kebijakan remunerasi ini, Perseroan memastikan bahwa sistem imbal jasa yang diterapkan mampu mendorong kinerja yang berkelanjutan, menjaga independensi pengambilan keputusan, serta selaras dengan kepentingan jangka panjang Perseroan dan para pemangku

PROSEDUR PENENTUAN STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penentuan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK mengenai penerapan tata kelola dan kebijakan remunerasi bagi perusahaan pembiayaan. Perseroan menerapkan prinsip kewajaran, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penetapan remunerasi.

Proses penentuan remunerasi diawali melalui pembahasan dan diskusi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam proses tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun struktur remunerasi, kebijakan remunerasi, serta besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing anggota untuk memastikan kesesuaian antara remunerasi yang diterima dengan pencapaian kinerja, baik secara kolektif maupun individual.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek-aspek berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari perusahaan dalam industri yang sama.
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

is determined in a structured manner, taking into account, among other things, the complexity of the Company's business, the level of responsibility of the position, the Company's performance, and the performance achievements of each organ.

By implementing this remuneration policy, the Company ensures that the reward system implemented encourages sustainable performance, maintains independent decision-making, and aligns with the long-term interests of the Company and its stakeholders.

PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF THE STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The procedure for determining the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws and regulations, specifically the Financial Services Authority Regulation (POJK) concerning the implementation of governance and remuneration policies for finance companies. The Company applies the principles of fairness, equality, transparency, and accountability in every stage of remuneration determination.

The remuneration determination process begins with deliberation and discussion by the Nomination and Remuneration Committee. During this process, the Nomination and Remuneration Committee develops the remuneration structure, remuneration policy, and remuneration amount for the Board of Commissioners and Board of Directors. It also evaluates the performance of each member to ensure that the remuneration received aligns with performance achievements, both collectively and individually.

The remuneration structure, policy, and amount are determined by considering at least the following aspects:

- Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of companies in the same industry.
- Duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are linked to the achievement of the Company's goals and performance.
- Performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- Balance of allowances between fixed and variable.



Selanjutnya hasil pembahasan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Laporan Tata Kelola Perseroan yang disusun oleh Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan pelaporan internal.

Setelah Dewan Komisaris menyampaikan laporan dimaksud kepada pemegang saham, pemegang saham melalui RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku berjalan. Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan jumlah remunerasi dan/atau kompensasi dengan mengacu pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Melalui mekanisme tersebut, Perseroan memastikan bahwa kebijakan remunerasi diterapkan secara konsisten, sejalan dengan kinerja, tidak mendorong pengambilan risiko yang berlebihan, serta mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.

KRITERIA PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) serta diselaraskan dengan kepentingan jangka panjang Perseroan. Dalam penerapannya, Perseroan juga memperhatikan prinsip keadilan terhadap Debitur, Kreditur, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya, sehingga kebijakan remunerasi tidak mendorong pengambilan risiko yang berlebihan dan tetap mendukung keberlanjutan usaha.

Penentuan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, antara lain kinerja keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencapaian kinerja individual masing-masing anggota, serta prinsip kewajaran jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis dan level jabatan yang setara dalam industri. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan keselarasan remunerasi dengan sasaran strategis dan arah pengembangan jangka panjang Perseroan.

Melalui penerapan kriteria tersebut, Perseroan memastikan bahwa kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak hanya mencerminkan apresiasi atas kinerja dan

The results of the Nomination and Remuneration Committee's discussions and recommendations are then outlined in the Corporate Governance Report prepared by the Board of Directors and submitted to the Board of Commissioners as part of the internal accountability and reporting mechanism.

After the Board of Commissioners submits the report to shareholders, the shareholders, through the GMS, authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the current fiscal year. Based on this authority, the Board of Commissioners proposes the amount of remuneration and/or compensation, referring to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, for approval at the Annual General Meeting of Shareholders.

Through this mechanism, the Company ensures that remuneration policies are implemented consistently, are aligned with performance, do not encourage excessive risk-taking, and support the ongoing implementation of Good Corporate Governance.

CRITERIA FOR THE DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by applying the principle of prudence and is aligned with the Company's long-term interests. In its implementation, the Company also adheres to the principle of fairness towards Debtors, Creditors, and all other Stakeholders, ensuring that the remuneration policy does not encourage excessive risk-taking and continues to support business sustainability.

The determination of the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out objectively and transparently, taking into account various relevant aspects, including the Company's financial performance and fulfillment of obligations in accordance with applicable laws and regulations, the individual performance achievements of each member, and the principle of fairness when compared with similar companies and positions at the same level in the industry. Furthermore, the Company also considers the alignment of remuneration with the Company's strategic objectives and long-term development direction.

Through the application of these criteria, the Company ensures that the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors not only reflects



tanggung jawab yang diemban, tetapi juga mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dirancang secara proporsional dan transparan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab, kompleksitas tugas, serta kontribusi masing-masing organ dalam mendukung pencapaian kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan. Struktur remunerasi tersebut disusun agar sejalan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paket remunerasi bagi Direksi mencakup gaji, berbagai tunjangan, bonus berbasis kinerja, serta imbalan pasca kerja. Sementara itu, remunerasi bagi Dewan Komisaris terdiri atas gaji pokok dan bonus, tanpa mencakup pemberian bonus saham maupun opsi saham, sehingga tetap menjaga independensi dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Selain komponen remunerasi utama, Perseroan juga memberikan fasilitas lainnya dalam bentuk natura, antara lain fasilitas perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan, serta fasilitas pendukung lain yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Keseluruhan struktur remunerasi tersebut ditujukan untuk memastikan keseimbangan antara pemberian imbalan yang kompetitif dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepentingan jangka panjang Perseroan.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut ini:

appreciation for the performance and responsibilities they assume, but also supports the implementation of good corporate governance and the creation of long-term value for all stakeholders.

REMUNERATION STRUCTURE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is designed proportionally and transparently, taking into account the level of responsibility, complexity of duties, and the contribution of each organ in supporting the Company's performance and business sustainability. The remuneration structure is designed to align with the principles of good corporate governance and applicable laws and regulations.

The remuneration package for the Board of Directors includes salary, various allowances, performance-based bonuses, and post-employment benefits. Meanwhile, remuneration for the Board of Commissioners consists of base salary and bonuses, excluding stock awards or stock options, thus maintaining the independence and oversight function of the Board of Commissioners.

In addition to the main remuneration components, the Company also provides other benefits in kind, including housing, transportation, and health insurance, as well as other supporting facilities determined in accordance with Company policy. The overall remuneration structure is intended to ensure a balance between providing competitive rewards with the application of prudent principles and the Company's long-term interests.

THE AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners throughout 2025 is described in the following table:

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Members of the Board of Commissioners	Total Remunerasi Tahun 2025 Total Remuneration in 2025
Remunerasi (Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (Salary, Bonus, routine allowances, tantiem, and other facilities in non-kind form)	3 orang 3 people	Rp1.013,919,355 IDR1,013,919,355



Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Members of the Board of Commissioners	Total Remunerasi Tahun 2025 Total Remuneration in 2025
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya): 1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance and so on): 1. Can be owned 2. Cannot be owned	3 orang 3 people	Rp160.633.560 IDR160,633,560
Jumlah Total		Rp1.174.552.915 IDR1,174,552,915

Tabel berikut ini menguraikan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan:

The following table describes the amount of remuneration for the Board of Commissioners in one year, grouped by income level:

Total Remunerasi Tahun 2025 ^{*)}	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Members of the Board of Commissioners	Total Remuneration in 2025 ^{*)}
Di atas Rp2 miliar	-	Above IDR2 billion
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	-	Above IDR1 billion – IDR2 billion
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	1 orang people	Above IDR500 million – IDR1 billion
Rp500 juta ke bawah	2 orang people	Below IDR500 million

^{*)} Jumlah yang diterima dalam bentuk uang tunai
Amount received in cash

BESARAN REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2025

THE AMOUNT OF BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION IN 2025

Besaran remunerasi yang diterima Direksi sepanjang tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut ini:

The amount of remuneration received by the Board of Directors throughout 2025 is described in the following table:

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Jumlah Anggota Direksi Number of Members of the Board of Directors	Total Remunerasi Tahun 2025 Total Remuneration in 2025
Remunerasi (Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (Salary, Bonus, routine allowances, tantiem, and other facilities in non-kind form)	6 orang 6 people	Rp18.583.841.893 IDR18,583,841,893
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya): 1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance and so on): 1. Can be owned 2. Cannot be owned	6 orang 6 people	Rp7.078.334.411 IDR7,078,334,411
Jumlah Total		Rp25.662.176.304 IDR25,662,176,304



Tabel berikut ini menguraikan Besaran Remunerasi anggota Direksi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan:

The following table describes the amount of Board of Directors Remuneration in one year, grouped by income level:

Total Remunerasi Tahun 2025 ^{*)}	Jumlah Anggota Direksi Number of Members of the Board of Directors	Total Remuneration in 2025 ^{*)}
Di atas Rp2 miliar	3 orang people	Above IDR2 billion
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	2 orang people	Above IDR1 billion – IDR2 billion
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	1 orang people	Above IDR500 million – IDR1 billion
Rp500 juta ke bawah	–	Below IDR500 million

^{*)} Jumlah yang diterima dalam bentuk uang tunai
Amount received in cash

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Affiliated Relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan senantiasa menjaga independensi dan objektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan tidak adanya hubungan afiliasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sepanjang tahun pelaporan, seluruh anggota Dewan Komisaris dinyatakan tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 20 Pedoman Dewan Komisaris, yang menegaskan bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, meminimalkan potensi benturan kepentingan, serta memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip GCG.

AFFILIATED RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company consistently maintains the independence and objectivity of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function by ensuring that there are no affiliations that could influence decision-making. Throughout the reporting year, all members of the Board of Commissioners were declared to have no financial or family relationships with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders.

This provision is clearly stipulated in Article 20 of the Board of Commissioners Guidelines, which stipulates that the majority of members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors. This regulation aims to maintain the independence of the Board of Commissioners, minimize potential conflicts of interest, and ensure that the supervisory function is carried out professionally, objectively, and in accordance with GCG principles.



Dengan menjalankan ketentuan tersebut, Perseroan menilai bahwa struktur dan komposisi Dewan Komisaris telah mendukung terciptanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen.

Informasi lebih rinci mengenai hubungan afiliasi seluruh anggota Dewan Komisaris dijelaskan pada tabel berikut:

By implementing these provisions, the Company believes that the structure and composition of the Board of Commissioners support the creation of an effective and independent supervisory mechanism.

More detailed information regarding the affiliations of all members of the Board of Commissioners is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Familial Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship					
		Direksi BOD		Dewan Komisaris BOC		Pemegang Saham Shareholder		Direksi BOD		Dewan Komisaris BOC		Pemegang Saham Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Sang In Lee	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Je Ui Jung	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Selain memastikan tidak terdapat hubungan afiliasi, Dewan Komisaris Perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Komitmen tersebut dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang melarang anggota Dewan Komisaris untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris juga dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan di luar remunerasi serta fasilitas lain yang telah ditetapkan dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan prinsip GCG.

In addition to ensuring the absence of affiliated relationships, the Company's Board of Commissioners affirms its commitment to implementing the principle of transparency in all its duties and decision-making. This commitment is implemented in accordance with the provisions prohibiting members of the Board of Commissioners from exploiting the Company for personal, family, and/or other party interests that could potentially harm or reduce the Company's profits.

Furthermore, members of the Board of Commissioners are also prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Company beyond the remuneration and other facilities determined and approved by the General Meeting of Shareholders. The implementation of these provisions aims to maintain the integrity, objectivity, and independence of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function in accordance with GCG principles.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Perseroan menempatkan transparansi dan independensi sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tugas Direksi. Ketentuan mengenai hubungan afiliasi Direksi diatur secara jelas dalam Pasal 51 Pedoman Direksi, yang mewajibkan setiap anggota Direksi untuk mengungkapkan secara terbuka informasi terkait adanya hubungan keuangan dan/

AFFILIATED RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company places transparency and independence as key principles in carrying out the duties of the Board of Directors. Provisions regarding affiliated relationships among the Board of Directors are clearly stipulated in Article 51 of the Board of Directors' Guidelines, which requires each member of the Board of Directors to openly



atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan.

Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak terdapat potensi benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta menjaga objektivitas dan integritas Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan. Seluruh informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi disampaikan secara lengkap, terdokumentasi, dan diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perseroan.

Adapun rincian mengenai hubungan afiliasi anggota Direksi disajikan pada tabel berikut:

disclose information regarding any financial and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or the Company's shareholders.

This disclosure aims to ensure there are no potential conflicts of interest in the decision-making process and to maintain the objectivity and integrity of the Board of Directors in carrying out their management functions. All information regarding affiliated relationships among the Board of Directors is fully disclosed, documented, and disclosed in the Company's Corporate Governance Report.

Details regarding affiliated relationships among members of the Board of Directors are presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Familial Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship					
		Direksi BOD		Dewan Komisaris BOC		Pemegang Saham Shareholder		Direksi BOD		Dewan Komisaris BOC		Pemegang Saham Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yap Tjay Hing	Direktur Utama President Director		✓		✓	✓ ^{*)}		✓			✓	✓ ^{*)}	
Peter Halim	Direktur Utama President Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓
Kisup Wi	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓
Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Human Resources & General Affairs Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓
Hery Susanto Dermawan	Direktur Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓
Choi, Ho Jung	Direktur Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓
Kyeongho Min	Direktur Director		✓		✓	✓		✓			✓		✓

^{*)} Melalui FPR | through FPR



Komite Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Committees of the Board of Commissioners

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Perseroan didukung oleh sejumlah komite yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris. Keberadaan komite-komite tersebut dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan secara lebih fokus, mendalam, dan independen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Komite-komite pendukung Dewan Komisaris yang menjalankan peran dan tanggung jawab pengawasan tersebut, antara lain meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Masing-masing komite melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

To enhance the effectiveness of its supervisory function, the Company's Board of Commissioners is supported by several committees established under its purview. These committees are intended to assist the Board of Commissioners in conducting more focused, in-depth, and independent oversight in accordance with their respective areas of responsibility.

The supporting committees of the Board of Commissioners that carry out these supervisory roles and responsibilities include the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee. Each committee carries out its duties and functions in accordance with work guidelines and applicable laws and regulations, and is accountable to the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT Audit Committee

Komite Audit merupakan salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan dukungan untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan fungsi audit baik internal maupun eksternal.

The Audit Committee is one of the committees under the Board of Commissioners which has a strategic role in strengthening the supervisory function and providing support for conducting in-depth reviews of financial reports, the effectiveness of internal controls, compliance with laws and regulations, and the implementation of both internal and external audit functions.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit Perseroan dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan yang relevan, antara lain:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015").
2. POJK 48/2024.

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The establishment of the Company's Audit Committee is carried out based on several relevant regulations, including:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee ("POJK 55/2015").
2. POJK 48/2024.

PEDOMAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan secara efektif, terstruktur, dan akuntabel, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Audit melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 21

AUDIT COMMITTEE CHARTER

To ensure the effective, structured, and accountable implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities, the Company has established Audit Committee Guidelines through a Circular Decision of the Board of Commissioners in lieu of a Board of Commissioners



Maret 2022. Pedoman tersebut selanjutnya diperbarui pada tanggal 29 September 2025 sebagai wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa menyesuaikan kerangka kerja Komite Audit dengan perkembangan regulasi serta praktik tata kelola perusahaan yang berlaku.

Pedoman Komite Audit berfungsi sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yang mencakup pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, kewenangan, struktur keanggotaan, tata cara penyelenggaraan rapat, serta mekanisme pelaporan kepada Dewan Komisaris. Dengan adanya pedoman ini, Komite Audit diharapkan mampu menjalankan perannya secara independen, objektif, dan profesional dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, Perseroan menyediakan akses terbuka terhadap Pedoman Komite Audit melalui situs web resmi Perseroan. Dokumen tersebut dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui tautan <https://kreditplus.com/committee-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya secara independen guna menjaga objektivitas, integritas, dan kualitas pengawasan atas kegiatan Perseroan. Dalam menjalankan peran tersebut, setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan sebagai pedoman perilaku yang menjunjung tinggi standar etika, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai landasan pelaksanaan tugas, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Audit yang mengatur secara jelas ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Audit. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait kualitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

Meeting dated March 21, 2022. These guidelines were subsequently updated on September 29, 2025, reflecting the Company's commitment to continuously adapting the Audit Committee's framework to regulatory developments and applicable corporate governance practices.

The Audit Committee Guidelines serve as an operational reference in the implementation of the supervisory function, encompassing regulations regarding duties and responsibilities, authority, membership structure, meeting procedures, and reporting mechanisms to the Board of Commissioners. With these guidelines, the Audit Committee is expected to carry out its role independently, objectively, and professionally, supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function.

As part of implementing the principle of transparency, the Company provides open access to the Audit Committee Guidelines through the Company's official website. The document can be accessed by all stakeholders through the link <https://kreditplus.com/committee-charter>.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is responsible for carrying out all its duties and functions independently to maintain objectivity, integrity, and quality oversight of the Company's activities. In carrying out this role, each member of the Audit Committee is required to adhere to the Company's Code of Ethics, which serves as a guideline for behavior that upholds ethical standards, professionalism, and compliance with applicable regulations.

As a foundation for carrying out its duties, the Company has established Audit Committee Guidelines, which clearly define the scope of the Audit Committee's duties, responsibilities, and obligations. These guidelines serve as a reference in supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight function, particularly regarding the quality of financial reports, the effectiveness of the internal control system, risk management, and the Company's compliance with laws and regulations and regulatory requirements.

The duties and responsibilities of the Audit Committee, as stipulated in the Audit Committee Guidelines, are as follows:

1. Reviewing financial information to be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;



2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian akuntan dan kantor akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; serta 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.	2. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Company's activities; 3. Providing independent opinions in the event of differences of opinion between management and the Accountant regarding the services provided; 4. Providing recommendations regarding the appointment, reappointment, and dismissal of accountants and accounting firms based on independence, scope of assignment, and service fees; 5. Review the implementation of the audit by the internal auditor and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditor; 6. Review the implementation of risk management activities carried out by the Board of Directors if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners; 7. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes; 8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company; and 9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Wewenang Komite Audit telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 Pedoman Komite Audit Perseroan sebagai landasan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan independen. Pengaturan ini bertujuan memastikan Komite Audit memiliki kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, keuangan, aset, dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu;
2. Berkomunikasi langsung dengan pihak yang relevan termasuk karyawan, Direksi, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee's authority is clearly stipulated in Article 6 of the Company's Audit Committee Guidelines, which serves as the basis for implementing an effective and independent oversight function. This regulation aims to ensure that the Audit Committee has adequate authority to carry out its duties and responsibilities in accordance with GCG principles and applicable laws and regulations.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the following authorities:

1. Access the Company's documents, data, and information regarding employees, finances, assets, and resources as deemed necessary;
2. Communicate directly with relevant parties, including employees, the Board of Directors, and parties carrying out internal audit, risk management, and accounting functions, regarding the Committee's duties and responsibilities;
3. Involve independent parties outside the Committee members as needed to assist in carrying out its duties (if necessary);
4. Exercise other authority granted by the Board of Commissioners.



MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Periode jabatan anggota Komite Audit ditetapkan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu selama 3 (tiga) tahun. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu khusus bagi anggota Komite Audit yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, masa penunjukannya sebagai anggota Komite Audit mengikuti masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris. Pengaturan mengenai masa jabatan Komite Audit ini telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Pedoman Komite Audit Perseroan, sebagai bagian dari upaya menjaga independensi, akuntabilitas, dan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2025, Komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, di mana 1 (satu) orang menjabat sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya merupakan pihak independen. Informasi lebih rinci terkait susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

The term of office of Audit Committee members is set not to exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, which is 3 (three) years. After the end of the term of office, Audit Committee members may be reappointed only for 1 (one) subsequent term of office, in accordance with applicable provisions.

Meanwhile, for Audit Committee members who also serve as Independent Commissioners of the Company, their term of appointment as Audit Committee members follows their term of office as members of the Board of Commissioners. Regulations regarding the term of office of the Audit Committee are set out in Article 9 paragraph (2) of the Company's Audit Committee Guidelines, as part of efforts to maintain independence, accountability, and continuity of the implementation of the supervisory function.

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE AUDIT COMMITTEE

As of December 31, 2025, the Audit Committee's membership composition consisted of 3 (three) members, of which 1 (one) serves as Chair and 2 (two) other members are independent parties. More detailed information regarding the composition of the Audit Committee is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	Surat Keputusan No. 001/SK/DK/1/2016 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Maret 2016 Decree No. 001/SK/DK/1/2016 concerning the Establishment of the Audit Committee dated March 2, 2016	- Komisaris Independen - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Pemantau Risiko - Independent Commissioner - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - Chairman of the Risk Oversight Committee	2016-2021 (Periode Pertama) 2016-2021 (First Term)
		Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Maret 2021 (khusus Komisaris Independen Perseroan, masa penunjukannya sebagai anggota Komite Audit mengikuti masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris) Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated March 26, 2021 (specifically for the Company's Independent Commissioners, the term of appointment as members of the Audit Committee follows the relevant term of office as members of the Board of Commissioners)		2021-2026 (Periode Kedua) 2021-2026 (Second Term)



Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Peter Irawan Chandra	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Maret 2021 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on March 26, 2021 Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on March 22, 2024	Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) Member of the Risk Oversight Committee (Independent Party)	2021 – 2024 (Periode Pertama) 2021 – 2024 (First Term) 2024–2029 (Periode Kedua) 2024–2029 (Second Term)
Siti Rosyidah	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on March 21, 2022	-	2022 – 2027 (Periode Pertama) 2022 – 2027 (First Term)

KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Komite Audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian di bidang audit, akuntansi, dan/atau keuangan. Ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan serta pengendalian internal.

Adapun persyaratan keahlian dan kompetensi anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, serta kemampuan komunikasi yang baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan terutama yang berkaitan dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perusahaan Pembiayaan, dan peraturan lainnya yang relevan.
3. Mematuhi kode etik Komite yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
4. Berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

The Audit Committee must have at least one member with educational background, experience, and expertise in auditing, accounting, and/or finance. This requirement is established as part of the Company's commitment to maintaining the quality and effectiveness of its oversight function regarding financial reporting and internal control.

The expertise and competency requirements for Audit Committee members, as stipulated in the Audit Committee Guidelines, are as follows:

1. Have high integrity, relevant ability, knowledge, and experience, and good communication skills.
2. Understand financial statements, the Company's business, especially those related to the Company's services or business activities, audit processes, risk management, as well as laws and regulations in the Capital Market, Financing Companies, and other relevant regulations.
3. Comply with the Committee's code of ethics as set by the Company.
4. Commit to continuously improving competence through education and training.



PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

Profil Ketua Komite Audit

Chairman of the Audit Committee Profile

Nursalam Andi Tabusalla

Ketua Komite Audit | Chairman of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 67 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

- Periode Pertama:
Surat Keputusan No. 001/SK/DK/1/2016 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Maret 2016
- Periode Kedua:
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Maret 2021

- First Term:
Decree No. 001/SK/DK/1/2016 concerning the Establishment of the Audit Committee dated March 2, 2016
- Second Term:
Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on March 26, 2021

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Dasar Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Basic Certification of Commissioners by the Indonesian Financing Company Certification Institute

Profil lengkap Bapak Nursalam Andi Tabusalla selaku Ketua Komite Audit yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Nursalam Andi Tabusalla as Chairman of the Audit Committee who also serves as the Company's Independent Commissioner can be seen in the Company Profile Chapter.

Profil Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee Profile

Peter Irawan Chandra

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun

Indonesian citizen, 65 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Bachelor of Economics dari Monash University (1986).

Bachelor of Economics from Monash University (1986)

Sertifikasi Profesi Professional Certification

-

-

Riwayat Karier Career History

- Komisaris Independen PT Surya Semesta Internusa Tbk (2023-saat ini);
- Komisaris Independen PT Sinar Mas Asset Management (2018-saat ini);
- Komisaris Independen PT Mizuho-Balimor Finance (2018-saat ini);
- Principal in Risk Consulting, Financial Institution, M&A Practices di KPMG Advisory, Indonesia (2017-2020).

- Independent Commissioner of PT Surya Semesta Internusa Tbk (2023-present)
- Independent Commissioner of PT Sinar Mas Asset Management (2018-present)
- Independent Commissioner of PT Mizuho-Balimor Finance (2018-present)
- Principal in Risk Consulting, Financial Institution, M&A Practices at KPMG Advisory, Indonesia (2017-2020)

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan.

Member of the Company's Risk Oversight Committee

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



Siti Rosyidah

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun

Indonesian citizen, 62 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

- Magister Manajemen pada bidang Keuangan dari Universitas Borobudur (2005);
- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1989).
- Sertifikasi Examiner oleh IQA Foundation;
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Certified Human Resources Professional oleh Atma Jaya Catholic University;
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko;
- Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek oleh The Indonesia Capital Market Institute;
- Sertifikasi Advokat oleh Peradi dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Sertifikasi Wakil Manajer Investasi oleh The Indonesia Capital Market Institute;
- Sertifikasi Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I oleh FHP Edulaw & Himpunan Konsultan
- Hukum Pasar Modal.
- Head of Risk Group and Corporate Supervision Subsidiary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – PPA Division (2009–2017);
- Komite Audit PT BNI Multifinance (2015);
- Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola PT BNI Multifinance (2016);
- Head of Legal Unit Supervision Group PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018);
- AVP Litigation of Criminal Cases and Claims PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017).
- Tidak merangkap jabatan di Perseroan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.
- Master of Management in Finance from Borobudur University (2005);
- Bachelor of Laws from the University of Indonesia (1989).
- Examiner Certification by the IQA Foundation;
- Level 1 Risk Management Certification by the Risk Management Certification Agency;
- Level 2 Risk Management Certification by the Risk Management Certification Agency;
- Certified Human Resources Professional by Atma Jaya Catholic University;
- Level 3 Risk Management Certification by the Risk Management Certification Agency;
- Broker–Dealer Representative Certification by the Indonesia Capital Market Institute;
- Advocate Certification by the Indonesian Advocates Association (Peradi) and the West Java High Court;
- Investment Manager Representative Certification by the Indonesia Capital Market Institute;
- Basic Capital Market Legal Consultant Professional Education Certification I by FHP Edulaw & the Consultant Association
- Capital Market Law.
- Head of Risk Group and Corporate Supervision Subsidiary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – PPA Division (2009–2017);
- Audit Committee, PT BNI Multifinance (2015);
- Remuneration, Nomination, and Governance Committee, PT BNI Multifinance (2016);
- Head of Legal Unit Supervision Group, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017–2018);
- AVP Litigation of Criminal Cases and Claims, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017).
- Not holding concurrent positions in the Company.
- Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit diharuskan bersikap objektif dan independen agar setiap keputusan tidak terpengaruh dari kepentingan pihak manapun. Berikut merupakan aspek independensi yang harus dipenuhi Perseroan:

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee is required to be objective and independent so that all decisions are not influenced by the interests of any party. The following are aspects of independence that the Company must fulfill:



Aspek Independensi Independence Aspects	Nursalam Andi Tabusalla	Peter Irawan Chandra	Siti Rosyidah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan maupun perusahaan afiliasi Does not have management relationship in the Company or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not served as a political party administrator, official and government	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Dalam rangka menjaga kualitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, Komite Audit secara berkelanjutan mengikuti berbagai program pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi. Pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi ini merupakan wujud kepatuhan terhadap Pasal 8 ayat (5) huruf d Pedoman Komite Audit, yang mewajibkan setiap anggota Komite Audit senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Melalui pembaruan pengetahuan dan keahlian secara berkesinambungan, Komite Audit diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.

Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit sepanjang tahun 2025 diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

To maintain the quality and effectiveness of the implementation of its supervisory function, the Audit Committee continuously participates in various training and/or competency improvement programs. The implementation of these training and competency improvement programs demonstrates compliance with Article 8, paragraph (5), letter d of the Audit Committee Guidelines, which requires each Audit Committee member to continuously improve their competency through relevant education and training. Through continuous updating of knowledge and expertise, the Audit Committee is expected to be able to optimally carry out its roles and responsibilities.

Information regarding the training and/or competency improvement activities attended by Audit Committee members throughout 2025 is further outlined in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Nursalam A. Tabusalla Ketua Komite Chairman of the Committee	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Februari 2025 February 4, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Nursalam A. Tabusalla Ketua Komite Chairman of the Committee	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU-PPT dan PPPSM) Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and WMD) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publik)
Peter Irawan Chandra Anggota Komite Member of the Committee			
Siti Rosyidah Anggota Komite Member of the Committee			



RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Pedoman Komite Audit. Penyelenggaraan rapat dimaksudkan sebagai sarana koordinasi, evaluasi, serta pembahasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Rapat Komite Audit dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite Audit. Setiap keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Ketentuan mengenai frekuensi rapat, kuorum kehadiran, serta mekanisme pengambilan keputusan tersebut menjadi bagian integral dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Audit Committee is required to hold regular meetings at least once every three months, as stipulated in Article 10 of the Audit Committee Guidelines. Meetings are intended to coordinate, evaluate, and discuss the implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities.

Audit Committee meetings are considered valid if attended by more than 50% (fifty percent) of the Audit Committee members. All meeting decisions are made based on the principle of deliberation and consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote.

Provisions regarding meeting frequency, attendance quorum, and decision-making mechanisms are an integral part of the implementation of good corporate governance principles to support the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight function.

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	5	5	100%
Peter Irawan Chandra	Anggota Komite Member of the Committee	5	5	100%
Siti Rosyidah	Anggota Komite Member of the Committee	5	5	100%

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Audit membahas agenda-agenda sebagai berikut:

2025 Audit Committee Meeting Agenda

Throughout 2025, the Audit Committee meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Update Hasil Audit Q4 2024 dan Usulan Rencana Audit Tahunan 2025	Q4 2024 Audit Results Update and Proposed 2025 Annual Audit Plan
2.	19 Februari 2025 February 19, 2025	Update Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Auditan 2024	External Auditor Update on the 2024 Audited Financial Statements
3.	30 April 2025 April 30, 2025	Update Audit Internal Q1 2025	Internal Audit Update Q1 2025
4.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Tinjauan Kinerja Q2	Q2 Performance Review
5.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Hasil Audit per 30 September 2025	Audit Results as of September 30, 2025



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Komite Audit Perseroan.

Seluruh kegiatan Komite Audit pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Adapun program kerja dan aktivitas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2024, sesuai yang diamanatkan dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan sebagai auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2025;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Unit Audit Internal;
4. Melaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.

2025 AUDIT COMMITTEE DUTIES IMPLEMENTATION REPORT

Throughout 2025, the Audit Committee consistently carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations and the Company's Audit Committee Guidelines.

All Audit Committee activities in 2025 were carried out based on a predetermined work program and reported periodically to the Board of Commissioners. The work program and supervisory activities implemented by the Audit Committee throughout 2025 are as follows:

1. Evaluate the implementation of audit services provided by the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, and Partners for the annual historical financial information as of December 31, 2024, as mandated by POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services (PA) and Public Accounting Firms (KAP) in Financial Services Activities;
2. Recommend to the Board of Commissioners that the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, and Partners be appointed as the independent auditor to audit the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2025;
3. Monitor and evaluate the implementation of the Internal Audit Unit's duties;
4. Hold five Audit Committee meetings annually.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang berperan mendukung pengawasan terhadap kebijakan dan proses nominasi, suksesi, serta remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif. Komite ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengangkatan, evaluasi kinerja, dan penetapan remunerasi dilakukan secara objektif, transparan, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee under the Board of Commissioners that supports the oversight of the nomination, succession, and remuneration policies and processes for members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and executive officers. This committee ensures that all decisions regarding appointments, performance evaluations, and remuneration are made objectively, transparently, and in accordance with the principles of good corporate governance.



DASAR PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan, antara lain:

1. POJK 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 21 Maret 2022 sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta mekanisme kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan GCG bagi Perusahaan Pembiayaan.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan organisasi, Perseroan melakukan pembaruan atas Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 29 September 2025. Pembaruan tersebut dimaksudkan agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan nominasi, suksesi, serta struktur dan kebijakan remunerasi yang berlandaskan prinsip kewajaran, kehati-hatian, dan keberlanjutan.

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, Perseroan menyediakan akses terhadap Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi kepada publik melalui situs web resmi Perseroan, sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui tautan <https://kreditplus.com/committee-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi antara lain:

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The establishment of the Company's Nomination and Remuneration Committee is based on the provisions of applicable laws and regulations and the Company's internal policies, including:

1. POJK 34/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; and
2. POJK 48/2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Institutions;

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

The Company established the Nomination and Remuneration Committee Guidelines on March 21, 2022, as a basis for implementing the Nomination and Remuneration Committee's duties, responsibilities, authorities, and working mechanisms. These guidelines were prepared with reference to applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority (OJK) regulations regarding the implementation of GCG for Financing Companies.

To ensure compliance with regulatory developments and organizational needs, the Company updated the Nomination and Remuneration Committee Guidelines on September 29, 2025. This update is intended to enable the Nomination and Remuneration Committee to optimally perform its function in providing recommendations to the Board of Commissioners regarding nomination and succession policies, as well as remuneration structures and policies based on the principles of fairness, prudence, and sustainability.

As a form of transparency, the Company provides public access to the Nomination and Remuneration Committee Guidelines through the Company's official website, accessible to all stakeholders via the link <https://kreditplus.com/committee-charter>.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with Article 5 of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines, the scope of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee includes, among others:



Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait nominasi dan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan.

Nomination Function

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the Nomination process; and
 - c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the program for developing the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
4. Providing proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

Remuneration Function

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration structure;
 - b. Remuneration policy; and
 - c. Amount of remuneration.
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing performance with the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

AUTHORITY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In carrying out its supervisory function and providing recommendations regarding nominations and remuneration, the Nomination and Remuneration Committee has the authority as regulated in Article 6 of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines, namely as follows:

1. The Committee is authorized to access Company documents, data and information required to carry out its duties.
2. In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Committee is authorized to communicate directly with employees, the Board of Directors and other parties related to the implementation of the nomination and remuneration system in the Company.



3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

3. If necessary, the Committee is authorized to involve independent parties to assist in carrying out its duties.

MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Periode jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS. Untuk anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, masa jabatannya dibatasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 dan 3 Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

TERM OF OFFICE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee who also serve as members of the Board of Commissioners shall be adjusted to their term of office as members of the Board of Commissioners based on the resolution of the GMS. For Committee members who are not members of the Board of Commissioners, their term of office shall be limited to no longer than the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association. This provision is stated in Article 9 paragraphs 2 and 3 of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Pasal 8 Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengacu pada Pasal 3 POJK 34/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen.
2. 2 (dua) orang anggota lainnya dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - c. Pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with Article 8 of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines and referring to Article 3 of POJK 34/2014, the Nomination and Remuneration Committee is formed with a minimum of 3 (three) members with the following provisions:

1. 1 (one) Chairman concurrently a member who is an Independent Commissioner.
2. 2 (two) other members may come from:
 - a. Members of the Board of Commissioners; or
 - b. Parties from outside the Company; or
 - c. Officials with a position 1 (one) level below the Board of Directors who are in charge of human resource management.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

In line with these provisions, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021 Circular Decision of the Board of Commissioners as Independent Commissioner in Lieu of the Board of Commissioners Meeting dated April 27, 2021	- Komisaris Independen - Ketua Komite Audit - Ketua Komite Pemantau Risiko - Independent Commissioner - Chairman of the Audit Committee - Chairman of the Risk Oversight Committee	2021 – 2026 (Periode Pertama) 2021 – 2026 (First Term)



Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Sang In Lee	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025	• Komisaris Utama • Anggota Komite Nominasi & Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko • President Commissioner • Chairman of the Nomination and Remuneration Committee • Chairman of the Risk Oversight Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)
Juan Sumando Nababan	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Juli 2023 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on July 25, 2023	Deputy Head of Human Resources & General Affairs Department	2023 – 2028 (Periode Pertama) 2023 – 2028 (First Term)

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Nursalam Andi Tabusalla

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi | Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 67 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021

Sertifikasi Dasar Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on April 27, 2021

Basic Certification of Commissioners by the Indonesian Financing Company Certification Institute

Profil lengkap Bapak Nursalam Andi Tabusalla selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Nursalam Andi Tabusalla as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee who also serves as the Company's Independent Commissioner can be seen in the Company Profile Chapter.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Sang In Lee

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 50 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025

Sertifikasi Dasar Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025

Basic Certification of Commissioners by the Indonesian Financing Company Certification Institute



Profil lengkap Bapak Sang In Lee selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Sang In Lee as a member of the Nomination and Remuneration Committee who also serves as the Company's President Commissioner can be seen in the Company Profile Chapter.

Juan Sumando Nababan

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun

Indonesian citizen, 43 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2010); dan
- Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran (2006).

Sertifikasi Dasar Manajerial oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

- People and Organization Development Manager Perseroan (2013–2023);
- Organization Development Section Head PT Matahari Department Store Tbk (2011–2012); dan
- HR Generalist PT Finansia Multi Finance (2006–2010).

Deputy Head of Human Resources & General Affairs Department Perseroan

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

- Master of Management from University of Indonesia (2010); and
- Bachelor of Psychology from Padjadjaran University (2006).

Basic Managerial Certification by the Indonesian Financing Company Certification Institute

- People and Organization Development Manager of the Company (2013–2023);
- Organization Development Section Head of PT Matahari Department Store Tbk (2011–2012); and
- HR Generalist of PT Finansia Multi Finance (2006–2010).

Deputy Head of Human Resources & General Affairs Department of the Company

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3). Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Komite juga diwajibkan mematuhi Kode Etik Perseroan untuk memastikan setiap keputusan diambil dengan integritas dan objektivitas.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan memastikan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku. Kriteria independensi tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee consistently carries out its duties and responsibilities independently in accordance with Article 5 paragraph (3) of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines. All Committee members are also required to comply with the Company's Code of Ethics to ensure that all decisions are made with integrity and objectivity.

Throughout 2025, the Company ensured that all members of the Nomination and Remuneration Committee met the independence criteria as stipulated in applicable regulations. These independence criteria are detailed in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspects	Nursalam Andi Tabusalla	Sang In Lee	Juan Sumando Nababan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan maupun perusahaan afiliasi Does not have management relationship in the Company or affiliated companies	✓	✗ ¹⁾	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓



Aspek Independensi Independence Aspects	Nursalam Andi Tabusalla	Sang In Lee	Juan Sumando Nababan
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not served as a political party administrator, official and government	✓	✓	✓

^{*)} Sang In Lee juga menjabat sebagai General Manager di Grup Bisnis Global, KB Kookmin Card Corp.
Sang In Lee also serves as General Manager at Global Business Group, KB Kookmin Card Corp.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara konsisten mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk memperkuat pemahaman, keahlian, serta efektivitas pelaksanaan tugas komite. Program pengembangan yang diikuti oleh anggota komite meliputi, namun tidak terbatas pada, kegiatan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, members of the Nomination and Remuneration Committee consistently participated in various training and competency development programs to strengthen their understanding, expertise, and effectiveness in carrying out the committee's duties. The development programs participated in by committee members include, but are not limited to, the following activities:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Sang In Lee Anggota Komite Member of the Committee	Sertifikasi Dasar Komisaris Commissioner Basic Certification	27 Februari 2025 February 27, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Juan Sumando Nababan Anggota Komite Member of the Committee	KreditPlus Tangguh Development Camp KreditPlus Tangguh Development Camp	11-13 Desember 2025 December 11-13, 2025	PeopleShift

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Rapat

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan, dengan tingkat kehadiran lebih dari separuh jumlah anggota, termasuk Ketua Komite agar pelaksanaan rapat dapat dianggap sah.

Selain mengadakan rapat formal, Komite juga dapat mengambil keputusan secara sah tanpa pertemuan dengan syarat seluruh anggota telah menerima pemberitahuan tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan yang diambil melalui rapat Komite.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Nomination and Remuneration Committee shall hold regular meetings at least once every four months, with attendance of more than half of its members, including the Committee Chair, to ensure the meeting is considered valid.

In addition to holding formal meetings, the Committee may also make decisions without a formal meeting, provided that all members have received written notification and given their written approval of the proposal. Decisions made in this manner have the same legal force as decisions made through Committee meetings.



Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat dan mekanisme pengambilan keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Pasal 10 Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

The policies regarding the holding of meetings and the decision-making mechanisms of the Nomination and Remuneration Committee are regulated in Article 10 of the Nomination and Remuneration Committee Guidelines.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan sebanyak 4 (empat) kali rapat, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Meeting Frequency and Level of Attendance

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings, with detailed information as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	4	4	100%
Sang In Lee	Anggota Komite Member of the Committee	4	2	50%
Juan Sumando Nababan	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi membahas agenda-agenda sebagai berikut:

2025 Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Rekomendasi atas Pengangkatan Presiden Komisaris dan Komisaris	Recommendations on the Appointment of President Commissioner and Commissioners
2.	30 April 2025 April 30, 2025	Perubahan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi	Amendment to the Nomination and Remuneration Committee Charter
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Perubahan atas Skema Remunerasi Direksi	Changes to the Directors' Remuneration Scheme
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	1. Perubahan atas Struktur Kompensasi; dan 2. Usulan Penetapan Rentang Gaji.	1. Changes to the Compensation Structure; and 2. Proposed Salary Range Determination.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mendukung Dewan Komisaris, khususnya terkait fungsi nominasi dan remunerasi. Komite secara konsisten memastikan setiap kegiatan dan keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip GCG.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee effectively carried out its roles and responsibilities in supporting the Board of Commissioners, particularly regarding the nomination and remuneration functions. The Committee consistently ensured that all activities and decisions taken were in line with applicable laws and regulations and GCG principles.

Berikut ini adalah daftar program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi selama periode pelaporan:

1. Pemberian rekomendasi atas penetapan range gaji untuk tahun 2025;
2. Memberikan rekomendasi atau usulan perubahan struktur organisasi;

The following is a list of programs and activities implemented by the Nomination and Remuneration Committee during the reporting period:

1. Providing recommendations on the determination of salary ranges for 2025;
2. Providing recommendations or proposals for changes to the organizational structure;



3. Memberikan rekomendasi/usulan pengangkatan dan pengangkatan kembali Komisaris Utama, Komisaris Independen, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur Perseroan;
4. Meninjau indikator pengukuran kinerja Manajemen Perseroan tahun 2024 dan menentukan indikator pengukuran kinerja Manajemen Perseroan tahun 2025;
5. Memberikan rekomendasi terhadap sistem remunerasi Perseroan untuk tahun 2025; dan
6. Melaksanakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

3. Providing recommendations/proposals for the appointment and reappointment of the President Commissioner, Independent Commissioners, Commissioners, President Director, Deputy President Director, and Directors of the Company;
4. Reviewing the Company's Management performance measurement indicators for 2024 and determining the Company's Management performance measurement indicators for 2025;
5. Providing recommendations on the Company's remuneration system for 2025; and
6. Holding Nomination and Remuneration Committee meetings four times a year.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko berperan sebagai pengawas strategis di bawah Dewan Komisaris yang bertugas memastikan manajemen risiko Perseroan berjalan efektif di seluruh lini operasional. Komite ini secara aktif memantau berbagai risiko, mulai dari kredit, likuiditas, operasional, hingga penerapan teknologi informasi yang semakin krusial dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan. Melalui pemantauan dan penelaahan yang cermat, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi yang membantu Perseroan menghadapi tantangan secara proaktif sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis.

The Risk Oversight Committee acts as a strategic oversight body under the Board of Commissioners, ensuring the Company's risk management is effective across all operational lines. This committee actively monitors various risks, from credit and liquidity to operations, to the increasingly crucial application of information technology in addressing the dynamics of the financing industry. Through careful monitoring and review, the Risk Oversight Committee provides recommendations that help the Company proactively address challenges while maintaining business sustainability.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap praktik tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Pembentukan Komite ini merujuk pada ketentuan POJK 48/2024. Dengan landasan regulasi ini, Komite Pemantau Risiko menjalankan perannya secara formal dan sistematis dalam mendukung Dewan Komisaris.

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Company's Risk Oversight Committee was established as part of the Company's commitment to good governance practices and effective risk management. The establishment of this Committee is in accordance with POJK 48/2024. Based on this regulatory framework, the Risk Oversight Committee carries out its role formally and systematically in supporting the Board of Commissioners.

PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pedoman Komite Pemantau Risiko disusun sebagai kerangka kerja bagi seluruh anggota Komite dalam menjalankan tugas pengawasan risiko, sesuai dengan prinsip GCG. Pedoman ini mengatur ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, struktur organisasi, serta mekanisme pelaporan, dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

The Risk Oversight Committee Guidelines are designed to serve as a framework for all Committee members in carrying out their risk oversight duties, in accordance with GCG principles. These guidelines define the scope of duties and responsibilities, terms of office, organizational structure, and reporting mechanisms, and are binding on all Committee members.



Pedoman Komite Pemantau Risiko pertama kali disahkan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan pada 21 Maret 2022, dan telah ditinjau kembali serta diperbarui pada 26 September 2025 untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Perseroan dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan regulasi POJK 48/2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perseroan berkomitmen melakukan pembaruan pedoman agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru OJK, termasuk terkait pengawasan risiko, transparansi, dan kepatuhan regulasi.

Sebagai bagian dari praktik tata kelola yang transparan, Perseroan menyediakan akses publik terhadap Pedoman Komite Pemantau Risiko melalui situs resmi Perseroan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah melalui tautan <https://kreditplus.com/committee-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dan senantiasa berpedoman pada Kode Etik Perseroan dalam melaksanakan setiap tugasnya. Komite ini memiliki tanggung jawab utama untuk mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan manajemen risiko Perseroan berjalan secara efektif di seluruh lini operasional.

Dalam menjalankan perannya, Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan pemantauan, penelaahan, serta memberikan rekomendasi strategis terkait berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan. Tugas dan tanggung jawab utama Komite antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya di Perseroan; dan
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta satuan kerja manajemen risiko.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Pasal 5 Pedoman Komite Pemantau Risiko, Komite memiliki wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya secara efektif. Wewenang ini mencakup kemampuan untuk memantau, menelaah, dan memberikan rekomendasi terkait risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, sehingga Dewan Komisaris dapat membuat keputusan yang tepat dan berbasis informasi.

The Risk Oversight Committee Guidelines were first ratified through a Circular Decision of the Company's Board of Commissioners on March 21, 2022, and were reviewed and updated on September 26, 2025, to ensure they align with the Company's needs and evolving laws and regulations. In accordance with POJK Regulation 48/2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, the Company is committed to updating the guidelines to ensure they remain aligned with the latest OJK provisions, including those related to risk oversight, transparency, and regulatory compliance.

As part of its transparent governance practices, the Company provides public access to the Risk Oversight Committee Guidelines through its official website, allowing all stakeholders to easily access them via the link <https://kreditplus.com/committee-charter>.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee acts independently and consistently adheres to the Company's Code of Ethics in carrying out its duties. This Committee is primarily responsible for supporting the Board of Commissioners in ensuring the Company's risk management is effective across all operational lines.

In carrying out its role, the Risk Oversight Committee is tasked with monitoring, reviewing, and providing strategic recommendations regarding various risks that could impact the Company's business continuity. The Committee's primary duties and responsibilities include the following:

1. Conducting evaluations related to the conformity between risk management policies and their implementation in the Company; and
2. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the risk management work unit.

AUTHORITY OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Pursuant to Article 5 of the Risk Oversight Committee Guidelines, the Committee has the necessary authority to effectively carry out its role. This authority includes the ability to monitor, review, and provide recommendations regarding the risks facing the Company, enabling the Board of Commissioners to make appropriate and informed decisions.



Secara rinci, wewenang Komite Pemantau Risiko mencakup:

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan mereka sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui RUPS. Sementara itu, bagi anggota Komite yang bukan bagian dari Dewan Komisaris, masa jabatannya ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Dewan Komisaris tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Komite ini kapan saja jika dianggap perlu. Ketentuan mengenai masa jabatan keanggotaan komite diatur secara rinci dalam Pasal 7 Pedoman Komite Pemantau Risiko.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Pedoman Komite Pemantau Risiko, jumlah anggota Komite ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite; dan
2. 1 (satu) orang pihak independen selaku anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menunjuk tambahan anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, kebutuhan Perseroan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Komite diangkat dan dapat diberhentikan oleh Dewan Komisaris, sehingga komposisi Komite selalu selaras dengan kebutuhan pengawasan risiko Perseroan.

Specifically, the Risk Oversight Committee's authority includes:

1. The Committee has the authority to access Company documents, data and information needed to carry out its duties.
2. In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Committee has the authority to communicate directly with employees, the Board of Directors, and other parties.
3. If necessary, the Committee has the authority to involve independent parties to assist in carrying out its duties.

TERM OF OFFICE OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The term of office of members of the Risk Oversight Committee who also serve as members of the Board of Commissioners follows their term of office as members of the Board of Commissioners as determined by the GMS. Meanwhile, for Committee members who are not part of the Board of Commissioners, their term of office is set at 3 (three) years. The Board of Commissioners still has the authority to dismiss members of this Committee at any time if deemed necessary. Provisions regarding the term of office of committee members are regulated in detail in Article 7 of the Risk Oversight Committee Guidelines.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

As stipulated in Article 6 of the Risk Oversight Committee Guidelines, the Committee's membership is set at a minimum of three (3) members, with the following provisions:

1. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman of the Committee; and
2. 1 (one) independent party as a member who has expertise in finance and/or risk management.

The Board of Commissioners has the authority to appoint additional members to the Risk Oversight Committee in accordance with the complexity of the Company's business activities, the Company's needs, and applicable laws and regulations. Each Committee member is appointed and may be dismissed by the Board of Commissioners, ensuring that the Committee's composition remains aligned with the Company's risk oversight needs.



Per 31 Desember 2025, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the composition of the Company's Risk Oversight Committee is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on April 27, 2021	- Komisaris Independen - Ketua Komite Audit - Ketua Nominasi dan Remunerasi - Independent Commissioner - Chairman of the Audit Committee - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	2021 – 2026 (Periode Pertama) 2021 – 2026 (First Term)
Sang In Lee	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025	- Komisaris Utama - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - President Commissioner - Member of the Nomination and Remuneration Committee	2025 – 2030 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (First Term)
Peter Irawan Chandra	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on April 27, 2021 Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025 Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025	Anggota Komite Audit (Pihak Eksternal Independen) Audit Committee Member (Independent External Party)	2021–2024 (Periode Pertama) 2021–2024 (First Term) 2024–2027 (Periode Kedua) 2024–2027 (Second Term)

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko

Profile of the Chairman of the Risk Oversight Committee

Nursalam Andi Tabusalla

Ketua Komite Pemantau Risiko | Chairman of the Risk Oversight Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 67 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on April 27, 2021

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Dasar Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Basic Certification of Commissioners by the Indonesian Financing Company Certification Institute



Profil lengkap Bapak Nursalam Andi Tabusalla selaku Ketua Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Nursalam Andi Tabusalla as Chairman of the Risk Oversight Committee who also serves as the Company's Independent Commissioner can be seen in the Company Profile Chapter.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee Member Profile

Sang In Lee

Anggota Komite Pemantau Risiko | Member of the Risk Oversight Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 50 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025

Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Dasar Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Basic Certification of Commissioners by the Indonesian Financing Company Certification Institute

Profil lengkap Bapak Sang In Lee selaku anggota Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Sang In Lee as a member of the Risk Oversight Committee who also serves as the Company's President Commissioner can be seen in the Company Profile Chapter.

Peter Irawan Chandra

Anggota Komite Pemantau Risiko | Member of the Risk Oversight Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun

Indonesian citizen, 65 years old

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

- Periode Pertama:
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 April 2021
- Periode Kedua:
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025

- First Term:
Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on April 27, 2021
- Second Term:
Circular Resolution of the Board of Commissioners in Lieu of the Board of Commissioners Meeting on January 30, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

-

-

Profil lengkap Bapak Peter Irawan Chandra selaku anggota Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub Bab Komite Audit, dalam pembahasan berjudul profil Komite Audit.

The complete profile of Mr. Peter Irawan Chandra as a member of the Risk Oversight Committee who also serves as a member of the Company's Audit Committee can be seen in the Corporate Governance Chapter, Audit Committee Sub-Chapter, in the discussion entitled Audit Committee profile.



INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko senantiasa menjalankan tugasnya secara independen sesuai ketentuan Pasal 4 Pedoman Komite Pemantau Risiko. Setiap anggota Komite juga diwajibkan mematuhi Kode Etik Perseroan untuk memastikan integritas dan objektivitas dalam setiap keputusan dan rekomendasi yang disampaikan.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang menjabat sepanjang tahun 2025 telah memenuhi kriteria independensi sesuai regulasi yang berlaku. Kriteria ini menjadi dasar bagi Komite untuk menjalankan fungsi pengawasan risiko secara efektif, bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Kriteria independensi anggota Komite disajikan dalam tabel berikut:

Aspek Independensi Independence Aspects	Nursalam Andi Tabusalla	Sang In Lee	Peter Irawan Chandra
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan maupun perusahaan afiliasi Does not have management relationship in the Company or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not served as a political party administrator, official and government	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Komite Pemantau Risiko secara proaktif mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi guna memperkuat kemampuan setiap anggota dalam menjalankan pengawasan risiko Perseroan. Dengan mengikuti program-program tersebut, anggota Komite mampu meningkatkan kualitas pemantauan dan analisis risiko, sekaligus memastikan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris selalu tepat waktu, relevan, dan mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan.

INDEPENDENCE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Oversight Committee consistently performs its duties independently in accordance with Article 4 of the Risk Oversight Committee Guidelines. Each Committee member is also required to adhere to the Company's Code of Ethics to ensure integrity and objectivity in all decisions and recommendations.

The Company confirms that all members of the Risk Oversight Committee serving throughout 2025 met the independence criteria as stipulated in applicable regulations. These criteria serve as the basis for the Committee to effectively carry out its risk oversight function, free from the influence of vested interests. The independence criteria for Committee members are presented in the following table:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE IN 2025

The Risk Oversight Committee proactively participates in various training and competency development programs to strengthen each member's ability to oversee the Company's risks. By participating in these programs, Committee members are able to improve the quality of risk monitoring and analysis, while ensuring that recommendations provided to the Board of Commissioners are timely, relevant, and support the Company's business sustainability.



Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan selama 2025 adalah sebagai berikut:

Details of the education and training activities for 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Nursalam A. Tabusalla Ketua Komite Chairman of the Committee	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU-PPT dan PPPSM) Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and WMD) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publika)
Peter Irawan Chandra Anggota Komite Member of the Committee			
Sang In Lee Anggota Komite Member of the Committee	Sertifikasi Dasar Komisaris Commissioner Basic Certification	27 Februari 2025 February 27, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Rapat

Komite Pemantau Risiko secara rutin menyelenggarakan rapat berkala minimal 1 (satu) kali setiap kuartal untuk membahas isu-isu penting terkait pengelolaan risiko Perseroan. Setiap rapat diadakan dengan memperhatikan kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota, termasuk Ketua Komite, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dengan seluruh perbedaan pendapat dicatat secara rinci beserta alasannya dalam risalah rapat.

Selain mengadakan rapat formal, Komite Pemantau Risiko juga memiliki fleksibilitas untuk mengambil keputusan secara tertulis tanpa pertemuan langsung, sepanjang semua anggota telah diberitahu dan menyetujui usulan secara tertulis. Mekanisme ini memberikan kelincahan dalam pengambilan keputusan sambil tetap menjaga kekuatan hukum yang setara dengan rapat resmi. Dengan pendekatan ini, Komite memastikan proses pengawasan risiko berjalan efektif, responsif, dan mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Risk Oversight Committee regularly holds meetings at least once every quarter to discuss important issues related to the Company's risk management. Each meeting is held with the attendance of more than 50% (fifty percent) of members, including the Committee Chair, to ensure that decisions are made by deliberation and mutual agreement. If consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote, with all dissenting opinions recorded in detail and their reasons in the minutes of the meeting.

In addition to holding formal meetings, the Risk Oversight Committee also has the flexibility to make written decisions without a face-to-face meeting, provided that all members have been notified and agree to the written proposal. This mechanism provides agility in decision-making while maintaining the legal force equivalent to a formal meeting. With this approach, the Committee ensures that the risk oversight process is effective, responsive, and supports the Company's business sustainability.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Nursalam Andi Tabusalla	Ketua Komite Chairman of the Committee	4	4	100%
Sang In Lee	Anggota Komite Member of the Committee	4	2	50%
Peter Irawan Chandra	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%

Meeting Frequency and Level of Attendance

In 2025, the Risk Oversight Committee held 4 (four) meetings, with the following attendance levels:

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Pemantau Risiko membahas agenda-agenda sebagai berikut:

2025 Risk Oversight Committee Meeting Agenda

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Peninjauan <i>Risk Appetite</i> & <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2024 serta Penetapan <i>Risk Appetite</i> & <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2025	Review of Risk Appetite and Risk Tolerance in 2024 and Determination of Risk Appetite and Risk Tolerance in 2025
2.	30 April 2025 April 30, 2025	1. Laporan Tahunan Profil Risiko Tahun 2024; dan 2. Laporan Tanggung Jawab Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024	1. Annual Risk Profile Report for 2024; and 2. Report on the Board of Directors' Responsibility for Risk Management Implementation for 2024.
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Implementasi Strategi Anti- <i>Fraud</i> di KBFMF berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2024	Implementation of Anti-Fraud Strategy at KBFMF based on POJK No. 12 of 2024
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Laporan Tanggung Jawab Direksi atas Penerapan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2025	Report of the Board of Directors' Responsibility for the Implementation of Risk Management for the First Half of 2025

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Penelaahan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2024 dan Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2025;
2. Menyampaikan laporan *Risk Profile* Perseroan tahun 2024;
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Manajemen Risiko untuk tahun 2024;
4. Melakukan peninjauan tahunan atas Kebijakan Manajemen Risiko; dan
5. Melaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE IN 2025

In 2025, the Risk Oversight Committee carried out several activities in accordance with its duties and responsibilities, as described below:

1. Review of Risk Appetite and Risk Tolerance for 2024 and Determination of Risk Appetite and Risk Tolerance for 2025;
2. Submitting the Company's Risk Profile report for 2024;
3. Submitting the Risk Management Accountability Report for 2024;
4. Conducting an annual review of the Risk Management Policy; and
5. Holding Risk Oversight Committee meetings four times a year.



Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees under the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan operasional Perseroan, Direksi mendapat dukungan dari sejumlah komite yang dibentuk di bawah Direksi. Komite-komite ini antara lain:

1. Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi
3. Komite Manajemen Risiko

Pembentukan ketiga komite tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk memastikan seluruh proses operasional dikelola secara efektif, terukur, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui peran masing-masing komite, Direksi mampu melakukan pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang mendukung kelancaran operasional serta pencapaian tujuan strategis Perseroan.

In carrying out its duties and responsibilities for the Company's operational management, the Board of Directors receives support from several committees established under the Board of Directors. These committees include:

1. Asset and Liability Management Committee
2. Information Technology Steering Committee
3. Risk Management Committee

The establishment of these three committees reflects the Company's commitment to ensuring that all operational processes are managed effectively, measurably, and in accordance with applicable laws and regulations. Through the roles of each committee, the Board of Directors is able to supervise, coordinate, and make decisions that support the smooth operation and achievement of the Company's strategic objectives.

KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Asset and Liability Management Committee

Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas ("ALCO") dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengelola struktur aset dan liabilitas Perseroan secara seimbang dan berkelanjutan. Komite ini berperan strategis dalam memastikan likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan Perseroan terjaga, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan manajemen aset dan liabilitas. Dalam pelaksanaannya, ALCO secara berkala menelaah posisi aset dan liabilitas, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan rekomendasi yang membantu Direksi mengambil keputusan finansial yang tepat.

The Asset and Liability Management Committee ("ALCO") was established to support the Board of Directors in managing the Company's asset and liability structure in a balanced and sustainable manner. This committee plays a strategic role in ensuring the Company's liquidity, profitability, and financial stability, while minimizing risks associated with asset and liability management. In its implementation, the ALCO periodically reviews the asset and liability positions, identifies potential risks, and provides recommendations to assist the Board of Directors in making sound financial decisions.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

ALCO dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengelola aset dan liabilitas Perseroan secara efektif dan berkelanjutan. Pembentukan Komite ini didasarkan pada Pedoman Direksi Perseroan serta Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022. Dengan dasar tersebut, Komite ini memiliki landasan formal yang jelas untuk menjalankan perannya dalam memantau, menelaah, dan memberikan rekomendasi terkait manajemen aset dan liabilitas Perseroan, sehingga mendukung stabilitas dan keberlanjutan keuangan Perseroan.

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

ALCO was established to support the Board of Directors in managing the Company's assets and liabilities effectively and sustainably. The establishment of this Committee is based on the Company's Board of Directors Guidelines and the Board of Directors' Circular Resolution in Lieu of a Board of Directors Meeting dated March 16, 2022. With this foundation, this Committee has a clear formal basis to carry out its role in monitoring, reviewing, and providing recommendations regarding the management of the Company's assets and liabilities, thereby supporting the Company's financial stability and sustainability.



PEDOMAN KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Direksi pada 16 Maret 2022 dan diperbarui pada 1 September 2025. Pedoman ini mengatur secara jelas ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, struktur, serta mekanisme pelaporan bagi seluruh anggota Komite. Sebagai panduan yang bersifat mengikat, pedoman ini memastikan setiap anggota Komite dapat menjalankan peran pengelolaan aset dan liabilitas secara konsisten, profesional, dan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk meningkatkan transparansi, Perseroan menyediakan akses publik terhadap pedoman ini melalui situs resmi pada tautan berikut: <https://kreditplus.com/committee-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

ALCO bertugas memberikan dukungan strategis kepada Direksi dalam hal pengelolaan keuangan Perseroan. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis dari Pengelolaan Aset & Liabilitas dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan;
2. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga Perusahaan secara menyeluruh;
3. Mengelola struktur modal dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis;
4. Mengelola portofolio investasi;
5. Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar;
6. Memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator;
7. Merumuskan dan melakukan *review* strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Perseroan;
8. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP pasca krisis serta menilai posisi baru dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Perseroan; dan
9. Berkoordinasi dengan Komite dan fungsi terkait pada Perseroan dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Asset and Liability Management Committee Guidelines were first established through a Board of Directors Circular Decision on March 16, 2022, and updated on September 1, 2025. These Guidelines clearly define the scope of duties and responsibilities, terms of office, structure, and reporting mechanisms for all Committee members. As a binding guideline, these guidelines ensure that each Committee member can carry out their role in managing assets and liabilities consistently, professionally, and in accordance with the principles of good corporate governance. To enhance transparency, the Company provides public access to these guidelines through its official website at the following link: <https://kreditplus.com/committee-charter>.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

ALCO is tasked with providing strategic support to the Board of Directors in managing the Company's finances. More specifically, ALCO's duties and responsibilities are as follows:

1. Providing strategic direction for Asset & Liability Management and ensuring tactical follow-up to create a balance sheet structure that continues to evolve to achieve performance objectives within the specified risk parameters;
2. Conducting consolidated supervision and management of the Company's liquidity position and interest rate risk as a whole;
3. Managing the capital structure and use of capital among various business units;
4. Managing the investment portfolio;
5. Approving hedging strategies for invested capital and profits in foreign currencies to mitigate market risk exposure;
6. Monitoring the Company's compliance with relevant regulations and charter from regulators;
7. Formulating and reviewing strategies in managing market risk and liquidity risk related to the Company's balance sheet profile, capital, and funding structure;
8. Activate the Liquidity Contingency Plan (LCP) when conditions lead to a liquidity crisis, evaluate the effectiveness of the LCP post-crisis and assess new positions and determine follow-up strategies for the Company's balance sheet restructuring; and
9. Coordinate with the Committee and related functions in the Company in terms of credit funding or financing.



WEWENANG KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diberikan wewenang sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Pedoman Komite Pengelolaan Aset. Kewenangan ini memungkinkan ALCO untuk melakukan pengawasan, penelaahan, dan memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi terkait pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

Secara rinci, wewenang ALCO mencakup beberapa hal berikut:

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

MASA JABATAN KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Masa jabatan ketua dan anggota ALCO disesuaikan dengan kedudukan mereka di Perseroan. Bagi anggota yang juga menjabat sebagai anggota Direksi, maka masa jabatannya mengikuti periode penunjukan sebagai Direksi yang ditetapkan melalui RUPS. Sementara itu, bagi anggota Komite yang bukan bagian dari Direksi, masa jabatannya ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Pada pelaksanaannya, Direksi tetap memiliki hak untuk memberhentikan anggota ini sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Ketentuan mengenai masa jabatan ini diatur secara rinci dalam Pasal 5 Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas, guna menjaga kesinambungan dan fleksibilitas pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Sesuai Pasal 5 Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas, penentuan anggota ALCO senantiasa mempertimbangkan kombinasi keahlian, pengalaman, dan kapasitas pengambilan keputusan yang memadai. Susunan anggota ALCO dirancang agar setiap personel mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait manajemen aset dan liabilitas secara efektif.

AUTHORITY OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, ALCO is granted the authority stipulated in Article 4 of the Asset Management Committee Guidelines. This authority allows ALCO to supervise, review, and provide strategic recommendations to the Board of Directors regarding the management of the Company's assets and liabilities.

Specifically, ALCO's authority includes the following:

1. The Committee has the authority to access Company documents, data, and information needed to carry out its duties.
2. In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Committee has the authority to communicate directly with employees, the Board of Directors, and other parties.
3. If necessary, the Committee has the authority to involve independent parties to assist in carrying out its duties.

TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

The term of office of the ALCO chairman and members is adjusted to their position in the Company. For members who also serve as members of the Board of Directors, their term of office follows the period of appointment as Directors as determined by the GMS. Meanwhile, for Committee members who are not part of the Board of Directors, their term of office is set for 3 (three) years. In practice, the Board of Directors still has the right to dismiss these members at any time if deemed necessary. Provisions regarding this term of office are regulated in detail in Article 5 of the Asset and Liability Management Committee Guidelines, in order to maintain the continuity and flexibility of the management of the Company's assets and liabilities.

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

In accordance with Article 5 of the Asset and Liability Management Committee Guidelines, the selection of ALCO members consistently considers a combination of expertise, experience, and adequate decision-making capacity. The ALCO membership is designed to ensure that each member is capable of effectively performing oversight functions and providing recommendations regarding asset and liability management.



Mengacu pada kebijakan internal yang berlaku, susunan keanggotaan ALCO di Perseroan ditentukan sebagai berikut:

1. Direktur Utama sebagai Ketua;
2. Wakil Direktur Utama sebagai Anggota;
3. Direktur (Chief Financial Officer) sebagai Anggota;
4. Direktur (Chief Operating Officer) sebagai Anggota;
5. Head of Funding, Finance & Accounting sebagai Anggota; dan
6. Head of Enterprise Risk Management sebagai Anggota.

Direksi memiliki kewenangan untuk menunjuk tambahan anggota ALCO sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, kebutuhan Perseroan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Komite ALCO per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

In accordance with applicable internal policies, the ALCO membership composition at the Company is determined as follows:

1. President Director as Chairman;
2. Vice President Director as Member;
3. Director (Chief Financial Officer) as Member;
4. Director (Chief Operating Officer) as Member;
5. Head of Funding, Finance & Accounting as Member; and
6. Head of Enterprise Risk Management as Member.

The Board of Directors has the authority to appoint additional ALCO members based on the complexity of the Company's business activities, the Company's needs, and applicable laws and regulations.

Based on these provisions, the composition of the ALCO Committee as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	• Direktur Utama • Ketua Komite Pengarah TI • Ketua Komite Manajemen Risiko • President Director • Chairman of the IT Steering Committee • Chairman of the Risk Management Committee	2022 – 2027 (Periode Pertama) 2022 – 2027 (First Term)
Peter Halim ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025	• Direktur Utama • Ketua Komite Pengarah TI • Anggota Komite Manajemen Risiko • President Director • Chairman of the IT Steering Committee • Member of the Risk Management Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)
Kisup Wi	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	• Wakil Direktur Utama • Ketua Komite Manajemen Risiko • Anggota Komite Pengarah TI • Deputy President Director • Chairman of the Risk Management Committee • Member of the IT Steering Committee	2022 – 2027 (Periode Pertama) 2022 – 2027 (First Term)
Hery Susanto Dermawan ³⁾	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025	• Direktur • Anggota Komite Pengarah TI • Director • Member of the IT Steering Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Agustus 2023 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on August 16, 2023	• Direktur • Anggota Komite Pengarah TI • Anggota Komite Manajemen Risiko • Director • Member of the IT Steering Committee • Member of the Risk Management Committee	2023–2028 (Periode Pertama) 2023 – 2028 (First Term)



Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Kyeongho Min	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 30 Januari 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on January 30, 2025	Direktur Director	2025 – 2029 (Periode Pertama) 2025 – 2029 (First Term)
Cun Pin	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2025	Head of Funding & Treasury, Finance & Accounting	2025–2028 (Periode Kedua) 2025 – 2028 (Second Term)
Marie Yovanka Engelina ⁴⁾	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2025	• Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management • Anggota Komite Pengarah TI • Anggota Komite Manajemen Risiko • Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management • Member of the IT Steering Committee • Member of the Risk Management Committee	2025–2025 (Periode Kedua) 2025 – 2025 (Second Term)
Daniel Adrian ⁵⁾	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025	• Head of Risk Management • Anggota Komite Pengarah TI • Anggota Komite Manajemen Risiko • Head of Risk Management • Member of the IT Steering Committee • Member of the Risk Management Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

³⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁴⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁵⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's Asset and Liability Management Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

³⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

⁴⁾ She officially resigned as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

⁵⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

MEMBERSHIP PROFILE OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Profile of the Chairman of the Asset and Liability Management Committee

Peter Halim

Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Chairman of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025

Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute



Profil lengkap Bapak Peter Halim selaku Ketua ALCO yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Peter Halim as Chairman of ALCO who also serves as the Company's President Director can be seen in the Company Profile Chapter.

Profil Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Profile of Asset and Liability Management Committee Members

Kisup Wi

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 50 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti
Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022

Circular Resolution of the Board of Directors
in Lieu of the Board of Directors Meeting on
March 16, 2022

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute

Hery Susanto Dermawan

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, domisili di Jakarta

Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti
Rapat Direksi tanggal 1 September 2025

Circular Resolution of the Board of Directors
in Lieu of the Board of Directors Meeting on
September 1, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute

Choi, Ho Jung

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 45 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 45 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti
Rapat Direksi tanggal 16 Agustus 2023

Circular Resolution of the Board of Directors
in Lieu of the Board of Directors Meeting on
August 16, 2023

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan dan Sertifikasi
Manajemen Risiko – Direksi oleh Lembaga
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute



Kyeongho Min

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 43 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 43 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti
Rapat Direksi tanggal 30 Januari 2025

Circular Resolution of the Board of Directors
in Lieu of the Board of Directors Meeting on
January 30, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute

Profil lengkap Bapak Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, Choi, Ho Jung, dan Kyeongho Min selaku anggota ALCO yang juga menjabat sebagai Direksi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profiles of Mr. Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, Choi, Ho Jung, and Kyeongho Min as members of ALCO who also serve as Directors of the Company can be seen in the Company Profile Chapter.

Cun Pin

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun

Indonesian citizen, 42 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Meraih gelar Akuntan dari Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia (2007);

- Earned an Accountant degree from the Accountant Professional Education, University of Indonesia (2007)
- Bachelor of Accounting from Tarumanagara University (2005)

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute

Riwayat Karier Career History

- Fixed Asset Manager di PT Chevron Pacific Indonesia (2018);
- Financial and Accounting Manager PT Chevron Pacific Indonesia (2017–2018);
- Financial Forecasting, Analysis and Reporting Advisor di PT Chevron Pacific Indonesia (2016–2017);
- Head of Corporate Audit Indonesia di PT Chevron Pacific Indonesia (2014–2016);
- Project Business Service for South Africa Business Unit di Chevron Houston, USA (2013–2014);
- Audit and Compliance Advisor – Chevron Technology Company di Chevron Houston, USA (2012–2013);
- Joint Venture Finance Accountant di PT Chevron Pacific Indonesia (2010–2012);
- Corporate Auditor di PT Chevron Pacific Indonesia (2008–2010);
- Senior Auditor di PricewaterhouseCoopers (2005–2008).

- Fixed Asset Manager at PT Chevron Pacific Indonesia (2018);
- Financial and Accounting Manager at PT Chevron Pacific Indonesia (2017–2018);
- Financial Forecasting, Analysis and Reporting Advisor at PT Chevron Pacific Indonesia (2016–2017);
- Head of Corporate Audit Indonesia at PT Chevron Pacific Indonesia (2014–2016);
- Project Business Service for South Africa Business Unit at Chevron Houston, USA (2013–2014);
- Audit and Compliance Advisor – Chevron Technology Company at Chevron Houston, USA (2012–2013);
- Joint Venture Finance Accountant at PT Chevron Pacific Indonesia (2010–2012)
- Corporate Auditor at PT Chevron Pacific Indonesia (2008–2010);
- Senior Auditor at PricewaterhouseCoopers (2005–2008).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Head of Funding & Treasury, Finance & Accounting Perseroan

Head of Funding & Treasury, Finance & Accounting of the Company

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



Marie Yovanka Engeline

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun

Indonesian citizen, 45 years old

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Sertifikasi Profesi

Professional Certification

Riwayat Karier

Career History

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi

Affiliations

- Magister Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma (2005);
 - Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma (2002).
 - Sertifikasi Dasar Manajerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia;
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Satu Tingkat Dibawah Direksi;
 - Sertifikasi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan;
 - Sertifikasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan;
 - LEAN SIX SIGMA Certified oleh Cardiff University UK;
 - SIX SIGMA GREEN BELT Certified oleh GE Training Center Fairfield USA.
 - Head of Risk Management di PT Bank Neo Commerce Tbk (2021);
 - Head of Digital Transformation – Customer Engagement di PT Allianz Life Indonesia (2019–2020);
 - Head of Inforce Optimization and Operation Excellence di Cigna Insurance Indonesia (2018);
 - Head of Operational Risk di Commonwealth Bank Indonesia (2016–2017);
 - Executive Manager – International Assignment di Commonwealth Bank Australia (2016);
 - Head of Credit Policy & Quality Review – VP di Commonwealth Bank Indonesia (2013–2015);
 - Risk Management Project Manager – AVP di Commonwealth Bank Indonesia (2012);
 - Risk Management: Operational Risk & Credit Risk – Risk Management Project di PT Bank Commonwealth (2011– 2017);
 - Business Transformation Manager – PCM Client Service Center Manager di PT Bank HSBC Indonesia (2008–2011);
 - Operation & Compliance Assistant Manager di GE Finance Capital (2006–2008);
 - Management Development Program di GE Finance Capital (2004–2006).
 - Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management Perseroan;
 - Anggota Komite Pengarah TI Perseroan;
 - Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.
- Master of Information Systems Management from Gunadarma University (2005);
 - Bachelor of Informatics Engineering from Gunadarma University (2002).
 - Basic Managerial Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute;
 - Risk Management Certification One Level Below the Board of Directors;
 - Qualification Certification 6 of Banking Risk Management Fields by the Banking Professional Certification Institute;
 - Risk Management Certification Body Level 4 Certification by the Banking Professional Certification Institute;
 - LEAN SIX SIGMA Certified by Cardiff University UK;
 - SIX SIGMA GREEN BELT Certified by GE Training Center Fairfield USA.
 - Head of Risk Management at PT Bank Neo Commerce Tbk (2021)
 - Head of Digital Transformation – Customer Engagement at PT Allianz Life Indonesia (2019–2020)
 - Head of Inforce Optimization and Operation Excellence at Cigna Insurance Indonesia (2018)
 - Head of Operational Risk at Commonwealth Bank Indonesia (2016–2017)
 - Executive Manager – International Assignment at Commonwealth Bank Australia (2016)
 - Head of Credit Policy & Quality Review – VP at Commonwealth Bank Indonesia (2013–2015)
 - Risk Management Project Manager – AVP at Commonwealth Bank Indonesia (2012)
 - Risk Management: Operational Risk & Credit Risk – Risk Management Project at PT Bank Commonwealth (2011–2017)
 - Business Transformation Manager – PCM Client Service Center Manager at PT Bank HSBC Indonesia (2008–2011)
 - Operations & Compliance Assistant Manager at GE Finance Capital (2006–2008)
 - Management Development Program at GE Finance Capital (2004–2006)
 - Head of Enterprise Risk and Anti Fraud Management of the Company
 - Member of the Company's IT Steering Committee
 - Member of the Company's Risk Management Committee
- Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



Daniel Adrian

Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas | Member of the Asset and Liability Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun

Indonesian citizen, 46 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan (2002)

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

- Credit Risk Lead di PT Spenmo Teknologi Indonesia (2021–2022);
- Chief Risk Officer/SVP Risk Management di PT Crowde Membangun Bangsa (2021);
- Risk Management Head di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2020);
- Chief Risk Officer di PT Andalan Finance Indonesia (2018–2020);
- Credit Policy Division Head di PT Bussan Auto Finance (2018);
- Credit & Collection Strategy Division Head di PT MNC Finance (2016–2018);
- Risk Head di PT Nissan Financial Services Indonesia (2016);
- Automotive Risk Senior Manager di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2012–2016);
- Credit Support Department Head di PT Adira Dinamika Multi Finance (2004–2012).

- Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management Perseroan;
- Anggota Komite Pengarah TI Perseroan;

- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Bachelor of Economics from Pelita Harapan University (2002)

Financing Expert Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute

- Credit Risk Lead at PT Spenmo Teknologi Indonesia (2021–2022);
- Chief Risk Officer/SVP Risk Management at PT Crowde Membangun Bangsa (2021);
- Risk Management Head at PT BFI Finance Indonesia Tbk (2020);
- Chief Risk Officer at PT Andalan Finance Indonesia (2018–2020);
- Credit Policy Division Head at PT Bussan Auto Finance (2018);
- Credit & Collection Strategy Division Head at PT MNC Finance (2016–2018);
- Risk Head at PT Nissan Financial Services Indonesia (2016);
- Automotive Risk Senior Manager at PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2012–2016);
- Credit Support Department Head at PT Adira Dinamika Multi Finance (2004–2012).

- Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management;
- Member of the Company's IT Steering Committee;
- Member of the Company's Risk Management Committee.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

INDEPENDENSI KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

ALCO senantiasa menjalankan perannya dengan mengedepankan prinsip independensi sebagai landasan utama. Setiap rekomendasi dan keputusan yang dihasilkan Komite disusun secara objektif, berdasarkan analisis mendalam terhadap struktur aset dan liabilitas Perseroan, serta potensi risiko dan peluang yang ada. Prinsip independensi ini memastikan anggota ALCO dapat memberikan masukan yang jernih dan tidak bias kepada Direksi, sehingga pengambilan keputusan terkait likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan Perseroan selalu tepat dan terukur.

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota ALCO telah memenuhi kriteria independensi sesuai regulasi dan ketentuan internal Perseroan, menjadikan Komite ini andalan dalam menjaga keseimbangan keuangan sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis secara berkelanjutan.

INDEPENDENCE OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE

ALCO consistently carries out its role by prioritizing the principle of independence as its primary foundation. Every recommendation and decision made by the Committee is formulated objectively, based on an in-depth analysis of the Company's asset and liability structure, as well as potential risks and opportunities. This principle of independence ensures that ALCO members can provide clear and unbiased input to the Board of Directors, ensuring that decisions regarding the Company's liquidity, profitability, and financial stability are always appropriate and measured.

Throughout 2025, all ALCO members met the independence criteria as stipulated in the Company's regulations and internal provisions, making this Committee a key player in maintaining financial balance while supporting business sustainability.



PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota ALCO secara konsisten mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan Perseroan, meningkatkan pemahaman terhadap manajemen aset dan liabilitas, serta memastikan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko keuangan.

Rincian kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, all ALCO members consistently participated in various training and competency improvement programs as part of their ongoing commitment to strengthening the Company's financial management capacity, enhancing their understanding of asset and liability management, and ensuring the implementation of best practices in financial risk management.

The details of the training and competency improvement activities during 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee Choi, Ho Jung Anggota Komite Member of the Committee	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Februari 2025 February 4, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Cun Pin Anggota Komite Member of the Committee	Seminar Nasional Will Trade War Create Financial Turmoil? National Seminar Will Trade War Create Financial Turmoil?	6 Mei 2025 May 6, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee Choi, Ho Jung Anggota Komite Member of the Committee	Seminar <i>Online Economic Outlook</i> Economic Outlook Online Seminar	2 September 2025 September 2, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee Choi, Ho Jung Anggota Komite Member of the Committee	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU-PPT dan PPSM)l Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and PPSM) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publik)



Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Cun Pin Anggota Komite Member of the Committee	KreditPlus Tangguh <i>Development Camp</i> KreditPlus Tangguh Development Camp	4-6 Desember 2025 December 4-6, 2025	PeopleShift
Marie Yovanka Engelina Anggota Komite Member of the Committee	Seminar Nasional <i>Resilience and Turnaround</i> : Indonesia's Economic Direction National Seminar on Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies

RAPAT KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Kebijakan Rapat

ALCO wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap kuartal atau 4 (empat) kali dalam setahun. Pelaksanaan rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota, termasuk kehadiran Ketua Komite, dan setiap keputusan diupayakan melalui musyawarah bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas, ALCO juga dapat mengambil keputusan secara tertulis tanpa pertemuan langsung sepanjang seluruh anggota telah diberitahu dan menyetujui usulan secara tertulis. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan rapat resmi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, ALCO telah menyelenggarakan sebanyak 4 (empat) kali rapat, dengan rincian informasi sebagai berikut:

ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

ALCO is required to hold regular meetings at least 1 (one) time every quarter or 4 (four) times a year. The implementation of the meeting is considered valid if attended by more than 50% of members, including the presence of the Committee Chair, and every decision is attempted through joint deliberation. As stipulated in Article 6 of the Asset and Liability Management Committee Guidelines, ALCO can also make decisions in writing without a face-to-face meeting as long as all members have been notified and agree to the proposal in writing. Decisions taken through this mechanism have the same legal force as decisions of an official meeting.

Meeting Frequency and Level of Attendance

Throughout 2025, ALCO has held 4 (four) meetings, with detailed information as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	2	2	100%
Peter Halim ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	4	4	100%
Kisup Wi	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Hery Susanto Dermawan ³⁾	Anggota Komite Member of the Committee	4	1	25%
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Kyeongho Min	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Cun Pin	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%



Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Marie Yovanka Engelina ⁴⁾	Anggota Komite Member of the Committee	3	3	100%
Daniel Adrian ⁵⁾	Anggota Komite Member of the Committee	1	1	100%

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

³⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁴⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁵⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's Asset and Liability Management Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

³⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

⁴⁾ She officially resigned as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

⁵⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's Asset and Liability Management Committee as of September 1, 2025

Agenda Rapat Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat ALCO membahas agenda-agenda sebagai berikut:

2025 Asset and Liability Management Committee Meeting Agenda

Throughout 2025, ALCO meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	Laporan Perkembangan Aset dan Liabilitas Q4 2024	Asset and Liability Development Report Q4 2024
2.	30 April 2025 April 30, 2025	Laporan Perkembangan Aset dan Liabilitas Q1 2025	Asset and Liability Development Report Q1 2025
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Laporan Perkembangan Aset dan Liabilitas Semester I Tahun 2025	Asset and Liability Development Report for the First Half of 2025
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Laporan Perkembangan Aset dan Liabilitas Q3 2025	Asset and Liability Development Report Q3 2025

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ALCO secara telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain sebagai berikut:

1. *Update* terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal ke-4 tahun 2024;
2. *Update* terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal ke-1 tahun 2025;
3. *Update* terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal ke-2 tahun 2025;
4. *Update* terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal ke-3 tahun 2025; dan
5. Melaksanakan rapat Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES IN 2025

In 2025, ALCO implemented a number of strategic initiatives in accordance with the work plan established at the beginning of the year, including the following:

1. Update on the Company's Assets & Liabilities as of the fourth quarter of 2024;
2. Update on the Company's Assets & Liabilities as of the first quarter of 2025;
3. Update on the Company's Assets & Liabilities as of the second quarter of 2025;
4. Update on the Company's Assets & Liabilities as of the third quarter of 2025; and
5. Conducting meetings of the Asset and Liability Management Committee.



KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Steering Committee

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) berperan sebagai forum strategis Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif, investasi, dan pengembangan TI sejalan dengan arah bisnis, kebutuhan operasional, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komite ini bertugas memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi atas strategi TI Perseroan, mencakup aspek keamanan informasi, tata kelola data, manajemen risiko TI, serta efektivitas layanan dan infrastruktur teknologi yang mendukung kelancaran operasional. Dengan peran tersebut, Komite Pengarah TI tidak hanya memastikan pemanfaatan teknologi yang optimal, tetapi juga mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait transformasi digital, efisiensi proses, dan inovasi operasional yang berkelanjutan.

The Information Technology (IT) Steering Committee serves as the Company's strategic forum to ensure that all IT initiatives, investments, and developments align with business direction, operational needs, and the principles of good corporate governance. This committee is tasked with providing direction, oversight, and evaluation of the Company's IT strategy, encompassing aspects of information security, data governance, IT risk management, and the effectiveness of technology services and infrastructure that support smooth operations. In this role, the IT Steering Committee not only ensures optimal technology utilization but also supports the Board of Directors in strategic decision-making related to digital transformation, process efficiency, and sustainable operational innovation.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pembentukan Komite Pengarah TI mengacu pada sejumlah regulasi berikut ini:

1. POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ("POJK 4/2021").
2. Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ("SEOJK 22/2021").
3. Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The formation of the IT Steering Committee refers to the following regulations:

1. OJK Regulation No. 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions ("POJK 4/2021").
2. OJK Circular Letter No. 22/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions ("SEOJK 22/2021").
3. Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of Board of Directors Meeting dated March 16, 2022.

PEDOMAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Direksi pada 16 Maret 2022. Seiring dengan perkembangan regulasi di sektor jasa keuangan dan kebutuhan operasional Perseroan, pedoman ini diperbarui pada 29 Agustus 2025 guna memperkuat tata kelola TI, keamanan informasi, dan kesiapan menghadapi transformasi digital.

Secara umum, pedoman ini mengatur ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, struktur, serta mekanisme pelaporan bagi anggota Komite Pengarah TI. Bersifat mengikat, pedoman ini menjadi panduan wajib bagi setiap anggota dalam melaksanakan perannya secara konsisten dan profesional.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE CHARTER

The Information Technology Steering Committee Guidelines were first established through a Board of Directors Circular Decision on March 16, 2022. In line with regulatory developments in the financial services sector and the Company's operational needs, these guidelines were updated on August 29, 2025, to strengthen IT governance, information security, and readiness for digital transformation.

In general, these guidelines define the scope of duties and responsibilities, terms of office, structure, and reporting mechanisms for IT Steering Committee members. These guidelines are binding and serve as mandatory guidance for each member in carrying out their roles consistently and professionally.



Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, Perseroan mempublikasikan pedoman ini melalui situs resmi: <https://kreditplus.com/committee-charter>.

As a manifestation of the principle of transparency, the Company publishes these guidelines on its official website: <https://kreditplus.com/committee-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan TI yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI.
3. Kesesuaian proyek TI yang disetujui dengan rencana pengembangan TI.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek TI dengan proyek TI yang disetujui.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI agar investasi pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki Perseroan.

WEWENANG KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 Pedoman Komite Pengarah TI. Wewenang ini memungkinkan Komite untuk memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi seluruh inisiatif serta investasi TI Perseroan.

Secara lebih rinci, kewenangan Komite mencakup beberapa hal berikut:

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The description of the duties and responsibilities of the IT Steering Committee as regulated in the Information Technology Steering Committee Guidelines is as follows:

1. The IT development plans that in line with the Company's business activities.
2. The formulation of IT policies and procedures.
3. Conformity of the approved IT projects with the IT development plan.
4. Conformity of implementation of the IT project with the approved IT project.
5. Conformity of IT with the needs of management information systems and the needs of the Company's business activities.
6. Effectiveness of risk mitigation on the Company's investments in the IT sector so that the Company's investment in the IT sector contributes to the achievement of the Company's business objectives.
7. Monitoring the performance of IT and efforts to improve the performance of IT.
8. Effort to resolve various problems related to IT that cannot be resolved by the work unit of users and organizers of IT in an effective, efficient, and timely manner.
9. Adequacy and allocation of IT resources owned by the Company.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE AUTHORITY

In carrying out its duties and responsibilities, the Information Technology Steering Committee has a number of authorities as stipulated in Article 4 of the IT Steering Committee Guidelines. These authorities enable the Committee to provide direction, oversee, and evaluate all of the Company's IT initiatives and investments.

More specifically, the Committee's authorities include the following:

1. The Committee has the authority to access Company documents, data and information needed to carry out its duties.
2. In relation with the execution of its duties and responsibilities, the Committee is authorized to directly communicate with the employee, Board of Directors and other parties.



3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

MASA JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Ketentuan mengenai masa jabatan anggota Komite Pengarah TI diatur dalam Pasal 5 Pedoman Komite. Bagi anggota yang juga menjabat sebagai Direksi, maka masa jabatannya sebagai anggota komite mengikuti periode penunjukan sebagai Direksi sesuai dengan tanggal pengangkatannya melalui RUPS. Sementara itu, anggota yang bukan bagian dari Direksi memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan fleksibilitas bagi Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Pedoman Komite Pengarah TI menetapkan bahwa anggota Komite ini terdiri dari:

1. Direktur Utama sebagai Ketua;
2. Wakil Direktur Utama sebagai Anggota;
3. Direktur sebagai Anggota;
4. Direktur sebagai Anggota;
5. Head of IT & Digitalization sebagai Anggota
6. Head of Operation & Collection Management sebagai Anggota; dan
7. Head of Enterprise Risk Management sebagai Anggota.

Direksi dapat menunjuk lebih anggota sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, kebutuhan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, susunan Komite Pengarah TI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

3. If necessary, the Committee is authorized to involve independent parties to assist its duties.

TERM OF OFFICE OF IT STEERING COMMITTEE MEMBERS

The provisions regarding the term of office of IT Steering Committee members are regulated in Article 5 of the Committee Guidelines. For members who also serve as Directors, their term of office as committee members follows the period of appointment as Directors according to the date of their appointment through the GMS. Meanwhile, members who are not part of the Board of Directors have a term of office of 3 (three) years with the flexibility for the Board of Directors to dismiss them at any time if deemed necessary.

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The provisions outlined in Article 5 of the IT Steering Committee Charter stipulate that the members of this Committee consist of:

1. President Director as Chairman;
2. Vice President Director as Member;
3. Director as Member;
4. Director as Member;
5. Head of IT & Digitalization as Member;
6. Head of Operation & Collection Management as Member; and
7. Head of Enterprise Risk Management as Member.

The Board of Directors may appoint additional members according to the complexity of business activities, the needs of the Company, and the applicable laws and regulations.

In accordance with those provisions, the composition of the IT Steering Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	• Direktur Utama • Ketua ALCO • Ketua Komite Manajemen Risiko • President Director • Chairman of the ALCO • Chairman of the Risk Management Committee	2022 – 2025 (Periode Pertama) 2022 – 2025 (First Term)



Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Peter Halim ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025	• Direktur Utama • Ketua ALCO • Anggota Komite Manajemen Risiko • President Director • Chairman of the ALCO • Member of the Risk Management Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)
Kisup Wi	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	• Wakil Direktur Utama • Ketua Komite Manajemen Risiko • Anggota ALCO • Vice President Director • Chairman of the Risk Management Committee • Member of ALCO	2022 – 2027 (Periode Pertama) 2022 – 2027 (First Term)
Hery Susanto Dermawan	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	• Direktur • Anggota ALCO • Director • Member of ALCO	2022 – 2027 (Periode Pertama) 2022 – 2027 (First Term)
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Agustus 2023 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on August 16, 2023	• Direktur • Anggota ALCO • Anggota Komite Manajemen Risiko • Director • Member of ALCO • Risk Management Committee Member	2023–2028 (Periode Pertama) 2023 – 2028 (First Term)
David Wirawan	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated March 16, 2025	Head of IT and Digitalization	2025 – 2025 (Periode Kedua) 2025 – 2025 (Second Term)
Herman Jusup	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated March 16, 2025	• Head of Operation Management • Anggota Komite Manajemen Risiko • Head of Operation Management • Member of the Risk Management Committee	2025 – 2025 (Periode Kedua) 2025 – 2025 (Second Term)
Marie Yovanka Engalina ³⁾	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated March 16, 2025	• Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite Manajemen Risiko • Head of Enterprise Risk and Anti-Fraud Management • Member of ALCO • Member of the Risk Management Committee	2025–2025 (Periode Kedua) 2025 – 2025 (Second Term)
Daniel Adrian ⁴⁾	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated September 1, 2025	• Head of Risk Management • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite Manajemen Risiko • Head of Risk Management • Member of ALCO • Member of the Risk Management Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

³⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁴⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's IT Steering Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025

³⁾ She officially resigned as a Member of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025

⁴⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025



PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi

Profil Bapak Peter Halim telah disampaikan pada Sub Bab Profil Komite ALCO, sementara informasi lengkap mengenai profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Profil Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

Profil Bapak Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, dan Choi, Ho Jung, dan Daniel Adrian telah disampaikan pada Sub Bab Komite ALCO, sementara informasi lengkap mengenai profil Bapak Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, dan Choi, Ho Jung dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

Profile of the Chairman of the Information Technology Steering Committee

Mr. Peter Halim's profile has been presented in the ALCO Committee Profile Sub-Chapter, while complete information regarding his profile can be seen in the Company Profile Chapter.

Information Technology Steering Committee Member Profiles

The profiles of Mr. Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, and Choi, Ho Jung, and Daniel Adrian have been presented in the ALCO Committee Sub-Chapter, while complete information regarding the profiles of Mr. Kisup Wi, Hery Susanto Dermawan, and Choi, Ho Jung can be seen in the Company Profile Chapter.

David Wirawan

Anggota Komite Komite Pengarah TI | Member of the IT Steering Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun

Indonesian citizen, 50 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Management Business Administration dari IPMI Business School (2015);
- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanuddin (1999).

- Master of Management Business Administration from IPMI Business School (2015);
- Bachelor of Electrical Engineering from Hasanuddin University (1999).

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute

Riwayat Karier Career History

- IT Director di PT Dutalestari Sentratama – Kino Group (2015–2017);
- Chief Corporate IT di OT Group tahun (1999–2014).

- IT Director at PT Dutalestari Sentratama – Kino Group (2015–2017);
- Chief Corporate IT at OT Group in (1999–2014).

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Head of IT and Digitalization

Head of IT and Digitalization

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



Herman Jusup

Anggota Komite Komite Pengarah TI | Member of the IT Steering Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun

Indonesian citizen, 47 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1994).

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

- Operation General Manager di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2010–2017);
- Operational Regional & General Affairs Manager di PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (2000–2010);
- General Auditor & Special Auditor di Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) (1997–2000).

Head of Operation Management

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Bachelor of Accounting from Atma Jaya Catholic University of Indonesia (1994).

Financing Expert Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute

- Operation General Manager at PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2010–2017);
- Operational Regional & General Affairs Manager at PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (2000–2010);
- General Auditor & Special Auditor at Public Accounting Firm Hans, Tuanakotta & Mustofa (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) (1997–2000).

Head of Operation Management

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah TI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada prinsip independensi sehingga setiap keputusan, arahan, dan evaluasi terkait strategi TI dilakukan secara objektif dan profesional. Independensi ini menjadi landasan bagi Komite dalam memberikan masukan kepada Direksi tanpa adanya pengaruh kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal.

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite yang menjabat selama tahun 2025 telah memenuhi kriteria independensi sesuai regulasi dan pedoman internal. Dengan prinsip independensi yang kuat, Komite dapat secara efektif mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait teknologi informasi, keamanan data, dan transformasi digital, sekaligus menjaga integritas dan keberlanjutan operasional Perseroan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Komite Pengarah TI secara aktif mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan pengelolaan strategi TI. Rincian kegiatan pelatihan dan

INDEPENDENCE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The IT Steering Committee carries out its duties and responsibilities based on the principle of independence, ensuring that every decision, direction, and evaluation related to IT strategy is conducted objectively and professionally. This independence serves as the foundation for the Committee to provide input to the Board of Directors without the influence of personal interests or external pressure.

The Company ensured that all Committee members serving throughout 2025 met the independence criteria in accordance with applicable regulations and internal guidelines. Upholding a strong principle of independence, the Committee effectively supported the Board of Directors in making strategic decisions related to information technology, data security, and digital transformation, while safeguarding the integrity and sustainability of the Company's operations.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, all members of the IT Steering Committee actively participated in various training and competency development programs as part of the Company's commitment to strengthening IT strategic oversight and management capabilities. Details of the training



peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini adalah sebagai berikut:

and competency development activities implemented throughout the year are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
David Wirawan Anggota Komite Member of the Committee	<i>The Open Group Architecture Framework</i>	20–21 Februari 2025 February 20–21, 2025	IT Governance Indonesia
Herman Jusup Anggota Komite Member of the Committee	Seminar Nasional <i>Will Trade War Create Financial Turmoil?</i> National Seminar <i>Will Trade War Create Financial Turmoil?</i>	6 Mei 2025 May 6, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
David Wirawan Anggota Komite Member of the Committee			
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee	KreditPlus Tangguh <i>Development Camp</i> KreditPlus Tangguh Development Camp	17–19 Desember 2025 December 17–19, 2025	PeopleShift
Herman Jusup Anggota Komite Member of the Committee			
Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee			
Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee			
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Februari 2025 February 4, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee			
Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee			
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee	Seminar <i>Online Economic Outlook</i> Economic Outlook Online Seminar	2 September 2025 September 2, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Herman Jusup Anggota Komite Member of the Committee			
David Wirawan Anggota Komite Member of the Committee			
Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee			
Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee			
Peter Halim Ketua Komite Chairman of the Committee	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU–PPT dan PPSM)l Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter- Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML–CFT and PPSM) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publika)
Hery Susanto Dermawan Anggota Komite Member of the Committee			
Kisup Wi Anggota Komite Member of the Committee			



RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan Rapat

Sesuai Pasal 6 Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap kuartal, atau 4 (empat) kali dalam setahun. Frekuensi rapat dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan operasional dan urgensi pembahasan, sehingga Komite dapat menanggapi isu TI secara proaktif.

Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota, termasuk kehadiran Ketua Komite, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan musyawarah dan pertimbangan kolektif. Mekanisme ini memastikan proses pengambilan keputusan berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung efektivitas pengelolaan serta pengawasan teknologi informasi di Perseroan.

Selain melalui rapat formal, Komite Pengarah TI juga memiliki mekanisme untuk mengambil keputusan secara tertulis tanpa pertemuan langsung. Mekanisme ini berlaku apabila seluruh anggota telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan yang diambil dalam rapat resmi, memastikan kelancaran pengambilan keputusan strategis terkait TI secara efektif dan responsif.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, Komite Pengarah TI telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

In accordance with Article 6 of the Information Technology Steering Committee Guidelines, Committee meetings must be held at least once every quarter or four times annually. The frequency of meetings can be increased depending on operational needs and the urgency of the discussions, allowing the Committee to proactively address IT issues.

A meeting is considered valid if attended by more than 50% (fifty percent) of the members, including the Committee Chair, so that every decision taken reflects collective deliberation and deliberation. This mechanism ensures a transparent and accountable decision-making process, supporting the effective management and oversight of information technology within the Company.

In addition to formal meetings, the IT Steering Committee also has a mechanism for making written decisions without a face-to-face meeting. This mechanism applies if all members have been notified in writing and have given their written approval to the proposal. Decisions made through this mechanism have the same legal force as decisions made at formal meetings, ensuring the smooth, effective, and responsive process of strategic IT-related decisions.

Frequency and Attendance Level

In 2025, the IT Steering Committee held 4 (four) meetings with the following attendance levels:

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	2	2	100%
Peter Halim ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	4	4	100%
Kisup Wi	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Hery Susanto Dermawan	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
David Wirawan	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Herman Jusup	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Marie Yovanka Engelina ³⁾	Anggota Komite Member of the Committee	3	3	100%



Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Daniel Adrian ⁴⁾	Anggota Komite Member of the Committee	1	1	100%

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

³⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

⁴⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Anggota Komite Pengarah TI Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's IT Steering Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025

³⁾ She officially resigned as a Member of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025

⁴⁾ He was officially appointed as a Member of the Company's IT Steering Committee as of September 1, 2025

Agenda Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Pengarah TI membahas agenda-agenda sebagai berikut:

Information Technology Steering Committee Meeting Agenda 2025

Throughout 2025, the IT Steering Committee meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	Perkembangan Proyek <i>Next Generation Financing System</i>	Next Generation Financing System Project Development
2.	30 April 2025 April 30, 2025	Kepatuhan TI terkait Implementasi <i>Customer Relationship Management (Chromebook)</i>	IT Compliance related to Customer Relationship Management Implementation (Chromebook)
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Pembaruan TI: Penguatan Keamanan Siber dan Optimalisasi Biaya	IT Update: Cybersecurity Enhancement and Cost Optimization
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Rencana Aksi TI Tahun 2026	IT Action Plan 2026

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah TI telah melaksanakan berbagai aktivitas dan program kerja yang dirancang untuk memperkuat peran teknologi informasi dalam mendukung strategi dan operasional Perseroan. Setiap program bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efektivitas infrastruktur TI, serta memastikan seluruh inisiatif teknologi selaras dengan kebutuhan bisnis dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berikut adalah rangkaian aktivitas dan program yang telah dilaksanakan oleh Komite sepanjang tahun 2025:

1. Melakukan *update* terkait *Project NGFS (Next Generation Financing System)*;
2. Melakukan *update* terkait inisiatif *Customer Relationship Management (CRM)*;
3. Membahas rencana lanjutan Program *Chromebook* di tahun 2025;
4. Membahas penguatan keamanan siber dengan mengubah VPN ke SASE;
5. Membahas optimalisasi biaya biaya TI Perseroan dengan penggantian vendor, negosiasi ulang kontrak, dan optimasi layanan *cloud* di tahun 2025;
6. Membahas pengkinian Strategi TI dan Action Plan TI selama tahun 2025 dan 2026; dan
7. Melaksanakan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the IT Steering Committee implemented various activities and work programs designed to strengthen the role of information technology in supporting the Company's strategy and operations. Each program aimed to improve the efficiency, security, and effectiveness of IT infrastructure, while ensuring that all technology initiatives were aligned with business needs and good corporate governance principles.

The following is a series of activities and programs implemented by the Committee throughout 2025:

1. Provided an update on the NGFS (Next Generation Financing System) Project;
2. Provided an update on the Customer Relationship Management (CRM) initiative;
3. Discussed plans for the Chromebook Program in 2025;
4. Discussed strengthening cybersecurity by converting VPN to SASE;
5. Discussed optimizing the Company's IT costs through vendor replacement, contract renegotiation, and cloud service optimization in 2025;
6. Discussed updates to the IT Strategy and IT Action Plan for 2025 and 2026; and
7. Holding Information Technology Steering Committee meetings four times a year.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko berperan sebagai organ pendukung Direksi yang membantu memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan berjalan efektif di seluruh lini operasional. Komite ini bertugas memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian serta mitigasi berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, meliputi pengawasan dan pemberian rekomendasi atas pengelolaan seluruh jenis risiko sesuai dengan ketentuan dan prinsip manajemen risiko yang berlaku.

The Risk Management Committee serves as a supporting body to the Board of Directors, helping to ensure the effective implementation of the Company's risk management across all operational lines. This committee is tasked with providing direction, oversight, and evaluation of the identification, measurement, monitoring, control, and mitigation of the various risks faced by the Company, including oversight and recommendations for the management of all types of risks in accordance with applicable risk management regulations and principles.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Perseroan mengacu pada sejumlah regulasi berikut ini:

1. POJK 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan penyempurnaan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. ("POJK 42/2024").
2. Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 April 2021.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHING THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The establishment of the Risk Management Committee in the Company refers to the following regulations:

1. POJK 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, which is an improvement on POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions ("POJK 42/2024").
2. Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated April 27, 2021.

PEDOMAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi pada 16 Maret 2022, dan diperbarui melalui Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 19 April 2022. Pedoman ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota serta menjadi landasan formal bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite dalam mengarahkan serta mengawasi manajemen risiko Perseroan.

Secara umum, pedoman ini mengatur ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, struktur, serta mekanisme pelaporan anggota Komite Manajemen Risiko.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Perseroan mempublikasikan pedoman ini melalui situs resmi sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah di <https://kreditplus.com/committee-charter>.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Risk Management Committee Guidelines were established through a Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of a Board of Directors Meeting on March 16, 2022, and updated through a Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of a Board of Directors Meeting on April 19, 2022. These Guidelines are binding on all members and serve as the formal basis for implementing the Committee's duties, functions, and responsibilities in directing and overseeing the Company's risk management.

In general, these guidelines govern the scope of duties and responsibilities, terms of office, structure, and reporting mechanisms for Risk Management Committee members.

To demonstrate transparency and accountability, the Company publishes these guidelines on its official website for easy access by all stakeholders at <https://kreditplus.com/committee-charter>.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan organ non-struktural di Perseroan yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi terkait penerapan manajemen risiko di seluruh lingkungan Perseroan. Peran ini memungkinkan Komite untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis risiko, memastikan bahwa praktik manajemen risiko dijalankan secara efektif, sistematis, dan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Ruang lingkup mengenai tugas dan tanggung jawab komite ini diatur dalam Pasal 3 Pedoman Komite Manajemen Risiko.

WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko diberikan wewenang yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian rekomendasi secara efektif kepada Direksi. Wewenang ini mencakup berbagai hal yang mendukung penilaian, evaluasi, serta arahan terkait kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko Perseroan, antara lain:

1. Komite berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Periode tugas anggota Komite Manajemen Risiko yang juga menjabat sebagai anggota Direksi mengikuti masa penunjukannya sebagai Direksi sebagaimana ditetapkan melalui RUPS. Sementara itu, anggota Komite yang bukan merupakan Direksi menjabat selama 3 (tiga) tahun, dengan fleksibilitas bagi Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Ketentuan mengenai masa jabatan ini diatur dalam Pasal 5 Pedoman Komite Manajemen Risiko.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a non-structural body within the Company tasked with providing advice and recommendations to the President Director and/or Board of Directors regarding the implementation of risk management throughout the Company. This role enables the Committee to support risk-based strategic decision-making and ensure that risk management practices are implemented effectively, systematically, and in accordance with the principles of good corporate governance. The scope of this committee's duties and responsibilities is stipulated in Article 3 of the Risk Management Committee Guidelines.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE AUTHORITY

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is granted authority to effectively carry out its oversight function and provide recommendations to the Board of Directors. This authority encompasses various matters that support the assessment, evaluation, and direction of the Company's risk management policies, procedures, and practices, including:

1. The Committee is authorized to access Company documents, data and information needed to carry out its duties.
2. In relation to the execution of its duties and responsibilities, the Committee is authorized to directly communicate with the employee, Board of Directors and other parties.
3. If needed, the Committee is authorized to involve independent parties to assist its duties.

TERM OF OFFICE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The term of office of members of the Risk Management Committee who also serve as members of the Board of Directors follows the term of their appointment as Directors as determined by the GMS. Meanwhile, Committee members who are not Directors serve for 3 (three) years, with the flexibility for the Board of Directors to dismiss them at any time if deemed necessary. Provisions regarding this term of office are regulated in Article 5 of the Risk Management Committee Guidelines.



JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5 Pedoman Komite Manajemen Risiko menetapkan bahwa anggota Komite paling sedikit terdiri dari separuh 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan pejabat eksekutif terkait, sehingga mencerminkan keseimbangan antara pengambilan keputusan strategis dan pengawasan operasional. Direksi memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota tambahan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha, kebutuhan Perseroan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Article 5 of the Risk Management Committee Guidelines stipulates that the Committee's membership must consist of at least half of the Board of Directors and relevant executive officers, reflecting a balance between strategic decision-making and operational oversight. The Board of Directors has the authority to appoint additional members based on the complexity of the Company's business activities, the Company's needs, and applicable laws and regulations.

Based on these provisions, the composition of the Risk Management Committee as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Jabatan Lain di Perseroan Other Positions in the Company	Periode Masa Jabatan Term of Office
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on March 16, 2022	- Direktur Utama - Ketua ALCO - Ketua Komite Pengarah TI - President Director - Chairman of the ALCO - Chairman of the IT Steering Committee	2022 – 2025 (Periode Pertama) 2022 – 2025 (First Term)
Kisup Wi ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated September 1, 2025	- Wakil Direktur Utama - Anggota ALCO - Anggota Komite Pengarah TI - Deputy President Director - Member of ALCO - Member of the IT Steering Committee	2025 – 2030 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (First Term)
Peter Halim	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 September 2025 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting on September 1, 2025	- Direktur Utama - Ketua ALCO - Ketua Komite Pengarah TI - President Director - Chairman of the ALCO - Chairman of the IT Steering Committee	2025 – 2028 (Periode Pertama) 2025 – 2028 (First Term)
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated May 27, 2024	- Direktur - Anggota ALCO - Anggota Komite Pengarah TI - Director - Member of ALCO - Member of the IT Steering Committee	2023–2028 (Periode Pertama) 2023 – 2028 (First Term)
Ka Nen	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 4 September 2023 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated March 16, 2025	–	2023–2026 (Periode Pertama) 2023 – 2026 (First Term)
Daniel Adrian	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 1 November 2022 Circular Resolution of the Board of Directors in Lieu of the Board of Directors Meeting dated November 1, 2022	Head of Risk Management	2022 – 2025 (Periode Pertama) 2022 – 2025 (First Term)

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's Risk Management Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's Risk Management Committee as of September 1, 2025



PROFIL KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Ketua Komite Manajemen Risiko

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERSHIP PROFILE

Profile of the Chairman of the Risk Management Committee

Kisup Wi

Ketua Komite Manajemen Risiko | Chairman of the Risk Management Committee

Warga Negara Republik Korea, berusia 50 tahun, domisili di Jakarta

Republic of Korea citizen, 50 years old, domiciled in Jakarta

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti
Rapat Direksi tanggal 1 September 2025

Circular Resolution of the Board of Directors in
Lieu of the Board of Directors Meeting dated
September 1, 2025

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga
Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Financing Expert Certification by the Indonesian
Financing Professional Certification Institute

Profil lengkap Bapak Kisup selaku Ketua Komite Manajemen Risiko yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

The complete profile of Mr. Kisup as Chairman of the Risk Management Committee who also serves as Deputy President Director of the Company can be seen in the Company Profile Chapter.

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil Bapak Peter Halim dan Choi, Ho Jung selaku anggota Komite Manajemen Risiko yang juga menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan telah disampaikan pada Sub Bab Profil Komite ALCO, sementara informasi lengkap mengenai profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Risk Management Committee Member Profile

The profiles of Mr. Peter Halim and Mr. Choi, Ho Jung, members of the Risk Management Committee who also serve as the Company's President Director and Director, have been included in the ALCO Committee Profile subsection; detailed information regarding their profiles can be found in the Company Profile Chapter.

Ka Nen

Anggota Komite Manajemen Risiko | Member of the Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun

Indonesian citizen, 52 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Indonesian College of Economics.

Sertifikasi Profesi Professional Certification

-

-

Riwayat Karier Career History

- General Manager di PT Provident Capital Indonesia yang diperbantukan di Kreditor dan JD.ID (2015–2020);
- General Manager External Affairs di PT Bumi Suksesindo Tbk (2013–2015);
- Director Business and Operation di PT Mitra Investindo Tbk (2008–2013);
- RM Marketing di PT Finansia Multi Finance (2003–2008);
- Assistant Manager di PT Kalimas Motor (2001–2003);
- Head Marketing di PT Primaswadana Perkasa (1996–2001).

- General Manager at PT Provident Capital Indonesia who was seconded to Kreditor and JD.ID (2015–2020)
- General Manager External Affairs at PT Bumi Suksesindo Tbk (2013–2015)
- Director Business and Operation at PT Mitra Investindo Tbk (2008–2013)
- RM Marketing at PT Finansia Multi Finance (2003–2008)
- Assistant Manager at PT Kalimas Motor (2001–2003)
- Head of Marketing at PT Primaswadana Perkasa (1996–2001)

Head of Collection Management

Head of Collection Management.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.



Daniel Adrian

Anggota Komite Manajemen Risiko | Member of the Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun

Indonesian citizen, 46 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan (2002)

Sertifikasi Ahli Pembiayaan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia

- Credit Risk Lead di PT Spenmo Teknologi Indonesia (2021–2022);
- Chief Risk Officer/SVP Risk Management di PT Crowde Membangun Bangsa (2021);
- Risk Management Head di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2020);
- Chief Risk Officer di PT Andalan Finance Indonesia (2018–2020);
- Credit Policy Division Head di PT Bussan Auto Finance (2018);
- Credit & Collection Strategy Division Head di PT MNC Finance (2016–2018);
- Risk Head di PT Nissan Financial Services Indonesia (2016);
- Automotive Risk Senior Manager di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2012–2016);
- Credit Support Department Head di PT Adira Dinamika Multi Finance (2004–2012).

Head of Risk Management Perseroan

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Bachelor of Economics from Pelita Harapan University (2002)

Financing Expert Certification by the Indonesian Financing Professional Certification Institute

- Credit Risk Lead at PT Spenmo Teknologi Indonesia (2021–2022);
- Chief Risk Officer/SVP Risk Management at PT Crowde Membangun Bangsa (2021);
- Risk Management Head at PT BFI Finance Indonesia Tbk (2020);
- Chief Risk Officer at PT Andalan Finance Indonesia (2018–2020);
- Credit Policy Division Head at PT Bussan Auto Finance (2018);
- Credit & Collection Strategy Division Head at PT MNC Finance (2016–2018);
- Risk Head at PT Nissan Financial Services Indonesia (2016);
- Automotive Risk Senior Manager at PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2012–2016);
- Credit Support Department Head at PT Adira Dinamika Multi Finance (2004–2012).

Head of Credit Risk Management of the Company

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan seluruh tugas, fungsi, dan wewenangnya. Setiap anggota melaksanakan peran secara objektif, bebas dari intervensi pihak manapun, serta tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Prinsip independensi ini diterapkan dalam seluruh proses evaluasi, pemantauan, dan pemberian rekomendasi terkait pengelolaan risiko sehingga setiap keputusan yang dihasilkan berlandaskan analisis profesional dan kepentingan terbaik Perseroan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam POJK, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan risiko di seluruh lini operasional Perseroan.

INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee consistently upholds the principle of independence in carrying out all its duties, functions, and authorities. Each member performs their role objectively, free from interference from any party, and has no personal interests or relationships that could influence the quality of decision-making.

This principle of independence is applied throughout the evaluation, monitoring, and recommendation processes related to risk management, ensuring that every decision is based on professional analysis and the best interests of the Company. This approach aligns with the principles of good corporate governance as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) and strengthens the effectiveness of risk oversight across all aspects of the Company's operations.



PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko secara konsisten mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi guna memperkuat kapasitas pengawasan risiko, meningkatkan pemahaman terhadap dinamika risiko industri pembiayaan, dan menyesuaikan praktik manajemen risiko dengan perkembangan regulasi termasuk POJK terbaru.

Berikut rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Komite sepanjang tahun 2025:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2025

All members of the Risk Management Committee consistently participate in various training and competency development programs to strengthen their risk oversight capacity, enhance their understanding of the risk dynamics of the financing industry, and adapt their risk management practices to regulatory developments, including the latest OJK Regulations.

The following details the education and training programs attended by Committee members throughout 2025:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Kisup Wi Ketua Komite Chairman of the Committee Peter Halim Anggota Komite Member of the Committee	Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru OJK Policy Direction for 2025 and the New Government's Economic Growth Strategy	4 Februari 2025 February 4, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Ka Nen Anggota Komite Member of the Committee	Seminar Nasional Will Trade War Create Financial Turmoil? National Seminar Will Trade War Create Financial Turmoil?	6 Mei 2025 May 6, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Kisup Wi Ketua Komite Chairman of the Committee Peter Halim Anggota Komite Member of the Committee	Seminar <i>Online Economic Outlook</i> Economic Outlook Online Seminar	2 September 2025 September 2, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Daniel Adrian Anggota Komite Member of the Committee	Sertifikasi Manajemen Risiko – Satu Tingkat Di Bawah Direksi Risk Management Certification – One Level Below Directors	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
Daniel Adrian Anggota Komite Member of the Committee	Sertifikasi <i>Certified Risk Professional</i> Certified Risk Professional Certification	15–18, 22 September 2025 September 15–18, 22 2025	RAP Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko RAP Indonesia and the Risk Management Professional Certification Institute
Kisup Wi Ketua Komite Chairman of the Committee Peter Halim Anggota Komite Member of the Committee	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU-PPT dan PPSM)l Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and PPSM) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publika)



RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Rapat

Komite Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap kuartal atau 4 (empat) kali dalam setahun. Frekuensi rapat dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk memastikan pengawasan risiko yang efektif. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite, termasuk kehadiran Ketua Komite.

Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat formal, dengan syarat seluruh anggota telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani. Keputusan yang diambil melalui mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat resmi Komite.

Kebijakan penyelenggaraan rapat ini diatur dalam Pasal 6 Pedoman Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung efektivitas pengawasan risiko Perseroan sesuai prinsip GCG.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yap Tjay Hing ¹⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	2	2	100%
Kisup Wi ²⁾	Ketua Komite Chairman of the Committee	4	4	100%
Peter Halim	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Choi, Ho Jung	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Ka Nen	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%
Daniel Adrian	Anggota Komite Member of the Committee	4	4	100%

¹⁾ Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan per tanggal 3 Juli 2025

²⁾ Beliau resmi diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan per tanggal 1 September 2025

¹⁾ He officially resigned as Chairman of the Company's Risk Management Committee as of July 3, 2025

²⁾ He was officially appointed as Chairman of the Company's Risk Management Committee as of September 1, 2025

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Risk Management Committee is required to hold regular meetings at least once every quarter or four times a year. The frequency of meetings can be increased as needed to ensure effective risk oversight. A meeting is considered valid if attended by more than 50% (fifty percent) of the Committee members, including the Committee Chair.

The Risk Management Committee may make valid decisions without holding a formal meeting, provided that all members have been notified in writing and have provided their signed written consent. Decisions made through this mechanism have the same legal force as decisions made at formal Committee meetings.

The policy for holding these meetings is regulated in Article 6 of the Risk Management Committee Guidelines, ensuring that every decision-making process is transparent, accountable, and supports the effectiveness of the Company's risk oversight in accordance with GCG principles.

Frequency and Attendance Level

In 2025, the Risk Management Committee held 4 (four) meetings with the following attendance levels:



Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Manajemen Risiko membahas agenda-agenda sebagai berikut:

Agenda of the Risk Management Committee Meeting in 2025

Throughout 2025, the Risk Management Committee meetings discussed the following agendas:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	<i>Risk Control and Self Assessment (RCSA)</i> Perseroan tahun 2024	The Company's Risk Control and Self Assessment (RCSA) in 2024
2.	30 April 2025 April 30, 2025	Pembaruan Rencana Keberlangsungan Usaha (BCP)	Business Continuity Plan (BCP) Update
3.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Laporan Profil Risiko Q1 dan Q2 Tahun 2025	Risk Profile Report Q1 and Q2 2025
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Perubahan Struktur Organisasi Manajemen Risiko dan Pembaruan <i>Credit Decision Engine</i> (CDE)	Changes to the Risk Management Organizational Structure and Credit Decision Engine (CDE) Updates

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang merupakan bagian integral dari tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas Komite selama tahun 2025 mencakup berbagai program dan inisiatif berikut ini:

1. Meninjau *Risk Control and Self Assessment (RCSA)* Perseroan tahun 2024;
2. Meninjau rencana kelangsungan bisnis (BCP) tahun 2025;
3. Meninjau Laporan Profil Risiko Perseroan tahun 2025;
4. Meninjau perubahan dalam Organisasi Manajemen Risiko & Pembaruan Mesin Pengambilan Keputusan Kredit (*Credit Decision Engine/CDE*);
5. Melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE TASK IN 2025

Throughout 2025, the Risk Management Committee implemented various strategic activities that are an integral part of its duties and responsibilities. The Committee's duties during 2025 included the following programs and initiatives:

1. Reviewing the Company's 2024 Risk Control and Self-Assessment (RCSA);
2. Reviewing the 2025 Business Continuity Plan (BCP);
3. Reviewing the Company's 2025 Risk Profile Report;
4. Reviewing changes in the Risk Management Organization and updating the Credit Decision Engine (CDE);
5. Holding four Risk Management Committee meetings annually.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal, peraturan OJK, dan prinsip GCG. Peran krusial ini berfungsi sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran komunikasi korporasi. Dalam praktiknya, Sekretaris Perusahaan juga memfasilitasi penyelenggaraan RUPS, pengelolaan informasi publik, koordinasi administrasi, serta dokumentasi keputusan strategis Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan diangkat atau diberhentikan melalui Keputusan Direksi, sehingga perannya tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang profesional dan berkelanjutan, memperkuat fondasi tata kelola, dan menjaga reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan.

DASAR PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan mengacu pada regulasi POJK No. 35/POJK.04/2014 ("POJK 35/2014") tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/KBFMF/CCBOD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Mekanisme ini memastikan bahwa fungsi Sekretaris Perusahaan dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap regulasi, dan selaras dengan prinsip GCG, sekaligus memperkuat peran Sekretaris Perusahaan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di Perseroan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/KBFMF/CC-BOD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang secara umum sudah diselaraskan dengan Pasal 5 POJK 35/2014. Secara rinci,

The Corporate Secretary plays a strategic role in ensuring the Company's compliance with capital market regulations, OJK regulations, and GCG principles. This crucial role serves as a liaison between the Board of Commissioners, the Board of Directors, shareholders, and other stakeholders, while ensuring transparency, accountability, and smooth corporate communications. In practice, the Corporate Secretary also facilitates the holding of GMS, public information management, administrative coordination, and documentation of the Company's strategic decisions.

In carrying out his/her functions, the Corporate Secretary reports directly to the Board of Directors and is appointed or dismissed through a Board of Directors Decree. Therefore, his/her role not only ensures compliance but also supports professional and sustainable decision-making, strengthens the foundation of governance, and maintains the Company's reputation among stakeholders.

BASIS FOR APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY FUNCTIONS

The mechanism for appointing and implementing the Corporate Secretary function in the Company refers to the POJK regulation POJK 35/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, as well as the Decree of the Company's Board of Directors No. 001/KBFMF/CCBOD/III/2022 dated March 16, 2022. Based on these provisions, the Board of Directors has the authority to appoint or dismiss the Corporate Secretary with the approval of the Board of Commissioners. This mechanism ensures that the Corporate Secretary function is carried out professionally, in compliance with regulations, and in line with GCG principles, while strengthening the role of the Corporate Secretary in maintaining transparency, accountability, and effective communication with all stakeholders.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The provisions regarding the duties and responsibilities of the Corporate Secretary in the Company are stipulated in the Company's Board of Directors' Decree No. 001/KBFMF/CC-BOD/III/2022 dated March 16, 2022, which is generally aligned with Article 5 of POJK 35/2014. Specifically, the



tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Keeping abreast of capital market developments, particularly applicable laws and regulations.
2. Providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure compliance with capital market laws and regulations.
3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance, including:
 - a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website;
 - b. Submitting reports to the Financial Services Authority (OJK) in a timely manner;
 - c. Organizing and documenting General Meetings of Shareholders;
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
 - e. Implementing orientation programs for the Company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. As a liaison between the Company and Shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Antonius Padua Wisuda Adhitama

Sekretaris Perusahaan | Secretary Profile

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun

Indonesian citizen, 47 years old

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/KBFMF/CC-BOD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.

- Magister International Economic & Business Laws dari Universitas Rijksuniversiteit Groningen, Belanda (2003); dan
- Sarjana Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2000).

Sertifikasi Dasar Manajerial dan Sertifikasi Manajemen Risiko – Satu Tingkat Di Bawah Direksi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia.

- Head of Compliance and Corporate Secretary (2022 – saat ini);
- Legal, Risk & Compliance Senior Manager di PT Finansia Multi Finance (2017 – 2022);
- Legal & Risk Management Counsel di PT Sampoerna Wirausaha (2017);
- Legal & Compliance Department Head di PT Nissan Financial Service Indonesia (2013–2016); dan
- Corporate Legal Manager di PT Finansia Multi Finance (2008 – 2013).

Decree of the Company's Board of Directors No. 001/KBFMF/CC-BOD/III/2022 dated March 16, 2022.

- Master of International Economic & Business Laws from Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands (2003); and
- Bachelor of Business Law from the Faculty of Law, University of Indonesia (2000).

Basic Managerial Certification and Risk Management Certification – One Level Below Directorship by the Indonesian Financing Professional Certification Institute.

- Head of Compliance and Corporate Secretary (2022 – present);
- Legal, Risk & Compliance Senior Manager at PT Finansia Multi Finance (2017 – 2022);
- Legal & Risk Management Counsel at PT Sampoerna Wirausaha (2017);
- Legal & Compliance Department Head at PT Nissan Financial Service Indonesia (2013–2016); and
- Corporate Legal Manager at PT Finansia Multi Finance (2008 – 2013)



**Rangkap Jabatan
Concurrent Positions**
**Hubungan Afiliasi
Affiliations**

Tidak memiliki rangkap jabatan baik Perseroan maupun luar Perseroan.
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

Does not hold dual positions either within the Company or outside the Company.
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi guna meningkatkan pemahaman terkait regulasi pasar modal, praktik terbaik GCG, manajemen risiko, serta penggunaan TI yang mendukung fungsi sekretariat korporasi. Berikut adalah rincian program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti selama tahun 2025:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY TRAINING AND/OR IMPROVEMENT IN 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary participated in various training and competency development programs to enhance their understanding of capital market regulations, GCG best practices, risk management, and the use of IT to support corporate secretariat functions. The following details the training and competency development programs participated in during 2025:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Antonius Padua Wisuda Adhitama Head of Compliance and Corporate Secretary	Seminar Nasional <i>Resilience and Turnaround</i> : Indonesia's Economic Direction National Seminar on Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Association of Indonesian Financing Companies
	Pelaksanaan Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa (APU-PPT dan PPPSM) Pejabat Eksekutif PT KB Finansia Multi Finance Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and WMD) Training for Executive Officers of PT KB Finansia Multi Finance	10 Desember 2025 December 10, 2025	HukumOnline (PT Justika Siar Publik)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal yang berfokus pada pemenuhan kepatuhan regulasi, penerapan tata kelola yang baik, serta efektivitas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional Perseroan, di antaranya:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK, BEI, dan regulator lain yang terkait dengan pasar modal, serta menyampaikan informasi tersebut dan memberikan masukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary optimally carried out its functions and responsibilities, focusing on regulatory compliance, good governance, and effective communication with all stakeholders. These duties encompassed various strategic activities that support transparency, accountability, and the sustainability of the Company's operations, including:

1. Following developments in the capital market, especially laws and regulations applicable in the capital market, including ensuring compliance with new regulations issued by the OJK, IDX and other regulators related to the capital market and conveying such information and providing input to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;



2. Melakukan penyesuaian kebijakan Perseroan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berlaku.
 3. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Rincian pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut telah diuraikan secara lengkap pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub Bab Rapat Umum Pemegang Saham.
 4. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali, Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali, termasuk pengadministrasian risalah rapatnya. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 5. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Pada tahun 2025, beberapa laporan berkala yang telah disampaikan antara lain:
 - a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025;
 - b. Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan;
 - c. Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 Seri A;
 - d. Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan/atau KAP;
 - e. Laporan Perubahan Pengurus Perseroan;
 - f. Laporan Keuangan Tengah Tahun untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - g. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit untuk tahun buku 2025;
 - h. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025.
 6. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui situs web Perseroan maupun melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
 7. Mengadministrasikan, mendistribusikan, serta menindaklanjuti surat masuk dari OJK Pasar Modal, BEI, dan institusi lainnya yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 8. Memelihara dan menjalin komunikasi dengan media dan investor, baik dalam rangka memberikan tanggapan maupun menyampaikan pembaruan kinerja Perseroan.
 9. Melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan penguatan citra (*brand image*) Perseroan.
2. Adjusting the Company's policies in accordance with applicable Good Corporate Governance provisions;
 3. Organizing and documenting GMS, both Annual GMS and Extraordinary GMS. In 2025, the Company held Annual GMS and Extraordinary GMS. Details regarding the implementation of Annual GMS and Extraordinary GMS have been described in detail in the Corporate Governance Chapter, sub-chapter General Meeting of Shareholders.
 4. Throughout 2025, the Company held 6 (six) Board of Commissioners Meetings, 12 (twelve) Board of Directors Meetings, and 4 (four) Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, including the administration of the minutes of the meetings. The Corporate Secretary ensures that the meetings are held in accordance with applicable regulations.
 5. Submitting periodic and incidental reports to regulators in accordance with applicable capital market regulations. In 2025, several periodic reports submitted included:
 - a. Report on the Sustainable Financial Action Plan (SFAP) for 2025;
 - b. Annual Rating Results Report;
 - c. Report on Fund Readiness for Principal and Interest Repayment of KB Finansia Multi Finance Bonds II 2024 Series A;
 - d. Evaluation Report on the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm;
 - e. Report on Changes in the Company's Management;
 - f. Mid-Year Financial Statements for the period ending June 30, 2025, audited by a Public Accountant;
 - g. Audited Annual Financial Statements for the 2025 financial year;
 - h. 2025 Annual Report and Sustainability Report.
 6. Conducting information disclosure in accordance with applicable provisions, through both the Company's website and the Electronic Reporting System.
 7. Administering, distributing, and following up on incoming correspondence from the OJK Capital Market, the IDX, and other institutions addressed to the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 8. Maintaining and establishing communication with the media and investors, both to provide feedback and to provide updates on the Company's performance.
 9. Carrying out various activities related to building and strengthening the Company's brand image.



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal (UAI) merupakan fungsi independen di Perseroan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Sebagai pilar utama dalam kerangka *Three Lines of Defence*, UAI beroperasi sebagai garis pertahanan ketiga yang memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas pengendalian internal dan mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh manajemen operasional (garis pertama) serta fungsi pengawasan risiko dan kepatuhan (garis kedua).

Unit ini berperan aktif mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan audit rutin dan khusus, menilai kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta praktik terbaik industri. Hasil audit dan rekomendasi perbaikan disampaikan secara langsung kepada Komite Audit dan Direksi, sehingga langkah-langkah mitigasi risiko dapat dilakukan secara tepat waktu dan terukur.

Selain itu, UAI juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kapabilitas tim melalui program pelatihan reguler, termasuk pembaruan regulasi OJK, praktik tata kelola, manajemen risiko, serta TI yang mendukung efektivitas audit. Dengan menjalankan peran independen ini, UAI menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal sebagai landasan formal bagi seluruh personel UAI dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan profesional. Piagam ini pertama kali disahkan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris pada 21 Maret 2022, dan disusun secara komprehensif untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas audit. Piagam ini mencakup visi dan misi fungsi audit internal, struktur organisasi serta kedudukan Unit Audit Internal dalam Perseroan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab auditor internal, kode etik profesi, persyaratan dan kualifikasi anggota, mekanisme pertanggungjawaban, hingga ketentuan mengenai perangkapan jabatan. Dengan adanya Piagam ini, setiap kegiatan audit dilakukan sesuai standar profesional, mendukung efektivitas pengendalian internal, dan memperkuat penerapan prinsip GCG.

The Internal Audit Unit (UAI) is an independent function within the Company that plays a strategic role in strengthening governance, internal control, and risk management. As a key pillar in the Three Lines of Defense framework, the UAI operates as the third line of defense, providing objective assessments of the effectiveness of internal controls and risk mitigation implemented by operational management (the first line) and the risk and compliance oversight function (the second line).

This unit actively supports the Board of Commissioners and Board of Directors by conducting routine and special audits, assessing the Company's compliance with laws and regulations, internal policies, and industry best practices. Audit results and recommendations for improvement are communicated directly to the Audit Committee and Board of Directors, ensuring timely and measurable risk mitigation measures.

Furthermore, the UAI focuses on improving the quality and capabilities of its team through regular training programs, including updates on OJK regulations, governance practices, risk management, and IT that support audit effectiveness. By fulfilling this independent role, the UAI serves as a critical foundation in ensuring business sustainability, transparency, and accountability, while strengthening stakeholder trust in the Company.

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

The Company has established an Internal Audit Charter as a formal foundation for all IAU personnel to carry out their oversight function independently, objectively, and professionally. This charter was first ratified through a Circular Decision of the Board of Commissioners in Lieu of a Board of Commissioners Meeting on March 21, 2022, and is comprehensively structured to provide clear direction for all audit activities. This charter covers the vision and mission of the internal audit function, the organizational structure and position of the Internal Audit Unit within the Company, the scope of duties and responsibilities of internal auditors, the professional code of ethics, member requirements and qualifications, accountability mechanisms, and provisions regarding concurrent positions. With this Charter, all audit activities are conducted in accordance with professional standards, supporting the effectiveness of internal controls and strengthening the implementation of GCG principles.



Sebagai wujud transparansi, Perseroan menyediakan akses publik terhadap Piagam Audit Internal melalui situs resmi sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses dokumen ini dengan mudah di tautan berikut: <https://kreditplus.com/internal-audit-charter>.

As a form of transparency, the Company provides public access to the Internal Audit Charter through its official website, allowing all stakeholders to easily access this document at the following link: <https://kreditplus.com/internal-audit-charter>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

UAI memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal. Berdasarkan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab UAI mencakup hal-hal berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit (IAU) plays a strategic role in ensuring the effectiveness of internal controls, risk management, and the Company's compliance with laws and regulations and internal policies. Based on the Internal Audit Charter, the IAU's duties and responsibilities include the following:

1. Prepare and implement the annual internal audit plan.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policy.
3. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Provide suggestions for improvement and objective information on the audited activities at all levels of management.
5. Prepare a report on the results of the audit and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners.
6. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested.
7. Cooperate with the Audit Committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out.
9. Carry out special inspections if necessary.

WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, UAI diberikan sejumlah kewenangan yang memungkinkan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi berjalan secara efektif, independen, dan profesional. Wewenang tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

INTERNAL AUDIT UNIT AUTHORITY

In carrying out its duties and responsibilities, the UAI is granted a number of authorities that enable its oversight and recommendation functions to operate effectively, independently, and professionally. These authorities include the following:

1. access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
2. communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee and members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
3. hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
4. coordinate its activities with the activities of the external auditor.



Visi Vision

Menjadi mitra kerja yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan Perseroan.

To be an independent, objective, professional, trusted, responsive partner to support the duties of the Board of Directors and Management in an effort to achieve the Company's goals or objectives.

Misi Mission

1. Membantu Direksi dan Manajemen dalam mencapai kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perseroan.
 2. Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi personil Audit Internal yang profesional.
 3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai Perseroan dan sistem-sistem pendukungnya.
1. Assist the Board of Directors and Management in achieving the Company's performance by increasing the efficiency and effectiveness of the Company's activities.
 2. Improve competence to become professional Internal Audit personnel.
 3. Strive for consulting services to increase the values of the Company and its supporting systems.

KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI

UAI dipimpin oleh Kepala Audit Internal, yang dibantu oleh satu atau lebih Kepala Departemen (Manager) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit di berbagai bidang. Secara struktural, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (*solid line*) sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah koordinasi Direksi.

Selain itu, UAI memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit (*dotted line*) sehingga memungkinkan penyampaian temuan, rekomendasi, dan laporan audit secara independen tanpa intervensi dari manajemen operasional. Kedudukan ini menegaskan peran UAI sebagai garis pertahanan ketiga dalam kerangka *Three Lines of Defence*, sekaligus memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas audit.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE

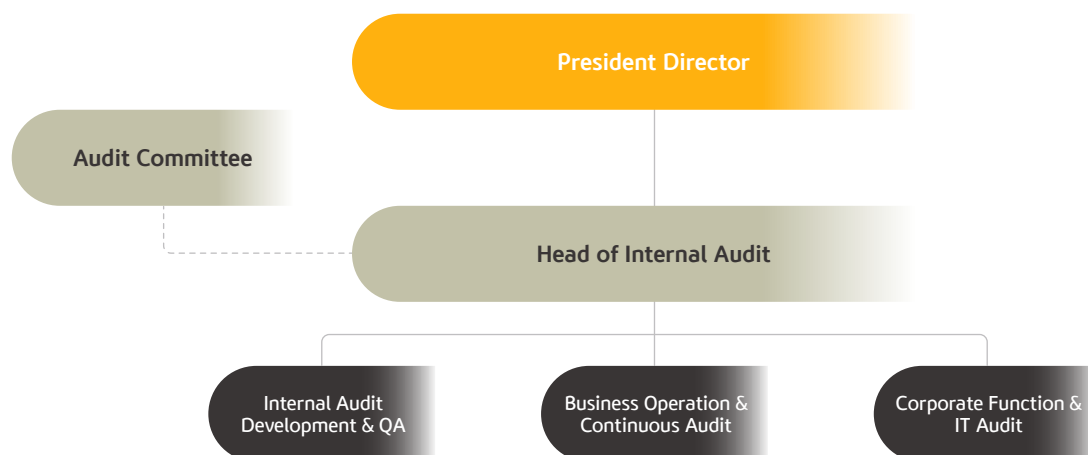
The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit, who is assisted by one or more Department Heads (Managers) to ensure effective audit implementation across various areas. Structurally, the Head of the Internal Audit Division reports directly to the President Director (*solid line*), so that daily tasks are coordinated by the Board of Directors.

Furthermore, the Internal Audit Unit has direct communication access with the Board of Commissioners through the Audit Committee (*dotted line*), enabling the independent submission of audit findings, recommendations, and reports without intervention from operational management. This position emphasizes the Internal Audit Unit's role as the third line of defense within the Three Lines of Defense framework, while ensuring integrity, transparency, and accountability in all audit activities.



Struktur organisasi UAI Perseroan per 31 Desember 2025 digambarkan sebagai berikut:

The organizational structure of the Company's Internal Audit Unit as of December 31, 2025, is as follows:



PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal berada di bawah kewenangan Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Direktur Utama memiliki hak untuk memberhentikan Kepala Audit Internal sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Piagam Audit Internal. Mekanisme ini memastikan bahwa posisi Kepala Divisi Audit Internal selalu dipegang oleh individu yang kompeten, independen, dan mampu melaksanakan fungsi pengawasan internal secara efektif.

PARTY RESPONSIBLE FOR APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit is under the authority of the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and is reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable regulations. The President Director has the right to dismiss the Head of Internal Audit at any time if the Head of Internal Audit fails or is incompetent in carrying out his/her duties, or does not meet the requirements set out in the Internal Audit Charter. This mechanism ensures that the position of Head of Internal Audit Division is always held by an individual who is competent, independent, and capable of carrying out internal oversight functions effectively.

PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION

Ahmad Salman Farizy

Kepala Audit Internal | Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun

Indonesian citizen, 46 years old

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi No. 01/KBFMF/CC-BOD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

Decree of the Board of Directors No. 01/KBFMF/CC-BOD/X/2022 dated October 3, 2022.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Manajemen dari Indonesia Banking School (2019);
- Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2002).

- Master of Management from Indonesia Banking School (2019)
- Bachelor of Economics majoring in Accounting from the Faculty of Economics, Padjadjaran University (2002)



Sertifikasi Profesi Professional Certification

Riwayat Karier Career History

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Hubungan Afiliasi Affiliations

- *Qualified Internal Auditor (QIA)* dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
- *Chartered Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- *Risk Management Certification Level 3* dari BSMR GARP.
- *Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)*, Institute of Internal Auditor (IIA).
- Senior Vice President – Head of Funding and Corporate Function Audit PT Bank BTPN member of SMBC Group (2019 – 2022);
- Vice President – Head Office Audit Head PT Bank BTPN (2016 – 2018);
- Vice President – Head Office and IT Audit Head PT Bank BTPN (2015 – 2016);
- Vice President – Product Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2014 – 2015);
- Assistant Vice President – Head Office and Treasury Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2010 – 2013);
- Manager – Treasury Audit Team Leader PT Bank Niaga (2006 – 2009).

Tidak memiliki rangkap jabatan baik Perseroan maupun luar Perseroan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama.

- *Qualified Internal Auditor (QIA)*, Internal Audit Education Foundation (YPIA)
- *Chartered Accountant*, Indonesian Institute of Accountants (IAI)
- *Risk Management Certification Level 3*, BSMR GARP
- *Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)*, Institute of Internal Auditors (IIA)
- Senior Vice President – Head of Funding and Corporate Function Audit PT Bank BTPN member of SMBC Group (2019 – 2022)
- Vice President – Head Office Audit Head PT Bank BTPN (2016 – 2018)
- Vice President – Head Office and IT Audit Head PT Bank BTPN (2015 – 2016)
- Vice President – Product Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2014 – 2015)
- Assistant Vice President – Head Office and Treasury Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2010 – 2013)
- Manager – Treasury Audit Team Leader PT Bank Niaga (2006 – 2009)

Does not hold dual positions either within the Company or outside the Company.

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional, setiap personel UAI wajib memenuhi persyaratan kompetensi tertentu, baik secara individu maupun kolektif. Persyaratan ini mencakup pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang relevan dengan praktik audit, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Secara umum, auditor internal di Perseroan harus memenuhi kualifikasi berikut ini:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik Audit Internal.

INTERNAL AUDITOR REQUIREMENTS

To perform its oversight function effectively and professionally, each UAI member is required to meet certain competency requirements, both individually and collectively. These requirements include knowledge, experience, and skills relevant to audit practices, internal control, risk management, and compliance with applicable regulations.

In general, internal auditors at the Company must meet the following qualifications:

1. Have integrity and professional, independent, honest, and objective behavior in carrying out their duties.
2. Have knowledge and experience of technical auditing and other disciplines relevant to their field of work.
3. Have knowledge of laws and regulations in the Capital Market sector and other related laws and regulations.
4. Have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively.
5. Comply with professional standards issued by the Internal Audit Association.
6. Comply with the Internal Audit code of ethics.



7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

INDEPENDENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Seluruh auditor internal senantiasa menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko, serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, UAI menjaga independensi dengan menerapkan pembatasan kewenangan operasional sehingga auditor internal tidak terlibat dalam aktivitas yang menjadi objek audit.

Seluruh auditor internal wajib mematuhi kode etik profesi yang menjadi pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas secara profesional, serta diwajibkan menyampaikan deklarasi independensi untuk menghindari benturan kepentingan dan memastikan objektivitas penilaian. Penerapan prinsip-prinsip ini menegaskan posisi UAI sebagai garis pertahanan ketiga dalam kerangka *Three Lines of Defense* sehingga mampu memberikan pengawasan yang kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personel UAI Perseroan wajib berpedoman pada kode etik profesi auditor internal yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Integritas**
Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh personel UAI menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, dan penuh tanggung jawab.
2. **Objektivitas**
Seluruh personel UAI menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Personel UAI membuat penilaian yang seimbang atas segala hal relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

7. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by laws and regulations or court decisions or verdict.
8. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
9. Willing to continuously improve their knowledge, skills, and professional abilities.

INDEPENDENCE OF INTERNAL AUDIT UNIT

All internal auditors consistently perform their oversight function independently and objectively to ensure the effectiveness of internal controls and risk management, as well as the Company's compliance with all applicable regulations. In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit maintains its independence by implementing operational authority restrictions so that internal auditors are not involved in activities subject to audit.

All internal auditors are required to adhere to a professional code of ethics that serves as a guideline for professional conduct in carrying out their duties. They are also required to submit a declaration of independence to avoid conflicts of interest and ensure objectivity of assessments. The application of these principles affirms the Internal Audit Unit's position as the third line of defense within the Three Lines of Defense framework, enabling it to provide credible, objective, and accountable oversight.

INTERNAL AUDITOR CODE OF ETHICS

In carrying out their duties, all UAI personnel of the Company are required to adhere to the code of ethics for the internal auditor profession as outlined below:

1. **Integrity**
In carrying out their duties, all personnel of the Internal Audit Unit highly uphold honesty, diligence, and full responsibility.
2. **Objectivity**
All personnel of the Internal Audit Unit demonstrate the highest level of professional objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activities or processes being examined. Internal Audit Unit personnel make balanced assessments of all relevant aspects and are not affected by personal interests or other parties in giving their considerations.



3. Kerahasiaan

Seluruh personel UAI menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin, kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Seluruh personel UAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit internal.

3. Confidentiality

All personnel of the Internal Audit Unit respect the value and ownership of the information they received and do not disclose information without permission, unless there are mandatory under the provisions or professional obligations.

4. Competence

All personnel of the Internal Audit Unit have dedicated their required knowledge, skills, and experience that are required in carrying out the internal audits activity.

RAPAT UNIT AUDIT INTERNAL

Kebijakan Rapat

UAI memiliki wewenang untuk mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal yang merujuk pada Pasal 8 POJK 56/2015. Pelaksanaan rapat secara berkala maupun insidental menjadi sarana strategis untuk menjaga koordinasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung penerapan GCG yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *Three Lines of Defense*.

Frekuensi Rapat

Pada tahun 2025, UAI telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat reguler dengan Komite Audit dan 12 (dua belas) kali rapat bulanan bersama Direksi dengan agenda utama meliputi:

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Meeting Policy

The Internal Audit Unit (UAI) has the authority to hold regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, as stipulated in the Internal Audit Charter, which refers to Article 8 of POJK 56/2015. Holding regular and ad hoc meetings serves as a strategic tool to maintain coordination, improve oversight effectiveness, and ensure that decisions taken support the implementation of GCG that is transparent, accountable, and in accordance with the Three Lines of Defense principles.

Meeting Frequency

In 2025, UAI held 3 (three) regular meetings with the Audit Committee and 12 (twelve) monthly meetings with the Board of Directors with the main agenda including:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Januari 2025	Monthly Review (Activities & Plans) January 2025
2.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Update Aktivitas Audit Internal Q4 2024 dan Rencana Audit Tahunan 2025	Q4 2024 Internal Audit Activity Update and 2025 Annual Audit Plan
3.	25 Februari 2025 February 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & rencana) Februari 2025	Monthly Review (Activities & Plans) February 2025
4.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Maret 2025	Monthly Review (Activities & Plans) March 2025
5.	25 April 2025 April 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) April 2025	Monthly Review (Activities & Plans) April 2025
6.	26 Mei 2025 May 26, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Mei 2025	Monthly Review (Activities & Plans) May 2025
7.	30 Juni 2025 June 30, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Juni 2025	Monthly Review (Activities & Plans) June 2025
8.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Update Aktivitas Audit Internal Q2 2025	Internal Audit Activity Update Q2 2025
9.	31 Juli 2025 July 31, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Juli 2025	Monthly Review (Activities & Plans) July 2025
10.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Agustus 2025	Monthly Review (Activities & Plans) August 2025
11.	30 September 2025 September 30, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) September 2025	Monthly Review (Activities & Plans) September 2025



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
12.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Inisiatif Rencana Bisnis 2026 dari Divisi terkait	2026 Business Plan Initiatives from related Divisions
13.	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Update Aktivitas Audit Internal Q3 2025	Internal Audit Activity Update Q3 2025
14.	21 November 2025 November 21, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) November 2025	Monthly Review (Activities & Plans) November 2025
15.	31 Desember 2025 December 31, 2025	Tinjauan Bulanan (Kegiatan & Rencana) Desember 2025	Monthly Review (Activities & Plans) December

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, UAI telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis yang bertujuan untuk memperkuat kerangka pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan Perseroan, antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan;
2. Mengajukan usulan dan memintakan persetujuan perencanaan audit tahunan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
3. Pengembangan metodologi audit berdasarkan Global;
4. Internal Audit Standard dan Peraturan OJK;
5. Melaksanakan reguler audit yang mencakup audit Kantor Cabang dan unit kerja Kantor Pusat, serta *mandatory audit* dari OJK;
6. Melaksanakan *continuous audit* dan *monitoring*;
7. Menerbitkan laporan hasil audit internal;
8. Monitoring tindak lanjut hasil audit internal;
9. Mengembangkan kompetensi dan keahlian auditor melalui pelatihan berkelanjutan.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT ACTIVITIES IN 2025

Throughout 2025, the IAU has implemented various strategic activities aimed at strengthening the Company's internal control, risk management, and compliance framework, including:

1. Preparation of the Annual Audit Plan;
2. Submitting proposals and requesting approval of the annual audit plan to the President Director and the Audit Committee.
3. Developing an audit methodology based on global standards;
4. Internal Audit Standards and OJK Regulations;
5. Conducting regular audits, including audits of branch offices and head office work units, as well as mandatory audits issued by the OJK;
6. Conducting continuous audits and monitoring;
7. Publishing internal audit reports;
8. Monitoring follow-up actions on internal audit results;
9. Developing auditor competency and expertise through ongoing training.



Audit Eksternal

External Audit

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Perseroan menempatkan audit eksternal sebagai salah satu mekanisme penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan. Audit eksternal dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan memiliki reputasi profesional di bidang jasa keuangan. Fungsi audit ini mencakup pemeriksaan menyeluruh atas laporan keuangan Perseroan, evaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta penilaian atas efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

Audit eksternal memberikan opini independen yang menjadi dasar kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan Perseroan. Selain itu, hasil audit eksternal digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan UAI untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pengawasan risiko, dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Pelaksanaan audit eksternal secara periodik ini mendukung Perseroan dalam memenuhi ketentuan regulator, termasuk peraturan OJK, serta memperkuat posisi Perseroan sebagai lembaga pembiayaan yang taat pada praktik GCG.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Perseroan melaksanakan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023"). Penunjukan KAP dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dengan memperhatikan prinsip independensi, kompetensi profesional, reputasi, pengalaman di sektor pembiayaan, serta kepatuhan terhadap standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses seleksi meliputi evaluasi kelayakan calon KAP, termasuk pengalaman audit sebelumnya, kualifikasi tim audit, serta kemampuan menangani laporan keuangan Perseroan secara menyeluruh. Setelah proses evaluasi selesai, Dewan Komisaris menetapkan KAP melalui keputusan resmi dan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The Company considers external audits to be a crucial mechanism for ensuring transparency, accountability, and reliability of its financial reports. External audits are conducted by an independent Public Accounting Firm (KAP) with a professional reputation in the financial services sector. This audit function includes a comprehensive examination of the Company's financial statements, an evaluation of compliance with applicable accounting standards, and an assessment of the effectiveness of implemented internal controls.

External audits provide an independent opinion that forms the basis for stakeholder confidence in the Company's financial statements. Furthermore, external audit results are used as evaluation material by the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Internal Audit Unit (IAU) to improve governance quality, strengthen risk oversight, and uphold the principles of transparency and accountability.

Periodic external audits support the Company's compliance with regulatory requirements, including OJK regulations, and strengthen its position as a financing institution that adheres to GCG practices.

MECHANISM FOR APPOINTING PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) in accordance with OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities ("POJK 9/2023"). The appointment of the KAP is made by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee, taking into account the principles of independence, professional competence, reputation, experience in the financing sector, and compliance with audit standards and applicable laws and regulations.

The selection process includes an evaluation of the suitability of the prospective KAP, including prior audit experience, audit team qualifications, and their ability to comprehensively handle the Company's financial statements. Upon completion of the evaluation process, the Board of Commissioners appoints the KAP through an official decree and submits notification to the OJK in accordance with applicable regulations.



Berdasarkan hasil proses seleksi yang transparan dan akuntabel, pemegang saham melalui RUPS Tahunan tanggal 23 April 2025 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) beserta akuntan publik yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penetapan ini dilakukan oleh Pemegang Saham atas dasar pertimbangan Dewan Komisaris yang merujuk pada rekomendasi Komite Audit dengan tetap memperhatikan kriteria independensi, kompetensi profesional, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan audit mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hasil audit bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan manajemen serta pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus memastikan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi POJK dan prinsip GCG.

INFORMASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Informasi Kantor Akuntan Publik mengenai profil Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan jasa audit dan non-audit berikut opini audit dan fee audit untuk tahun buku 2025 dan tahun buku sebelumnya telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Informasi Akuntan Publik.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas, Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan hanya diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tanpa terlibat dalam penyediaan jasa konsultasi atau layanan tambahan lainnya. Pembatasan ini memastikan auditor dapat bekerja secara profesional dan bebas dari potensi benturan kepentingan, sehingga hasil audit dapat dijadikan dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pengambilan keputusan manajemen dan pengawasan Dewan Komisaris.

Based on a transparent and accountable selection process, the shareholders, through the Annual GMS held on April 23, 2025, appointed the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (a member of BDO International Limited) and a public accountant appointed by the firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025. This appointment was made by the Shareholders based on the Board of Commissioners' considerations, which referred to the recommendations of the Audit Committee, while still considering the criteria of independence, professional competence, and compliance with applicable regulations.

The audit was conducted in accordance with the Public Accounting Professional Standards and the previously established work agreement and audit scope, ensuring that the audit results are objective, accurate, and accountable. This supports management decision-making and the Board of Commissioners' oversight, while ensuring the Company's compliance with POJK regulations and GCG principles.

INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Public Accounting Firm information regarding the profile of the Public Accounting Firm, the name of the Public Accountant appointed to perform audit and non-audit services, including audit opinions and audit fees for the 2025 financial year and the previous financial year has been presented in the Profile Chapter, Sub-Chapter Public Accountant Information.

OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM

To maintain independence and objectivity, the Public Accounting Firm conducting the audit of the Company's Financial Statements is mandated to examine only the financial statements without engaging in consulting or other additional services. This limitation ensures that the auditor can work professionally and free from potential conflicts of interest, so that the audit results can serve as an accurate and accountable basis for management decision-making and oversight by the Board of Commissioners.



KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Perseroan memastikan koordinasi yang efektif antara auditor eksternal dan Komite Audit guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam mekanisme ini, auditor eksternal secara berkala melaporkan temuan audit, opini, dan rekomendasi perbaikan kepada Komite Audit baik melalui rapat reguler maupun rapat khusus yang dijadwalkan sesuai kebutuhan. Komite Audit kemudian menelaah hasil audit, menilai risiko material, dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris serta Direksi mengenai langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Koordinasi ini juga mencakup pembahasan rencana audit tahunan, ruang lingkup audit, dan isu signifikan yang muncul selama proses audit. Dengan mekanisme tersebut, Perseroan memastikan bahwa fungsi pengawasan eksternal dapat berjalan secara objektif dan independen, sementara Komite Audit memiliki akses penuh terhadap informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, selaras dengan ketentuan POJK dan praktik terbaik tata kelola perusahaan.

COORDINATION OF EXTERNAL AUDITORS AND AUDIT COMMITTEE

The Company ensures effective coordination between the external auditor and the Audit Committee to support the implementation of its oversight function and good corporate governance. Under this mechanism, the external auditor periodically reports audit findings, opinions, and recommendations for improvement to the Audit Committee through both regular meetings and special meetings scheduled as needed. The Audit Committee then reviews the audit results, assesses material risks, and provides input to the Board of Commissioners and Board of Directors regarding necessary mitigation measures.

This coordination also includes discussions of the annual audit plan, audit scope, and significant issues arising during the audit process. Through this mechanism, the Company ensures that the external oversight function can operate objectively and independently, while the Audit Committee has full access to the information necessary to evaluate the effectiveness of internal controls and compliance with applicable regulations, in line with the provisions of OJK regulations and best corporate governance practices.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI PERSEROAN

Perseroan menempatkan sistem pengendalian internal (SPI) sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan SPI yang diterapkan sejalan dengan strategi manajemen risiko, dengan mengadopsi pilar sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan terintegrasi ke seluruh lini organisasi.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE COMPANY

The Company places an internal control system (ICS) as the primary foundation for conducting effective and efficient operations in accordance with applicable laws and regulations. The ICS policy is implemented in line with the risk management strategy, adopting a comprehensive and integrated internal control system across all organizational lines.



Perseroan menerapkan prinsip Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai landasan utama dalam pengelolaan risiko, yaitu:

1. Pilar pertama adalah Manajemen Operasional yang bertindak sebagai pemilik dan pengelola risiko serta pengendalian, termasuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan strategis Perseroan.
2. Pilar kedua adalah Fungsi Pemantauan Risiko yang dijalankan oleh unit manajemen risiko dan kepatuhan yang bertugas memastikan bahwa risiko dikelola secara tepat dan sesuai dengan kebijakan internal.
3. Pilar ketiga adalah Fungsi Internal Audit yang melakukan penilaian independen terhadap efektivitas pengelolaan dan pengendalian risiko, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

Kerangka SPI di Perseroan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Kepatuhan, manajemen, dan seluruh karyawan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas namun tetap saling terhubung dan mendukung. Struktur ini menjamin koordinasi yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas di seluruh aktivitas operasional.

Dengan penerapan SPI yang terintegrasi dan berbasis *Three Lines of Defense*, Perseroan mampu mengelola risiko secara proaktif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang kredibel serta berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat penerapan GCG, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi investor.

LINGKUP PENGENDALIAN INTERNAL DI PERSEROAN

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif dengan dasar prinsip *Three Lines of Defense* yang menjadi fondasi dalam memastikan pengelolaan risiko dan operasional yang efektif. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengendalian operasional dan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur internal, regulasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Lingkup pengendalian internal mencakup seluruh aktivitas Perseroan, dengan fokus pada identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan. Mekanisme ini juga berperan dalam mendeteksi penyimpangan, termasuk tindakan kecurangan (*fraud*) sehingga setiap risiko dapat ditangani secara tepat dan proaktif.

The Company implements the Three Lines of Defense principle as the primary foundation for risk management, namely:

1. The first pillar is Operational Management, which acts as the owner and manager of risk and control, including being responsible for implementing operational activities to achieve the Company's strategic objectives.
2. The second pillar is the Risk Monitoring Function, carried out by the risk management and compliance unit, which is tasked with ensuring that risks are managed appropriately and in accordance with internal policies.
3. The third pillar is the Internal Audit Function, which conducts independent assessments of the effectiveness of risk management and control, ensuring that the system operates in accordance with established procedures and standards.

The Company's ICS framework involves the Board of Directors, the Board of Commissioners, Compliance Officer, management, and all employees, with a clear separation of duties and responsibilities that remain interconnected and supportive. This structure ensures effective coordination, transparency in decision-making, and accountability across all operational activities.

With the implementation of an integrated Internal Control System (ICS) based on the Three Lines of Defense, the Company is able to proactively manage risks, ensure regulatory compliance, and support credible and sustainable decision-making. This simultaneously strengthens GCG implementation, enhances stakeholder trust, and creates long-term value for investors.

SCOPE OF INTERNAL CONTROL IN THE COMPANY

The Company implements a comprehensive internal control system based on the Three Lines of Defense principle, which serves as the foundation for ensuring effective risk management and operations. This system is designed to enhance operational and financial controls and ensure compliance with internal procedures, regulations, and applicable laws.

The scope of internal control encompasses all Company activities, with a focus on identifying, monitoring, and mitigating risks that have the potential to cause significant losses. This mechanism also plays a role in detecting irregularities, including fraud, so that each risk can be addressed appropriately and proactively.



Selain itu, pengendalian internal mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjaga integritas dan keamanan aset Perseroan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi investor.

Furthermore, internal control supports the implementation of the prudent principle and enhances overall organizational effectiveness. Thus, this system not only maintains the integrity and security of the Company's assets but also strengthens stakeholder trust and creates sustainable value for investors.

PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN

OPERATIONAL AND FINANCIAL CONTROL

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan terintegrasi dengan strategi manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku, keandalan laporan keuangan, serta menjamin efektivitas operasional. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan risiko, mencegah penyimpangan, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan dan *prudent*.

The Company implements a comprehensive internal control system integrated with a risk management strategy to ensure compliance with OJK regulations and applicable laws, the reliability of financial reports, and operational effectiveness. This system is designed to minimize risk, prevent irregularities, and support the achievement of business objectives in a sustainable and prudent manner.

Dalam aspek keuangan, pengendalian internal difokuskan pada pencatatan akuntansi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, sekaligus memastikan penyampaian laporan keuangan berkala kepada regulator sesuai ketentuan POJK dan standar akuntansi yang berlaku. Untuk memastikan hal ini, Perseroan menerapkan mekanisme *review* internal dan verifikasi berlapis, termasuk pengawasan oleh Unit Audit Internal (UAI) guna menjamin integritas data keuangan. Selain itu, laporan keuangan tahunan Perseroan juga diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk melalui prosedur seleksi yang transparan sehingga dapat memberikan assurance tambahan terhadap laporan keuangan Perseroan. Pendekatan ini mendukung transparansi, kepatuhan terhadap regulasi OJK, serta memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan atas integritas dan kualitas pelaporan keuangan Perseroan.

In the financial aspect, internal control focuses on accurate, complete, and timely accounting records, while ensuring the submission of periodic financial reports to regulators in accordance with OJK regulations and applicable accounting standards. To ensure this, the Company implements a multi-layered internal review and verification mechanism, including oversight by the Internal Audit Unit (IAU) to ensure the integrity of financial data. Furthermore, the Company's annual financial statements are audited by an external auditor appointed through a transparent selection process, providing additional assurance of the Company's financial statements. This approach supports transparency, compliance with OJK regulations, and provides stakeholders with confidence in the integrity and quality of the Company's financial reporting.

Dalam aspek operasional, aspek pengendalian internal mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab antar-organ secara jelas, penerapan prosedur operasional standar, serta pemantauan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas bisnis. Perseroan memastikan bahwa proses operasional berjalan efisien, sesuai kebijakan internal, dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, mekanisme ini juga memfasilitasi identifikasi risiko potensial, mitigasi risiko operasional, serta pencegahan praktik *fraud*, sehingga operasional Perseroan tetap terkendali dan mendukung kesinambungan bisnis.

In the operational aspect, internal control aspects include a clear separation of duties and responsibilities between organs, the implementation of standard operating procedures, and continuous monitoring of all business activities. The Company ensures that operational processes run efficiently, comply with internal policies, and align with applicable regulations. Furthermore, this mechanism facilitates the identification of potential risks, operational risk mitigation, and fraud prevention, ensuring the Company's operations remain under control and support business continuity.



Dengan menerapkan struktur pengendalian internal yang menyeluruh pada aspek keuangan dan operasional, Perseroan memastikan kegiatan usaha pembiayaan senantiasa berjalan secara efisien, laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan akurat, serta risiko operasional dikelola secara proaktif, mendukung penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan ketentuan POJK dan prinsip *prudent financial management*.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Perseroan menempatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pilar utama dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya regulasi OJK yang mengatur Industri Jasa Keuangan Non-Bank, peraturan pasar modal, perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan regulasi lain yang relevan.

Untuk memastikan penerapan kepatuhan yang konsisten dan sistematis, Perseroan mengoperasikan fungsi kepatuhan yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan risiko ketidakpatuhan secara berkala. Fungsi ini berkoordinasi erat dengan Unit Audit Internal (UAI), Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan manajemen operasional untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan standar praktik terbaik industri.

Selama tahun 2025, Perseroan aktif mengikuti berbagai sosialisasi, seminar, dan *workshop* yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi industri sebagai upaya memperkuat pemahaman terhadap kebijakan OJK dan memastikan implementasi regulasi berjalan optimal. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek pengawasan regulasi, praktik kepatuhan, dan perkembangan terbaru dalam Industri Jasa Keuangan Non-Bank.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten melakukan peninjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan seluruh proses bisnis, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip GCG dan peraturan yang berlaku. Peninjauan ini melibatkan koordinasi antara manajemen operasional, Unit Manajemen Risiko, Unit Audit Internal, dan Komite Audit, sesuai dengan implementasi kerangka *Three Lines of Defense*.

By implementing a comprehensive internal control structure across financial and operational aspects, the Company ensures that its financing business activities continue to run efficiently, financial reports are submitted timely and accurately, and operational risks are proactively managed, supporting the implementation of transparent, accountable, and sustainable governance, in line with OJK regulations and prudent financial management principles.

COMPLIANCE WITH LEGISLATION

The Company places compliance with laws and regulations as a key pillar of good corporate governance. All of the Company's operational activities are carried out in accordance with applicable regulations, particularly the Financial Services Authority (OJK) regulations governing the Non-Bank Financial Services Industry, capital market regulations, taxation, employment, consumer protection, and other relevant regulations.

To ensure consistent and systematic compliance implementation, the Company operates a compliance function tasked with regularly monitoring, evaluating, and reporting non-compliance risks. This function coordinates closely with the Internal Audit Unit (IAU), the Risk Management Committee, the Risk Oversight Committee, and operational management to ensure all business activities comply with applicable regulations and industry best practice standards.

Throughout 2025, the Company actively participated in various outreach programs, seminars, and workshops organized by regulators and industry associations to strengthen understanding of OJK policies and ensure optimal regulatory implementation. These activities covered various aspects of regulatory oversight, compliance practices, and the latest developments in the Non-Bank Financial Services Industry.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS IN 2025

Throughout 2025, the Company consistently reviewed the effectiveness of its internal control system to ensure that all business processes, risk management, and financial reporting were carried out in accordance with GCG principles and applicable regulations. This review involved coordination between operational management, the Risk Management Unit, the Internal Audit Unit, and the Audit Committee, in accordance with the implementation of the Three Lines of Defense framework.



Proses tinjauan mencakup evaluasi pengendalian keuangan, termasuk pencatatan akuntansi dan ketepatan waktu penyampaian laporan berkala ke regulator, serta pengendalian operasional yang memastikan efektivitas prosedur internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan mitigasi risiko operasional. Dalam hal ini, Unit Audit Internal berperan melakukan assessment independen dan memberikan rekomendasi perbaikan, sedangkan manajemen bertanggung jawab menindaklanjuti temuan untuk memperkuat sistem pengendalian.

Hasil tinjauan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal Perseroan berfungsi secara memadai dan efektif untuk mendukung keandalan laporan keuangan, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan OJK, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selama periode pelaporan tidak ditemukan adanya kelemahan material yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan atau keberlangsungan operasional Perseroan.

Dengan demikian, Perseroan meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan selama 2025 telah berjalan secara efektif, andal, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta praktik terbaik industri pembiayaan, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan akan pengelolaan risiko dan tata kelola yang profesional.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa SPI yang diterapkan telah memadai dan berfungsi secara efektif untuk mendorong pengelolaan risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, serta mendukung pencapaian tujuan operasional dan keuangan Perseroan. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa kerangka SPI Perseroan telah memadai, andal, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta praktik terbaik industri pembiayaan, sehingga mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

The review process included an evaluation of financial controls, including accounting records and the timeliness of periodic reports submitted to regulators, as well as operational controls that ensure the effectiveness of internal procedures, regulatory compliance, and operational risk mitigation. The Internal Audit Unit played a role in conducting independent assessments and providing recommendations for improvements, while management was responsible for following up on findings to strengthen the control system.

The results of the review throughout 2025 indicated that the Company's internal control system functioned adequately and effectively to support the reliability of financial reports, encourage compliance with OJK regulations, and improve operational efficiency. During the reporting period, no material weaknesses were identified that could impact the integrity of the financial reports or the continuity of the Company's operations.

Thus, the Company believes that the internal control system implemented during 2025 has been running effectively, reliably, and in line with the principle of prudence and best practices of the financing industry, providing stakeholders with confidence in professional risk management and governance.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on the results of a comprehensive evaluation of the internal control system conducted throughout 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company stated that the implemented Internal Control System (SPI) is adequate and functions effectively to encourage risk management, ensure compliance with OJK regulations, and support the achievement of the Company's operational and financial objectives. This statement reflects the belief that the Company's SPI framework is adequate, reliable, and in line with prudential principles and best practices in the financing industry, thus supporting transparent, accountable, and sustainable governance.



Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan di Perseroan diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi industri pembiayaan. Fungsi ini memegang peran penting dalam mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko kepatuhan yang berpotensi berdampak terhadap kelangsungan operasional dan reputasi Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Fungsi Kepatuhan menjalankan pendekatan preventif melalui berbagai langkah pengendalian, antara lain penerapan *Compliance Gap Analysis* untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan regulator dengan kebijakan internal, serta pelaksanaan *Quality Assurance* atas tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, Perseroan secara proaktif meminimalkan potensi ketidakpatuhan sejak dini, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Fungsi Kepatuhan juga berperan sebagai lini kedua dalam kerangka *Three Lines of Defense*, bekerja secara sinergis untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Dengan penerapan fungsi Kepatuhan yang terstruktur dan berkesinambungan, Perseroan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat praktik GCG, menjaga integritas organisasi, serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan secara profesional dan bertanggung jawab.

DASAR HUKUM

Perseroan telah mengangkat Pejabat Kepatuhan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penguatan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK 48/2024. Penunjukan ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dijalankan secara konsisten dalam kerangka hukum yang berlaku serta selaras dengan prinsip GCG. Melalui peran Pejabat Kepatuhan, Perseroan secara proaktif mengawasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan lainnya, sekaligus memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

The Company's Compliance Function is consistently implemented to ensure that all policies, systems, procedures, and business activities consistently comply with OJK regulations and applicable laws and regulations for the financing industry. This function plays a critical role in identifying, monitoring, and mitigating compliance risks that could potentially impact the Company's operational continuity and reputation.

In its implementation, the Compliance Function employs a preventative approach through various control measures, including the implementation of Compliance Gap Analysis to identify gaps between regulatory requirements and internal policies, and the implementation of Quality Assurance on the level of compliance with applicable regulations and procedures. Through these mechanisms, the Company proactively minimizes potential non-compliance early on, while ensuring that all business activities are conducted based on the prudential principle.

The Compliance Function also serves as the second line of defense within the Three Lines of Defense framework, working synergistically to ensure the effectiveness of internal control and risk management systems. With the structured and continuous implementation of the Compliance Function, the Company not only meets regulatory obligations but also strengthens GCG practices, maintains organizational integrity, and supports the Company's business sustainability in a professional and responsible manner.

LEGAL BASIS

The Company has appointed a Compliance Officer responsible for implementing and strengthening the compliance function in accordance with POJK 48/2024. This appointment demonstrates the Company's commitment to ensuring that all business activities are carried out consistently within the applicable legal framework and in line with GCG principles. Through the role of the Compliance Officer, the Company proactively monitors the level of compliance with OJK regulations and other laws and regulations, while ensuring the application of the principle of prudence in all business decisions.



PRINSIP KEPATUHAN

Prinsip Kepatuhan yang diterapkan oleh Perseroan merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, sistem, dan langkah-langkah terstruktur yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Perseroan, termasuk penyusunan kebijakan internal, penerapan prosedur operasional, serta pelaksanaan kegiatan usaha, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas pengawasan lainnya yang berwenang.

Penerapan prinsip kepatuhan juga mencakup pemenuhan seluruh komitmen yang telah disampaikan Perseroan kepada regulator baik dalam bentuk kewajiban pelaporan, tindak lanjut hasil pengawasan maupun implementasi ketentuan regulasi baru. Melalui penerapan prinsip kepatuhan secara konsisten dan menyeluruh, Perseroan berupaya meminimalkan risiko ketidakpatuhan, menjaga integritas operasional, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola dan keberlanjutan usaha Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sesuai dengan ketentuan POJK 48/2024. Penempatan Fungsi Kepatuhan secara independen ini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas pengawasan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan agar senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan di Perseroan dirancang untuk memberikan kewenangan dan akses yang memadai kepada manajemen puncak dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian risiko kepatuhan secara berkelanjutan. Melalui struktur tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, menyampaikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut atas temuan kepatuhan dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

COMPLIANCE PRINCIPLES

The Compliance Principles implemented by the Company are a fundamental foundation for conducting responsible and sustainable business activities. These principles are implemented through a series of policies, systems, and structured measures aimed at ensuring that all Company activities, including the development of internal policies, the implementation of operational procedures, and the conduct of business activities, comply with applicable laws and regulations, particularly those stipulated by the Financial Services Authority (OJK) and other competent supervisory authorities.

The implementation of compliance principles also encompasses the fulfillment of all commitments the Company has made to regulators, including reporting obligations, follow-up on supervisory results, and the implementation of new regulatory provisions. Through the consistent and comprehensive application of compliance principles, the Company strives to minimize the risk of non-compliance, maintain operational integrity, and strengthen stakeholder trust in the Company's governance and business sustainability.

COMPLIANCE FUNCTION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Company's Compliance Function is carried out by the Compliance Work Unit, led by the Head of the Compliance Work Unit and directly reporting to the President Director, in accordance with POJK 48/2024. This independent Compliance Function is intended to ensure effective compliance oversight of all Company policies, systems, procedures, and business activities, ensuring they remain aligned with applicable laws and regulations.

The Company's Compliance Function organizational structure is designed to provide adequate authority and access to top management for ongoing monitoring, evaluation, and control of compliance risks. Through this structure, the Compliance Work Unit plays an active role in identifying potential violations, submitting recommendations for improvement, and ensuring timely and effective follow-up on compliance findings.



Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Perseroan per 31 Desember 2025 disajikan pada bagan berikut:

The Company's Compliance Function organizational structure as of December 31, 2025, is presented in the following chart:



DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN, SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA

Perseroan menunjuk seorang Direktur yang secara khusus membawahkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan dan GCG. Per 31 Desember 2025, fungsi kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Bapak Peter Halim yang merupakan Direktur Utama sekaligus selaku Direktur Kepatuhan.

Perseroan memastikan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan antara lain meliputi:

1. Memastikan tingkat kepatuhan Perseroan yang tinggi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan, dalam menerapkan *Compliance Gap analysis*, analisis dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
2. Mengkaji setiap usulan dari Pejabat Kepatuhan terkait kepatuhan.
3. Memastikan setiap manual, kebijakan dan prosedur dilakukan pengkinian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
5. Memastikan pengelolaan terhadap profil risiko kepatuhan berjalan dengan baik.

DIRECTOR IN CHARGE OF COMPLIANCE FUNCTION, AND HIS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Company has appointed a Director specifically responsible for and overseeing the implementation of the compliance function, in accordance with the Financial Services Authority Regulations concerning the implementation of compliance and GCG functions. As of December 31, 2025, the compliance function will be under the responsibility of Mr. Peter Halim, who serves as the President Director and Director of Compliance.

The Company ensures that the Director responsible for the compliance function meets the integrity, competency, and qualification requirements required by applicable laws and regulations. The duties and responsibilities of the Director responsible for the compliance function include:

1. Ensuring the Company's high level of compliance with applicable laws and regulations, assisted by the Compliance Function Officer and Compliance Work Unit, in implementing Compliance Gap analysis, analysis of the impact on the Company's operational activities.
2. Reviewing every proposal from the Compliance Officer regarding compliance.
3. Ensuring that every manual, policy and procedure is updated to the applicable laws and regulations.
4. Monitoring compliance with the obligation to submit reports to regulators.
5. Ensuring that the management of the compliance risk profile is running well.



6. Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Perseroan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang diangkat sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posisi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dijabat oleh Head of Compliance & Corporate Secretary, yang pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

Profil lengkap Kepala Satuan Kerja Kepatuhan disajikan pada Bab Profil Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Perseroan termasuk memeriksa hal-hal yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan perubahan dalam peraturan dan ketentuan terkait bisnis dan aturan pengawasan serta memberi nasihat sehubungan pemenuhan kepatuhan;
2. Mengelola program kepatuhan Perseroan membangun hubungan dan sistem kerja sama dengan otoritas pengawas; dan
3. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini termasuk menyesuaikan operasi dan strategi bisnis dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS TERHADAP FUNGSI KEPATUHAN

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan aktif terhadap penerapan fungsi kepatuhan Perseroan guna memastikan seluruh kegiatan usaha Perseroan senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, serta prinsip GCG.

Pengawasan tersebut dilakukan antara lain melalui evaluasi atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi

6. Reviewing the draft internal provisions to be issued to ensure that the internal provisions are in accordance with applicable provisions.

PROFILE OF THE HEAD OF COMPLIANCE WORK UNIT

The Company's Compliance function is led by the Head of the Compliance Unit, appointed in accordance with OJK regulations and applicable laws and regulations. The Head of the Compliance Unit is held by the Head of Compliance & Corporate Secretary, whose appointment is determined by a Circular Decree of the Board of Commissioners.

The complete profile of the Head of the Compliance Unit is provided in the Corporate Secretary Profile section of this Annual Report.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Work Unit has the following duties and responsibilities:

1. Ensuring adherence to all applicable laws and regulations within the Company, including the review of matters requiring adjustment in accordance with changes in business-related regulations and supervisory provisions, as well as providing counsel regarding compliance fulfillment;
2. Managing the Company's compliance program by building relationships and cooperation systems with supervisory authorities; and
3. Developing and implementing policies, procedures, and best practices that ensure compliance with applicable regulations. This includes aligning business operations and strategies with applicable legal provisions.

ACTIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE COMPLIANCE FUNCTION

The Board of Commissioners actively supervises the implementation of the Company's compliance function to ensure that all of the Company's business activities consistently comply with applicable laws and regulations, internal policies, and GCG principles.

This oversight is carried out through, among other things, evaluating the effectiveness of the compliance function's implementation, monitoring follow-up on findings and



yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, serta penelaahan atas laporan berkala mengenai tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan OJK dan regulator terkait lainnya.

Dalam rangka memastikan independensi dan efektivitas fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan strategis serta memastikan kecukupan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kewenangan Satuan Kerja Kepatuhan.

Melalui pengawasan aktif tersebut, Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan yang kuat dan berkelanjutan di seluruh tingkatan organisasi, sebagai bagian integral dari pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola Perseroan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2025

Dalam rangka memperkuat penerapan fungsi kepatuhan serta memastikan efektivitas peran pengawasan, Perseroan secara berkelanjutan mendorong peningkatan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan melalui penyelenggaraan dan partisipasi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Program pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Satuan Kerja Kepatuhan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK dan regulator terkait lainnya, serta penerapan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh regulator, asosiasi industri, maupun lembaga pelatihan profesional, guna memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan secara efektif, independen, dan selaras dengan praktik terbaik di industri.

recommendations submitted by the Compliance Work Unit, and reviewing periodic reports regarding the Company's level of compliance with OJK regulations and other relevant regulators.

To ensure the independence and effectiveness of the compliance function, the Board of Commissioners also provides strategic direction and ensures the adequacy of the Compliance Work Unit's organizational structure, human resources, and authority.

Through this active oversight, the Board of Commissioners is committed to supporting the creation of a strong and sustainable compliance culture at all levels of the organization, as an integral part of risk management and the implementation of corporate governance.

COMPLIANCE WORK UNIT TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT IN 2025

To strengthen the implementation of the compliance function and ensure the effectiveness of its supervisory role, the Company continuously encourages the improvement of the Compliance Work Unit's competency through the implementation and participation of various structured and ongoing education and training programs.

These training programs are designed to enhance the Compliance Work Unit's understanding and capabilities regarding developments in laws and regulations, particularly those issued by the OJK and other relevant regulators, as well as the application of GCG principles.

Throughout 2025, the Compliance Work Unit participated in various education and training activities organized by regulators, industry associations, and professional training institutions to ensure the effective, independent implementation of the compliance function and aligned with industry best practices.



Berikut disajikan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2025:

The following information presents information regarding the education and training programs attended by the Compliance Work Unit during 2025:

No.	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
1.	<i>Compliance Training – (Onboarding Employees)</i>	5 Mei 2025 May 5, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
2.	<i>Compliance Training di Kantor Cabang Bogor</i> Compliance Training at Bogor Branch Office	9 Juni 2025 June 9, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
3.	<i>Compliance Training – (Onboarding Employees)</i>	10 Juli 2025 July 10, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
4.	<i>Compliance pada Event Bulan Kepatuhan</i> Compliance at the Compliance Month Event	18 September 2025 September 18, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Internal Compliance Dept.
5.	<i>Compliance Training – (Onboarding Employees)</i>	13 Oktober 2025 October 13, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
6.	<i>Compliance Training – (Onboarding Employees)</i>	8 Desember 2025 December 8, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
7.	<i>Compliance for Executive Management</i>	10 Desember 2025 December 10, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Hukum Online
8.	<i>Compliance e-learning</i>	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan berbagai program kerja secara terencana dan berkesinambungan guna memastikan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program kerja Satuan Kerja Kepatuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan realisasi pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan melalui penerapan *Compliance Gap Analysis*;
2. Menindaklanjuti dokumen/bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti pemenuhan kepatuhan;
3. Memastikan kegiatan operasional telah berjalan selaras sesuai dengan kebijakan internal dan Peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE WORK UNIT WORK PROGRAM IN 2025

Throughout 2025, the Compliance Work Unit implemented various work programs in a planned and continuous manner to ensure the Company's compliance with applicable laws and regulations. The Compliance Work Unit's work programs implemented during 2025 include the following:

1. Identifying and realizing compliance with the provisions of the Laws and Regulations through the implementation of Compliance Gap Analysis;
2. Following up on documents/evidence that can be used as evidence of compliance;
3. Ensuring that operational activities are running in line with internal policies and Laws and Regulations.



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Risiko secara terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan serta prinsip GCG. Implementasi Sistem Manajemen Risiko dilakukan untuk memastikan seluruh risiko yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan, termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi, dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan secara memadai sesuai dengan profil risiko dan kapasitas Perseroan.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan profil risiko Perseroan, karakteristik kegiatan usaha, serta perkembangan kondisi internal dan eksternal, termasuk dinamika ekonomi, regulasi, dan industri pembiayaan. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan, prosedur, dan menentukan limit risiko yang disusun dengan mempertimbangkan karakteristik produk pembiayaan, kondisi pasar, serta dinamika lingkungan usaha dan regulasi. Proses manajemen risiko tersebut didukung oleh pengendalian internal serta mekanisme pelaporan risiko secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko, Perseroan menempatkan fungsi manajemen risiko secara independen dari unit operasional, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta sistem dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Melalui penerapan Sistem Manajemen Risiko, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen, serta memperkuat ketahanan Perseroan dalam menghadapi berbagai potensi risiko, guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Implementasi sistem Manajemen Risiko Perseroan dilaksanakan secara terukur dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan peraturan berikut ini:

1. POJK 42/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan penyempurnaan POJK No. 44/

The Company implements an integrated and sustainable Risk Management System as an integral part of its business operations, in accordance with the OJK Regulations concerning the application of risk management for financing companies and GCG principles. The Risk Management System is implemented to ensure that all risks inherent in financing business activities, including credit risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk, strategic risk, and reputational risk, can be identified, measured, monitored, and adequately controlled in accordance with the Company's risk profile and capacity.

The Risk Management System is implemented by taking into account the Company's risk profile, business activity characteristics, and internal and external developments, including economic, regulatory, and financing industry dynamics. The Company consistently implements policies and procedures and determines risk limits, which are formulated taking into account the characteristics of financing products, market conditions, and the dynamics of the business and regulatory environment. This risk management process is supported by internal controls and a regular risk reporting mechanism to the Board of Directors and Board of Commissioners.

To ensure the effective implementation of the Risk Management System, the Company positions the risk management function independently from operational units, supported by competent human resources (HR) and adequate supporting systems and infrastructure.

Through the implementation of the Risk Management System, the Company is committed to maintaining business continuity, improving the quality of management decision-making, and strengthening the Company's resilience in facing various potential risks, in order to support healthy and sustainable business growth.

BASIS FOR IMPLEMENTING RISK MANAGEMENT

The Company's Risk Management system is implemented in a measured manner, guided by the following regulatory provisions:

1. OJK Regulation No. 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions,



POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang telah menggantikan Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KB FMF/III/2025 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT KB Finansia Multi Finance.

which is an improvement on POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.

2. Regulation of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48/PADK.06/2025 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, which replaces OJK Circular Letter No. 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.
3. Decree of the Board of Commissioners No. 007/KB FMF/III/2025 concerning the Risk Management Policy of PT KB Finansia Multi Finance.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memastikan penerapan Sistem Manajemen Risiko berjalan secara efektif, Perseroan membangun struktur tata kelola manajemen risiko yang disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas bisnis, dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan. Struktur tersebut dirancang selaras dengan ketentuan OJK dan prinsip GCG.

Perseroan menerapkan konsep *Three Lines of Defense* sebagai kerangka pengelolaan risiko yang mengatur pemisahan peran dan tanggung jawab antara fungsi bisnis dan operasional, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, serta fungsi pengendalian internal dan audit internal. Penerapan kerangka ini bertujuan untuk menjaga independensi fungsi pengelolaan risiko serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

UNIT PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di dalam Perseroan dilaksanakan secara *prudent*, terintegrasi, dan menyeluruh, dengan melibatkan peran aktif Direksi dalam pengelolaan serta pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris. Proses ini didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang memadai, termasuk kebijakan, prosedur, dan sistem yang selaras dengan kompleksitas dan skala usaha Perseroan.

Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko juga diperkuat oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman di bidang manajemen risiko sebagaimana diamanatkan oleh POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

To ensure the effective implementation of the Risk Management System, the Company has established a risk management governance structure tailored to the scale of the business, its complexity, and the level of risk inherent in its business activities. This structure is designed in accordance with OJK regulations and GCG principles.

The Company implements the Three Lines of Defense concept as a risk management framework that regulates the separation of roles and responsibilities between business and operational functions, risk management and compliance functions, and internal control and internal audit functions. This framework aims to maintain the independence of the risk management function and enhance the effectiveness of internal control.

RISK MANAGEMENT UNIT

Risk management within the Company is implemented in a prudent, integrated, and comprehensive manner, with the active involvement of the Board of Directors in management and effective oversight by the Board of Commissioners. This process is supported by an adequate risk management framework, including policies, procedures, and systems aligned with the complexity and scale of the Company's business.

Furthermore, the effectiveness of risk management implementation is also strengthened by the availability of human resources with the competence, expertise, and experience in risk management, as mandated by OJK Regulation No. 42 of 2024 concerning the Implementation



bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko secara terstruktur dan terintegrasi guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko di seluruh aspek kegiatan usaha. Kerangka kerja tersebut dirancang selaras dengan ketentuan OJK serta prinsip GCG, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan.

Kerangka kerja manajemen risiko Perseroan didasarkan pada 4 (empat) pilar utama sebagai berikut:

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioner

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran aktif dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di Perseroan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian arahan strategis, pengawasan berkelanjutan, penguatan budaya manajemen risiko, serta penetapan struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Selain itu, keduanya memastikan kecukupan sumber daya—baik dari sisi jumlah maupun kompetensi—agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan optimal di seluruh lini operasional.

The Board of Directors and the Board of Commissioners play an active role in ensuring the effectiveness of risk management implementation within the Company. This support is realized through providing strategic direction, ongoing oversight, strengthening a risk management culture, and establishing a clear organizational structure and division of responsibilities. Furthermore, both parties ensure the adequacy of resources—both in terms of quantity and competence—to ensure optimal risk management implementation across all operational lines.

Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko
Adequacy of Risk Management policies and procedures, and determination of Risk limits

Perseroan telah menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis. Kebijakan ini disesuaikan dengan jenis, kompleksitas usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta ketentuan otoritas terkait. Perseroan juga menetapkan limit risiko berdasarkan *risk appetite*, toleransi risiko (*risk tolerance*), dan strategi keseluruhan, dengan mempertimbangkan jenis/parameter yang diatur oleh otoritas, riwayat dan signifikansi risiko, serta rencana strategis Perseroan.

The Company has prepared risk management strategies, policies, and procedures that are in line with its vision, mission, and business strategy. This policy is adjusted to the type, complexity of the business, risk profile, level of risk to be taken, and provisions of the relevant authorities. The Company also sets risk limits based on risk appetite, risk tolerance, and overall strategy, taking into account the types/parameters regulated by the authorities, history and significance of risk, and the Company's strategic plan.

of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The Company implements a structured and integrated risk management framework to ensure effective risk management across all aspects of its business activities. This framework is designed in accordance with OJK regulations and GCG principles and serves as a reference for the ongoing process of risk identification, measurement, monitoring, and control.

The Company's risk management framework is based on four main pillars:

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko
Adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, and control of Risk, as well as the Risk Management information system.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko menjadi pilar utama dalam penerapan manajemen risiko Perseroan. Risiko diidentifikasi secara proaktif di seluruh aktivitas bisnis untuk menilai sumber, kemungkinan, serta dampaknya, dan dilanjutkan hingga tahap mitigasi sesuai karakteristik dan kompleksitas usaha. Untuk menunjang efektivitas proses tersebut, Perseroan menyediakan sistem informasi manajemen risiko yang andal dan selaras dengan kebutuhan operasional, sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.

The process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks is a key pillar in the Company's risk management implementation. Risks are proactively identified across all business activities to assess their source, likelihood, and impact, and then proceed to the mitigation stage according to the characteristics and complexity of the business. To support the effectiveness of this process, the Company provides a reliable risk management information system aligned with operational needs, ensuring optimal and integrated risk management implementation.

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Comprehensive internal control system

Perseroan memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan efektif dengan berlandaskan pada konsep Three Lines of Defense. Sistem ini didukung oleh kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi Internal Audit berperan strategis dengan melakukan pelaporan independen langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta kepada Direktur Utama, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan internal.

The Company ensures the implementation of an integrated and effective internal control system based on the Three Lines of Defense concept. This system is supported by policies and procedures designed to ensure compliance and effectiveness of the implementation of risk management as a whole. The Internal Audit function plays a strategic role by conducting independent reporting directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee, as well as to the President Director, in order to ensure transparency and accountability of internal supervision.



JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko secara komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup tahap identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian terhadap berbagai risiko utama yang berpotensi memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha. Berdasarkan hasil proses tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi dan menetapkan sejumlah risiko kunci yang relevan dengan karakteristik operasional Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

TYPES OF RISKS AND HOW TO MANAGE THEM

Throughout 2025, the Company implemented a comprehensive and continuous risk management process, which included the identification, assessment, monitoring, and control of various key risks that could potentially have a material impact on business activities. Based on the results of this process, the Company has identified and determined a number of key risks relevant to the Company's operational characteristics as a finance company, as follows:

Jenis dan Penjelasan Risiko Types and Explanations of Risks	Upaya Mitigasi Tahun 2025	Mitigation Efforts in 2025
Risiko Strategis Risiko strategis adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Strategic Risk Strategic risk is the risk that occurs due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.	Untuk mendukung pengelolaan risiko strategis secara optimal, Perseroan menerapkan berbagai langkah berikut: 1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas dalam merancang rencana strategis. 2. Mengoptimalkan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama proses penyusunan strategi bisnis sesuai <i>strategic planning cycle</i>. 3. Menetapkan limit untuk setiap parameter risiko strategis yang sejalan dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan. 4. Melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja aktual Perseroan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Tahunan. 5. Mendorong pengembangan atau perluasan kegiatan usaha melalui kerangka kerja Komisi Pembuatan dan Pengembangan Produk. 6. Memperbaharui pedoman <i>liquidity risk contingency plan</i> dan <i>credit risk contingency plan</i> dan melakukan <i>stress testing</i> untuk memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal.	To support optimal strategic risk management, the Company implements the following steps: 1. Formulating clear policies and procedures in designing strategic plans. 2. Optimizing active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners during the business strategy formulation process according to the strategic planning cycle. 3. Setting limits for each strategic risk parameter that is in line with the Company's risk appetite and risk tolerance. 4. Conducting regular monitoring of the Company's actual performance and comparing it with the targets set in the Annual Business Plan. 5. Encouraging the development or expansion of business activities through the (Product Establishment & Product Development Commission) framework. 6. Updating the liquidity risk contingency plan and credit risk contingency plan guidelines and conduct stress testing to ensure the Company's readiness to face internal and external changes.
Risiko Operasional Merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Operational Risk This is a risk that occurs due to the inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Company's operations.	Perseroan melaksanakan berbagai langkah untuk mengelola risiko operasional secara efektif, antara lain: 1. Menerapkan <i>Operational Risk Assessment</i> dalam kerangka <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) guna memastikan identifikasi, evaluasi dan mitigasi risiko operasional dilakukan secara optimal. 2. Melakukan kaji ulang dan pembaruan aktivitas operasional sesuai hasil RCSA untuk mendukung perbaikan proses bisnis. 3. Melakukan pemantauan profil risiko operasional secara berkala untuk memperkuat sistem pengendalian internal dalam mengelola risiko operasional. 4. Menerapkan kerangka kerja anti-<i>fraud</i> secara komprehensif, termasuk sosialisasi program anti-<i>fraud</i>, pengoptimalan kanal <i>whistleblowing system</i>, penggunaan sistem deteksi <i>fraud</i>, investigasi, dan pemberian sanksi. 5. Mengimplementasikan <i>Fraud Detection Alert System</i> (Radar) untuk mendeteksi risiko <i>fraud</i> pada proses akuisisi kredit dan penagihan. 6. Menerapkan <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS) untuk menjaga keberlanjutan operasional dalam menghadapi berbagai risiko. 7. Mengimplementasikan <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) untuk memantau eksposur risiko operasional dan memberikan peringatan dini. 8. Mengimplementasikan <i>Loss Event Database</i> (LED) untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kejadian kerugian operasional. 9. Mengimplementasikan standar keamanan teknologi informasi berbasis ISO 27001:2022 untuk memastikan sistem keamanan informasi yang memadai.	The Company implements various measures to effectively manage operational risks, including: 1. Implementing Operational Risk Assessment within the Risk Control Self Assessment (RCSA) framework to ensure that identification, evaluation and mitigation of operational risks are carried out optimally. 2. Conducting reviews and updates of operational activities according to the results of the RCSA to support business process improvements. 3. Conducting regular monitoring of operational risk profiles to strengthen the internal control system in managing operational risks. 4. Implementing a comprehensive anti-fraud framework, including socialization of anti-fraud programs, optimization of whistleblowing system channels, use of fraud detection systems, investigations, and sanctions. 5. Implementing a Fraud Detection Alert System (Radar) to detect fraud risks in the credit acquisition and collection process. 6. Implementing a Business Continuity Management System (BCMS) to maintain operational sustainability when confronted with diverse risks. 7. Implementing a Key Risk Indicator (KRI) to monitor operational risk exposure and provide early warning. 8. Implementing a Loss Event Database (LED) to record, monitor, and analyze operational loss events. 9. Implementing information technology security standards based on ISO 27001:2013 to ensure an adequate information security system.



Jenis dan Penjelasan Risiko Types and Explanations of Risks	Upaya Mitigasi Tahun 2025	Mitigation Efforts in 2025
Risiko Kredit Merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pokok maupun bunga pada tanggal jatuh tempo. Risiko ini dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit dan stabilitas keuangan Perseroan. Credit Risk This is a risk that arises from a customer's inability to fulfill their obligation to repay principal and interest by the due date. This risk can impact the quality of the company's credit portfolio and financial stability.	Berikut adalah upaya mitigasi risiko kredit tahun 2025: 1. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui kebijakan penyaluran pembiayaan berdasarkan <i>arm's length</i>, dengan prinsip kehati-hatian dan persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang. 2. Menetapkan limit risiko kredit sesuai <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan untuk menjaga eksposur tetap terkendali. 3. Melakukan evaluasi berkala pada produk dan portofolio pembiayaan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko sejak dini. 4. Melakukan penerapan <i>Risk-Based Pricing</i> (RBP) untuk produk pembiayaan <i>Digital Electronics & Appliances</i>. 5. Melakukan <i>stress testing</i> dan menetapkan rencana kontinjensi untuk risiko kredit.	The following are credit risk mitigation efforts in 2025: 1. Preparing, establishing, and updating financing distribution policies based on arm's length, with the principle of prudence and transparent and tiered credit approval. 2. Setting credit risk limits according to the Company's risk appetite and risk tolerance to keep exposure under control. 3. Conducting periodic evaluations of products and financing portfolios as an early warning system to identify risks at an early stage. 4. Implementing Risk-Based Pricing (RBP) for Digital Electronics & Appliances financing products. 5. Conducting stress testing and establishing contingency plans for credit risk.
Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Market Risk Market Risk is the risk on the position of assets, liabilities, equity and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions.	Berikut adalah upaya mitigasi risiko pasar yang dilakukan: 1. Menetapkan limit pada setiap parameter risiko pasar sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan agar eksposur tetap terkendali. 2. Melakukan <i>stress testing</i> dan pemantauan profil risiko pasar secara berkala sebagai indikator peringatan dini, sehingga potensi risiko dapat terdeteksi sejak awal. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kondisi aset dan liabilitas terutama yang memiliki sensitivitas terhadap suku bunga dan indikator keuangan yang terekspos risiko pasar melalui forum Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas.	The following are market risk mitigation efforts that are carried out: 1. Setting limits on each market risk parameter in accordance with the Company's risk appetite and risk tolerance so that exposure remains under control. 2. Conducting stress testing and monitoring of market risk profiles periodically as early warning indicators, so that potential risks can be detected at an early stage. 3. Conducting periodic monitoring and evaluation of asset and liability conditions, especially those that are sensitive to interest rates and financial indicators exposed to market risk through the Asset and Liability Management Committee forum.
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Liquidity Risk Liquidity risk is the risk resulting from the Company's inability to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.	Untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas berjalan efektif dan mendukung keberlangsungan operasional, Perseroan menerapkan langkah-langkah berikut: 1. Menerapkan manajemen risiko likuiditas yang efektif, termasuk menyusun rencana pendanaan darurat. 2. Menetapkan batasan (limit) pada setiap parameter risiko likuiditas sesuai dengan kerangka <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan. 3. Melakukan <i>stress testing</i> secara berkala dan menyusun rencana kontinjensi untuk mengantisipasi potensi gangguan likuiditas. 4. Memantau profil risiko likuiditas secara rutin sebagai indikator peringatan dini. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas aset, liabilitas dan rasio-rasio likuiditas melalui forum Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas.	To ensure that liquidity risk management runs effectively and supports operational continuity, the Company implements the following steps: 1. Implementing effective liquidity risk management, including preparing an emergency funding plan. 2. Setting limits on each liquidity risk parameter in accordance with the Company's risk appetite and risk tolerance framework. 3. Conducting periodic stress testing and preparing contingency plans to anticipate potential liquidity disruptions. 4. Monitoring the liquidity risk profile routinely as an early warning indicator. 5. Conducting periodic monitoring and evaluation of assets, liabilities and liquidity ratios through the Asset and Liability Management Committee forum.



Jenis dan Penjelasan Risiko Types and Explanations of Risks	Upaya Mitigasi Tahun 2025 Mitigation Efforts in 2025	Mitigation Efforts in 2025
Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek hukum atau yuridis yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Legal Risk Legal risk is the risk that arises due to lawsuits or weaknesses in legal or juridical aspects related to the Company's business activities.	Untuk mengelola risiko hukum secara optimal dan meminimalkan dampak potensialnya, Perseroan menerapkan langkah-langkah berikut: 1. Menetapkan batasan (limit) pada setiap parameter risiko hukum sesuai dengan kerangka <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan. 2. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap dokumen perjanjian pembiayaan dan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memastikan kesesuaian dengan syarat sahnya perjanjian serta menghindari kelemahan dalam klausula. 3. Memantau profil risiko hukum secara rutin sebagai bagian dari indikator peringatan dini untuk mengantisipasi potensi permasalahan. 4. <i>Monitoring</i> penanganan tuntutan hukum kepada Perseroan secara berkala. 5. Mengimplementasikan secara bertahap digitalisasi dokumen dan perjanjian pembiayaan melalui <i>Document Management System</i> (DMS) khusus untuk produk pembiayaan <i>Digital Electronics and Appliances</i> dan pembiayaan kendaraan roda dua.	To optimally manage legal risk and minimize its potential impact, the Company implements the following steps: 1. Setting limits on each legal risk parameter in accordance with the Company's risk appetite and risk tolerance framework. 2. Conducting periodic reviews of financing agreement documents and agreements with third parties to ensure compliance with the terms of the agreement and to avoid weaknesses in the clauses. 3. Routinely monitoring the legal risk profile as part of an early warning indicator to anticipate potential problems. 4. Monitoring the handling of lawsuits against the Company periodically. 5. Gradually implementing digitalization of financing documents and agreements through the Document Management System (DMS) specifically for Digital Electronics and Appliances financing products and two-wheeled vehicle financing.
Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Compliance Risk Compliance risk is the risk that arises due to the Company not fulfilling or not implementing the applicable laws and regulations.	Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mengelola risiko secara efektif, Perseroan menjalankan langkah-langkah berikut: 1. Menetapkan batasan (limit) pada setiap parameter risiko kepatuhan dalam kerangka <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan. 2. Memantau profil risiko kepatuhan secara berkala sebagai bagian dari indikator peringatan dini. 3. Melakukan sosialisasi terkait regulasi baru kepada pegawai serta melakukan kaji ulang dan uji kepatuhan atas implementasi internal terhadap regulasi tersebut. 4. Memantau laporan yang wajib disampaikan kepada otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 5. Menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). 6. Mengimplementasi kerangka kerja Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai regulasi yang berlaku.	To ensure compliance with applicable regulations and manage risk effectively, the Company takes the following steps: 1. Setting limits on each compliance risk parameter within the Company's risk appetite and risk tolerance framework. 2. Monitoring the compliance risk profile periodically as part of the early warning indicators. 3. Disseminating new regulations to employees and conducting compliance reviews and tests on the internal implementation of these regulations. 4. Monitoring reports that must be submitted to the authorities to ensure compliance with applicable provisions. 5. Applying the principles of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML CFTT & WMD). 6. Implementing the Consumer and Community Protection framework and Personal Data Protection (PDP) in accordance with applicable regulations.
Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terhadap Perseroan, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap kegiatan, tindakan, atau kebijakan Perseroan. Reputation Risk Reputation risk is the risk that arises due to a decrease in the level of stakeholder trust in the Company, which originates from negative perceptions of the Company's activities, actions, or policies.	Untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan meminimalkan risiko reputasi, Perseroan menerapkan langkah-langkah berikut: 1. Memantau berita atau publikasi yang bersifat negatif serta menetapkan strategi komunikasi yang tepat guna mencegah penyebaran informasi yang kontra produktif. 2. Menetapkan batasan (limit) pada setiap parameter risiko reputasi dalam kerangka <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan. 3. Memantau profil risiko reputasi secara rutin sebagai bagian dari indikator peringatan dini. 4. Mengelola pengaduan debitur secara efektif sesuai regulasi yang berlaku.	To maintain stakeholder trust and minimize reputation risk, the Company implements the following steps: 1. Monitoring negative news or publications and determining appropriate communication strategies to prevent the spread of counterproductive information. 2. Setting limits on each reputation risk parameter within the Company's risk appetite and risk tolerance framework. 3. Monitoring the reputation risk profile regularly as part of an early warning indicator. 4. Managing debtor complaints effectively in accordance with applicable regulations.

Perseroan mengelola seluruh risiko kunci yang telah diuraikan pada tabel di atas secara terintegrasi melalui kerangka sistem dan proses yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Penetapan kebijakan pengelolaan risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan secara proaktif guna memastikan eksposur risiko berada dalam batas yang dapat diterima serta mengurangi potensi dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

The Company manages all key risks outlined in the table above in an integrated manner through a structured, consistent, and sustainable framework of systems and processes. Risk management policies for each type of risk are proactively established to ensure risk exposure remains within acceptable limits and mitigate potential negative impacts on the Company's performance and financial condition.



Pelaksanaan manajemen risiko dipantau dan ditinjau secara berkesinambungan untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara tingkat risiko yang dihadapi dan efektivitas langkah pengendaliannya. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi atas kebijakan, sistem, dan proses manajemen risiko agar tetap selaras dengan perkembangan lingkungan usaha, perubahan regulasi, serta dinamika industri pembiayaan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin, adaptif, dan tepat waktu, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat ketahanan usaha, menjaga stabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara berkala melakukan peninjauan atas efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko guna memastikan kesesuaian antara kebijakan, proses, dan implementasi pengelolaan risiko dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta prinsip GCG.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Sistem Manajemen Risiko Perseroan dinilai telah diterapkan secara cukup memadai dan efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko utama yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan. Proses pengelolaan risiko didukung oleh struktur tata kelola yang jelas, kebijakan dan prosedur yang memadai, serta mekanisme pelaporan risiko yang berjalan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah diterapkan secara cukup memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip GCG dengan mempertimbangkan profil risiko, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Penerapan Sistem Manajemen Risiko tersebut dinilai mampu mendukung pengambilan keputusan yang prudent, mendukung kesinambungan usaha, serta pencapaian tujuan strategis Perseroan meskipun terdapat kelemahan di beberapa aspek yang senantiasa disempurnakan oleh Perseroan.

Risk management implementation is continuously monitored and reviewed to ensure an optimal balance between the level of risk faced and the effectiveness of its control measures. The Company also periodically evaluates its risk management policies, systems, and processes to ensure they remain aligned with developments in the business environment, regulatory changes, and the dynamics of the financing industry.

With the disciplined, adaptive, and timely implementation of risk management, the Company is committed to strengthening business resilience, maintaining performance stability, and supporting the achievement of its strategic objectives and business sustainability.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2025

Throughout 2025, the Company periodically reviewed the effectiveness of its Risk Management System implementation to ensure compliance with applicable laws and regulations, particularly Financial Services Authority regulations, and GCG principles.

Based on the review results, the Company's Risk Management System was deemed adequate and effective in identifying, measuring, monitoring, and controlling key risks inherent in the Company's business activities. The risk management process is supported by a clear governance structure, adequate policies and procedures, and a regular risk reporting mechanism to the Board of Directors and Board of Commissioners.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The Board of Directors and the Board of Commissioners declare that the Company's Risk Management System has been implemented adequately and effectively in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and GCG principles, taking into account the risk profile, scale, and complexity of the Company's business activities. The implementation of the Risk Management System is considered capable of supporting prudent decision-making, supporting business continuity, and achieving the Company's strategic objectives, although there are weaknesses in several aspects that are continuously being improved by the Company.



REALISASI TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan sejumlah inisiatif strategis dan merealisasikan target manajemen risiko yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan Sistem Manajemen Risiko secara menyeluruh. Pelaksanaan inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan keterkaitan yang erat antara manajemen risiko dan pencapaian sasaran strategis Perseroan.

Berikut disajikan realisasi target dan inisiatif strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

1. Mengembangkan sistem pengelolaan risiko operasional dengan menerapkan *Loss Event Database* (LED) untuk mencatat data kejadian risiko atau kerugian operasional.
2. Mengembangkan *Business Continuity Plan* (BCP) guna memastikan penerapan kelangsungan bisnis.
3. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas dan risiko pasar untuk memastikan kesiapan menghadapi perubahan internal dan eksternal Perseroan.
4. Membangun *Credit Scoring* baru yang dikembangkan internal Perseroan untuk produk pembiayaan kendaraan roda dua (2W) dan produk pembiayaan *Digital Electronic and Appliances* (DE&A).
5. Melarang seluruh deviasi/penyimpangan atas kebijakan kredit untuk semua produk.
6. Melakukan pengetatan terhadap segmen yang memiliki risiko tinggi dengan cara seperti mengetatkan syarat uang muka minimum/LTV maksimum, dan syarat penghasilan minimum untuk produk pembiayaan 2W dan DE&A.
7. Membatasi pembiayaan multiguna roda empat (4W) dengan fokus pada pembiayaan konsumen AO/RO (*Additional Order/Repeat Order*).

TARGET REALIZATION AND STRATEGIC INITIATIVES FOR RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN 2025

Throughout 2025, the Company implemented several strategic initiatives and achieved established risk management targets as part of its efforts to strengthen the implementation of its comprehensive Risk Management System. These initiatives were aimed at improving the effectiveness of risk management, strengthening internal controls, and ensuring a strong link between risk management and the achievement of the Company's strategic objectives.

The following presents the realization of the strategic targets and initiatives implemented throughout 2025:

1. Developing an operational risk management system by implementing a *Loss Event Database* (LED) to record data on operational risk events or losses.
2. Developing a *Business Continuity Plan* (BCP) to ensure business continuity.
3. Conducting *stress testing* of liquidity and market risks to ensure readiness to face internal and external changes in the Company.
4. Developing a new internally developed credit scoring system for two-wheeled vehicle (2W) financing products and *Digital Electronics and Appliances* (DE&A) financing products.
5. Prohibiting all deviations from credit policies for all products.
6. Tightening high-risk segments by tightening minimum down payment/maximum LTV requirements and minimum income requirements for 2W and DE&A financing products.
7. Limiting multipurpose four-wheeled (4W) financing with a focus on AO/RO (*Additional Order/Repeat Order*) consumer financing.



Perkara Hukum

Legal Cases

KASUS HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, operasional, maupun keberlangsungan usaha. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki perkara atau gugatan material yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini, termasuk informasi mengenai pokok perkara maupun status penyelesaiannya.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2025, tidak terdapat masalah hukum, baik itu dalam konteks pidana maupun perdata, yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Pada tahun 2025, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak. Oleh karena itu, informasi mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Entitas Anak tidak relevan untuk disajikan dalam Laporan Tahunan 2025.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN

Perseroan tidak menghadapi masalah hukum yang signifikan, baik perkara perdata maupun pidana, sehingga tidak berdampak bagi kegiatan operasional atau kondisi keuangan Perseroan.

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Throughout 2025, the Company was not involved in any legal proceedings, either civil or criminal, that could have a significant impact on its financial performance, operations, or business continuity. Therefore, the Company has no material cases or lawsuits that require disclosure in this Annual Report, including information regarding the subject matter or the status of their resolution.

LEGAL ISSUES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2025, there were no legal issues, either in a criminal or civil context, faced by the Company's Board of Commissioners and Directors.

LEGAL ISSUES FACED BY SUBSIDIARIES

In 2025, the Company did not have any subsidiary. Therefore, information regarding legal matters related to these subsidiaries is not relevant for presentation in the 2025 Annual Report.

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE COMPANY

The Company does not face any significant legal issues, either civil or criminal, so there is no impact on the Company's operational activities or financial condition.



Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

SANKSI ADMINISTRATIF DARI REGULATOR

Pada tahun 2025, Perseroan menerima 2 (dua) sanksi administratif dari OJK berupa teguran tertulis terkait penyampaian koreksi laporan debitor melalui SLIK serta peringatan tertulis atas ketidaksesuaian terhadap ketentuan gearing ratio dan rasio permodalan. Perseroan telah menindaklanjuti seluruh sanksi tersebut secara tepat waktu melalui langkah-langkah perbaikan yang diperlukan serta penguatan pengendalian internal guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Atas sanksi terkait rasio keuangan, Perseroan telah memenuhi ketentuan regulator sehingga sanksi tersebut telah dicabut oleh OJK pada 9 Desember 2025.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM REGULATORS

In 2025, the Company received 2 (two) administrative sanctions from the OJK in the form of a written reprimand regarding the submission of corrections to debtor reports through SLIK, as well as a written warning for non-compliance with the gearing ratio and capital adequacy ratio requirements. The Company has addressed all such sanctions in a timely manner through necessary corrective measures and the strengthening of internal controls to ensure compliance with applicable regulations. Regarding the sanctions related to financial ratios, the Company has met regulatory requirements, and as a result, the OJK lifted those sanctions on December 9, 2025.

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM ATAU PERATURAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN ATAU MATERIAL

Tidak ditemukan adanya kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, maupun ketentuan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang bersifat signifikan atau material. Seluruh transaksi yang melibatkan pihak berelasi telah dilakukan sesuai prosedur serta memenuhi prinsip kewajaran, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH LAWS OR REGULATIONS RELATED TO SIGNIFICANT OR MATERIAL RELATED PARTY TRANSACTIONS

No significant or material cases of non-compliance with laws, regulations, or provisions relating to transactions with related parties were identified. All transactions involving related parties were conducted in accordance with procedures and adhered to the principles of fairness, transparency, and compliance with applicable regulations.

SANKSI DARI REGULATOR TERKAIT PERISTIWA PENTING

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator yang disebabkan oleh keterlambatan publikasi atau tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (*material event*).

SANCTIONS FROM REGULATORS RELATED TO MATERIAL EVENTS

Throughout 2025, the Company never received any sanctions from regulators due to late publication or failure to make announcements within the specified timeframe for material events.

SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERKAIT MASALAH PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN/ KONSUMEN/KEPAILITAN/KOMERSIAL/ PERSAINGAN ATAU LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan tidak mencatatkan adanya pelanggaran hukum terkait perburuhan, ketenagakerjaan, hak konsumen, kepailitan, praktik

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF LAWS RELATED TO LABOR/EMPLOYMENT/ CONSUMER/BANKRUPTCY/COMMERCIAL/ COMPETITION OR ENVIRONMENTAL ISSUES

The Company has not recorded any significant or material violations of laws related to labor, employment, consumer rights, bankruptcy, commercial practices, competition, or



komersial, persaingan usaha, maupun perlindungan lingkungan hidup yang bersifat signifikan atau material. Kondisi ini menegaskan komitmen Perseroan untuk beroperasi secara etis, patuh hukum, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak pernah menerima putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait sengketa perpajakan. Kondisi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

environmental protection. This confirms the Company's commitment to operating ethically, complying with the law, and being responsible to all stakeholders.

SANCTIONS RELATED TO TAX REGULATIONS

Over the past three years, the Company has not received a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax dispute. This reflects the Company's commitment to complying with all applicable tax regulations in Indonesia.

Kode Etik

Code of Ethics

Perseroan menetapkan dan menerapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan secara profesional, berintegritas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip GCG.

Kode Etik Perseroan mengatur nilai-nilai dasar, standar perilaku, serta komitmen etika yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan, antara lain terkait integritas, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pencegahan benturan kepentingan, kerahasiaan informasi, serta perlakuan yang adil terhadap pemangku kepentingan.

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan Kode Etik, Perseroan secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh insan Perseroan, serta menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin atas setiap pelanggaran yang terjadi. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ditindaklanjuti secara konsisten sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan yang berlaku.

Melalui penerapan Kode Etik secara konsisten, Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan etika bisnis yang tinggi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

The Company establishes and implements a Code of Ethics as a guideline of conduct for all Company personnel, including the Board of Commissioners, Directors, and employees, in carrying out their duties and responsibilities. This Code of Ethics is designed to ensure that all Company business activities are conducted professionally, with integrity, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles.

The Company's Code of Ethics establishes core values, standards of conduct, and ethical commitments that must be adhered to by all Company personnel, including those related to integrity, compliance with laws and regulations, prevention of conflicts of interest, confidentiality of information, and fair treatment of stakeholders.

To ensure the effective implementation of the Code of Ethics, the Company continuously disseminates and internalizes it to all Company personnel, and establishes a monitoring and disciplinary mechanism for any violations. All violations of the Code of Ethics are consistently followed up in accordance with internal provisions and applicable regulations.

Through consistent implementation of the Code of Ethics, the Company is committed to building a work culture based on integrity and high business ethics, strengthening stakeholder trust, and supporting the Company's business sustainability.



POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik Perseroan mengatur standar perilaku dan etika bisnis yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi, anggota Komite, dan karyawan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pokok-pokok Kode Etik Perseroan meliputi antara lain:

1. Etika berkaitan dengan Pelanggan;
2. Etika berkaitan dengan Pemegang Saham dan Investor;
3. Etika Nasional dan Sosial;
4. Etika berkaitan dengan Persaingan Sehat;
5. Etika sebagai Grup Keuangan;
6. Etika terkait Komisaris, Direktur, anggota Komite, dan Karyawan; dan
7. Etika Kerja bagi Komisaris, Direktur, anggota Komite, dan Karyawan.

Melalui penerapan pokok-pokok Kode Etik tersebut secara konsisten, Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang beretika, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Perseroan menjadikan Kode Etik sebagai landasan utama dalam menjaga penerapan standar etika tertinggi di seluruh aktivitas bisnis dan operasional. Untuk memastikan implementasi yang efektif, seluruh insan Perseroan diwajibkan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten baik dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja maupun dalam perilaku di luar lingkungan kerja yang dapat berdampak pada reputasi Perseroan. Komitmen terhadap kepatuhan Kode Etik tersebut bertujuan untuk memperkuat budaya integritas dan profesionalisme, serta menjaga reputasi dan citra positif Perseroan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan GCG.

KODE ETIK BERLAKU UNTUK SELURUH LEVEL ORGANISASI

Seluruh insan Perseroan, termasuk jajaran Dewan Komisaris, Direksi, anggota Komite, dan karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perseroan secara konsisten dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan seluruh aktivitas usaha. Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip GCG.

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS

The Company's Code of Ethics sets out standards of business conduct and ethics that serve as a guide for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee members, and employees in interacting with stakeholders and in carrying out their duties and responsibilities. The Code of Ethics includes, among other things:

1. Ethics related to Customers;
2. Ethics related to Shareholders and Investors;
3. National and Social Ethic;
4. Ethics related to Healthy Competition;
5. Ethics as a Financial Group;
6. Ethics related to Commissioners, Directors, Committee members, and Employees; and
7. Work Ethics for Commissioners, Directors, Committee members, and Employees.

Through consistent implementation of the Code of Ethics, the Company is committed to building an ethical work culture, strengthening stakeholder trust, and supporting the sustainability of the Company's business.

COMPLIANCE WITH THE CODE OF ETHICS

The Company considers the Code of Ethics to be the primary foundation for maintaining the highest ethical standards across all business and operational activities. To ensure effective implementation, all Company personnel are required to consistently comply with and implement the Code of Ethics, both in carrying out their duties within the workplace and in behavior outside the workplace that could impact the Company's reputation. Commitment to compliance with the Code of Ethics aims to strengthen a culture of integrity and professionalism, as well as to maintain the Company's reputation and positive image on an ongoing basis as part of the implementation of GCG.

CODE OF ETHICS APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

All Company personnel, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee members, and employees, are required to consistently comply with and implement the Company's Code of Ethics in carrying out their duties, responsibilities, and all business activities. Compliance with the Code of Ethics is an integral part of the Company's commitment to implementing GCG principles.



Perseroan menegaskan bahwa penerapan Kode Etik berlaku tanpa pengecualian dan menjadi standar perilaku yang mengikat seluruh jajaran organisasi. Kode Etik bersifat mengikat bagi seluruh karyawan, termasuk yang berstatus tetap, kontrak, maupun dalam masa percobaan. Setiap karyawan diharapkan memahami dan menjalankan nilai-nilai Kode Etik dalam aktivitasnya sehari-hari. Hal ini bertujuan membangun perilaku kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, sehingga menciptakan hubungan yang wajar dan etis dengan sesama rekan kerja maupun mitra usaha, sesuai dengan prinsip moral dan standar etika yang berlaku.

Perseroan juga menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin atas kepatuhan terhadap Kode Etik termasuk penerapan sanksi yang tegas dan konsisten atas setiap pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan Kode Etik secara menyeluruh, Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang beretika dan berintegritas di seluruh lini organisasi.

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK

Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan inisiatif penyebaran dan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh insan Perseroan secara rutin melalui media internal yang dapat diakses kapan saja, guna memastikan pemahaman dan penerapan Kode Etik secara konsisten di seluruh lini organisasi. Tidak hanya itu, Kode Etik Perseroan juga dapat diakses oleh pihak eksternal melalui situs resmi Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas penerapan Kode Etik, Perseroan secara berkala menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi yang ditujukan untuk membantu karyawan memahami penerapan prinsip-prinsip etika, baik dalam tindakan individu maupun dalam hubungan kerja dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Inisiatif ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi prinsip etika, transparansi, dan integritas guna menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Perseroan.

The Company affirms that the Code of Ethics applies without exception and serves as a standard of conduct binding on all levels of the organization. The Code of Ethics is binding on all employees, including those on permanent, contract, or probationary positions. Every employee is expected to understand and implement the values of the Code of Ethics in their daily activities. This aims to foster professional, responsible, and trustworthy work behavior, thereby creating fair and ethical relationships with fellow workers and business partners, in accordance with applicable moral principles and ethical standards.

The Company also establishes a mechanism for monitoring and enforcing discipline for compliance with the Code of Ethics, including the application of firm and consistent sanctions for any violations, in accordance with applicable regulations. Through the comprehensive implementation of the Code of Ethics, the Company is committed to building a work culture of ethics and integrity throughout the organization.

DISSEMINATION AND SOCIALIZATION OF THE CODE OF ETHICS

The Company continuously implements initiatives to disseminate and socialize the Code of Ethics to all Company employees on a regular basis through internal media that can be accessed at any time, to ensure consistent understanding and implementation of the Code of Ethics across all levels of the organization. Furthermore, the Company's Code of Ethics is also accessible to external parties through the Company's official website.

To enhance understanding of the Code of Ethics, the Company regularly holds various educational activities aimed at helping employees understand the application of ethical principles, both in individual actions and in working relationships with colleagues and other stakeholders. This initiative is aimed at creating a work environment that upholds the principles of ethics, transparency, and integrity to maintain the Company's reputation and business sustainability.



Pada tahun 2025, sosialisasi Kode Etik dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, seperti:

1. Penandatanganan pernyataan Ikhtisar pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik oleh seluruh karyawan sebagai bentuk penyegaran atas Kode Etik Perseroan.
2. Mengintegrasikan materi Kode Etik ke dalam pelatihan Kepatuhan Internal yang diselenggarakan secara tatap muka baik secara daring maupun luring.
3. Menyelenggarakan kegiatan Compliance Month yang secara khusus membahas Kode Etik. Kegiatan ini dikemas secara komunikatif, menarik, dan relevan dengan kondisi kerja sehari-hari, sehingga memudahkan karyawan dalam memahami serta menginternalisasi nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memastikan Kode Etik tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga diterapkan secara konsisten sebagai pedoman perilaku dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan di lingkungan Perseroan.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Perseroan menerapkan dan menegakkan Kode Etik secara konsisten sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan GCG. Penerapan Kode Etik didukung melalui integrasi prinsip etika ke dalam kebijakan dan prosedur internal, mekanisme pengawasan, serta sosialisasi yang memadai. Sebagai bentuk pengawasan, Peraturan Perusahaan menetapkan mekanisme yang jelas dalam menangani pelanggaran Kode Etik termasuk pemberian sanksi yang tegas dan proporsional kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Melalui penerapan dan penegakan Kode Etik yang konsisten, Perseroan berkomitmen menjaga integritas, memastikan kepatuhan terhadap prinsip GCG, serta mendukung keberlanjutan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

In 2025, socialization of the Code of Ethics carried out through several activities, such as:

1. Signing a Pledge of Understanding and Compliance with the Code of Ethics by all employees as a refresher on the Company's Code of Ethics.
2. Integrating Code of Ethics material into Internal Compliance training, held face-to-face, both online and offline.
3. Organizing Compliance Month activities specifically addressing the Code of Ethics. These activities are presented in a communicative, engaging, and relevant manner to daily work conditions, making it easier for employees to understand and internalize the ethical values applicable within the Company.

Through this ongoing socialization and education, the Company is committed to ensuring that the Code of Ethics is not only formally understood but also consistently implemented as a guideline for behavior in all activities and decision-making within the Company.

EFFORTS TO IMPLEMENT AND ENFORCE THE CODE OF ETHICS

The Company consistently implements and enforces the Code of Ethics as part of its commitment to GCG implementation. The implementation of the Code of Ethics is supported by the integration of ethical principles into internal policies and procedures, monitoring mechanisms, and adequate outreach. As a form of oversight, the Company Regulations establish a clear mechanism for handling violations of the Code of Ethics, including imposing firm and proportionate sanctions on parties proven to have committed violations. Through consistent implementation and enforcement of the Code of Ethics, the Company is committed to maintaining integrity, ensuring compliance with GCG principles, and supporting business sustainability and stakeholder trust.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Perseroan telah menetapkan dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan GCG. Sistem ini disediakan sebagai sarana bagi seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, Kode Etik, maupun prinsip integritas dan etika usaha.

Sistem Pelaporan Pelanggaran dirancang untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan dari segala bentuk tindakan balasan sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik. Perseroan memastikan bahwa setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti secara objektif, independen, dan profesional sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengelolaan WBS dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, meliputi penerimaan laporan, verifikasi awal, investigasi, serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut kepada manajemen dan pihak terkait. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran, Perseroan akan mengambil tindakan korektif dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan yang berlaku.

Melalui penerapan WBS yang efektif, Perseroan berupaya memperkuat budaya kepatuhan dan integritas, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi risiko yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha dan reputasi Perseroan.

MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan menyediakan berbagai media penyampaian laporan pelanggaran sebagai bagian dari penerapan WBS. Media tersebut disediakan untuk memudahkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam menyampaikan laporan secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab. Para pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui saluran resmi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain:

The Company has established and implemented a Whistleblowing System (WBS) as part of its commitment to GCG implementation. This system provides a means for all internal and external stakeholders to report suspected violations of laws and regulations, internal policies, the Code of Ethics, and the principles of integrity and business ethics.

The Whistleblowing System is designed to ensure the confidentiality of the whistleblower's identity and provide protection from any form of retaliation, provided the report is submitted in good faith. The Company ensures that every report received is followed up objectively, independently, and professionally in accordance with applicable procedures.

The WBS is managed through a structured mechanism, including receiving reports, initial verification, investigation, and submitting follow-up recommendations to management and relevant parties. In the event of proven violations, the Company will take corrective action and impose sanctions in accordance with internal provisions and applicable regulations.

Through the effective implementation of the WBS, the Company strives to strengthen a culture of compliance and integrity, increase transparency, and minimize potential risks that could impact the Company's business sustainability and reputation.

MEDIA FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

The Company provides various channels for reporting violations as part of its WBS implementation. These channels are provided to facilitate internal and external stakeholders in submitting reports securely, confidentially, and responsibly. Reporters can submit violation reports through official channels established by the Company, including:



Surat Elektronik
E-mail

Telepon
Phone

WhatsApp
(hanya layanan *chat*)
WhatsApp (chat only)

Surat Menyurat
Correspondence

lapor@finansia.com

021-29333646, diarahkan ke PIC Compliance & Corporate Secretary

0811-999-9494

Gedung Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Up: Divisi Compliance & Corporate Secretary

021-29333646, directed to PIC Compliance & Corporate Secretary

Office 8 Building, 15th Floor, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Attention to: Compliance & Corporate Secretary Division

Penyediaan berbagai media pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan pelanggaran, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lingkungan Perseroan.

The provision of various reporting media aims to increase accessibility, encourage active participation in reporting violations, and strengthen the implementation of the principles of transparency, accountability, and integrity within the Company's environment.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan telah menetapkan mekanisme penyampaian laporan pelanggaran yang diatur dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) yang berlaku sejak 21 Mei 2024. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan disampaikan secara bertanggung jawab, dapat diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara efektif. Berikut ini adalah persyaratan atau kriteria penyampaian laporan pelanggaran yang diterima melalui WBS Perseroan:

1. Menyampaikan laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perseroan dengan melihat tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran oleh Perseroan.
2. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk mempermudah komunikasi sekurang-kurangnya meliputi nama pelapor dan nomor telepon, alamat email yang dapat dihubungi, namun dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan dan merugikan Pelapor, maka nama dapat dirahasiakan (anonim).
3. Pelaporan harus menyertakan bukti awal (tidak mengharuskan suatu bukti yang komprehensif) antara lain berupa data, rekaman pembicaraan, video, foto, surat pernyataan, atau bukti-bukti lainnya yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran sehingga laporan dapat ditindaklanjuti atau telusuri, serta fakta-fakta yang relevan dengan menggunakan metode 5W+1H. Tanpa informasi memadai, laporan dinyatakan tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti.

MECHANISM FOR THE SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

The Company has established a mechanism for submitting reports of violations, as stipulated in the Whistleblowing Policy, which has been in effect since May 21, 2024. This mechanism aims to ensure that each report is submitted responsibly, can be verified, and is effectively followed up. The following are the requirements or criteria for submitting reports of violations received through the Company's WBS:

1. Submitting a report of alleged violations committed by Company employees, considering actions that are prohibited as violations by the Company.
2. The reporter provides information regarding the reporter's identity to facilitate communication, at least including the reporters name and telephone number, email address that can be contacted, but under certain conditions that can endanger and harm the Reporter, the name can be kept confidential (anonymous).
3. Reporting must include initial evidence (not requiring comprehensive evidence) including data, recordings of conversations, videos, photos, statements, or other evidence that indicates a violation has occurred so that the report can be followed up or investigated, as well as relevant facts using the 5W+1H method. Without adequate information, the report is declared invalid and will not be followed up.



KOMITMEN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran melalui WBS dengan itikad baik. Komitmen ini merupakan bagian integral dari penerapan prinsip GCG serta upaya menjaga integritas dan transparansi dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk:

1. Jaminan kerahasiaan atas identitas pelapor serta seluruh informasi dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya ancaman, intimidasi, hukuman, maupun tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan oleh pihak terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporan tersebut.

Perlindungan ini berlaku sejak laporan diterima hingga seluruh proses penanganan laporan diselesaikan, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal yang berlaku. Dalam hal laporan disampaikan secara anonim, Perseroan tetap memastikan penanganan laporan dilakukan secara objektif dan profesional sepanjang memenuhi persyaratan pelaporan.

Melalui komitmen perlindungan terhadap pelapor, Perseroan mendorong terciptanya budaya keterbukaan dan keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan GCG dan menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.

TATA CARA ATAU PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN

Perseroan menerapkan tata cara atau prosedur penanganan laporan pelanggaran yang terstruktur dan prosedural untuk memastikan setiap laporan yang masuk melalui WBS diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Setiap laporan pelanggaran yang diterima akan terlebih dahulu dianalisis oleh WBS Officer melalui proses verifikasi awal guna menilai kelengkapan informasi dan kecukupan bukti permulaan yang disampaikan. Dalam hal informasi atau bukti awal dinilai belum memadai, WBS Officer akan meminta pelapor untuk melengkapi informasi dimaksud agar laporan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

COMMITMENT TO PROTECT WHISTLEBLOWERS

The Company is committed to providing adequate protection to every whistleblower who submits a report of violations through the WBS in good faith. This commitment is an integral part of the implementation of GCG principles and efforts to maintain integrity and transparency in all of the Company's business activities. The Company provides protection to whistleblowers in the following forms:

1. Guarantee of confidentiality of the reporter's identity and all information and contents of the report submitted;
2. Guarantee of protection against all forms of treatment that may harm the whistleblower/reporter;
3. Guarantee of protection from possible threats, intimidation, punishment or other unpleasant actions carried out by the reported party or other parties related to the report.

This protection applies from the time the report is received until the entire report handling process is completed, in accordance with applicable internal regulations and policies. If the report is submitted anonymously, the Company continues to ensure that the report is handled objectively and professionally, provided it meets reporting requirements.

Through its commitment to protecting whistleblowers, the Company encourages a culture of openness and courage in reporting suspected violations, as part of its efforts to strengthen GCG implementation and maintain the Company's business sustainability.

PROCEDURES FOR HANDLING REPORTS

The Company implements a structured and procedural procedure for handling violation reports to ensure that every report received through the WBS is verified and followed up objectively, transparently, and accountably.

Each violation report received will first be analyzed by the WBS Officer through an initial verification process to assess the completeness of the information and the sufficiency of the initial evidence submitted. If the initial information or evidence is deemed inadequate, the WBS Officer will request the reporter to complete the information so that the report can be optimally followed up.



Apabila laporan telah dilengkapi dengan informasi dan bukti permulaan yang cukup serta dinyatakan valid, laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap investigasi lebih lanjut oleh unit atau departemen yang berwenang, yaitu Departemen Anti-Fraud Management dan/atau Industrial Relation, sesuai dengan jenis dan karakteristik dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Penanganan laporan pelanggaran dilaksanakan melalui tahapan yang dirancang untuk menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan dalam pengambilan keputusan, dengan tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian serta perlindungan terhadap pelapor. Adapun tahapan prosedur pengelolaan laporan meliputi:

1. **Penerimaan dan Verifikasi Laporan**
Pemeriksaan kelengkapan laporan serta verifikasi awal atas kebenaran informasi dan bukti permulaan oleh WBS Officer.
2. **Analisis dan Evaluasi Awal**
Penilaian tingkat urgensi, prioritas penanganan, serta penetapan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
3. **Investigasi dan Tindak Lanjut**
Pelaksanaan investigasi secara menyeluruh oleh Departemen Anti-Fraud Management dan/atau Industrial Relation, termasuk pengumpulan fakta, analisis data, dan penilaian atas dugaan pelanggaran, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan tindakan korektif dan/atau sanksi sesuai ketentuan Perseroan.
4. **Pelaporan Hasil dan Pemantauan**
Dokumentasi dan pelaporan hasil penanganan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tujuan pemantauan, evaluasi, serta peningkatan efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Melalui penerapan prosedur penanganan pelaporan yang komprehensif dan konsisten, Perseroan menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya integritas, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mendukung penerapan GCG.

PIHAK PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan menetapkan pengelolaan WBS melalui unit kerja yang independen guna memastikan penanganan laporan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan WBS berada di bawah tanggung jawab Departemen Internal Compliance yang berfungsi melakukan penerimaan, pencatatan, serta analisis awal atas setiap laporan yang masuk.

If the report is supplemented with sufficient information and initial evidence and is deemed valid, the report will proceed to the further investigation stage by the authorized unit or department, namely the Anti-Fraud Management and/or Industrial Relations Department, according to the type and characteristics of the alleged violation reported.

The handling of violation reports is carried out through stages designed to maintain the principles of transparency, accountability, and accuracy in decision-making, while upholding the principle of prudence and protection for the reporter. The stages of the report management procedure include:

1. **Receipt and Verification of Reports**
Checking the completeness of the report and initial verification of the accuracy of the information and preliminary evidence by the WBS Officer.
2. **Initial Analysis and Evaluation**
Assessing the level of urgency, prioritizing handling, and determining the necessary follow-up steps.
3. **Investigation and Follow-up**
Implementation of a comprehensive investigation by the Anti-Fraud Management and/or Industrial Relations Department, including fact-finding, data analysis, and assessment of the alleged violation, which then forms the basis for determining corrective actions and/or sanctions in accordance with Company regulations.
4. **Reporting Results and Monitoring**
Documentation and reporting of report handling results to the Board of Directors and Board of Commissioners for the purposes of monitoring, evaluating, and improving the effectiveness of the Whistleblowing System.

Through the implementation of comprehensive and consistent reporting procedures, the Company affirms its commitment to strengthening a culture of integrity, improving the effectiveness of internal control, and supporting the implementation of GCG.

VIOLATIONS REPORT MANAGEMENT

The Company establishes WBS management through an independent work unit to ensure that reports are handled objectively, professionally, and in accordance with statutory provisions. WBS management falls under the responsibility of the Internal Compliance Department, which receives, records, and conducts initial analysis of each incoming report.



Dalam hal laporan dinyatakan valid dan didukung bukti permulaan yang memadai, Perseroan menindaklanjutinya melalui proses investigasi oleh Departemen Anti-Fraud Management dan/atau Departemen Industrial Relation sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran. Penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan dilaksanakan oleh Departemen Industrial Relation berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan peran dan kewenangan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran berjalan efektif, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN MELALUI WBS

Berdasarkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Perseroan yang ditetapkan pada 21 Mei 2024, Perseroan menyediakan mekanisme WBS untuk menerima laporan terkait berbagai bentuk pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan setiap tindakan yang bertentangan dengan integritas, hukum, atau kebijakan Perseroan dapat diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan secara tepat. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, meliputi:

1. Hal-hal yang melanggar kriteria pengendalian internal Perusahaan.
2. Tindak Pidana, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh staf yang dapat dicurigai sebagai tindak pidana termasuk penggelapan, melalaikan tugas, pencurian, pemerasan, penyuapan, perantara pinjaman pribadi, tindakan tidak adil sehubungan dengan akun konsumen, pengalihan aset keluar negeri dan lain-lain.
3. Tindakan yang diduga melanggar Peraturan OJK mengenai Perusahaan Pembiayaan, UU Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Peraturan dan ketentuan terkait lainnya.
4. Perintah kerja ilegal atau tidak adil yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
5. Pelecehan Seksual melalui bahasa seksual atau perilaku fisik.
6. Instruksi yang tidak adil atau ilegal untuk mempekerjakan karyawan, dan
7. Setiap kasus ditentukan bahwa insiden di atas kemungkinan terjadi atau adanya tindakan operasional yang salah atau kasus ilegal.

If a report is deemed valid and supported by sufficient preliminary evidence, the Company will follow up through an investigation by the Anti-Fraud Management Department and/or the Industrial Relations Department, depending on the type of alleged violation. The Industrial Relations Department will determine and enforce sanctions for proven violations based on the Company's internal policies and applicable regulations.

These roles and authorities are designed to ensure the effective, accountable, and consistent implementation of the Whistleblowing System, as stipulated in the Financial Services Authority (OJK) regulations.

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED THROUGH WBS

Based on the Company's Whistleblowing Policy, established on May 21, 2024, the Company provides a WBS mechanism to receive reports related to various forms of violations. This provision aims to ensure that any actions that violate the Company's integrity, law, or policies can be identified, followed up, and resolved appropriately. Types of violations that can be reported through the WBS include:

1. Matters that violate the Company's internal control criteria.
2. Criminal Acts, namely any actions committed by staff that may be suspected of being a crime, including embezzlement, neglect of duty, theft, extortion, bribery, personal loan brokering, unfair actions related to customer accounts, transfer of assets abroad, and others.
3. Actions suspected of violating the Financial Services Authority (OJK) Regulations concerning Financing Companies, the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law, and other related regulations and provisions.
4. Illegal or unfair work orders given in connection with the performance of duties.
5. Sexual Harassment through sexual language or physical behavior.
6. Unfair or illegal instructions for hiring employees, and
7. Each case determines that the above incidents are likely to occur or that there are operational errors or illegal cases.



KEWAJIBAN DAN KONSEKUENSI PELAPORAN PELANGGARAN BAGI KARYAWAN PERSEROAN

Perseroan mewajibkan seluruh karyawan untuk melaporkan setiap dugaan atau tindakan pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan, antara lain tindakan manipulasi, penipuan, pencurian, kesalahan prosedur, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum maupun kebijakan internal. Kewajiban ini berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme WBS atau saluran resmi lainnya yang telah ditetapkan, dengan tujuan memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

Karyawan atau manajemen yang tidak melaporkan atau menutupi tindakan pelanggaran yang diketahui dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan, termasuk tindakan disipliner hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap Perseroan. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab aktif untuk mendukung kepatuhan, pencegahan risiko, dan perlindungan aset Perseroan, selaras dengan ketentuan POJK terkait Tata Kelola Perusahaan dan Pelaporan Pelanggaran.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS PENGELOLAAN WBS

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas pengelolaan WBS sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan integritas Perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan WBS, menyediakan sumber daya yang memadai, serta memastikan mekanisme pelaporan dapat berjalan secara independen, mudah diakses, dan mampu menindaklanjuti setiap laporan secara objektif. Sementara itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap implementasi WBS, termasuk memastikan bahwa setiap proses penanganan laporan dilakukan secara profesional, tepat waktu, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan terjalinnya sinergi antara Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan dapat menjamin bahwa WBS berfungsi efektif sebagai alat pengendalian internal yang mendukung integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

OBLIGATIONS AND CONSEQUENCES OF REPORTING VIOLATIONS FOR COMPANY EMPLOYEES

The Company requires all employees to report any suspected or suspected violations that could harm the Company, including manipulation, fraud, theft, procedural errors, or other activities that violate the law or internal policies. This obligation applies to violations committed by superiors, coworkers, or subordinates. Reporting is carried out through the WBS mechanism or other established official channels, with the aim of ensuring integrity, transparency, and accountability in the workplace.

Employees or management who fail to report or cover up known violations may be subject to sanctions in accordance with Company Regulations, including disciplinary action up to termination of employment, depending on the severity of the violation and its impact on the Company. This policy emphasizes that each individual has an active responsibility to support compliance, risk prevention, and protect the Company's assets, in line with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding Corporate Governance and Whistleblowing.

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN WBS MANAGEMENT

The Board of Commissioners and the Board of Directors play a central role in ensuring the effectiveness of the WBS management as part of efforts to strengthen the Company's governance and integrity. The Board of Directors is responsible for establishing the WBS policy direction, providing adequate resources, and ensuring that the reporting mechanism operates independently, is easily accessible, and is able to follow up on each report objectively. Meanwhile, the Board of Commissioners carries out an active oversight function over the implementation of the WBS, including ensuring that each report handling process is carried out professionally, timely, and free from conflicts of interest. With the synergy between the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company can ensure that the WBS functions effectively as an internal control tool that supports integrity, accountability, and compliance with applicable regulations.



SOSIALISASI WBS KEPADA KARYAWAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL

Perseroan menyadari bahwa sosialisasi WBS merupakan bagian krusial dalam memastikan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran dan mendukung prinsip GCG sesuai ketentuan POJK. Sosialisasi WBS ditujukan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga pemangku kepentingan eksternal, termasuk vendor, konsumen, *dealer*, dan agen, agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban dalam melaporkan dugaan pelanggaran serta berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang transparan dan berintegritas.

Perseroan melaksanakan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh melalui berbagai media komunikasi, antara lain pelatihan internal, publikasi di *platform* resmi Perseroan, dan alat peraga fisik maupun non-fisik, sehingga pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan prosedur pelaporan WBS dapat merata di seluruh lingkungan kerja.

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi WBS, antara lain:

1. Memasukkan materi WBS dalam pelatihan Kepatuhan Internal.
2. Menerbitkan artikel secara berkala mengenai WBS yang dapat dibaca seluruh karyawan.
3. Memasang informasi *channel* pelaporan WBS pada perangkat kerja (laptop/komputer) karyawan.

Melalui upaya sosialisasi yang efektif ini, Perseroan memastikan bahwa mekanisme WBS berfungsi optimal sebagai alat pengawasan internal, sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh karyawan dan pemangku kepentingan dalam menjaga kepatuhan, integritas, dan akuntabilitas Perseroan.

HASIL DARI PENANGANAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN DI TAHUN 2025

Jumlah Laporan Pengaduan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menerima 103 (seratus tiga) laporan pelanggaran melalui mekanisme WBS. Seluruh laporan yang masuk diproses sesuai dengan prosedur internal yang berlaku, termasuk tindak lanjut terhadap laporan yang terbukti valid. Tim pengelola WBS melakukan verifikasi menyeluruh atas setiap laporan untuk memastikan kelayakan dan kebenarannya, serta mengelompokkan laporan berdasarkan kategori status.

WBS SOCIALIZATION TO EMPLOYEES AND EXTERNAL STAKEHOLDERS

The Company recognizes that WBS socialization is a crucial part of ensuring the effectiveness of the violation reporting system and supporting GCG principles in accordance with the POJK (Financial Services Authority) regulations. WBS socialization is aimed not only at employees but also at external stakeholders, including vendors, consumers, dealers, and agents, so that all parties understand their rights and obligations in reporting suspected violations and play an active role in building a work culture of transparency and integrity.

The Company conducts regular and comprehensive socialization through various communication channels, including internal training, publications on the Company's official platforms, and physical and non-physical demonstrations. This ensures a uniform understanding of the function, benefits, and procedures for WBS reporting throughout the work environment.

In 2025, the Company conducted several WBS socialization activities, including:

1. Incorporating WBS material into Internal Compliance training.
2. Regularly publishing articles about the WBS that are accessible to all employees.
3. Installing WBS reporting channel information on employee work devices (laptops/computers).

Through this effective socialization effort, the Company ensures that the WBS mechanism functions optimally as an internal oversight tool, while encouraging the active participation of all employees and stakeholders in maintaining the Company's compliance, integrity, and accountability.

RESULTS OF REPORT HANDLING AND REPORT FOLLOW-UP IN 2025

Number of Complaint Reports

Throughout 2025, the Company received 103 (one hundred and three) reports of violations through the WBS mechanism. All reports were processed in accordance with applicable internal procedures, including follow-up on reports found to be valid. The WBS management team conducted a thorough verification of each report to ensure its validity and accuracy, and categorized the reports by status category.



Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil penanganan dan tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang diterima selama tahun 2025:

The following table summarizes the results of the handling and follow-up of violation reports received during 2025:

Status Laporan ^{*)}	Jumlah Laporan Tahun 2025 Total of Reports in 2025	Report Status
Tidak Valid	85	Invalid
Selesai	18	Completed
Dalam Proses Investigasi	0	Ongoing Investigation
Jumlah Laporan diterima	103	Total Reports Received

^{*)} Per 31 Desember 2025
Per December 31, 2025

Kebijakan Antikorupsi, Antisuap, dan Antigratifikasi

Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Anti-Gratification Policy

LANDASAN HUKUM

Perseroan menjalankan kebijakan antikorupsi, antisuap, dan antigratifikasi dengan mengacu pada berbagai landasan hukum yang relevan, antara lain:

1. POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
2. Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan;
4. Peraturan OJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
5. Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud* Perseroan; dan
6. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perseroan.

LEGAL BASIS

The Company carries out anti-corruption, anti-bribery, and anti-gratification by referring to various relevant legal bases, including:

1. POJK No. 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
2. OJK Regulation No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions;
3. OJK Regulation No. 28 of 2024 concerning the Management of Track Record Information of Actors Through the Actor Information System in the Financial Services Sector;
4. OJK Regulation No. 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
5. Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines of the Company; and
6. Anti-Bribery Management System Guidelines of the Company.



PROGRAM DAN PROSEDUR INTERNAL TERKAIT ANTIKORUPSI

Perseroan berkomitmen menjalankan usaha pembiayaan secara sehat dengan menegakkan integritas, profesionalisme, serta menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) maupun bentuk bad governance lainnya. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Perseroan telah menerapkan Pedoman Anti Korupsi sebagai bagian dari Kebijakan Penerapan Strategi Anti-Fraud PT KB Finansia Multi Finance yang diperbarui dan efektif berlaku sejak 1 Oktober 2024.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menetapkan prosedur pencegahan dan penanganan korupsi, termasuk menetapkan korupsi sebagai pelanggaran yang wajib dilaporkan melalui mekanisme WBS sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran. Korupsi juga dikategorikan sebagai salah satu dari 6 (enam) tipologi *fraud* dalam Kebijakan Anti-Fraud Perseroan.

Secara rinci, berikut merupakan 6 jenis *fraud* yang dimaksud:

INTERNAL PROGRAMS AND PROCEDURES RELATED TO ANTI CORRUPTION

The Company is committed to conducting its financing business in a healthy manner by upholding integrity and professionalism, while avoiding Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) and other forms of bad governance. To strengthen this commitment, the Company has implemented Anti-Corruption Guidelines as part of the PT KB Finansia Multi Finance Anti-Fraud Strategy Implementation Policy, which was updated and effective October 1, 2024.

In its implementation, the Company has established procedures for preventing and handling corruption, including designating corruption as a violation that must be reported through the WBS mechanism, as stipulated in the Whistleblowing Policy. Corruption is also categorized as one of six fraud typologies in the Company's Anti-Fraud Policy.

In detail, the six types of fraud in question are as follows:

Jenis <i>Fraud</i> Types of Fraud	Sub Jenis <i>Fraud</i>	Sub Types of Fraud
Korupsi Corruption	Pemerasan	Extortion
	Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen	Conflict of interest that is detrimental to LJK and/or Consumers
	Penyuapan	Bribery
Penyalahgunaan Aset Misappropriation of Assets	Penerimaan tidak sah	Unauthorized acceptance
	Penyalahgunaan uang tunai	Cash misuse
	Penyalahgunaan persediaan	Misuse of supplies
	Penyalahgunaan aset lainnya	Other misappropriation of assets
Kecurangan Laporan Keuangan Financial Reporting Fraud	Kecurangan laporan keuangan meliputi overstating atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya	Financial reporting fraud includes overstating or understating net assets and/or net income which results in a discrepancy between the information and the actual conditions.
Penipuan Fraud	Penipuan	Fraud
Pembocoran informasi rahasia Leakage of confidential information	Pembocoran informasi rahasia	Leakage of confidential information
Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>fraud</i> Other actions that can be equated with fraud	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>fraud</i>	Other actions that can be equated with fraud



PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS ANTIPENYUAPAN

Setiap tahun, Direksi atas nama Perseroan melakukan penandatanganan Pakta Integritas Antipenyuapan sebagai bentuk komitmen yang tegas terhadap penerapan praktik bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penandatanganan ini tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan moral, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang mengikat seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menolak segala bentuk penyuapan, gratifikasi yang tidak sah, serta tindakan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Adapun isi dari Pernyataan dalam Pakta Integritas Antipenyuapan meliputi:

1. Seluruh Insan Perseroan menyadari bahwa penyuapan adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, melanggar peraturan perundang-undangan, serta aturan Perseroan.
2. Seluruh Insan Perseroan menyadari bahwa Tindakan penyuapan merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan maupun Pemegang Saham.
3. Seluruh Insan Perseroan menyadari bahwa dampak dari tindakan penyuapan tidak hanya merugikan Perseroan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarga.
4. Seluruh Insan Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan atau terlibat dalam tindakan penyuapan serta menghindari perilaku yang dapat mempermudah atau memberi peluang bagi pihak lain untuk melakukan penyuapan.
5. Seluruh Insan Perseroan berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan pedoman penerapan strategi anti-*fraud* secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap aktivitas operasional Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI ANTI-FRAUD

Perseroan telah membentuk unit atau fungsi Anti-*Fraud* sebagai langkah nyata dalam pengendalian *fraud* secara menyeluruh di lingkungan Perseroan.

Per 31 Oktober 2024, Perseroan telah melakukan perubahan struktur organisasi sebagai pemenuhan POJK 12/2024 sehingga unit Anti-Fraud Management berubah menjadi suatu unit pada fungsi Enterprise Risk & Anti-Fraud Management yang bertugas membantu Direksi dalam memastikan efektivitas pengendalian *fraud* di seluruh unit kerja Perseroan.

IMPLEMENTATION OF THE ANTI-BRIBERY INTEGRITY PACT

Each year, the Board of Directors, on behalf of the Company, signs an Anti-Bribery Integrity Pact as a firm commitment to implementing clean, transparent, and integrity-based business practices. This signing serves not only as a moral statement but also as a code of conduct binding all management and employees to reject all forms of bribery, unlawful gratuities, and other actions that could potentially create a conflict of interest.

The contents of the Anti-Bribery Integrity Pact Statement include:

1. All Company Personnel are aware that bribery is an act that is contrary to religious norms, violates laws and regulations, and the Company's rules.
2. All Company Personnel are aware that bribery is a betrayal of the trust and confidence given by the Company and Shareholders.
3. All Company Personnel are aware that the impact of bribery is not only detrimental to the Company but also causes harm to themselves and their families.
4. All Company Personnel are committed to not committing or being involved in bribery and to avoid behavior that could facilitate or provide opportunities for other parties to commit bribery.
5. All Company Personnel are committed to supporting and applying the anti-fraud strategy implementation guidelines comprehensively and consistently in every operational activity of the Company.

ANTI-FRAUD ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Company has formed an Anti-Fraud Management unit or function as a concrete step in controlling fraud comprehensively within the Company.

Effective October 31, 2024, the Company has implemented changes to its organizational structure in compliance with OJK Regulation No. 12/2024, under which the Anti-Fraud Management unit was restructured as part of the Enterprise Risk & Anti-Fraud Management function, with responsibility for assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of fraud control across all operational units of the Company.



Bagan Struktur Anti-Fraud Management Anti-Fraud Management Structure Chart



Anti-Fraud Management memiliki tugas dan tanggung jawab terkait anti-*fraud*, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Membantu Manajemen atas penerapan Strategi Anti-*Fraud* melalui 4 (empat) pilar yaitu i) Pencegahan, ii) Deteksi, iii) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi serta iv) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
2. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan penerapan Strategi Anti-*Fraud* termasuk penyelesaian, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kejadian *fraud*.
4. Memastikan penerapan Strategi Anti-*Fraud* di lingkungan Perseroan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
5. Dapat melakukan investigasi dengan berkoordinasi kepada pihak terkait maupun Internal Audit.
6. Memastikan, mengawasi, dan mengontrol atas tindak lanjut hasil investigasi berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
7. Memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta menetapkan tindak lanjut untuk menyelesaikan kejadian *fraud* disertai dengan upaya-upaya untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Perseroan.
8. Melakukan pengkajian atas kejadian *fraud* yang pernah terjadi untuk dapat diketahui akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan dari kejadian *fraud* dan perbaikan sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan agar kejadian *fraud* tidak berulang.

Anti-Fraud Management unit or function has duties and responsibilities related to anti-fraud, which are described as follows:

1. Assisting Management in implementing the Anti-Fraud Strategy through 4 (four) pillars, namely i) Prevention, ii) Detection, iii) Investigation, Reporting and Sanctions as well as iv) Monitoring, Evaluation and Follow-up.
2. Responsible directly to the President Director and has a direct communication and reporting relationship to the Board of Commissioners.
3. Reporting the implementation of the Anti-Fraud Strategy including the resolution, evaluation, and follow-up of fraud incidents.
4. Ensuring that the implementation of the Anti-Fraud Strategy within the Company has been carried out in accordance with applicable policies and procedures.
5. Can conduct investigations by coordinating with related parties and Internal Audit.
6. Ensuring, supervising, and controlling the follow-up of investigation results in accordance with the decisions that have been made.
7. Monitoring and evaluating fraud incidents and determining follow-up to resolve fraud incidents accompanied by efforts to minimize potential losses for the Company.
8. Conducting a review of fraud incidents that have occurred to determine the root of the problem, the impacts caused by the fraud incident and improvements to the internal control system that need to be made so that fraud incidents do not recur.



PROFIL KEPALA UNIT ENTERPRISE RISK & ANTI- FRAUD MANAGEMENT

PROFILE OF THE HEAD OF ENTERPRISE RISK & ANTI-FRAUD MANAGEMENT UNIT

Michael Helmi Pratama

Kepala Unit Anti-Fraud Management | Head of Anti-Fraud Management Unit

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun

Indonesian citizen, 43 years old

Riwayat Pendidikan Educational Background

Sertifikasi Certification

Riwayat Karier Career History

DIII Fakultas Sastra Inggris UNDIP Semarang

Sertifikasi Managerial APPI OJK

Diploma III, Faculty of English Literature,
Diponegoro University, Semarang

OJK APPI Managerial Certification

- 2005: PT Finansia Multifinance – Credit Marketing Officer
- 2005 – 2008: PT Finansia Multifinance – Credit Analyst
- 2008 – 2009: PT Finansia Multifinance – Kepala Pos
- 2009 – 2013: PT Finansia Multifinance – Branch Manager
- 2013 – 2017: PT Finansia Multifinance – Area Credit Manager
- 2017 – 2022: PT KB Finansia Multifinance – Credit Operation Manager
- 2022 – 2025: PT KB Finansia Multifinance – Deputy Head of Credit Operation
- 2025 – present: PT KB Finansia Multifinance – Deputy Head of Anti-Fraud Management

- 2005: PT Finansia Multifinance – Credit Marketing Officer
- 2005 – 2008: PT Finansia Multifinance – Credit Analyst
- 2008 – 2009: PT Finansia Multifinance – Postmaster
- 2009 – 2013: PT Finansia Multifinance – Branch Manager
- 2013 – 2017: PT Finansia Multifinance – Area Credit Manager
- 2017 – 2022: PT KB Finansia Multifinance – Credit Operations Manager
- 2022 – 2025: PT KB Finansia Multifinance – Deputy Head of Credit Operations
- 2025 – present: PT KB Finansia Multifinance – Deputy Head of Anti-Fraud Management

STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam rangka memperkuat tata kelola dan menjaga integritas organisasi, Perseroan telah menyusun dan menetapkan Strategi Anti-Fraud yang efektif. Perseroan tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi melakukan penelaahan menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi profil risiko. Perseroan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, termasuk dinamika industri serta perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks dan adaptif. Kompleksitas kegiatan usaha dan variasi produk maupun layanan yang dijalankan juga menjadi perhatian, karena setiap lini bisnis memiliki karakteristik risiko yang berbeda.

Selain itu, Perseroan mengidentifikasi jenis-jenis *fraud* yang berpotensi terjadi dan menganalisis risiko terkait, baik dari sisi frekuensi kejadian maupun dampak finansial, operasional, hukum, dan reputasi yang dapat ditimbulkan. Seluruh analisis tersebut kemudian diselaraskan dengan kecukupan sumber daya yang dimiliki, mencakup kompetensi sumber daya manusia, keandalan sistem, serta infrastruktur pendukung, guna memastikan Strategi Anti-Fraud dapat diterapkan secara efektif, proporsional, dan berkelanjutan.

Sasaran strategi Anti-Fraud juga telah ditetapkan secara terukur dan selaras dengan profil risiko, serta rencana bisnis Perseroan.

ANTI-FRAUD STRATEGY

To strengthen governance and maintain organizational integrity, the Company has developed and implemented an effective Anti-Fraud Strategy. The Company focuses not only on formal compliance but also conducts a comprehensive review of various factors influencing its risk profile. The Company considers internal and external environmental conditions, including industry dynamics and increasingly complex and adaptive crime modes. The complexity of its business activities and the variety of products and services it operates are also taken into consideration, as each business line has different risk characteristics.

Furthermore, the Company identifies potential fraud types and analyzes the associated risks, both in terms of frequency of occurrence and the potential financial, operational, legal, and reputational impacts. All of this analysis is then aligned with the adequacy of its resources, including human resource competency, system reliability, and supporting infrastructure, to ensure the Anti-Fraud Strategy can be implemented effectively, proportionally, and sustainably.

The Anti-Fraud Strategy's objectives have also been measurably established and aligned with the Company's risk profile and business plan.



Sasaran tersebut antara lain mencakup peningkatan budaya integritas, penguatan sistem pengendalian internal, penurunan tingkat kejadian *fraud*, serta percepatan penyelesaian kasus yang teridentifikasi.

Penyusunan dan penerapan Strategi Anti-*Fraud* dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, dan Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

UPAYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN KORUPSI

Perseroan berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi prinsip GCG serta mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Salah satu langkah utamanya adalah penerapan pengendalian gratifikasi dan antikorupsi untuk mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini dituangkan dalam Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Pedoman SMAP) yang berlaku sejak 26 Juni 2023.

Pedoman SMAP berisi kebijakan dan panduan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan, serta berlaku bagi seluruh Insan Perseroan dan pihak ketiga yang bekerja sama. Penerapannya mencakup seluruh aktivitas operasional di Kantor Pusat, Kantor Cabang, maupun unit kerja lainnya. Untuk memastikan efektivitasnya, Pedoman SMAP disosialisasikan secara berkala dan menjadi acuan utama dalam menjaga integritas serta mencegah praktik penyuapan di lingkungan Perseroan.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, Perseroan juga menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-*Fraud* apabila ditemukan aktivitas *fraud*, dengan mengacu pada lampiran II POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat rincian kejadian *fraud*, antara lain: jenis *fraud*, jenis dan identitas pelaku, aktivitas dan lokasi kejadian, divisi/unit kerja tempat terjadinya *fraud*, pihak yang dirugikan, jumlah kerugian, kelemahan yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*, tindakan pengamanan yang telah dilakukan, langkah perbaikan yang diterapkan, jabatan dan status pelaku, sanksi yang dikenakan, serta status penanganan kasus *fraud* dimaksud.

These objectives include enhancing a culture of integrity, strengthening internal control systems, reducing the incidence of fraud, and accelerating the resolution of identified cases.

The preparation and implementation of the Anti-Fraud Strategy is carried out through four main pillars, namely the Prevention Pillar, the Detection Pillar, the Investigation, Reporting, and Sanctions Pillar, and the Monitoring, Evaluation, and Follow-up Pillar.

EFFORTS TO CONTROL GRATIFICATION AND CORRUPTION

The Company is committed to creating a healthy business environment by upholding GCG principles and complying with all laws and regulations. One of its key measures is the implementation of anti-gratification and anti-corruption controls to prevent actions that could potentially lead to conflicts of interest or practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This commitment is outlined in the Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP Guidelines), which took effect on June 26, 2023.

The SMAP Guidelines contain policies and guidelines for preventing, detecting, and handling bribery, and apply to all Company personnel and collaborating third parties. Their implementation covers all operational activities at the Head Office, Branch Offices, and other work units. To ensure their effectiveness, the SMAP Guidelines are regularly disseminated and serve as the primary reference for maintaining integrity and preventing bribery practices within the Company.

Furthermore, as part of strengthening its internal control and risk management systems, the Company also prepares and submits an Anti-Fraud Strategy Implementation Report if fraudulent activity is detected, referring to Attachment II of POJK 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.

The report should contain at least the following details of the fraud incident: the type of fraud, the type and identity of the perpetrator, the activity and location of the incident, the division/work unit where the fraud occurred, the affected party, the amount of the loss, the weaknesses that caused the fraud, the security measures taken, the corrective measures implemented, the position and status of the perpetrator, the sanctions imposed, and the status of the fraud case.



Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perseroan mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan risiko.

The report must be submitted no later than 3 (three) business days after the Company becomes aware of the fraud with significant impact, as a form of compliance with regulatory requirements and the Company's commitment to maintaining transparency and accountability in risk management.

TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTIKORUPSI

Perseroan telah merumuskan Pedoman SMAP dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Perseroan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Sebagai panduan dalam pengendalian tindak penyuapan, melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral;
3. Membentuk lingkungan yang sadar dan paham dalam menangani/mengendalikan segala bentuk penyuapan; serta
4. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh Insan Perseroan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

THE PURPOSE OF GRATIFICATION CONTROL AND ANTI CORRUPTION

The Company has formulated the SMAP Guidelines with the following main objectives:

1. Realizing Company Personnel who are clean and free from corruption, collusion and nepotism;
2. As a guide in controlling bribery, through efforts that are not only aimed at prevention but also to detect and conduct investigations and improve the system as part of an integral strategy;
3. Forming an environment that is aware and understands how to handle/control all forms of bribery; and
4. To improve the understanding and compliance of all Company Personnel with Anti-Bribery Management System.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI/ANTI-FRAUD TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten melaksanakan program edukasi dan pengembangan kompetensi Antikorupsi/Anti-Fraud sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai ketentuan dalam Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), termasuk definisi penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS. Pelatihan dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti kelas tatap muka maupun webinar dengan rincian sebagai berikut:

1. *Training Offline Anti-Fraud* untuk Karyawan; dan
2. *Training Online Anti-Fraud* untuk Karyawan.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) sesi sosialisasi dan pelatihan yang diikuti oleh 1.040 (seribu empat puluh) karyawan dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Kegiatan ini dirancang untuk memastikan seluruh karyawan dan manajemen memahami, mematuhi, dan menerapkan prinsip antipenyuapan, sekaligus mampu mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik kepentingan, gratifikasi, atau praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

ANTI-CORRUPTION/ANTI-FRAUD TRAINING/SOCIALIZATION IN 2025

Throughout 2025, the Company consistently implemented Anti-Corruption/Anti-Fraud education and competency development programs as part of its commitment to improving employee understanding of the provisions of the Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP), including the definitions of bribery, gratuities, conflicts of interest, and the reporting mechanism for suspected violations through the WBS. The training was conducted through various methods, including face-to-face classes and webinars, as follows:

1. *Offline Anti-Fraud Training* for Employees; and
2. *Online Anti-Fraud Training* for Employees.

The socialization program consisted of 13 (thirteen) socialization and training sessions attended by 1,040 (one thousand forty) employees from the Head Office and Branch Offices. These activities were designed to ensure that all employees and management understand, comply with, and apply anti-bribery principles, while simultaneously identifying and avoiding potential conflicts of interest, gratuities, or corrupt practices in carrying out their daily duties.



Program edukasi berkelanjutan ini tidak hanya memperkuat kepatuhan dan integritas internal, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi Perseroan dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan mitra bisnis, sehingga kegiatan usaha dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

EDUKASI DAN/ATAU SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI-FRAUD BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai wujud komitmen dalam menerapkan Strategi Anti-Fraud secara menyeluruh, Perseroan secara aktif melaksanakan edukasi dan/atau sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi/Anti-Fraud kepada para pemangku kepentingan eksternal, termasuk konsumen, mitra kerja, vendor, agen, dan pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan Perseroan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha memahami standar integritas dan kepatuhan yang berlaku. Pada 2025, sosialisasi melalui media Website, Kreditplus Mobile, dan Email pada periode Mei dan November 2025. Selain itu, Perseroan juga menerapkan Ikatan Pakta Integritas yang mewajibkan vendor atau pihak eksternal untuk membaca dan memahami kebijakan terkait AFM.

KEJADIAN FRAUD YANG BERSIFAT SIGNIFIKAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat/mencatat adanya kejadian *fraud* yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan, operasional, maupun reputasi Perseroan.

Dalam hal terdapat indikasi atau kejadian *fraud*, Perseroan memastikan setiap kasus ditindaklanjuti melalui prosedur penanganan yang telah ditetapkan, termasuk proses investigasi secara independen dan objektif, pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta penyampaian laporan kepada regulator apabila memenuhi kriteria pelaporan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This ongoing education program not only strengthens internal compliance and integrity, but also serves as an important foundation for the Company in building stakeholder trust, including investors, regulators, and business partners, so that business activities can be carried out in a transparent, accountable, and sustainable manner.

EDUCATION AND/OR SOCIALIZATION OF ANTI-FRAUD POLICIES FOR STAKEHOLDERS

As part of its commitment to fully implementing its Anti-Fraud Strategy, the Company actively conducts education and/or outreach regarding its Anti-Corruption/Anti-Fraud Policy to external stakeholders, including consumers, business partners, vendors, agents, and other parties with whom the Company has a business relationship. This initiative is undertaken to ensure that all parties involved in business activities understand the applicable standards of integrity and compliance. In 2025, outreach will be conducted via the Company's website, the Kreditplus Mobile app, and email during the periods of May and November 2025. Additionally, the Company has implemented an Integrity Pledge requiring vendors or external parties to read and understand policies related to AFM.

SIGNIFICANT FRAUD EVENTS IN 2025

Throughout 2025, the Company did not record any fraud incidents that significantly impacted its financial condition, operations, or reputation.

In the event of any indication or incident of fraud, the Company ensures that each case is followed up through established procedures, including an independent and objective investigation, the imposition of sanctions in accordance with applicable regulations, and the submission of reports to regulators if they meet reporting criteria. All these stages are carried out in accordance with internal policies and applicable laws and regulations.



Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) Program

KEBIJAKAN APU, PPT, & PPSPM DI PERSEROAN

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berkomitmen pada praktik usaha yang bersih, aman, dan berintegritas, Perseroan menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Kebijakan ini diatur melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KB FMF/XII/2023, sebagai langkah internalisasi dari POJK No. 8 Tahun 2023 mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPSPM di sektor jasa keuangan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan Perseroan mematuhi hukum dan peraturan domestik, sekaligus mencegah Perseroan digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Dalam implementasinya, Perseroan menjalankan serangkaian kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan seluruh transaksi, nasabah, serta pihak ketiga yang bekerja sama. Setiap aktivitas pembiayaan diawasi secara cermat untuk mendeteksi potensi transaksi yang mencurigakan, mendukung kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta memitigasi risiko terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang diterapkan Perseroan dalam rangka meminimalkan risiko terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM:

1. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*/"CDD") dan (*Enhanced Due Diligence*/"EDD")
 - Melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) bagi seluruh calon nasabah.
 - Menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk calon nasabah berisiko tinggi.
 - Memeriksa riwayat keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang dan memastikan kesesuaian profil serta tujuan pengajuan aplikasi.
 - Mendeteksi dan mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berpotensi terkait TPPU, TPPT, atau PPSPM.

AML, CFT, & WMD POLICY IN THE COMPANY

As a finance company committed to clean, safe, and integrity-based business practices, the Company implements an Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) Policy. This policy is regulated through Board of Commissioners Decree No. 004/KB FMF/XII/2023, as an internalization of POJK No. 8 of 2023 concerning the implementation of AML, CFT, and WMD programs in the financial services sector. This policy is designed to ensure the Company complies with domestic laws and regulations, while preventing the Company from being used as a vehicle for Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (PF-WMD).

In its implementation, the Company maintains a series of policies, procedures, and internal controls that include the identification, verification, and monitoring of all transactions, customers, and collaborating third parties. Every financing activity is closely monitored to detect potential suspicious transactions, support compliance with regulatory requirements, and mitigate risks related to ML, TF, PF-WMD.

The following are the steps implemented by the Company to minimize risks related to money laundering, TF, and PPSPM:

1. Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD)
 - Conducting Customer Due Diligence (CDD) for all prospective customers.
 - Implementing Enhanced Due Diligence (EDD) for prospective high-risk customers.
 - Checking for any history of involvement in money laundering and ensuring the suitability of the profile and purpose of the application.
 - Detecting and preventing Suspicious Financial Transactions potentially related to money laundering, TF, or PPSPM.



2. *Due Diligence* dalam Proses SDM (*Know Your Employee*/"KYE")

- Melakukan *Know Your Employee* (KYE) dalam proses rekrutmen.
- Memverifikasi latar belakang calon karyawan untuk memastikan tidak memiliki rekam jejak pelanggaran integritas, kode etik, maupun keterlibatan dalam TPPU atau tindak pidana lainnya.
- Menjaga integritas dan kualitas SDM di semua jenjang organisasi.

Selain menerapkan prosedur di atas, Perseroan juga secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan, manajemen, dan pihak terkait guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban APU, PPT, dan PPPSPM. Implementasi program ini diawasi secara konsisten oleh unit kepatuhan yang pelaporannya dilakukan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehingga setiap risiko dapat dikelola secara efektif dan tepat waktu.

Melalui penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang konsisten, Perseroan menegaskan posisinya sebagai lembaga pembiayaan yang patuh hukum, transparan, dan terpercaya, sekaligus memperkuat kepercayaan investor, regulator, dan mitra bisnis, serta mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

PELATIHAN TERKAIT PROGRAM APU, PPT & PPPSPM TAHUN 2025

Dalam rangka memperkuat kepatuhan terhadap Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM, Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi di tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

No.	Materi Pendidikan/Pelatihan Educational/Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
1.	APU PPT PPPSPM – (<i>Onboarding Employees</i>)	5 Mei 2025 May 5, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
2.	APU PPT PPPSPM di Kantor Cabang Bogor APU PPT PPPSPM at Bogor Branch Office	9 Juni 2025 June 9, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
3.	APU PPT PPPSPM – (<i>Onboarding Employees</i>)	10 Juli 2025 July 10, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
4.	APU PPT PPPSPM pada <i>Event</i> Bulan Kepatuhan APU PPT PPPSPM at the Compliance Month Event	18 September 2025 September 18, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Internal Compliance Dept.
5.	APU PPT PPPSPM – (<i>Onboarding Employees</i>)	13 Oktober 2025 October 13, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
6.	APU PPT PPPSPM – (<i>Onboarding Employees</i>)	8 Desember 2025 December 8, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.
7.	APU PPT PPPSPM <i>for Executive Management</i>	10 Desember 2025 December 10, 2025	Regulatory Compliance Dept. & Hukum Online
8.	APU PPT PPPSPM <i>e-learning</i>	Januari–Desember 2025 January–December 2025	Regulatory Compliance Dept. & Learning & Development Dept.

2. Due Diligence in HR Processes (*Know Your Employee*/ KYE)

- Conducting *Know Your Employee* (KYE) during the recruitment process.
- Verify the background of prospective employees to ensure they have no track record of integrity violations, code of ethics violations, or involvement in money laundering (TPPU) or other crimes.
- Maintain the integrity and quality of human resources at all levels of the organization.

In addition to implementing the above procedures, the Company also regularly conducts various training and outreach activities for all employees, management, and related parties to increase awareness and understanding of AML, PPT, and PPPSPM obligations. The implementation of these programs is consistently monitored by the compliance unit, which reports regularly to the Board of Directors and Board of Commissioners so that all risks can be managed effectively and timely.

Through the consistent implementation of AML, PPT, and PPPSPM programs, the Company affirms its position as a legally compliant, transparent, and trusted financing institution, while strengthening the trust of investors, regulators, and business partners, and supporting long-term business sustainability.

TRAINING FOR AML, CFT & WMD PROGRAM IN 2025

In order to strengthen compliance with the AML, CFT, and WMD Policies, the Company will hold various training and outreach activities in 2025, namely as follows:



PELAKSANAAN PROGRAM APU, PPT, & PPPSPM TAHUN 2025

Dalam rangka memperkuat kepatuhan terhadap Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah menjalankan serangkaian program strategis guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi serta menangani potensi risiko terkait TPPU, TPPT, dan PPPSPM. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama periode pelaporan, meliputi:

IMPLEMENTATION OF AML, CFT, & WMD PROGRAMS IN 2025

To strengthen compliance with the AML, CFT, and WMD policies, the Company implemented a series of strategic programs throughout 2025 to improve understanding, awareness, and practical skills in identifying and addressing potential risks related to ML, TF, and PPSPM. Several activities undertaken during the reporting period include:

No.	Nama Aktivitas Name of Activity	Keterangan Description
1.	Melakukan program pengkinian data konsumen terkategori Risiko Tinggi dan Menengah Conducting a data update program for consumers categorized as High and Medium Risk	Program Pengkinian Data telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 melalui kolaborasi dengan unit Desk Collection, dengan total 6.744 konsumen yang telah berhasil terverifikasi. The Data Update Program has been implemented throughout 2025 through collaboration with the Desk Collection unit, with a total of 6,744 consumers successfully verified.
2.	Melakukan program pemeriksaan ulang EDD (Re-EDD) untuk konsumen terkategori Risiko Tinggi dan Menengah Conducting an EDD re-examination program (Re-EDD) for consumers categorized as High and Medium Risk	Sebanyak 1.636 konsumen telah dilakukan Re-EDD untuk memastikan tidak ada potensi transaksi keuangan mencurigakan. A total of 1,636 consumers have undergone Re-EDD to ensure there is no potential for suspicious financial transactions.
3.	Secara rutin melakukan pemeriksaan daftar DTTOT dan Watchlist terhadap konsumen dan karyawan Regularly conduct DTTOT and Watchlist checks on consumers and employees	Dilakukan secara rutin setiap bulan Done regularly every month
4.	Melakukan pelaporan terhadap potensi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada Regulator Reporting potential suspicious financial transactions and cash financial transactions to the Regulator	Pelaporan dilakukan jika terdapat adanya potensi transaksi keuangan mencurigakan dan permintaan khusus dari regulator. Reporting is carried out if there is potential for suspicious financial transactions and special requests from regulators.
5.	Melakukan <i>self-assessment</i> terhadap penerapan dan tingkat risiko APU PPT PPPSPM yang hasilnya dilaporkan kepada OJK Conducting a self-assessment of the implementation and risk level of APU PPT PPPSPM, the results of which are reported to the OJK	- Laporan Individual Risk Assessment (IRA) - Laporan Penilaian Tingkat Risiko (PTR) - Individual Risk Assessment (IRA) Report - Risk Level Assessment (PTR) Report
6.	Ikut serta dalam Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing 2025 yang diselenggarakan oleh PPATK Participated in the 2025 Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing organized by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)	PT KB Finansia Multi Finance memperoleh nilai FIR sebesar 9.43 (Kategori Sangat Baik), dengan kontribusi nilai dari Dimensi 1 (9.16), Dimensi 2 (9.43), dan Dimensi 3 (9.86). Skor ini mencerminkan komitmen tinggi Perseroan dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum melalui implementasi tata kelola, kepatuhan, serta kualitas pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang sangat baik sesuai ketentuan yang berlaku. PT KB Finansia Multi Finance received an FIR score of 9.43 (Very Good), with contributions from Dimension 1 (9.16), Dimension 2 (9.43), and Dimension 3 (9.86). This score reflects the Company's strong commitment to supporting the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and law enforcement agencies through the implementation of excellent governance, compliance, and high-quality reporting of AML, CFT, and PPPSPM in accordance with applicable regulations.
7.	Meningkatkan akurasi deteksi transaksi mencurigakan pada alur pembiayaan melalui penguatan infrastruktur sistem IT Improve the accuracy of detecting suspicious transactions in financing flows by strengthening IT system infrastructure	Pengembangan sistem didasarkan pada hasil evaluasi pengujian terhadap sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. The system development is based on the results of testing evaluations of suspicious financial transaction detection systems.
8.	Menyelenggarakan pelatihan kepada karyawan terkait mengenai penerapan APU PPT PPPSPM Conduct training for related employees regarding the implementation of APU PPT PPPSPM	Pelatihan akan diselenggarakan secara <i>online e-learning</i> dan <i>online/offline tatap muka</i> dengan narasumber. The training will be held online via e-learning and online/offline face-to-face with the resource person.



RENCANA KERJA APU, PPT, & PPPSPM TAHUN 2026

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyusun Rencana Kerja APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2026 sebagai langkah strategis lanjutan untuk memperkuat pengendalian risiko, meningkatkan efektivitas prosedur internal, serta memastikan seluruh proses bisnis tetap patuh terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian. Fokus utama kegiatan yang akan dilakukan Perseroan di tahun depan, adalah sebagai berikut:

AML, CFT, & WMD WORK PLAN IN 2026

Based on the evaluation of program implementation throughout 2025, the Company has prepared the 2026 AML, CFT, and WMD Work Plan as a strategic follow-up to strengthen risk control, improve the effectiveness of internal procedures, and ensure all business processes remain compliant with regulations and prudential principles. The Company's main focus activities next year are as follows:

No.	Nama Aktivitas Name of Activity	Keterangan Description
1.	Melanjutkan program pengkinian data konsumen terkategori Risiko Tinggi dan Menengah Continuing the program to update consumer data categorized as High and Medium Risk	Program Pengkinian Data akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 melalui kolaborasi dengan unit Desk Collection. The Data Update Program will be implemented throughout 2025 through collaboration with the Desk Collection unit.
2.	Melanjutkan program pemeriksaan ulang EDD (Re-EDD) untuk konsumen terkategori Risiko Tinggi dan Menengah. Continuing the EDD re-examination (Re-EDD) program for consumers categorized as High and Medium Risk.	Konsumen yang menjadi target pemeriksaan ulang Re-EDD adalah konsumen yang berdasarkan Consumers who are the target of the Re-EDD re-examination are consumers who are based on
3.	Melanjutkan program pemeriksaan daftar DTTOT dan Watchlist terhadap konsumen dan karyawan. Continue the DTTOT and Watchlist check program for consumers and employees.	Dilakukan secara rutin setiap bulan Done regularly every month
4.	Melakukan pelaporan terhadap potensi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada Regulator Reporting potential suspicious financial transactions and cash financial transactions to the Regulator	Pelaporan dilakukan jika terdapat adanya potensi transaksi keuangan mencurigakan dan permintaan khusus dari regulator. Reporting is carried out if there is potential for suspicious financial transactions and special requests from regulators.
5.	Melakukan <i>self-assessment</i> terhadap penerapan dan tingkat risiko APU PPT PPPSPM yang hasilnya dilaporkan kepada OJK Conducting a self-assessment of the implementation and risk level of APU PPT WMD, the results of which are reported to the OJK.	- Laporan Individual Risk Assessment (IRA) - Laporan Penilaian Tingkat Risiko (PTR) - Individual Risk Assessment (IRA) Report - Risk Level Assessment (PTR) Report
6.	Ikut serta dalam Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR) 2026 yang akan diselenggarakan oleh PPATK Participate in the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR) 2026, which will be held by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).	Pelaksanaan akan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh PPATK Implementation will follow the schedule set by PPATK
7.	Meningkatkan akurasi deteksi transaksi mencurigakan pada alur pembiayaan melalui penguatan infrastruktur sistem IT Improve the accuracy of detecting suspicious transactions in financing flows by strengthening IT system infrastructure.	Pengembangan sistem didasarkan pada hasil evaluasi pengujian terhadap sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. The system development is based on the results of testing evaluations of suspicious financial transaction detection systems.
8.	Menyelenggarakan pelatihan kepada karyawan terkait mengenai penerapan APU PPT PPPSPM Conduct training for related employees regarding the implementation of APU PPT WMD	Pelatihan akan diselenggarakan secara <i>online e-learning</i> dan <i>online/offline</i> tatap muka dengan narasumber. The training will be held online via e-learning and online/offline face-to-face with the resource person.
9.	Mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga Penyedia Jasa platform teknologi terpadu di Indonesia yang menyediakan solusi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Establishing cooperation with Third Party Integrated Technology Platform Service Providers in Indonesia that provide Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU PPT) solutions.	Platform teknologi ini akan mendukung Unit Kerja Khusus dalam melaksanakan pemeriksaan EDD secara komprehensif, sekaligus menjamin kualitas hasil pemeriksaannya. This technology platform will support the Special Task Force in conducting comprehensive EDD audits, while ensuring the quality of the audit results.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan berkomitmen menyediakan akses informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyampaian informasi dilakukan melalui saluran resmi yang dikelola secara terstruktur sehingga seluruh data Perseroan dapat diakses sesuai kebutuhan, tanpa mengurangi perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan strategis.

Dalam praktik keterbukaan informasi, Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan informasi material kepada regulator. Selain itu, Perseroan memanfaatkan platform komunikasi resmi, seperti situs web Perseroan, publikasi, laporan keuangan, dan laporan tahunan, untuk menyampaikan informasi yang lengkap mengenai kinerja, tata kelola, dan aktivitas operasional.

Untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keberlangsungan informasi, Perseroan menerapkan pengendalian internal dan kebijakan keamanan data yang ketat. Akses terhadap data internal hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan upaya mitigasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

MEDIA ELEKTRONIK

Perseroan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi secara efektif dan transparan kepada publik. Situs web resmi Perseroan di www.kreditplus.com dirancang untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi terkait aktivitas dan kinerja Perseroan.

Situs web ini memuat berbagai informasi penting, termasuk data korporat, hubungan investor, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, produk dan layanan, laporan keuangan, informasi dividen, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, informasi atau fakta material, serta berbagai kegiatan Perseroan. Dengan pemanfaatan media elektronik ini, Perseroan memastikan transparansi, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company is committed to providing transparent, accurate, and timely access to information for all stakeholders. Information is disseminated through structured official channels, ensuring that all company data can be accessed as needed, without compromising the protection of confidential and strategic information.

In its information disclosure practices, the Company complies with all statutory provisions, including the obligation to submit periodic reports, incidental reports, and material information to regulators. Furthermore, the Company utilizes official communication platforms, such as the company website, publications, financial reports, and annual reports, to convey comprehensive information regarding performance, governance, and operational activities.

To maintain the confidentiality, integrity, and continuity of information, the Company implements strict internal controls and data security policies. Access to internal data is granted only to authorized parties, in line with the principle of prudence and efforts to mitigate the risk of information leakage or misuse.

ELECTRONIC MEDIA

The Company utilizes electronic media as its primary means of effectively and transparently conveying information to the public. The Company's official website at www.kreditplus.com is designed to facilitate stakeholders' access to information related to the Company's activities and performance.

This website contains a variety of important information, including corporate data, investor relations, corporate governance, social responsibility, products and services, financial reports, dividend information, annual reports, sustainability reports, material information or facts, and various Company activities. By utilizing electronic media, the Company ensures transparency, openness, and accessibility of relevant information for all stakeholders.



MEDIA SOSIAL

Perseroan memanfaatkan media sosial sebagai jendela interaktif untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara lebih luas dan langsung. Melalui platform ini, Perseroan menyampaikan informasi yang terkini, relevan, dan akurat, mulai dari produk dan layanan, agenda kegiatan korporasi, hingga berbagai inisiatif strategis yang mendukung pencapaian tujuan bisnis.

Pendekatan yang interaktif memungkinkan Perseroan membangun hubungan yang lebih dekat dan transparan dengan publik, sekaligus memperkuat citra sebagai perusahaan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Akun resmi media sosial Perseroan menjadi sarana penting untuk memastikan informasi dapat diakses secara mudah, tepat waktu, dan konsisten.

MEDIA KOMUNIKASI INTERNAL

Perseroan senantiasa membangun komunikasi yang efektif di internal organisasi untuk memastikan seluruh karyawan memiliki visi dan misi yang selaras dengan Perseroan, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas bisnis. Untuk itu, Perseroan menyediakan berbagai media komunikasi internal yang mudah diakses, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik, seperti WhatsApp, email, dan majalah Perseroan.

Dengan tersedianya berbagai kanal komunikasi ini, Perseroan memastikan informasi yang disampaikan valid, relevan, dan dapat diandalkan bagi seluruh karyawan, sehingga tercipta koordinasi yang baik, pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan dan strategi Perseroan, serta budaya kerja yang kohesif dan produktif.

SOCIAL MEDIA

The Company utilizes social media as an interactive platform to reach all stakeholders more broadly and directly. Through this platform, the Company delivers up-to-date, relevant, and accurate information, ranging from products and services, corporate activity agendas, to various strategic initiatives that support the achievement of business goals.

This interactive approach enables the Company to build closer and more transparent relationships with the public, while strengthening its image as an open and responsive company to stakeholder needs. The Company's official social media accounts serve as a crucial tool to ensure information is easily accessible, timely, and consistent.

INTERNAL COMMUNICATION MEDIA

The Company consistently fosters effective internal communication to ensure all employees share the same vision and mission, while simultaneously supporting the smooth implementation of business activities. To this end, the Company provides various easily accessible internal communication channels, both print and electronic, such as WhatsApp, email, and the company magazine.

By providing these various communication channels, the Company ensures that the information disseminated is valid, relevant, and reliable for all employees, thus fostering effective coordination, a comprehensive understanding of company policies and strategies, and a cohesive and productive work culture.



Pemberian Dana/Donasi untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision of Funds/Donations for Social and Political Activities

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam hal pemberian dana atau donasi, Perseroan menerapkan kebijakan yang mengatur tata cara, kriteria, dan batasan pemberian bantuan, sehingga seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian dana atau donasi hanya diperuntukkan bagi kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat yang sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan. Setiap bentuk bantuan melalui proses evaluasi, dokumentasi, dan persetujuan berjenjang untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan Perseroan serta menghindari potensi konflik kepentingan.

Perseroan secara tegas tidak memberikan kontribusi atau dukungan dalam bentuk apapun kepada kegiatan politik, partai politik, calon legislatif, calon kepala daerah, atau pihak yang terlibat dalam aktivitas politik praktis. Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan pemberian dana dan donasi untuk kegiatan sosial maupun politik, sejalan dengan kebijakan internal dan prinsip integritas Perseroan.

The Company is committed to conducting its business activities responsibly and making a positive contribution to society. When providing funds or donations, the Company implements policies that govern the procedures, criteria, and limits for providing assistance, ensuring that the entire process is transparent, accountable, and in accordance with applicable laws and regulations.

Funds or donations are allocated solely for social, humanitarian, educational, and community development activities that align with the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) program. All forms of assistance undergo a multi-level evaluation, documentation, and approval process to ensure alignment with the company's objectives and avoid potential conflicts of interest.

The Company strictly prohibits any contributions or support in any form to political activities, political parties, legislative candidates, regional head candidates, or parties involved in practical political activities. By 2025, the Company will refrain from providing funds or donations for social or political activities, in line with internal policies and the company's integrity principles.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Long-Term Performance-Based Compensation Policy

Perseroan tidak menerapkan skema pemberian insentif jangka panjang dalam bentuk kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/"MSOP") maupun oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/"ESOP").

The Company does not implement a long-term incentive scheme in the form of share ownership by management (*Management Stock Ownership Program*/"MSOP") or by employees (*Employee Stock Ownership Program*/"ESOP").



Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Information Disclosure Policy Regarding Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

Perseroan menempatkan transparansi kepemilikan saham sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Mengacu pada Pasal 93 POJK 48/2024, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih, baik di Perseroan maupun di perusahaan lain baik di dalam atau pun luar negeri. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Direksi, serta dilaporkan secara rutin melalui Laporan Tata Kelola Perseroan kepada OJK.

Seluruh informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung, disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada Sub Bab Struktur dan Komposisi Pemegang Saham. Dengan langkah ini, Perseroan memastikan pemangku kepentingan menerima informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya, mendukung praktik tata kelola yang baik dan transparan.

The Company places share ownership transparency as a crucial component of corporate governance. Pursuant to Article 93 of POJK 48/2024, each member of the Board of Directors and Board of Commissioners is required to disclose share ownership of 5% or more, both in the Company and in other companies, both domestic and international. This provision is also stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Guidelines, and is regularly reported through the Corporate Governance Report to the OJK.

All share ownership information of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, both direct and indirect, is presented in the Company Profile chapter, under the Shareholder Structure and Composition sub-chapter. This step ensures that stakeholders receive clear, accurate, and reliable information, supporting good and transparent governance practices.

Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practices

Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip GCG termasuk dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani potensi praktik *bad corporate governance*. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat indikasi pelanggaran prinsip tata kelola, dan seluruh aktivitas operasional terus dipantau melalui mekanisme pengawasan internal serta sistem pelaporan yang efektif sehingga dilaksanakan secara bertanggung jawab, patuh peraturan, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.

The Company is committed to implementing GCG principles, including identifying, reporting, and addressing potential bad corporate governance practices. Throughout 2025, there were no indications of violations of governance principles, and all operational activities were continuously monitored through internal oversight mechanisms and an effective reporting system, ensuring they were carried out responsibly, in compliance with regulations, and oriented toward stakeholder interests.



Pelanggaran Hukum, terkait Perburuhan/Tenaga Kerja/ Konsumen/Ketidakmampuan Melunasi Kewajiban/ Perdagangan/Persaingan/Lingkungan Hidup

Violation of Law, Related to Labor/Workforce/Consumers/Inability to Settle Obligations/Trade/Competition/Environment

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi pelanggaran hukum terkait aspek perburuhan, tenaga kerja, perlindungan konsumen, ketidakmampuan melunasi kewajiban, perdagangan, persaingan usaha, maupun lingkungan hidup.

Throughout 2025, the Company did not face any legal violations related to labor, employment, consumer protection, inability to pay obligations, trade, business competition, or the environment.

Kebijakan untuk Mencegah Terjadinya *Insider Trading*

Policy to Prevent Insider Trading

Sampai dengan akhir 2025, Perseroan belum memiliki kebijakan khusus terkait *insider trading*, akan tetapi langkah-langkah pencegahan tetap diterapkan melalui ketentuan internal yang mengedepankan integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Larangan benturan kepentingan yang tercantum dalam Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan, anggota komite, Direksi, dan Dewan Komisaris, memastikan setiap pengambilan keputusan bebas dari kepentingan pribadi.

Perseroan juga menerapkan proses contract management yang mewajibkan *pitching* sebelum penunjukan rekanan atau vendor guna menjamin objektivitas dan keterbukaan dalam kerja sama. Keberadaan WBS turut melengkapi mekanisme ini dengan menyediakan saluran bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan indikasi benturan kepentingan yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional.

Selain itu, setiap keputusan kerja sama dengan pihak afiliasi harus melalui prosedur persetujuan formal, sesuai Pasal 13 ayat 2.a.ii Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS Luar Biasa. Dengan mekanisme ini, Perseroan memastikan seluruh keputusan strategis dijalankan secara transparan, akuntabel, dan patuh pada prinsip tata kelola yang baik, sekaligus meminimalkan risiko praktik *insider trading*.

As of the end of 2025, the Company does not have a specific policy regarding insider trading. However, preventative measures are implemented through internal regulations that prioritize integrity, transparency, and good governance. The prohibition on conflicts of interest stipulated in the Company's Code of Ethics applies to all employees, committee members, the Board of Directors, and the Board of Commissioners, ensuring that all decision-making is free from personal interests.

The Company also implements a contract management process that requires pitching before appointing partners or vendors to ensure objectivity and transparency in collaboration. The WBS complements this mechanism by providing a channel for employees and external parties to report any indications of conflicts of interest, which are then followed up professionally.

Furthermore, every decision to collaborate with affiliated parties must undergo a formal approval procedure, in accordance with Article 13 paragraph 2.a.ii of the Company's Articles of Association, which requires approval from the Board of Commissioners and an Extraordinary GMS. With this mechanism, the Company ensures that all strategic decisions are implemented transparently, accountably, and in accordance with the principles of good governance, while minimizing the risk of insider trading practices.



Kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok

Policy on Supplier Selection and Capability Improvement

Perseroan menerapkan kebijakan seleksi pemasok yang transparan dan berkeadilan guna memastikan setiap pemasok yang terlibat memiliki kapabilitas, integritas, dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang mencakup kemampuan teknis, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

Selain seleksi awal, Perseroan juga mendorong peningkatan kemampuan pemasok melalui mekanisme evaluasi dan program pengembangan sehingga kemitraan yang terjalin tidak hanya memenuhi standar saat ini tetapi juga berkontribusi pada efisiensi operasional, kualitas layanan, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkesinambungan.

The Company implements a transparent and fair supplier selection policy to ensure that each supplier engaged possesses the capabilities, integrity, and quality standards that align with operational needs. The selection process is based on criteria that include technical capability, regulatory compliance, and a commitment to sustainability principles.

In addition to initial selection, the Company also encourages supplier capacity building through evaluation mechanisms and development programs so that established partnerships not only meet current standards but also contribute to operational efficiency, service quality, and sustainable business practices. This policy aligns with the principles of good governance and supports the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.

Kebijakan tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Policy on Fulfillment of Creditors' Rights

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup pembayaran kewajiban tepat waktu, penyampaian informasi material yang relevan secara transparan, dan komunikasi yang terbuka serta profesional dengan kreditur.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang, Perseroan memastikan setiap aktivitas usaha dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga hak-hak kreditur terlindungi secara optimal, meskipun dalam berbagai kondisi operasional. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjunjung integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

The Company is committed to fulfilling all creditors' rights in accordance with agreed agreements and applicable laws and regulations. This policy includes timely payment of obligations, transparent delivery of relevant material information, and open and professional communication with creditors.

As part of its efforts to maintain trust and long-term relationships, the Company ensures that all business activities are conducted with the principles of prudence and good governance, ensuring that creditors' rights are optimally protected, even under various operational conditions. This approach reflects the Company's commitment to upholding integrity, accountability, and business sustainability.



Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

07

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	400
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	410
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance	420
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Annual Report of Issuers or Public Companies	455
Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index	467
Lampiran Umpan Balik Feedback Attachment	471





Tentang Laporan Keberlanjutan

About the Sustainability Report



“Perseroan senantiasa mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan pada seluruh aktivitas operasional dengan penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang bertanggung jawab untuk mendorong penciptaan nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.”

“The Company has always integrated sustainability principles across all operational activities with responsible Environmental, Social, and Governance (ESG) practices to drive the creation of sustainable value for the community and the environment.”



Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2025 dengan menggunakan kerangka penyusunan yang terintegrasi dengan Laporan Tahunan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 ("SEOJK 16/2021") tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 51/POJK.03/2017 ("POJK 51/2017") tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pendekatan integrasi ini memungkinkan Perseroan menghadirkan pengungkapan informasi yang lebih efektif dan efisien, mengurangi redundansi data, serta memastikan informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan saling melengkapi dan dipublikasikan dalam satu buku yang sama.

Dalam laporan ini, Perseroan memaparkan berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan pada aktivitas bisnis untuk mendukung keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environment, Social, Governance*/"ESG"), sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tidak terdapat perubahan signifikan pada penyajian angka keuangan maupun topik material dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh data dan informasi yang disajikan mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. [C.6]

The Company has issued its Sustainability Report for the fiscal year 2025 using a preparation framework integrated with the Annual Report. This report has been prepared in accordance with the provisions of SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 ("SEOJK 16/2021") concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as POJK No. 51/POJK.03/2017 ("POJK 51/2017") concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

This integrated approach enables the Company to present more effective and efficient information disclosure, reduce data redundancy, and ensure that the information in the Annual Report and Sustainability Report is complementary and published in a single book.

In this report, the Company outlines various strategic initiatives implemented within its business activities to support sustainability across environmental, social, and governance (ESG) aspects, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) principles.

There are no significant changes in the presentation of financial figures or material topics compared to the previous year. All data and information provided cover the period from January 1, 2025, to December 31, 2025. [C.6]



KOMITMEN DAN DUKUNGAN PENUH PERSEROAN TERHADAP PROGRAM KEUANGAN BERKELANJUTAN [A.1]

Dalam menjalankan bisnis di bidang pembiayaan, Perseroan menyadari bahwa penciptaan keberlanjutan usaha jangka panjang harus sejalan dengan upaya menjaga aspek ESG. Berdasarkan pemahaman ini, Perseroan secara konsisten menerapkan strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan tujuan bisnis dan dijalankan secara menyeluruh di seluruh aktivitas operasional untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Nilai-nilai keberlanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap inisiatif strategis rantai bisnis Perseroan. Prinsip-prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas strategis dengan target pencapaian yang terukur melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Dalam menyusun RAKB tahun 2025, Perseroan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta regulasi berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs);
7. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST); serta
8. Pedoman Keuangan Berkelanjutan PT KB Finansia Multi Finance.

Perseroan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Mengacu pada POJK 51/2017, delapan prinsip berikut menjadi landasan Perseroan dalam melaksanakan operasional dan menyalurkan pembiayaan hijau:

THE COMPANY'S FULL COMMITMENT AND SUPPORT FOR THE SUSTAINABLE FINANCE PROGRAM [A.1]

The Company realizes that it should align the creation of long-term business sustainability with maintaining ESG aspects in running its financing business. With that in mind, the Company has been very consistent in implementing a sustainability strategy that is integrated with business objectives and executing it comprehensively across all operations to support sustainable business growth.

Sustainability values have become an inseparable part of every strategic initiative in the Company's business chain. Sustainability principles are integrated into all strategic activities with measurable achievement targets through the Sustainable Finance Action Plan (SFAP).

In preparing the 2025 SFAP, the Company is guided by the following laws and regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which mandates the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility;
2. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
5. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
6. Sustainable Development Goals (SDGs) Principles;
7. Environmental, Social, and Governance (ESG) Aspects; and
8. PT KB Finansia Multi Finance Sustainable Finance Guidelines.

The Company is committed to conducting financing business activities that not only create economic value for shareholders but also provide a real positive impact on the environment and the community. Referring to POJK 51/2017, the following eight principles serve as the Company's foundation in carrying out operations and channeling green financing:



No.	Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan Principles of Sustainable Finance	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Prinsip Investasi Bertanggung Jawab Perseroan menerapkan investasi yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Dengan demikian, Perseroan dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas bisnis Perseroan. Responsible Investment The Company implements investments that consider economic, environmental, social, and governance factors in its investment decisions with the aim for better risk management and generate sustainable long-term profits. The implementation of this principle is carried out gradually according to the Company's conditions and complexity.	Perseroan menerapkan investasi yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Dengan demikian, Perseroan dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas bisnis Perseroan. The Company implements investments that consider economic, social, environmental, and governance aspects. In doing so, the Company can better manage risks and generate sustainable long-term returns. The implementation of these principles is carried out gradually in accordance with the Company's financial condition, structure, and business complexity.
2.	Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan Dalam menerapkan prinsip ini, Perseroan menekankan pentingnya penyusunan strategi keberlanjutan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis yang dimaksud dalam prinsip ini meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko kegiatan operasional pembiayaan. Sustainable Business Strategy and Practice Principle In applying this principle, the Company emphasizes the importance of preparing a sustainability strategy focusing on achieving long-term goals and determining short-term strategies that are part of efforts to achieve long-term goals. The strategies and business practices referred to in this principle include vision, mission, organizational structure, strategic plans, standard operating procedures, work programs to the determination of risk factors for financing operational activities.	Perseroan telah merumuskan dan menerapkan strategi berkelanjutan untuk periode 5 tahun (2025–2029). Strategi jangka panjang tersebut mencakup visi, misi, rencana strategis, prosedur operasional, struktur organisasi dan faktor risiko dari Perseroan. Adapun dalam penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan menetapkan kebijakan dan strategi bisnis sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profitabilitas Aset dengan memperkuat penjualan di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, meningkatkan proporsi produk yang sangat menguntungkan; dan mendorong bisnis baru. 2. Melakukan penghematan biaya dengan menerapkan proses pengajuan aplikasi pembiayaan berbasis <i>mobile</i> secara <i>online</i>, pengurangan tenaga kerja dan efisiensi organisasi melalui perbaikan proses kerja, dan memperluas cakupan penyaluran pembiayaan melalui <i>telemarketing</i> sebagai saluran akuisisi berbiaya rendah/produktivitas tinggi. 3. Penjaminan/elaborasi risiko dengan cara memperbaiki dan menguraikan strategi penjaminan bagi <i>unbanked</i>, menemukan segmen berkualitas tinggi melalui analisis portofolio yang luas dan meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan pinjaman jatuh tempo jangka pendek dan jangka menengah hingga panjang yang efisien melalui peningkatan strategi <i>Apps of Collection System</i>. 4. Memperkuat kemampuan operasional/manajemen dengan cara peningkatan modal dan pendanaan jangka panjang dan fleksibel, pengelolaan sumber daya manusia utama dan peningkatan kemampuan organisasi dan memperkuat sistem kepatuhan internal dan pelatihan kesadaran etika karyawan. The Company has formulated and implemented a sustainable strategy for a 5-year period (2025–2029). The long-term strategy includes the vision, mission, strategic plan, operational procedures, organizational structure, and risk factors of the Company. As for the implementation of sustainable finance, the Company sets the following business policies and strategies: 1. Increase Asset Profitability by strengthening sales in regions with high growth potential, increasing the proportion of highly profitable products, and driving new business. 2. Make cost savings by implementing an online mobile-based financing application process, reducing manpower and organizational efficiency through improved work processes, and expanding the scope of financing distribution through telemarketing as a low-cost/high-productivity acquisition channel. 3. Underwriting/risk elaboration by improving and elaborating underwriting strategy for the unbanked, finding high-quality segments through extensive portfolio analysis, and improving profitability through efficient management of short-term and medium- to long-term overdue loans through improved Apps of Collection System strategy. 4. Strengthen operational/management capabilities by raising long-term and flexible capital and funding, managing key human resources, enhancing organizational capabilities, and strengthening internal compliance systems and employee ethical awareness training.



No.	Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan Principles of Sustainable Finance	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
3.	Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya kepada debitur. Untuk memastikan terselenggaranya bisnis pembiayaan yang bertanggung jawab, Perseroan secara cermat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi risiko sosial dan lingkungan hidup yang berpotensi timbul dari kegiatan usaha yang dibiayai. Social and Environmental Risk Management Principle The Company consistently upholds the principle of prudence in extending financing to debtors. To ensure the implementation of responsible financing practices, the Company carefully identifies, measures, monitors, and mitigates social and environmental risks that may arise from the financed business activities.	Risiko lingkungan dan sosial adalah risiko yang timbul apabila Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan Pemerintah Indonesia maupun internasional mengenai lingkungan dan sosial atas pembiayaan produk yang dibiayai oleh Perseroan termasuk produk ramah lingkungan (<i>Green Financing Product</i>). Peraturan mengenai lingkungan dan sosial tersebut menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dampak risiko lingkungan dan sosial bagi Perseroan pada akhirnya akan memengaruhi tingkat kemampuan membayar debitur kepada Perseroan. Jika usaha-usaha yang dibiayai oleh Perseroan tidak berkelanjutan dan terganggu keberlangsungan bisnisnya, maka debitur akan kehilangan sumber pendapatan sehingga pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan untuk meminimalkan dampak atas risiko tersebut yaitu Perseroan melakukan penilaian kelayakan Kredit bahwa calon debitur yang dapat dibiayai telah memenuhi kriteria 5C dalam <i>framework</i> pembiayaan (<i>Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy</i>). Melalui analisis secara komprehensif, maka Perseroan dapat mengukur kelayakan kredit atas calon debitur yang akan diberikan pembiayaan. Environmental and social risk is the risk arising if the Company does not comply with and/or does not implement the Government of Indonesia and international environmental and social regulations on the financing of products financed by the Company including green products (<i>Green Financing Product</i>). Environmental and social regulations are the foundation for sustainable development that prioritizes harmony between economic, social, and environmental aspects. The impact of environmental and social risks on the Company will ultimately affect the level of ability to pay debtors to the Company. If the businesses financed by the Company are not sustainable and their business continuity is disrupted, the debtors will lose their source of income so that in the end they cannot fulfill their obligations to the Company. Risk mitigation carried out by the Company to minimize the impact of these risks is that the Company conducts a creditworthiness assessment that prospective debtors who can be financed have met the 5C criteria in the financing framework (<i>Character, Capital, Collateral, Capacity, and Condition of Economy</i>). Through comprehensive analysis, the Company can measure the creditworthiness of prospective debtors who will be given financing.
4.	Prinsip Tata Kelola Pelaksanaan seluruh kegiatan operasional maupun bisnis Perseroan senantiasa mengadopsi prinsip tata kelola berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran dalam seluruh kegiatan operasional Perseroan. Governance Principle The implementation of all operational and business activities of the Company always adopts the principles of sustainability governance by taking into account economic, environmental, and social aspects built on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, equality, and fairness in all operational activities of the Company.	Sebagai bagian dari KB Financial Group, Perseroan bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip (<i>Good Corporate Governance/ GCG</i>). Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>GCG</i>) pada setiap kegiatan usaha, sebagai dasar dalam mencapai visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas penerapan struktur dan proses <i>GCG</i> pada setiap tingkatan organisasi guna menjaga kelangsungan usaha serta memastikan <i>outcome</i> <i>GCG</i> yang lebih baik dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip <i>GCG</i>, antara lain dilakukan melalui budaya Perusahaan yang melekat bagi seluruh organ Perseroan dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, Perseroan juga mewujudkannya melalui layanan yang berintegritas dan profesional. Selain itu Perseroan juga senantiasa melakukan pengkinian standar penerapannya sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. As part of KB Financial Group, the Company is responsible for implementing <i>GCG</i> principles. The Company realizes the importance of implementing the principles of good corporate governance (<i>GCG</i>) in every business activity, as a basis for achieving the Company's vision and mission sustainably. Thus, the Company always improves the quality of the implementation of <i>GCG</i> structures and processes at every level of the organization in order to maintain business continuity and ensure better <i>GCG</i> outcomes in providing added value to shareholders and stakeholders. In its implementation, the implementation of <i>GCG</i> principles, among others, is carried out through the Corporate Culture that is inherent to all organs of the Company in carrying out activities. In addition, the Company also realizes it through services with integrity and professionalism. In addition, the Company also constantly updates its implementation standards in line with the development of applicable laws and regulations in accordance with the Company's business activities.



No.	Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan Principles of Sustainable Finance	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
5.	Prinsip Komunikasi yang Informatif Perseroan berkomitmen untuk menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif kepada para pemangku kepentingan mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek usaha. Perseroan secara berkala mempublikasikan laporan-laporan keterbukaan informasi yang mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Informative Communication Principle The Company is committed in preparing and providing informative reports covering strategy, governance, performance, and prospects. The reports should be easy to understand, accountable, and delivered through effective communication media and accessible to all Stakeholders.	Perseroan telah menyampaikan dan mempublikasikan kewajiban pelaporan baik laporan rutin, non-rutin dan insidental terhadap publik melalui saluran komunikasi resmi yang dimiliki Perseroan yaitu <i>website</i> Perseroan, surat kabar harian nasional dan juga penyampaian laporan kepada regulator The Company has submitted and published its reporting obligations, including routine, non-routine, and incidental reports, to the public through its official communication channels, namely the Company's website, national daily newspapers, and report submissions to regulators.
6.	Prinsip Inklusif Perseroan berusaha mewujudkan hadirnya pembiayaan yang inklusif dengan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan ataupun institusi non-perbankan. Inclusive Principle The Company strives to realize the presence of inclusive financing by ensuring the availability and affordability of financial products and/or services to all levels of society, including those who do not have access to banking products and/or services or non-banking institutions.	Bisnis inti Perseroan adalah memberikan produk pembiayaan. Namun demikian, selain memberikan produk pembiayaan investasi, modal kerja dengan agunan kendaraan bermotor, Perseroan juga memberikan pembiayaan dalam bentuk multiguna yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumtif barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga. Untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, Perseroan terus mengembangkan usahanya agar dapat diakses oleh masyarakat Indonesia melalui 116 Kantor Cabang dan 64 Kantor Selain Kantor Cabang yang dimiliki Perseroan. The Company's core business is to provide financing products. However, in addition to providing investment financing products, working capital with motor vehicle collateral, the Company also provides financing in the form of multipurpose, which can be used by the public for various consumptive needs for electronic goods and household appliances. To be able to reach all Indonesian people, the Company continues to develop its business to be accessible to the Indonesian people through 116 branch offices and 64 non-branch offices.
7.	Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas Dalam menyalurkan pembiayaan, Perseroan berfokus pada sektor sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian SDGs, termasuk penanganan perubahan iklim. Priority Sector Development Principle In providing financing, the Company focuses on priority leading sectors designated by the Government through the Medium-Term Development Plan) and the National Long-Term Development Plan. This is carried out to support the achievement of the SDGs, including climate change mitigation.	Sektor prioritas untuk pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan adalah: 1. Pembiayaan Modal Kerja untuk Usaha Berskala Mikro; 2. Pembiayaan Multiguna; 3. Pembiayaan Moda Transportasi yang ramah lingkungan yang meliputi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Murni Listrik dan <i>Hybrid</i> serta barang elektronik yang ramah lingkungan; 4. Pembiayaan investasi dan modal kerja terhadap pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan pemerintah terkait lingkungan dan sosial. The priority sectors for financing provided by the Company are: 1. Working Capital Financing for Micro-scale Enterprises; 2. Multipurpose Financing; 3. Financing of environmentally friendly modes of transportation, which include Pure Electric and Hybrid Battery-Based Electric Motor Vehicles and environmentally friendly electronic goods; 4. Investment and working capital financing for businesses that comply with government regulations related to the environment and social.



No.	Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan Principles of Sustainable Finance	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
8.	Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi Dalam rangka menyelaraskan strategi atau kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk, Perseroan berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerja sama dengan institusi lainnya terkait Keuangan Berkelanjutan. Coordination and Collaboration Principle In order to align strategies or policies, business opportunities, and product innovation, the Company actively participates in forums, activities, and collaborations with other institutions related to Sustainable Finance.	1. Perseroan mengikuti kegiatan <i>meeting</i> dan sosialisasi yang diadakan oleh Regulator dan Asosiasi terkait strategi pengembangan keuangan berkelanjutan. 2. Perseroan secara rutin menyampaikan laporan kegiatan keuangan berkelanjutan kepada pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan pada sektor prioritas yang direncanakan, Perseroan terbuka dalam menjalankan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya seperti dengan pihak ketiga seperti yayasan penyelenggara kegiatan sosial dan lingkungan, regulator, komunitas pecinta lingkungan, distributor atau <i>supplier</i> produk ramah lingkungan dan sebagainya. 1. The Company participates in meetings and socialization activities organized by Regulators and Associations related to sustainable finance development strategies. 2. The Company regularly submits reports on sustainable finance activities to its shareholders, the Financial Services Authority, and other relevant stakeholders. 3. In carrying out financing activities in planned priority sectors, the Company remains open to collaboration with relevant parties. Examples include partnerships with third parties such as foundations organizing social and environmental activities, regulators, environmental communities, distributors, or suppliers of eco-friendly products, and others.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, Perseroan tidak hanya memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang dalam setiap pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis. Ke depan, Perseroan akan terus mendorong penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi nasabah, insan Perseroan, serta masyarakat di sekitar lingkungan operasional. **[C.1]**

By applying the principles of Sustainable Finance, the Company not only complies with the prevailing regulations but also affirms its commitment to long-term sustainability in every decision-making process and business activity. Going forward, the Company will continue to drive the creation of added value for all stakeholders, while realizing sustainable growth not only for the Company but also for its debtors, employees, and the communities surrounding its operational environment. **[C.1]**

STRATEGI KEBERLANJUTAN **[A.1]**

Tata kelola yang etis dan berkelanjutan menjadi landasan utama Perseroan dalam menjalankan bisnis di sektor jasa keuangan. Nilai-nilai keberlanjutan tidak sekadar diadopsi sebagai kebijakan, tetapi dijadikan prinsip yang menjiwai setiap pengambilan keputusan dan aktivitas operasional. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan sekaligus merespons tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang. Komitmen terhadap Keuangan Berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan praktik ekonomi yang selaras dengan prinsip ESG di seluruh lini operasional.

Selama lebih dari tiga dekade perjalanan Perseroan, prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Aspek ESG senantiasa diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam setiap kebijakan dan aktivitas bisnis, sehingga dampak positif dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan, masyarakat sekitar, dan lingkungan operasional. Dalam membangun budaya keberlanjutan ini, Perseroan mendorong seluruh karyawan untuk

SUSTAINABILITY STRATEGY **[A.1]**

Ethical and sustainable governance lays the primary foundation for the Company in conducting its business within the financial services sector. Sustainability values are not merely adopted as policies but embodied as principles that inspire every decision-making process and operational activity. This approach enables the Company to foster a sustainable business while responding to evolving social and environmental challenges. The Company delivers on this commitment to Sustainable Finance by adopting economic practices aligned with ESG principles across all operational lines.

Marking its more than 30-year journey, sustainability principles have become an integral part of the Company's strategy. ESG aspects are constantly and comprehensively integrated into every policy and business activity, ensuring that all stakeholders, the surrounding community, and the operational environment benefit from the positive impacts generated. In building this sustainability culture, the Company encourages all employees to actively adopt and



secara aktif mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam setiap keputusan dan kegiatan operasional, sehingga keberlanjutan menjadi bagian yang melekat dalam keseharian kerja dan berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta pemangku kepentingan.

Dalam RAKB Tahun 2025, Perseroan menitikberatkan strategi pada sejumlah fokus utama yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan sekaligus memperkuat daya saing bisnis:

1. Melanjutkan program edukasi internal secara berkelanjutan, melalui metode pelatihan tatap muka langsung (*offline*) dan mengembangkan metode pelatihan secara *online* dengan memanfaatkan *e-learning*.
2. Meningkatkan portofolio jumlah pembiayaan produk ramah lingkungan (*Green Financing Product*).
3. Melanjutkan kampanye program ramah lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan dan memantau upaya penghematan energi dan material di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.
4. Mewujudnyatakan kontribusi Perusahaan terhadap sosial dan lingkungan melalui kegiatan dan/atau pemberian donasi kepada pihak ketiga yang bergerak di bidang sosial dan pelestarian lingkungan.
5. Melakukan studi terkait adopsi metode keuangan berkelanjutan dengan IFRS sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan strategis ini memastikan Perseroan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan, sehingga setiap langkah bisnis selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

AKTUALISASI ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025

Dalam menghadapi dinamika tantangan lingkungan dan ekonomi yang semakin kompleks, Perseroan menegaskan perannya sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan dengan memprioritaskan pendanaan pada sektor usaha ramah lingkungan dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

implement ESG principles in every decision and operational activity, making sustainability an inherent part of daily operations and contributing to long-term value creation for the Company and its stakeholders.

In its 2025 Plan & Budget, the Company focuses its strategy on several key areas that support the achievement of sustainability goals while strengthening business competitiveness:

1. Continuing ongoing internal education programs through face-to-face (*offline*) training methods and developing online training methods by utilizing *e-learning*.
2. Increasing the financing portfolio of Green Financing Products.
3. With consistency, running d sustainable green program campaigns and monitoring energy and material efficiency efforts in Branch Offices and the Head Office.
4. Materializing the Company's contribution to the social and environmental sectors through activities and/or donations to third parties engaged in social and environmental conservation.
5. Conducting studies related to the adoption of sustainable finance methods in accordance with IFRS, following the provisions of the Financial Services Authority.

This strategic approach ensures that the Company not only creates economic value but also provides a real contribution to the environment, society, and corporate governance, ensuring that every business step is aligned with long-term sustainability goals.

ACTUALIZATION OF THE 2025 SUSTAINABLE FINANCE ROADMAP

In facing increasingly complex environmental and economic challenges, the Company affirms its role as a sustainability-oriented finance company by prioritizing financing in environmentally friendly and social business sectors. This approach aims not only to drive inclusive economic growth but also to deliver a real positive impact on the community and the environment surrounding its operational areas.



Untuk itu, Perseroan menjadikan RAKB sebagai kompas yang memandu implementasi keuangan berkelanjutan secara terintegrasi, sistematis, dan terukur pada seluruh aspek bisnis. Melalui RAKB, Perseroan memastikan bahwa seluruh inisiatif pembiayaan selaras dengan prinsip ESG, memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan risiko, serta memaksimalkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau dan inklusif.

Sepanjang tahun 2025, berbagai inisiatif dalam RAKB telah berhasil direalisasikan dengan capaian yang signifikan. Rincian aktualisasi tersebut, termasuk indikator dan dampak yang dihasilkan, disajikan secara transparan melalui tabel berikut:

To this end, the Company uses the SFAP as a compass that offers guidance for an integrated, systematic, and measurable implementation of sustainable finance across all business aspects. Through the SFAP, the Company ensures that all financing initiatives align with ESG principles, providing clear direction for risk management, and maximizing its contribution towards building a green and inclusive economy.

Throughout 2025, various initiatives within the SFAP were successfully realized with noteworthy achievements. The following tables present details of this actualization, including the indicators and resulting impacts:

No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Tujuan Aktivitas Objective of Activities	Indikator Pencapaian Success Indicators	Realisasi Realization
1.	Melanjutkan program edukasi internal secara berkelanjutan, melalui metode pelatihan tatap muka langsung (<i>offline</i>) dan mengembangkan metode pelatihan <i>online</i> dengan memanfaatkan <i>e-learning</i> . Continue the internal education program on an ongoing basis, through face-to-face (<i>offline</i>) training methods and developing online training methods by utilizing <i>e-learning</i> .	Meningkatkan <i>awareness</i> Karyawan terkait dengan program-program rencana aksi keuangan berkelanjutan yang dijalankan oleh Perseroan. Increase employee awareness regarding the sustainable finance action plan programs implemented by the Company.	Tertelaksananya program edukasi/pelatihan bagi karyawan Perseroan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Implementation of educational/training programs for the Company's employees in accordance with the established implementation schedule.	Perseroan telah melaksanakan berbagai program edukasi kepada karyawan, melalui pelatihan tatap muka langsung baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> (<i>in class</i>). The Company has conducted various educational programs for employees through face-to-face training sessions, both online and offline (<i>in-class</i>).
2.	Meningkatkan portofolio jumlah pembiayaan produk ramah lingkungan (<i>Green Financing Product</i>). Increasing the portfolio of green financing products.	Mendukung kontribusi Perseroan dalam menjalankan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan. Supporting the Company's contribution to implementing sustainable finance within the financial sector.	Portofolio jumlah pembiayaan produk ramah lingkungan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Increased portfolio of green financing products compared to the previous year.	Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp54 miliar untuk produk ramah lingkungan, yang meliputi pembiayaan agunan kendaraan listrik, <i>hybrid</i> dan barang elektronik dengan teknologi ramah lingkungan dan lainnya. Throughout 2025, the Company distributed financing amounting to Rp54 Billion for green products, which includes financing secured by electric vehicles, hybrid and electronic goods with eco-friendly technology among others.



No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Tujuan Aktivitas Objective of Activities	Indikator Pencapaian Success Indicators	Realisasi Realization
3.	Melanjutkan kampanye program ramah lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan serta memantau upaya penghematan energi dan material di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Continuing the consistent and sustainable green program campaigns, as well as monitoring efforts to conserve energy and materials at both Head Office and the Branch Offices.	Selain meningkatkan kontribusi pada program keuangan berkelanjutan, Perseroan juga secara konsisten melakukan efisiensi biaya operasional pada seluruh lini bisnis. In addition to increasing its contribution to sustainable finance programs, the Company also consistently implements operational cost efficiencies across all business lines.	Terlaksananya program-program ramah lingkungan di area kerja Kantor Pusat maupun Kantor Cabang yang menghasilkan kontribusi positif dan berkelanjutan untuk penghematan energi dan material. Implementation of green programs in the Head Office and Branch Offices that produce positive and sustainable contributions to energy and material conservation.	Perseroan senantiasa berkomitmen menjalankan program efisiensi energi (air, listrik, dan BBM) serta penggunaan material (kertas) secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh kegiatan operasional, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. The Company remains committed to implementing energy efficiency programs (water, electricity, and fuel) and material usage (paper) consistently and sustainably across all operational activities, both at the Head Office and Branch Offices.
4.	Mewujudnyatakan kontribusi Perusahaan terhadap sosial dan lingkungan melalui kegiatan dan/atau pemberian donasi kepada pihak ketiga yang bergerak di bidang sosial dan pelestarian lingkungan. Materializing the Company's contribution to the social and environmental sectors through activities and/or donations to third parties engaged in social and environmental conservation.	Selain melakukan pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan juga menjalankan komitmen untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap sosial masyarakat. In addition to fulfilling its Corporate Social and Environmental Responsibility, the Company is also committed to supporting environmental conservation efforts and social community welfare.	Terlaksananya kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan dan/atau pemberian donasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Implementation of social and environmental conservation activities and/or providing donations to those in need and contributing to environmental preservation.	Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Di bidang sosial, Perseroan menyalurkan donasi berupa keperluan pendidikan dan dana operasional kepada Yayasan Panti Asuhan Putra Nusa. Sementara itu, di bidang lingkungan, Perseroan berkontribusi dalam pelestarian alam melalui penyerahan 400 bibit pohon produktif untuk ditanam oleh Kelompok Tani Hutan Ciwalen, Cianjur. Throughout 2025, the Company conducted Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs. In the social sector, the Company distributed donations in the form of educational supplies and operational funds to the Putra Nusa Orphanage Foundation. Meanwhile, in the environmental sector, the Company contributed to nature conservation by donating 400 productive tree seedlings to be planted by the Ciwalen Forest Farmer Group, Cianjur.



Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance



“Untuk mewujudkan praktik pembiayaan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan, Perseroan telah menempatkan prinsip tata kelola keberlanjutan serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas usaha.”

“To realize responsible and environmentally friendly financing business practices, the Company has integrated the principles of sustainability governance with due consideration of social and environmental aspects in every business activity.”



STRUKTUR DAN PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.1]

Dalam memastikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan terintegrasi secara menyeluruh ke dalam strategi bisnis, Perseroan membangun tata kelola keberlanjutan yang menjadi fondasi bagi pencapaian pertumbuhan usaha selaras dengan tujuan ESG. Struktur tata kelola ini mengawasi pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan secara efektif, menjamin setiap inisiatif memiliki dampak nyata terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memastikan praktik bisnis berjalan bertanggung jawab dan konsisten. Kebijakan internal yang berorientasi pada ESG menjadi panduan dalam operasionalisasi program ini.

Dalam struktur tata kelola Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi berperan sebagai organ pengawas utama yang secara aktif melakukan *monitoring*, evaluasi, dan memberikan arahan strategis terhadap program prioritas serta realisasi RAKB. Untuk memastikan efektivitas penerapannya, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus melalui Surat Keputusan Direksi No. 393/FMF/II/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Keuangan Berkelanjutan, yang telah diperbaharui beberapa kali dan di saat ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 881/KBFMF/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat dan Koordinator Sosial dan Lingkungan dan Surat Keputusan Direksi No. 446/KBFMF/XI/2020 tentang Pedoman Keuangan Berkelanjutan, serta Memo Internal No. 6061/RGC/II/2025 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Unit ini memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengkoordinasikan implementasi program Keuangan Berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap langkah memberikan dampak nyata bagi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Sejalan dengan peran Unit Kerja Khusus tersebut, penyusunan RAKB difasilitasi oleh Departemen Regulatory Compliance, yang bertindak sebagai koordinator dalam menerima pembaruan tahunan dari masing-masing departemen terkait. Pada pelaksanaannya, Direksi memberikan arahan strategis untuk menentukan program prioritas RAKB dengan cakupan 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, sementara Dewan Komisaris meninjau dan menyetujui rencana yang telah disusun sehingga implementasi program berjalan secara terarah dan terukur.

STRUCTURE AND RESPONSIBLE PERSON FOR SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [E.1]

To ensure the comprehensive integration of Sustainable Finance principles into its business strategy, the Company has established a sustainability governance framework that underpins business growth aligned with ESG objectives. This governance structure oversees the effective implementation of Sustainable Finance programs, ensuring that each initiative delivers measurable impact across environmental, social, and economic dimensions while promoting responsible and consistent business practices. ESG-oriented internal policies provide guidance for the operationalization of these programs.

Within the Company's governance structure, the Board of Commissioners and the Board of Directors act as the primary oversight bodies that actively monitor, evaluate, and provide strategic direction for priority programs and the realization of the SFAP. To ensure effective implementation, the Company established a Special Working Unit through the Board of Directors Decree No. 393/FMF/II/2020 on the Establishment of the Sustainable Finance Working Unit, which has been updated several times and is currently regulated under the Board of Directors Decree No. 881/KBFMF/I/2026 regarding the Appointment of Social and Environmental Officers and Coordinators, the Board of Directors Decree No. 446/KBFMF/XI/2020 on the Sustainable Finance Guidelines, and Internal Memo No. 6061/RGC/II/2025 regarding the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) Program. This unit has full authority to manage and coordinate the implementation of Sustainable Finance programs while ensuring that every step delivers a tangible impact on environmental, social, and economic aspects.

In line with the role of the Special Working Unit, the preparation of the SFAP is facilitated by the Regulatory Compliance Department, which acts as the coordinator in receiving annual updates from each relevant department. During its execution, the Board of Directors provides strategic direction to determine SFAP priority programs covering a period of 1 (one) to 5 (five) years, while the Board of Commissioners reviews and approves the formulated plan to ensure that program implementation remains directed and measurable.



Unit Kerja Khusus dipimpin oleh Pejabat Penanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang melapor langsung kepada Direksi mengenai perkembangan pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan. Tim ini terdiri dari perwakilan berbagai departemen yang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan program, memastikan efektivitas, kualitas, dan dampak positif dari setiap inisiatif dapat terwujud secara konsisten.

Uraian tanggung jawab dan peran masing-masing unit kerja dalam struktur tata kelola Keuangan Berkelanjutan dijelaskan secara rinci melalui tabel berikut:

The Special Work Unit is led by the Officer in Charge of Social and Environmental Responsibilities, who reports directly to the Board of Directors on the progress of Sustainable Finance program implementation. The team comprises representatives from various departments who have completed Sustainable Finance training and actively contribute to program execution, ensuring that each initiative consistently delivers effective results, maintains high quality, and generates positive impact.

The description of the responsibilities and roles of each working unit within the Sustainable Finance governance structure is detailed in the following table:

Unit Kerja atau Pejabat Work Unit or Officer	Peran dan Tanggung Jawab	Role and Responsibility
Direksi Board of Directors	Bertanggung jawab atas seluruh rangkaian Aksi Keuangan Berkelanjutan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perseroan.	Responsible for the entire spectrum of Sustainable Finance Actions, starting from planning, implementation, and evaluation conducted by the Company.
<i>Regulatory Compliance</i>	1. Bertanggung jawab kepada Direksi untuk menjalankan pengelolaan Aksi Keuangan Berkelanjutan; 2. Membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; 3. Menginisiasi pembentukan unit/satuan khusus untuk Aksi Keuangan Berkelanjutan; 4. Melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan; 5. Memonitor pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan 6. Menyusun Laporan Keberlanjutan (termasuk penyampaian laporan ke OJK dan publikasi pada website Perseroan).	1. Responsible to the Board of Directors for managing Sustainable Finance Actions; 2. Develop a Sustainable Finance Action Plans; 3. Initiate the establishment of special units/teams for Sustainable Finance Actions; 4. Report Sustainable Finance Action Plans to the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Financial Services Authority; 5. Monitor the implementation of Sustainable Finance Actions; and 6. Develop Sustainability Reports (including reporting to the Financial Services Authority and publication on the Company's website).
<i>Learning and Development (L&D)</i>	Melakukan penyusunan modul pelatihan (<i>offline</i> dan <i>online</i>) maupun kerja sama pembuatan pelatihan dengan pihak ketiga mengenai keuangan berkelanjutan.	Develop training modules (offline and online) and collaborate with third parties to conduct training on sustainable finance.
<i>Finance and Accounting (FA)</i>	Pengalokasian anggaran program-program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan memonitor penggunaan anggaran tersebut. Bekerja sama dalam upaya adopsi metode keuangan berkelanjutan IFRS dalam Laporan Keuangan Perusahaan.	Allocation of the budget for Sustainable Finance Action Plan programs and monitoring the utilization of said budget. Collaborating in the efforts to adopt IFRS sustainable finance methods within the Company's Financial Statements.
<i>Business</i>	1. Penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan; serta 2. Penerbitan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan (termasuk di dalamnya melakukan riset).	1. Disburse credit to the Sustainable Business Category activities; and 2. Issue Sustainable Financial products and/or services (including conducting research).
<i>Information Technology (IT)</i>	Mendukung pengadaan kebutuhan teknologi dalam rangka digitalisasi kegiatan usaha sebagai bagian dari program kerja ramah lingkungan.	Support the procurement of technology needs for business digitalization as part of eco-friendly business programs.
<i>Business Development</i>	Melakukan perencanaan, analisis dan implementasi program keuangan berkelanjutan yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis Perseroan.	To plan, analyze, and implement sustainable finance programs directly related to the Company's business activities.
<i>Marketing Communication</i>	1. Membuat materi promosi atau paket pemasaran pembiayaan produk ramah lingkungan; 2. Membuat kampanye keuangan berkelanjutan melalui saluran-saluran atau media sosial dan media komunikasi lainnya; serta 3. Menyusun dan menyelenggarakan kegiatan pemberian sumbangan/event Perseroan terkait TJSL yang telah direncanakan.	1. Create promotion materials or marketing packages for financing eco-friendly products; 2. Conduct sustainable financial campaigns through various channels, social media, and other communication media; and 3. Arrange and organize the Company's donations/events activities related to CSER that have been planned.
<i>Operation (OPR)</i>	1. Menyediakan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan; serta 2. Mendukung pengawasan pelaksanaan program kerja ramah lingkungan.	1. Provide policies related to sustainable finance; and 2. Support the supervision of eco-friendly work programs.
<i>Credit Risk</i>	Menyiapkan parameter kredit bagi <i>Green Financing Product</i> .	Prepare credit parameters for Green Financing Products.



Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi program-program Keuangan Berkelanjutan, Perseroan menjalin kolaborasi dengan mitra yang kompeten dan profesional di bidang-bidang terkait. Kerja sama ini mencakup penyediaan narasumber untuk pelatihan Keuangan Berkelanjutan, pengadaan produk ramah lingkungan, serta keterlibatan konsultan berpengalaman sehingga setiap program dapat dijalankan secara efektif, sesuai standar, dan memberikan dampak positif yang terukur terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

In order to support the successful implementation of Sustainable Finance programs, the Company collaborates with competent and professional partners in related fields. This collaboration includes the provision of keynote speakers for Sustainable Finance training, the procurement of eco-friendly products, and the involvement of experienced consultants, ensuring that every program is executed effectively, in accordance with standards, and delivers a measurable positive impact on environmental, social, and economic aspects.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025

Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program Keuangan Berkelanjutan di Perseroan. Untuk itu, berbagai program pengembangan kompetensi diselenggarakan bagi seluruh karyawan, mencakup pelatihan terkait penerapan keberlanjutan dalam aktivitas operasional baik secara *offline* maupun *online*.

DEVELOPMENT OF COMPETENCIES RELATED TO SUSTAINABLE FINANCE IN 2025

A deep understanding of sustainability principles plays a crucial role in supporting the successful implementation of Sustainable Finance programs within the Company. That's why we organize numerous competency development programs for all employees, encompassing training related to the implementation of sustainability in operational activities, both offline and online.

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 535 karyawan telah berpartisipasi dalam pelatihan dan program pengembangan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, a total of 535 employees participated in training and competency development programs related to Sustainable Finance, with the following details:

No.	Nama Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Online On Boarding Training – Sustainable Finance	10 Juli 2025 July 10, 2025	Regulatory Compliance
2.	Training HAKORDIA Sustainable Finance	18 September 2025 September 18, 2025	Regulatory Compliance
3.	Offline Training Sustainable Finance	11 Oktober 2025 October 11, 2025	Regulatory Compliance
4.	On Boarding Training – Sustainable Finance	13 Oktober 2025 October 13, 2025	Regulatory Compliance
5.	Offline Training Sustainable Finance	8 Desember 2025 December 8, 2025	Regulatory Compliance

Selain pelatihan, Perseroan juga secara konsisten menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Keuangan Berkelanjutan untuk membangun kesadaran seluruh karyawan mengenai prinsip ESG dan memberikan panduan penerapannya dalam proses kerja sehari-hari. Inisiatif ini memastikan setiap karyawan memiliki pemahaman yang memadai dan mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara efektif dalam operasional bisnis.

In addition to training, the Company also consistently organizes the socialization of the Sustainable Finance Guidelines to build awareness among all employees regarding ESG principles and provide guidance for their application in daily work processes. This initiative ensures that every employee has an adequate understanding and is able to effectively implement sustainability principles in business operations.



PENILAIAN RISIKO, EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.3]

Pesatnya dinamika yang berkembang di industri jasa keuangan menimbulkan beragam risiko yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam operasional Perseroan. Menyadari pentingnya pengelolaan risiko secara proaktif, Perseroan telah merancang dan menerapkan strategi mitigasi yang berlandaskan ketentuan POJK No. 42 tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Strategi ini memungkinkan Perseroan mengantisipasi dampak dari 8 (delapan) jenis risiko utama yang dapat muncul, sekaligus menegakkan pengelolaan risiko terkait Keuangan Berkelanjutan secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja dan meminimalkan potensi dampak negatif.

Pengelolaan risiko ESG menjadi bagian yang melekat dalam kerangka manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan, sehingga setiap aktivitas operasional dan pembiayaan dipantau dengan mempertimbangkan potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Integrasi risiko ESG dilakukan sejak tahap *screening* awal pengajuan kredit calon debitur, memungkinkan identifikasi risiko sejak dini dan penerapan langkah mitigasi yang efektif.

Fungsi Manajemen Risiko juga diperkuat untuk memastikan seluruh risiko tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan (*risk appetite*). Dewan Komisaris dan Direksi turut berperan aktif dalam pengawasan serta penetapan strategi mitigasi sehingga setiap tindakan yang diambil bersifat terukur, konsisten, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap berbagai risiko ESG yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis, antara lain:

ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [E.3]

The rapid dynamics evolving within the financial services industry give rise to various risks that could potentially affect the effectiveness of Sustainable Finance implementation in the Company's operations. Recognizing the importance of proactive risk management, the Company has designed and implemented mitigation strategies based on the provisions of POJK No. 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions. This strategy enables the Company to anticipate the impacts of 8 (eight) main types of risks that may arise, while optimizing the management of risks related to Sustainable Finance to support the achievement of performance targets and minimize potential negative impacts.

ESG risk management is an inherent part of the Company's overall risk management framework, ensuring that every operational and financing activity is monitored by considering potential environmental and social impacts. As a financing company, the Company plays a strategic role in driving green and sustainable economic growth. The integration of ESG risks is conducted starting from the initial screening stage of prospective debtors' credit applications, allowing for early risk identification and the implementation of effective mitigation measures.

The Risk Management function was strengthened to ensure all risks remained within the defined risk appetite. The Board of Commissioners and the Board of Directors actively oversaw risk management and determined mitigation strategies, ensuring that each action was measured, consistent, and supportive of the Company's long-term sustainability.

Throughout 2025, the Company has identified and evaluated various ESG risks considered to have a significant impact on business continuity, as follows:



Topik Topic	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
Lingkungan Environment	Risiko penyaluran pembiayaan terhadap bidang usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. The risk of financing disbursement to business sectors that are not aligned with the principles of sustainable finance.	• Melakukan <i>due diligence</i> secara ketat untuk menghindari pembiayaan terhadap bidang usaha yang bertentangan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berdampak negatif bagi lingkungan; dan • Menerapkan daftar pengecualian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Perseroan khususnya terkait pentingnya pertimbangan aspek LST di setiap aktivitas bisnis Perseroan. • Conducting strict due diligence to avoid providing financing to business sectors that conflict with the debtor's risk profile, as well as ensuring compliance with sustainability principles and preventing negative environmental impacts; and • Implementing the financing exclusion list established by the Company. Introducing Sustainable Finance principles to both new and existing debtors, particularly regarding the importance of considering ESG aspects in every business activity of the Company.
Sosial Social	• Risiko ketidakmerataan tingkat kompetensi dan kemampuan karyawan dalam memahami praktik penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan • Penyaluran bantuan atau pelaksanaan kegiatan CSR yang tidak tepat sasaran. • Risk of uneven levels of competence and ability of employees to understand the practice of implementing Sustainable Finance; and • Misallocation of assistance or improper implementation of CSR activities.	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi internal bagi Manajemen dan karyawan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan di Perseroan; dan • Mempublikasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Perseroan kepada masyarakat, melalui sarana media sosial, surat kabar <i>online</i> lokal dan <i>website</i> Perseroan dengan tujuan sebagai percontohan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi. • Increasing internal socialization activities for Management and employees related to the implementation of Sustainable Finance in the Company; and • Publicizing the implementation of social and environmental responsibility programs organized by the Company to the community, through social media facilities, local online newspapers and the Company's website with the aim of serving as a model for the community to contribute.
Ekonomi Economy	Rendahnya angka penyaluran pembiayaan untuk kendaraan ramah lingkungan. Low disbursement of financing for environmentally friendly vehicles.	• Merancang program-program pemasaran yang berorientasi terhadap portofolio penyaluran pembiayaan produk ramah lingkungan; dan • Meningkatkan literasi keuangan mengenai pentingnya penggunaan produk-produk ramah lingkungan untuk berkontribusi terhadap Keuangan Berkelanjutan kepada debitur dan masyarakat luas. • Designing marketing programs oriented toward the financing distribution portfolio for eco-friendly products; and • Increasing financial literacy regarding the importance of using eco-friendly products to contribute to Sustainable Finance for both debtors and the wider community.

Perseroan secara konsisten menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan penerapan kegiatan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan RAKB dan dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus. Mekanisme tersebut mencakup langkah-langkah berikut:

1. Setiap anggota satuan kerja melakukan identifikasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program RAKB;
2. Risiko yang teridentifikasi dinilai dari sisi signifikansi dampaknya, termasuk potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program Keuangan Berkelanjutan;
3. Pemantauan risiko dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh Pejabat atau Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas implementasi program, dengan setiap informasi terkait risiko dikomunikasikan secara rutin kepada Pejabat Keuangan Berkelanjutan; dan

The Company consistently establishes strict monitoring mechanisms to ensure the implementation of Sustainable Finance activities is in accordance with the SFAP and carried out by the Special Working Unit. This mechanism includes the following steps:

1. Each work unit member identifies risks that may arise during the implementation of the SFAP program;
2. Identified risks are assessed in terms of the significance of their impact, including potential risks that could hinder the success of the Sustainable Finance program;
3. Risk monitoring is conducted intensively and continuously by the Officers or Working Units responsible for program implementation, with all risk-related information communicated regularly to the Sustainable Finance Officer; and



- Pejabat Keuangan Berkelanjutan menentukan langkah-langkah pengendalian apabila risiko berpotensi mengganggu keberhasilan program Keuangan Berkelanjutan.

Untuk memitigasi potensi ketidaktercapaian program prioritas maupun target keberlanjutan yang tercantum dalam RAKB, Perseroan telah mengimplementasikan beberapa langkah mitigasi risiko, antara lain:

- Penyusunan dokumen kebijakan sebagai landasan pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan;
- Penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahap pelaksanaan program; dan
- Penyusunan laporan evaluasi atas program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan, yang terdokumentasi sebagai bukti penerapan dan alat pengawasan.

Dalam pengelolaan risiko korporat dan keberlanjutan, Perseroan menerapkan kerangka kerja berbasis 4 (empat) pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk penetapan batas risiko (*risk limit*);
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, didukung sistem informasi manajemen risiko yang handal; dan
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan terintegrasi.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menilai pengelolaan risiko keberlanjutan telah dilaksanakan secara efektif, tanpa ditemukan celah atau kelemahan material dalam manajemen risiko. Selain itu, tidak terdapat kasus pelanggaran terkait pembiayaan sektor terlarang atau sektor dengan risiko tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Temuan ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan peraturan yang berlaku.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [E.4]

Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan usaha tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari berbagai pihak, khususnya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan serta kelancaran aktivitas bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen membangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, guna memahami kebutuhan, ekspektasi, serta aspirasi mereka terhadap aktivitas bisnis Perseroan.

- The Sustainable Finance Officer determines control measures if risks have the potential to disrupt the success of the Sustainable Finance program.

To mitigate the potential non-achievement of priority programs or sustainability targets specified in the SFAP, the Company has implemented several risk mitigation measures, including:

- Preparation of policy documents as the foundation for the implementation of Sustainable Finance programs;
- Appointment of responsible parties in each stage of program implementation; and
- Preparation of evaluation reports on the Sustainable Finance programs that have been implemented, which are documented as evidence of implementation and oversight tools.

In managing corporate and sustainability risks, the Company implements a 4 (four) pillars risk management framework, as follows:

- Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Adequacy of risk management policies and procedures, including the setting of risk limits;
- Adequacy of risk identification, measurement, control, and monitoring processes, supported by a reliable risk management information system; and
- A comprehensive and integrated internal control system.

Throughout 2025, the Company assessed that sustainability risk management was implemented effectively, with no material gaps or weaknesses identified in its risk management practices. In addition, there were no violations related to financing in prohibited sectors or sectors with a high risk to environmental preservation. These findings reflect the Company's commitment to conducting its financing activities responsibly, in alignment with sustainability principles and applicable regulations.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT [E.4]

The Company recognizes that business sustainability cannot be achieved without the active participation of various parties, particularly stakeholders. Stakeholders play a crucial role in supporting the successful implementation of Sustainable Finance as well as the smooth operation of overall business activities. Therefore, the Company is committed to building effective communication and fostering harmonious relationships with stakeholders to understand their needs, expectations, and aspirations regarding the Company's business activities.



Pada tahun 2025, Perseroan telah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha, berpengaruh terhadap keberlanjutan Perseroan, dan menerima dampak signifikan dari aktivitas bisnisnya. Bentuk pelibatan dan isu utama yang menjadi perhatian tiap kelompok pemangku kepentingan dijabarkan dalam tabel berikut:

In 2025, the Company identified key stakeholder groups that have direct links to business activities, influence the Company's sustainability, and receive significant impacts from its business operations. The forms of engagement and key issues of concern for each stakeholder group are detailed in the following table:

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholders List	Metode Pelibatan atau Pendekatan Method of Engagement/Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency	Topik dan Isu Utama Kepentingan Interest Topics and Main Issues
Konsumen Customers	- Situs - Media Sosial - Layanan konsumen - Website - Social Media - Customer services	- Setiap Saat - Sesuai Kebutuhan - Ongoing - As needed	- Layanan pelanggan atas produk dan/atau jasa; - Informasi produk dan/atau jasa. - Customer Service on products and/or services; - Product and/or service information.
Karyawan Employees	- Media komunikasi internal (<i>email & education portal</i>), Surat Edaran, Surat Keputusan, Memo Internal - Rapat berkala bersama dengan karyawan - Pelatihan karyawan - Internal communication media (<i>email & education portal</i>), Circulars Letter, Decree, Internal Memos - Regular meetings with employees - Employee training	- Mingguan - Sesuai Kebutuhan - Weekly - As Needed	Sosialisasi kebijakan, pedoman internal, program ramah lingkungan yang disampaikan melalui <i>Key Visual</i> yang ditayangkan pada <i>desktop</i> komputer karyawan dan artikel yang dipublikasikan pada portal internal karyawan (<i>Compass</i>). Dissemination of policies, internal guidelines, and environmentally friendly programs is carried out through <i>Key Visual</i> displayed on employees' desktop computers and articles published on the internal employee portal (<i>Compass</i>).
Pemerintah dan Regulator Government and Regulator	Sesi dengar pendapat dan sosialisasi mengenai regulasi terbaru. Public hearings and socialization sessions regarding the latest regulations.	Sesuai Kebutuhan As needed	- Pemenuhan kewajiban terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku; dan - Menjalin kemitraan dalam konteks keberlanjutan. - Compliance with obligations and applicable regulations; and - Building partnerships in the context of sustainability.
Pemegang Saham Shareholders	- RUPS Tahunan - RUPS Luar Biasa - Annual GMS - Extraordinary GMS	1 (satu) kali setahun - Sesuai Kebutuhan - Once a year - As needed	- Mendapatkan informasi yang transparan mengenai pencapaian kinerja Perseroan; - Perubahan kepengurusan manajemen; - Pembagian dividen; - Terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham; - Pengangkatan auditor eksternal; - Penyampaian informasi terkait transaksi afiliasi; - Transparansi belanja modal; dan - Transparansi informasi aksi korporasi - Receiving transparent information about the Company's performance; - Changes in management; - Dividend distribution; - Fulfillment of Shareholders' right; - Appointment of external auditor; - Disclosure of information related to affiliate transaction; - Disclosure of information related to capital expenditure; and - Disclosure of information related to corporate action information.
Mitra Kerja/Vendor Business Partners/Vendors	Perjanjian Kerja Sama dengan <i>Dealer</i> Cooperation Agreement with Dealers.	Sesuai Kebutuhan As needed	- Mekanisme pengadaan jasa secara adil dan transparan; dan - Penyelesaian pembayaran jasa yang tepat waktu - Fair and transparent procurement mechanisms for services; and - Timely payment settlement for services
Media	Mitra penting yang dapat mempengaruhi pencitraan positif atau negatif Perseroan. Key partners that may influence the Company's positive or negative reputation.	Sesuai Kebutuhan As needed	- Publikasi kegiatan keuangan berkelanjutan; dan <i>Placement</i> iklan/advertorial. - Publication on the sustainable finance activities; and - Placement of advertisements/advertorials.



TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.5]

Perseroan terus berkomitmen memperkuat keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri dan regulasi yang terus berubah. Dalam kerangka implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai POJK 51/2017, fokus utama Perseroan adalah meningkatkan penyaluran pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. Meskipun permintaan pasar terhadap kendaraan listrik dan *hybrid* masih terbatas, kondisi ini justru membuka peluang bagi Perseroan untuk menghadirkan strategi inovatif yang tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Merespons tantangan ini, Perseroan memperluas portofolio pembiayaan ramah lingkungan melalui produk *Green Financing*, khususnya pada segmen *Digital Electronic and Appliances* (DE&A), yang memiliki potensi penyaluran lebih besar. Strategi pemasaran ditujukan pada calon debitur yang mengajukan pembiayaan untuk barang elektronik berteknologi ramah lingkungan sehingga mendorong adopsi produk berkelanjutan secara lebih luas.

Selain faktor eksternal, tantangan juga muncul dari internal organisasi. Kurangnya pemahaman karyawan mengenai integrasi aspek ESG dalam praktik sehari-hari dapat mempengaruhi efektivitas implementasi program Keuangan Berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan rutin menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan *workshop* guna meningkatkan kompetensi karyawan terkait keberlanjutan, memastikan seluruh insan Perseroan dapat berperan aktif dalam pencapaian target RAKB.

Di sisi lain, tren positif dari antusiasme investor dan masyarakat terhadap investasi berkelanjutan membuka peluang bagi Perseroan untuk memperluas produk dan layanan pembiayaan berkelanjutan. Dukungan pemerintah berupa insentif untuk sektor prioritas dan pembiayaan inklusif juga memperkuat peran Perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Seiring penerapan langkah-langkah strategis tersebut, Perseroan secara bertahap menyesuaikan kebijakan dan standar internal dengan regulasi LST, memastikan kepatuhan, efektivitas implementasi, dan keselarasan dengan strategi keberlanjutan. Pendekatan ini menegaskan komitmen Perseroan untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang demi penciptaan nilai jangka panjang.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN SUSTAINABLE FINANCE [E.5]

The Company remains committed to strengthening business sustainability in response to evolving industry dynamics and regulatory frameworks. In implementing Sustainable Finance in line with POJK 51/2017, the Company focuses on increasing financing for environmentally friendly vehicles. While market demand for electric and hybrid vehicles remains limited, this situation presents an opportunity to introduce innovative strategies that support business growth while enhancing the Company's contribution to the environment and society.

In response to these challenges, the Company is expanding its green financing portfolio through Green Financing products, particularly in the Digital Electronics and Appliances (DE&A) segment, which holds a larger distribution potential. Marketing strategies are directed toward prospective debtors applying for financing for electronic goods featuring eco-friendly technology, thereby encouraging wider adoption of sustainable products.

Besides external factors, challenges also arise from within the internal organization. A lack of employee understanding regarding the integration of ESG aspects into daily practices can affect the effectiveness of Sustainable Finance program implementation. To address this, the Company regularly organizes training, seminars, and workshops to enhance employee competencies related to sustainability, ensuring that all the Company's personnel can play an active role in achieving SFAP targets.

On the other hand, the positive trend of investor and public enthusiasm for sustainable investment opens opportunities for the Company to expand its sustainable financing products and services. Government support in the form of incentives for priority sectors and inclusive financing also strengthens the Company's role in driving sustainable economic growth.

As it takes these strategic steps, the Company is gradually adjusting its internal policies and standards to align with ESG regulations, ensuring compliance, implementation effectiveness, and alignment with its sustainability strategy. This approach reaffirms the Company's commitment to facing challenges while seizing opportunities for long-term value creation.



PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN [S-12]

Perseroan memandang pengelolaan konflik kepentingan sebagai fondasi penting dalam memperkuat kredibilitas tata kelola dan mendukung keberlanjutan usaha. Setiap keputusan, baik strategis maupun operasional, dijalankan dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas, serta terbebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi tata kelola yang komprehensif, Perseroan membangun sistem pengendalian internal yang proaktif untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan mengelola potensi konflik kepentingan sejak dini. Kerangka ini mencakup hadirnya serangkaian kebijakan tertulis, seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku, serta mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur. Perseroan mendorong seluruh karyawan di setiap lapisan organisasi untuk memikul tanggung jawab yang setara dalam menjaga objektivitas serta melaporkan setiap potensi benturan kepentingan.

Budaya integritas juga diperkuat melalui program edukasi dan internalisasi nilai secara berkelanjutan. Sosialisasi kebijakan, pelatihan kepatuhan, serta pemantauan implementasi menjadi instrumen kunci untuk memastikan prinsip pencegahan konflik kepentingan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari. Setiap laporan ditangani melalui proses evaluasi yang transparan dan independen, sesuai dengan ketentuan internal maupun regulasi yang berlaku.

Dengan pendekatan yang proaktif dan terintegrasi ini, Perseroan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang etis, memperkuat sistem pengendalian risiko, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan, selaras dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

PREVENTION OF CONFLICT OF INTEREST [S-12]

The Company views the management of conflicts of interest as a vital foundation in strengthening governance credibility and supporting business sustainability. Every decision, whether strategic or operational, is carried out based on the principles of professionalism, independence, and accountability, and is free from the influence of personal interests or specific parties.

As an integral part of comprehensive governance implementation, the Company has developed a proactive internal control system to anticipate, detect, and manage potential conflicts of interest from an early stage. This framework includes a series of written policies, such as the Code of Ethics and Code of Conduct, as well as secure and structured reporting mechanisms. The Company encourages all employees at every organizational level to share equal responsibility for maintaining objectivity and for reporting any potential conflicts of interest.

A culture of integrity is also reinforced through ongoing education and value internalization programs. Policy socialization, compliance training, and implementation monitoring serve as key instruments to ensure that conflict-of-interest prevention principles are not only understood but also consistently applied in daily work practices. Every report is handled through a transparent, independent evaluation process in accordance with internal provisions and applicable regulations.

Through this proactive and integrated approach, the Company is committed to fostering an ethical work environment, strengthening risk control systems, and building stakeholder trust, in line with the principles of sustainable and responsible business.



Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance



MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [F.1]

Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan usaha jangka panjang tidak hanya bergantung pada strategi yang tepat dan kebijakan yang memadai, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh insan Perseroan dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik kerja sehari-hari. Budaya keberlanjutan yang kokoh terbentuk ketika setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menciptakan operasi yang selaras dengan prinsip ESG sehingga setiap keputusan dan tindakan sehari-hari mendukung kinerja bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY [F.1]

The Company recognizes that long-term business sustainability depends not only on appropriate strategies and adequate policies but also on the active participation of all the Company's personnel in internalizing sustainability principles into daily work practices. A solid sustainability culture is formed when every individual understands their role and responsibility in creating operations aligned with ESG principles, ensuring that every daily decision and action supports responsible and sustainable business performance.



Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang relevan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan memperkuat pemahaman karyawan dan mitra kerja terhadap praktik usaha yang berwawasan lingkungan dan mendorong penerapan aksi nyata di tempat kerja. Sebagai bagian dari komitmen ini, Perseroan secara konsisten mengimplementasikan inisiatif program keuangan berkelanjutan di seluruh kantor pusat dan cabang, termasuk upaya penghematan energi listrik melalui pemadaman lampu di luar jam kerja, pengelolaan air secara efisien dengan menutup kran yang tidak digunakan dan melakukan perawatan rutin instalasi air, serta pengurangan penggunaan kertas dengan memanfaatkan kertas daur ulang, mencetak dokumen dua sisi, dan mendorong digitalisasi dokumen internal.

Di sisi lain, Perseroan juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan pelatihan dan sesi berbagi pengetahuan mengenai Keuangan Berkelanjutan untuk memastikan seluruh karyawan baik di kantor pusat maupun cabang memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik kerja sehari-hari.

Perseroan menegaskan bahwa membangun budaya keberlanjutan merupakan perjalanan bersama, di mana setiap langkah, keputusan, dan inisiatif karyawan menjadi bagian dari praktik kerja yang selaras dengan prinsip ESG. Komitmen ini memastikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar strategi, tetapi menjadi bagian dari identitas Perseroan, menghasilkan dampak positif yang berkesinambungan bagi bisnis, pemangku kepentingan, dan lingkungan.

Throughout 2025, the Company conducted outreach and educational programs to support the implementation of Sustainable Finance principles, with the objective of strengthening employees' and business partners' understanding of environmentally responsible business practices and promoting the adoption of practical actions in the workplace. In line with this commitment, the Company consistently carried out sustainable finance initiatives across its head office and branch offices, including conserving electricity by turning off lights outside working hours, managing water usage efficiently by closing unused taps and performing routine maintenance of water installations, and reducing paper consumption by using recycled paper, printing documents double-sided, and advancing the digitalization of internal documents.

Furthermore, the Company organized a series of training activities and knowledge-sharing sessions on Sustainable Finance to ensure that all employees, both at the head office and branch offices, have a deep understanding and are able to apply sustainability principles in their daily work practices.

The Company affirms that building a culture of sustainability is a shared journey, where every step, decision, and employee initiative becomes part of work practices that align with ESG principles. It is a commitment that ensures sustainability is more than just a strategy, as it shapes the Company's identity and generates a continuous positive impact on the business, stakeholders, and the environment.



KINERJA EKONOMI

Pencapaian kinerja ekonomi Perseroan menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang sekaligus menjadi referensi penting bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, Perseroan terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan debitur, dengan tetap menjaga kualitas layanan yang tinggi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Sejalan dengan komitmen terhadap Keuangan Berkelanjutan, Perseroan secara aktif mengembangkan portofolio pembiayaan hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga diwujudkan melalui layanan pembiayaan inklusif yang memperluas akses bagi berbagai segmen debitur, sekaligus memperkuat kontribusi Perseroan terhadap pencapaian tujuan lingkungan dan sosial.

Sepanjang tahun pelaporan 2025, Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp3,981 triliun. Dari total tersebut, pembiayaan yang masuk kategori ramah lingkungan mencapai 1,38%, digunakan untuk mendukung pembelian 176 unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Murni dan *Hybrid*. Di samping itu, pembiayaan untuk produk elektronik ramah lingkungan tercatat sebesar Rp50,147 miliar, atau sekitar 1,26% dari total penyaluran.

Perbandingan detail antara target dan realisasi portofolio, termasuk pencapaian yang selaras dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan, disajikan pada tabel berikut: [\[F.3\]](#)

ECONOMIC PERFORMANCE

The achievement of the Company's economic performance serves as the primary foundation in ensuring long-term business sustainability and acts as a vital reference for investors and shareholders in strategic decision-making. To create optimal added value for all stakeholders, the Company continuously provides financing services and products that meet the needs of debtors, while maintaining high service quality and adhering to sustainability principles.

In line with the commitment to Sustainable Finance, the Company actively develops a green financing portfolio that supports sustainable development. This approach is also realized through inclusive financing services that expand access for various debtor segments, while strengthening the Company's contribution toward achieving environmental and social goals.

During the 2025 reporting period, the Company successfully disbursed new financing amounting to IDR3.981 trillion, reflecting consistent growth and disciplined risk management. Out of this total, financing categorized as environmentally friendly reached 1.38%, which was utilized to support the purchase of 176 units of Battery Electric Vehicles and Hybrid Electric Vehicles. In addition, financing for eco-friendly electronic products was recorded at IDR50.147 billion, or approximately 1.26% of the total disbursement.

Detailed comparisons between portfolio targets and realizations, including achievements aligned with Sustainable Finance principles, are presented in the following table: [\[F.3\]](#)

Deskripsi Description	2025		2024		2023	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Portofolio Pembiayaan untuk Proyek Berwawasan Lingkungan Financing Portfolio for Environmentally Sustainable Projects						
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Financing for Battery-Based Electric Vehicle	6.470	4.738	15.100	22.055	35.242	20.019
Pembiayaan untuk Produk Ramah Lingkungan (TV LED, Smart TV, AC Inverter dan Monitor LED) Financing for Eco-Friendly Products (LED TV, Smart TV, Inverter AC, and LED Monitor)	51.075	50.147	60.000	59.870	70.484	77.613
Total Pembiayaan Hijau Total Green Financing	57.075	54.886	75.100	81.926	105.726	97.632
Total Penyaluran Pembiayaan Tahun 2025 Total Financing Disbursement in 2025	7.925.000	3.980.756	7.642.963	7.715.098	8.737.136	8.919.998



Deskripsi Description	2025		2024		2023	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Persentase Total Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan (%) Percentage of Total Financing of Sustainable Business Activities to Total Financing (%)	0,72%	1,38%	0,98%	1,06%	1,21%	1,09%
Pendapatan Revenue	2.063.513	1.752.442	2.026.454	1.954.681	2.247.136	2.282.199
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Nett Profit (Loss) for The Year	(230.773)	(857.602)	(114.860)	(314.927)	86.737	91.546

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan hijau melampaui target yang ditetapkan dalam RAKB Tahun 2025, dengan tingkat ketercapaian mencapai 1,38% untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan produk elektronik ramah lingkungan seperti TV LED, Smart TV, AC Inverter, dan Monitor LED. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendorong kegiatan usaha berkelanjutan sekaligus menjaga pertumbuhan portofolio yang stabil.

Secara keseluruhan, persentase total pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total pembiayaan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan keselarasan antara strategi bisnis dan prinsip ESG yang diadopsi Perseroan.

Informasi lebih rinci mengenai pencapaian target keuangan, realisasi rencana kerja tahun 2025, serta analisis mendalam mengenai kinerja keuangan Perseroan dapat ditemukan pada Bab Analisa dan Diskusi Manajemen dalam Laporan Tahunan 2025.

Based on the data in the table, it is evident that the Company successfully distributed green financing, exceeding the targets set in the 2025 SFAP, with an achievement rate of 1.38% for Battery Electric Vehicles and eco-friendly electronic products such as LED TVs, Smart TVs, Inverter ACs, and LED Monitors. This reflects the Company's commitment to driving sustainable business activities while maintaining stable portfolio growth.

Overall, the percentage of total financing for sustainable business activities relative to total financing shows a steady upward trend, reflecting how the Company's business strategy aligns with its adopted ESG principles.

Detailed information regarding the achievement of financial targets, the realization of the 2025 work plan, and an in-depth analysis of the Company's financial performance can be found in the Management Discussion and Analysis section of the 2025 Annual Report.

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perseroan secara konsisten menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan baik dalam pengelolaan operasional sehari-hari maupun dalam budaya kerja di kantor. Praktik ini mencakup penggunaan material yang berwawasan lingkungan dan penerapan *green lifestyle* sehingga setiap karyawan memiliki kesadaran serta pemahaman mendalam akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Perseroan meyakini bahwa setiap langkah kecil yang berwawasan lingkungan memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat polusi dan mengurangi volume limbah. Selain itu, Perseroan secara rutin menggalakkan kampanye pengurangan penggunaan bahan-bahan yang sulit didaur ulang, seperti plastik, *styrofoam*, dan material sejenis, sebagai upaya untuk meminimalkan jejak lingkungan secara menyeluruh. **[F.5]**

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

The Use of Eco-Friendly Materials

In conducting its financing business activities, the Company consistently applies environmentally friendly business practices, both in its daily operational management and in the office work culture. This practice includes the use of environmentally sound materials and the implementation of a green lifestyle, ensuring that every employee possesses a deep awareness and understanding of the importance of environmental preservation.

The Company believes that every small environmentally conscious step has a significant impact on lowering pollution levels and reducing waste volume. Furthermore, the Company regularly promotes campaigns to reduce the use of materials that are difficult to recycle, such as plastic, styrofoam, and similar materials, as an effort to minimize its overall environmental footprint. **[F.5]**



Strategi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang bertanggung jawab, sekaligus mendukung penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Biaya Lingkungan Hidup Tahun 2025 [F.4]

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan berbagai inisiatif berwawasan lingkungan, termasuk penerapan praktik *green office*, pengelolaan limbah operasional, pengurangan penggunaan bahan-bahan yang sulit didaur ulang, serta program kampanye kesadaran lingkungan bagi karyawan. Realisasi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus mendukung terciptanya nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Upaya Reduksi Emisi melalui Efisiensi Energi Listrik

Energi listrik menjadi nadi yang mendukung seluruh aktivitas operasional Perseroan mulai dari penerangan kantor, sistem pendingin, hingga perangkat komputer dan peralatan elektronik lainnya. Menyadari peran strategis energi listrik dalam kelancaran operasional, Perseroan menempatkan efisiensi energi sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam mengurangi jejak karbon dan mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan.

Sepanjang 2025, Perseroan menempuh berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik, selaras dengan prinsip ESG dan standar keberlanjutan global. Setiap upaya diarahkan untuk menurunkan emisi, mengelola sumber daya secara efisien, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di seluruh lini organisasi. Melalui inisiatif ini, Perseroan tidak sekadar memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

This strategy not only reflects the Company's compliance with the Sustainable Finance principles as regulated in POJK 51/2017, but is also a concrete manifestation of the Company's commitment to conducting responsible financing business activities while supporting the creation of added value for all stakeholders.

Environmental Costs in 2025 [F.4]

In 2025, the Company undertook various environmentally sound initiatives, including the implementation of green office practices, operational waste management, reduction in the use of non-recyclable materials, and environmental awareness campaign programs for employees. This realization reflects the Company's commitment to running the business in an environmentally responsible manner while supporting the creation of added value for all stakeholders.

Improved Electrical Energy Efficiency

Electrical energy serves as the lifeline that powers all of the Company's operations, from office lighting and cooling systems to computer devices and other electronic equipment. Recognizing the strategic role of electrical energy in ensuring smooth operations, the Company has placed energy efficiency as an integral part of its sustainability strategy. This approach aims not only to enhance operational performance but also serves as a concrete step in reducing the carbon footprint and supporting environmentally responsible business practices.

Throughout 2025, the Company exerted some strategic measures to optimize the use of electrical energy, in alignment with ESG principles and global sustainability standards, directing every effort toward reducing emissions, managing resources efficiently, and fostering environmental awareness across all levels of the organization. These initiatives, the Company does not merely fulfill its operational needs but also reaffirms its commitment to contributing to sustainable development.



Inisiatif Utama Efisiensi Energi Listrik [F.7] Key Electricity Efficiency Initiatives

1. Mengganti lampu neon dengan lampu berjenis LED yang lebih hemat energi;
2. Mematikan lampu saat tidak digunakan untuk kegiatan operasional baik di ruang *meeting*, toilet, atau ruangan lainnya;
3. Menggunakan AC berteknologi *inverter*;
4. Membudayakan mencabut stop kontak atau barang elektronik apabila telah selesai digunakan seperti komputer, laptop, *handphone* dan peralatan *pantry*;
5. Mengatur suhu ruangan agar tidak boros energi;
6. Mematikan lampu ruangan tepat waktu yakni pada jam makan siang dan pada pukul 18:00 WIB; dan
7. Pembatasan penggunaan penerangan hanya pada ruang-ruang yang sedang digunakan.

Implementasi berbagai langkah efisiensi sepanjang 2025 membuahkan hasil yang positif. Konsumsi energi listrik di lingkup Perseroan menunjukkan tren penurunan konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir, tercermin pada data berikut:

The implementation of various efficiency measures in 2025 has yielded positive results. Electricity consumption across the Company has shown a consistent downward trend over the past 3 (three) years, as reflected in the following data:

Volume Penggunaan Energi (Listrik) Energy Usage Volume (Electricity)

2025

1.589.362 kWh

5.722 GigaJoule (GJ)

2024

3.830.255 kWh

13.789 GigaJoule (GJ)

2023

5.326.591 kWh

19.176 GigaJoule (GJ)

Catatan: Data penggunaan listrik mencakup Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Note: Electricity usage data includes Head Office and Branch Offices

Penurunan konsumsi energi listrik pada tahun 2025 semakin menegaskan komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis pembiayaan yang berkelanjutan. Selain mengoptimalkan operasional, upaya ini juga menumbuhkan kesadaran akan risiko sosial dan lingkungan, selaras dengan prinsip ESG yang menjadi fondasi strategi keberlanjutan Perseroan.

Lower electricity consumption in 2025 further reinforces the Company's commitment to conducting a sustainable financing business. In addition to optimizing operations, this effort also fosters awareness of social and environmental risks, in alignment with the ESG principles that serve as the foundation of the Company's sustainability strategy.

Penghematan Energi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis, khususnya pengoperasian aset kendaraan, Perseroan mengandalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai energi utama untuk mobilitas operasional. Menyadari dampak lingkungan yang timbul dari emisi karbon akibat pembakaran BBM, Perseroan secara proaktif melakukan berbagai upaya penghematan energi. Strategi tersebut mencakup servis rutin kendaraan untuk memastikan performa optimal, pelaksanaan uji emisi secara berkala, penggunaan BBM sesuai spesifikasi

Energy Saving Fuel Oil (BBM)

To support the smooth operation of business activities, particularly the operation of vehicle assets, the Company relies on Fuel Oil (BBM) as the primary energy source for operational mobility. Recognizing the environmental impact arising from carbon emissions caused by fuel combustion, the Company proactively undertakes various energy-saving efforts. This strategy includes routine vehicle servicing to ensure optimal performance, regular emission tests, the use of fuel in accordance with vehicle specifications, a transition



kendaraan, langkah transisi menuju kendaraan listrik, serta pengurangan frekuensi penggunaan kendaraan melalui penyelenggaraan rapat secara daring.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten memantau penggunaan BBM untuk mendukung mobilitas operasional. Upaya ini sejalan dengan strategi pengelolaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, yang mencakup servis rutin kendaraan, uji emisi berkala, penggunaan BBM sesuai spesifikasi, transisi menuju kendaraan listrik, serta pengurangan frekuensi penggunaan kendaraan melalui rapat daring.

Rincian penggunaan BBM selama 3 (tiga) tahun terakhir tercatat sebagai berikut:

toward electric vehicles, and reducing the frequency of vehicle use through online meetings.

Throughout 2025, the Company monitored fuel usage to support operational mobility, consistent with the efficient and environmentally friendly energy management strategy, which encompasses routine vehicle maintenance, periodic emission testing, fuel utilization according to specifications, the transition toward electric vehicles, and the reduction of vehicle usage frequency via virtual meetings.

Details of fuel consumption over the past 3 (three) years are recorded as follows:

2025	2024	2023
318.913 Liter Liters	462.683 Liter Liters	449.655 Liter Liters
1.148 GigaJoule (GJ)	1.665 GigaJoule (GJ)	1.618 GigaJoule (GJ)

Catatan: Data penggunaan BBM mencakup Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Note: Fuel usage data includes Head Office and Branch Offices

Namun demikian, pada tahun 2025, konsumsi BBM Perseroan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hasil penerapan strategi efisiensi energi yang diterapkan di kegiatan operasional Perseroan belum terlihat maksimal. Perseroan dalam hal ini terus akan mengupayakan penerapan efisiensi BBM lebih ketat di tahun-tahun yang akan datang, agar dapat berkontribusi pada pengurangan jejak karbon, sekaligus memperkuat praktik bisnis yang berkelanjutan.

Komitmen Perseroan terhadap Pencapaian Net Zero Emission (NZE) [E-06]

Perseroan memandang isu perubahan iklim sebagai risiko sekaligus peluang strategis yang perlu dikelola secara terstruktur. Sejalan dengan target Emisi Nol Bersih nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta penguatan implementasi Keuangan Berkelanjutan oleh OJK, Perseroan mengintegrasikan komitmen *Net Zero Emission* (NZE) ke dalam kerangka strategi keberlanjutan dan pengelolaan risiko jangka panjang.

However, in 2025, the Company's fuel consumption still increased from the previous year, as the results of the energy efficiency strategies implemented in the Company's operations have not yet fully taken effect. In this regard, the Company will continue to strive for more stringent fuel-efficiency measures in the coming years to contribute to carbon footprint reduction while strengthening sustainable business practices.

The Company's Commitment to Achieving Net Zero Emission (NZE) [E-06]

The Company views the issue of climate change as both a risk and a strategic opportunity that must be managed in a structured manner. In line with the national Net Zero Emission target coordinated by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry and the strengthening of Sustainable Finance implementation by the OJK, the Company integrates its Net Zero Emission (NZE) commitment into its sustainability strategy framework and long-term risk management.



Komitmen tersebut diimplementasikan melalui strategi transisi yang terukur dan bertahap dengan menempatkan prioritas pada penurunan intensitas emisi yang bersumber dari kegiatan operasional. Dalam mendukung pencapaian target NZE, Perseroan telah merealisasikan berbagai inisiatif konkret, antara lain peningkatan efisiensi konsumsi energi di lingkungan kerja, percepatan digitalisasi proses bisnis untuk mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya lainnya, serta pengelolaan mobilitas kerja secara lebih efisien guna menekan emisi dari aktivitas perjalanan dinas. Langkah-langkah tersebut dirancang sebagai fondasi awal dalam membangun operasional yang lebih rendah karbon dan selaras dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan turut memperluas dampak positif melalui penguatan portofolio pembiayaan berkelanjutan. Penyaluran *green financing* difokuskan pada kendaraan listrik dan *hybrid* serta produk elektronik berteknologi hemat energi, yang selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kerangka Keuangan Berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan peran aktif Perseroan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap solusi pembiayaan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan strategi operasional dan inisiatif pembiayaan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi secara konsisten terhadap pencapaian agenda NZE nasional serta memperkuat ketahanan dan relevansi bisnis dalam lanskap ekonomi yang semakin berorientasi pada prinsip ESG.

Komitmen Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) [E-01] [E-07]

Aktivitas operasional Perseroan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang utamanya bersumber dari penggunaan listrik dan BBM pada kendaraan operasional. Meskipun sektor pembiayaan memiliki profil emisi relatif lebih rendah dibandingkan industri berbasis manufaktur, Perseroan menyadari bahwa setiap kontribusi emisi tetap memiliki dampak terhadap perubahan iklim dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian emisi GRK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi keberlanjutan dan efisiensi operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menitikberatkan upaya pengendalian energi pada emisi langsung dari penggunaan BBM untuk kendaraan operasional (*scope 1*), serta emisi tidak langsung yang timbul dari konsumsi listrik di kantor pusat dan cabang (*scope 2*). Sampai saat ini, Perseroan masih dalam tahap persiapan penghitungan *Scope 3*, yang mencakup emisi dari rantai pasok, perjalanan bisnis, dan aktivitas tidak langsung lainnya.

The Company delivers on this commitment through a measured and phased transition strategy, prioritizing the reduction of emission intensity sourced from operational activities. To help achieve NZE targets, the Company has realized various concrete initiatives, including improving energy consumption efficiency in the workplace, accelerating the digitalization of business processes to reduce the use of paper and other resources, and managing work mobility more efficiently to suppress emissions from business travel activities. These steps are designed as the initial foundation for building lower-carbon operations aligned with long-term sustainability principles.

As a financing business, the Company also does what it takes to expand its positive impact by strengthening its sustainable financing portfolio. The distribution of green financing is focused on electric and hybrid vehicles, as well as energy-efficient electronic products, in accordance with the principle of prudence and the Sustainable Finance framework. This initiative reflects the Company's active role in supporting the transition toward a low-carbon economy while expanding public access to more environmentally friendly financing solutions.

By integrating operational strategies and sustainable financing initiatives, the Company is committed to contributing consistently toward the achievement of the national NZE agenda and strengthening business resilience and relevance within an economic landscape increasingly oriented toward ESG principles.

Commitment to Greenhouse Gas (GHG) Emissions Control [E-01] [E-07]

The Company's operational activities generate Greenhouse Gas (GHG) emissions primarily sourced from the use of electricity and fuel (BBM) in operational vehicles. Although the financing sector has a relatively lower emission profile compared to manufacturing-based industries, the Company recognizes that every emission contribution still has an impact on climate change and environmental quality. Therefore, GHG emissions control is an integral part of the Company's sustainability strategy and operational efficiency.

Throughout 2025, the Company focused its energy control on direct emissions from fuel used for operational vehicles (*Scope 1*), as well as indirect emissions arising from electricity consumption at the head office and branch offices (*Scope 2*). Currently, the Company is still in the preparation stage for calculating *Scope 3*, which includes emissions from the supply chain, business travel, and other indirect activities.



Dokumentasi emisi GRK dan total penggunaan energi selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

GHG emissions documentation and total energy usage over the past 3 (three) years are presented as follows:

Keterangan	Satuan Unit	2025	2024	2023	Description
Cakupan 1: BBM	Liter Liters	318.913	462.683	449.655	Scope 1: Fuel
	GigaJoule (GJ)	1.148	1.665	1.618	
Cakupan 2: Listrik [E-03]	kWh	1.589.362	3.830.255	5.326.591	Scope 2: Electricity [E-03]
	GigaJoule (GJ)	5.722	13.789	19.176	
Total Penggunaan Energi	GigaJoule (GJ)	6.870	15.454	20.794	Total Energy Use

Implementasi berbagai strategi efisiensi energi yang diterapkan Perseroan membuahkan hasil positif, tercermin dari penurunan intensitas emisi GRK dibandingkan tahun sebelumnya. Efisiensi ini tidak hanya menurunkan jejak karbon, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap biaya operasional, sejalan dengan upaya pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab.

The Company is seeing the fruit of its many energy efficiency strategies, as reflected in the decrease in GHG emission intensity compared to the previous year. This efficiency not only reduces the carbon footprint but also has a positive impact on operational costs, in alignment with more responsible resource management efforts.

Transformasi Digital dan Efisiensi Kertas

Kertas merupakan salah satu material penting bagi Perseroan yang digunakan untuk mendukung kegiatan korespondensi, pencetakan dokumen, serta berbagai kebutuhan administrasi. Namun, tingginya konsumsi kertas memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik, terutama terhadap kelestarian hutan sebagai bahan baku utama.

Digital Transformation and Paper Efficiency

Paper is one of the essential materials for the Company, used to support correspondence, document printing, and various administrative needs. However, high paper consumption has a significant environmental impact if not managed properly, particularly concerning the sustainability of forests as the primary raw material source.

Menyadari hal tersebut, Perseroan terus membangun budaya *paperless* melalui serangkaian inisiatif strategis. Penggunaan *e-mail* dijadikan sebagai sarana utama untuk mensosialisasikan informasi dan kebijakan internal, sementara dokumen non-esensial dikurangi atau sepenuhnya dihindari dari pencetakan. Selain itu, kertas bekas atau kertas bolak-balik dimanfaatkan untuk keperluan administrasi, dan setiap dokumen diperiksa ulang sebelum dicetak untuk meminimalkan kesalahan dan limbah. Upaya ini juga mencakup pengurangan jumlah cetakan Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta pengembangan aplikasi digital yang mendukung komunikasi internal secara *paperless*.

Recognizing this, the Company continues to build a paperless culture through a series of strategic initiatives. The use of email serves as the primary means for socializing internal information and policies, while the printing of non-essential documents is reduced or entirely avoided. Furthermore, used paper or double-sided printing is utilized for administrative purposes, and every document is re-checked before printing to minimize errors and waste. These efforts also include reducing the number of printed copies of the Annual Report and Sustainability Report, as well as developing digital applications that support paperless internal communication.



Inisiatif Utama Pengurangan Material Kertas Key Initiatives for Paper Material Reduction

1. Memaksimalkan penggunaan <i>e-mail</i> dalam mensosialisasikan informasi dan kebijakan internal; 2. Menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas atau kertas bolak-balik untuk keperluan administrasi kantor/penggunaan memo/sarana pertukaran informasi internal lainnya; 3. Tidak mencetak dokumen yang bersifat non-esensial; 4. Mengecek ulang sebelum dokumen dicetak sehingga terhindar dari kesalahan; 5. Mengurangi jumlah cetakan Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan; dan 6. Pengembangan aplikasi digital.	1. Maximize the use of e-mail in disseminating information and internal policies; 2. Implement a policy of using waste paper or paper back and forth for office administration purposes/use of memos/other means of internal information exchange; 3. Not printing non-essential documents; 4. Double-checking before documents are printed to avoid errors; 5. Reducing the number of printouts of the Annual Report and Sustainability Report; and 6. Development of digital applications.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil mencatat penurunan signifikan dalam penggunaan kertas dengan total konsumsi mencapai 14.403.170 lembar, dibandingkan 22.559.198 lembar pada 2024. Tren ini menunjukkan efektivitas berbagai inisiatif efisiensi yang diterapkan, sekaligus memperkuat komitmen Perseroan terhadap praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Informasi rinci mengenai penggunaan kertas Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company successfully recorded a significant reduction in paper usage, consuming only 14,403,170 compared to 22,559,198 sheets in 2024. This trend demonstrates the effectiveness of the efficiency initiatives implemented, while strengthening the Company's commitment to more environmentally friendly business practices.

Detailed information regarding the Company's paper usage over the past 3 (three) years is presented as follows:

Penggunaan Kertas Paper Usage

2025

14.403.170

Lembar Kertas | Paper Sheet

2024

22.559.198

Lembar Kertas | Paper Sheet

2023

57.741.719

Lembar Kertas | Paper Sheet

Data di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diterapkan berhasil menekan angka penggunaan kertas secara substansial, sekaligus memperkuat komitmen Perseroan dalam mewujudkan hadirnya praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Dengan terus mendorong digitalisasi dan budaya *paperless*, Perseroan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menegaskan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan, selaras dengan prinsip ESG dan standar praktik bisnis global.

The data above demonstrates that the efficiency measures implemented have successfully and substantially reduced paper usage, while simultaneously strengthening the Company's commitment to realizing more environmentally friendly business practices. By continuing to promote digitalization and a paperless culture, the Company not only reduces its environmental impact but also enhances operational efficiency and reaffirms its responsibility toward sustainability, in alignment with ESG principles and global business practice standards.



Efisiensi dan Hemat Air Bersih [E-04]

Air bersih merupakan sumber daya esensial yang mendukung keberlangsungan aktivitas operasional Perseroan. Ketersediaan air yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik perkantoran, termasuk sanitasi, kebersihan fasilitas, aktivitas pendukung operasional, serta kebutuhan ibadah dan konsumsi harian. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, Perseroan memanfaatkan pasokan air dari PDAM dan sumur air dalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan menyadari bahwa pengelolaan air yang bertanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional, tetapi juga dengan upaya mitigasi risiko lingkungan dan gangguan operasional, seperti keterbatasan pasokan air maupun potensi banjir. Oleh karena itu, pengendalian konsumsi air menjadi bagian dari praktik pengelolaan lingkungan yang diterapkan secara berkelanjutan.

Implementasi pengelolaan air dilakukan melalui penerapan prinsip efisiensi dan penghematan yang berlaku di kantor pusat maupun kantor cabang. Seluruh karyawan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam penggunaan air secara bijak melalui kebijakan internal dan kampanye peningkatan kesadaran. Inisiatif tersebut meliputi:

Efficiency and Clean Water Conservation [E-04]

Clean water is an essential resource that supports the continuity of the Company's operational activities. An adequate water supply is required to meet office domestic needs, including sanitation, facility cleanliness, operational support activities, as well as religious requirements and daily consumption. To support these needs, the Company utilizes water supplies from PDAM and deep water wells in accordance with applicable regulations.

The Company recognizes that responsible water management relates not only to operational efficiency but also to environmental risk mitigation and the prevention of operational disruptions, such as water supply shortages or potential flood risks. Therefore, controlling water consumption is an integral part of the environmental management practices implemented sustainably.

The implementation of water management is carried out through the application of efficiency and conservation principles applicable at both the head office and branch offices. All employees are encouraged to actively participate in the wise use of water through internal policies and awareness campaigns. These initiatives include:



Inisiatif Utama Efisiensi dan Hemat Air Bersih Key Initiatives for Water Efficiency and Conservation

1. Melakukan kampanye hemat air;	1. Conducting water-saving campaigns;
2. Menampung air hujan dan menggunakannya untuk mencuci mobil operasional atau menyiram tanaman;	2. Collecting rainwater and using it to wash operational cars or water plants;
3. Melakukan pengecekan instalasi air secara berkala untuk mendeteksi kebocoran pipa atau saluran;	3. Checking water installations periodically to detect pipe or channel leaks;
4. Melakukan perbaikan dan penggantian instalasi air yang bocor; dan	4. Repairing and replacing leaking water installations; and
5. Menghimbau karyawan ataupun tamu gedung untuk selalu menutup keran dengan rapat.	5. Encouraging employees or guests of the building to always close taps tightly.

Tren pemakaian air bersih di lingkup Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

The trend in clean water usage within the Company over the past 3 (three) years is presented in the following table:

Penggunaan Air Water Usage

2025

21.967 M³

2024

35.947 M³

2023

34.007 M³



Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan konsumsi air melalui pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap instalasi jaringan air, guna mencegah kebocoran dan pemborosan. Di samping itu, budaya hemat air secara konsisten diinternalisasi kepada seluruh karyawan, sehingga tercipta pola penggunaan yang lebih efisien, terukur, dan bertanggung jawab.

Upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk mengintegrasikan aspek ESG ke dalam aktivitas operasional sehari-hari, sekaligus memperkuat praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair (Efluen)

[E-05]

Sebagai perusahaan pembiayaan, kegiatan operasional Perseroan tidak menghasilkan limbah industri berskala besar maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah signifikan. Limbah yang timbul umumnya berasal dari aktivitas administratif dan operasional perkantoran, seperti kertas dan arsip kedaluwarsa, kalender tidak terpakai, perangkat elektronik (UPS dan media penyimpanan), material plastik (kartu tidak aktif dan pembungkus dokumen), sampah makanan, serta seragam yang sudah tidak digunakan.

Selain limbah domestik perkantoran, Perseroan juga tidak menghasilkan limbah cair (efluen) yang berpotensi mencemari lingkungan. Seluruh limbah operasional dikelola secara rutin dan terjadwal melalui kerja sama dengan dinas kebersihan setempat, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, Perseroan menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) untuk menekan timbulan limbah padat. Implementasi prinsip ini mencakup pengurangan penggunaan material yang tidak esensial, pemanfaatan kembali aset atau perlengkapan yang masih layak pakai, serta pemilahan sampah untuk mendukung proses daur ulang. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan volume limbah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional. [F.14]

Perseroan memastikan bahwa seluruh limbah telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan maupun pengaduan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi di bidang lingkungan hidup, mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan pembiayaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan. [F.16]

Moving forward, the Company is committed to continuously optimizing the management of water consumption through routine maintenance and periodic inspections of water network installations to prevent leaks and waste. Furthermore, a water-saving culture is consistently internalized among all employees, creating a usage pattern that is more efficient, measurable, and responsible.

These efforts reflect the Company's commitment to integrating ESG aspects into daily operational activities, while simultaneously strengthening environmentally friendly business practices oriented toward long-term sustainability.

Waste and Liquid Waste (Effluent) Management

[E-05]

As a financing company, the Company's operational activities do not generate large-scale industrial waste or significant amounts of Hazardous and Toxic Waste (B3). The waste generated generally originates from administrative and office operational activities, such as paper and expired archives, unused calendars, electronic equipment (UPS and storage media), plastic materials (inactive cards and document/money wrappers), food waste, and unused uniforms.

The Company does not produce other liquid waste (effluents) than domestic waste that can pollute the environment. All operational waste is managed on a routine and scheduled basis through cooperation with the local sanitation department, while consistently adhering to applicable provisions and regulations.

In order to maintain environmental quality, the Company applies the reduce, reuse, recycle (3R) principles to suppress the generation of solid waste. The implementation of these principles includes reducing the use of non-essential materials, repurposing assets or equipment that are still fit for use, and sorting waste to support the recycling process. These efforts are directed at lowering the volume of waste sent to landfill sites (TPA) while minimizing the environmental impact of operational activities. [F.14]

The Company ensures that all waste is managed properly in accordance with applicable regulations. Throughout 2025, no reports or complaints were filed against non-compliance with regulations in the environmental sector, reflecting the Company's commitment to conducting financing activities oriented toward sustainability principles. [F.16]



Tumpahan yang Terjadi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya insiden tumpahan limbah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Hal ini sejalan dengan karakteristik bisnis Perseroan yang bergerak di sektor jasa keuangan, di mana kegiatan operasional tidak melibatkan bahan kimia berbahaya atau proses produksi yang menimbulkan risiko tumpahan.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Dalam rangka mengelola risiko lingkungan, Perseroan menjalankan seluruh aktivitas operasional di lokasi yang berada di luar kawasan konservasi dan area dengan keanekaragaman hayati tinggi. Sejalan dengan karakter usaha di sektor pembiayaan, Perseroan tetap mengintegrasikan komitmen pelestarian lingkungan hidup ke dalam setiap inisiatif yang relevan, meskipun operasionalnya tidak menimbulkan dampak langsung terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi.

Sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah melaksanakan berbagai aksi lingkungan, termasuk pengelolaan efisiensi energi listrik dan BBM, pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi, serta implementasi program hemat air bersih. Langkah-langkah ini tidak hanya menurunkan jejak karbon dan konsumsi sumber daya, tetapi juga mendukung terciptanya operasional yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam setiap lini kegiatan bisnis, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Mekanisme Pengaduan terkait Masalah Lingkungan Hidup

Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dijalankan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menerapkan prinsip bisnis berwawasan lingkungan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan yang dirumuskan dalam RAKB. Sebagai bagian dari komitmen ini, Perseroan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan terkait masalah lingkungan hidup, sehingga setiap potensi dampak negatif dapat ditangani secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Untuk mempermudah pelaporan dan pengelolaan pengaduan, Perseroan mengoptimalkan *Whistleblowing System* sebagai kanal resmi bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan laporan atau keluhan terkait pelanggaran lingkungan. Sistem ini memungkinkan pengaduan ditindaklanjuti secara efektif, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mendukung pengelolaan risiko lingkungan yang lebih baik, sekaligus memastikan seluruh operasional Perseroan selaras dengan standar keberlanjutan global.

Spills Occurred

Throughout 2025, the Company recorded no spill incidents across all its operational activities. This is in line with the Company's business characteristics as a financial services provider, where operational activities do not involve hazardous chemicals or production processes that pose a risk of spills.

Biodiversity Protection

In order to manage environmental risks, the Company conducts all its operational activities in locations situated outside of conservation areas and areas of high biodiversity value. In line with the nature of its business in the financing sector, the Company continues to integrate environmental preservation commitments into every relevant initiative although its operations do not have a direct impact on high conservation value areas.

As a tangible manifestation of its commitment to climate change mitigation, throughout 2025, the Company has implemented various environmental actions, including electricity and fuel efficiency management, reducing paper usage through digitalization, and implementing clean water conservation programs. These steps not only reduce the carbon footprint and resource consumption but also support the creation of more efficient, safe, and sustainable operations. These efforts are part of the Company's strategy to integrate ESG principles into every line of business activity, while simultaneously strengthening its contribution to responsible and sustainable economic development.

Environmental Complaint Mechanism

The Company ensures that all operational activities are regulatorily compliant and applies eco friendly business principles through various sustainability initiatives formulated in the SFAP (Sustainable Finance Action Plan). As part of this commitment, the Company provides a transparent complaint mechanism regarding environmental issues, ensuring that any potential negative impacts can be handled quickly, accurately, and accountably.

To facilitate reporting and complaint management, the Company optimizes the Whistleblowing System as the official channel for all relevant parties to submit reports or grievances related to environmental violations. This system enables effective follow-up on complaints, maintains Whistleblower confidentiality, and supports better environmental risk management, while ensuring all the Company's operations align with global sustainability standards.



KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN PRIMA DAN SETARA KEPADA SEMUA DEBITUR

[F.17]

Bagi Perseroan, pelayanan bukan sekadar proses operasional, melainkan cerminan dari nilai-nilai inti Perseroan yang menempatkan kepuasan dan kesejahteraan debitur sebagai prioritas utama. Perseroan memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan layanan yang adil, inklusif, dan setara menjadi pondasi dalam setiap interaksi bisnis. Dalam praktiknya, Perseroan terus berupaya menghadirkan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan berkelanjutan, serta memastikan ketersediaan akses yang merata bagi seluruh debitur baik melalui interaksi langsung dengan *customer service* di kantor cabang maupun melalui layanan digital yang mudah dijangkau.

Transparansi dan profesionalisme senantiasa menjadi landasan utama dalam setiap proses penanganan pengaduan debitur. Perseroan menjalankan mekanisme penanganan pengaduan dengan berpedoman pada standar *Service Level Agreement* (SLA) internal yang ketat, sekaligus mengacu pada regulasi OJK yang berlaku guna memastikan setiap masalah debitur diselesaikan secara cepat, adil, dan konsisten. Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan kepastian dan perlindungan bagi debitur, tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka terhadap Perseroan sebagai mitra keuangan yang andal, responsif, dan bertanggung jawab.

Lebih dari sekadar pelayanan, pendekatan inklusif ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan Perseroan. Dengan memastikan bahwa setiap debitur mendapatkan perlakuan yang sama dan pengalaman layanan yang konsisten, Perseroan turut mendukung pemberdayaan ekonomi yang merata dan inklusif. Komitmen ini memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menegaskan kontribusinya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis di tengah dinamika industri keuangan yang terus berkembang.

ASPEK KETENAGAKERJAAN

Kesetaraan Kesempatan Bekerja dan Mengembangkan Karier bagi Seluruh Karyawan [F.18]

Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan usaha tidak dapat dilepaskan dari terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan memberdayakan. Perseroan memahami bahwa setiap karyawan memiliki potensi unik yang layak

COMMITMENT TO PROVIDING EXCELLENT AND EQUAL SERVICE TO ALL DEBTORS [F.17]

For the Company, service is not merely an operational process but a reflection of its core values, which place debtor satisfaction and welfare as the top priority. The Company understands that every individual has different needs; therefore, a fair, inclusive, and equal service approach serves as the foundation for every business interaction. In practice, the Company continuously strives to provide innovative and sustainable financial products and services, ensuring equal access for all debtors through both direct interactions with customer service at branch offices and easily accessible digital services.

Transparency and professionalism consistently serve as the primary cornerstone in every debtor complaint handling process. The Company implements complaint handling mechanisms guided by strict internal Service Level Agreement (SLA) standards, while adhering to applicable OJK regulations to ensure that every debtor issue is resolved quickly, fairly, and consistently. This approach not only provides certainty and protection for debtors but also strengthens their trust in the Company as a reliable, responsive, and responsible financial partner.

Beyond mere service, this inclusive approach is a manifestation of the Company's social responsibility and sustainability. By ensuring that every debtor receives equal treatment and a consistent service experience, the Company supports equitable and inclusive economic empowerment. This commitment strengthens the Company's position as a professional, responsible financing company oriented toward long-term value creation for all stakeholders, while reaffirming its contribution to sustainable and ethical business practices amidst the evolving dynamics of the financial industry.

EMPLOYMENT ASPECT

Equal Employment Opportunities and Career Development for All Employees [F.18]

The Company believes that it should not disassociate business sustainability from the creation of an inclusive, fair, and empowering work environment, that every employee has unique potential worthy of development;



untuk dikembangkan, sehingga setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk membangun karier dan mencapai kinerja terbaiknya. Berangkat dari prinsip ini, inklusivitas dan kesetaraan dijadikan sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan, proses, dan praktik pengelolaan SDM Perseroan.

Dalam setiap tahap pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier, Perseroan menegaskan prinsip perlakuan setara tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang individu. Nilai-nilai budaya kerja yang positif juga dijunjung tinggi, termasuk penerapan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan juga memastikan pemenuhan hak karyawan, mulai dari kesempatan pengembangan kompetensi, peningkatan karier, hingga remunerasi yang adil, sebagai wujud nyata komitmen terhadap kesejahteraan dan motivasi karyawan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan pengaduan dari karyawan terkait diskriminasi di lingkungan kerja. Hal ini mencerminkan kepatuhan Perseroan terhadap praktik ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Komitmen terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Karyawan Termasuk Pencegahan Pelecehan Seksual

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karyawan bukan sekadar prinsip operasional bagi Perseroan, melainkan landasan etis yang menjadi fondasi setiap kebijakan, praktik, dan interaksi dalam lingkungan kerja. Perseroan meyakini bahwa setiap karyawan merupakan individu dengan martabat, hak, dan potensi yang harus dihormati sehingga masing-masing individu dapat bekerja dalam suasana yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi, pelecehan seksual, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan membangun budaya kerja yang adil, setara, dan saling menghormati, di mana setiap kebebasan untuk menyampaikan pendapat maupun pengaduan ditanggapi dengan serius, objektif, dan penuh tanggung jawab. Prinsip *zero tolerance* juga diterapkan secara konsisten terhadap segala bentuk pelecehan, diskriminasi, atau perilaku yang merugikan, baik yang bersifat verbal maupun fisik, sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan etis. Pelaksanaan kebijakan ini diperkuat melalui aturan internal yang tegas mengenai jaminan hak-hak dasar karyawan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 3 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam bertindak profesional dan bertanggung jawab.

and hence, gives everyone equal opportunities to build a career and achieve their best performance. Departing from this principle, inclusiveness and equality are built as the main pillars in every policy, process, and human resources management practice of the Company.

In every stage of HR management, from recruitment to career development, the Company affirms the principle of equal treatment regardless of ethnicity, race, religion, gender, or individual background. Positive work culture values are also upheld, including the zero-tolerance policy toward all forms of discrimination. The Company also ensures the fulfillment of employee rights, from competency development opportunities and career advancement to fair remuneration, as a concrete manifestation of its commitment to employee welfare and motivation.

Throughout 2025, the Company received no reports or complaints from employees regarding discrimination in the workplace. This reflects the Company's compliance with labor practices as regulated in Law No. 13 of 2003 on Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation.

Commitment to the Protection of Employee Human Rights, Including the Prevention of Sexual Harassment

Respect for employee Human Rights is not merely an operational principle for the Company, but rather an ethical foundation that serves as the basis for every policy, practice, and interaction within the work environment. The Company believes that every employee is an individual with dignity, rights, and potential that must be respected so that each individual can work in an atmosphere that is safe, inclusive, and free from discrimination, sexual harassment, or other forms of inhumane treatment.

In realizing this commitment, the Company fosters a work culture that is fair, equal, and mutually respectful, where every freedom to voice opinions or complaints is responded to seriously, objectively, and responsibly. A zero-tolerance principle is also consistently applied to all forms of harassment, discrimination, or harmful behavior, whether verbal or physical, as part of the Company's efforts to maintain a safe, inclusive, and ethical work environment. the implementation of this policy is reinforced through strict internal rules regarding the guarantee of basic employee rights, as regulated in Article 3 of the Company's Regulations concerning the Rights and Obligations of the Parties, serving as a guideline for all employees to act professionally and responsibly.



Dengan tersedianya landasan kebijakan yang jelas, Perseroan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, tetapi juga menegaskan komitmen berkelanjutan dalam membangun budaya kerja yang menghormati martabat setiap individu. Setiap karyawan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan secara aman, objektif, dan transparan, sehingga tercipta suasana kerja yang saling menghargai, mendukung pengembangan kompetensi, dan mendorong produktivitas yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan internal perusahaan sebagaimana dalam Memo Internal Nomor 6206/IR/IV/2025 tentang Penanganan Keluhan Karyawan Melalui IR Care.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan terkait pelanggaran HAM, termasuk kasus pelecehan seksual maupun tindakan tidak manusiawi lainnya, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas penerapan kebijakan internal, penguatan budaya kerja yang saling menghormati, serta komitmen berkelanjutan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, etis, dan berkeadilan bagi seluruh karyawan.

Kepatuhan terhadap Praktik Kerja tanpa Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [5-10]

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Perseroan menentang keras praktik kerja paksa di seluruh wilayah operasional dan memastikan penerapan jam kerja yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Perusahaan, seluruh karyawan bekerja 5 (lima) hari dalam seminggu dengan durasi 8 (delapan) jam per hari, serta diberikan waktu istirahat 1 (satu) jam setelah 4 (empat) jam bekerja. Perseroan juga memberikan kompensasi berupa insentif lembur bagi karyawan yang melakukan kerja lembur sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menghormati HAM dan menjunjung prinsip kesejahteraan pekerja dalam setiap aktivitas bisnis.

Perseroan juga memastikan tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di seluruh area operasional. Untuk mencegah praktik rekrutmen tenaga kerja anak, Perseroan secara tegas mengatur standar usia minimum karyawan dalam Pasal 7 Bab II Peraturan Perusahaan. Penyusunan kebijakan tersebut sudah memperhatikan ketentuan Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan maupun pengaduan terkait praktik kerja paksa maupun pekerja anak di bawah umur baik di kantor pusat maupun cabang. Hal ini menegaskan komitmen berkelanjutan Perseroan terhadap praktik ketenagakerjaan yang etis dan bertanggung jawab.

With a clear policy framework in place, the Company not only ensures compliance with applicable labor regulations but also reaffirms its ongoing commitment to building a work culture that respects the dignity of every individual. Every employee is provided with a safe, objective, and transparent space to express opinions and grievances, thereby creating a work atmosphere of mutual respect that supports competency development and drives sustainable productivity. This is in accordance with the company's internal policy as set forth in Internal Memo No. 6206/IR/IV/2025 regarding the Handling of Employee Complaints Through IR Care.

Throughout 2025, the Company received no reports related to Human Rights violations, including cases of sexual harassment or other inhumane acts, at either the head office or branch offices. This achievement reflects the effectiveness of internal policy implementation, the strengthening of a mutually respectful work culture, and the Company's ongoing commitment to creating a safe, inclusive, ethical, and equitable work environment for all employees.

Compliance with Labor Practices without Child Labor and Forced Labor [5-10]

In conducting its business activities, the Company strongly opposes forced labor practices across all operational areas and ensures the implementation of reasonable working hours in accordance with applicable labor regulations. Based on Article 15 of the Company's Regulations, all employees work 5 (five) days a week with a duration of 8 (eight) hours per day, and are provided with a 1 (one) hour break after 4 (four) hours of work. The Company also provides compensation in the form of overtime incentives for employees who perform overtime work in accordance with the provisions. This reflects the Company's commitment to respecting Human Rights and upholding the principle of worker welfare in every business activity.

The Company also ensures that no underage children are employed throughout all operational areas. To prevent child labor recruitment practices, the Company strictly regulates the minimum age standard for employees in Chapter II, Article 7 of the Company's Regulations. The formulation of this policy takes into account the provisions of the International Labour Organization (ILO) Convention No. 138 regarding the minimum age for admission to employment.

Throughout 2025, there were no reports or complaints related to forced labor practices or underage child labor at either the head office or branch offices. This reaffirms the Company's ongoing commitment to ethical and responsible labor practices.



Kebijakan Remunerasi yang Adil dan Kompetitif bagi Karyawan

Perseroan menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam penerapan kebijakan remunerasi yang kompetitif, transparan, dan selaras dengan kinerja karyawan. Penyusunan skema dan besaran remunerasi dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi finansial Perseroan, dinamika ekonomi, tingkat inflasi, serta kesesuaian dengan strategi bisnis jangka panjang. Kebijakan remunerasi ini merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam menunjang kesejahteraan karyawan, sekaligus mendorong loyalitas, motivasi, dan kontribusi optimal seluruh insan Perseroan.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menekankan prinsip inklusivitas dan keadilan, Perseroan menerapkan remunerasi yang setara tanpa membedakan jenis kelamin. Tidak terdapat kesenjangan gaji pokok antara karyawan laki-laki dan perempuan, dengan rasio 1:1, sebagai cerminan komitmen Perseroan dalam menjamin pemenuhan hak karyawan secara adil dan bebas bias gender.

Perseroan memastikan bahwa besaran remunerasi yang diberikan kepada seluruh karyawan berada pada tingkat yang layak, memadai, dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup karyawan, remunerasi yang diterima telah memenuhi, bahkan melebihi, Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku. Kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan prinsip kesetaraan dalam hal pengupahan dapat dilihat melalui perbandingan gaji karyawan dengan ketentuan upah minimum, yang dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Perbandingan Gaji Karyawan dengan Golongan Terendah terhadap UMR [F.20]

Comparison of Employee Salaries in the Lowest Class to the Regional Minimum Wage (UMR)

Wilayah Operasional Operational Area	UMP Tahun 2025 2025 Minimum Wage	Gaji Karyawan Golongan Terendah Lowest Employee Salary			
		Tetap Permanent	Rasio Ratio	Kontrak Contract	Rasio Ratio
Kantor Pusat Head Office	Rp5.396.761	Rp5.867.403	1 : 1,09	Rp5.416.856	1 : 1,00
Cabang Bali dan Indonesia Bagian Timur (Intim) Bali and Eastern Indonesia Branch	Rp3.045.329	Rp3.010.262	1 : 1,00	Rp3.129.702	1 : 1,03
Cabang Jawa Barat West Java branch	Rp3.854.620	Rp4.067.783	1 : 1,06	Rp3.837.146	1 : 1,00
Cabang Jawa Tengah Central Java Branch	Rp2.713.232	Rp2.923.020	1 : 1,08	Rp2.688.379	1 : 1,00
Cabang Jawa Timur East Java Branch	Rp4.167.388	Rp4.212.759	1 : 1,01	Rp4.333.729	1 : 1,04
Cabang Kalimantan Kalimantan Branch	Rp3.587.198	Rp3.745.544	1 : 1,04	Rp3.609.630	1 : 1,01
Region Jabodetabek	Rp5.235.245	Rp5.382.752	1 : 1,03	Rp5.251.248	1 : 1,00
Region Sulawesi	Rp3.637.875	Rp3.807.905	1 : 1,05	Rp3.626.882	1 : 1,00
Region Sumatera	Rp3.974.031	Rp4.164.241	1 : 1,05	Rp3.948.205	1 : 1,00

Fair and Competitive Remuneration Policy for Employees

The Company places the principle of fairness as the primary foundation in implementing remuneration policies that are competitive, transparent, and aligned with employee performance. The remuneration scheme and amount is formulated comprehensively with due consideration of the Company's financial condition, economic dynamics, inflation rates, and alignment with long-term business strategies. This policy is a concrete manifestation of the Company's commitment to supporting employee welfare, while simultaneously fostering loyalty, motivation, and the optimal contribution of all the Company's personnel.

As a financing company that emphasizes the principles of inclusiveness and fairness, the Company implements equal remuneration regardless of gender. There is no basic salary gap between male and female employees, with a ratio of 1:1, reflecting the Company's commitment to ensuring the fulfillment of employee rights fairly and free from gender bias.

The Company ensures that the amount of remuneration provided to all employees is at a decent and adequate level, in accordance with applicable labor regulations. As a form of support for improving the quality of life of employees, the remuneration received meets, and even exceeds, the Provincial Minimum Wage (UMP) or the applicable Regency/City Minimum Wage. The Company's compliance with regulations and the principle of equality in terms of wages can be seen through the comparison of employee salaries with minimum wage provisions, which are detailed in the following table:



Selain berhak atas gaji pokok, Perseroan juga memberikan berbagai manfaat non-tunai yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh, seperti Jaminan Kesehatan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan, program dana pensiun, serta fasilitas kegiatan seni dan olahraga untuk mendukung terciptanya keseimbangan harmonis antara tanggung jawab pekerjaan dan kualitas kehidupan pribadi karyawan. Di samping itu, karyawan yang telah bekerja selama minimal 12 bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan, serta tetap menerima upah penuh selama cuti sebagai bentuk penghargaan Perseroan atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi mereka dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan organisasi.

Perseroan juga memastikan pemenuhan hak remunerasi bagi karyawan kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan, sehingga seluruh karyawan baik yang berstatus tetap maupun kontrak mendapatkan perlakuan yang adil, konsisten, dan transparan. Pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Perseroan untuk membangun lingkungan kerja yang kompetitif, inklusif, sehat, dan produktif, di mana setiap karyawan dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi maksimal secara profesional sekaligus manusiawi.

Tingkat Pergantian Karyawan [S-03]

Tingkat pergantian karyawan (*employee turnover*) merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pengelolaan SDM di Perseroan. Pemantauan terhadap perputaran karyawan dilakukan secara seksama, tidak hanya untuk menjaga kelancaran operasional, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan talenta yang berkelanjutan, yang menekankan pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan potensi karyawan secara optimal, sehingga menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh organisasi.

Dalam upaya menjaga stabilitas tenaga kerja, Perseroan menerapkan berbagai langkah mitigasi yang terukur dan sistematis. Upaya ini mencakup *benchmarking* praktik terbaik di industri, retensi karyawan berprestasi, serta analisis posisi-posisi kunci dan kritikal yang memiliki peran strategis dalam operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan secara konsisten mendorong keterlibatan karyawan melalui program-program motivasi, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi, dengan tujuan memperkuat loyalitas, membangun hubungan kerja yang harmonis, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan talenta.

In addition to the right to a basic salary, the Company also provides various non-cash benefits designed to enhance the overall quality of life and well-being of employees, such as Health Insurance, Religious Holiday Allowance (THR), annual leave allowance, maternity leave allowance for female employees, a pension fund program, as well as arts and sports facilities to support a harmonious balance between work responsibilities and the quality of employees' personal lives. Furthermore, employees who have completed at least 12 (twelve) consecutive months of service are entitled to annual leave while continuing to receive full wages during the leave, as a form of the Company's appreciation for their dedication, loyalty, and contribution to the success and sustainability of the organization.

The Company also ensures the fulfillment of remuneration rights for contract employees in accordance with the provisions of the Company's Regulations, ensuring that all employees, whether permanent or contract, receive fair, consistent, and transparent treatment. This holistic approach reflects the Company's ongoing commitment to building a competitive, inclusive, healthy, and productive work environment where every employee can grow, develop, and provide their maximum contribution in a professional and humane manner.

Employee Turnover Rate [S-03]

The employee turnover rate is one of the key indicators in assessing the effectiveness of HR management within the Company. Monitoring employee turnover is conducted diligently, not only to maintain operational continuity but also as part of a sustainable talent management strategy that emphasizes capacity building, competency enhancement, and the optimal utilization of employee potential, thereby creating long-term value for the entire organization.

To maintain workforce stability, the Company implements measurable and systematic mitigation initiatives, including benchmarking against industry best practices, retaining high-performing employees, and analyzing key and critical positions that play strategic roles in its operations. In parallel, the Company promotes employee engagement through motivation programs, career development, and competency enhancement, with the aim of strengthening loyalty, building harmonious working relationships, and supporting the sustainability of talent management.



Informasi terkait pergantian karyawan Perseroan selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Information regarding the Company's employee turnover during 2025 is presented in the following table:

Deskripsi Description	Jumlah Karyawan Tahun 2025 Number of Employees in 2025	Persentase kenaikan (penurunan) dibandingkan Tahun 2024 Percentage increase (decrease) compared to 2024
Jumlah karyawan <i>resign</i> atau mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Number of employees who resigned or were laid off	4.541 karyawan 4,541 employees	1,63%
Jumlah karyawan baru atau pengganti Number of new or replacement employees	1.718 karyawan 1,718 employees	(44,06%)

Berdasarkan data tersebut, *turnover* sukarela dan atrisi pada tahun 2025 meningkat sebesar 1,63% dibandingkan tahun 2024, mencerminkan dinamika tenaga kerja yang tetap terjaga dalam batas yang terkendali. Di sisi lain, Perseroan juga menurunkan jumlah rekrutmen karyawan baru atau pengganti sebesar 44,06% sebagai bagian dari strategi efisiensi dan optimalisasi struktur organisasi.

Based on these data, voluntary turnover and attrition in 2025 increased by 1.63% compared to 2024, reflecting workforce dynamics that remain within manageable limits. Meanwhile, the Company also reduced the number of new hires or replacements by 44.06% as part of its strategy to improve efficiency and optimize its organizational structure.

Komitmen Menghadirkan Lingkungan Kerja yang Layak dan Kondusif [S-11]

Perseroan menempatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif sebagai salah satu fondasi utama dalam mendukung produktivitas serta keberlanjutan kinerja seluruh insan Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara konsisten berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penerapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang komprehensif, terstruktur, dan dijalankan dengan disiplin di seluruh area operasional.

Commitment to Providing a Decent and Conducive Work Environment [S-11]

The Company places a safe, healthy, and conducive work environment as one of the primary foundations for supporting the productivity and sustainable performance of all the Company's personnel. To this end, the Company is consistently committed to creating a conducive work environment through the implementation of a comprehensive and structured Occupational Health and Safety (OHS) policy, executed with discipline across all operational areas.

Meskipun beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan dengan tingkat risiko operasional rendah, Perseroan memastikan bahwa setiap kebijakan K3 diterapkan secara menyeluruh dan ketat. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja, menjaga kesejahteraan karyawan, mencegah insiden atau penyebaran penyakit, dan menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, serta mendukung kinerja optimal. Dengan pendekatan ini, Perseroan menegaskan komitmen berkelanjutan dalam membangun lingkungan kerja yang layak, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan.

Although operating as a financing company with a low operational risk level, the Company ensures that every OHS policy is implemented thoroughly and strictly. This step aims to minimize potential work accidents, maintain employee well-being, prevent incidents or the spread of diseases, and create safe, comfortable working conditions that support optimal performance. Through this approach, the Company reaffirms its ongoing commitment to building a decent, healthy, and productive work environment for all employees.



Tingkat Kecelakaan Kerja dan Implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

[S-06]

Sebagai perusahaan pembiayaan dengan risiko operasional yang relatif rendah, Perseroan tetap menempatkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas strategis. Perlindungan kesehatan dan keselamatan karyawan menjadi bagian integral dari pemenuhan hak pekerja sekaligus upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Penerapan sistem K3 yang konsisten membuktikan komitmen Perseroan dalam mengelola risiko secara proaktif serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan.

Sistem K3 Perseroan dirancang berdasarkan regulasi perundang-undangan dan kebijakan internal, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 26 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; serta
6. Kebijakan internal Perseroan terkait K3 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 727/KBFMF/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

Agar penerapan K3 berjalan secara efektif, Perseroan menugaskan Departemen General Affair sebagai penanggung jawab utama, dengan ruang lingkup tugas meliputi:

1. Melakukan analisis kelayakan gedung sebelum proses sewa-menyewa, untuk memastikan infrastruktur aman dan layak digunakan;
2. Menilai lokasi kantor cabang guna memitigasi risiko bencana alam musiman, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang; dan
3. Menetapkan standar material dan konstruksi gedung agar lingkungan kerja aman, nyaman, dan ramah bagi karyawan.

Workplace Accident Rates and the Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Systems [S-06]

As a financing company with a relatively low operational risk, the Company continues to place Occupational Health and Safety (OHS) as a strategic priority. The protection of employee health and safety is an integral part of fulfilling workers' rights, as well as an effort to create a safe, comfortable, and productive work environment. The consistent implementation of the OHS system demonstrates the Company's commitment to proactively managing risks and upholding sustainability principles.

The Company's OHS system is designed based on statutory regulations and internal policies, including:

1. Law No. 1 of 1970 on Occupational Health and Safety;
2. Law No. 17 of 2023 on Health;
3. Law No. 13 of 2003 on Manpower;
4. Law No. 6 of 2023 on Job Creation;
5. Minister of Manpower Regulation No. 26 of 2014 on Occupational Health and Safety Management Systems; and
6. Internal policies regarding OHS as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 727/KBFMF/XI/2024 dated November 20, 2024.

To ensure the effective implementation of OHS, the Company appoints the General Affairs Department as the primary person in charge, with a scope of duties including:

1. Conducting building feasibility analyses prior to the leasing process to ensure that infrastructure is safe and fit for use;
2. Assessing branch office locations to mitigate the risks of seasonal natural disasters, such as floods, landslides, and high winds; and
3. Establishing material and building construction standards to ensure a safe, comfortable, and worker-friendly environment.



Perseroan juga mendorong seluruh karyawan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja. Berbagai inisiatif K3 telah dilaksanakan di kantor pusat maupun cabang, antara lain:

1. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat kebakaran;
2. Penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk hand sanitizer dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
3. Pemastian ketersediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat di seluruh area operasional; dan
4. Sistem pelaporan dan *monitoring* K3 secara rutin di setiap kantor cabang.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat nihil kasus kecelakaan kerja, baik di kantor pusat maupun cabang. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi sistem K3 berjalan efektif dan konsisten, sekaligus mencerminkan komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ESG dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dukungan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Karyawan [S-05]

Perkembangan pesat di sektor pembiayaan *multifinance* mendorong Perseroan untuk terus memperkuat kompetensi karyawan sebagai pilar utama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Untuk itu, Perseroan menempatkan program pengembangan kompetensi karyawan sebagai prioritas strategis dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan yang terarah, mencakup baik pengembangan *soft skills* maupun *hard skills*.

Materi pelatihan disusun agar relevan dengan dinamika dan kebutuhan industri jasa keuangan sehingga seluruh insan Perseroan memiliki kapabilitas unggul. Melalui program ini, setiap karyawan diharapkan memiliki kemampuan mumpuni dalam menjalankan tanggung jawabnya, sekaligus mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan usaha Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan beragam kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk pelatihan, lokakarya, sertifikasi, konferensi, dan seminar. Tercatat jumlah program yang telah dilaksanakan berjumlah 15 Diklat dengan realisasi anggaran sebesar Rp13,19 miliar.

Informasi lebih rinci terkait program pengembangan kompetensi Perseroan dijelaskan melalui tabel berikut:

The Company also encourages all employees to foster awareness and responsibility for their own safety and that of their colleagues. Various OHS initiatives have been implemented at the head office and branches, including:

1. Fire emergency response training and simulations;
2. Provision of health facilities, including hand sanitizers and First Aid (P3K) kits;
3. Ensuring the availability of emergency response equipment and supplies across all operational areas; and
4. Routine OHS reporting and monitoring systems at each branch office.

Throughout 2025, the Company recorded zero work accidents at both the head office and branches. This result indicates that the implementation of the OHS system has been effective and consistent, while reflecting the Company's commitment to creating a safe, conducive, and sustainable work environment in line with ESG principles in daily business practices.

Employee Training and Capacity Building Support [S-05]

Rapid developments in the multifinance sector drive the Company to continuously strengthen employee competencies as a primary pillar in enhancing competitiveness and service quality. To this end, the Company places employee competency development programs as a strategic priority by organizing various targeted training sessions, covering both soft skills and hard skills development.

Training materials are designed to be relevant to the dynamics and needs of the financial services industry, ensuring that all Company employees develop strong and relevant capabilities. Through this program, employees are expected to demonstrate a high level of proficiency in performing their responsibilities while contributing effectively to the achievement of the Company's business objectives.

Throughout 2025, the Company organized various competency development activities, including training sessions, workshops, certifications, conferences, and seminars. A total of 15 training programs were conducted, with a budget realization of IDR13.19 billion.

More detailed information about the Company's competency development programs is described in the following table:



Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
<i>Branch Managerial Development Program</i>	28	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Management Trainee</i>	62	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Leadership program for Manager</i>	28	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Certification – Basic Managerial</i>	77	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Certification – Collection</i>	1.665	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Certification – Manajemen Risiko</i> <i>Certification – Risk Management</i>	4	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Certification – Refreshment Point BOD / BOC</i>	28	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Anti-fraud</i>	1.711	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)</i> <i>Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (AML/CFT)</i>	2.027	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Pelindungan Konsumen</i> <i>Consumer Protection</i>	3.947	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Pelindungan Data Pribadi</i> <i>Personal Data Protection</i>	3.947	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Keuangan Berkelanjutan</i> <i>Sustainable Finance</i>	580	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Manajemen Dasar Risiko</i> <i>Basic Risk Management</i>	283	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Orientasi Karyawan Baru (OKB)</i> <i>New Employee Orientation (NEO)</i>	12.294	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Orientation program for Operation Staff</i>	388	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Orientation program for Sales SPV/HEAD</i>	41	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Orientation program for Credit SPV/ HEAD</i>	36	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>IT & Product Certification</i>	17	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Reinforcement program for Manager</i>	1.050	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Reinforcement program for Branch Manager</i>	123	Januari, Februari, Mei 2025 January, February, May 2025
<i>Reinforcement program for Credit Manager</i>	5	April, Mei 2025 April, May 2025
<i>Reinforcement program for Operation Manager</i>	111	Juli 2025 July 2025
<i>Reinforcement program for Sales SPV/ Head</i>	1.664	Februari, Agustus, Oktober 2025 February, August, October 2025
<i>Reinforcement program for Credit SPV/ Head</i>	172	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Employee Event</i>	27.184	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Sosialisasi MI/SKD</i> <i>MI/SKD Socialization</i>	644	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Pendampingan pelaksanaan kebijakan</i> <i>Policy Implementation Support</i>	535	Januari – Desember 2025 January – December 2025
<i>Workshop implementasi kebijakan</i> <i>Policy Implementation Workshop</i>	526	Januari – Desember 2025 January – December 2025



Rincian program pengembangan kompetensi, termasuk jumlah peserta serta distribusi jam pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan jenjang manajemen, dijelaskan lebih lanjut melalui tabel-tabel berikut:

Details of the competency development programs, including total participants and the distribution of training hours by gender and management level, are further described in the following tables:

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Trained	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan Average Training Hours per Employee
Berdasarkan Jenis Kelamin By Gender			
Laki-laki Male	4.431	36.833	2,48
Perempuan Female	1.251	12.919	2,66
Berdasarkan Jenjang Manajemen By Management Level			
Dewan Komisaris & Direksi BoC & BoD	8	129	6,25
Kepala Divisi Head Division	16	321	5,35
Manager	757	13.097	5,07
Supervisor	1.062	8.446	2,65
Staff	3.839	27.759	2,04

Asuransi Kesehatan Kerja

Perseroan berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan karyawan dengan menyediakan program asuransi kesehatan yang meng-cover seluruh karyawan beserta anggota keluarga inti mereka. Fasilitas kesehatan ini merupakan hasil kerja sama antara Perseroan dengan PT Mandiri Axa General Insurance yang memberikan layanan menyeluruh mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin (*check-up*), perawatan rawat inap dan rawat jalan, perawatan gigi, hingga program persalinan bagi istri karyawan.

Selain itu, Perseroan memastikan bahwa seluruh (100%) karyawan di kantor pusat maupun kantor cabang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan ini menjadi wujud komitmen nyata Perseroan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan secara menyeluruh, sehingga karyawan dapat bekerja dengan rasa aman, tenang, dan sepenuhnya fokus dalam memberikan kontribusi profesional mereka.

Occupational Health Insurance

The Company is committed to supporting employee well-being by providing health insurance programs that cover all employees and their immediate family members. This health facility is the result of a collaboration between the Company and PT Mandiri Axa General Insurance, providing comprehensive services ranging from routine medical check-ups and inpatient and outpatient care to dental care and maternity programs for employees' wives.

Additionally, the Company ensures that all employees (100%) at both the head office and branch offices are registered as active participants in the BPJS Health and BPJS Employment programs. This reflects the Company's commitment to providing comprehensive health and employment protection, enabling employees to work with a sense of security and confidence while remaining fully focused on delivering their professional contributions.

ASPEK MASYARAKAT

Informasi Kegiatan atau Wilayah Operasional yang Menghasilkan Dampak terhadap Masyarakat [F.23]

Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari tiga dekade, Perseroan memiliki jaringan operasional yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari kantor pusat hingga cabang di daerah-daerah strategis. Keberadaan Perseroan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat

COMMUNITY ASPECT

Activities or Operational Areas that have an Impact on the Society [F.23]

As a financing company that has served the Indonesian people for over three decades, the Company maintains an operational network spread across various regions, from its head office to branches in strategic areas. The Company's presence aims not only to provide financial services but also to drive local economic growth and offer a tangible contribution to the surrounding community. This commitment is realized through a series of strategic



sekitar. Komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian inisiatif strategis, mulai dari membuka lapangan kerja yang mengutamakan putra-putri daerah, bekerja sama dengan pemasok lokal untuk memperkuat rantai nilai operasional, hingga menyalurkan bantuan sosial serta melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas.

Dalam menghadirkan layanan pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat, Perseroan selalu menempatkan prinsip inovasi dan inklusivitas sebagai landasan pengembangan produknya. Seluruh pilihan pembiayaan, mulai dari modal kerja, investasi, hingga kebutuhan rumah tangga dan elektronik (DE&A), dirancang secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga secara langsung mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Seiring dengan pengembangan layanan pembiayaan, Perseroan juga menjalankan seluruh aktivitas operasional dengan menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten. Setiap kegiatan bisnis dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar, sekaligus menjaga harmoni antara operasional perusahaan dan keberlanjutan alam. Pendekatan ini memastikan bahwa

initiatives, ranging from creating job opportunities that prioritize local talent and collaborating with local suppliers to strengthen the operational value chain, to distributing social assistance and implementing Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs designed to enhance community welfare and empowerment.

In providing inclusive financing services to the public, the Company consistently places the principles of innovation and inclusivity as the foundation of its product development. All financing options—ranging from working capital and investment to household and electronic needs (DE&A)—are designed flexibly and tailored to the community's needs, thereby directly driving sustainable local economic empowerment.

Alongside the development of its financing services, the Company conducts all operational activities by consistently applying sustainability principles. Every business activity is designed to minimize negative impacts on the ecosystem and the surrounding environment, while maintaining harmony between corporate operations and natural sustainability. This approach ensures that the Company's



pertumbuhan usaha Perseroan tidak hanya terukur dari sisi finansial, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara bisnis, masyarakat, dan alam.

Di sisi lain, Perseroan menyadari bahwa setiap aktivitas pembiayaan membawa potensi risiko yang harus dikelola dengan cermat dan bertanggung jawab. Adapun risiko-risiko yang memiliki eksposur signifikan terhadap bisnis Perseroan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan operasional Perseroan, seperti kredit macet yang berpotensi membatasi akses debitur terhadap layanan keuangan di masa mendatang maupun kemungkinan kebocoran data pribadi nasabah. Untuk itu, Perseroan menerapkan proses identifikasi dan verifikasi calon debitur secara menyeluruh guna menilai profil risiko dan kemampuan membayar dengan seksama sehingga setiap keputusan pembiayaan dapat diambil secara *prudent*, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Perseroan juga secara proaktif menyelenggarakan program edukasi dan literasi keuangan, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab, sehingga dampak sosial dari aktivitas pembiayaan dapat diminimalkan. Di sisi lain, dalam hal perlindungan data, Perseroan terus memperkuat dan memperbarui infrastruktur serta sistem TI untuk mengantisipasi risiko kebocoran maupun serangan *phishing*, sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang ketat dan standar keamanan yang tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan tidak hanya dijalankan dengan aman dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap dampak positif maupun negatif dari seluruh aktivitas usaha, Perseroan mampu mengenali area yang memerlukan penguatan atau perbaikan, sekaligus menjadikannya sebagai landasan strategis dalam merancang arah dan prioritas kegiatan bisnis ke depan. Pendekatan ini menegaskan komitmen Perseroan untuk mengelola usaha pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, serta menjaga keseimbangan yang harmonis antara bisnis, komunitas, dan ekosistem di sekitarnya.

business growth is not only measured financially but also strengthens its social contribution, preserves the environment, and creates a sustainable balance between business, society, and nature.

On the other hand, the Company recognizes that every financing activity carries potential risks that must be managed carefully and responsibly. Risks with significant exposure to the Company's business are a primary focus of operational management, such as bad credit—which has the potential to limit debtors' future access to financial services—and the possibility of leaking customers' personal data. To this end, the Company implements a comprehensive identification and verification process for prospective debtors to carefully assess risk profiles and repayment capacity, ensuring that every financing decision is made prudently, responsibly, and in alignment with sustainability principles.

The Company also proactively organizes financial education and literacy programs designed to improve public understanding of the responsible use of financing facilities, thereby minimizing the social impact of financing activities. Furthermore, regarding data protection, the Company continues to strengthen and update its IT infrastructure and systems to anticipate leakage risks and phishing attacks, in line with the implementation of strict risk management and high security standards. This approach ensures that all financing activities are conducted not only safely and efficiently but also in accordance with the principles of sustainability, integrity, and corporate social responsibility.

By conducting a thorough mapping of both the positive and negative impacts of all business activities, the Company is able to identify areas requiring reinforcement or improvement, while using them as a strategic foundation for designing future business directions and priorities. This approach reaffirms the Company's commitment to managing a financing business that focuses not only on economic growth but also on creating sustainable social and environmental value, empowering the community, and maintaining a harmonious balance between the business, the community, and the surrounding ecosystem.



Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) [5-12]

Dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya, Perseroan menempatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Setiap inisiatif mencerminkan upaya Perseroan untuk tumbuh selaras dengan komunitas dan ekosistem di sekitarnya, menegaskan peran aktif perusahaan dalam pembangunan sosial yang inklusif dan bertanggung jawab.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan sejumlah program TJSL yang berfokus pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pendidikan, sosial, dan lingkungan, di seluruh wilayah operasional kantor pusat maupun cabang. Rincian program TJSL beserta capaian yang diperoleh Perseroan disajikan sebagai berikut:

Environmental Social Responsibility (CSR) Activities [5-12]

In conducting all its business activities, the Company places harmonious relationships with the community and stakeholders as a top priority. This commitment is realized through various Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs designed not only to provide immediate benefits but also to create a sustainable, long-term impact on society while preserving the environment. Each initiative reflects the Company's efforts to grow in harmony with the surrounding community and ecosystem, reaffirming the Company's active role in inclusive and responsible social development.

Throughout 2025, the Company ran numerous CSER programs focusing on 3 (three) main pillars—education, social, and environment—across all operational areas of the head office and branches. The details of the CSER programs and the achievements attained by the Company are presented as follows:

No	Bidang Field	Jenis Kegiatan Type of activity	Aspek TPB TPB Aspect	Periode Pelaksanaan Implementation Period	Dampak dan Capaian Kegiatan Impact and Achievement of Activities	Realisasi Biaya Cost Realization
1.	Donasi keperluan pendidikan Educational Donations	Donasi sosial untuk Panti Asuhan Putra Nusa Charitable donation to the Putra Nusa Orphanage	04 QUALITY EDUCATION 01 NO POVERTY	5 November 2025 November 5, 2025	Membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pendidikan anak-anak di Yayasan Putra Nusa. Assisting in meeting the basic needs of children and fostering their enthusiasm for learning as they pursue their education at the Putra Nusa Foundation.	Rp13.000.000
2.	Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation	Donasi bibit pohon produktif kepada Kelompok Tani Hutan Ciwalen Donation of productive tree seedlings to the Ciwalen Forest Farmers' Group	15 LIFE ON LAND 13 CLIMATE ACTION	8 November 2025 dan 12 November 2025 November 8, 2025 and November 12, 2025	Mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penanaman pohon produktif yang memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi jangka panjang bagi Masyarakat di wilayah Cianjur. Supporting sustainable forest management through the planting of productive trees that provide long-term environmental and economic benefits to communities in the Cianjur region.	Rp29.000.000
3.	Peningkatan Awareness/ Pendidikan Terkait Keuangan Berkelanjutan Raising Awareness/ Education on Sustainable Finance	Pelatihan keuangan berkelanjutan kepada pegawai Training on sustainable finance for employees	04 QUALITY EDUCATION 08 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	Januari-Desember 2025 January-December 2025	Peningkatan awareness bagi 580 pegawai. Raising awareness among 580 employees.	-
Jumlah Total						Rp42.000.000



Kampanye Literasi dan Inklusi Keuangan

Perseroan mengambil peran aktif dalam menyelenggarakan berbagai program literasi dan inklusi keuangan bagi debitur maupun masyarakat luas, baik melalui inisiatif internal maupun kolaborasi strategis dengan mitra dan *Self-Regulatory Organization* (SRO). Setiap kegiatan dirancang untuk memastikan bahwa keterlibatan Perseroan tidak sekadar formalitas, tetapi memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk pembiayaan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini selaras dengan target prioritas yang tercantum dalam RAKB dan menjadi wujud komitmen Perseroan dalam mendorong pengelolaan keuangan yang bijak, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan program ini menjadi wujud nyata kepatuhan Perseroan sekaligus tanggung jawab sosial dalam mengimplementasikan POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang dirancang secara terstruktur dan partisipatif, debitur maupun masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk pembiayaan, sehingga mampu membuat keputusan finansial secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan literasi keuangan dan 2 (dua) kegiatan inklusi keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Financial Literacy and Inclusion Campaign

The Company takes an active role in organizing various financial literacy and inclusion programs for both debtors and the broader community, through internal initiatives as well as strategic collaborations with partners and Self-Regulatory Organizations (SROs). Each activity is designed to ensure that the Company's involvement is not merely a formality but provides a tangible impact in increasing public understanding of the responsible use of financing products. This approach is aligned with the priority targets stipulated in the Business Plan (RAKB) and serves as a manifestation of the Company's commitment to fostering wise, inclusive, and sustainable financial management.

The implementation of these programs is a concrete realization of the Company's compliance and social responsibility in implementing POJK No. 3 of 2023 concerning the Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public. Through various structured and participatory activities, debtors and the public gain a deeper understanding of financing products, enabling them to make financial decisions accurately, wisely, and responsibly.

Throughout 2025, the Company organized 2 (two) financial literacy activities and 2 (two) financial inclusion activities, with the details as follows:

Kegiatan Activity	Tujuan Pelaksanaan Aim of Activity	Realisasi Realization	Dampak Impact
Literasi keuangan: Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Secara Finansial dalam Mengakses Produk Pembiayaan Financial Literacy: Empowering Communities to Access Financing Products	Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang cara mengatur keuangan dengan memanfaatkan produk dan/atau layanan pembiayaan. Raising public awareness about how to manage finances by utilizing financing products and/or services, including their benefits, risks, costs, and consumer rights and obligations.	Terlaksana secara webinar <i>online</i> pada tanggal 21 Maret 2025 Held as an online webinar on March 21, 2025	Total kehadiran peserta 136 orang Total number of participants: 136
Literasi keuangan: Mengenal Produk dan/atau Layanan Perusahaan Pembiayaan Financial Literacy: Understanding Financing Companies' Products and/or Services	Meningkatkan kesadaran Masyarakat di Kota Manado tentang produk dan/atau layanan pembiayaan termasuk manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban konsumen. Raising public awareness in the City of Manado about financing products and/or services, including their benefits, risks, costs, and consumer rights and obligations.	Terlaksana secara tatap muka langsung pada tanggal 10 Oktober 2025 Held in person on October 10, 2025	Total kehadiran peserta 50 orang Total number of participants: 50
Inklusi Keuangan di Kota Bogor Financial Inclusion in Bogor	Memperkenalkan dan Membuka Akses Produk dan Layanan Pembiayaan Kreditplus kepada Masyarakat yang Berdomisili di Wilayah Kota Bogor. Introducing and Providing Access to Kreditplus Financing Products and Kreditplus Financing Services to Residents of the City of Bogor.	Terlaksana pada tanggal 5 – 18 Juni 2025 Held from June 5 to 18, 2025	Jumlah Masyarakat yang menghadiri Inklusi Keuangan sebanyak 101 orang Number of community members attending the Financial Inclusion event: 101
Inklusi Keuangan di Kota Manado Financial Inclusion in Manado	Memperkenalkan dan Membuka Akses Produk dan Layanan Pembiayaan Kreditplus kepada Masyarakat yang Berdomisili di Wilayah Kota Manado. Introducing and Providing Access to Kreditplus Financing Products and Services to Residents of the City of Manado.	Terlaksana pada tanggal 10 – 12 Oktober 2025 Held from October 10 – 12, 2025	Jumlah Masyarakat yang menghadiri Inklusi Keuangan tercatat sebanyak 103 orang The number of community members attending the Financial Inclusion event was recorded as 103



Seluruh program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Perseroan sepanjang tahun ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mekanisme Pengaduan Masyarakat [F.24]

Dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional, Perseroan menempatkan kenyamanan, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam setiap interaksi. Perseroan memahami bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh kualitas hubungan dengan komunitas dan pemangku kepentingan di sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi secara transparan, sehingga setiap masukan dapat direspons dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, Perseroan menyediakan berbagai kanal pengaduan yang mudah diakses, mencakup *Contact Center*, WhatsApp, email, *web chat*, serta media sosial resmi. Dengan tersedianya berbagai *platform* ini, Perseroan memastikan bahwa setiap individu, kelompok, maupun komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, tanpa hambatan maupun kekhawatiran akan ketidakamanan data atau diskriminasi. Kanal pengaduan yang tersedia antara lain:

- WhatsApp Chat: 08118300605
- Email: cs@kreditplus.com
- Web Chat: www.kreditplus.com

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan yang signifikan dan material dari masyarakat terkait operasional layanan sehari-hari, termasuk permasalahan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat. Hasil tersebut menegaskan komitmen Perseroan untuk menjalankan praktik bisnis yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan komunitas di sekitar wilayah operasional.

All financial literacy and inclusion programs implemented by the Company throughout this year have not only succeeded in enhancing public understanding and insight but have also played a vital role in strengthening stability and driving sustainable economic growth.

Public Complaint Mechanism [F.24]

In order to build harmonious and sustainable relationships with the community surrounding its operational areas, the Company places convenience, openness, and accountability as the primary pillars in every interaction. The Company understands that business sustainability is determined not only by financial performance but also by the quality of its relationships with the community and surrounding stakeholders. Therefore, the public is provided with the space to convey criticism, suggestions, and aspirations transparently, ensuring that every input is responded to quickly, accurately, and responsibly.

As a concrete manifestation of its commitment to responsible business practices, the Company provides various easily accessible complaint channels, including a Contact Center, WhatsApp, email, web chat, and official social media. With the availability of these platforms, the Company ensures that every individual, group, or community can actively participate in providing input without barriers or concerns regarding data insecurity or discrimination. The available complaint channels include:

- WhatsApp Chat: 08118300605
- Email: cs@kreditplus.com
- Web Chat: www.kreditplus.com

Throughout 2025, the Company did not receive any significant and material complaints from the public regarding daily service operations, including issues concerning the rights of indigenous peoples. This result reaffirms the Company's commitment to conducting transparent, fair, and responsible business practices while maintaining harmonious relationships with the community surrounding its operational areas.



PRODUK DAN/ATAU JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pengembangan Produk dan/atau Layanan Pembiayaan yang Berkelanjutan [F.26]

Dalam menjalankan visi bisnis yang berkelanjutan, Perseroan senantiasa menempatkan inovasi dan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai fondasi dalam menghadirkan produk dan layanan pembiayaan. Setiap langkah dalam pengembangan portofolio pembiayaan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang semakin beragam, tetapi juga untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa perkembangan bisnis Perseroan tidak hanya mengutamakan kinerja finansial, tetapi juga sejalan dengan prinsip ESG.

Selain konsisten melakukan inovasi produk pembiayaan, Perseroan juga secara proaktif memperluas kolaborasi dengan *dealer* dan mitra strategis untuk mempromosikan layanan pembiayaan hijau, sehingga akses masyarakat terhadap produk ramah lingkungan menjadi lebih mudah dan inklusif. Upaya ini tidak hanya meningkatkan daya saing Perseroan, tetapi juga menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang positif, serta memperkuat ekosistem keberlanjutan di seluruh wilayah operasional.

Dengan mengimplementasikan seluruh inisiatif tersebut, Perseroan menegaskan bahwa inovasi dan keberlanjutan dapat berjalan seiring. Setiap produk dan layanan yang dikembangkan tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek, tetapi juga menekankan pertumbuhan yang bertanggung jawab, penciptaan nilai sosial bagi masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang.

Jaminan Keamanan Produk dan/atau Jasa Perseroan [F.27]

Dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada debitur, Perseroan menempatkan keamanan, kualitas, dan kepatuhan produk sebagai prioritas utama. Setiap produk pembiayaan dikembangkan dan dievaluasi secara menyeluruh melalui proses *due diligence* yang ketat, dimulai dari tahap perancangan hingga *go live*, yang dilaksanakan oleh Departemen Marketing Product Development dan Regulatory Compliance. Proses ini dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian untuk memastikan seluruh potensi risiko teridentifikasi dengan tepat, sehingga setiap produk memiliki standar pelaksanaan yang jelas, transparan, dan konsisten.

Seluruh produk pembiayaan yang dipasarkan Perseroan juga telah memperoleh izin operasional resmi dari OJK. Kepemilikan izin ini memberikan jaminan tambahan bahwa setiap produk pembiayaan tidak hanya aman dan

SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS AND/OR SERVICES

Sustainable Development of Financial Products and/or Services [F.26]

In pursuing a sustainable business vision, the Company consistently places innovation and social and environmental responsibility as the foundation for providing financing products and services. Every step in the development of the financing portfolio is designed not only to meet the increasingly diverse financial needs of the public but also to provide a sustainable positive impact on the community and the surrounding environment. This approach ensures that the Company's business development does not only prioritize financial performance but also remains aligned with ESG principles.

In addition to consistently innovating financing products, the Company also proactively expands collaborations with dealers and strategic partners to promote green financing services, making public access to eco-friendly products easier and more inclusive. These efforts not only enhance the Company's competitiveness but also generate positive socio-economic impacts and strengthen the sustainability ecosystem across all operational areas.

By implementing all these initiatives, the Company reaffirms that innovation and sustainability can go hand in hand. Every product and service developed is designed not only to meet short-term financial needs but also to emphasize responsible growth, the creation of social value for the community, and environmental preservation as an integral part of its long-term business strategy.

Safety Guarantee of the Company's Products and/or Services [F.27]

In disbursing financing facilities to debtors, the Company places product safety, quality, and compliance as top priorities. Every financing product is developed and comprehensively evaluated through a rigorous due diligence process, from the design stage to "go-live," carried out by the Marketing Product Development Department and the Regulatory Compliance Department. This process is conducted meticulously and with due care to ensure all potential risks are accurately identified, so that every product has clear, transparent, and consistent implementation standards.

All financing products marketed by the Company have also obtained official operational licenses from the OJK. These licenses provide an additional guarantee that every financing product is not only safe and reliable but also



andal, tetapi juga sah secara hukum dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang.

Sementara untuk produk-produk yang telah beredar di pasar, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi risiko menyeluruh dan merumuskan upaya mitigasi yang konsisten dengan *risk appetite* perusahaan. Profil calon debitur dievaluasi secara mendalam, memastikan kesesuaian dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing produk, sehingga setiap fasilitas pembiayaan digunakan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Melalui penerapan serangkaian proses internal yang ketat, mulai dari pengembangan hingga pemasaran produk, Perseroan memastikan bahwa seluruh produk dan layanan pembiayaan yang dipasarkan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, keamanan, dan kepatuhan hukum. Efektivitas pengelolaan ini tercermin dari tidak adanya laporan pengaduan terkait pelanggaran ketentuan informasi produk dan jasa sepanjang tahun 2025.

Dampak Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan [F.28]

Seluruh produk pembiayaan yang dipasarkan Perseroan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para debitur. Produk-produk ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh modal kerja dan investasi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis, sekaligus memberi masyarakat akses terhadap barang dan kebutuhan rumah tangga atau elektronik yang mendukung kesejahteraan sehari-hari.

Dengan menghadirkan beragam produk pembiayaan yang inklusif dan inovatif, Perseroan secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberdayakan masyarakat. Fasilitas pembiayaan yang disediakan memungkinkan debitur memanfaatkan dana secara tepat untuk meningkatkan produktivitas usaha dan memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih efisien, sehingga tercipta siklus ekonomi yang positif bagi komunitas di sekitar wilayah operasional Perseroan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen Perseroan untuk menghadirkan produk dan layanan pembiayaan yang tidak hanya aman dan andal, tetapi juga memberikan nilai tambah jangka panjang. Setiap layanan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memberdayakan debitur secara berkelanjutan, dan menciptakan dampak sosial yang nyata. Seluruh upaya ini sejalan dengan prinsip ESG, memperkuat keunggulan kompetitif Perseroan, serta memastikan keberlanjutan menjadi bagian integral dari setiap produk pembiayaan yang diberikan.

legally valid and under the supervision of the competent authority.

For products already available in the market, the Company periodically conducts comprehensive risk evaluations and formulates mitigation efforts consistent with the Company's risk appetite. Prospective debtor profiles are evaluated in depth to ensure alignment with the characteristics and risk levels of each product, ensuring that every financing facility is used appropriately, safely, and responsibly.

Through the implementation of a series of strict internal processes, from product development to marketing, the Company ensures that all marketed financing products and services fulfill the principles of prudence, safety, and legal compliance. The effectiveness of this management is reflected in the absence of reports or complaints regarding violations of product and service information regulations throughout 2025.

Impact of Sustainable Financial Products and Services [F.28]

All financing products marketed by the Company are designed not only to meet the financial needs of the public but also to provide a tangible economic impact for debtors. These products enable business actors to obtain the working capital and investment necessary to maintain business continuity, while providing the public with access to household goods and electronics that support daily welfare.

By providing a diverse range of inclusive and innovative financing products, the Company actively drives local economic growth while empowering the community. The financing facilities provided allow debtors to utilize funds appropriately to increase business productivity and meet living needs more efficiently, thereby creating a positive economic cycle for the communities surrounding the Company's operational areas.

This initiative reaffirms the Company's commitment to providing financing products and services that are not only safe and reliable but also provide long-term added value. Every service is designed to support economic growth, empower debtors sustainably, and create a real social impact. All of these efforts are in line with ESG principles, strengthening the Company's competitive advantage and ensuring that sustainability remains an integral part of every financing product provided.



Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

Sepanjang tahun 2025, seluruh produk dan layanan Perseroan tetap beroperasi sesuai standar yang ditetapkan dan tidak ada yang ditarik kembali oleh regulator dari pasar keuangan. Hal ini mencerminkan efektivitas proses pengembangan, evaluasi, dan pemantauan produk Perseroan, sekaligus menegaskan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan yang ditawarkan aman, andal, dan sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Mekanisme dan Saluran Pengaduan Debitur

Perlindungan debitur merupakan bagian integral dari komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas layanan dan membangun hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Untuk itu, Perseroan menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan, responsif, dan mudah diakses guna memastikan setiap pertanyaan, permintaan informasi, klarifikasi, maupun keluhan terkait produk dan layanan pembiayaan dapat ditangani secara tepat dan profesional. Para debitur dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang disediakan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- **Whatsapp Chat:** 08118300605
- **Email:** cs@kreditplus.com
- **Web Chat:** www.kreditplus.com

Selain melalui kanal digital dan telekomunikasi, debitur juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dengan mengunjungi kantor cabang Perseroan di seluruh wilayah operasional. Ketersediaan berbagai saluran ini memastikan akses yang inklusif bagi seluruh debitur, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing.

Setiap laporan yang diterima akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur internal yang berlaku. Proses penanganan dilakukan secara transparan dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak debitur serta mengacu pada *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pengawasan penyelesaian pengaduan berada di bawah koordinasi Departemen Account Service guna memastikan konsistensi kualitas layanan dan ketepatan waktu penyelesaian.

The Number of Products Recalled [F.29]

Throughout 2025, all of the Company's products and services continued to operate in accordance with established standards, and none were withdrawn from the financial market by regulators. This reflects the effectiveness of the Company's product development, evaluation, and monitoring processes, while reaffirming that all offered financing facilities are safe, reliable, and fully compliant with applicable regulations.

Debtor Complaint Mechanism and Channels

Debtor protection is an integral part of the Company's commitment to maintaining service quality and building relationships based on trust. To this end, the Company provides a transparent, responsive, and easily accessible complaint mechanism to ensure that every question, request for information, clarification, or grievance related to financing products and services can be handled appropriately and professionally. Debtors may submit complaints through various official communication channels provided by the Company, as follows:

- **Whatsapp Chat:** 08118300605
- **Email:** cs@kreditplus.com
- **Web Chat:** www.kreditplus.com

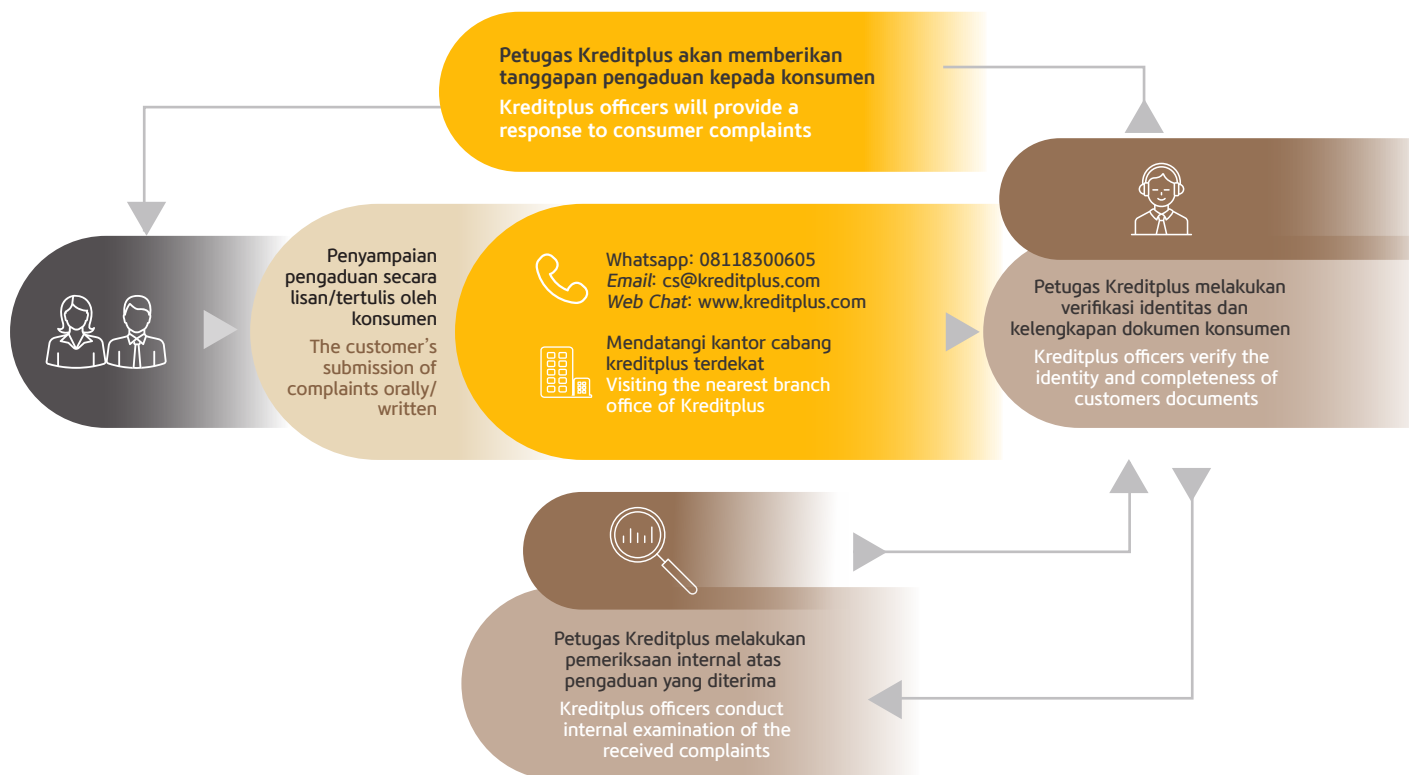
In addition to digital and telecommunication channels, debtors may also submit complaints directly by visiting the Company's branch offices across all operational areas. The various channels ensure inclusive access for all debtors, in accordance with their respective preferences and needs.

Every report received will be recorded, verified, and followed up on according to applicable internal procedures. The handling process is conducted transparently while upholding debtors' rights and referring to the established Service Level Agreement (SLA). The management and oversight of complaint resolution are under the coordination of the Account Service Department to ensure consistent service quality and timely resolution.



Sebagai bentuk transparansi proses, Perseroan menyajikan bagan mekanisme pelayanan pengaduan berikut guna menggambarkan tahapan penanganan secara terstruktur dan terukur:

As a form of process transparency, the Company presents the following complaint service mechanism flow to illustrate the handling stages in a structured and measurable manner:



Dalam menangani setiap pengaduan debitur, Perseroan menetapkan standar waktu penanganan yang jelas dan terukur sebagai berikut:

1. Tanggapan pengaduan dan penyelesaian pengaduan yang diterima secara lisan akan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
2. Tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian pengaduan yang diterima secara tulisan akan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Perseroan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal membutuhkan penelitian khusus atau kondisi khusus lainnya.

In handling each debtor complaint, the Company has established clear and measurable handling time standards as follows:

1. Complaints received verbally will be responded to and resolved within a maximum of 5 (five) working days from the date of receipt.
2. Complaints received in writing will be followed up and resolved within a maximum of 10 (ten) working days from the date of receipt.
3. The Company may extend the resolution period by up to 10 (ten) additional working days if special investigations or other specific conditions are required.

Pada tahun 2025, Perseroan menerima sebanyak 880 laporan pengaduan, menurun secara signifikan 66,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.615 keluhan. Seluruh pengaduan yang diterima telah diproses dan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai dengan standar SLA yang berlaku, dengan tetap mengacu pada ketentuan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

In 2025, the Company recorded 880 complaint reports, a 66.35% decline from 2,615 complaints in the prior year. All complaints were handled and resolved promptly in line with applicable service level agreement standards, with processes consistently aligned to the provisions of POJK No. 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.



Informasi lebih rinci mengenai penanganan laporan pengaduan debitur sepanjang tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Detailed information regarding the handling of debtor complaint reports throughout 2025 is presented in the following table:

No.	Kategori Pengaduan Complaint Category	Status Penyelesaian Completion Status			Jumlah Pengaduan Diterima Number of Complaints Received
		Selesai Resolved	Dalam Proses In Process	Tidak Selesai Not Resolved	
1.	Denda/penalti Fines/penalties	35	0	0	35
2.	Kegagalan/keterlambatan transaksi Transaction failures/delays	46	0	0	46
3.	Jumlah Tagihan Total Bill Amount	152	0	0	152
4.	Permasalahan asuransi objek pembiayaan Insurance issues regarding the financed asset	2	0	0	2
5.	Permasalahan agunan/jaminan Collateral/security issues	56	0	0	56
6.	Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK <i>Checking</i>) Financial Information Service System (OJK <i>Checking</i>)	222	0	0	222
7.	Biaya administrasi/provisi/ transaksi Administrative/commission/transaction fees	15	0	0	15
8.	Perilaku petugas penagihan Collection agent conduct	169	0	0	169
9.	<i>Fraud</i> , penipuan, kecurangan oleh pegawai dan/ atau pihak lain Fraud, deception, or misconduct by employees and/or other parties	139	0	0	139
10.	Keberatan Biaya Tambahan/Denda Objections to Additional Fees/Penalties	43	0	0	43
11.	Perbedaan perhitungan bunga atau pokok Discrepancies in interest or principal calculations	1	0	0	1
Jumlah Total		880	0	0	880

Sebagaimana tersaji pada tabel di atas, seluruh laporan pengaduan yang diterima hingga akhir tahun 2025 telah diproses, ditindaklanjuti, dan diselesaikan secara menyeluruh sesuai dengan standar waktu penanganan yang berlaku. Tidak terdapat pengaduan yang tertunda melewati batas SLA yang ditetapkan.

As presented in the table above, all complaint reports received until the end of 2025 have been processed, followed up, and completely settled in accordance with the applicable handling time standards. There were no complaints pending beyond the established SLA limits.

Setiap masukan, kritik, maupun saran yang disampaikan oleh debitur tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengaduan, tetapi juga sebagai umpan balik strategis bagi Manajemen. Informasi tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan, meningkatkan efektivitas prosedur operasional, serta menyempurnakan kualitas produk dan layanan. Dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, Perseroan berupaya memastikan pengalaman layanan yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan debitur.

Every input, criticism, and suggestion submitted by debtors is viewed not only as a complaint but also as strategic feedback for Management. This information is analyzed to identify root causes, improve the effectiveness of operational procedures, and refine the quality of products and services. Through a continuous evaluation mechanism, the Company strives to ensure a service experience that is increasingly responsive, transparent, and oriented toward debtor satisfaction.



Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 [F.30]

Sebagai langkah konkret untuk mengidentifikasi area perbaikan sekaligus meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan, Perseroan menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan secara internal dan periodik setiap tahun. Survei ini dirancang untuk mengukur persepsi, pengalaman, serta tingkat loyalitas debitur terhadap produk pembiayaan dan kualitas layanan yang diberikan. Hasil survei menjadi dasar evaluasi Manajemen dalam merumuskan strategi peningkatan layanan, penyempurnaan proses operasional, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan debitur.

Pada pelaksanaan survei tahun 2025, tercatat sebanyak 934 responden berpartisipasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 915 responden menyatakan kepuasan mereka terhadap pelayanan pembiayaan Perseroan.
2. Sebanyak 901 responden menyatakan minat mereka dalam mengajukan kembali pembiayaan setelah pembiayaan berakhir/menambah pembiayaan yang masih berjalan.
3. Sebanyak 914 responden menyatakan bahwa Petugas Perseroan telah memberikan pelayanan yang jujur dan memuaskan.
4. Sebanyak 913 responden menyatakan bahwa upaya Perseroan dalam meningkatkan Pembiayaan Produk Ramah Lingkungan sudah baik hingga cenderung sangat baik.
5. Sebanyak 910 responden memberikan informasi maupun penyelesaian pengaduan konsumen sudah baik.
6. Sebanyak 910 responden menyatakan bahwa pelayanan petugas Customer Service dalam memberikan informasi maupun penyelesaian pengaduan konsumen sudah baik.

Informasi terkait skor kualitas layanan Perseroan dijelaskan melalui tabel berikut:

Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey

Customer Satisfaction Survey 2025 [F.30]

As a concrete step to identify areas for improvement and enhance product and/or service quality, the Company conducts an internal customer satisfaction survey periodically each year. This survey is designed to measure debtors' perceptions, experiences, and loyalty levels toward the financing products and service quality provided. The survey results serve as a basis for Management's evaluation in formulating service improvement strategies, refining operational processes, and strengthening long-term relationships with debtors.

In the 2025 survey, a total of 934 respondents participated, with the following results:

1. 915 respondents expressed satisfaction with the Company's financing services.
2. 901 respondents showed interest in reapplying for financing after their current financing ends or in adding to their existing financing.
3. 914 respondents stated that Company officers provided honest and satisfactory services.
4. 913 respondents rated the Company's efforts in increasing financing for Eco-Friendly Products as good to very good.
5. 910 respondents indicated that the provision of information and consumer complaint handling were satisfactory.
6. 910 respondents confirmed that Customer Service officers provided good service in delivering information and resolving consumer complaints.

Information regarding the Company's service quality scores is explained in the following table:

2025 **98%** 2024 **97%**



Berdasarkan data tersebut, tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi kualitas layanan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi peningkatan layanan yang telah dijalankan, sekaligus memperkuat loyalitas debitur serta reputasi Perseroan dalam memberikan layanan pembiayaan yang andal, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan debitur.

EXTERNAL ASSURANCE

Dalam menyusun Laporan Keberlanjutan tahun 2025, Perseroan belum menggunakan jasa *external assurance* atau verifikasi oleh pihak ketiga yang independen sebagaimana direkomendasikan dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 51/2017. Meskipun demikian, Perseroan memastikan bahwa seluruh data, informasi, dan pernyataan yang disajikan dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi internal yang memadai, didukung oleh sistem pengendalian internal serta mekanisme koordinasi lintas fungsi untuk menjamin akurasi, kelengkapan, dan keandalan informasi.

TANGGAPAN UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima umpan balik maupun tanggapan tertulis dari pemangku kepentingan terkait Laporan Keberlanjutan tahun 2024. Kendati demikian, Perseroan tetap membuka ruang komunikasi yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan dan praktik keberlanjutan secara berkelanjutan.

Based on these data, the customer satisfaction level in 2025 remained in the very good category, demonstrating consistent service quality compared to the previous year. This achievement reflects the effectiveness of the service enhancement strategies implemented, while simultaneously strengthening debtor loyalty and the Company's reputation for providing reliable, transparent, and debtor-oriented financing services.

EXTERNAL ASSURANCE

In preparing the 2025 Sustainability Report, the Company has not engaged external assurance services or verification by an independent third party as recommended by the Financial Services Authority through POJK 51/2017. Nevertheless, the Company ensures that all data, information, and statements presented in this report have undergone an adequate internal verification process, supported by internal control systems and cross-functional coordination mechanisms to guarantee the accuracy, completeness, and reliability of the information.

FEEDBACK RESPONSE TO THE PREVIOUS YEAR'S REPORT

Throughout 2025, the Company did not receive any feedback or written responses from stakeholders regarding the 2024 Sustainability Report. Nevertheless, the Company maintains open communication channels for all stakeholders to convey suggestions, inputs, or questions as part of its efforts to continuously improve reporting quality and sustainability practices.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 – Annual Report of Issuers or Public Companies

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
BENTUK LAPORAN TAHUNAN		ANNUAL REPORT FORMAT
1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		1. The annual report is presented in printed and electronic formats.
2. Laporan tahunan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid dan dapat diperbanyak dengan kualitas baik.		2. The printed version of the annual report is printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound, and can be reproduced in good quality.
3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	✓	3. The electronic version of the annual report is presented in PDF format.
ISI LAPORAN TAHUNAN		ANNUAL REPORT CONTENT
1. Ketentuan Umum a. Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. Ikhtisar data keuangan penting 2. Informasi saham (jika ada) 3. Laporan Direksi 4. Laporan Dewan Komisaris 5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik 6. Analisis dan pembahasan manajemen 7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik 8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik 9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan. b. Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓	1. General Provision a. Annual report at least contains the following information: 1. Summary of key financial information 2. Stock information (if any) 3. Board of Directors Report 4. Board of Commissioners Report 5. Profile of Issuer or Public Company 6. Management discussion and analysis 7. Corporate Governance of Issuer of Public Company 8. Corporate social and environmental responsibilities of the Issuer of the Public Company 9. Audited annual financial statements 10. Statement from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners on accountability for the Annual Report. b. Annual report may present information in the form of images, charts, tables, and/or diagrams with clear titles and descriptions to facilitate reading and understanding.
2. Uraian isi Laporan Tahunan A. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1. Pendapatan/penjualan 2. Laba bruto 3. Laba (rugi) 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 5. Total laba (rugi) komprehensif 6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 7. Laba (rugi) per saham 8. Jumlah aset 9. Jumlah liabilitas 10. Jumlah ekuitas 11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset 12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas 13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan 14. Rasio lancar 15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset 17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	8	2. Description of Content of Annual Report A. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in 3 (three) fiscal year comparisons or since the commencement of the business if the Issuer or Public Company started its business for less than 3 (three) years, and at least contains: 1. Revenue/Sales 2. Gross profit 3. Profit (loss) 4. total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest 5. Total comprehensive profit (loss) 6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest 7. Earning (loss) per share 8. Total assets 9. Total liabilities 10. Total equities 11. Profit (loss) to total assets ratio 12. Profit (loss) to equities ratio 13. Profit (loss) to income ratio 14. Current ratio 15. Liabilities to equities ratio 16. Liabilities to total assets ratio 17. Other information or financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
B. Informasi Saham Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: - Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: - Jumlah saham yang beredar - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan - Harga tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan - Volume perdagangan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	12	B. Stock Information Stock information (if any) contains at least: - Shares issued for every quarter presented in a comparative format for the last 2 fiscal years, covering at least: - Number of outstanding shares - Market capitalization based on the price at the stock exchange where the shares are listed on - Highest, lowest, and closing share prices at the stock exchange where the shares are listed on - Trading volume at the stock exchange where the shares are listed.
- Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sesuai point 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: - Tanggal pelaksanaan aksi korporasi - Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham - Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi - Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada) - Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	12	- In the event of corporate actions, such as stock split, reverse stock, issuance of dividends, issuance of bonus shares, and change in share par value, then the share price referred to in point 1) should be added with an explanation on: - Date of corporate action - Ratios of stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and changes in the shares' par value - Number of outstanding shares prior to and after corporate action - Amount of convertible bonds/stocks exercised (if any) - Share price prior to and after corporate action.
Dalam hal terjadi <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> saham dalam tahun buku, Emiten menjelaskan alasan <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> tersebut.	13	In the event that the company's shares were suspended or delisted from trading during the financial year, then the Issuer should provide an explanation on the reason for the suspension and/or delisting.
Dalam hal <i>suspension</i> dan/atau <i>delisting</i> sesuai poin 3) di atas masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.	13	In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the annual report, then the Issuer or Public Company should explain the actions taken to resolve the suspension and/or delisting.
C. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat: - Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik - Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik - Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik - Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan - Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	34-54	C. The Board of Directors Report The Board of Directors' report should at least contain: - The performance of the Issuer or Public Company, at least covering: - Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company - The roles of the Board of Directors in the Issuer's or Public Company's strategy and strategic policy formulation - Actions taken by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategies - Comparison between results and targets - Challenges faced by the Issuer or Public Company.
Pandangan tentang prospek usaha.		Description of business prospects.
Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		Implementation of the Issuer's or Public Company's good corporate governance practices.
D. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.	18-32	D. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners report should at least contain: Assessment of the performance of the Board of Directors in the management of the Issuer or Public Company.
Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.		View on the business prospects of the Issuer or Public Company as prepared by the Board of Directors.
Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		View on the Issuer's or Public Company's good corporate governance practices.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
E. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	60; 62-66	E. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least: 1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the name change during the year under review.
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten meliputi: alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik dan alamat situs web.	60	2. Access to Issuer or Public Company, including branch office(s) or representative office(s), where the public can have access to information of the Issuer or Public Company, which includes: address, telephone number, e-mail address, and website address.
3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	62-66	3. Brief history of the Issuer or Public Company.
4. Visi, misi dan budaya/nilai-nilai perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.	70-71	4. Vision, mission, and corporate culture/values of the Issuer or Public Company.
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	72-73	5. Line of business according to the latest articles of association, line of business carried out in the fiscal year, and types of products and/or services produced.
6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik.	74-75	6. The operation coverage of the Issuer or Public Company.
7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai satu tingkat di bawah Direksi, termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	76-77	7. Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart format, at least covering one level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and under the Board of Commissioners, with the names and titles.
8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional.	78	8. Memberships in national and international industry associations.
9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab b. Foto terbaru c. Usia d. Kewarganegaraan e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan 2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya, baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) termasuk nama pihak yang terafiliasi h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya.	87-92	9. Profiles of members of the Board of Directors, covering at least: a. Name and position according to duties and responsibilities b. Latest photograph c. Age d. Citizenship e. Education and/or certification f. Employment history, covering information on: 1. Legal basis for the appointment as a member of the Board of Directors of the said Issuer or Public Company 2. Concurrent positions, as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of committees and other positions (if any) 3. Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company g. Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the majority shareholders (if any), including the name of the affiliated party h. Changes and reasons for the change in the composition of the Board of Directors.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Nama dan jabatan - Foto terbaru - Usia - Kewarganegaraan - Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris - Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) - Pengalaman kerja beserta periode waktunya, baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik - Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama (jika ada) termasuk nama pihak yang terafiliasi - Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode - Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.	82-84; 85	10. Profiles of members of the Board of Commissioners, covering at least: - Name and position - Latest photograph - Age - Citizenship - Education and/or certification - Employment history, covering information on: - Legal basis for the appointment as a member of the Board of Commissioners - Legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is also an Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company - Concurrent positions, as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of committees and other positions (if any) - Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company - Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, the majority shareholders (if any), including the name of the affiliated party - Statement of independence of the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed for more than 2 (two) periods - Changes and reasons for the change in the composition of the Board of Commissioners.
11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan adalah susunan yang terakhir dan sebelumnya.	80-81; 86	11. In the event that there were changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, occurring after the end of the reporting year up to the deadline for submission of the Annual Report, then the Annual Report discloses the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.
12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan dan status ketenagakerjaan dalam tahun buku.	93-95	12. Employee statistics by gender, position, age, education level, and type of employment within the reporting year.
13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku yang terdiri dari informasi mengenai: - Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik - Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik - Kelompok pemegang saham masyarakat (masing-masing memiliki kurang dari 5%).	96	13. Names of shareholders and the percentage of ownership at the beginning and at the end of the reporting year, including information on: - Shareholders having 5% or more shares of Issuer or Public Company - Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who own shares of the Issuers or Public Company - Groups of public shareholders (each with less than 5% share ownership).
14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku.	97	14. Percentage of indirect share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the beginning and at the end of the reporting year.
15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi: - Kepemilikan institusi lokal - Kepemilikan institusi asing - Kepemilikan individu lokal - Kepemilikan individu asing.	96-97	15. Number of shareholders and percentage of share ownership based on: - Ownership by local institutions - Ownership by foreign institutions - Ownership by local individuals - Ownership by foreign individuals.
16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk bagan/skema.	98	16. Information on the direct and indirect majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, both directly and indirectly, as well as individual shareholders, presented in the form of a chart or diagram.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama atas entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas tersebut. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	99	17. Names of subsidiaries, associated companies, joint ventures controlled by the Issuer or Public Company (if any), with information on the percentage of stock ownership, line of business, total assets, and operating status of these entities. For subsidiaries, disclose the addresses of all subsidiaries.
18. Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan.	100	18. Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing up to the end of the reporting year, and the name of the Stock Exchange where the Issuer of Public Company shares are listed.
19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek yang dimaksud pada poin 18, yang memuat sedikitnya nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	100-102	19. Information on securities listing other than the said security in point 18, containing at least the name of the Securities, year of issuance, interest rate/yield, date of maturity, offering price, and rating of the securities (if any).
20. Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik beserta jaringan/asosiasi/aliannya, meliputi: a. Nama dan alamat b. Periode penugasan c. Informasi jasa audit dan/atau non-audit yang diberikan d. Biaya jasa audit dan/atau non-audit untuk masing-masing penugasan selama tahun buku e. Jika tidak memberikan jasa non-audit, maka diungkapkan informasi tersebut.	103-104	20. Public accountant services and public accounting firms and their networks/associations/allies, including: a. Name and address b. Assignment period c. Information on audit and/or non-audit assignments d. Audit and/or non-audit service fees for each reporting year e. Disclose the information if there is no non-audit service provided.
21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya.	105	21. Names and addresses of other capital market supporting institutions and/or professions.
F. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit memuat:		F. Management Discussion and Analysis The management discussion and analysis section contains analysis and discussion on the financial statements and other material information with emphasis on material changes that occurred during the financial year, at least including:
1. Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya b. Pendapatan/penjualan c. Profitabilitas.	156-161	1. Operational review per segment of operations according to the type of industry of the Issuer or Public Company, containing at least: a. Production, including process, capacity, and growth b. Sales/revenue c. Profitability.
2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas c. Ekuitas d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif, dan e. Arus kas.	a) 163-165 b) 165-167 c) 167-169 d) 173-174	2. A comprehensive analysis of the financial statements that includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) financial years, and an explanation of the causes and impact of such changes, at least covering: a. Current assets, non-current assets, and total assets b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities c. Equities d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss), and e. Cash flows.
3. Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	175-176	3. The capacity to pay debts by providing the relevant ratios.
4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	176-177	4. Account receivables collectability of the Issuer or Public Company by providing the relevant ratios.
5. Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan.	177-179	5. Capital structure and W management policies concerning capital structure, including the basis for the policy.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. Tujuan dari ikatan tersebut b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut c. Mata uang yang menjadi denominasi d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi terhadap risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	179	6. Discussion on material ties for capital goods investments, including information on at least: a. The purpose of such ties b. Source of funds to fulfill such ties c. Currency of denomination d. Measures taken by the Issuer or Public Company to protect the position of a related foreign currency against risk.
7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a. Jenis investasi barang modal b. Tujuan investasi barang modal c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	179	7. Discussion on investment in capital goods realized in the last fiscal year, at least covers: a. Type of capital goods investment b. Objective of capital goods investment c. Value of the investment in capital goods.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).	180-181	8. Material information and facts occurring after the date of the accountant's report (if any).
9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	185-186	9. Information on the prospect of the Issuer or Public Company in connection with the condition of the industry, the economy in general, and the international market, supported with quantitative data from reliable sources.
10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai, mengenai: a. Pendapatan/penjualan b. Laba (rugi) c. Struktur modal (<i>capital structure</i>) d. Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	181-182	10. Comparison between the targets/projections at the beginning of the financial year and the results achieved, concerning: a. Revenue/sales b. Profit (loss) c. Capital structure d. Other matters considered material for the Issuer or Public Company.
11. Target/proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan b. Laba (rugi) c. Struktur modal (<i>capital structure</i>) d. Kebijakan dividen e. Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	182-184	11. Targets/projections for the next year concerning: a. Revenue/sales b. Profit (loss) c. Capital structure d. Dividend policy e. Other matters considered material for the Issuer or Public Company.
12. Aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit strategi pemasaran dan pangsa pasar.	186-187	12. Marketing aspects of the products and/or services of the Issuer or Public Company, at least concerning the marketing strategy and market share.
13. Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: a. Kebijakan dividen b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non-kas c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	184-185	13. Description regarding dividends during the last 2 fiscal years (if any), including at least: a. Dividend policy b. Date of cash dividend payment and/or date of non-cash dividend distribution; c. Amount of dividend per share (cash and/or non-cash) d. Total dividend distributed per year.
14. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sesuai POJK tentang LRPD, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	187	14. Realization of the use of proceeds from Public Offerings, under the condition of: a. During the reporting year, in which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year-end should be disclosed b. In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should provide an explanation on such change.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat: - Tanggal, nilai, dan objek transaksi - Nama pihak yang melakukan transaksi - Sifat hubungan afiliasi (jika ada) - Penjelasan mengenai kewajaran transaksi - Pemenuhan ketentuan terkait - Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: - Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principles</i>) - Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principles</i>). - Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. - Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui oleh pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.	191 191 191 188 & 190 188	15. Material information (if any), among others, concerning investment, expansion, divestment, merger, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties, and transactions with conflict of interest that occurred in the reporting year, covering: - Date, value, and object of the transaction - Names of transacting parties - Nature of the affiliation (if any) - Description of the fairness of the transaction - Compliance with related regulations - In the event that there is an affiliation relationship, the Issuer or Public Company also discloses information: - Statement of the Board of Directors that affiliated transactions have gone through adequate procedures to ensure that transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, carried out by complying with the arms-length principles - The roles of the Board of Commissioners and Audit Committee are to ensure that transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, carried out by complying with the arms-length principles. - For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously. - For the disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions.
16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	191-197	16. Changes in regulations that have a significant effect on the Issuer or Public Company and have an impact on the financial statements (if any).
17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	197	17. Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).
G. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		G. Corporate Governance The corporate governance of the Issuer or Public Company at least contains descriptions of:
- RUPS, paling sedikit memuat: - Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan satu tahun sebelum tahun buku, meliputi: - Keputusan RUPS pada tahun buku dan satu tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku - Keputusan RUPS pada tahun buku dan satu tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasannya - Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melaksanakan penghitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	212	- The GMS contains at least: - Information regarding the resolutions of the GMS in the reporting year and one year prior to the reporting year, covering: - Resolutions of the GMS in the reporting year and one year prior to the reporting year that were realized during the reporting year - Resolutions of the GMS in the reporting year and one year prior to the reporting year that have not been realized, and the reasons - In the event that the Issuer or Public Company is assisted by an independent party in the implementation of the GMS to carry out the vote counting, then this matter is to be disclosed.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
2. Direksi, paling sedikit memuat: - Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi - Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi - Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: - Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku - Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku, paling sedikit memuat: - Prosedur penilaian kinerja - Kriteria yang digunakan - Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	248	2. The Board of Directors, at least covering: - Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors - Statement that the Board of Directors has a board charter - Policies and frequency of the Board of Directors meetings, including meetings with the Board of Commissioners, and attendance records of members of the Board of Directors in these meetings - Training and/or Board of Directors' competence development: - Training and/or competence development policies for members of the Board of Directors, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors - Training and/or competence development activities attended by members of the Board of Directors during the reporting year - Assessment on the performance of the committees that assist the execution of the duties of the Board of Directors during the reporting year, at least covering: - Performance evaluation procedure - Criteria used - In the event that the Issuer or Public Company does not establish any committee to support the Board of Directors in performing its duties, then this matter is to be disclosed.
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris - Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris - Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut, termasuk kehadiran dalam RUPS - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: - Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku - Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja - Kriteria yang digunakan - Pihak yang melakukan penilaian - Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, paling sedikit memuat: - Prosedur penilaian kinerja - Kriteria yang digunakan.	232	3. The Board of Commissioners, at least covering: - Duties and responsibilities of the Board of Commissioners - Statement that the Board of Commissioners has a board charter - Policies and frequency of the Board of Commissioners meetings, including meetings with the Board of Directors and attendance records of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance in GMS - Training and/or Board of Commissioners' competence development: - Training and/or competence development policies for members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners - Training and/or competence development activities attended by members of the Board of Commissioners during the reporting year - Assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners, and each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, at least covering: - Performance evaluation implementation procedure - Criteria used - The party conducting the assessment - Assessment on the performance of the committees that assist the execution of the duties of the Board of Commissioners during the reporting year, at least covering: - Performance evaluation procedure - Criteria used.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Prosedur nominasi b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: 1. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 3. Besaran remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	270	4. The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least cover: a. The nomination procedure b. Procedure and implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners remuneration, among others: 1. Procedures to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners 2. The structure of the Board of Directors' and Board of Commissioners' remuneration 3. Total remuneration of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a. Nama b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		5. Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that conduct business based on the Sharia principles, as stipulated in the articles of association, at least containing disclosure: a. Name b. Legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board c. The term of office of the Sharia Supervisory Board d. Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board e. Frequency and mechanism for providing advice and recommendations, as well as the supervision on the Issuer's or Public Company's fulfillment of the Sharia principles in the capital market.
6. Komite Audit, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan Komite b. Usia c. Kewarganegaraan d. Riwayat pendidikan e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite 2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik f. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit g. Pernyataan independensi Komite Audit h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku i. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut j. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) Komite Audit.	279	6. Audit Committee, covering at least: a. Name and position in the Committee b. Age c. Citizenship d. Education background e. Employment history, including: 1. Legal basis for the appointment as a member of the Committee 2. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of committees and other positions (if any) 3. Working experience and terms of office in and outside of the Issuer or Public Company f. Period and terms of office as a member of the Audit Committee g. Statement of independence of the Audit Committee h. Training and/or competence development attended in the reporting year i. Policies and frequency of the Audit Committee meetings and the attendance record of members of the Audit Committee in these meetings j. Audit Committee's activities in the reporting year as stipulated in the Audit Committee charter.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
7. Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi, paling sedikit memuat: - Nama dan jabatannya dalam keanggotaan Komite/fungsi - Usia - Kewarganegaraan - Riwayat pendidikan - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite/fungsi - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik - Periode dan masa jabatan anggota Komite/fungsi - Pernyataan independensi Komite - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku - Uraian tugas dan tanggung jawab - Pernyataan telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite - Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut - Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku - Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, mengungkapkan: - Alasan tidak dibentuknya Komite - Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.	288	7. Nomination and Remuneration Committee or function, covering at least: - Name and position in the Committee/function - Age - Citizenship - Education background - Employment history, including: - Legal basis for the appointment as a member of the Committee/function - Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of committees and other positions (if any) - Working experience and terms of office in and outside of the Issuer or Public Company - Period and terms of office as a member of the Committee/function - Statement of independence of the Committee/function - Training and/or competence development attended in the reporting year - Duties and responsibilities - Statement that the Committee/function has a Committee charter - Policies and frequency of meetings and members' attendance record in these meetings - Activities in the reporting year - In the event that the Nomination and Remuneration Committee is not formed, disclose: - Reasons for not forming the Committee - Parties executing the nomination and remuneration function.
8. Komite lain dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Nama dan jabatannya dalam keanggotaan Komite - Usia - Kewarganegaraan - Riwayat pendidikan - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten - Periode atau masa jabatan anggota Komite - Pernyataan independensi Komite - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku - Uraian tugas dan tanggung jawab - Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite - Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite dalam rapat tersebut - Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	296, 304, 316, 325	8. Other Committees to support the function and duties of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, covering at least: - Name and position in the Committee - Age - Citizenship - Education background - Employment history, including: - Legal basis for the appointment as a member of the Committee - Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of committees and other positions (if any) - Working experience and terms of office in and outside of the Issuer or Public Company - Period and terms of office as a member of the Committee - Statement of independence of the Committee - Training and/or competence development attended in the reporting year - Duties and responsibilities - Statement that the Committee has a Committee charter - Policies and frequency of Committee meetings and members' attendance record in these meetings - Activities of the Committee in the reporting year.



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
9. Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat: - Nama - Domisili - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik - Riwayat pendidikan - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku - Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.	333	9. Corporate Secretary, covering at least: - Name - Domicile - Employment history, including: - Legal basis for the appointment as Corporate Secretary - Working experience and terms of office within and outside of the Issuer or Public Company - Education background - Training and/or competence development attended in the reporting year - Implementation of duties of the Corporate Secretary in the reporting year.
10. Unit Audit Internal, paling sedikit memuat: - Nama - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Unit Audit Internal - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik - Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada) - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku - Struktur dan kedudukan unit Audit Internal - Uraian tugas dan tanggung jawab - Pernyataan telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit Audit Internal - Uraian singkat pelaksanaan tugas unit Audit Internal pada tahun buku.	337	10. Internal Audit unit, covering at least: - Name - Employment history, including: - Legal basis for the appointment as Head of the Internal Audit unit - Working experience and terms of office in and outside of the Issuer or Public Company - Qualifications or Certifications related to the internal audit profession (if any) - Training and/or competence development attended in the reporting year - Structure and position of the Internal Audit unit - Duties and responsibilities - Statement that the Internal Audit unit has a charter - Implementation of duties of the Internal Audit unit in the reporting year.
11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan, paling sedikit memuat: - Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya - Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal - Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	347	11. Description of the internal control system implemented, covering at least: - Financial and operational control, and compliance with other prevailing regulations - Review on the effectiveness of the internal control system - Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.
12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai: - Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko - Jenis risiko dan cara pengelolaannya dan - Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik - Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	358	12. Risk management system implemented covering at least: - Overview of the risk management system - Types of risk and risk mitigation measures - Review on the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company - Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the adequacy of the risk management system.
13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris (jika ada), paling sedikit mengenai: - Pokok perkara/gugatan - Status penyelesaian perkara/gugatan - Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	366	13. Legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners (if any), covering at least: - Substance of the case/claim - Case/claim status - Impact on the condition of the Issuer or Public Company.
14. Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	367	14. Information on administrative sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, by the Capital Market Authority or other authorities during the reporting year (if any).



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
15. Informasi mengenai kode etik, meliputi: a. Pokok-pokok kode etik b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	368	15. Information on the company's code of conduct, including: a. Key points of the code of conduct b. Socialization and enforcement of the code of conduct c. Statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company.
16. Uraian mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja bagi manajemen dan/atau karyawan, antara lain berupa program kepemilikan saham manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a. Jumlah saham dan/atau opsi b. Jangka waktu pelaksanaan c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	393	16. Description of the long-term performance-based compensation policy for management and/or employees, including the management stock ownership program (MSOP) and/or the employee stock ownership program (ESOP). The information disclosed at least contains: a. Number of shares and/or options b. Implementation period c. Requirements for eligible employee and/or management d. Exercise price or determination of exercise price.
17. Uraian mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka b. Pelaksanaan atas kebijakan tersebut.	394	17. Description of the information disclosure policy regarding: a. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, no later than three working days after the occurrence of ownership or any change in the ownership of the Public Company's shares b. Implementation of the policy.
18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), paling sedikit memuat: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran b. Perlindungan bagi pelapor c. Penanganan pengaduan d. Pihak yang mengelola pengaduan e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit memuat: 1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku 2. Tindak lanjut pengaduan.	371	18. Description of the whistleblowing system, covering at least: a. Violation reporting mechanism b. Whistleblower protection c. Report handling d. Unit responsible for report handling e. Results of the report handling, covering at least: 1. Number of complaints received and processed during the reporting year 2. Follow-up on complaints.
19. Uraian kebijakan anti korupsi, paling sedikit memuat: a. Program dan prosedur yang dilakukan untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa, suap dan/atau gratifikasi b. Pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan.	379	19. Description of the anti-corruption policy, covering at least: a. Programs and procedures implemented to address corrupt practices, kickbacks, bribery, and/or gratification b. Employee anti-corruption training/socialization.
20. Penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	455	20. Implementation of the corporate governance guidelines for public companies for Issuers issuing equity-based securities, covering: a. Statement regarding the recommendations that have been implemented and/or b. Description of recommendations that have not been implemented, along with the reasons and alternative measures (if any).



SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021	Halaman Page	SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
H. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 1. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. 2. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		H. Corporate Social and Environmental Responsibility 1. In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that reports regarding social and environmental responsibility have been disclosed in the Sustainability Report, which is presented separately from the Annual Report. 2. The Sustainability Report presented separately from the Annual Report is to be submitted together with the submission of the Annual Report.
I. Laporan Keuangan Tahunan Yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.		I. Audited Annual Financial Statement The financial statements included in the Annual Report are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The Financial Report contains a statement regarding the accountability for the financial report as regulated in the POJK concerning the Responsibilities of the Board of Directors on the Financial Report, or the laws and regulations in the capital market sector that govern periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
J. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.		J. Letter of statement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the responsibility for the Annual Report.

Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index

Laporan Keberlanjutan ini disusun sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran-II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

This Sustainability Report is prepared in accordance with the requirements in Appendix-II of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers, and Publicly Listed Companies.

Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index	Halaman Pages
1. Penjelasan tentang strategi keberlanjutan 1. Sustainability Strategy	406-407
2. Ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan 2. Sustainability Performance Overview	10-11
a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: a. Economic Performance Overview:	10-11
1) Kuantitas produk atau jasa yang dijual 1) Quantity of products or services sold	
2) Pendapatan atau penjualan 2) Revenue or sales	
3) Laba atau rugi bersih 3) Net profit or loss	



Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index	Halaman Pages
4) Produk ramah lingkungan, dan (produksi energi terbarukan) 4) Environment-friendly products, and (renewable energy production)	
5) Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan berkelanjutan. 5) Local engagement related to sustainable business processes.	
b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: b. Environmental Performance Overview	11
1) Penggunaan energi (termasuk listrik dan air) 1) Energy consumption (including electricity and water)	
2) Pengurangan emisi yang dihasilkan 2) Emission reductions	
3) Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan 3) Reduction of waste and effluent (waste released to the environment) produced	
4) Pelestarian keanekaragaman hayati. 4) Biodiversity Conservation	
c. Aspek sosial Social Performance Overview	10-11
3. Profil Perusahaan 3. Company Profile	
a. Visi, misi dan nilai keberlanjutan a. Sustainability vision, mission, and values	70-71
b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik dan situs web LJK, emiten atau perusahaan publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan b. Name, address, phone number, fax number, email address, and website of the financial services institution, issuer or public company, as well as its branch and/or representative offices	60
c. Skala usaha c. Business scale	61
1) Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban 1) Total assets or asset capitalization, and total liabilities	
2) Jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan dan status ketenagakerjaan 2) Number of employees, by gender, position, age, education, and employment status	
3) Persentasi kepemilikan saham (publik dan pemerintah) 3) Shareholding percentage (public and government)	
4) Wilayah operasional 4) Areas of operations	
d. Produk, layanan dan kegiatan usaha yang dijalankan d. Products, services, and business activities;	
e. Keanggotaan pada asosiasi e. Membership in associations	
f. Perubahan LJK, emiten dan perusahaan publik yang bersifat signifikan f. Significant changes in the financial services institution, issuer, or public company	
4. Penjelasan Direksi 4. Board of Directors' Message	49-51
a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan a. Policies to respond to challenges in achieving the sustainability strategy	
b. Penerapan keuangan berkelanjutan b. Implementation of sustainable finance	
c. Strategi pencapaian target c. Target achievement strategies	
5. Tata Kelola Keberlanjutan 5. Sustainability Governance	
a. Uraian mengenai tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan a. Description of the duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officers, and/or work units responsible for the application of sustainability	410-413
b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan b. Elaboration on the competence development of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, employees, officers, and/or work units responsible for the application of sustainability	413



Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index		Halaman Pages
c. Prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, emiten dan perusahaan publik		414-416
c. Procedures to identify, measure, monitor, and control risks out of the application of sustainability with regard to economic, social, and environmental aspects, including the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing, carrying out periodic reviews and evaluations towards the effectiveness of the financial services institution's, issuer's, or public company's risk management process		
d. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan		416-417
d. Relationships with Stakeholders		
e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan		418
e. Issues encountered, progress, and their impact on the application of sustainable finance		
6. Kinerja Berkelanjutan		
6. Sustainability Performance		
a. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan		420-421
a. Activities to develop a sustainability culture		
b. Kinerja Ekonomi		422-423
b. Economic Performance		
1) Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi		
1) Comparison between targets and performance of production, portfolio, financing or investment targets, revenue and profit or loss		
2) Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan		
2) Comparison between targets and performance of portfolio, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are aligned with sustainable finance		
c. Kinerja Sosial		
c. Social Performance		
1) Komitmen untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen		433
1) Commitment to provide equal products and/or services to consumers		
2) Ketenagakerjaan		
2) Employment		
a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak		433-434
a) statement regarding equal work opportunities and the existence or otherwise of forced labor and child labor practices		
b) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional		436-437
b) remuneration of permanent employees at the lowest grade as a percentage of the regional minimum wage		
c) lingkungan bekerja yang layak dan aman		438-440
c) positive and safe work environment		
d) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai		440-442
d) employee training and development		
3) Masyarakat		
3) Community		
a) dampak operasi terhadap masyarakat sekitar		442-444
a) impact of operations on surrounding communities		
b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti		447
b) community complaint mechanism, and the number of community complaints received and resolved		
c) kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)		445
c) Social and environmental responsibility activities		
d. Kinerja Lingkungan Hidup		
d. Environmental Performance		
1) Biaya lingkungan hidup		424
1) Environmental expenditure		
2) Penggunaan material yang ramah lingkungan		423-424
2) Use of eco-friendly materials		
3) Uraian mengenai penggunaan energi		424-426
3) Description on energy use		
a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan		
a) quantity and intensity of energy consumed		
b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan, termasuk penggunaan sumber energi terbarukan		
b) energy use efficiency measures and achievements, including the use of renewable energy sources		



Indeks POJK NO.51/POJK.03/2017 POJK NO. 51/POJK.03/2017 Index	Halaman Pages
e. Kinerja lingkungan hidup bagi LJK, emiten atau perusahaan publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, paling sedikit memuat:	
e. Environmental performance for a financial services institution, issuer, or public company whose business processes are directly related to the environment, including at least:	
1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d	
1) Performance as intended in letter d	
2) Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	
2) Information on operational activities or areas creating positive and negative impacts on the surrounding environment, especially efforts to increase ecosystem carrying capacity	
3) Keanekaragaman hayati	
3) Biodiversity	
a) Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	
a) Impacts of operational areas located within or near conservation or areas with biodiversity	
b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan	
b) biodiversity conservation initiatives	
4) Emisi	
4) Emissions	
a) Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	
a) Quantity and intensity of emissions generated by the type	
b) Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan	
b) Emission reduction efforts and achievements	
5) Limbah dan efluen	
5) Waste and effluent	
a) Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	
a) Quantity of waste and effluent generated, by type	
b) Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	
b) Waste and effluent management mechanism	
c) Tumpahan yang terjadi (jika ada)	
c) Spill incidents (if any)	
6) Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan	
6) Number and subjects of environmental complaints received and resolved	
f. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	
f. Responsibility for the development of sustainable products and/or services	
1) Inovasi dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan berkelanjutan	448
1) Innovation and development of sustainable products and/or services	
2) Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	448-449
2) Number and percentage of products and services that have been evaluated for consumer safety	
3) Dampak positif dan negatif produk/jasa	449
3) Positive and negative impacts of products/services	
4) Jumlah produk yang ditarik Kembali	450
4) Number of products recalled	
5) Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	453-454
5) Customer satisfaction survey on sustainable products and/or services	
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, Jika Ada	454
7. Written Verification From An Independent Party, If Any	
8. Lembar Umpan Balik Bagi Pembaca, Jika Ada	471-472
8. Feedback Page For Readers, If Available	
9. Tanggapan terhadap Umpan Balik dari Tahun Sebelumnya	454
9. Response To Feedback For The Previous Year's Report	



Lampiran Umpan Balik

Feedback Attachment

Profil Anda | Your Profile

Nama | Name :

E-mail | E-mail :

Telp/Hp | Phone/Call Phone :

Golongan Pemangku Kepentingan Stakeholder Category

- ☐ Pemegang Saham
Shareholder
- ☐ Karyawan
Employee
- ☐ Debitur
Debtors
- ☐ Masyarakat
Society
- ☐ Investor
Investor
- ☐ Media
Media
- ☐ Pemerintah/Regulator
Government/Regulator
- ☐ Lain-lain, mohon sebutkan
Others, please specify.....
- ☐ Pemasok
Supplier





Mohon berikan penilaian atas tingkat aspek material yang dinilai penting menurut anda bagi keberlanjutan Perseroan (nilai 1=paling tidak penting s/d 5 = paling penting).
Please rate the material aspects that you consider important for the sustainability of the Company (from 1=most important to 5=least important)

Kinerja Ekonomi
Economic Performance
[]

Ketenagakerjaan
Employment
[]

Program Sosial Masyarakat
Social Community Program
[]

Portofolio Produk
Product Portfolio
[]

Pelatihan dan Pendidikan
Training and Education
[]

Keamanan Debitur
Customer Safety
[]

Lingkungan
Environment
[]

Lain-lain, sebutkan
Others, please specify
[]

Pembaca bisa memberikan pertanyaan, kritik dan saran, atas laporan ini:
You may submit your inquiries, critics, and suggestions on this report:

.....

.....

Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon agar lembar umpan balik ini dikirimkan kembali ke alamat:
Thank you for your participation. Please return this feedback form to:

Kantor Pusat | Head Office
PT KB Finansia Multi Finance
Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190



08

Laporan Keuangan

Financial Statements

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

**LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025**

DAN/AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pernyataan Direksi

Directors' Statement

Laporan Keuangan

Financial Statements

**Ekshibit/
Exhibit**

Laporan Posisi Keuangan

A

Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain

B

*Statement of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas

C

Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas

D

Statement of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan

E

Notes to the Financial Statements

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Peter Halim
Alamat Kantor : PT KB Finansia Multi Finance
Office 8, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Alamat Domisili : Jl. Benda, GG. Langgar No. 7
RT/RW : 010/004
Kel. Cilandak Timur,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No. Telepon : (021) 2933 3646
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kisup Wi
Alamat Kantor : PT KB Finansia Multi Finance
Office 8, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Alamat Domisili : Apartemen The Capital Residence
Tower 2 unit 8C SCBD, Lot 24
Jl. Jendral Sudirman kav 52-53
Jakarta Selatan
No. Telepon : (021) 2933 3646
Jabatan : Wakil Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan;
5. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret / March 2026



Peter Halim
Direktur Utama/
President Director

We, the undersigned:

1. Name : Peter Halim
Office Address : PT KB Finansia Multi Finance
Office 8, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Residential Address : Jl. Benda, GG. Langgar No. 7
RT/RW : 010/004
Kel. Cilandak Timur,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone number : (021) 2933 3646
Position : President Director
2. Name : Kisup Wi
Office Address : PT KB Finansia Multi Finance
Office 8, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Residential Address : Apartment The Capital Residence
Tower 2 unit 8C SCBD, Lot 24
Jl. Jendral Sudirman kav 52-53
Jakarta Selatan
Phone number : (021) 2933 3646
Position : Vice President Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT KB Finansia Multi Finance ("The Company") financial statements;
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been presented completely and correctly disclosed in the Company's financial statements;
b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system;
5. We are responsible for the Company's compliances with laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Kisup Wi
Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

Exhibit A

Exhibit A

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2024	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	3,33	603.856.131.068	293.797.009.303	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	4	3.635.019.724.067	6.799.026.440.508	Financing receivables
Tagihan anjak piutang	5	132.776.446.562	373.016.480.656	Factoring receivables
Beban dibayar dimuka dan uang muka	6	24.797.580.083	17.922.426.736	Prepaid expenses and advances
Pajak dibayar dimuka	17a	513.276.339	521.597.673	Prepaid tax
Piutang lain-lain	7,33	122.898.157.934	189.940.647.903	Other receivables
Aset tak guna	8,33	57.155.367.124	37.659.340.423	Right-of-use assets
Aset tetap	9	102.119.632.775	122.848.627.046	Property and equipment
Aset takberwujud	10,33	107.718.898.808	96.772.477.366	Intangible asset
Investasi jangka panjang	11,33	41.580.000.000	29.869.080.080	Long term investment
Aset pajak tangguhan	17a	413.463.165.547	185.136.983.974	Deferred tax assets
Aset lain-lain	12	18.860.905.811	26.668.124.480	Other assets
JUMLAH ASET		4.758.159.292.130	8.133.478.226.615	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Pinjaman yang diterima	13,33	3.549.779.145.941	5.622.930.546.685	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	14	244.415.956.549	-	Subordinated loan
Surat berharga yang diterbitkan	15	367.054.366.121	3.202.054.919.241	Securities issued
Utang lain-lain	16,33	40.789.160.089	63.158.898.525	Other payables
Utang pajak	17b	3.682.445.638	3.887.528.722	Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	20,33	114.813.593.038	107.832.412.946	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18	102.368.080.575	115.478.881.754	Post-employment benefits obligation
Liabilitas sewa	19	9.481.211.325	15.064.671.488	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas		4.631.824.164.198	7.129.307.099.361	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sewa 426.250.040 saham (2024: 226.250.040 saham)	21	426.250.840.000	226.250.040.000	Share capital - par value of Rp 1,000 per share Authorized capital, issued and fully paid capital 426,250,040 shares (2024: 226,250,040 shares)
Tambahan modal disetor Korporasi kelas 1a: lain Sedek taba	22	88.886.785.571	288.886.785.571	Additional paid-in capital
Telah ditentukan penggunaannya Tidak ditetapkan penggunaannya	23	45.250.000.000	45.250.000.000	Other equity component
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	24,33	600.000.000.000	600.000.000.000	Perpetual convertible bonds
Jumlah Ekuitas		128.136.127.372	994.163.217.254	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.758.159.292.130	8.123.478.226.615	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Exhibit E
tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements
which are an Exhibit E an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 26 Maret/March 2024

(Nama)

Widi Daryono Utami/ Vice President Director

Exhibit B

EXHIBIT B

PT KB FINANSIAL MULTI FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

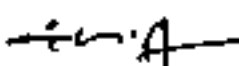
PT KB FINANSIAL MULTI FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pembayaran konsumen	25, 33	1.642.739.798,372	1.825.588.675.788	Consumer financing
Angka piutang	26	30.164.851,453	53.497.732.797	Factoring
Lain-lain	27, 33	79.537.268,741	75.594.320.504	Others
Jumlah Pendapatan		1.752.441.918,566	1.954.680.729,089	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Beban kepegawaian	28	526.371.494,871	601.008.285,318	Personnel expenses
Beban keuangan	29, 33	487.091.433,400	516.022.133,517	Finance cost
Beban umum dan administrasi	30, 33	310.573.665,141	294.282.928,881	General and administrative expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai				Allowances for impairment losses for
Piutang pembiayaan	4	1.449.159.849,391	770.093.181,983	financing receivables
Tagihan angka piutang	5	28.163.591,292	46.491.804,452	factoring receivables
Beban penyusutan dan amortisasi	6, 9, 10	121.728.408,138	111.849.400,781	Depreciation and amortization
Beban lain-lain	31	1.040.064,062	22.852.241,458	expenses
Jumlah Beban		2.436.128.490,745	2.304.619.926,374	Total Expenses
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(1.083.686.492,179)	(409.939.247,289)	LOSS BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX
Kali	17c	-	-	Current
Tangguhan	17c, e	226.084.815,836	95.012.356,566	Deferred
Manfaat Pajak Penghasilan		226.084.815,836	95.012.356,566	Income Tax Benefit
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(857.601.676,343)	(314.926.890,723)	NET LOSS FOR THE YEAR
KERUGUAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE LOSS
POS-POS YANG TIDAK AKAN				ITEMS THAT WILL NOT BE
OVERKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Kerugian aktuaria program				Loss on defined benefit
manfaat pensi	18	(23.087.862,896)	(861.619,113)	actuarial program
Keuntungan (kerugian) dari perubahan				Gain (loss) on changes in value of
nilai aset keuangan yang diukur pada				financial assets measured
nilai wajar melalui penghasilan				at fair value through other
komprehensif lain	11	(2.420.000,000)	(14.040.000,000)	comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos yang				income tax relating to item that will
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	17e	2.241.449,732	3.142.886,013	not be reclassified to profit or loss
Jumlah Kerugian Komprehensif Lain		(8.266,413,164)	(11.758.723,100)	Total Other Comprehensive Loss
JUMLAH KERUGUAN KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
TAHUN BERJALAN		(865.868,089,507)	(326.685,613,823)	FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Exhibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an Exhibit E an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 26 Maret / March 2026


Walm Director Utama / Vice President Director

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo laba/ Retained earnings			Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan/ Perpetual convertible bonds	Jumlah ekuitas/ Total equity			
	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 1 Januari 2024	226.250.040.000	288.886.785.571	25.250.008.000	287.328.211.700	(56.128.241.941)	600.000.000.000	1.371.586.803.330	Balance as of 1 January 2024
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	-	-	20.000.000.000	(20.000.000.000)	-	-	-	Appropriated retained earnings
Pembayaran dividen tunai	-	-	-	(5.203.750.920)	-	(5.203.750.920)	-	Payment of cash dividends
Pembayaran atas kupon perpetual bonds	-	-	-	(45.534.411.333)	-	(45.534.411.333)	-	Payment of coupon perpetual bonds
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(314.926.690.723)	-	(314.926.690.723)	-	Loss for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(11.758.733.100)	(11.758.733.100)	-	Other comprehensive loss
Saldo 31 Desember 2024	226.250.040.000	288.886.785.571	45.250.008.000	(98.336.641.276)	(67.886.975.041)	600.000.000.000	994.163.217.254	Balance as of 31 December 2024
Saham bonus	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-	-	-	-	-	Bonus Shares
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(857.601.676.323)	-	(857.601.676.323)	-	Loss for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(8.426.413.159)	(8.426.413.159)	-	Other comprehensive loss
Saldo 31 Desember 2025	426.250.040.000	88.886.785.571	45.250.008.000	(955.938.317.599)	(76.313.388.200)	600.000.000.000	128.135.127.772	Balance as of 31 December 2025
Catatan 21/ Note 21	Catatan 22/ Note 22	Catatan 23/ Note 23	Catatan 24/ Note 24					

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements which are on Exhibit E
an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari transaksi pembiayaan		7.424.291.765.964	8.910.637.693.074	Proceeds from financing transactions
Penerimaan dari pendapatan keuangan	27,33	1.258.715.518	3.224.373.251	Proceeds from finance income
Pembayaran atas transaksi pembiayaan	(	3.405.323.413.391)	(6.666.816.004.000)	Payment of financing transactions
Pembayaran beban keuangan	(	411.883.804.182)	(549.667.114.462)	Payment of financing cost
Pembayaran beban operasional	(	1.225.137.579.922)	(1.298.059.171.336)	Payment of operating expenses
Pembayaran atas pajak penghasilan	(	859.210.713)	(2.005.747.295)	Payment of income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		2.382.346.473.274	397.314.029.232	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset takberwujud	10	(37.830.691.053)	(41.141.455.399)	Acquisitions of intangible asset
Perolehan aset tetap	9	(13.592.154.245)	(34.130.658.754)	Acquisitions of property and equipment
Perolehan atas aset hak-guna	8,32	(39.400.445.498)	(39.805.767.632)	Acquisitions of right-of-use assets
Hasil dari penjualan aset tetap	9	540.393.260	328.755.919	Proceeds from sale of property and equipment
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(90.282.897.536)	(114.749.125.866)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	13,32	4.331.825.000.000	7.726.997.637.576	Proceeds from fund borrowings
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan		-	394.035.000.000	Proceeds from issuance of securities issued
Penerimaan dari pinjaman subordinasi	14	247.800.000.000	-	Proceeds from Subordinated Loan
Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan	(	639.640.000.000)	(500.000.000.000)	Payments of debt securities issued
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	13	(6.404.921.481.633)	(7.690.338.251.909)	Payments of fund borrowings
Pembayaran atas liabilitas sewa	(	17.317.666.114)	(19.039.341.606)	Payments of lease liabilities
Pembayaran bunga obligasi perpetual yang dapat dikonversikan		-	(45.534.411.333)	Interest payment of perpetual convertible bonds
Pembayaran dividen tunai		-	(5.203.750.920)	Payment of cash dividends
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(2.482.254.147.747)	(139.083.118.192)	Net cash flows used in financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS LAINNYA	27	249.693.774	(204.115.602)	OTHER INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS		(189.940.878.235)	143.277.669.572	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	293.797.009.303	150.519.339.731	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	103.856.131.068	293.797.009.303	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are on Exhibit E an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan") dahulu PT Finansia Multi Finance berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 9 Juni 1994 dari Rachmad Umar, S.H., Notaris di Pondok Gede. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10254-HT.01.01. Th 94 tanggal 5 Agustus 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572. Berdasarkan akta Notaris No. 23 tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT KB Finansia Multi Finance, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 6 Juli 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No.153 tanggal 29 Oktober 2025 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03-0246674 tanggal 29 Oktober 2025.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi dan atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 dan yang telah dilakukan pembaharuan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-177/NB.11/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki 116 dan 129 kantor cabang yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT KB Finansia Multi Finance ("the Company") formerly PT Finansia Multi Finance was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 4 dated 9 June 1994 of Rachmad Umar, S.H., Notary in Pondok Gede. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (recently known as the Ministry of Law of the Republic of Indonesia) by its Decision Letter No. C2-10254-HT.01.01.Th 94 dated 5 August 1994 and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.79 dated 4 October 1994, Supplement No. 7572. Based on Notarial deed No. 23 dated 6 July 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Company changed its name to PT KB Finansia Multi Finance, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 6 July 2020.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently based on the Notarial Deed No. 153 dated 29 October 2025 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the changes in Issued and Paid-Up Capital Increase. This change had been received and registered in the Corporate System Administration at the Minister of Law of the Republic of Indonesia through letter No.AHU-AH.01.03-0246674 AHU dated 29 October 2025.

In accordance with Article 3 of the Company's Article of Association, the scope of its activities comprises of investment financing, working capital financing, multipurpose financing, operating lease and/or fee-based activities, provided that they do not conflict with the provisions of legislation in the financial services sector and other financing activities based on approval from Financial Service Authority (OJK).

The Company obtained its operating license as multi finance company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. 460/KMK.017/1994 dated 14 September 1994 and that has been updated based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number: KEP-177/NB.11/2020 dated 5 August 2020 and started its commercial operation in 1994.

The Company is domiciled in Jakarta with its head office located in Office 8 Building, 15th Floor, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company has 116 and 129 branch offices, which were located throughout Indonesia.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran umum obligasi Perusahaan

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

Pada tanggal 22 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari dan 3 tahun yang dinyatakan efektif oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. S-126/D.04/2022. Obligasi tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerima surat dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No.124/DIR/RATLTR/VII/2022 yang menyatakan Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA+(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. Peringkat Nasional 'AA' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada tanggal 13 September 2022, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.143/DIR/RATLTR/IX/2022 yang menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang telah dinaikkan menjadi 'AAA(idn)' dari 'AA+(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

Pada tanggal 25 Juli 2024, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 136/DIR/RATLTR/VII/2024 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

Pada tanggal 15 Juli 2025, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan menerbitkan "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 untuk jangka waktu 370 hari dan 3 tahun yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. S-133/D.04/2023. Obligasi tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perusahaan telah menerima surat dari Fitch No.131/DIR/RATLTR/VIII/2023 yang menetapkan kembali Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

1. GENERAL (Continued)

b. Public offering of the Company's bonds

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

On 22 July 2022, the Company issued "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" with nominal value of Rp 1,000,000,000,000 with maturities 370 days and 3 years which became effective on 14 July 2022 based on the Decision Letter No.S-126/D.04/2022 of the Chairman of Financial Services Authority ("OJK"). This bond is listed in the Indonesia Stock Exchange.

On 29 July 2022, the Company received a letter from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No.124/DIR/RATLTR/VII/2022 which affirmed the National Long-Term Rating of the Company "AA+(idn)" for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. The National Rating of 'AA' indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

On 13 September 2022, the Company received a letter from Fitch No.143/DIR/RATLTR/IX/2022 which affirmed the National Long-Term Rating of the Company has been upgraded to "AAA(idn)" from "AA+(idn)" for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. The National Rating of 'AAA' indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected of default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

On 18 August 2023, the Company received a letter No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

On 25 July 2024, the Company has received letters No. 136/DIR/RATLTR/VII/2024 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

On 15 July 2025, the Company has received letters No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

On 27 June 2023, the Company issued "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" with a nominal value of Rp 1,000,000,000,000 with maturities 370 days and 3 years which became effective on 19 June 2023 based on the Decision Letter No. S-133/D.04/2023. This bond is listed in the Indonesia Stock Exchange.

On 18 August 2023, the Company received a letter from Fitch No.131/DIR/RATLTR/VIII/2023 which reaffirmed the National Long-Term Rating of 'AAA(idn)' for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran umum obligasi Perusahaan (Lanjutan)

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 (Lanjutan)

Pada tanggal 25 Juli 2024, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 136/DIR/RATLTR/VII/2024 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Pada tanggal 15 Juli 2025, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

Pada tanggal 12 Desember 2024, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.234/DIR/RATLTR/XII/2024 yang menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024. Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada tanggal 17 Desember 2024, Perusahaan menerbitkan "Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024" dengan jumlah pokok sebesar Rp 394.035.000.000 untuk jangka waktu 370 hari dan 3 tahun yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan No. S-164/D.04/2024. Obligasi tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 15 Juli 2025, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Interest Rate	Jatuh Tempo/ Due Date	Status Pembayaran/ Payment Status	Peringkat/ Rating
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri/Series A	686.385.000.000	4,70%	2 Agustus/ August 2023	Lunas/ Paid	AAA (idn)
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri/Series B	313.615.000.000	7,40%	22 Juli/ July 2025	Lunas/ Paid	AAA (idn)
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri/Series A	500.000.000.000	6,20%	7 Juli/ July 2024	Lunas/ Paid	AAA (idn)
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri/Series B	500.000.000.000	7,30%	27 Juni/ June 2026	Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Seri/Series A	326.025.000.000	6,70%	27 Desember /December 2025	Lunas/ Paid	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Seri/Series B	68.010.000.000	7,00%	17 Desember /December 2027	Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due	AAA (idn)

1. GENERAL (Continued)

b. Public offering of the Company's bonds (Continued)

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 (Continued)

On 25 July 2024, the Company has received letters No. 136/DIR/RATLTR/VII/2024 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

On 15 July 2025, the Company has received letters No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

On 12 December 2024, the Company received a letter from Fitch No.234/DIR/RATLTR/XII/2024 which affirmed the National Long-Term Rating of the Company "AAA(idn)" for Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024. The National Rating of "AAA" indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected of default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

On 17 December 2024, the Company issued "Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024" with a nominal value of Rp 394,035,000,000 with maturities 370 days and 3 years which became effective on 11 December 2024 based on the Decision Letter No.S-164/D.04/2024. Those bonds were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On 15 July 2025, the Company has received letters No.123/DIR/RATLTR/VII/2025 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

The bonds issued by the Company as of 31 December 2025 were as follows:

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Dewan Komisaris, Direksi dan Komite**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah melalui Akta Notaris No. 82 tanggal 16 September 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan ini telah diterima dan dicatat serta disimpan di dalam Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.09-0338247 tanggal 16 September 2025, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Sang In Lee	
Komisaris Independen :	Nursalam Andi Tabusalla	
Komisaris :	Je Ui Jung	
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama :	Peter Halim	
Wakil Direktur Utama :	Kisup Wi	
Direktur :	Hery Susanto Dermawan	
Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs :	Martina Hariyanto	
Direktur :	Choi, Ho Jung	
Direktur :	Kyeongho Min	
Direktur :	-	

Komposisi Komite Manajemen Risiko Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah melalui Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 1 September 2025, susunan Komite Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
<u>Komite Manajemen Risiko</u>		
Ketua :	Kisup Wi	
Anggota :	Peter Halim	
Anggota :	Choi, Ho Jung	
Anggota :	Ka Nen	
Anggota :	Daniel Adrian	
Anggota :	-	
Anggota :	-	

1. **GENERAL** (Continued)

c. **Boards of Commissioners, Directors and Committee**

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has undergone several changes, most recently amended through Notarial Deed No. 82 dated 16 September 2025 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta regarding changes to the Board of Directors and Commissioners. This change had been registered and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.09-0338247 dated 16 September, 2025, therefore the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024		<u>Board of Commissioners</u>
	Moon Cheol Kang	:	President Commissioner
	Nursalam Andi Tabusalla	:	Independent Commissioner
	-	:	Commissioner
			<u>Directors</u>
	Yap Tjay Hing	:	President Director
	Kisup Wi	:	Vice President Director
	Hery Susanto Dermawan	:	Director
			Director of Human Resources and General Affairs
	Martina Hariyanto	:	Affairs
	Choi, Ho Jung	:	Director
	Kyeongho Min	:	Director
	Peter Halim	:	Director

The composition of the Company's Risk Management Committee has undergone several changes, most recently amended through the Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 1 September 2025, the composition of the Company's Risk Management Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024		<u>Risk Management Committee</u>
	Yap Tjay Hing	:	Chairman
	Peter Halim	:	Member
	Choi, Ho Jung	:	Member
	Ka Nen	:	Member
	Daniel Adrian	:	Member
	Kisup Wi	:	Member
	Marie Yovanka Angelina	:	Member

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 1 September 2025, susunan Komite Pengarah TI Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komite Pengarah TI</u>	
Ketua :	Peter Halim
Anggota :	Kisup Wi
Anggota :	David Wirawan
Anggota :	Hery Susanto Dermawan
Anggota :	Choi, Ho Jung
Anggota :	Herman Jusup
Anggota :	Daniel Adrian

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 1 September 2025, susunan Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas</u>	
Ketua :	Peter Halim
Anggota :	Kisup Wi
Anggota :	Kyeongho Min
Anggota :	Choi, Ho Jung
Anggota :	Cun Pin
Anggota :	Hery Susanto Dermawan
Anggota :	Daniel Adrian

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

<u>Komite Audit</u>		
Ketua :	Nursalam Andi Tabusalla	:
Anggota :	Peter Irawan Chandra	:
Anggota :	Siti Rosyidah	:

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 30 Januari 2025, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komite Nominasi dan Remunerasi</u>	
Ketua :	Nursalam Andi Tabusalla
Anggota :	Sang In Lee
Anggota :	Juan Sumando Nababan

1. GENERAL (Continued)

c. Boards of Commissioners, Directors and Committee (Continued)

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 1 September 2025, the composition of the Company's IT Steering Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024		<u>IT Steering Committee</u>
Yap Tjay Hing :		:	Chairman
Kisup Wi :		:	Member
David Wirawan :		:	Member
Hery Susanto Dermawan :		:	Member
Choi, Ho Jung :		:	Member
Herman Jusup :		:	Member
Marie Yovanka Angelina :		:	Member

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 1 September 2025, the composition of the Company's Asset and Liability Management Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024		<u>Asset & Liabilities Management Committee</u>
Yap Tjay Hing :		:	Chairman
Kisup Wi :		:	Member
Sea Hwan Lah :		:	Member
Choi, Ho Jung :		:	Member
Cun Pin :		:	Member
Peter Halim :		:	Member
Marie Yovanka Angelina :		:	Member

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's Audit Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

			<u>Audit Committee</u>
Nursalam Andi Tabusalla :		:	Chairman
Peter Irawan Chandra :		:	Member
Siti Rosyidah :		:	Member

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 30 January 2025, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024		<u>Nomination and Remuneration Committee</u>
Nursalam Andi Tabusalla :		:	Chairman
Moon Cheol Kang :		:	Member
Juan Sumando Nababan :		:	Member

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 30 Januari 2025, susunan Komite Pemantau Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komite Pemantau Risiko</u>	
Ketua :	Nursalam Andi Tabusalla
Anggota :	Sang In Lee
Anggota :	Peter Irawan Chandra

Gaji, bonus dan tunjangan yang diberikan kepada manajemen Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 60.897.534.478 dan Rp 73.054.768.821.

Entitas induk utama Perusahaan adalah KB Financial Group. Entitas induk Perusahaan adalah KB Kookmin Card Corp. Keduanya adalah perusahaan yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (Tidak diaudit):

	2025
Karyawan tetap	2.131
Karyawan tidak tetap	1.816
Jumlah	3.947

1. GENERAL (Continued)

c. *Boards of Commissioners, Directors and Committee (Continued)*

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 30 January 2025, the composition of the Company's Risk Oversight Committee as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2024	<u>Risk Oversight Committee</u>
Nursalam Andi Tabusalla :		<i>Chairman</i>
Moon Cheol Kang :		<i>Member</i>
Peter Irawan Chandra :		<i>Member</i>

Salaries, bonuses and benefits provided to the Company's management for the year ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp 60,897,534,478 and Rp 73,054,768,821, respectively.

The ultimate parent entity of the Company is KB Financial Group. The Company's parent entity is KB Kookmin Card Corp. Both are the company located in Seoul, South Korea.

The total number of the Company's employees as of 31 December 2025 and 2024 was as follows (Unaudited):

	2024	
	3.109	<i>Permanent employees</i>
	3.684	<i>Non-permanent employees</i>
Jumlah	6.793	Total

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini merupakan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten untuk tahun-tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun berdasarkan atas akrual dan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan secara khusus.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The significant accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. *Basis of Preparation*

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS"), which includes the Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by Financial Accounting Standards Board Institute of Accountants in Indonesia and regulations prescribed by Financial Service Authority ("OJK").

The financial statements were prepared on the accrual basis and historical costs concept, unless otherwise stated.

The statements of cash flows were prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan (Lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("IDR" atau "Rp") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal dimana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 2u.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku Efektif mulai 1 Januari 2025 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen PSAK 221, 'Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing', memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya.

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"

Amendemen PSAK 109 ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

a. Basis of Preparation (Continued)

The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah ("IDR" or "Rp") which is the functional currency of the Company.

The preparation of financial statement in compliance with SFAS requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company's management to exercise judgement in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the financial statements and their effect are disclosed in Note 2u.

b. Changes to the statements of financial accounting and interpretations of statement of financial accounting standards

The adoption of these amended standards, which are effective beginning 1 January 2025 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported for the current or prior financial years.

- Amendment of SFAS 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" - Lack of Exchangeability

Amendment of SFAS 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" clarifies the requirements concerning the conditions under which a currency is non-exchangeable and its disclosure.

- SFAS 117 "Insurance Contracts"

SFAS 117 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. SFAS 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.

The adoption of these amended standards, which are effective beginning 1 January 2026 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported for the current or prior financial years.

- Amendment of SFAS 109 and SFAS 107 "Classification and Measurement of Financial Instruments"

The amendment adds and clarifies provisions in SFAS 109 regarding the derecognition of financial liabilities and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with environmental, social and governance (ESG)-linked features, financial assets with non-recourse features and contractually linked instruments such as tranches. The amendment also modifies provisions in SFAS 107 related to disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flow.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 terkait Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

Amandemen ini mengubah persyaratan 'penggunaan sendiri' dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Ketentuan ini hanya berlaku untuk kontrak yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak- kontrak ini dikenal sebagai 'kontrak dengan referensi listrik yang bergantung pada alam'.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu sembilan bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (c) manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
 - (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

b. Changes to the statements of financial accounting and interpretations of statement of financial accounting standards (Continued)

- Amendments to SFAS 109 and SFAS 107 of Contracts Referencing Nature-dependent Electricity

The amendment modifies the 'own use' and hedge accounting requirements of SFAS 109 and introduce specific disclosure requirements for SFAS 107. They apply only to contracts that involve variability in electricity generation due to uncontrollable natural conditions, like weather. These are known as 'contracts referencing nature-dependent electricity'.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of nine months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

d. Related Party Transactions

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (a) has control or joint control over the reporting entity;
 - (b) has significant influence over the reporting entity; or
 - (c) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (a) The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member).
 - (c) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - (f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - (g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (h) An entity, or member of a group in which the entity is a part of that group, provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan ini, suatu pihak disebut sebagai pihak berelasi terhadap Perusahaan, apabila:

- i. Entitas tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan Perusahaan atau melakukan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan di dalam membuat keputusan kebijakan keuangan dan operasional, atau memiliki pengendalian bersama terhadap Perusahaan;
- ii. Perusahaan dan entitas tersebut adalah subjek pengendalian bersama;
- iii. Entitas tersebut adalah entitas asosiasi Perusahaan atau ventura bersama dimana Perusahaan adalah venturer;
- iv. Pihak tersebut adalah anggota personel manajemen kunci atau anggota keluarga dekat individu yang bersangkutan, atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan Perusahaan;
- v. Pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat pihak yang disebut pada butir (i) atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut; atau
- vi. Pihak tersebut merupakan program imbalan pasca kerja yang merupakan manfaat karyawan atau merupakan entitas yang berelasi dengan pihak berelasi dengan Perusahaan.

Anggota keluarga dekat merupakan individu anggota keluarga yang diharapkan mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh orang, dalam hubungan mereka dengan entitas.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 33).

e. Instrumen Keuangan

(i) Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

1. Biaya perolehan diamortisasi;
2. Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
3. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

d. Related Party Transactions (Continued)

For the purposes of these financial statements, a party is considered to be related to the Company if:

- i. The party has the ability, directly or indirectly through one or more intermediaries, to control the Company or exercise significant influence over the Company in making financial and operating policy decisions, or has joint control over the Company;
- ii. The Company and the party are subject to common control;
- iii. The party is an associate of the Company or a joint venture in which the Company is a venturer;
- iv. The party is a member of the key management personnel of the Company or a close family member of such an individual, or is an entity under the control, joint control or significant influence of the Company;
- v. The party is a close family member of a party referred to in (i) or is an entity under the control, joint control or significant influence of such individuals; or
- vi. The party is a post-employment benefit plan which is for the benefit of employees of the Company or of any entity that is a related party of the Company.

Close family members of an individual are those family members who may be expected to influence, or be influenced by, that individual in their dealings with the entity.

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements (Note 33).

e. Financial Instruments

(i) Financial Assets

The Company classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

1. Amortised cost;
2. Fair value through profit or loss ("FVTPL");
3. Fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The classification depends on the purpose for which the financial assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(i) Aset Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan, terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang pembiayaan, piutang lain-lain investasi jangka panjang dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "aset lain-lain").

Perusahaan mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori:

- (i) Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Perusahaan diakui pada nilai wajarnya ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pemberian suatu pinjaman maupun perolehan piutang dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman maupun piutang tersebut tidak diperoleh. Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari 'pendapatan piutang pembiayaan'.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instrument (Continued)

(i) Financial Assets (Continued)

The Company determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

The Company's financial assets, consist of cash and cash equivalents, restricted cash, financing receivables, other receivables, long term investments and loans to employees (recorded as part of "other assets").

The Company assets into the following category:

- (i) *The Company's financial classified as financial assets measured at amortised cost*

A financial assets is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions:

- *Financial assets is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *Contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.*

At initial recognition, the Company's financial assets measured at amortised cost are measured at fair values plus or minus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of loans or receivables and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan or receivables had not been acquired or issued. Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of 'financing receivables'.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(i) Aset Keuangan (Lanjutan)

- (i) Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai" atas piutang pembayaran konsumen.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, beban yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan liabilitas sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(i) Financial Assets (Continued)

- (i) The Company's financial classified as financial assets measured at amortised cost (Continued)

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as financial assets measured at amortised cost recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Allowance for Impairment Losses" for financing receivables.

- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. Company may determine at initial classification of a financial asset on a certain equity instrument which commonly measured the fair value through profit and loss rise change in the fair value presented under fair value through other comprehensive income.

- (iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

Fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and fixed maturities that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- a) Financial assets managed under business model which its objective is to both collect the contractual cash flows and sell the financial assets; and
- b) Contractual cash flows characteristics test resulting rights on certain basic term of cashflows meets the solely payments of principal and interest.

(ii) Financial Liabilities

The Company's financial liabilities consist of fund borrowings, securities issued, accrued expenses, other payables and lease liabilities.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pengakuan suatu pinjaman yang diterima, dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman yang diterima tidak diakui. Beban atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari "beban keuangan".

(iii) Instrumen Ekuitas

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan di klasifikasikan sebagai ekuitas hanya sebatas ketika instrumen keuangan tersebut tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas keuangan.

Saham biasa Perusahaan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.

(iv) Hierarki Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 107 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(ii) Financial Liabilities (Continued)

The Company classified its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs. After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method. Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the recognition of loan received and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan has not been recognized. Expenses on financial liabilities measured at amortized cost is charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of "finance cost".

(iii) Equity Instruments

Financial instruments issued by the Company are classified as equity only to the extent that they do not meet the definition of a financial liability or financial asset.

The Company's ordinary shares are classified as equity instruments.

(iv) Fair Value Measurement Hierarchy

SFAS 107 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the fair value measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- a. quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- b. inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (level 2); and
- c. inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(iv) Hierarki Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Tingkatan di dalam hierarki nilai wajar dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan penetapnya pada basis tingkatan input paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

(v) Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(iv) Fair Value Measurement Hierarchy (Continued)

The level in the fair value hierarchy within which the financial asset or financial liability is categorised is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

(v) Fair Value Estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cashflows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(vi) Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan piutang pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, penghentian pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa piutang pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau hasil penjualan agunan diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(vi) Derecognition

The Company derecognized a financial asset when the contractual rights to the cash flow from asset expire, or when the Company transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and reward of ownership are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognized as a separate asset or liability.

The Company derecognize financing receivables at the time when the collateral vehicle has been taken out. In addition, derecognition of financial liabilities when they have been redeemed or otherwise extinguished.

In a transaction where the Company has substantially own or did not transfer all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company terminate the recognition of such assets, if the Company no longer has control over those assets. The rights and obligations arising or that still exists in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control over the assets still owned, the Company continued to recognize the transferred assets in the amount of involvement that is sustainable, where the level of sustainability of the Company in the transferred assets amounted to changes in the value of the transferred assets.

Companies write off any outstanding financing receivables and reserves related to impairment losses, when the Company determines that the financing receivables cannot be collectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the sale of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the financing receivables.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(vii) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar yang relevan.

(viii) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami konsumen;
- (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Perusahaan, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami konsumen, memberikan keringanan (konsesi) pada konsumen yang tidak mungkin diberikan jika konsumen tidak memiliki kesulitan tersebut;
- (d) terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are off-set and the net amount is presented in the statements of financial position when, and only when, the Company has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by relevant standards.

(viii) Impairment of Financial Assets

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- (a) significant financial difficulty of the consumer;
- (b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- (c) the Company, for economic or legal reasons relating to the consumer's financial difficulty, granting to the consumer a concession that the lender would not otherwise consider;
- (d) it becomes probable that the consumer will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- (e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(viii) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- (f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- (1) memburuknya status pembayaran konsumen dalam kelompok tersebut; dan
 - (2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Financial Instruments (Continued)

(viii) Impairment of Financial Assets (Continued)

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include: (Continued)

- (f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:*

- (1) adverse changes in the payment status of consumers in the portfolio; and*
- (2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

The Company firstly assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

e. Financial Instruments (Continued)

(viii) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

(viii) Impairment of Financial Assets (Continued)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statements of comprehensive income. If financial assets measured at amortised cost has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi beban-beban untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(viii) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya. Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

Ketika piutang pembiayaan tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang pembiayaan tidak tertagih diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas aset keuangan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembayaran konsumen dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

f. Piutang Pembiayaan

Piutang pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan, akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian piutang pembiayaan dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

e. Financial Instruments (Continued)

(viii) Impairment of Financial Assets (Continued)

Estimates of changes in future cash flows for group of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period. The methodology and assumptions used in estimating future cash flows are reviewed periodically by the Company to reduce the difference between the estimated amount of loss with the amount of actual loss.

When a financing receivable account is uncollectible, such receivable is written-off against the related allowance for impairment losses. Such receivable is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment expense related to financing receivables are classified into "Allowance for Impairment Losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of financial assets written-off, in the previous period are recognized as allowances for impairment losses for financing receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

f. Financing Receivables

Financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing providers bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned financing receivables income and allowance for impairment losses.

Unearned income on financing receivables, which represents the difference between total installments to be received from the customers and the principal amount financed deducted with the unamortized cost, will be recognized as income over the terms of the contract using effective interest method of the financing receivables.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Piutang Pembiayaan (Lanjutan)

Penyelesaian kontrak sebelum masa piutang pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggu lebih dari 180 hari. Perusahaan juga dapat melakukan *write off* sebelum 180 hari dan dapat melakukan penundaan *write off*.

Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

Pembiayaan investasi diberikan untuk pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi.

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja ditunjukkan untuk debitur yang:

- Memiliki usaha produktif; dan/atau
- Memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pembiayaan multiguna diberikan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

Pembiayaan Bersama

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama *without recourse* dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan piutang pembiayaan disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Piutang Pembiayaan".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

f. Financing Receivables (Continued)

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting income related to this early termination of a contract is recognized in the current year's statement of profit or loss.

Financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 180 days. The Company can perform a write-off before 180 days and postpone the write-off.

Financing receivables based on purpose of financing

Investment financing were extended to finance capital goods and services needed for business/ investment activities.

Working capital financing were extended for working capital needs which fully utilized within one cycle of business activities.

Investment and working capital financing activities were intended to borrowers which:

- Have productive businesses; and/or
- Have ideas to develop the productive businesses

Multipurpose financing were extended for financing of goods/services for consumption and non-business related or productive activities.

Joint Financing

All joint financing contracts entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments is recorded as financing receivables in the statement of financial position (net approach). Financing receivables income is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income after deducting the portions which belong to other parties participating to these joint financing transactions.

In joint financing without recourse, arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates to consumer than the interest rates stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Financing Receivables Income".

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Piutang Pembiayaan (Lanjutan)

Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

g. Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang *with recourse* merupakan piutang yang dibeli dari Perusahaan lain. Tagihan anjak piutang *with recourse* diklasifikasikan dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan tagihan anjak piutang dan nilai wajar mengacu pada Catatan 2e.

h. Piutang dalam Proses Penyelesaian

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait, yaitu piutang pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual objek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

f. *Financing Receivables* (Continued)

Joint Financing (Continued)

Financing receivables are classified as financial assets measured at amortised cost. See Note 2e for the accounting policy of financial assets measured at amortised cost.

g. *Factoring Receivables*

Factoring receivables with recourse are purchased receivables from other companies. Factoring receivables with recourse are classified as financial assets at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment, derecognition of factoring receivables and fair value are discussed in Note 2e.

h. *Receivables in the Settlement Process*

Receivables in the settlement process represent receivables from collateral recovered and stated at net realizable value which is carrying amount or principal amount of related financing receivables, namely financing receivables less allowance for decline in market value of the collateral retained. Financing receivables is reclassified to receivables in the settlement process when the collateral is withdrawn because the consumer is not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Hak-Guna

Aset hak-guna diakui pada saat tanggal mulai sewa. Aset hak-guna dinilai pada harga perolehan, yang mana dinilai pada jumlah sewa liabilitas disesuaikan pada pembayaran sewa dibuat pada saat atau sebelum tanggal sewa dimulai. Aset hak-guna kemudian disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus mulai tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal berakhir umur penggunaan aset hak-guna atau tanggal akhir sewa.

k. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

**Masa manfaat/Useful lives
(dalam tahun/in years)**

Bangunan	20
Peralatan kantor	5
Kendaraan	5
Perabot dan perlengkapan kantor	5
Renovasi bangunan	5

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the useful-life beneficial periods using the straight-line method.

j. Right-of-use assets

Right-of-use assets are recognised at the lease commencement date. It is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date. It is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end the lease term.

k. Property and Equipment

The Company uses the cost model for its property and equipment measurement.

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and purchase taxes that should not be credited and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment useful lives as follows:

Building
Office equipment
Vehicles
Furniture and fixtures
Building renovation

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Aset Tetap (Lanjutan)

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi tahun berjalan pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam penyelesaian untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

PSAK 236 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan Perusahaan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

k. Property and Equipment (Continued)

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these cost area not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of property and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the current year profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Asset in progress under development are stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Impairment of non-financial assets

SFAS 236 prescribes the procedures to be employed by the Company to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the Company to recognise an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimation of the asset's recoverable amount.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Aset Takberwujud

Biaya yang terkait dengan mengembangkan atau mempertahankan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran untuk memperoleh hak paten, merek dagang dan lisensi dikapitalisasi.

(i) Piranti lunak

Piranti lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal pirantilunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa piranti lunak siap dipakai. Setelah pengakuan awal, piranti lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

(ii) Lisensi eksklusif

Lisensi pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal lisensi meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa lisensi siap dipakai. Setelah pengakuan awal, lisensi diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk lisensi akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat sebagai berikut:

Masa manfaat/Useful lives
(dalam tahun/in years)

Piranti lunak	5
Lisensi eksklusif	5

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

l. Intangible Asset

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognized as an expense as incurred. Expenditure to acquire patents, trademarks and licences is capitalized.

(i) Software

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use. After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on software assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

(ii) Exclusive License

Licence is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of licence consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the licence to its intended use. After initial recognition, licence is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on licence assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Intangible asset is amortized using the straightline method over the following useful lives:

Software
Exclusive License

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal lisensi dan piranti lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat lisensi dan piranti lunak adalah lima tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset takberwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. Investasi jangka panjang

Investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diakui sebesar nilai wajarnya.

Investasi dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase kepemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Investasi pada instrumen ekuitas

Perusahaan memiliki investasi strategis dalam entitas yang listed. Untuk investasi tersebut, Perusahaan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengklasifikasikan investasi pada FVTOCI daripada FVTPL karena Perusahaan menganggap pengukuran ini paling representatif untuk model bisnis aset ini.

Investasi pada instrumen ekuitas pada FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Kemudian, aset diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam keuntungan belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI.

Akumulasi keuntungan atau kerugian tidak direklasifikasi ke laba rugi pada saat penarikan investasi pada instrumen ekuitas, sebaliknya, ditransfer ke saldo laba (defisit). Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas ini diakui dalam laba rugi, kecuali dividen jelas merupakan pemulihan sebagian dari biaya perolehan investasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

l. Intangible Asset (Continued)

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of licence and software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of licence and software are five years.

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Gains or losses on disposal of intangible asset are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

m. Long term investment

Investment with ownership interest of less than 20% are classified as financial assets at fair value through other comprehensive income and recognised at its fair value.

Investments with ownership interest of 20% to 50%, directly or indirectly owned, are accounted for using the equity method whereby the Company proportionate share in the net income or loss of the associated company after the date of acquisition is added to or deducted from, and dividends subsequently received are deducted from, the acquisition cost of the investments. The carrying amount of the investments is written-down to recognize any permanent decline in value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to the current year's statement of comprehensive income.

Investment in equity instruments

The Company has a number of strategic investments in listed entity. For those investments, the Company has made an irrevocable election to classify the investments at FVTOCI rather than FVTPL as the Company considers this measurement to be the most representative of the business model for these assets.

Investments in these equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the unrealized gain from changes in fair value of FVTOCI financial assets.

The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the investment in equity instruments, instead, it is transferred to retained earnings (deficit). Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

n. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with recourse disajikan secara gross, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

o. Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca Kerja - Program imbalan pasti

Perusahaan menerapkan PSAK 219 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja", dimana semua keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan harus diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain, secara retrospektif. Kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya yang masih menangguhkan keuntungan (kerugian) aktuarial dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan.

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pasti manfaat pasca kerja kepada para karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan "Undang-undang Omnibus".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

n. Fund Borrowings

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including with recourse joint financing facilities. With recourse joint financing facilities are presented gross, i.e. loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured unamortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2e for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

o. Securities Issued

Securities issued consist of bonds payable.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

p. Employees' Benefits

Post-employment Benefits - Defined benefit plans

The Company adopted SFAS 219 (Revised 2015), "Employee Benefit", which all actuarial gains (losses) of the Company employee benefit liability will have to be recognised immediately in other comprehensive income, which applied retrospectively. The Company prior accounting policy of deferring the recognition of unrecognised actuarial gains (losses) using the corridor method will no longer be permitted.

The Company provides defined benefit post-employment benefits to their employees in accordance with the Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation that known as the "Omnibus Law".

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

p. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja - Program imbalan pasti
(Lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau jumlah kompensasi.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian Aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

q. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

p. Employees' Benefits (Continued)

Post-employment Benefits - Defined benefit plans
(Continued)

Defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the Projected Unit Credit.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions recognised in other comprehensive income and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which recognised in other comprehensive income will be immediately recognised in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Short-term employee benefits

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

q. Lease

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non sewa dan mencatat komponen sewa dan non sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

q. Lease (Continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusun aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari piutang pembiayaan (Catatan 2f) diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh biaya transaksi yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

q. Lease (Continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

r. Revenue and Expenses Recognition

Income from financing receivables (Note 2f) are recognised over the term of the contract based on the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company does not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan Perusahaan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Untuk piutang pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dicadangkan.

Pendapatan administrasi dari pembiayaan konsumen diakui pada saat perjanjian piutang pembiayaan ditandatangani.

s. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Kurs utama yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

	2025	2024	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.782	16.162	1 Unites States Dollars (USD)
Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 221 (Revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.			

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

r. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

The Company's financing receivables income is presented net of with financing receivables income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

For financing receivables with principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, the interest income accrued but not yet collected is provided with allowance.

Administration income from consumer financing is recognized when the financing receivables agreement signed off.

s. Foreign Currency Transactions and Translations

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current period statement of profit or loss and other comprehensive income.

The main exchange rates used for translating the foreign currency as of 31 December 2025 and 2024 are based of the mid rates published by Bank Indonesia, are as follows:

Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 221 (Revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

t. Pajak Penghasilan

Pajak kini

Aset dan/atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelum periode pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui, diukur kembali pada tiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan.

Perpajakan lainnya

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

t. Income Tax

Current tax

Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the statement of financial position date.

Current income tax are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which it's relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date.

Amendments to tax obligations are recorded when an Assessment Letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each statement of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an Assessment Letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

u. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Penyajian laporan keuangan Perusahaan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan liabilitas kontijensi pada tanggal pelaporan. Namun demikian, ketidakpastian tentang asumsi dan estimasi ini dapat mengakibatkan hasil penyesuaian material untuk nilai buku aset atau liabilitas yang berpengaruh pada periode di masa depan.

I. Penggunaan Pertimbangan

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan:

(i) Pajak penghasilan

Perusahaan memiliki eksposur atas pajak penghasilan, pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi dimana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti di dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah penambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat.

(ii) Penentuan mata uang fungsional

Dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan, penilaian diperlukan untuk menentukan mata uang yang terutama mempengaruhi seluruh transaksi jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan.

II. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, didiskusikan di bawah.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

u. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

I. Use of Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

(i) Income tax

The Company has exposure to income taxes, significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the current income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

(ii) Determination of functional currency

In determining the functional currency of the Company, an assessment is required to determine the currency that mainly affects the entire transaction services rendered and costs of the Company.

II. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

u. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(i) Masa manfaat aset tetap

Biaya aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap. Manajemen memperkirakan masa manfaat aset tetap adalah 5 - 20 tahun. Hal ini sesuai taksiran masa manfaat yang umum diaplikasikan pada industri. Perubahan tingkat yang diharapkan dalam penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat peralatan dan nilai sisa atas aset-aset tersebut. Oleh karena itu, biaya penyusutan di masa yang akan datang dapat saja berubah. Nilai tercatat aset tetap Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 9 atas laporan keuangan.

(ii) Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman sebagai tingkat suku bunga inkremental Perusahaan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang mempengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Perusahaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

u. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(i) Useful lives of property and equipment

The cost of property and equipment is depreciated on a straight-line method over the assets' estimated useful economic lives. Management estimates the useful lives of these plant and equipment is 5 - 20 years. These are common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets. Therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company's property and equipment at the end of the reporting period is disclosed in Note 9 to the financial statements.

(ii) Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. Since the Company could not readily determine the implicit rate, management use the Company's average loan interest rate as the Company's incremental interest rate.

There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Company.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

u. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(iii) Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua kerugian fiskal yang belum dipergunakan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak terhadap kerugian yang dapat dikurangkan akan dapat diutilisasi. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan perbedaan temporer dan tingkat laba fiskal di masa depan bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 17e atas laporan keuangan.

(iv) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2e.

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kolektif.

Nilai tercatat penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 4 dan 5 atas laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

u. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(iii) Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The carrying amount of the Company's deferred tax assets at the end of reporting period is disclosed in Note 17e to the financial statements.

(iv) Allowance for impairment losses of financial assets

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2e.

Collectively assessed impairment allowance cover credit losses inherent in portfolios of financing receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired receivables, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The carrying amount of the company's allowance for impairment losses of financial assets of the Company at the end of reporting period is disclosed in Note 4 and 5 to the financial statements.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

u. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(v) Penentuan nilai wajar

Perusahaan menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat diskonto dan perkiraan arus kas masa depan. Maka dari itu, perkiraan nilai wajar yang diperoleh tidak selalu dapat dibuktikan dengan membandingkan pada pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak dapat segera direalisasi.

Metode dan asumsi yang digunakan, serta teknik penilaian yang digunakan, diungkapkan di dalam Catatan 2e di dalam laporan keuangan.

(vi) Asumsi pensiun

Biaya, aset dan liabilitas dari program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode-metode yang mengandalkan estimasi dan asumsi aktuarial.

Rincian dari asumsi-asumsi utama ditetapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan, Perusahaan menerima masukan dari aktuaris independen berkaitan dengan kelayakan asumsi, Perubahan dalam asumsi yang digunakan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan.

v. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

u. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(v) Determining fair value

The Company determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques. Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows. In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and, in many cases, may not be capable of being realized immediately.

The methods and assumptions applied, and the valuation techniques used, are disclosed in Note 2e to the financial statements.

(vi) Pension assumptions

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions.

Details of the key assumptions are set out in Note 18 to the financial statements, the Company takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions, Changes in the assumptions used may have a significant effect on the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statements of financial position.

v. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

w. Dividen

Dividen diakui ketika terhutang secara legal. Dividen kepada pemegang saham diakui ketika diumumkan oleh direksi. Dividen final diakui ketika disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

x. Kontijensi

Liabilitas kontijen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontijensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontijen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

y. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bila material.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)

w. Dividend

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

x. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

y. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2025	2024
Kas		
Rupiah	3.341.743.415	11.050.023.573
Jumlah kas	3.341.743.415	11.050.023.573
Bank		
Rupiah		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42.181.548.186	16.519.496.636
PT Bank Central Asia Tbk	18.924.669.905	68.051.714.398
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.100.293.011	14.559.706.831
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.703.876.687	4.542.969.410
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.675.853.808	2.980.032.953
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	658.331.122	761.068.653
Bank MUFG Ltd, Cabang Jakarta	426.752.869	64.004.149
Lain-lain		
(Saldo di bawah Rp 300.000.000)	532.384.827	15.459.565.034
Sub-jumlah	70.203.710.415	122.938.558.064
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 33)		
PT Bank KB Indonesia Tbk		
(d.h. PT Bank KB Bukopin Tbk)	5.341.203.091	88.646.204
Jumlah	75.544.913.506	123.027.204.268
USD		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	666.078	667.167
Jumlah bank	75.545.579.584	123.027.871.435
Jumlah (Dipindahkan)	78.887.322.999	134.077.895.008

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of the followings:

Cash on hand	
Rupiah	
Total cash on hand	
Cash in banks	
Rupiah	
<u>Third parties</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	
Bank MUFG Ltd, Branch Jakarta	
Others	
(Balances below Rp 300,000,000)	
Sub-total	
<u>Related party</u> (Note 33)	
PT Bank KB Indonesia Tbk	
(d.h. PT Bank KB Bukopin Tbk)	
Total	
USD	
<u>Third parties</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	
Total cash in banks	
Total (Brought forward)	

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Kas dan setara kas terdiri dari: (Lanjutan)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Cash and cash equivalents consist of the followings:
(Continued)

	2025	2024	
Jumlah (Pindahan)	78.887.322.999	134.077.895.008	Total (Carried forward)
Setara kas			Cash equivalents
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Mega Tbk	-	150.000.000.000	PT Bank Mega Tbk
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
PT Bank KB Indonesia Tbk	25.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank KB Indonesia Tbk
Jumlah deposito	25.000.000.000	160.000.000.000	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	103.887.322.999	294.077.895.008	Total cash and cash equivalents
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31.191.931)	(280.885.705)	Allowance for impairment losses
Jumlah kas dan setara kas - bersih	103.856.131.068	293.797.009.303	Total cash and cash equivalents - net
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:			Movements of allowance for impairment losses were as follows:
	2025	2024	
Saldo awal	280.885.705	76.770.103	Beginning balance
(Pembalikan) penambahan cadangan selama periode berjalan (Catatan 27)	(249.693.774)	204.115.602	(Reversal) additional of allowance during the period (Note 27)
Saldo akhir	31.191.931	280.885.705	Ending balance
Kisaran suku bunga dari deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:			The range of interests earned from the above time deposits is as follows:
	2025	2024	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	5,6%	4,5% - 6,75%	Time deposit interest rate per annum Rupiah
Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 35 atas laporan keuangan.			Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents was disclosed in Note 35 to the financial statements.

4. PIUTANG PEMBIAYAAN

4. FINANCING RECEIVABLES

	2025	2024	
Piutang pembiayaan - bruto:			Financing receivables - gross:
Pihak ketiga	4.556.033.527.687	8.495.016.314.776	Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(591.648.188.047)	(1.193.179.448.205)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	3.964.385.339.640	7.301.836.866.571	Total
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):			Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):
Pembiayaan bersama	(139.926.617.993)	(174.202.778.224)	Joint financing
Jumlah piutang pembiayaan (Dipindahkan)	3.824.458.721.647	7.127.634.088.347	Total financing receivables (Brought forward)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

4. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Jumlah piutang pembiayaan (Pindahan)	3.824.458.721.647	7.127.634.088.347	<i>Total financing receivables (Carried forward)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189.438.995.580)	(328.607.407.839)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	<u>3.635.019.726.067</u>	<u>6.799.026.680.508</u>	<i>Total financing receivables - net</i>

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Details of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of financing receivables according to their respective due dates as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
< 1 tahun	3.553.727.152.971	5.589.311.133.985	<i>< 1 year</i>
1 - 2 tahun	762.067.797.443	1.895.872.538.503	<i>1 - 2 years</i>
> 2 tahun	<u>240.238.577.273</u>	<u>1.009.832.642.288</u>	<i>> 2 years</i>
Jumlah	<u>4.556.033.527.687</u>	<u>8.495.016.314.776</u>	<i>Total</i>

Kendaraan bermotor dan barang-barang yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan kepada 6 (enam) perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Pan Pacific Insurance dan PT Asuransi Artarindo.

The vehicles and goods financed by the Company are covered by insurance against losses to 6 (six) insurance companies, which are PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Pan Pacific Insurance and PT Asuransi Artarindo.

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang pembiayaan bruto adalah sebagai berikut:

The detailed aging analysis of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of installment portion of the gross financing receivables were as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Belum jatuh tempo	4.210.718.101.259	8.124.370.068.367	<i>Current</i>
Telah jatuh tempo:			<i>Overdue:</i>
1-30 hari	144.162.059.241	144.153.684.205	<i>1-30 days</i>
31-90 hari	150.303.987.206	144.737.125.596	<i>31-90 days</i>
91-120 hari	29.017.501.755	39.211.020.221	<i>91-120 days</i>
121-150 hari	17.608.706.851	25.595.546.334	<i>121-150 days</i>
151-180 hari	3.984.898.846	16.684.772.678	<i>151-180 days</i>
> 180 hari	<u>238.272.529</u>	<u>264.097.375</u>	<i>> 180 days</i>
Jumlah	<u>4.556.033.527.687</u>	<u>8.495.016.314.776</u>	<i>Total</i>

Suku bunga efektif per tahun untuk kontrak piutang pembiayaan rata-rata berkisar 13,38% - 71,11% pada tahun 2025 (2024: 15,08% - 88,77%).

The effective annual interest rates for financing receivables contracts in average ranged between 13.38% - 71.11% in 2025 (2024: 15.08% - 88.77%).

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

4. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan:

Financing receivables based on purpose of financing:

	2025			
	Investasi/ Investment	Modal kerja/ Working capital	Multiguna/ Multipurpose	
Piutang pembiayaan - bruto:				Financing receivables - gross:
Pihak ketiga	349.203.962.807	1.437.433.507.022	2.769.396.057.858	Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(51.994.922.235)	(161.009.422.602)	(378.643.843.210)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	297.209.040.572	1.276.424.084.420	2.390.752.214.648	Total
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):
Pembiayaan bersama	(2.684.703.317)	(111.441.836.189)	(25.800.078.487)	Joint financing
Jumlah piutang pembiayaan	294.524.337.255	1.164.982.248.231	2.364.952.136.161	Total financing receivables
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.087.332.176)	(44.611.351.882)	(122.740.311.522)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	272.437.005.079	1.120.370.896.349	2.242.211.824.639	Total financing receivables - net
	2024			
	Investasi/ Investment	Modal kerja/ Working capital	Multiguna/ Multipurpose	
Piutang pembiayaan - bruto:				Financing receivables - gross:
Pihak ketiga	569.216.419.734	3.402.914.389.441	4.522.885.505.602	Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(72.095.860.786)	(464.376.564.109)	(656.707.023.311)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	497.120.558.948	2.938.537.825.332	3.866.178.482.291	Total
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):
Pembiayaan bersama	(6.772.632.698)	(155.759.142.630)	(11.671.002.896)	Joint financing
Jumlah piutang pembiayaan	490.347.926.250	2.782.778.682.702	3.854.507.479.395	Total financing receivables
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.282.972.808)	(99.406.195.753)	(219.918.239.278)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	481.064.953.442	2.683.372.486.949	3.634.589.240.117	Total financing receivables - net

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

As the collateral to the financing receivables for vehicles, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB).

Piutang pembiayaan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank dan surat berharga yang diterbitkan (lihat Catatan 13 dan 15).

Financing receivables are used as collateral for credit facilities obtained from the banks and securities issued (see Notes 13 and 15).

Piutang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 794.895.123.940 dan Rp 2.104.995.709.295 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 13) dan sebesar Rp 327.227.500.050 dan Rp 566.976.381.774 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15).

Financing receivable as of 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 794,895,123,940 and Rp 2,104,995,709,295 were used as collateral to borrowings (Note 13) and amounting to Rp 327,227,500,050 and Rp 566,976,381,774 were used as collateral to securities issued, respectively (Note 15).

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

4. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

Reconciliation of expected credit loss allowance amount:

	2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal - 1 Januari 2025	129.239.993.390	40.381.529.015	158.985.885.434	328.607.407.839	Beginning balance - 1 January 2025
Transfer ke tahap 1 ¹⁾	2.713.241.019	(2.285.094.470)	(428.146.549)	-	Transfer to stage 1 ¹⁾
Transfer ke tahap 2 ¹⁾	(8.287.631.033)	9.324.153.376	(1.036.522.343)	-	Transfer to stage 2 ¹⁾
Transfer ke tahap 3 ¹⁾	(2.774.557.554)	(934.294.705)	3.708.852.259	-	Transfer to stage 3 ¹⁾
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali ²⁾	931.279.710.037	218.631.064.141	299.249.075.213	1.449.159.849.391	Net change in exposures and remeasurement ²⁾
Penghapusan	(992.270.726.344)	(223.172.160.961)	(372.885.374.345)	(1.588.328.261.650)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	59.900.029.515	41.945.196.396	87.593.769.669	189.438.995.580	Ending balance - 31 December 2025

¹⁾ Mutasi kerugian kredit ekspektasian terkait perubahan tahap dari periode sebelumnya

¹⁾ ECL movement due to change to account stage from prior period

²⁾ Pembiayaan baru dikurangi dengan pembayaran (termasuk pelunasan)

²⁾ New booking less payment (including repayment)

	2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal - 1 Januari 2024	146.132.059.463	40.969.514.069	146.912.226.523	334.013.800.055	Beginning balance - 1 January 2024
Transfer ke tahap 1 ¹⁾	4.941.619.677	(3.200.983.951)	(1.740.635.726)	-	Transfer to stage 1 ¹⁾
Transfer ke tahap 2 ¹⁾	(8.679.294.491)	9.961.419.821	(1.282.125.330)	-	Transfer to stage 2 ¹⁾
Transfer ke tahap 3 ¹⁾	(4.675.302.995)	(1.931.824.817)	6.607.127.812	-	Transfer to stage 3 ¹⁾
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali ²⁾	435.957.770.060	110.399.001.578	223.736.410.345	770.093.181.983	Net change in exposures and remeasurement ²⁾
Penghapusan	(444.436.858.324)	(115.815.597.685)	(215.247.118.190)	(775.499.574.199)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	129.239.993.390	40.381.529.015	158.985.885.434	328.607.407.839	Ending balance - 31 December 2024

¹⁾ Mutasi kerugian kredit ekspektasian terkait perubahan tahap dari periode sebelumnya

¹⁾ ECL movement due to change to account stage from prior period

²⁾ Pembiayaan baru dikurangi dengan pembayaran (termasuk pelunasan)

²⁾ New booking less payment (including repayment)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses were as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	328.607.407.839	334.013.800.055	Beginning balance
Penambahan cadangan selama periode berjalan	1.449.159.849.391	770.093.181.983	Additional of allowance during the period
Penghapusan selama periode berjalan	(1.588.328.261.650)	(775.499.574.199)	Write-off during the period
Saldo akhir	189.438.995.580	328.607.407.839	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the amount of the allowance for impairment losses for financing receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Nilai tercatat piutang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak melebihi nilai wajarnya.

The carrying amounts of financing receivables classified as financial assets measured at amortised cost approximate their fair values.

Akun ini merupakan piutang dalam Rupiah yang dikenakan bunga, yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian barang konsumen kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala.

This account represents interest bearing receivables denominated in Rupiah arising from financing activities in the form of providing goods to end users with periodic installment payment schedule.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. TAGIHAN ANJAK PIUTANG

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tagihan anjak piutang - bruto:		
Pihak ketiga	138.942.537.508	430.747.380.957
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui	(4.838.963.471)	(6.862.026.973)
Jumlah tagihan anjak piutang	134.103.574.037	423.885.353.984
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.327.127.455)	(50.868.953.333)
Jumlah tagihan anjak piutang - bersih	<u>132.776.446.582</u>	<u>373.016.400.651</u>

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
< 3 bulan	91.758.493.695	392.900.709.756
3 - 6 bulan	9.877.336.929	37.846.671.201
6 - 12 bulan	19.754.673.858	-
> 12 bulan	17.552.033.026	-
Jumlah	<u>138.942.537.508</u>	<u>430.747.380.957</u>

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang anjak piutang bruto adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Belum jatuh tempo	66.237.756.186	337.484.523.915
Telah jatuh tempo:		
1-30 hari	-	1.155.838.087
31-90 hari	-	5.048.801.803
91-120 hari	34.589.964.050	-
121-150 hari	-	-
151-180 hari	-	-
> 180 hari	38.114.817.272	87.058.217.152
Jumlah	<u>138.942.537.508</u>	<u>430.747.380.957</u>

Jangka waktu kontrak pembiayaan anjak piutang berkisar antara 3 - 28 bulan (2024: 2 - 5 bulan).

Suku bunga efektif per tahun untuk kontrak tagihan anjak piutang rata-rata berkisar 12,07% - 12,17% pada tahun 2025 (2024: 11,94% - 15,75%).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing terdapat 2 (dua) konsumen yang memiliki saldo tagihan anjak piutang melebihi 10% dari jumlah tagihan anjak piutang Perusahaan yaitu PT Uninet Media Sakti, PT Petrolindo Energi Perkasa, PT Rukun Mitra Sejati dan PT Vadhana International (2024: PT Uninet Media Sakti, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati dan PT Vadhana International).

5. FACTORING RECEIVABLES

Factoring receivables - gross:
Third parties
Unearned income on factoring
Total factoring receivables
Less:
Allowance for impairment losses
Total factoring receivables - net

Details of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of factoring receivables according to their respective due dates as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

< 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
> 12 months

The detailed aging analysis of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of installment portion of the gross factoring receivables were as follows:

Current
Overdue:
1-30 days
31-90 days
91-120 days
121-150 days
151-180 days
> 180 days

The period of factoring financing contracts ranged from 3 - 28 months (2024: 2 - 5 months).

The effective annual interest rates for factoring receivables contracts in average ranged between 12.07% - 12.17% in 2025 (2024: 11.94% - 15.75%).

As of 31 December 2025 and 2024, there are 2 (two) customers whose factoring receivables balance exceeded 10% of the Company's total factoring receivables, namely PT Uninet Media Sakti, PT Petrolindo Energi Perkasa, PT Rukun Mitra Sejati and PT Vadhana International (2024: PT Uninet Media Sakti, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati and PT Vadhana International).

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. TAGIHAN ANJAK PIUTANG (Lanjutan)

5. FACTORING RECEIVABLES (Continued)

Tagihan anjak piutang berdasarkan tujuan pembiayaan:

Factoring receivables based on purpose of financing:

	2025			
	Investasi/ Investment	Modal kerja/ Working capital	Multiguna/ Multipurpose	
Tagihan anjak piutang - bruto:				Factoring receivables - gross:
Pihak ketiga	-	138.942.537.508	-	Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(4.838.963.471)	-	Unearned income on consumer financing
Jumlah tagihan anjak piutang - bruto	-	134.103.574.037	-	Total factoring receivables - gross
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.327.127.455)	-	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan anjak piutang - bersih	-	132.776.446.582	-	Factoring receivables - net
	2024			
	Investasi/ Investment	Modal kerja/ Working capital	Multiguna/ Multipurpose	
Tagihan anjak piutang - bruto:				Factoring receivables - gross:
Pihak ketiga	-	430.747.380.957	-	Third parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(6.862.026.973)	-	Unearned income on consumer financing
Jumlah tagihan anjak piutang - bruto	-	423.885.353.984	-	Total factoring receivables - gross
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(50.868.953.333)	-	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan anjak piutang - bersih	-	373.016.400.651	-	Factoring receivables - net

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit
ekspektasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of expected credit loss allowance amount:

	2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal - 1 Januari 2025	1.677.503.266	256.352.915	48.935.097.152	50.868.953.333	Beginning balance - 1 January 2025
Transfer ke tahap 1 ¹⁾	-	-	-	-	Transfer to stage 1 ¹⁾
Transfer ke tahap 2 ¹⁾	-	-	-	-	Transfer to stage 2 ¹⁾
Transfer ke tahap 3 ¹⁾	-	-	-	-	Transfer to stage 3 ¹⁾
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali ²⁾	4.289.514.473	683.668.666	15.190.408.153	20.163.591.292	Net change in exposures and remeasurement ²⁾
Penghapusan	(5.845.589.084)	(940.021.581)	(62.919.806.505)	(69.705.417.170)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2025	121.428.655	-	1.205.698.800	1.327.127.455	Ending balance - 31 December 2025

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. TAGIHAN ANJAK PIUTANG (Lanjutan)

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

5. FACTORING RECEIVABLES (Continued)

Reconciliation of expected credit loss allowance amount: (Continued)

	2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal - 1 Januari 2024	4.257.151.381	-	-	4.257.151.381	Beginning balance - 1 January 2024
Transfer ke tahap 1 ¹⁾	-	-	-	-	Transfer to stage 1 ¹⁾
Transfer ke tahap 2 ¹⁾	-	-	-	-	Transfer to stage 2 ¹⁾
Transfer ke tahap 3 ¹⁾	(315.142.865)	-	315.142.865	-	Transfer to stage 3 ¹⁾
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali ²⁾ (	2.384.502.750)	256.352.915	48.619.954.287	46.491.804.452	Net change in exposures and remeasurement ²⁾
Penghapusan	119.997.500	-	-	119.997.500	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	1.677.503.266	256.352.915	48.935.097.152	50.868.953.333	Ending balance - 31 December 2024

¹⁾ Mutasi kerugian kredit ekspektasian terkait perubahan tahap dari periode sebelumnya

¹⁾ ECL movement due to change to account stage from prior period

²⁾ Pembiayaan baru dikurangi dengan pembayaran (termasuk pelunasan)

²⁾ New booking less payment (including repayment)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses were as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	50.868.953.333	4.257.151.381	Beginning balance
Penambahan cadangan selama periode berjalan	20.163.591.292	46.491.804.452	Additional of allowance during the period
(Penghapusan) pemulihan selama periode berjalan	(69.705.417.170)	119.997.500	(Write-off) recovery during the period
Saldo akhir	1.327.127.455	50.868.953.333	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan anjak piutang adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the amount of the allowance for impairment losses for factoring receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Nilai tercatat tagihan anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak melebihi nilai wajarnya.

The carrying amounts of factoring receivables classified as financial assets measured at amortised cost approximate their fair values.

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

6. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2025	2024	
Beban dibayar dimuka			Prepaid expenses
Pihak ketiga			Third parties
Asuransi dibayar dimuka	725.393.098	884.517.853	Prepaid insurance
Lain-lain	22.887.146.983	10.045.876.653	Prepaid others
Jumlah	23.612.540.081	10.930.394.506	Total
Uang muka			Advances
Pihak ketiga			Third parties
Uang muka operasional	1.185.040.002	6.992.032.260	Operational advance
Jumlah Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka	24.797.580.083	17.922.426.766	Total Prepaid Expenses and Advances

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (Lanjutan)

Beban dibayar di muka pos lain-lain adalah biaya-biaya untuk kegiatan operasional Perusahaan yang akan diamortisasi selama periode kontrak seperti biaya pemeliharaan piranti lunak dan lisensi komputer.

Uang muka operasional merupakan jumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu untuk perjalanan dinas, promosi, pembelian aset tetap.

6. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES (Continued)

Prepaid expenses - others are expenses for the Company's operational activities which will be amortized over the contract period such as software maintenance costs and computer software license fees.

Operational advances are the sum of money paid in advance for business travels, promotion, purchase of property and equipment.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025
Pihak berelasi (Catatan 33)	2.300.619.472
Pihak ketiga	
Piutang dalam proses penyelesaian	108.856.502.095
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31.473.632.063)
Piutang dalam proses penyelesaian - bersih	77.382.870.032
Lain -lain	42.414.668.430
	119.797.538.462
Jumlah	122.098.157.934

7. OTHER RECEIVABLES

	2024	
	890.970.682	<i>Related party (Note 33)</i>
		<i>Third parties</i>
	153.071.807.587	<i>Receivables in the settlement process</i>
		<i>Less:</i>
	(55.556.406.512)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<i>Receivables in the settlement process - net</i>
	97.515.401.075	<i>Others</i>
	2.534.316.148	
	100.049.717.223	
Jumlah	100.940.687.905	Total

Piutang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga adalah transaksi piutang atas komisi asuransi yang dilakukan dengan PT Kookmin Best Insurance Indonesia dan pihak ketiga.

Besarnya *rate* yang dikenakan ke PT Kookmin Best Insurance Indonesia menggunakan *rate* yang sama dengan perusahaan asuransi lainnya yaitu berdasarkan persentase dari *gross* premi dan disesuaikan dengan produk yang dibiayai.

Piutang dalam proses penyelesaian adalah transaksi atas jaminan konsumen yang dititipkan ke Perusahaan untuk dijual.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 31.473.632.063 dan Rp 55.556.406.512 cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.

Other receivables from related parties and third parties are transactions receivable on insurance commissions made with PT Kookmin Best Insurance Indonesia and third parties.

The rate charged to PT Kookmin Best Insurance Indonesia uses the same rate as other insurance companies, which is based on a percentage of the gross premium and adjusted for the product being financed.

Receivables in the settlement process are transactions for consumer guarantees that are entrusted to the Company for sale.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables in the settlement process from third parties as of 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp 31,473,632,063 and Rp 55,556,406,512 is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables accounts.

Management believes that all other receivables are collectible.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET HAK-GUNA

8. RIGHT-OF-USE ASSETS

2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Sewa bangunan	107.065.675.982	28.965.535.587 (	42.735.527.604)	93.295.683.965	Rental building
Sewa kendaraan	51.143.891.340	12.486.878.106 (	47.316.105.665)	16.314.663.781	Rental vehicle
Lain-lain	3.322.748.768	902.076.330 (	377.629.982)	3.847.195.116	Others
Jumlah biaya perolehan	161.532.316.090	42.354.490.023 (	90.429.263.251)	113.457.542.862	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa bangunan	44.009.341.154	44.370.127.461 (	42.735.527.604)	45.643.941.011	Rental building
Sewa kendaraan	39.185.443.055	14.843.190.213 (	45.474.042.982)	8.554.590.286	Rental vehicle
Lain-lain	678.190.958	1.552.401.571 (	126.948.088)	2.103.644.441	Others
Jumlah akumulasi penyusutan	83.872.975.167	60.765.719.245 (	88.336.518.674)	56.302.175.738	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	77.659.340.923			57.155.367.124	Carrying amount
2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Sewa bangunan	100.858.871.363	38.538.631.515 (	32.331.826.896)	107.065.675.982	Rental building
Sewa kendaraan	50.233.426.434	910.464.906	-	51.143.891.340	Rental vehicle
Lain-lain	149.906.654	3.207.403.211 (	34.561.097)	3.322.748.768	Others
Jumlah biaya perolehan	151.242.204.451	42.656.499.632 (	32.366.387.993)	161.532.316.090	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa bangunan	34.425.377.944	41.915.790.105 (	32.331.826.896)	44.009.341.154	Rental building
Sewa kendaraan	22.547.009.231	16.638.433.824	-	39.185.443.055	Rental vehicle
Lain-lain	11.118.395	674.298.059 (	7.225.496)	678.190.958	Others
Jumlah akumulasi penyusutan	56.983.505.570	59.228.521.988 (	32.339.052.392)	83.872.975.167	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	94.258.698.881			77.659.340.923	Carrying amount

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 60.765.719.245 dan Rp 59.228.521.988.

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2025 and 2024 is amounted to Rp 60,765,719,245 and Rp 59,228,521,988.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

9. PROPERTY AND EQUIPMENT

	2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	5.761.595.000	-	-	-	5.761.595.000	Land
Bangunan	10.495.177.790	-	-	-	10.495.177.790	Building
Renovasi bangunan	120.490.181.416	516.914.404 (	670.351.889)	6.559.329.472	126.896.073.403	Building renovation
Kendaraan	5.222.856.398	2.378.800.000 (	77.071.771)	-	7.524.584.627	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	15.437.637.916	71.405.600 (	1.003.349.320)	166.398.400	14.672.092.596	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	195.592.011.199	3.191.309.089 (	8.303.039.196)	45.510.000	190.525.791.092	Office equipment
Jumlah biaya perolehan	352.999.459.719	6.158.429.093 (	10.053.812.176)	6.771.237.872	355.875.314.508	Total acquisition cost
Aset dalam penyelesaian	2.540.716.440	7.433.725.152	- (	6.771.237.872)	3.203.203.720	Construction in progress
Jumlah	355.540.176.159	13.592.154.245 (	10.053.812.176)	-	359.078.518.228	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	6.703.309.688	524.758.890	-	-	7.228.068.578	Building
Renovasi bangunan	87.675.612.977	10.645.906.616 (	582.337.758)	-	97.739.181.835	Building renovation
Kendaraan	4.604.993.508	719.052.552 (	77.071.771)	-	5.246.974.289	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	13.062.639.125	811.905.331 (	981.165.788)	-	12.893.378.668	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	120.644.993.795	21.376.996.135 (	8.170.707.847)	-	133.851.282.083	Office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	232.691.549.093	34.078.619.524 (	9.811.283.164)	-	256.958.885.453	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	122.848.627.066				102.119.632.775	Carrying amount
	2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	5.761.595.000	-	-	-	5.761.595.000	Land
Bangunan	10.495.177.790	-	-	-	10.495.177.790	Building
Renovasi bangunan	100.142.876.952	2.650.551.541 (	117.284.710)	17.814.037.633	120.490.181.416	Building renovation
Kendaraan	10.905.034.672	23.544.114 (	5.705.722.388)	-	5.222.856.398	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	16.420.440.339	579.279.162 (	1.994.047.209)	431.965.624	15.437.637.916	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	142.597.344.459	4.029.034.793 (	9.235.805.053)	58.201.437.000	195.592.011.199	Office equipment
Jumlah biaya perolehan	286.322.469.212	7.282.409.610 (	17.052.859.360)	76.447.440.257	352.999.459.719	Total acquisition cost
Aset dalam penyelesaian	52.139.907.553	26.848.249.144	- (	76.447.440.257)	2.540.716.440	Construction in progress
Jumlah	338.462.376.765	34.130.658.754 (	17.052.859.360)	-	355.540.176.159	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	6.178.550.799	524.758.889	-	-	6.703.309.688	Building
Renovasi bangunan	78.566.211.792	9.226.685.895 (	117.284.710)	-	87.675.612.977	Building renovation
Kendaraan	10.016.870.948	293.844.948 (	5.705.722.388)	-	4.604.993.508	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	14.061.504.441	926.860.957 (	1.925.726.273)	-	13.062.639.125	Furniture and fixtures
Peralatan kantor	109.606.585.538	20.179.250.159 (	9.140.841.902)	-	120.644.993.795	Office equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	218.429.723.518	31.151.400.848 (	16.889.575.273)	-	232.691.549.093	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	120.032.653.247				122.848.627.066	Carrying amount

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 34.078.619.524 dan Rp 31.151.400.848.

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2025 and 2024 are amounted to Rp 34,078,619,524 dan Rp 31,151,400,848, respectively.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Perkiraan % penyelesaian/ <i>Estimated % of completion</i> (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>
31 Desember 2025		
Bangunan dan prasarana	77%	117.403.220
Peralatan kantor	50%	3.085.800.000
		<u>3.203.203.220</u>
31 Desember 2024		
Bangunan dan prasarana	48%	2.488.579.240
Peralatan kantor	50%	52.136.700
		<u>2.540.715.940</u>

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	2025	2024
Peralatan kantor	87.444.885.788	87.213.141.264
Renovasi bangunan	74.776.282.434	69.836.996.172
Perabot dan perlengkapan kantor	10.957.247.779	11.181.891.636
Kendaraan	1.157.172.543	1.225.774.314
Jumlah	<u>174.335.588.544</u>	<u>169.457.803.386</u>

Rincian laba atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Hasil penjualan	540.393.260	328.755.919
Jumlah tercatat	(242.529.012)	(163.284.087)
Laba atas penjualan aset tetap (Catatan 27)	<u>297.864.248</u>	<u>165.471.832</u>

Laba atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat beban bunga pinjaman yang dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya (*all risks*) kepada perusahaan asuransi, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 107.378.700.840 dan Rp 103.337.887.975. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

9. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

The detail of construction in progress as of 31 December 2025 and 2024 are as follow:

	Tahun perkiraan penyelesaian/ <i>Estimated year of completion</i> (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	
31 December 2025		
Buildings and infrastructures	2026	
Office equipment	2026	
		<u>3.203.203.220</u>
31 December 2024		
Buildings and infrastructures	2025	
Office equipment	2025	
		<u>2.540.715.940</u>

Gross carrying amount of fixed assets which were fully depreciated and still used are as follows (unaudited):

	2025	2024
Peralatan kantor	87.213.141.264	87.213.141.264
Building renovation	69.836.996.172	69.836.996.172
Furniture and fixtures	11.181.891.636	11.181.891.636
Vehicles	1.225.774.314	1.225.774.314
Total	<u>169.457.803.386</u>	<u>169.457.803.386</u>

The details of gain on sales of property and equipment were as follows:

	2025	2024
Sale proceeds	540.393.260	328.755.919
Carrying amount	(242.529.012)	(163.284.087)
Gain on sale of property and equipment (Note 27)	<u>297.864.248</u>	<u>165.471.832</u>

Gain on sale of property and equipment is recognized as part of "Other revenues" in the statements of profit or loss (Note 27).

As of 31 December 2025 and 2024, there were no contractual commitment for the acquisition of property and equipment.

As of 31 December 2025 and 2024, there were no interest expenses from borrowings which were capitalised to fixed assets.

All property and equipment, except for land, are covered against losses from fire, theft and other risks (all risks) to insurance company, third parties, with sum insured as of 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp 107,378,700,840 and Rp 103,337,887,975, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover potential losses on the assets insured.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

9. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of property and equipment as of 31 December 2025 and 2024.

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSET

	2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Piranti lunak	189.112.475.271	82.695.000	-	37.661.578.995	226.856.749.266	Software
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	(7.950.000.000)	-	-	Exclusive licence
Piranti lunak dalam penyelesaian	23.506.109.953	37.747.996.053	-	(37.661.578.995)	23.592.527.011	Software under development
Jumlah biaya perolehan	220.568.585.224	37.830.691.053	(7.950.000.000)	-	250.449.276.277	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi						accumulated amortization
Piranti lunak	115.846.108.058	26.884.269.419	-	-	142.730.377.477	Software
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	(7.950.000.000)	-	-	Exclusive licence
Jumlah akumulasi	123.796.108.058	26.884.269.419	(7.950.000.000)	-	142.730.377.477	Total accumulated
Jumlah tercatat	96.772.477.166				107.718.898.800	Carrying amount
	2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Piranti lunak	152.872.077.851	24.603.150	-	36.215.794.270	189.112.475.271	Software
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	Exclusive licence
Piranti lunak dalam penyelesaian	18.605.051.974	41.116.852.249	-	(36.215.794.270)	23.506.109.953	Software under development
Jumlah biaya perolehan	179.427.129.825	41.141.455.399	-	-	220.568.585.224	Total acquisition cost
Akumulasi amortisasi						accumulated amortization
Piranti lunak	94.376.630.113	21.469.477.945	-	-	115.846.108.058	Software
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	Exclusive licence
Jumlah akumulasi	102.326.630.113	21.469.477.945	-	-	123.796.108.058	Total accumulated
Jumlah tercatat	77.100.499.712				96.772.477.166	Carrying amount

Rincian piranti lunak dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detail of software under development as of 31 December 2025 and 2024 are as follow:

	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion (Tidak diaudit/ Unaudited)	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Tahun perkiraan penyelesaian/ Estimated year of completion (Tidak diaudit/ Unaudited)	
31 Desember 2025				31 December 2025
Piranti lunak	90%	21.467.941.697	2026	Software
31 Desember 2024				31 December 2024
Piranti lunak	73%	12.974.505.299	2026	Software

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan)

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada operasi masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 26.884.269.419 dan Rp 21.469.477.945.

10. INTANGIBLE ASSET (Continued)

Amortization charged to operations for the year ended 31 December 2025 and 2024 are amounted to Rp 26,884,269,419 and Rp 21,469,477,945, respectively.

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

	2025	2024
Aset keuangan pada FVTOCI		
Pihak berelasi (Catatan 33)		
PT Bank KB Indonesia Tbk	41.580.000.000	29.160.000.000

Financial asset at FVTOCI
Related party (Note 33)
PT Bank KB Indonesia Tbk

Mutasi atas investasi jangka panjang untuk periode dan tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movements in long-term investments for the period and years ended 31 December 2025 and 2024, are as follows:

	2025	2024
Saldo awal	29.160.000.000	43.200.000.000
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari perubahan nilai wajar	12.420.000.000	(14.040.000.000)
Saldo akhir	41.580.000.000	29.160.000.000

Beginning balance
Unrealized gain (loss) from changes in fair value

Ending balance

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Saham PT Bank KB Indonesia Tbk No. DE/V/2023-3892 tanggal 31 Mei 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Indonesia Tbk No. 33 tanggal 9 Juni 2023, Perusahaan terdaftar sebagai pemegang saham PT Bank KB Indonesia Tbk dengan jumlah kepemilikan 540.000.000 saham kelas B dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 54.000.000.000.

Based on Statement of Shares Ownership of PT Bank KB Indonesia Tbk No. DE/V/2023-3892 dated 31 May 2023 and Notarial Deed of Statement of Meeting Resolutions Amendment to the Articles of Association PT Bank KB Indonesia Tbk No. 33 dated 9 June 2023, the Company is registered as the shareholder of PT Bank KB Indonesia Tbk with total ownership of 540,000,000 class B shares with a nominal value of Rp 100 per share and total nominal value amounted to Rp 54,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mengakui keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI masing-masing sebesar Rp 12.420.000.000 dan Rp (14.040.000.000) sebagai laba (rugi) komprehensif lain pada periode berjalan.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company recognized unrealized income (loss) from changes in the fair value of FVTOCI's financial asset amounted to Rp 12,420,000,000 and Rp (14,040,000,000), respectively, as other comprehensive income (loss) in the current period.

Mutasi kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI adalah sebagai berikut:

Movements in unrealized gains from changes in the fair value of FVTOCI's financial asset are as follows:

	2025	2024
Saldo awal	(24.840.000.000)	(10.800.000.000)
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari perubahan nilai wajar	12.420.000.000	(14.040.000.000)
Saldo akhir	(12.420.000.000)	(24.840.000.000)

Beginning balance
Unrealized gain (loss) from changes in fair value

Ending balance

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024	
Aset pembiayaan karyawan	16.524.837.025	25.115.609.514	Employee financing assets
Uang jaminan	1.536.068.786	1.552.514.966	Security deposits
Jumlah	18.060.905.811	26.668.124.480	Total
Nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi nilai wajarnya.			

The carrying amounts of other assets approximate their fair values.

13. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari:

13. FUND BORROWINGS

Fund borrowings consist of the followings:

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
International Finance Corporation	1.361.375.000.000	789.550.000.000	International Finance Corporation
PT Bank HSBC Indonesia	480.000.000.000	700.000.000.000	PT Bank HSBC Indonesia
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta	365.000.000.000	483.333.333.333	MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000.000.000	230.000.000.000	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	188.555.555.542	297.888.888.888	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	165.000.000.000	299.000.000.000	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank DBS Indonesia	150.000.000.000	300.000.000.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	144.305.555.556	310.972.222.225	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	114.977.601.790	414.499.965.845	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	87.500.000.000	369.444.444.441	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	40.381.208.543	157.669.214.981	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	19.166.666.667	112.500.000.001	PT Bank Permata Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	375.833.333.333	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia	-	440.000.000.000	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	108.666.666.655	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
PT Bank KB Indonesia Tbk	200.000.000.000	250.000.000.000	PT Bank KB Indonesia Tbk
	3.566.261.588.098	5.639.358.069.702	
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(16.482.442.157)	(16.819.523.017)	Unamortized transaction costs
Jumlah	3.549.779.145.941	5.622.538.546.685	Total

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebesar 4,7% - 7,72 % dan 5,95 - 8,3% masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

The range of contractual interest rates per annum on the above bank loans are amounted to 4.7% - 7.72 % dan 5.95 - 8.3% for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

13. FUND BORROWINGS (Continued)

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The detail of borrowings are as follows:

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan	
				2025	2024
International Finance Corporation	27 Aug/Aug 2025	22 Sep/Sep 2028	1.361.375.000.000	1.361.375.000.000	789.550.000.000
PT Bank HSBC Indonesia	7 Des/Dec 2021	23 Jun/Jun 2025		-	150.000.000.000
	7 Des/Dec 2021	23 Jun/Jun 2025		-	70.000.000.000
	7 Des/Dec 2021	27 Jun/Jun 2025		-	150.000.000.000
	25 Apr/Apr 2024	29 Apr/Apr 2026	700.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	25 Apr/Apr 2024	29 Apr/Apr 2026		200.000.000.000	200.000.000.000
	25 Apr/Apr 2024	30 Sep/Sep 2026		30.000.000.000	30.000.000.000
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta	25 Apr/Apr 2024	23 Jan/Jan 2026		150.000.000.000	-
	7 Nov/Nov 2024	3 Jan/Jan 2025	350.000.000.000	-	350.000.000.000
	21 Jul/Jul 2025	24 Okt/Oct 2025		-	33.333.333.333
	21 Jul/Jul 2025	7 Nov/Nov 2025	400.000.000.000	-	100.000.000.000
	21 Jul/Jul 2025	31 Jul/Jul 2026	400.000.000.000	185.000.000.000	-
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	21 Jul/Jul 2025	25 Okt/Oct 2027	350.000.000.000	180.000.000.000	-
	28 Mar/Mar 2024	7 Jan/Jan 2025		-	100.000.000.000
	28 Mar/Mar 2024	3 Jan/Jan 2025		-	130.000.000.000
	24 Mar/Mar 2025	31 Mar/Mar 2026	1.000.000.000.000	-	-
	24 Mar/Mar 2025	31 Mar/Mar 2026		-	-
	24 Mar/Mar 2025	2 Jan/Jan 2026		190.000.000.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	24 Mar/Mar 2025	6 Jan/Jan 2026		60.000.000.000	-
	18 Jan/Jan 2024	10 Jan/Jan 2025		-	12.500.000.000
	18 Jan/Jan 2024	3 Feb/Feb 2025		-	8.333.333.333
	18 Jan/Jan 2024	26 Apr/Apr 2026		11.111.111.097	44.444.444.444
	18 Jan/Jan 2024	26 Apr/Apr 2026	1.500.000.000.000	5.555.555.556	22.222.222.222
	4 Jun/Jun 2024	29 Jan/Jan 2027		72.222.222.222	138.888.888.889
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	4 Jun/Jun 2024	30 Jan/Jan 2027		54.166.666.667	-
	4 Jun/Jun 2024	30 Sep/Sep 2027		45.500.000.000	71.500.000.000
	22 Agu/Aug 2023	22 Agu/Aug 2025	365.000.000.000	-	99.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	22 Agu/Aug 2023	22 Agu/Aug 2025		-	200.000.000.000
	25 Sep/Sep 2025	23 Des/Dec 2027	165.000.000.000	165.000.000.000	-
PT Maybank Indonesia	5 Mar/Mar 2024	14 Mar/Mar 2025	150.000.000.000	-	150.000.000.000
	28 Nov/Nov 2024	23 Des/Dec 2026	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
PT Bank Jago Tbk	13 Jul/Jul 2023	10 Agt/Aug 2026		11.111.111.111	27.777.777.780
	13 Jul/Jul 2023	27 Sep/Sep 2026		12.500.000.000	29.166.666.667
	13 Jul/Jul 2023	27 Sep/Sep 2026		7.500.000.000	17.500.000.000
	13 Jul/Jul 2023	23 Okt/Oct 2026	500.000.000.000	12.500.000.000	27.500.000.000
	13 Jul/Jul 2023	30 Okt/Oct 2026		55.555.555.556	122.222.222.222
	13 Jul/Jul 2023	29 Jan/Jan 2027		45.138.888.889	86.805.555.556
PT Bank Central Asia Tbk	27 Feb/Feb 2024	7 Mar/Mar 2027		25.847.801.429	44.962.290.307
	27 Feb/Feb 2024	27 Mar/Mar 2027		18.574.021.202	32.309.538.426
	27 Feb/Feb 2024	22 Apr/Apr 2027		23.518.593.053	39.775.566.924
	27 Feb/Feb 2024	25 Apr/Apr 2027	500.000.000.000	47.037.186.106	79.551.133.848
	27 Feb/Feb 2024	29 Apr/Apr 2027		-	114.553.632.741
	27 Feb/Feb 2024	22 Mei/May 2027		-	82.159.579.322
PT Bank Central Asia Tbk	27 Feb/Feb 2024	22 Mei/May 2027		-	21.188.224.277
	30 Agu/Aug 2023	26 Sep/Sep 2026	250.000.000.000	25.000.000.000	58.333.333.330
	30 Agu/Aug 2023	4 Okt/Oct 2026		41.666.666.667	91.666.666.667
	19 Mar/Mar 2024	27 Mar/Mar 2027		20.833.333.333	37.500.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	19 Mar/Mar 2024	29 Agu/Aug 2027	250.000.000.000	-	44.444.444.444
	19 Mar/Mar 2024	27 Sep/Sep 2027		-	137.500.000.000
Jumlah (Dipindahkan)/ Total (Brought forward)				3.306.713.712.888	4.194.688.854.732

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

13. FUND BORROWINGS (Continued)

The detail of borrowings are as follows: (Continued)

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan	
				2025	2024
Jumlah (Pindahan)/Total (Carried forward)				3.306.713.712.888	4.194.688.854.732
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	18 Apr/Apr 2023	18 Apr/Apr 2025	200.000.000.000	-	14.247.458.566
	15 Des/Dec 2023	15 Des/Dec 2027	200.000.000.000	40.381.208.543	143.421.756.415
PT Bank Permata Tbk	30 Mar/Mar 2022	8 Feb/Feb 2025		-	3.333.333.335
	30 Mar/Mar 2022	23 Sep/Sep 2025	280.000.000.000	-	5.000.000.000
	30 Mar/Mar 2022	20 Mar/Mar 2026		6.666.666.667	33.333.333.333
	30 Mar/Mar 2022	24 Mar/Mar 2026	12.500.000.000	62.500.000.000	
	31 Jan/Jan 2024	28 Feb/Feb 2025	100.000.000.000	-	8.333.333.333
PT Bank KEB Hana Indonesia	26 Sep/Sep 2023	29 Sep/Sep 2026	430.000.000.000	-	300.000.000.000
	26 Sep/Sep 2023	29 Sep/Sep 2026		-	75.833.333.333
PT Bank Shinhan Indonesia	28 Feb/Feb 2023	28 Feb/Feb 2025	200.000.000.000	-	200.000.000.000
	13 Des/Dec 2023	13 Des/Dec 2025	240.000.000.000	-	240.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22 Jun/Jun 2022	29 Jun/Jun 2026	250.000.000.000	-	18.749.999.989
	22 Jun/Jun 2022	16 Mar/Mar 2025		-	3.750.000.000
	22 Jun/Jun 2022	4 Jul/Jul 2026	100.000.000.000	-	39.583.333.333
	22 Jun/Jun 2022	5 Jul/Jul 2026		-	39.583.333.333
	22 Jun/Jun 2022	30 Sep/Sep 2026		-	7.000.000.000
PT Bank KB Indonesia Tbk	15 Feb/Feb 2024	14 Feb/Feb 2025	250.000.000.000	-	250.000.000.000
	11 Feb/Feb 2025	13 Feb/Feb 2026	200.000.000.000	200.000.000.000	-
Jumlah/Total				3.566.261.588.098	5.639.358.069.702

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK 46 Tahun 2024 yang mengatur bahwa Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai modal inti, Perusahaan tidak memenuhi rasio gearing yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit pada tanggal 31 Desember 2025.

Atas kondisi tersebut, pemegang saham Perusahaan berencana untuk melakukan inisiatif penguatan permodalan pada tahun 2026 guna memperbaiki struktur permodalan dan mendukung posisi keuangan Perusahaan, serta untuk memastikan pemenuhan kembali atas persyaratan covenants sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit pada periode selanjutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dan sedang melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja keuangan untuk memastikan pemenuhan covenant pada periode berikutnya.

Following the issuance of Financial Services Authority Regulation No. POJK 46 of 2024, which stipulates that Perpetual convertible bonds are no longer eligible to be recognized as core capital, the Company was not in compliance with the required gearing ratio as stipulated in its loan agreement as of 31 December 2025.

In response to this matter, the Company's shareholders plan to initiate a capital strengthening initiative in 2026 to support the Company's financial position and to ensure compliance with the relevant financial covenants in subsequent periods.

Management is confident that the Company will be able to meet its financial obligations as they fall due and is implementing strategic initiatives to enhance its financial performance and ensure compliance with the covenants in the subsequent period.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PINJAMAN SUBORDINASI

	2025
Rupiah	
International Finance Corporation	247.800.000.000
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.384.043.451)
Jumlah	244.415.956.549

Pada tanggal 27 Agustus 2025, Perusahaan dan International Finance Corporation (IFC) menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi untuk mendukung kegiatan modal kerja Perusahaan dengan jumlah keseluruhan hingga setara Rupiah sebesar US\$ 15.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penarikan.

14. SUBORDINATED LOAN

	2024
Rupiah	
International Finance Corporation	-
Less:	
Unamortized transaction costs	-
Total	-

On 27 August 2025, the Company and International Finance Corporation signed Subordinated Loan Agreement to support Company's working capital with an aggregate amount up to the Rupiah Equivalent of US\$ 15,000,000. The term of loan is 60 (sixty) months from the date disbursement.

	2025	2024
Tingkat suku bunga efektif tahunan	7,32%	-
Biaya bunga yang dicatat oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.969.578.082.		Interest expenses recorded by the Company for the year ended 31 December 2025 is amounting to Rp 4,969,578,082.

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

	2025
Rupiah	
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri B	-
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A	-
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Seri B	68.010.000.000
	568.010.000.000
Dikurangi:	
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(955.431.849)
Jumlah	567.054.568.151

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

Pada tanggal 22 Juli 2022, Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi dilakukan secara triwulan.

15. SECURITIES ISSUED

	2024
Rupiah	
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Series B	313.615.000.000
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Series B	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Series A	326.025.000.000
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Series B	68.010.000.000
	1.207.650.000.000
Less:	
Unamortized bonds issuance costs	(5.595.080.759)
Total	1.202.054.919.241

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

On 22 July 2022, the Company has issued "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" in which according to the Bonds Trustee Agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of performing financing receivables, namely account receivables that have no delay nor late payments in principal and/or interest exceeding 90 (ninety) calendar days, amounting to 20% of the principal amount of the Bonds on the Emission Date and no later than 5 (five) months after the Emission Date to be at least 60% of the principal amount of the Bonds.

The principal's bonds are paid in full as they fall due. The interest's bonds are paid on quarterly basis.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

Pelunasan Obligasi

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok dan bunga Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 - Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 686.385.000.000. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 22 Juli 2025, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok dan bunga Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 - Seri B dengan nilai pokok sebesar Rp 313.615.000.000. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi dilakukan secara triwulan.

Pelunasan Obligasi

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok dan bunga Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 - Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 500.000.000.000. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

Pada tanggal 17 Desember 2024, Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 40% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi dilakukan secara triwulan.

Pelunasan Obligasi

Pada tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 - Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 326.025.000.000. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

Bond redemption

On 2 August 2023, the Company have paid the principal and interest of Obligasi I KB Finansia Multi Finance - Series A with principal amount of Rp 686,385,000,000. This principal payment was made in full upon maturity.

On 22 July 2025, the Company have paid the principal and interest of Obligasi I KB Finansia Multi Finance - Series B with principal amount of Rp 313,615,000,000. This principal payment was made in full upon maturity.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

On 27 June 2023, the Company has issued "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" in which according to the Bonds Trustee Agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of performing financing receivables, namely account receivables that have no delay nor late payments in principal and/or interest exceeding 90 (ninety) calendar days, amounting to 20% of the principal amount of the Bonds on the Emission Date and no later than 5 (five) months after the Emission Date to be at least 60% of the principal amount of the Bonds.

The principal's bonds are paid in full as they fall due. The interest's bonds are paid on quarterly basis.

Bond redemption

On 7 July 2024, the Company have paid the principal and interest of Obligasi II KB Finansia Multi Finance - Series A with a principal amount of Rp 500,000,000,000. This principal payment was made in full upon maturity.

Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

On 17 December 2024, the Company has issued "Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024" in which according to the Bonds Trustee Agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of performing financing receivables, namely account receivables that have no delay nor late payments in principal and/or interest exceeding 90 (ninety) calendar days, amounting to 20% of the principal amount of the Bonds on the Emission Date and no later than 5 (five) months after the Emission Date to be at least 40% of the principal amount of the Bonds.

The principal's bonds are paid in full as they fall due. The interest's bonds are paid on quarterly basis.

Bond Redemption

On 24 December 2025, the Company have paid the principal and interest of Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance - Series A with principal amount of Rp 326,025,000,000. This principal payment was made in full upon maturity.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG LAIN-LAIN		16. OTHER PAYABLES	
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Asuransi	20.077.016.408	14.813.851.557	Insurance
Dealer	4.064.378.409	9.940.238.576	Dealer
Utang restorasi	6.090.623.025	6.268.746.500	Restoration liabilities
Lain-lain	9.695.414.851	24.842.204.981	Others
	39.927.432.693	55.865.041.614	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Asuransi	118.793.611	5.535.350.063	Insurance
Dealer	242.933.785	1.758.506.848	Dealer
	361.727.396	7.293.856.911	
Jumlah	40.289.160.089	63.158.898.525	Total
Utang restorasi merupakan kewajiban atas biaya renovasi kantor cabang kembali keadaan semula jika sudah tidak diperpanjang kontraknya.		Restoration liabilities represent the obligation to renovate the branch office returns to its original state if the contract is not renewed.	
Utang lain-lain merupakan kelebihan pembayaran konsumen yang harus dikembalikan dan klaim pembayaran ke notaris atas pengurusan jaminan fidusia.		Other payables represent excess consumer payments that must be returned and claim for payment to the notary for the processing of fiduciary security.	
Jumlah tercatat utang lain-lain tidak melebihi nilai wajarnya dan seluruhnya didenominasikan dalam mata uang Rupiah Indonesia.		The carrying amounts of other payables approximate their fair values and denominated in Indonesian Rupiah.	
17. PERPAJAKAN		17. TAXATION	
a. Pajak Dibayar Dimuka		a. Prepaid Tax	
	2025	2024	
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	513.276.339	521.597.873	Article 21
Jumlah	513.276.339	521.597.873	Total
b. Utang Pajak		b. Taxes Payables	
	2025	2024	
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	1.348.921.918	1.424.076.557	Article 21
Pasal 23/26	530.189.099	732.150.320	Article 23/26
Pasal 4 (2) - Final	307.321.728	596.609.124	Article 4(2) - Final
Pajak Pertambahan Nilai	1.496.012.893	1.134.692.721	Value Added Tax
Jumlah	3.682.445.638	3.887.528.722	Total
c. Manfaat Pajak Penghasilan		c. Income Tax Benefit	
	2025	2024	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	226.084.815.836	95.012.556.566	Deferred tax
Jumlah Manfaat Pajak Penghasilan	226.084.815.836	95.012.556.566	Income Tax Benefit

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

d. Pajak Penghasilan

d. Income Taxes

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(1.083.686.492.159)	(409.939.247.289)	Loss before income tax
<u>Beda tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Perjamuan dan donasi	1.180.455.557	1.712.503.639	Entertainment and donation
Beban pajak	1.281.849.322	11.529.464.937	Tax expense
Beban lain-lain	54.824.648.997	13.580.806.173	Other expense
Kupon perpetual bonds	-	(45.534.411.333)	Coupon perpetual bonds
Pendapatan keuangan yang telah dikenakan pajak bersifat final	(1.258.715.518)	(3.224.373.251)	Financing income subjected to final tax
Jumlah beda tetap	56.028.238.358	(21.936.009.835)	Total permanent difference
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Imbalan pasca-kerja	20.612.231.869	22.255.040.250	Post-employment benefits
Pembayaran pesangon	(58.292.987.619)	(21.701.014.766)	Severance payment
Penyusutan aset tetap	(8.931.011.214)	(4.478.877.685)	Depreciation of property and equipment
Aset hak-guna	(484.078.777)	(7.713.793.762)	Right-of-use assets
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	(24.082.774.450)	22.614.817.159	Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	(4.639.648.909)	(661.030.881)	Unamortized issuance cost on securities issued
Biaya penerbitan yang diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(337.080.860)	2.954.112.523	Amortized issuance cost on fund borrowings
Biaya penerbitan yang diamortisasi atas pinjaman subordinasi yang diterima	3.384.043.451	-	Amortized issuance cost on subordinated loan
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	20.514.406.992	(113.847.640.972)	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	(136.808.085)	(338.211.808)	Unamortized transaction cost on factoring receivables
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	(266.670.755.632)	(31.696.847.541)	Allowance for impairment of financing receivables
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	(14.306.473.459)	10.049.322.077	Allowance for impairment of factoring receivables
Cadangan limit belum terpakai	829.671.059	747.502.866	Allowance of limit of unused
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	(249.693.774)	204.115.602	Allowance for impairment of cash and cash equivalents
Jumlah beda temporer	(332.790.959.408)	(121.612.506.938)	Total temporary differences
Taksiran rugi kena pajak	(1.360.449.213.209)	(553.487.764.062)	Estimated taxable loss
Rugi fiskal fiskal yang dapat dikompensasi dari tahun sebelumnya:			Fiscal loss carried forward from prior year:
2024	(553.487.764.062)	-	2024
Kumulatif rugi fiskal	(1.913.936.977.271)	-	Cummulative fiscal loss
Dikurangi: kredit pajak penghasilan			Less: income tax credit
Pasal 23	-	-	Article 23
Pasal 25	-	-	Article 25
Pajak penghasilan badan lebih bayar	-	-	Corporate income tax over payment

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Jumlah taksiran laba kena pajak di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terhutang.

e. Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari:

17. TAXATION (Continued)

d. Income Taxes (Continued)

The estimated amount of taxable profit above is used as the basis for preparation of the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the Tax Office.

The determination of the tax liabilities is based on self-assessment. The tax office can perform examination of income taxes within 5 (five) years after the tax becomes due.

e. Deferred Tax

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ December 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2025	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Rugi fiskal	121.767.308.094	299.298.826.906	-	421.066.135.000	Fiscal loss
Imbalan pasca-kerja	25.840.227.992 (	8.289.766.265)	4.973.849.737	22.524.311.464	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(4.100.494.779) (	1.964.822.467)	-	(6.065.317.246)	Depreciation of property and equipment
Aset hak-guna	101.566.386 (	106.497.331)	-	(4.930.945)	Right-of-use assets
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	12.222.409.432 (	5.298.210.379)	-	6.924.199.053	Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(51.155.544.924)	4.513.169.538	-	(46.642.375.386)	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	30.097.779 (	30.097.779)	-	-	Unamortized transaction cost factoring receivables
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	3.700.295.063 (	74.157.789)	-	3.626.137.274	Unamortized issuance cost on fund borrowings
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman subordinasi yang diterima	-	744.489.559	-	744.489.559	Amortized issuance cost on subordinated loan
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	1.230.917.767 (	1.020.722.760)	-	210.195.007	Unamortized issuance cost on securities issued
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	66.509.729.553 (	58.667.566.239)	-	7.842.163.314	Allowance for impairment of financing receivables
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	3.147.424.161 (	3.147.424.161)	-	-	Allowance for impairment of factoring receivables
Cadangan limit yang belum terpakai	316.372.595	182.527.633	-	498.900.228	Allowance for limit of unused
Penyesuaian nilai wajar investasi jangka panjang	5.464.800.000	-	(2.732.400.000)	2.732.400.000	Fair value adjustment of long term investment
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	61.794.855 (	54.932.630)	-	6.862.225	Allowance for impairment of cash and cash equivalents
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	185.136.903.974	226.084.815.836	2.241.449.737	413.463.169.547	Deferred Tax Asset - Net

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

17. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred Tax (Continued)

	31 Desember/ December 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2024	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Imbalan pasca-kerja	25.664.256.373	121.885.606	54.086.013	25.840.227.992	Post-employment benefits
Rugi fiskal	-	121.767.308.094	-	121.767.308.094	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(3.115.141.688)	(985.353.091)	-	(4.100.494.779)	Depreciation of property and equipment
Aset hak-guna	1.798.601.014	(1.697.034.628)	-	101.566.386	Right-of-use assets
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	7.247.149.657	4.975.259.775	-	12.222.409.432	Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(26.109.063.910)	(25.046.481.014)	-	(51.155.544.924)	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	104.504.377	(74.406.598)	-	30.097.779	Unamortized transaction cost factoring receivables
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	3.050.390.308	649.904.755	-	3.700.295.063	Unamortized issuance cost on fund borrowings
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	1.376.344.561	(145.426.794)	-	1.230.917.767	Unamortized issuance cost on securities issued
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	73.483.036.012	(6.973.306.459)	-	66.509.729.553	Allowance for impairment of financing receivables
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	936.573.304	2.210.850.857	-	3.147.424.161	Allowance for impairment of factoring receivables
Cadangan limit yang belum terpakai	151.921.964	164.450.631	-	316.372.595	Allowance for limit of unused
Penyesuaian nilai wajar investasi jangka panjang	2.376.000.000	-	3.088.800.000	5.464.800.000	Fair value adjustment of long term investment
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	16.889.423	44.905.432	-	61.794.855	Allowance for impairment of cash and cash equivalents
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	86.981.461.395	95.012.556.566	3.142.886.013	185.136.903.974	Deferred Tax Asset - Net

Pemanfaatan aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan tergantung pada laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenakan pajak.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Company is dependent upon future taxable income and in excess of profits resulting from the reversal of existing taxable temporary differences.

f. Pengampunan Pajak

f. Tax Amnesty

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3735/PP/ WPJ.04/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016 dengan nominal aset pengampunan pajak yang diakui pada laporan posisi keuangan sebesar Rp 2.207.850.000 (Catatan 22).

Based on Tax Amnesty Certificate No. KET-3735/PP/ WPJ.04/2016 dated 31 December 2016, the Company has participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Tax Amnesty Law No.11 year 2016 with nominal of assets from tax amnesty which has been recognized in the statement of financial position amounted to Rp 2,207,850,000 (Note 22).

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan.

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan keuangan dan beban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA Nurichwan, aktuaria independen, yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2026 dan 10 Januari 2025.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	102.383.233.934	117.455.581.789	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(75.150.359)	(1.985.500.035)	Fair value of plan assets at end of the year
Kewajiban yang diakui dalam laporan posisi keuangan	<u>102.308.083.575</u>	<u>115.470.081.754</u>	Liabilities recognized in the statement of financial position

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

In accordance with the Indonesian Law No.11 Year 2020 and Government Regulation No.35/2021 on Job Creation, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The Company has defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria.

The post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements and post-employment benefits expenses for the years ended 31 December 2025 and 2024 was based on calculation conducted by KKA Nurichwan, an independent actuary, in its report dated 9 January 2026 and 10 January 2025.

The amounts recognised in the statement of financial position:

Movements in the present value of defined benefit obligation recognised in the statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	117.455.581.789	116.655.710.793	Present value of defined benefit obligation
Beban jasa kini	12.249.394.445	14.240.792.919	Current service cost
Biaya bunga	8.362.837.424	8.014.247.331	Interest cost
Pembayaran imbalan yang diharapkan	(58.292.987.619)	(21.701.014.766)	Expected benefit payment
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diharapkan	<u>79.774.826.039</u>	<u>117.209.736.277</u>	Expected present value of defined benefit obligation
Kerugian aktuarial	<u>22.608.407.895</u>	<u>245.845.512</u>	Actuarial loss
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	<u>102.383.233.934</u>	<u>117.455.581.789</u>	Present value of defined benefit obligation

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION (Continued)

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Movements in the liability recognised in the statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal 1 Januari	115.470.081.754	115.760.442.178	Beginning balance as of 1 January
Beban yang diakui pada periode berjalan (Catatan 28)	20.079.264.267	21.561.495.296	Expense recognized in period (Note 28)
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	23.087.862.896	861.619.113	Expense recognized in the other comprehensive income
Penarikan dana dari aset program luran yang dibayarkan oleh Perusahaan	7.463.862.277	8.187.539.933	Withdrawal of funds from program assets
Pembayaran imbalan	(5.500.000.000)	(9.200.000.000)	Company contributions
	(58.292.987.619)	(21.701.014.766)	Benefit payment
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	102.308.083.575	115.470.081.754	Liability recognized in statement of financial position

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the statement of profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	12.249.394.445	14.240.792.919	Current service cost
Biaya bunga	8.362.837.424	8.014.247.331	Interest cost
Imbal hasil ekspektasian aset program	(532.967.602)	(693.544.954)	The expected return from the plan assets
Jumlah beban	20.079.264.267	21.561.495.296	Total expenses

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan asset is follows:

	Program pensiun/Pension program		
	2025	2024	
Nilai wajar aset awal periode	1.985.500.035	895.268.615	Fair value of plan assets at beginning of the period
luran yang dibayarkan oleh Perusahaan	5.500.000.000	9.200.000.000	Company contributions
Imbal hasil ekspektasian aset program	532.967.602	693.544.954	The expected return from the plan assets
Penarikan dana dari aset program	(7.463.862.277)	(8.187.539.933)	Withdrawals from the plan asset
Nilai ekspektasi aset program	554.605.360	2.601.273.636	Estimated of plan assets at ending period
Kerugian aktuaria atas aset program	(479.455.001)	(615.773.601)	Actuarial losses on plan assets
Nilai aset program pada akhir periode	75.150.359	1.985.500.035	Fair value of plan assets at end of period

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the obligation for post-employment and current service cost as of 31 December 2025 and 2024:

	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits		
	2025	2024	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	93.607.063.346	107.363.537.768	Increase in interest rate 100 in basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	112.440.391.074	129.031.891.062	Decrease in interest rate 100 in basis point

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION (Continued)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan penyisihan imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining employee benefits expense and liabilities as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Tingkat diskonto	6,64%	7,12%	Discount rate
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	5,00%	5,00%	Estimated future salary increase
Tabel mortalita	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	Mortality table
Tingkat cacat	5,00%	5,00%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	Umur/ Age	Persentase/ Rate	Resignation rate
	0 - 39	5%	
	40 - 44	3%	
	45 - 49	2%	
	50 - 54	1%	
	>55	-	

Metode

Projected unit credit

Method

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other long-term employee benefits is as follows:

	31 Desember/ December 2025	
Analisis jatuh tempo pembayaran kewajiban imbalan pasti:		Maturity analysis of defined benefit obligation payments:
Tahun ke 1	2.208.294.541	In 1st year
Tahun ke 2	5.540.830.203	In 2nd year
Tahun ke 3	4.473.488.357	In 3rd year
Tahun ke 4	3.543.057.970	In 4th year
Tahun ke 5	8.224.189.859	In 5th year
Tahun ke 6 - 10	23.749.179.438	In 6 - 10th years
Tahun ke 11 - 15	28.593.457.049	In 11 - 15th years
Tahun ke 16 - 20	16.666.720.546	In 16 - 20th years
Lebih dari 20 tahun	9.384.015.970	Over 20th years
Jumlah	102.383.233.933	Total
Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 17,65 dan 18,28.		The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2025 and 2024 are 17.65 and 18.28, respectively.

19. LIABILITAS SEWA

19. LEASE LIABILITIES

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

Maturity analysis of lease liabilities is as follows:

	2025	
	Pembayaran sewa minimum/Minimum lease payment	Bunga/ Interest
Tidak lebih dari satu tahun	8.963.842.879	292.603.711
Antara satu dan lima tahun	833.402.957	23.430.740
Jumlah	9.797.245.836	316.034.451
		Nilai kini/ Present value
Tidak lebih dari satu tahun		8.671.239.168
Antara satu dan lima tahun		809.972.217
Jumlah		9.481.211.385
		Total

Not later than one year
Between one year and five years

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:
(Lanjutan)

19. LEASE LIABILITIES (Continued)

Maturity analysis of lease liabilities is as follows: (Continued)

	2024			
	Pembayaran sewa minimum/Minimum lease payment	Bunga/ Interest	Nilai kini/ Present value	
Tidak lebih dari satu tahun	12.758.476.703	532.754.634	12.225.722.069	Not later than one year
Antara satu dan lima tahun	2.971.343.681	132.394.262	2.838.949.419	Between one year and five years
Jumlah	15.729.820.384	665.148.896	15.064.671.488	Total
Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 839.164.997 dan Rp 1.524.605.358 (Catatan 29).				
Interest expense changed for the year ended 31 December 2025 and 2024 were amounted to Rp 839,164,997 and Rp 1,524,605,358, respectively (Note 29).				

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Beban bunga dan surat berharga yang diterbitkan	56.956.710.308	82.527.416.199	Interest Expenses and securities issued
Perbaikan dan pemeliharaan	21.871.192.197	2.003.628.067	Repair and maintenance
Promosi	7.321.645.526	281.312.245	Promotion
Sewa	3.658.523.852	2.685.456.101	Rental
Penagihan	3.324.704.674	707.876.073	Collection fee
Telekomunikasi dan pos	2.722.956.787	1.057.920.190	Telecommunication and postage
Beban kepegawaian	2.337.837.507	3.507.293.577	Personnel expenses
Pendidikan dan pelatihan	2.091.620.135	147.032.957	Education and training
Perlengkapan kantor	1.727.554.670	958.520.262	Office supplies
Jasa profesional	1.394.716.258	1.631.148.362	Professional fees
Jasa layanan keamanan dan kebersihan	1.052.752.742	21.207.534	Security and cleaning services
Lain-lain			
(Saldo di bawah Rp 1 Milyar)	5.838.821.882	8.416.050.146	Others (Balances below Rp 1 Bilion)
	110.299.036.538	103.944.861.713	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Jaminan Perusahaan	3.714.556.492	3.187.551.233	Corporate Guarantee
Jumlah	114.013.593.030	107.132.412.946	Total

21. MODAL SAHAM

21. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	2025			
Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	Shareholders
KB Kookmin Card Corp	362.312.534	362.312.534.000	85.00	KB Kookmin Card Corp
PT Finansia Pacifica Raya	63.937.506	63.937.506.000	15.00	PT Finansia Pacifica Raya
Jumlah	426.250.040	426.250.040.000	100.00	Total
	2024			
Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	Shareholders
KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000	80.00	KB Kookmin Card Corp
PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000	20.00	PT Finansia Pacifica Raya
Jumlah	226.250.040	226.250.040.000	100.00	Total

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Peningkatan Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 153 tanggal 29 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073455.AH.01.02 TAHUN 2025 tanggal 30 Oktober 2025 dan disimpan di dalam sistem administrasi berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0246674, Perusahaan telah menyetujui dan memutuskan untuk:

1. penambahan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 226.250.040.000 yang terdiri dari 226.250.040 saham biasa menjadi sebesar Rp 426.250.040.000 yang terdiri dari 426.250.040 saham biasa dengan masing-masing saham bernilai per saham Rp 1.000;
2. perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui penyetoran modal sebesar Rp 200.000.000.000 melalui kapitalisasi Saham Bonus Perusahaan yang berasal dari agio saham. Dimana pembagian Saham Bonus kepada para Pemegang Saham akan dilakukan secara pro rata sesuai dengan kepemilikan sahamnya.
3. perubahan susunan modal saham Perusahaan melalui penambahan modal disetor sebanyak 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang terbagi atas KB Kookmin Card Corp sebanyak 181.312.502 saham dan PT Finansia Pacifica Raya sebanyak 18.687.498 saham.
4. susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - KB Kookmin Card Corp, selaku pemegang 362.312.534 saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 362.312.534.000;
 - PT Finansia Pacifica Raya, selaku pemegang 63.937.506 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 63.937.506.000.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2025
Agio saham	86.678.935.571
Aset pengampunan pajak (Catatan 17f)	2.207.850.000
Jumlah	88.886.785.571

Penurunan agio saham disebabkan oleh perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, melalui kapitalisasi saham bonus sebesar Rp 200.000.000.000 yang bersumber dari agio saham. (Catatan 21)

23. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024 tanggal 16 April 2024, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2023 sebesar Rp 91.546.129.267 sebagai berikut:

- 1) pembagian dividen sebesar Rp 5.203.750.920 kepada pemegang saham secara proporsional :
 - KB Kookmin Card Corp sebesar Rp 4.163.000.736;
 - PT Finansia Pacifica Raya sebesar Rp 1.040.750.184;
- 2) pembayaran kupon *Perpetual Bonds* Rp 45.534.411.333;
- 3) sejumlah Rp 20.000.000.000, akan digunakan untuk dialokasikan menjadi dana Cadangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan ("Dana Cadangan"), yang mana total Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar Rp 45.250.008.000 atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- 4) alokasi sebagai saldo laba sebesar Rp 20.807.967.014.

21. SHARE CAPITAL (Continued)

Increase in Share Capital

Based on Notarial Deed No. 153 dated 29 October 2025 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0073455.AH.01.02 TAHUN 2025 dated 30 October 2025 and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.03-0246674, the Company has agreed and decided to:

1. the increase of the Company's authorized capital from amounted to Rp 226,250,040,000 consisting of 226,250,040 shares becomes amounted to Rp 426,250,040,000 consisting of 426,250,040 shares with a nominal value of Rp 1,000 per share;
2. the changes of the Company's issued and paid-up capital through cash capital payment amounted to Rp 200,000,000,000 which was carried out by capitalizing the Company's share premium to issue Bonus Shares. The distribution of the Bonus Shares to shareholders was made on a pro rata basis in accordance with their respective ownership interests.
3. the changes in the composition of the Company's share capital through additional paid-in capital of 200,000,000 shares with a nominal value of Rp 1,000 per share that divided to KB Kookmin Card Corp with 181,312,502 shares and PT Finansia Pacifica Raya with 18,687,498 shares.
4. the composition of the Company's shareholders are as follow:
 - KB Kookmin Card Corp, as the holder of 362,312,534 shares with a total value of Rp 362,312,534,000;
 - PT Finansia Pacifica Raya, as the holder of 63,937,506 shares with a total nominal value of Rp 63,937,506,000.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	2024	
286.678.935.571	286.678.935.571	Additional paid-in capital
2.207.850.000	2.207.850.000	Tax amnesty assets (Note 17f)
288.886.785.571	288.886.785.571	Total

The decrease in additional paid-in capital resulted from the change in the Company's issued and fully paid share capital through the capitalization of bonus shares amounting to Rp 200,000,000,000, which was reclassified from additional paid-in capital to share capital (Note 21).

23. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 dated 16 April 2024, all of the shareholders of the Company decided and agreed to the use of net profit in 2023 amounted to Rp 91,546,129,267 for:

- 1) distributed as dividends amounted to Rp 5,203,750,920 to each shareholder proportionally:
 - KB Kookmin Card Corp amounted to Rp 4,163,000,736;
 - PT Finansia Pacifica Raya amounted to Rp 1,040,750,184;
- 2) payment of *Perpetual Bonds* coupon amounted to Rp 45,534,411,333;
- 3) an amount of Rp 20,000,000,000 shall be used to be allocated as reserved as required under Article 70 of the Company Law and Article 20 Company's Article of Association ("Reserved Fund"), in which the total of Reserved Fund of the Company becomes Rp 45,250,008,000 or amounting to 20% of the issued and paid up capital in the Company.
- 4) allocated as retained earnings amounted to Rp 20,807,967,014.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. OBLIGASI PERPETUAL YANG DAPAT DI KONVERSIKAN

Pada tanggal 27 Juli 2021 dan 30 November 2023, Perusahaan menerbitkan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (PCB) kepada KB Kookmin Card Corp dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 435.000.000.000 dan Rp 165.000.000.000 yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas dengan fitur sebagai berikut:

a. Opsi penebusan

Penerbit tidak berkewajiban untuk menebus jumlah pokok PCB namun berhak atas kebijakannya sendiri dan tunduk pada peraturan terkait termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh persetujuan dari OJK jika menebus PCB sebelum tanggal penebusan, sebagaimana berlaku.

b. Opsi konversi

Konversi nilai dari PCB menjadi saham biasa (jika di konversi) adalah sebesar maksimal 600.000.000 saham. Harga konversi ditetapkan Rp 1.000 per saham. Pada waktu konversi, pemegang saham kepentingan minoritas akan melakukan setoran modal sehingga struktur permodalan perusahaan tidak melebihi batas maksimum kepemilikan modal asing yang diperbolehkan oleh OJK. Jika dilakukan konversi parsial, porsi yang tidak dikonversi bisa dibayar oleh Perusahaan sebagai penerbit.

c. Kelangsungan

Tenor dari PCB ini ditetapkan "selamanya" atau 30 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang lagi untuk 30 tahun kedepan (*embedded rollover*), dimana tidak ada batas untuk jumlah perpanjangan.

d. Kupon Perpetual Bonds

Pembayaran kupon *perpetual bonds* akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 6 bulan setelah selesainya laporan keuangan tahunan audit sesuai dengan kemampuan keuangan serta diskresi Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (PCB) masing-masing sebesar Rp 600.000.000.000.

24. PERPETUAL CONVERTIBLE BONDS

On 27 July 2021 and 30 November 2023, the Company issued perpetual convertible bound ("PCB") to KB Kookmin Card Corp with a nominal value of Rp 435,000,000,000 and Rp 165,000,000,000, respectively, which has been classified as an equity instrument with the following features:

a. Redemption option

The issuer is not obliged to redeem the principal amount of the PCB but would have the right, at its discretion and subject to relevant regulations including but not limited to obtaining the approval from OJK if redeeming the PCB prior to the redemption date, as applicable.

b. Conversion option

The conversion value of the PCB into ordinary shares (if exercised) is a maximum of 600,000,000 shares. The conversion price is fixed at Rp 1,000 per share. At the time of conversion, the minority interest shareholder will make a capital deposit so that the Company's capital structure does not exceed the maximum foreign capital ownership allowed by OJK. In the event of partial conversion, the unconverted portion may be paid by the Company as the issuer.

c. Perpetuity

The tenor of the PCB is set to be perpetual or 30 years since the issuance date, and extendable for another 30 years (*embedded rollover*), whereby there is no limitation on the number of extensions.

d. Perpetual Bonds coupon

Coupon payments for perpetual bonds will be made annually within 6 months after the completion of the annual audited financial statements in accordance with the Company's financial capacity and discretion based on applicable regulations (Note 23).

On 31 December 2025 and 2024, the amount of perpetual convertible bonds ("PCB") amounted to Rp 600,000,000,000 respectively.

25. PEMBIAYAAN KONSUMEN

	2025	2024
Pihak ketiga		
Pendapatan piutang pembiayaan	1.384.020.070.577	1.529.507.402.774
Pendapatan administrasi	255.870.205.113	287.677.326.475
	<u>1.639.890.275.690</u>	<u>1.817.184.729.249</u>
Pihak berelasi (Catatan 33)		
Pendapatan piutang pembiayaan	2.849.522.682	8.403.946.531
Jumlah	<u>1.642.739.798.372</u>	<u>1.825.588.675.780</u>

25. CONSUMER FINANCING

Third parties
Financing receivables income
Administration income

Related party (Note 33)
Financing receivables income

Total

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. ANJAK PIUTANG		26. FACTORING	
	2025	2024	
Pendapatan anjak piutang	27.877.462.709	53.327.689.497	Factoring income
Pendapatan pinalti	2.287.388.744	170.043.300	Penalty income
Jumlah	30.164.851.453	53.497.732.797	Total
27. PENDAPATAN LAIN-LAIN		27. OTHER REVENUES	
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Pembalikan cadangan penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	24.082.774.450	-	Reversal allowance for impairment of receivables in the settlement process
Bunga giro dan deposito	1.021.020.996	2.854.382.318	and time deposit
Laba atas penjualan aset tetap (Catatan 9)	297.864.248	165.471.832	Gain on sale of property and equipment (Note 9)
Pembalikan cadangan penurunan nilai atas penurunan kas dan bank (Catatan 3)	249.693.774	-	Reversal allowance for impairment of cash in banks (Note 3)
Lain-lain	53.648.220.771	72.204.475.425	Others
	79.299.574.239	75.224.329.575	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
Bunga giro dan deposito	237.694.522	369.990.933	Interest income from current accounts and time deposit
Jumlah	79.537.268.761	75.594.320.508	Total
Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari penyimpanan BPKB dan administrasi dari transaksi payment point.		Other income represents income from BPKB storage and administration of payment point transactions.	
28. BEBAN KEPEGAWAIAN		28. PERSONNEL EXPENSES	
	2025	2024	
Gaji, bonus dan tunjangan	506.292.229.804	580.466.790.014	Salaries, bonuses and allowances
Imbalan pasca-kerja (Catatan 18)	20.079.264.267	21.561.495.296	Post-employment benefits (Note 18)
Jumlah	526.371.494.071	602.028.285.310	Total
29. BEBAN KEUANGAN		29. FINANCE COST	
	2025	2024	
Pihak ketiga			Third parties
Beban bunga pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi dan surat berharga yang diterbitkan	392.296.907.714	481.667.319.912	Interest expense on fund borrowings, subordinated loan and securities issued
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 19)	839.164.997	1.524.605.358	Interest expense on lease liabilities (Note 19)
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Beban bunga pinjaman yang diterima	13.955.060.889	32.830.208.247	Interest expense on fund borrowings
Jumlah	407.091.133.600	516.022.133.517	Total

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2025	2024
Pihak ketiga		
Penagihan	72.685.846.292	67.096.912.689
Perbaikan dan pemeliharaan	59.187.728.686	52.431.842.515
Promosi	56.068.717.738	10.994.946.666
Telekomunikasi dan pos	23.416.346.677	29.234.952.978
Pendidikan dan pelatihan	13.187.429.474	15.094.299.933
Perlengkapan kantor	12.713.139.973	22.943.775.122
Administrasi bank	11.565.998.457	17.122.728.252
Jasa keamanan dan kebersihan	8.975.974.596	9.369.008.694
Sewa	8.130.337.895	6.582.972.007
Perjalanan dinas	7.578.052.578	14.794.845.598
Listrik dan air	7.337.716.827	8.177.413.179
Jasa professional	3.241.516.719	4.109.853.167
Perjamuan	1.180.455.557	1.712.503.639
Asuransi	1.060.894.123	1.861.258.031
Perijinan	435.365.958	319.860.245
Lain-lain	12.860.541.760	21.563.090.857
Pihak berelasi (Catatan 33)		
Administrasi bank	9.385.861.468	9.026.613.995
Promosi	-	95.904.000
Lain-lain	1.561.740.363	1.750.147.314
Jumlah	310.573.665.141	294.282.928.881

<i>Third parties</i>
<i>Collection fee</i>
<i>Repair and maintenance</i>
<i>Promotions</i>
<i>Telecommunication and postage</i>
<i>Education and training</i>
<i>Office supplies</i>
<i>Bank administration</i>
<i>Security and cleaning service</i>
<i>Rental</i>
<i>Traveling</i>
<i>Utilities</i>
<i>Professional fees</i>
<i>Entertainment</i>
<i>Insurance</i>
<i>Licenses</i>
<i>Others</i>
<i>Related party (Notes 33)</i>
<i>Bank administration</i>
<i>Promotions</i>
<i>Others</i>

Total

31. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Pencadangan atas limit belum terpakai	829.671.059	747.502.866
Pencadangan penurunan nilai atas penurunan kas dan bank	-	204.115.602
Penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	-	22.614.817.159
Beban lain-lain	210.398.003	285.805.823
Jumlah	1.040.069.062	23.852.241.450

<i>Allowance for limit unused credit limit</i>
<i>Allowance for impairment of cash in banks</i>
<i>Impairment of receivables in the settlement process</i>
<i>Other expenses</i>

Total

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi non-kas

Tabel dibawah ini menunjukkan transaksi non-kas Perusahaan selama periode berjalan sebagai berikut:

	2025	2024
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Perolehan atas aset hak-guna dari restorasi liabilitas	2.954.044.525	2.850.732.000

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2025					
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flows	Pergerakan valuta asing/ Movement in foreign exchange	Pergerakan non-kas/ Non-cash changes Pergerakan beban transaksi dan lain-lain/ Changes in transaction cost and other	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman yang diterima	5.622.538.546.685	(2.073.096.481.633)	-	337.080.889	3.549.779.145.941	Funds borrowings
Pinjaman subordinasi	-	247.800.000.000	-	(3.384.043.451)	244.415.956.549	Subordinated loan
Surat berharga yang diterbitkan	1.202.054.919.241	(639.640.000.000)	-	4.639.648.910	567.054.568.151	Securities issued
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	6.824.593.465.926	(2.464.936.481.633)	-	1.592.686.348	4.361.249.670.641	Total liabilities from financing activities

32. CASH FLOW INFORMATION

a. Non-cash transaction

The table shows the Company's non-cash transactions during the period is as follows:

Investing activities not affecting cash flows:	
Acquisitions of right-of-use assets from restoration liabilities	

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Changes in liabilities arise from financing activities are as follows:

33. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan dengan pihak-pihak berelasi.

Sifat hubungan dan transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
KB Kookmin Card Corp	Pemegang saham/ The shareholder
PT Finansia Pacifica Raya	Pemegang saham/ The shareholder
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	Perusahaan asosiasi/ Association Company's

33. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS

In conducting its business, the Company entered into certain business and financial transactions with its related parties.

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Beban yang masih harus dibayar, beban umum dan administrasi, obligasi perpetual yang dapat dikonversikan, laba ditahan/ Accrued expense, general and administrative expense, perpetual convertible bonds, retained earning
Aset hak-guna/ Right-of-use assets
Piutang lain-lain, utang lain-lain, dan pendapatan pembiayaan konsumen/Other receivable, other payable, and financing receivables income

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

33. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS
(Continued)

Sifat hubungan dan transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows: (Continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank KB Indonesia Tbk	Perusahaan asosiasi/ Association Company's	Kas dan setara kas, pinjaman yang diterima, beban keuangan, pendapatan lain-lain, beban umum dan administrasi dan investasi jangka panjang/Cash and cash equivalent, fund borrowings, financial charges, other revenue, long term-investment and general and administrative expense
PT Prima Sentra Abadi	Pemegang saham yang sama/ The same shareholders	Utang lain-lain/ Other payables
Kookmin Bank, Hong kong Branch	Perusahaan asosiasi/ Association Company's	Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense
PT KB Valbury Sekuritas	Perusahaan asosiasi/ Association Company's	Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense
PT KB Data System Indonesia	Perusahaan asosiasi/ Association Company's	Aset takberwujud/ Intangible asset
Kookmin Bank	Perusahaan asosiasi/ Association Company's	Beban umum dan administrasi/ General and administrative expense
Personel manajemen kunci/ Key management personnel	Direktur, komisaris dan pejabat eksekutif/ Directors, commissioners and executive	Beban kepegawaian/ Personnel expenses
Yap Tjay Hing	Pemegang saham yang sama/ The same shareholders	Piutang lain-lain/ Other Receivables

Saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan adalah sebagai berikut:

The significant balances with related parties as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Kas dan setara kas (Catatan 3)			Cash and cash equivalent (Note 3)
PT Bank KB Indonesia Tbk	30.341.203.091	10.088.646.204	PT Bank KB Indonesia Tbk
Aset hak-guna (Catatan 8)			Right-of-use assets (Note 8)
PT Finansia Pacifica Raya	17.566.416.000	26.100.772.991	PT Finansia Pacifica Raya
Piutang lain-lain (Catatan 7)			Other receivables (Note 7)
Yap Tjay Hing	2.181.825.861	-	Yap Tjay Hing
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	118.793.611	890.970.682	PT Kookmin Best Insurance Indonesia
Aset takberwujud (Catatan 10)			Intangible asset (Note 10)
PT KB Data Systems Indonesia	274.170.000	432.900.000	PT KB Data Systems Indonesia
Investasi jangka panjang (Catatan 11)			Long term investment (Note 11)
PT Bank KB Indonesia Tbk	41.580.000.000	29.160.000.000	PT Bank KB Indonesia Tbk
Jumlah	92.062.408.563	66.673.289.877	Total

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

33. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS
(Continued)

Saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

The significant balances with related parties as of 31 December 2025 and 2024 are as follows: (Continued)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>1,93%</u>	<u>0,82%</u>	Percentage to total assets
Pinjaman yang diterima (Catatan 13)			Fund borrowings (Note 13)
PT Bank KB Indonesia Tbk	200.000.000.000	250.000.000.000	PT Bank KB Indonesia Tbk
Utang lain-lain (Catatan 16)			Other payable (Note 16)
PT Prima Sentra Abadi	242.933.785	1.758.506.848	PT Prima Sentra Abadi
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	118.793.611	5.535.350.063	PT Kookmin Best Insurance Indonesia
Beban yang masih harus dibayar (Catatan 20)			Accrued expenses (Note 20)
KB Kookmin Card Corp	<u>3.714.556.492</u>	<u>3.187.551.233</u>	KB Kookmin Card Corp
Jumlah	<u>204.076.283.888</u>	<u>260.481.408.144</u>	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>4,41%</u>	<u>3,65%</u>	Percentage to total liabilities
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (Catatan 24)			Perpetual convertible bonds (Note 24)
KB Kookmin Card Corp	<u>600.000.000.000</u>	<u>600.000.000.000</u>	KB Kookmin Card Corp
Persentase terhadap jumlah ekuitas	<u>468,26%</u>	<u>60,35%</u>	Percentage to total equity
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pendapatan pembiayaan konsumen (Catatan 25)			Financing receivables income (Note 25)
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	2.849.522.682	8.403.946.531	PT Kookmin Best Insurance Indonesia
Pendapatan lain - lain (Catatan 27)			Other revenue (Note 27)
PT Bank KB Indonesia Tbk	<u>237.694.522</u>	<u>369.990.933</u>	PT Bank KB Indonesia Tbk
Jumlah	<u>3.087.217.204</u>	<u>8.773.937.464</u>	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>0,18%</u>	<u>0,45%</u>	Percentage to total revenue
Beban keuangan (Catatan 29)			Finance cost (Note 29)
PT Bank KB Indonesia Tbk	13.955.060.889	32.830.208.247	PT Bank KB Indonesia Tbk
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)			General and administrative expense (Note 30)
KB Kookmin Card Corp	7.193.094.925	6.086.840.511	KB Kookmin Card Corp
Bank Kookmin, Cabang Hong Kong	1.738.049.938	2.572.916.666	Kookmin Bank, Hong Kong Branch
Bank Kookmin	1.561.740.363	1.750.147.314	Kookmin Bank
PT KB Valbury Sekuritas	454.716.605	366.856.818	PT KB Valbury Sekuritas
PT Bank KB Indonesia Tbk	-	95.904.000	PT Bank KB Indonesia Tbk
Jumlah	<u>24.902.662.720</u>	<u>43.702.873.556</u>	Total
Persentase terhadap jumlah beban	<u>0,88%</u>	<u>1,85%</u>	Percentage to total expenses
Beban gaji, bonus dan tunjangan yang diberikan kepada manajemen perusahaan (Catatan 1c).			Salaries, bonuses and benefits provided to the Company management (Note 1c).

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

• **PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "SMBCI") telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama yang bersifat "revolving" untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan dan SMBCI telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama yang bersifat "revolving" untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 300.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2023, Perusahaan dan SMBCI telah menandatangani Addendum I Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah ketentuan *Credit Limit Determination*.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perusahaan dan SMBCI telah menandatangani Addendum II Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah batas maksimum pembiayaan menjadi sebesar Rp 600.000.000.000 dan perubahan kewajiban.

Pada tanggal 1 November 2023, Perusahaan dan SMBCI telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama terkait dengan perubahan kewajiban.

Pada tanggal 11 Maret 2025, Perusahaan dan SMBCI telah menandatangani Addendum IV Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama terkait dengan perubahan syarat pembiayaan.

• **PT Bank KB Indonesia Tbk**

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Bank KB Indonesia Tbk telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek Pemanfaatan Ruang KBFMF:No.07/KBFMFLGL/X/2022; KB BUKOPIN: No PKS.300/DSTC/X/2022 dimana telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 24 Oktober 2024. Di dalam perjanjian ADD.04/KBFMFLGL/X/2024 dan ADD.638/DSTC/X/2024, disepakati proyek pemanfaatan ruang di cabang PT Bank KB Indonesia Tbk untuk dapat digunakan sebagai aktifitas penjualan atas produk-produk Perusahaan dan aktifitas bisnis lainnya selain persetujuan kredit antara lain termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan angsuran dari konsumen. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

• **PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

On 13 December 2018, the Company and PT Bank SMBC Indonesia Tbk (known as "SMBCI") have signed a "revolving" Joint Financing cooperation agreement for durable goods, two wheelers and four wheelers vehicles or more, with the maximum financing limit amounted to Rp 500,000,000,000. The maturity date of this credit service agreement will be 36 (thirty six) months from the signing of the agreement.

On 28 October 2022, the Company and SMBCI have signed a "revolving" Joint Financing cooperation agreement for durable goods, two wheeler and four wheeler vehicles or more, with the maximum financing limit amounted to Rp 300,000,000,000. The maturity date of this credit service agreement will be 36 (thirty six) months from the signing of the agreement.

On 9 March 2023, the Company and SMBCI have signed Addendum I Joint Financing Cooperation Agreement to change the Credit Limit Determination.

On 11 August 2023, the Company and SMBCI have signed Addendum II Joint Financing Cooperation Agreement to increase the maximum financing limit amounted to Rp 600,000,000,000 and change the covenants.

On 1 November 2023, the Company and SMBCI have signed Addendum III Joint Financing Cooperation Agreement to change the covenants.

On 11 March 2025, the Company and SMBCI have signed Addendum IV Joint Financing Cooperation Agreement to change the financing terms.

• **PT Bank KB Indonesia Tbk**

On 21 October 2022, the Company and PT Bank KB Indonesia Tbk have signed a Co-Location Project Agreement KBFMF:No.07/KBFMFLGL/X/2022; KB BUKOPIN: No PKS.300/DSTC/X/2022, lastly amended on 24 October 2024. In the agreements ADD.04/KBFMFLGL/X/2024 and ADD.638/DSTC/X/2024, stated Co-location Project at the PT Bank KB Indonesia Tbk 's branch offices purposed for marketing activities for the Company' products and any other business activities other than credit approval such as included but not limited to receiving/ collecting installment payments from the customers. The term of the Agreement is valid from 21 October 2024 until 21 October 2025.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

• **PT Sinar Digital Terdepan**

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan dan PT Sinar Digital Terdepan mengadakan kerjasama dalam hal penerimaan pembayaran tagihan konsumen. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan berlaku selanjutnya kecuali salah satu pihak mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya.

• **PT Sarana Yukti Bandhana**

Perusahaan dan PT Sarana Yukti Bandhana (SYB) telah menjalin kerjasama sejak 2007 tentang Implementasi Sistem *Host to Host* Dalam Pengelolaan Data Tagihan Secara *Online* dimana telah mengalami beberapa perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal 7 Oktober 2024. Di dalam perjanjian No:KBFMF/ADD/ASR/2024/10/10/056, disepakati bahwa SYB akan berperan sebagai *Collecting Agent Aggregator* sehingga pembayaran tagihan nasabah Perusahaan dapat dilakukan oleh Mitra SYB dan/atau dilokasi *payment point* yang dikelola oleh Mitra SYB. Pada perubahan perjanjian terakhir, Perusahaan dan SYB sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai Pengertian, Lingkup Kerjasama, Biaya dan Pembayaran dan daftar mitra dari Perjanjian. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya.

• **PT Inovasi Daya Solusi**

Pada tanggal 3 November 2022, Perusahaan dan PT Inovasi Daya Solusi ("IDS") telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama *Platform Service Setorku* tentang Implementasi Layanan *Payment Point* dan Layanan Setorku dimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 4 Desember 2024. Di dalam perjanjian No.KB FMF: KBFMF/ADD/ASR/2024/12/065, disepakati bahwa IDS akan berperan sebagai *Collecting Agent Aggregator* sehingga pembayaran tagihan nasabah Perusahaan dapat dilakukan oleh Mitra IDS dan/atau dilokasi *payment point* yang dikelola oleh Mitra IDS. Pada perubahan perjanjian terakhir, Perusahaan dan IDS sepakat mengubah ketentuan layanan *Payment Point* dalam daftar produk/layanan & biaya transaksi. Mitra IDS untuk *payment point* adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan PT Sumber Indah Lestari (DanDan). Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

• **PT Sinar Digital Terdepan**

On 12 July 2019, the Company and PT Sinar Digital Terdepan entered into a collaboration in consumer bill payment services. The agreement is valid for a period of 1 year and apply hereinafter unless one of the parties end up with a written notice 60 days in advance.

• **PT Sarana Yukti Bandhana**

The Company and PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB") have established cooperation since 2007 for Host to Host system implementation in managing online billing data, the latest amendment on 7 October 2024. In the agreement stated that, SYB will be act as *Collecting Agent Aggregator* thus the Company customer billing payment can be done by SYB partner and/or in payment point which manage by SYB. In the latest amendment No:KBFMF/ADD/ASR/2024/10/10/056, In the latest amendment to the agreement, the Company and SYB agreed to amend the provisions regarding the Definition, Scope of Cooperation, Costs and Payments, and list of partners in the Agreement. The agreement is valid for a period of 1 (one) year and can be extended for a next period of 2 (two) years.

• **PT Inovasi Daya Solusi**

On 3 November 2022, the Company and PT Inovasi Daya Solusi ("IDS") have signed a *Setorku Service Platform Cooperation Agreement for Implementation of Payment Point Services and Setorku Services*, the latest amendment on 4 December 2024. In the agreement No.KB FMF: KBFMF/ADD/ASR/2024/12/065 stated that, IDS will be act as *Collecting Agent Aggregator* thus the Company customer billing payment can be done by IDS partner and/or in payment point which manage by IDS. In the latest amendment, the Company and IDS agreed to change the terms of *Payment Point* services in the list of products/services & transaction fees. IDS partner for payment point are PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan PT Sumber Indah Lestari (DanDan). The agreement is valid for a period of 2 (two) years and can be extended for a next period of 1 (one) year.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

• PT Mitra Sentral Terpadu

Pada tanggal 8 November 2021, Perusahaan dan PT Mitra Sentral Terpadu ("MST") telah menandatangani Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di *Collecting Agent* No. 03/PAYP/KBFMF-MST/XI/2021 tentang Implementasi layanan transaksi pembayaran produk secara langsung untuk nasabah serta layanan jasa di *Channel Delivery* milik *Collecting Agent* dimana telah mengalami beberapa perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal 12 Desember 2023. Pada perubahan perjanjian terakhir No: 252/PKS/MST-KP/XI/2021, Perusahaan dan MST sepakat mengubah ketentuan Daftar *Biller* dan/atau *Merchant* serta biaya transaksi. Mitra MST sebagai *Collecting Agent* adalah PT Indomarco Prismatama, PT Inti Dunia Sukses, PT Inti Cakrawala Citra, PT Lion Super Indo. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

• PT Ayopop Teknologi Indonesia

Pada tanggal 12 Desember 2023, Perusahaan dan PT Ayopop Teknologi Indonesia ("ATI") telah menandatangani Perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Layanan *Direct Debit* Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di *Collecting Agent* No. ATI : PKS12023 I 121008 dimana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir Perjanjian No: KBFMF/PKS/ASN2023/11/052 pada tanggal 1 April 2024. ATI akan menyediakan layanan *Direct Debit* melalui API kepada pelanggan untuk diimplementasi oleh Pelanggan dan disediakan kepada pengguna akhir dan atas penyediaan layanan *Direct Debit*. Salah satu mitra API sebagai aggregator untuk *Direct Debit* melalui Kreditplus Mobile (KPM) milik Perseroan. Perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis untuk setiap periode 1 (satu) tahun berikutnya secara berturut-turut.

• Bank Kookmin, Cabang Hong Kong

Pada tanggal 6 September 2024, Perusahaan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan (*Bank Guarantee*) senilai Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Perjanjian fasilitas ini sudah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 5 September 2025, Perusahaan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan (*Bank Guarantee*) senilai Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

• PT Mitra Sentral Terpadu

On 8 November 2021, the Company and PT Mitra Sentral Terpadu ("MST") have signed Acceptance of Product Payment Transactions at *Collecting Agent* No. 03/PAYP/KBFMF-MST/XI/2021 for Implementation of direct product payment transaction services for customers as well as services in the *Delivery Channel* owned by *Collecting Agent*, the latest amendment on 12 December 2023. In the last amendment to the agreement No: 252/PKS/MST-KP/XI/2021, the Company and MST agreed to change the provisions of the *Biller List* and/or *Merchants* and transaction fees. MST's partners as *Collecting Agent* are PT Indomarco Prismatama, PT Inti Dunia Sukses, PT Inti Cakrawala Citra, PT Lion Super Indo. The agreement is valid for a period of 2 (two) years and can be extended for a next period of 1 (one) year.

• PT Ayopop Teknologi Indonesia

On 12 December 2023, the Company and PT Ayopop Teknologi Indonesia ("ATI") have signed a cooperation agreement for the Implementation of *Direct Debit Services* for Receiving Product Payment Transactions at *Collecting Agent* No. ATI : PKS12023 I 121008, the latest amendment to the agreement No: KBFMF/PKS/ASN2023/11/052 on 1 April 2024. ATI will provide *Direct Debit* services through API to customers to be implemented by Customers and provided to end users and for the provision of *Direct Debit* services. One of the API partners as an aggregator for *Direct Debit* through the Company's *Kreditplus Mobile (KPM)*. This agreement is automatically renewed for each subsequent consecutive 1 (one) year period.

• Kookmin Bank, Hong Kong Branch

On 6 September 2024, the Company and Kookmin Bank, Hong Kong Branch have signed a *Bank Guarantee Facility Agreement* amounting to Rp 800,000,000,000 (eight hundred billion Rupiah) to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement. This facility agreement has ended and has not been extended.

On 5 September 2025, the Company and Kookmin Bank, Hong Kong Branch have signed a *Bank Guarantee Facility Agreement* amounting to Rp 800,000,000,000 (eight hundred billion Rupiah) to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

• **KB Kookmin Card Corp**

Pada tanggal 28 Juli 2020, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp telah menandatangani Perjanjian Jaminan untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 25 Februari 2021, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Pertama Perjanjian Jaminan, dimana KB Kookmin Card Corp akan menjamin pemberi pinjaman bahwa Perusahaan akan melakukan kewajiban saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 405.000.000.000 dan jangka waktu jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2026.

Pada tanggal 27 Juli 2021, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Kedua Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 370.461.000.000 untuk jangka waktu yang sama.

Pada tanggal 10 Maret 2022, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 367.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2027.

Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Keempat Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 366.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2028.

Pada tanggal 15 April 2025, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Kelima Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 439.500.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2030.

Pada tanggal 31 Oktober 2025, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Keenam Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 409.500.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2030.

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

• **KB Kookmin Card Corp**

On 28 July 2020, the Company and KB Kookmin Card Co., Ltd. have signed a Guaranty Agreement to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement.

On 25 February 2021, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a First Amendment to the Guaranty Agreement, in which KB Kookmin Card Corp will guarantee the lender that the Company will carry out its obligations at maturity in accordance with the loan agreement. The maximum amount of obligations that guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 405,000,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2026.

On 27 July 2021, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Second Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 370,461,000,000 with the same guarantee period.

On 10 March 2022, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Third Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 367,400,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2027.

On 7 June 2023, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Fourth Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 366,400,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2028.

On 15 April 2025, the Company and KB Kookmin Card Corp signed a Fifth Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp are amounted to KRW 439,500,000,000 and the maximum guaranteed term is 5 (five) years or until the end of 2030.

On 31 October 2025, the Company and KB Kookmin Card Corp signed a Sixth Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp are amounted to KRW 409,500,000,000 and the maximum guaranteed term is 5 (five) years or until the end of 2030.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

- **Kookmin Bank**

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan dan Kookmin Bank di Korea telah menandatangani Perjanjian Lisensi sehubungan dengan pemberian hak non-eksklusif untuk menggunakan merek jasa ("Royalti Merek") dimana atas penggunaan hak tersebut akan dikenakan Royalti Merek Tahunan. Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan Kookmin Bank di Korea menandatangani Addendum Perjanjian Lisensi dimana berdasarkan Addendum Perjanjian Lisensi tersebut pembayaran Royalti Merek dibebaskan sampai Kookmin Bank memberitahukan hasil pengkajian ulang secara tertulis untuk melakukan pembayaran Royalti Merek Tahunan.

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

- **Kookmin Bank**

On 28 December 2020, the Company and Kookmin Bank in Korea signed a License Agreement granting a non-exclusive right to use the service mark ("Brand Royalty"), for which an Annual Brand Royalty fee will be charged. On the same date, the Company and Kookmin Bank in Korea signed an Addendum to the License Agreement, under which the payment of the Brand Royalty is waived until Kookmin Bank provides written notification of the review results requiring the payment of the Annual Brand Royalty.

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan melalui operasinya sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Secara umum seperti semua bisnis lainnya, Perusahaan menghadapi risiko yang timbul dari penggunaan instrumen keuangan. Catatan ini menggambarkan tujuan Perusahaan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko tersebut dan metode yang digunakan untuk mengukur risiko. Informasi kuantitatif lebih lanjut sehubungan dengan risiko disajikan pada seluruh laporan keuangan.

Tidak ada perubahan substantif dalam eksposur Perusahaan terhadap risiko instrumen keuangan, tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko tersebut atau metode yang digunakan untuk mengukur risiko dari periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain dalam catatan ini.

Instrumen-instrumen keuangan utama

Instrumen keuangan pokok yang digunakan oleh Perusahaan, dimana munculnya risiko atas instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Kas dan setara kas
- Piutang pembiayaan
- Tagihan anjak piutang
- Piutang lain-lain
- Aset lain-lain
- Pinjaman yang diterima
- Pinjaman subordinasi
- Surat berharga yang diterbitkan
- Beban yang masih harus dibayar
- Utang lain-lain
- Liabilitas sewa

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT

The Company is exposed through its operations to the following financial risks:

- Credit risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Operational risk

In common with all other businesses, the Company is exposed to risks that arise from their financial instruments. This note describes the Company's objectives, policies and processes for managing those risks and the methods used to measure risks. Further quantitative information in respect of these risks is presented throughout these financial statements.

There have been no substantive changes in the Company's exposure to financial instrument risks, its objectives, policies and processes for managing those risks or the methods used to measure risks from previous periods unless otherwise stated in this note.

Principal financial instruments

The principal financial instruments used by the Company, from which financial instrument risk arises are as follows:

- Cash and cash equivalents
- Financing receivables
- Factoring receivables
- Other receivables
- Other assets
- Fund borrowings
- Pinjaman subordinasi
- Securities issued
- Accrued expenses
- Other payables
- Lease liabilities

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. **FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT**
(Continued)

Ikhtisar dari instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan menurut kategorinya sebagai berikut:

A summary of the financial instruments held by category is provided below:

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>		
	2025	2024
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	103.856.131.069	293.797.009.303
Piutang pembiayaan	3.635.019.726.067	6.799.026.680.508
Tagihan anjak piutang	132.776.446.582	373.016.400.651
Piutang lain-lain	44.715.287.900	3.425.286.830
Aset lain-lain	18.060.905.811	26.668.124.480
Jumlah	3.934.428.497.429	7.495.933.501.772
		Total

Ikhtisar dari instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan menurut kategorinya sebagai berikut:
(Lanjutan)

A summary of the financial instruments held by category is provided below: (Continued)

Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i>		
	2025	2024
Aset keuangan		
Piutang lain-lain	77.382.870.032	97.515.401.075
		Financial assets Other receivables
Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui FVTOCI/ <i>Financial assets measured at fair value through FVTOCI</i>		
	2025	2024
Aset keuangan		
Investasi jangka panjang	41.580.000.000	29.160.000.000
		Financial assets Long term investment
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liability at amortized cost</i>		
	2025	2024
Liabilitas keuangan		
Pinjaman yang diterima	3.549.779.145.941	5.622.538.546.685
Surat berharga yang diterbitkan	567.054.568.151	1.202.054.919.241
Pinjaman subordinasi	244.415.956.549	-
Beban yang masih harus dibayar	114.013.593.030	107.132.412.946
Utang lain-lain	40.289.160.687	63.158.898.525
Liabilitas sewa	9.481.210.787	15.064.671.488
Jumlah	4.525.033.635.145	7.009.949.448.885
		Total

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum

Perkembangan industri pembiayaan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada dasarnya sudah dilakukan sejak Perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan 4 (empat) tipe risiko utama:

1. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.
2. Risiko pasar meliputi risiko-risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan perubahan nilai suku bunga, nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan.
3. Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya yang jatuh tempo.
4. Risiko operasional yaitu risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak, kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari-hari.

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan penerapan manajemen risiko yang berjalan secara efektif, maka manajemen risiko akan menjadi partner strategis bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Perusahaan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, batasan-batasan transaksi, kewenangan-kewenangan dan ketentuan-ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT
(Continued)**

General objectives, policies and processes

The development in multi finance industry along with the improvement in complexity of financing activity emphasize more and more on the importance of good corporate governance and reliable risk management. Such both matters are important factors that become attention by the investor in valuation of option of its investment target. Basically the implementation of risk management in the Company has been done since the establishment of the Company, even though the Company still use conventional and developing ways in accordance with the development of internal and external circumstances.

The Company realizes that risk is a non-separable part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with 4 (four) particular risks:

1. Credit risk is the risk which will be arisen when the customer could not fulfill its liabilities in accordance with the agreement as agreed upon customer and the Company.
2. Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates, exchange rates which could incur the decreased in revenue, or increased in cost of capital of the Company.
3. Liquidity risk is the risk due to the Company's ability of financial resources in order to discharge its matured liabilities.
4. Operational risk is the risk which has potential operational loss and errors due to human factors by intentionally or unintentionally, failure of information technology and operational process, as well as disfunctions of internal control system in daily operational of the Company.

Risk management in the Company include overall of scope of business activity in the Company, based on the requirement of equilibrium between business operational function and its risk management. With the effectiveness of risk management implementation, thus the risk management will be strategic partner for business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of implementation of effective risk management, the Company keeps increasing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, therefore they can provide information regarding early potential risk and take appropriate actions to minimize the risk. The framework of risk management is presented under the form of policies, procedures, transactional limits, authorities, and other stipulation as well as various risk management instruments that is valid in all business activity. In order to ensure that the policy and procedure have been in line with the development of current business, the evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:
 - Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
 - Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
 - Melakukan fungsi pengawasan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga telah menetapkan kebijakan yang mengatur terkait tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), limit penyaluran pembiayaan serta batasan atas persetujuan atau otorisasi untuk transaksi kredit maupun transaksi operasional lainnya.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Perusahaan memiliki sejumlah perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen untuk menjamin ketersediaan data risiko terkini dan komprehensif. Perusahaan telah melakukan implementasi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)

General objectives, policies and processes (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. *Active supervision by Board of Commissioners and Directors, which includes:*
 - *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
 - *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits provision and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
 - *Carrying out supervisory functions through the Risk Management Committee (RMC) and Risk Oversight Committee (ROC).*

2. *Adequacy of risk management policies and procedures and risk limit setting*

The Company develops policies related to risk management, which are checked periodically and adopted constantly to fit the most recent business situation. Those policies were translated into Standard Operating Procedures, General Provisions and Decision of Board of Directors, which are being socialized to all employees. The company has also established policies to regulate the risk limit to be taken (risk appetite), risk tolerance, financing distribution limits and limits on approval or authorization for credit transactions and other operational transactions.

3. *Adequacy of risk identification, measurement, control and monitoring processes, and risk management information systems*

The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to guarantee the availability of update and comprehensive risk data. The Company has done the implementation of the current Company's operating system becoming centralized system, which is known as CONFINS.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggung jawab dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan kegiatan-kegiatan proses pengendalian di dalam Perusahaan, termasuk rekomendasi perbaikan-perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan
- Melakukan koordinasi dengan fungsi pengendalian dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum, sistem dan prosedur-prosedur, dan audit eksternal).

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Divisi Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses-proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparty* Perusahaan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit Perusahaan terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang pembiayaan dan aset lain-lain.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan mengingat perusahaan beroperasi dalam bidang pembiayaan. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Dengan demikian, perusahaan memiliki eksposur terhadap potensi kegagalan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan dan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas aset dan kerugian finansial bagi perusahaan.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT
(Continued)**

General objectives, policies and processes (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

4. Comprehensive internal control system

The Company has the Internal Audit Division, which reports on process and results of assessment independently to Boards of Commissioners and Directors. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Providing appraisal on the adequacy and effectiveness of all existing business process within the Company;
- Conducting examination on compliances into the Company's risk policies;
- Reporting on important issues related to the activities control process within the Company, including potential improvements to these processes; and
- Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor).

Basically risk management processes are carried out by each unit considering the risk faced are individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in related unit. The primary task of Risk Management Division is determining policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to Boards of Commissioners and Directors. The Determination of risk management policies is carried out through the approval process of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Company's counterparty fail to fulfill their contractual obligations to the Company. Credit risk is primarily attributable to its cash and cash equivalents, financing receivables and other assets.

Credit risk represents one of the primary risks faced by the Company, as it operates in the financing industry. In the course of its business activities, the Company provides financing facilities to customers, thereby exposing it to the possibility of default by borrowers in fulfilling their payment obligations in accordance with the agreed terms and financing contracts. Such circumstances may lead to a deterioration in asset quality and result in potential financial losses to the Company.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko kredit (Lanjutan)

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebagai berikut:

- Perusahaan menerapkan serangkaian *tools* dan mekanisme pengendalian yang terintegrasi dalam proses *Know Your Customer* (KYC), antara lain penggunaan *Loan Origination System* yang dilengkapi dengan *credit decision matrix* dan *credit scoring* untuk memastikan keputusan pembiayaan berbasis data dan parameter risiko yang terukur.
- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, merek dan jenis barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai “early warning system” atas suatu produk pembiayaan maupun kantor cabang.
- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

Perusahaan juga menerapkan pedoman Uji Tuntas Nasabah yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Risiko kredit juga timbul dari kas dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya.

Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Pengungkapan kuantitatif atas paparan risiko kredit sehubungan dengan aset keuangan adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i> Rp 000	Eksposur maksimum/ <i>Maximum exposure</i> Rp 000	Nilai tercatat/ <i>Carrying Value</i> Rp 000	Eksposur maksimum/ <i>Maximum exposure</i> Rp 000
Kas dan setara kas (kecuali kas)	100.545.579	100.545.579	283.027.871	283.027.871
Piutang pembiayaan	3.635.019.726	3.635.019.726	6.799.026.681	6.799.026.681
Tagihan anjak piutang	132.776.446	132.776.446	373.016.401	373.016.401
Piutang lain-lain	122.098.158	122.098.158	100.940.688	100.940.688
Aset lain-lain	18.060.906	18.060.906	26.668.124	26.668.124
Jumlah	4.008.500.815	4.008.500.815	7.582.679.765	7.582.679.765

Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Financing receivables
Factoring receivables
Other receivables
Other assets

Total

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)

Credit risk (Continued)

Risk management has been adopted by the Company against credit risk are as follows:

- The Company implements a series of tools and control mechanisms integrated within its *Know Your Customer* (KYC) process, including the use of a *Loan Origination System* equipped with a *credit decision matrix* and *credit scoring* to ensure that financing decisions are data-driven and based on measurable risk parameters.
- Portfolio diversification by region, economic sector and industry, brand and type of goods.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by among others, judged by the level of advances paid by consumers, age of the financed vehicle, type of insurance coverage chosen and so forth.
- The Key Performance Indicators (KPI) as an “early warning system” of an individual loan products as well as branch offices.
- Handling of problematic contracts that are both disciplined and proactive.
- Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for the branches of the quality of its portfolio is not on target.

The Company also implements the Customer Due Diligence as regulated in the Financial Service Authority Regulation No. 8 Year 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing Programs and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

Credit risk also arises from cash and cash equivalents and deposits with banks and financial institutions. To mitigate the credit risk, the Company places its cash and cash equivalents with reputable financial institutions.

The Company does not enter into derivatives to manage credit risk, although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

Quantitative disclosures of the credit risk exposure in relation to financial assets are set out below:

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko kredit (Lanjutan)

Credit risk (Continued)

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi atas piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table sets out the total credit risk and risk concentration of financing receivables and factoring receivables of the Company as of 31 December 2025 and 2024:

	2025	2024	
Berdasarkan objek yang dibiayai:			Based on object financed:
Mobil	1.577.139.374.771	4.189.297.318.456	Cars
Sepeda motor	1.216.293.766.276	1.769.965.899.123	Motorcycles
Barang <i>durable</i>	853.615.388.660	1.166.748.802.660	Durable goods
Tagihan anjak piutang	134.103.574.037	423.885.353.985	Factoring
Lain - lain	177.410.191.940	1.622.068.131	Others
Jumlah	3.958.562.295.684	7.551.519.442.355	Total

	2025	2024	
Berdasarkan wilayah geografis:			Based on geographic area:
Jabodetabek	1.324.008.030.411	2.628.027.012.295	Jabodetabek
Sulawesi dan Indonesia Timur	920.957.372.345	1.445.474.202.954	Sulawesi and East Indonesia
Sumatera	492.996.430.389	975.400.745.120	Sumatera
Jawa Barat	465.024.977.051	960.940.521.934	West Java
Jawa Timur	298.225.825.053	675.681.122.213	East Java
Kalimantan	353.584.936.896	578.987.287.505	Kalimantan
Jawa Tengah	103.764.723.539	287.008.550.334	Central Java
Jumlah	3.958.562.295.684	7.551.519.442.355	Total

Bank

Cash in bank

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah uang yang signifikan dalam bentuk bank ditempatkan di institusi-institusi sebagai berikut:

As of 31 December 2025, a significant amount of cash in banks are held with the following institutes:

	2025	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42.181.548.186	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	18.924.669.905	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.100.293.011	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.703.876.687	PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Risiko pasar

Market risk

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel-variabel pasar seperti perubahan tingkat bunga dan nilai tukar mata uang. Pendapatan Perusahaan berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari aset dengan bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bunga, sehingga mempengaruhi kinerja Perusahaan. Selain itu, pendapatan Perusahaan dapat berasal dari selisih kurs mata uang dalam jual beli valuta asing. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Market risk is the risk of loss due to changes in market variables such as changes in interest rates and currency exchange rates. Company Revenue derived from the difference between interest earned from assets with interest paid to third parties. Changes in interest rates may cause the decrease in interest income, thus affecting the performance of the Company. In addition, the Company's revenue may come from foreign exchange trading currency in foreign exchange. Changes in exchange rates may cause a decrease in the Company's revenue, which in turn could affect the Company's performance.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko pasar (Lanjutan)

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
2. Mengutamakan pendanaan dalam mata uang fungsional dan suku bunga tetap.

Risiko mata uang muncul karena Perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional. Ini adalah kebijakan Perusahaan, jika memungkinkan, untuk menyelesaikan liabilitas dalam mata uang fungsional dengan kas yang dihasilkan dari operasi sendiri dalam mata uang tersebut. Ketika Perusahaan mempunyai liabilitas dalam mata uang selain mata uang fungsional (dan tidak memiliki cadangan mata uang yang cukup untuk menyelesaikannya), kas dalam mata uang tersebut akan, jika memungkinkan, ditransfer dari pihak-pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dinyatakan menurut mata uang di bawah ini:

		2025		2024		
		Mata uang asing/ Foreign currency	Setara IDR/ Equivalent IDR	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara IDR/ Equivalent IDR	
Aset keuangan						Financial assets
Bank	USD	40	666.078	41	667.167	Cash in banks
Jumlah aset keuangan			666.078		667.167	Total financial assets
Aset bersih dalam mata uang asing			666.078		667.167	Net assets denominated in foreign currencies

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian atau potensi kerugian yang merupakan akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pembayaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi miss-match.
2. Menjaga agar posisi kas di bank milik Perusahaan agar selalu dalam posisi siap digunakan untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama Minimal 60 hari sesuai SKD 704 tentang Manajemen Risiko Likuiditas dan Rencana Pendanaan Darurat.
3. Memonitor posisi kas bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
4. Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT
(Continued)

Market risk (Continued)

Risk management has been adopted by the Company are as follows:

1. To review the interest rate financing that is associated with interest rate loans.
2. Prioritizing funding in functional currency and fixed interest rates

Currency risk arises because the Company enters into transactions denominated in a currency other than its functional currency. It is the Company policy, where possible, to settle liabilities denominated in its functional currency with the cash generated from its own operations in that currency. Where the Company have liabilities denominated in a currency other than its functional currency (and have insufficient reserves of that currency to settle them), cash already denominated in that currency will, where possible, be transferred from elsewhere within the related parties.

As of 31 December 2025 and 2024, the Company's financial assets and financial liabilities were denominated in the following currencies:

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of loss or potential loss that is due to the gap between receipts and payments. The occurrence of relatively wide gap will reduce the ability of the Company to meet its obligations when due.

Risk management applied by the Company are as follows:

1. Getting a loan with a repayment schedule of principal and interest in accordance with original maturities of receivables, so there is no miss-match.
2. Keeping the cash position of the Company's bank is always in a liquid position in support of financing activities for at least 60 days, in accordance with Circular Letter No. 704 concerning Liquidity Risk Management and Contingency Funding Plan.
3. Monitor the cash position of the Company bank periodically, whether yearly, monthly, weekly or daily, to ensure there is always sufficient cash surplus.
4. Keeping the number of receivables due in a particular period is greater than the debt that matured in the same period.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT
(Continued)

Risiko likuiditas (Lanjutan)

Liquidity risk (Continued)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo kontraktual (digambarkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table summarizes the contractual maturity gap profile (representing undiscounted contractual cash flows) of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2025 and 2024 :

2025					
	Antara 1 dan 12 bulan/ Between 1 and 12 months Rp 000	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years Rp 000	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years Rp 000	Jumlah/Total Rp 000	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	103.856.131	-	-	103.856.131	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	2.777.935.203	645.934.057	211.150.466	3.635.019.726	Financing receivables
Tagihan anjak piutang	116.602.518	16.173.928	-	132.776.446	Factoring receivables
Piutang lain-lain	122.098.158	-	-	122.098.158	Other receivables
Investasi jangka panjang	-	-	41.580.000	41.580.000	Long term investment
Aset lain-lain	2.679.620	2.779.294	12.601.992	18.060.906	Other assets
	<u>3.123.171.630</u>	<u>664.887.279</u>	<u>265.332.458</u>	<u>4.053.391.367</u>	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	1.963.256.196	1.016.188.582	570.334.368	3.549.779.146	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	(725.152)	(725.152)	245.866.261	244.415.957	Subordinated loan
Utang lain-lain	37.072.660	2.428.086	788.415	40.289.161	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	114.013.593	-	-	114.013.593	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	499.232.740	67.821.829	-	567.054.569	Securities issued
Liabilitas sewa	8.671.239	799.657	10.316	9.481.212	Lease liabilities
	<u>2.621.521.276</u>	<u>1.086.513.002</u>	<u>816.999.360</u>	<u>4.525.033.638</u>	
Perbedaan jatuh tempo	<u>501.650.354</u>	<u>(421.625.723)</u>	<u>(551.666.902)</u>	<u>(471.642.271)</u>	Maturity gap
2024					
	Antara 1 dan 12 bulan/ Between 1 and 12 months Rp 000	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years Rp 000	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years Rp 000	Jumlah/Total Rp 000	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	293.797.009	-	-	293.797.009	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	4.399.208.619	1.532.769.562	867.048.500	6.799.026.681	Financing receivables
Tagihan anjak piutang	373.016.401	-	-	373.016.401	Factoring receivables
Piutang lain-lain	100.940.688	-	-	100.940.688	Other receivables
Investasi jangka panjang	-	-	29.160.000	29.160.000	Long term investment
Aset lain-lain	2.264.241	2.693.001	21.710.883	26.668.125	Other assets
	<u>5.169.226.958</u>	<u>1.535.462.563</u>	<u>917.919.383</u>	<u>7.622.608.904</u>	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	3.166.157.911	1.516.961.347	939.419.289	5.622.538.547	Fund borrowings
Utang lain-lain	59.879.248	1.757.363	1.522.288	63.158.899	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	91.812.746	15.319.667	-	107.132.413	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	635.000.351	499.232.740	67.821.829	1.202.054.920	Securities issued
Liabilitas sewa	12.225.722	2.223.995	614.954	15.064.671	Lease liabilities
	<u>3.965.075.978</u>	<u>2.035.495.112</u>	<u>1.009.378.360</u>	<u>7.009.949.450</u>	
Perbedaan jatuh tempo	<u>1.204.150.980</u>	<u>(500.032.549)</u>	<u>(91.458.977)</u>	<u>612.659.454</u>	Maturity gap

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INSTRUMEN KEUANGAN - MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko likuiditas (Lanjutan)

Mayoritas pinjaman yang diterima Perusahaan dengan jatuh tempo antara 1 sampai 12 bulan dan 1 sampai 2 tahun dapat diperpanjang atau di *rollover* secara otomatis tanpa perlu adanya pelunasan.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan karena faktor manusia, kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses, maupun kejadian eksternal. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada Perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Perusahaan.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- 2) Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
- 3) Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- 4) Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.
- 5) Adanya penanaman nilai-nilai dasar risiko Perusahaan kepada seluruh karyawan, sehingga dapat menghindarkan/mengurangi potensi risiko dan *fraud*.
- 6) Adanya penilaian kinerja yang adil dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.
- 7) Menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas aktivitas operasional secara berkala melalui *Operational Risk Management Framework*.

36. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024, No.47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp 250.000.000.000;
- Perusahaan wajib memenuhi ketentuan rasio utang terhadap ekuitas (*gearing ratio*) paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

**35. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT
(Continued)**

Liquidity risk (Continued)

Majority of the Company's fund borrowings with maturity between 1 and 12 months and 1 and 2 years can be automatic roll over without clean up period.

Operational risk

Operational risk is the risk of loss due to system failure of information technology, errors due to human factors, operational procedures and weaknesses in a process, as well as external events. These risks may cause harm to the Company that will affect performance and soundness of the Company.

Risk management applied by the Company are as follows:

- 1) Implement a centralized system so that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.
- 2) Prepare backup and Disaster Recovery Plan is adequate when things happen that are not desirable for its major application systems, both in terms of hardware and software.
- 3) Implement a compliance audit system that is sustainable, both in branch offices or headquarters.
- 4) Implement a clear working rules (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred in accordance with an error rate that done.
- 5) The planting of the Company's risk values to all employees, to avoid/reduce the potential risks and fraud.
- 6) There is a fair assessment of performance and transparency as well as the opportunity for career development.
- 7) Implement the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks for operational activities periodically through the Operational Risk Management Framework.

36. CAPITAL MANAGEMENT

The Company's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders.

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Financial Service Authority Regulation 46 Tahun 2024 tanggal 30 December 2024, No.47/POJK.05/2020 dated 17 November 2020 and the Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Financing Companies which regulate provisions as follows:

- The Company's paid-up capital of minimum Rp 250,000,000,000;
- The Company is required to comply with the debt-to-equity ratio (*gearing ratio*) of a minimum of 0 (zero) times and a maximum of 10 (ten) times.

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

36. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Keterangan	POJK 46 Tahun 2024 POJK No. 47/POJK.05/2020 & POJK No. 35/POJK.05/2018	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure		Description
		2025	2024	
Modal disetor (dalam milliar rupiah)	Minimal Rp 250 miliar/ Minimum Rp 250 billion	426	226	Paid - up capital (in billion rupiah)
Rasio utang terhadap ekuitas (<i>gearing ratio</i>)	Maksimum 10x/ Maximum 10x	(16,86)	7,07	Debt to equity ratio (<i>gearing ratio</i>)
Pemenuhan ketentuan modal disetor minimum di atas, mulai berlaku untuk pendirian Perusahaan saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 46 Tahun 2024 dan 47/POJK.05/2020 diundangkan.				
The fulfillment of the minimum paid-up capital requirements above, comes into effect for the establishment of the Company when the Financial Services Authority Regulation Number POJK 46 Tahun 2024 and 47/POJK.05/2020 is promulgated.				

**37. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA**

**37. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

POJK 46 Tahun 2024

POJK 46 Tahun 2024

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 31 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dan Perusahaan Modal Ventura dimana Peraturan OJK ini telah mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang sebelum diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terutama terkait perhitungan rasio keuangan terkait permodalan, antara lain:

In order to develop and strengthen Financing Companies, on 31 December 2024, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation No. 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies. This regulation has amended, revoked, and/or introduced new provisions that were previously governed under OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 on the Operation of Financing Companies, particularly regarding the calculation of financial ratios related to capital requirements, including the following:

1. Kewajiban memiliki Modal Inti paling sedikit Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dinyatakan mulai berlaku 1(satu) tahun sejak Peraturan OJK diundangkan.
2. Kewajiban memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen) dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK diundangkan.
3. Ketentuan terkait perhitungan Modal bagi Perusahaan Pembiayaan menggunakan modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

1. The requirement to maintain a minimum Core Capital of Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) shall take effect one (1) year after the enactment of this OJK Regulation.
2. The requirement to maintain a Core Capital to Paid-up Capital ratio of at least 50% (fifty percent) shall take effect one (1) year after the enactment of this OJK Regulation.
3. The provision regarding the calculation of capital for Financing Companies, which includes Tier 1 (Core Capital) and Tier 2 (Supplementary Capital), shall take effect one (1) year after the enactment of this OJK Regulation.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN
OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan telah melakukan pengukuran atas rasio keuangan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara lain: (tidak diaudit)

	2025	2024	
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	79,16%	88,29%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	86,39%	105,1%	Financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	40,26 %	48,96%	Financing receivables for investment and working capital to total financing receivables ratio
Rasio permodalan	10,45 %	21,85%	Capital ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	3,74 %	2,80	Non performing financing
Rasio Modal Inti Terhadap Modal Disetor (MIMD)	-111%	439%	Core Capital to Paid-in Capital Ratio
Tingkat kesehatan Perusahaan	Peringkat/Ranking 4	Peringkat/Ranking 2	Company health level status
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki.			
Beberapa rasio yang digunakan Perusahaan untuk mengawasi permodalan antara lain rasio imbal hasil ekuitas dan rasio solvabilitas.			
Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri.			

37. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY
INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (Continued)

Based on Financial Service Authority Regulation (POJK) No.28/POJK.05/2020 concerning to the Financial Soundness Level of Non-Bank Financial Service Institutions, the Company has measured the financial ratios as stipulated in POJK No.35/POJK.05/2018 concerning the Operation of Financing Companies, as amended from time to time, most recently by POJK No. 46 of 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies. As of 31 December 2025 and 2024 the Company has calculated ratios as follows: (unaudited)

	2025	2024	
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	79,16%	88,29%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	86,39%	105,1%	Financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	40,26 %	48,96%	Financing receivables for investment and working capital to total financing receivables ratio
Rasio permodalan	10,45 %	21,85%	Capital ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	3,74 %	2,80	Non performing financing
Rasio Modal Inti Terhadap Modal Disetor (MIMD)	-111%	439%	Core Capital to Paid-in Capital Ratio
Tingkat kesehatan Perusahaan	Peringkat/Ranking 4	Peringkat/Ranking 2	Company health level status
Solvability ratio is used to identify the Company's capability to fulfill the Company's obligation through utilizing its own capital.			
Several ratios used by the Company to monitor capital are return on equity ratio and solvability ratio.			
Return on equity ratio is used to identify the Company's capability to earn profit from the invested equity and is reflected through the comparison between net income to equity.			

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 9 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0039319.AH.01.11.TAHUN 2026 Tanggal 23 Februari 2026 dan disimpan di dalam sistem administrasi berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.09-0096321, Perusahaan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi, sehingga susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2026
Direksi	
Direktur Utama	Peter Halim
Wakil Direktur Utama	Kisup Wi
Direktur	Hery Susanto Dermawan
Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs	Martina Hariyanto
Direktur	-
Direktur	Kyeongho Min

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Changes of the Composition of Board of Commissioners

Based on Notarial Deed No. 37 dated 9 February 2026 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU0039319.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 23 February 2026 and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.09-0096321, the Company has agreed The composition of the Company's Board of Directors, so that the composition of the Company's Board of Directors as follows:

	2025		Directors
Peter Halim	:	Peter Halim	President Director
Kisup Wi	:	Kisup Wi	Vice President Director
Hery Susanto Dermawan	:	Hery Susanto Dermawan	Director
Martina Hariyanto	:	Martina Hariyanto	Director of Human Resources and General Affairs
Choi, Ho Jung	:	Choi, Ho Jung	Director
Kyeongho Min	:	Kyeongho Min	Director

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Keputusan Direksi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 12 Januari 2026, telah diputuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan Bapak Jacob Tanasale sebagai *Chief Collection Officer*;
- Menyetujui pemberhentian Bapak Antonius Padua Wisuda sebagai *Compliance & Corporate Secretary*, yang juga menjabat sebagai *Compliance Officer*
- Menyetujui pemberhentian Bapak Cun Pin sebagai *Head of Finance, Accounting & Funding, Treasury*;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Cun Pin sebagai *Head of Compliance & Corporate Secretary*, yang juga menjabat sebagai *Compliance Officer*;
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Cun Pin sebagai Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan.

Dewan Komite

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 12 Januari 2026, susunan Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Komite Pengelolaan
Aset dan Liabilitas**

Ketua	:	Peter Halim	:
Anggota	:	Kisup Wi	:
Anggota	:	Kyeongho Min	:
Anggota	:	Choi, Ho Jung	:
Anggota	:	Hery Susanto Dermawan	:
Anggota	:	Daniel Adrian	:

• PT Bank KB Indonesia Tbk

Kredit Modal Kerja

Pada tanggal 11 Februari 2026, Perusahaan dan PT Bank KB Indonesia Tbk., telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit fasilitas *Uncommitted Term Loan* untuk perubahan plafond fasilitas menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas selama 12 bulan.

Pada tanggal 11 Februari 2026, Perusahaan dan PT Bank KB Indonesia Tbk., menandatangani Perjanjian Kredit dalam bentuk *Uncommitted Term Loan* untuk mendukung kegiatan modal kerja Perusahaan sebesar Rp 100,000,000,000. Jangka waktu fasilitas adalah 12 (dua belas bulan) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan *Letter of Comfort* dari KB Kookmin Card Corp.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

Boards of Directors Resolution

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 12 January 2026, the following resolutions were resolved:

- Approving the appointment of Mr. Jacob Tanasale as *Chief Collection Officer*;
- Approving dismissal of Mr. Cun Pin as *Head of Finance, Accounting & Funding, Treasury*;
- Approving the appointment of Mr. Cun Pin as *Head of Compliance & Corporate Secretary*, who concurrently serves as *Compliance Officer*;
- Approving the appointment of Mr. Cun Pin as *Head of Compliance & Corporate Secretary*, who concurrently serves as *Compliance Officer*;
- Approving the dismissal of Cun Pin as a member of *Asset and Liability Management Committee* of the Company.

Boards of Committee

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 12 January 2026, the composition of the Company's *Asset and Liability Management Committee* is as follows:

**Asset & Liabilities
Management Committee**

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member

• PT Bank KB Indonesia Tbk

Working Capital Loan

On 11th February 2026, the Company and PT Bank KB Indonesia Tbk. signed an Addendum to the Credit Agreement for the *Uncommitted Term Loan* facility, which includes an adjustment to the facility limit to IDR 100,000,000,000 and extending the facility's period for 12 months.

On 11th February 2026, the Company and PT Bank KB Indonesia Tbk., have signed Credit Agreement of *Uncommitted Term Loan* to support Company's working capital with maximum credit limit to Rp 100,000,000,000. The term of the facility is 12 (twelve) months. This facility is secured by *Letter of Comfort* from KB Kookmin Card Corp.

39. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diotorisasi oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2026.

39. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorized by the Company's Board of Directors for issuance on 26 March 2026.



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Head Office
Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00105/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/III/2026

No. : 00105/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT KB Finansia Multi Finance
J a k a r t a**

**The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT KB Finansia Multi Finance
J a k a r t a**

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT KB Finansia Multi Finance (the "Company") which comprise the statement of financial position as of 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a material accounting policies information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirement that are relevant to our Audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Key Audit Matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam Audit kami diuraikan sebagai berikut:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan dan Tagihan Anjak Piutang

Nilai tercatat neto produk piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah memperhitungkan kerugian ekspektasian. Kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 190.766.123.035 berasal dari Piutang Pembiayaan sebesar Rp 189.438.995.580 pada Catatan 4 dan Tagihan Anjak Piutang sebesar Rp 1.327.127.455 pada Catatan 5.

Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) dihitung berdasarkan tunggakan dan penghapusan historis untuk menentukan tahap kerugian ekspektasian tiap produk yang digunakan untuk penentuan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan umur pinjaman pada tiap produk. Tingkat cadangan ditelaah dan dimuktakhirkan atas estimasi kerugian kredit berdasarkan umur tiap piutang pembiayaan pada setiap tanggal pelaporan. KKE dihitung berdasarkan pendekatan kolektif dengan menggunakan beberapa parameter risiko antara lain *Probability of Default*, *Loss Given Default*, *Exposure at Default* dengan mempertimbangkan informasi faktor makroekonomi.

Kami memfokuskan pada area ini sebagai hal audit utama karena jumlah piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang mewakili 79% dari total aset Perusahaan. Pengukuran KKE dilakukan melalui pertimbangan manajemen dengan penggunaan estimasi dan asumsi yang diharapkan keandalannya dalam penentuan jumlah cadangan penurunan nilai yang diakui pada akhir periode pelaporan.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

- Kami telah menguji keakuratan model perhitungan KKE berdasarkan persyaratan dalam PSAK 109;
- Kami telah menilai penerapan model penurunan nilai yang mempertimbangkan tunggakan dan penghapusan historis dan estimasi umur pinjaman yang diharapkan;
- Kami telah menilai, membandingkan data historis dan menilai pandangan manajemen atas risiko kredit yang berdampak pada pengakuan kerugian ekspektasian setelah pengakuan awal selama umur pinjaman;
- Kami telah menilai analisis sensitivitas dalam kaitannya dengan asumsi faktor masa depan;

Key Audit Matters (Continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined as follows:

Allowance for Impairment Losses of Financing Receivables and Factoring Receivables

The net carrying value of financing and factoring receivables products are subsequently measured at amortised cost after providing for expected losses. Expected credit loss amounted to Rp 190,766,123,035 come from Financing Receivables amounted to Rp 189,438,995,580 in Note 4 and Factoring Receivables amounted to Rp 1,327,127,455 in Note 5.

Expected Credit Loss (ECL) is computed based on historical arrears and write-offs to determine an expected loss cycle by product which is used to determine the estimated life of receivables expected loss levels to provided against each product. Levels of allowances are reviewed and updated for the most recent expected life of receivables loss estimates at each reporting date. ECL is computed using collective approach with risk parameters including the Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default and consideration of macroeconomic factors information.

We focused on this area as a key audit matter due to amounts of financing receivables and factoring receivables represent 79% of total assets of the Company. The measurement of ECL is determined on the management's judgments using estimates and assumptions to derived reliability on provides allowance of impairment losses to be recognised in the end of reporting period.

In responding to the identified key audit matters, we performed the following audit procedures:

- *We have tested the computation accuracy of ECL model applied with requirements in SFAS 109;*
- *We have assessed the application of the model for impairment that considers the past arrears and write-offs and the expected life of loan loss estimates;*
- *We have assessed, compared the historical actual and challenge management's view of credit risk that impacts the recognition of expected losses upon initial recognition over the life of the loans;*
- *We have assessed sensitivity analysis in relation to the key forward looking assumptions;*

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama Audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (Continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Santanu Chandra, CPA
NIAP AP.0119/
License No. AP.0119

26 Maret 2026/ 26 March 2026

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

2025

Laporan Tahunan
Annual Report

PT KB Finansia Multi Finance

Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp. 1500605
Fax. 021-2933 3648
Email. cs@kreditplus.com

